



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (R K P D)
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024

2024

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (R K P D)
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2023



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2005–2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud adalah :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Pedoman Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan lainnya pada periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan Peraturan Daerah.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - Bab I : Pendahuluan;
 - Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - Bab V : Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota;
 - Bab VI : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - Bab VIII : Penutup.
- (3) Naskah RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2024 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 dan RKP Tahun 2024 serta Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Pasal 4

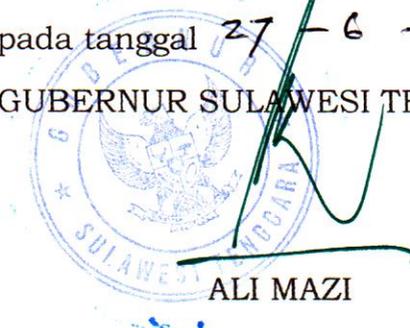
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 27 - 6 - 2023

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ALI MAZI

Diundangkan di Kendari

pada tanggal 27 - 6 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 14



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-6
1.4. Maksud dan Tujuan	I-8
1.4.1. Maksud.....	I-8
1.4.2. Tujuan	I-8
1.5. Sistematika Dokumen RKPD	I-9
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	II-1
2.1. Kondisi Umum Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II-1
2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	II-9
2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana	II-19
2.1.1.4. Demografi	II-21
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-25
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-25
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-36
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya, Olahraga dan Kepemudaan....	II-41
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-42
2.1.3.1. Fokus Urusan Layanan Wajib Dasar	II-43
2.1.3.2. Fokus Urusan Layanan Wajib Non Dasar	II-74
2.1.3.3. Fokus Urusan Layanan Pilihan.....	II-95
2.1.3.4. Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan.....	II-118
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-125



2.1.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-125
2.1.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II-127
2.1.4.3.	Luas Wilayah Produktif	II-127
2.1.4.4.	Fokus Iklim Berinvestasi.....	II-128
2.1.4.5.	Fokus Sumber Daya Manusia	II-129
2.2.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-129
2.3.	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-270
2.3.1.	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-270
2.3.2.	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	II-270
2.3.3.	Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	II-274
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH		III-1
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1.	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024	III-2
3.1.2.	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 ...	III-7
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-9
3.2.1.	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-10
3.2.2.	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-13
3.2.3.	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-16
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		IV-1
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-1
4.2.	Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2024	IV-4
BAB V ARAHAN KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN DAN KOTA		V-1
5.1.	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024	V-1
5.2.	Pengembangan Wilayah	V-6
5.3.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten dan Kota Tahun 2024.....	V-8

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VII-1
7.1. Indikator Makro	VII-1
7.2. Indikator Kinerja Utama Daerah	VII-2
7.3. Indikator Kinerja Kunci Daerah.....	VII-3
BAB VIII PENUTUP	VIII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pembagian Wilayah Adminsitratif dan Luas Wilayah Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten/ Kota, 2022	II-3
Tabel 2.2.	Banyaknya Desa Menurut Posisi Terhadap Laut Tahun 2022.....	II-4
Tabel 2.3.	Banyaknya Desa Menurut Topografi Wilayah Tahun 2022.....	II-5
Tabel 2.4.	Tipe Iklim Berdasarkan Klasifikasi Schmidt dan Ferguson di Provinsi Sulawesi Tenggara	II-7
Tabel 2.5.	Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan di Sulawesi Tenggara (hari) Tahun 2022.....	II-8
Tabel 2.6.	Pusat-Pusat Kegiatan di Sulawesi Tenggara.....	II-10
Tabel 2.7.	Capaian dan Target Kinerja Sektor Pertanian di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2024	II-12
Tabel 2.8.	Capaian dan Target Kinerja Produksi Sektor Tanaman Perkebunan dan Hortikultura di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2024	II-13
Tabel 2.9.	Capaian dan Target Produksi Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024	II-15
Tabel 2.10.	Hasil Produksi Pertambangan Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2019	II-18
Tabel 2.11.	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan SP 2020 dan Tahun 2022.....	II-22
Tabel 2.12	Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan SP 2020 dan Tahun 2022	II-23
Tabel 2.13.	Distribusi Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan SP 2020 dan Tahun 2022	II-23
Tabel 2.14	Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan SP 2020 dan Tahun 2022	II-24
Tabel 2.15.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022	II-25
Tabel 2.16.	Persentase Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2020 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 – 2022	II-26
Tabel. 2.17.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022	II-27
Tabel 2.18.	PDRB per Kapita Provinsi Sulawesi Tenggara (Juta Rupiah) Tahun 2017 s.d. 2022	II-29
Tabel 2.19.	Laju Inflasi Bulanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2022 ..	II-29
Tabel 2.20.	Distribusi Pengeluaran Penduduk di Indonesia Maret-September 2020, Maret-September 2021 dan Maret-September 2022	II-32

Tabel 2.21.	Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022.....	II-32
Tabel 2.22.	Persebaran Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022.....	II-33
Tabel 2.23.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara 2018-2022	II-35
Tabel 2.24.	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2022.....	II-36
Tabel 2.25.	Capaian dan Target Kinerja Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang Melek Huruf di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024.	II-37
Tabel 2.27.	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2018-2021.....	II-38
Tabel 2.28.	Usia Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022.....	II-39
Tabel 2.29	Pencapaian Indikator Kesejahteraan Bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2022.....	II-40
Tabel 2.30.	Penduduk Usia 15 tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022.....	II-41
Tabel 2.31.	Capaian dan Target Kinerja Perkembangan Olahraga dan Kepemudaan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024.....	II-42
Tabel 2.32.	Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022.....	II-43
Tabel 2.33.	Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2022.....	II-43
Tabel 2.34.	Capaian dan Target Kinerja Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024.....	II-44
Tabel 2.35.	Capaian dan Target Kinerja Perkembangan Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/MA/SMK Tahun 2018-2024.....	II-44
Tabel 2.36.	Capaian dan Target Kinerja Angka Kelulusan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024.....	II-44
Tabel 2.37.	Capaian dan Target Kinerja Angka Melanjutkan (AM) Sekolah Dasar hingga Menengah Atas di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 – 2024.....	II-45
Tabel 2.38.	Fasilitas Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024	II-45
Tabel 2.39.	Sarana dan Prasarana Pendidikan Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022.....	II-45
Tabel 2.40.	Data Sertifikasi Guru SMA, SMK dan SLB Prov. Sultra Tahun 2022.	II-46
Tabel 2.41.	Capaian dan Target Kinerja SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024.....	II-47
Tabel 2.42.	Capaian Kinerja Perkembangan Fasilitas Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2022.....	II-48
Tabel 2.43.	Cakupan Penyediaan Tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022.....	II-50

Tabel 2.44.	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 – 2022.....	II-50
Tabel 2.45.	Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2022.....	II-52
Tabel 2.46.	Capaian dan Target Kinerja Penanganan Tuberculosis (TB) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024	II-54
Tabel 2.47.	Capaian Program Imunisasi di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023.....	II-54
Tabel 2.48.	Capaian Kunjungan Neonatal Lengkap di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024	II-55
Tabel 2.49.	Capaian Kinerja dan Target Kunjungan Ibu Hamil di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024.....	II-56
Tabel 2.50.	Capaian Kinerja dan Target Persalinan Tenaga Kesehatan Berkompeten di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024.....	II-56
Tabel 2.51.	Capaian dan Target Kinerja SPM Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024.....	II-61
Tabel 2.52.	Data Jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2021.....	II-63
Tabel 2.53.	Pembangunan Infrastruktur di bidang pengairan (Irigasi, Pemenuhan Air baku, Penanggulangan Bahaya Banjir dan Abrasi Pantai)	II-64
Tabel 2.54.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Cipta Karya Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2021	II-65
Tabel 2.55.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara (Penetapan RTRW).....	II-65
Tabel 2.56.	Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024.....	II-67
Tabel 2.57	Capaian Kinerja SPM Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024	II-69
Tabel 2.58.	Jumlah PPNS Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 – 2021	II-69
Tabel 2.59.	Tempat Ibadah di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022.....	II-70
Tabel 2.60.	Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024	II-71
Tabel 2.61.	Capaian dan Target Kinerja SPM Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2024	II-72
Tabel 2.62.	Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2024	II-74
Tabel 2.63	Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2024.....	II-75
Tabel 2.64	Neraca Ketersediaan dan Kebutuhan Beberapa Komoditas Pangan Penting Tahun 2021 – 2022	II-80
Tabel 2.65	Capaian dan Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2024.....	II-80

Tabel 2.66.	Perbandingan Kualitas Konsumsi Penduduk Sulawesi Tenggara dengan Stadar WNPG Tahun 2018.....	II-80
Tabel 2.67.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2021	II-82
Tabel 2.68.	Capaian dan Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2024	II-82
Tabel 2.69	Status Mutu Air pada Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara	II-84
Tabel 2.70	Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2024.....	II-85
Tabel 2.71	Jumlah Pasangan Usia Subur, Peserta KB Aktif, dan Peserta KB Baru di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022.....	II-86
Tabel 2.72	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2020	II-86
Tabel 2.73	Arus Lalu Lintas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 – 2021	II-87
Tabel 2.74.	Perkembangan Koperasi Aktif Kabupaten/Kota Tahun 2018 – 2021 .	II-88
Tabel 2.75	Indikator Capaian Koperasi di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2020	II-89
Tabel 2.76.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018– 2024	II-89
Tabel 2.77.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2021	II-91
Tabel 2.78	Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2021	II-91
Tabel 2.79	Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2024.....	II-92
Tabel 2.80.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Bidang Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2024	II-94
Tabel 2.81	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Urusan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024.....	II-94
Tabel 2.82	Kondisi Pengelolaan Sektor Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024	II-96
Tabel 2.83.	Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024	II-98
Tabel 2.84.	Luas Lahan sawah berdasarkan jenis Pengairan dan Frekuensi Penanaman Padi (Ha) Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2021.....	II-100
Tabel 2.85.	Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024	II-101
Tabel 2.86	Luas Lahan yang di tanami padi dan tidak ditanami padi serta frekuensi penanamannya di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 – 2021	II-102
Tabel 2.87.	Luas Lahan Pertanian Tanaman Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021.....	II-102

Tabel 2.88.	Kontribusi Sektor Perkebunan & Hortikultural terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2021	II-103
Tabel 2.89.	Capaian dan Target Kinerja Sektor Perkebunan dan Hortikultural Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024	II-104
Tabel 2.90.	Target dan Realisasi Luas Fasilitasi Izin Perhutanan Sosial 2018-2022.....	II-106
Tabel 2.91.	Realisasi Luas Fasilitasi Izin Perhutanan Sosial 2018-2022 (menurut Jenis Izin	II-106
Tabel 2.92	Luas dan Persentase Kerusakan Kawasan Hutan 2018-2022.....	II-107
Tabel 2.93.	Persentase Luas lahan kritis yang di Rehabilitasi Tahun 2018-2022. II-108	II-108
Tabel 2.94.	Realisasi Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi 2018- 2022.....	II-108
Tabel.2.95	Rasio Luas Kawasan Lindung Tahun 2018-2022.....	II-109
Tabel 2.96	Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 -2024	II-110
Tabel 2.97.	Penerimaan Daerah Sektor Pertambangan Tahun 2017 – 2020	II-110
Tabel 2.98.	Keadaan Komoditas Pertambangan Nikel dan Aspal di Sulawesi Tenggara Tahun 2013 – 2020	II-111
Tabel 2.99	Pertambangan Tanpa Izin di Sulawesi Tenggara Tahun 2017 – 2021 II-111	II-111
Tabel 2.100.	Perkembangan Kelistrikan di Sulawesi Tenggara Tahun 2016 – 2021	II-111
Tabel 2.101.	Jumlah Pelanggan, Tenaga Listrik yang terjual, dan Nilai Penjualan Tenaga Listrik Menurut Kategori Pelanggan Tahun 2020 – 2021	II-112
Tabel 2.102	Bauran Energi Sulawesi Tenggara Tahun 2015.....	II-112
Tabel 2.103	Perkembangan Sektor Industri Kecil di Sulawesi Tenggara Tahun 2017 – 2021	II-113
Tabel 2.104	Ekspor Berdasarkan Volume dan Nilai Tahun 2018 – 2021	II-114
Tabel 2.105	Volume dan Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2013-2021 II-116	II-116
Tabel 2.106	Volume dan Nilai Ekspor Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2021 II-117	II-117
Tabel 2.107.	Volume dan Nilai Perdagangan Antar Pulau Menurut hasil Bumi dan Laut di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 – 2021...	II-117
Tabel 2.108	Keadaan Penerimaan Transmigrasi Umum menurut Jenis Transmigrasi Tahun 2017 – 2021.....	II-118
Tabel 2.109.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan Provinsi Sulawesi Tenggara.....	II-119
Tabel 2.110.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara.....	II-120
Tabel 2.111.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 – 2020	II-121

Tabel 2.112.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian Provinsi Sulawesi Tenggara 2015 – 2019.....	II-121
Tabel 2.113.	Capaian dan Target Kinerja Urusan Penunjan Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian Provinsi Sulawesi Tenggara 2018 – 2024.....	II-121
Tabel 2.114.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pengawasan Provinsi Sulawesi Tenggara.....	II-123
Tabel 2.115.	Kondisi Makro Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 – 2022.....	II-125
Tabel 2.116.	Pengeluaran Rata-rata per Kapita sebulan (rupiah) menurut Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2018 – 2022.....	II-126
Tabel 2.117.	Kondisi Infrastruktur Jalan, Perumahan, Irigasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2018-2019.....	II-127
Tabel 2.118.	Luas Lahan Bukan Pertanian dan Lahan Pertanian Bukan Sawah Menurut Penggunaan di Sulawesi Tenggara, Tahun 2018 - 2021 (Hektar).....	II-128
Tabel 2.119.	Jumlah Tindak Pidana Umum Menurut Jenis Kriminalitas Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021–2022.....	II-121
Tabel 2.120.	Realisasi Pajak dan Macam Pajak Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 – 2021.....	II-129
Tabel 2.121.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022.....	II-130
Tabel 2.122.	Realisasi Perda RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota.....	II-275
Tabel 3.1.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Tenggara.....	III-3
Tabel 3.2.	Tingkat Inflasi Gabungan 2 Kota di Sulawesi Tenggara (Kendari dan Baubau) Tahun 2021-2023.....	III-5
Tabel 3.3.	Nilai Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Sulawesi Tenggara Januari 2021-Maret 2023.....	III-6
Tabel 3.4.	Realisasi Indikator Makro Tahun 2021-2022 dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Tahun 2023-2024 Provinsi Sulawesi Tenggara.....	III-9
Tabel 3.5.	Realisasi Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 - 2022	III-10
Tabel 3.6.	Target dan Proyeksi Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 dan 2024.....	III-11
Tabel 3.7.	Realisasi Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 dan 2022	III-13
Tabel 3.8.	Target dan Proyeksi Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 dan 2024.....	III-14
Tabel 3.9.	Realisasi Pembiayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 - 2024	III-16
Tabel 3.10.	Target dan Proyeksi Pembiayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 dan 2024.....	III-16
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024- 2024 dan menjadi Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024.....	IV-2

Tabel 5.1.	Prioritas, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024.....	V-3
Tabel 5.2.	Data Capaian Kinerja Indikator Makro Kabupaten dan Kota.....	V-6
Tabel 5.3.	Data Rata-Rata Kinerja Indikator Makro Kabupaten/Kota pada Wilayah Daratan dan Kepulauan Tahun 2022.....	V-8
Tabel 6.1.	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tenggara.....	VI-1
Tabel 7.1	Indikator Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024.....	VII-1
Tabel 7.2.	Target Indikator Makro Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2024	VII-2
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Tenggara	VII-2
Tabel 7.4	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	VII-3



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lain	I-7
Gambar 2.1.	Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, 2022.....	II-2
Gambar 2.2.	Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kelompok Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, 2022	II-2
Gambar 2.3.	Kondisi Topografi Sulawesi Tenggara	II-4
Gambar 2.4.	Peta Struktur Ruang RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara	II-11
Gambar 2.5.	Peta Kawasan Strategis RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara.....	II-11
Gambar 2.6.	Peta Rawan Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara.....	II-21
Gambar 2.7.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022	II-27
Gambar 2.8.	PDRB per Kapita Sulawesi Tenggara (Juta Rupiah), Tahun 2017-2021	II-28
Gambar 2.9.	Grafik Perkembangan Gini Ratio Sulawesi Tenggara Periode September 2019 – September 2022.....	II-31
Gambar 2.10.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara dan Nasional, Tahun 2019-2022.....	II-35
Gambar 2.11.	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2017-2021	II-38
Gambar 2.12.	Peta Daerah Irigasi Provinsi Sulawesi Tenggara	II-64
Gambar 2.13.	Peta Kerentanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 (Food Security and Vulnerability Atlas) Prioritas Komposit	II-79
Gambar 2.14.	Peningkatan Akses Kepada Masyarakat dalam pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial Tahun 2018-2022.....	II-106
Gambar 3.1.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara y on y Triwulan I-2020 -Triwulan I-2023.....	III-2
Gambar 3.2.	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Tenggara Februari 2020-Februari 2023.....	III-5
Gambar 5.1.	Peta Gambaran Ketimpangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Sesuai Indikator Makro Pada Tahun 2022.....	V-8
Gambar 5.2.	Konsep Arah Pengembangan Wilayah Sulawesi Tenggara.....	V-10



Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah menurut Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Daerah melaksanakan pembangunan dengan tujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, sehingga untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah tersebut maka diperlukan sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dalam satu wadah pembangunan nasional. Agar pembangunan nasional dapat diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional, maka pembangunan nasional harus direncanakan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa perencanaan pembangunan pusat dan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan menjadi suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam praktek sehari-hari, perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang dengan periodisasi selama 20 (Dua puluh) tahun, meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah dengan periodisasi selama 5 (Lima) tahun, meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan tahunan yang disusun setiap tahun,

meliputi: Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Konteks penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penyusunan RKPD Tahun 2024 memiliki perbedaan dengan penyusunan RKPD tahun-tahun sebelumnya karena RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026, sedangkan RKPD tahun-tahun sebelumnya merupakan penjabaran dari RPJMD. Hal ini disebabkan karena RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023 telah berakhir pada tahun 2023 dan dilanjutkan dengan RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 sebagai dokumen transisi sebagai pedoman Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah secara serentak Tahun 2024 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Pada tahun 2022 telah terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Hal ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Berdasarkan regulasi tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam menyusun RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 berpedoman pada RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026, yaitu penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah dan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yaitu penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya.

RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 disusun melalui tahapan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Tahapan tersebut dilakukan dengan pendekatan perencanaan teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, pendekatan perencanaan partisipatif yaitu proses penyusunan melibatkan pemangku kepentingan (Instansi vertikal dan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perwakilan masyarakat, Pemerintah Kabupaten/Kota, akademisi, media massa/elektronik, dan pemangku kepentingan lainnya), sedangkan pendekatan perencanaan politis dilakukan dengan cara penghimpunan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD, serta pendekatan perencanaan *top-down* (atas-bawah) dan *bottom-up* (bawah-atas) dilakukan dengan cara penyelarasan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat. Substansi dokumen disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, menerapkan pendekatan THIS (Tematik-Holistik, Integratif, Spasial), Pendekatan Tematik-Holistik yaitu penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas nasional dan daerah; Pendekatan Integratif, yaitu keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional; dan Pendekatan Spasial, yaitu kegiatan prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan terlebih dahulu menindaklanjuti hasil reviu dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Hasil Fasilitas Rancangan Akhir RKPD dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pasca penetapan dokumen selanjutnya menjadi pedoman dalam perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi, pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota dan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi sebagai dokumen perencanaan anggaran dalam rangka penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
 9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056) ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

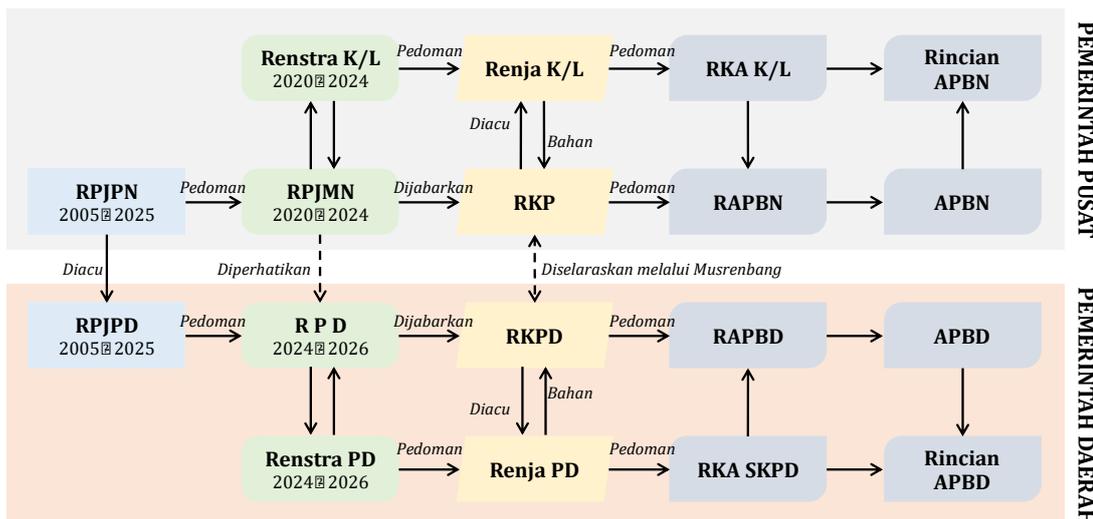
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan tiga kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan RKP Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

- Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);
 32. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 7).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional bahwa RPJPN merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional selama 20 tahun. Untuk menjabarkan RPJPN, maka disusun RPJMN yang meliputi visi, misi, dan program Presiden yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMN disusun untuk perencanaan selama 5 tahun, dan kemudian dijabarkan setiap tahunnya kedalam RKP, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP dimaksud memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Gambar 1.1. menunjukkan keterkaitan dokumen perencanaan baik itu pada level pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional bahwa RPJPN merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional selama 20 tahun. Untuk menjabarkan RPJPN, maka disusun RPJMN yang meliputi visi, misi, dan program Presiden yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMN disusun untuk perencanaan selama 5 tahun, dan kemudian dijabarkan setiap tahunnya kedalam RKP, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP dimaksud memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga,

kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.



Gambar 1.1. Proses penyusunan dan keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lain

Perencanaan pembangunan pada level pemerintahan daerah dikenal pula dengan perencanaan jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan perencanaan tahunan (RKPD). RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program OPD, lintas OPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Pada tahun 2023 periodisasi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 telah berakhir dan telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 sebagai dokumen transisi perencanaan jangka menengah daerah yang berlaku sampai dengan ditetapkannya RPJMD periode berikutnya sesuai masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih terhitung sejak tanggal pelantikan.

RPD disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yakni menginstruksikan Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang menjabat hingga tahun 2023 agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 dan memerintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 – 2026. RPD tahun 2024 – 2026 dan Renstra PD Tahun 2024 – 2026 menjadi dasar Penjabat Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024, 2025 dan 2026, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dokumen RKPD yang disusun setiap tahun tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara disusun oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara untuk digunakan sebagai acuan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Substansi RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan cara menyelaraskan antara program dan kegiatan prioritas nasional yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga dalam Renja K/L dengan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dengan maksud agar sasaran pembangunan nasional dapat tercapai dengan upaya sinergitas tersebut. RKPD merupakan akumulasi dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing, baik dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan wajib maupun dalam menjalankan urusan pemerintahan pilihan serta penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, setiap OPD harus berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan kedalam Renja Perangkat Daerah disusun dengan memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, dengan memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 ini juga harus diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), meliputi RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota. baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi yang menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota. Selain itu juga memperhatikan dokumen lainnya yang relevan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2024.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 adalah:

- a. Menjelaskan secara umum tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024;
- b. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 terdiri dari 8 (delapan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD.
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.
- 1.3 Hubungan antar Dokumen
Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.
- 1.4 Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD sasaran penyusunan dokumen RKPD
- 1.5 Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah
Pada bagian ini memberikan data dan informasi yang menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah dari berbagai aspek.
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
Bagian ini akan memberikan data dan informasi serta telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah.
- 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah yaitu isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Bagian ini akan memberikan informasi hasil telaah kondisi dan analisis data statistik perekonomian daerah tahun lalu dan tahun berjalan serta tantangan dan prospek perekonomian yang mungkin akan dihadapi pada tahun 2023 dan 2024.

- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Bagian ini akan memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2024 yang merupakan bagian dari pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJPD Prov. Sultra 2005-2025.
- 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024
Prioritas pembangunan adalah prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

BAB V ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

- 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024
Bagian ini akan memuat arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024.
- 5.2. Pengembangan Wilayah
Bagian ini akan memuat pengembangan wilayah berdasarkan isu strategis yang terdapat di kabupaten/kota.
- 5.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2024.
Bagian ini akan memuat arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota berdasarkan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bagian ini akan memuat rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2024 beserta kerangka pendanaannya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII PENUTUP

Memuat kesimpulan dan harapan dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024.



Bab II

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Secara astronomis terletak di bagian Selatan Garis Khatulistiwa, memanjang dari Utara ke Selatan di antara $02^{\circ}45'$ – $06^{\circ}15'$ Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara $120^{\circ}45'$ – $124^{\circ}45'$ Bujur Timur. Luas wilayah Sulawesi Tenggara adalah berupa daratan seluas 36.159,71 km² dan luas laut 110.000 km². Panjang garis pantai 1.740 km, jumlah pulau 651 buah, 361 pulau diantaranya telah memiliki nama, 290 pulau belum memiliki nama dan hanya 86 pulau yang berpenghuni.

Berdasarkan posisi geografisnya, batas Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah;
Sebelah Selatan : Provinsi NTT di Laut Flores;
Sebelah Timur : Provinsi Maluku di Laut Banda;
Sebelah Barat : Provinsi Sulawesi Selatan di Teluk Bone.

Wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 15 wilayah kabupaten dan 2 kota, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas daratan terluas yakni Kabupaten Konawe (5.351,85 km²). Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2022 berdasarkan Hasil Proyeksi Interim 2020-2023 (pertengahan tahun/Juni) tercatat sebanyak **2.701.661 jiwa** yang terdiri dari laki-laki **1.366.862 jiwa** dan perempuan **1.334.789 jiwa**. Jumlah penduduk tersebut terpetakan dalam kategori umur 0-75 tahun ke atas.



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 2.1.
Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, 2022



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 2.2.
Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kelompok Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, 2022

Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Adminsitratif dan Luas Wilayah Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten/ Kota, 2022

Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten	Luas Total Area (Km2)
Buton	Pasarwajo	1.669,33
Muna	Raha	1.858,10
Konawe	Unaaha	5.351,85
Kolaka	Kolaka	2.958,92
Konawe Selatan	Andoolo	4.237,74
Bombana	Rumbia	3.293,97
Wakatobi	Wanci	450,46
Kolaka Utara	Lasusua	2.932,25
Buton Utara	Buranga	1.755,83
Konawe Utara	Wanggudu	4.219,81
Kolaka Timur	Tirawuta	3.992,53
Konawe Kepulauan	Langara	705,71
Muna Barat	Laworo	818,70
Buton Tengah	Labungkari	836,96
Buton Selatan	Batauga	517,63
Kota Kendari	Kendari	265,79
Kota Baubau	BauBau	294,14
Sulawesi Tenggara	Kendari	36.159,71

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023

1) Letak dan Kondisi Geografis

a) Posisi Astronomis

Sulawesi Tenggara secara astronomis terletak di bagian Selatan Garis Khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan diantara $02^{\circ}45'$ – $06^{\circ}15'$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}25'$ - $124^{\circ}45'$ Bujur Timur.

b) Posisi Geostrategis

Pulau Sulawesi menjadi bagian penting dari masa depan Indonesia. Posisi geostrategis yang menjadi jalur perdagangan dan distribusi barang antar wilayah barat dan timur Indonesia menjadikan pulau Sulawesi menjadi wilayah yang potensial sebagai pusat ekonomi dan perdagangan dalam dan luar negeri. Sulawesi Tenggara adalah salah satu provinsi yang mencakup jazirah tenggara pulau Sulawesi dan memiliki beberapa pulau disekitarnya serta berbatasan langsung dengan laut banda sehingga wilayah ini kaya akan sumber daya laut dan berpotensi untuk menjadi kawasan wisata bahari.

c) *Kondisi/Kawasan*

Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi daratan Konawe dan Kolaka. Sedangkan kepulauan meliputi Pulau Buton dan Pulau Muna serta pulau-pulau kecil yang tersebar di bagian Selatan dan Tenggara.

Wilayah Sulawesi Tenggara, pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang, dan berbukit, sedangkan permukaan tanah pegunungan yang relatif rendah yakni sekitar 1.868.860 hektar sebagian besar berada pada ketinggian 100-500 meter diatas permukaan laut dengan tingkat kemiringan mencapai 40 derajat, serta terdapat Kawasan pesisir dan laut yang diperkirakan mencapai 110.000 km².

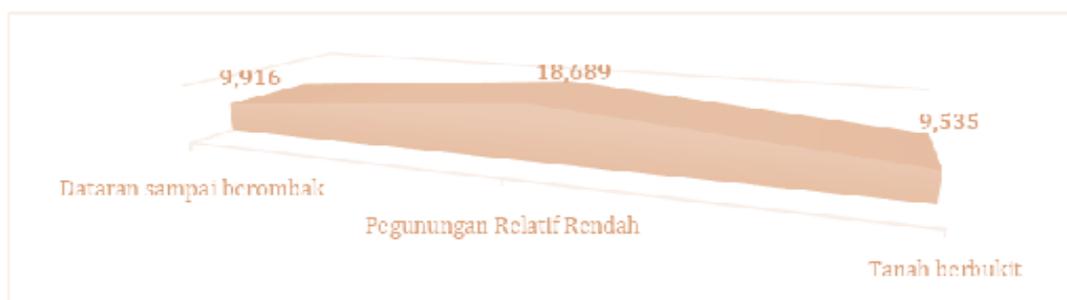
Tabel 2.2. Banyaknya Desa Menurut Posisi Terhadap Laut Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Tepi Laut	Bukan Tepi Laut	Jumlah
Kab. Kolaka	53	82	135
Kab. Konawe	33	338	371
Kab. Muna	78	108	186
Kab. Buton	66	29	95
Kab. Konawe Selatan	92	265	357
Kab. Bombana	73	70	143
Kab. Wakatobi	90	10	100
Kab. Kolaka Utara	47	86	133
Kab. Konawe Utara	61	112	173
Kab. Buton Utara	78	13	91
Kab. Kolaka Timur	-	133	133
Kab. KonaweKepulauan	84	12	96
Kab. Muna Barat	33	53	86
Kab. Buton Tengah	63	14	77
Kab. Buton Selatan	54	16	70
Kota Kendari	30	35	65
Kota Baubau	19	24	43
Jumlah	954	1400	2354

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023

d) *Topografi*

Topografi merupakan gambaran permukaan bumi, yang biasanya berasosiasi dengan ciri-ciri bentuk permukaan seperti variasi relief suatu daerah. Sebagian besar topografi Sulawesi Tenggara terdiri dari tanah berbukit hingga bergunung, yaitu ± 74% sedang selebihnya datar sampai berombak ± 26%, sebagaimana disajikan pada diagram berikut :



Gambar 2.3.
Kondisi Topografi Sulawesi Tenggara

Secara umum topografi Sulawesi Tenggara bergelombang, bergunung dan berbukit. Pada beberapa tempat terdapat dataran aluvial seperti Mowewe, Lainea, Ladongi dan lain-lain. Berdasarkan kelas kemiringan lahan maka kondisi topografi di Sulawesi Tenggara dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Dataran Konaweha-Lahumbuti dengan luas kurang lebih 87.500 ha.
- b. Dataran Rate-rate–Lambandia dengan luas kurang lebih 25.000 ha.
- c. Dataran Waworamo–Punggaluku dengan luas kurang lebih 18.000 ha.
- d. Dataran Tinanggea–Lakara dengan luas kurang lebih 17.000 ha.
- e. Dataran Lalindu–Lasolo dengan luas kurang lebih 17.000 ha.
- f. Dataran Konda dengan luas kurang lebih 14.000 ha.
- g. Dataran Sampara dengan luas kurang lebih 14.000 ha.
- h. Dataran Roraya dengan luas kurang lebih 10.000 ha.
- i. Dataran Kolono dengan luas kurang lebih 4.000 ha.
- j. Dataran Oko-oko – Tawai dengan luas kurang lebih 13.500 ha.
- k. Dataran Kolaka – Pomalaa dengan luas kurang lebih 12.000 ha.
- l. Dataran Watuputih dengan luas kurang lebih 7.000 ha.

Diantara gunung dan bukit-bukit, terbentang dataran-dataran yang merupakan daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Permukaan tanah pegunungan telah banyak digunakan untuk usaha. Tanah ini sebagian besar berada pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan tanah yang mencapai 40°.

Tabel 2.3. Banyaknya Desa Menurut Topografi Wilayah Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Lereng/Puncak	Lembah	Dataran	Jumlah
Kab. Kolaka	20	9	106	135
Kab. Konawe	20	23	328	371
Kab. Muna	4	2	180	186
Kab. Buton	3	6	86	95
Kab. Konawe Selatan	18	-	339	357
Kab. Bombana	14	2	127	143
Kab. Wakatobi	24	1	75	100
Kab. Kolaka Utara	33	2	98	133
Kab. Konawe Utara	20	5	148	173
Kab. Buton Utara	2	-	89	91
Kab. Kolaka Timur	11	35	87	133
Kab. KonaweKepulauan	1	-	95	96
Kab. Muna Barat	-	-	86	86
Kab. Buton Tengah	2	2	73	77
Kab. Buton Selatan	15	1	54	70
Kota Kendari	8	-	57	65
Kota Baubau	-	-	43	43
Jumlah	195	88	2071	2354

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023

2) Geologi

Secara geologis Provinsi Sulawesi Tenggara terbentuk akibat tumbukan (*collition*) dua buah lempeng besar yaitu lempeng benua yang berasal dari Australia dan lempeng samudra yang berasal dari pacific. Akibat tumbukan tersebut maka wilayah Sulawesi Tenggara terdiri dari 3 group utama batuan penyusunnya yaitu :

- Kompleks batuan malihan di Sulawesi Tenggara terdiri dari sekis, kuarsit, sabak dan marmer yang melampar dari kolaka utara hingga ke selatan membentuk pegunungan Tangkelemboke, Mendoke dan Pegunungan Rumbia.
- Kompleks ofiolit dan sedimen pelagic. Kompleks ofiolit Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari lajur ofiolit Sulawesi Timur dimana di atasnya di tutupi oleh sedimen pelagic. Kompleks ofiolit Sulawesi Tenggara didominasi oleh batuan ultramafik dan mafik yang terdiri dari harzburgit, dunit, werlit, lertzolit, websterit, serpentinit, dan piroksinit. Sedangkan untuk batuan mafik terdiri atas gabro, basalt, dolerite, mikrogabro, dan amfibolit. Untuk batuan sedimen pelagic tersusun oleh batugamping laut dalam dan sisipan rijang merah.
- Molasa Sulawesi tersebar luas dan umumnya menempati bagian selatan dari jazirah Sulawesi bagian tenggara. Molasa Sulawesi yang berada di Sulawesi Tenggara terdiri atas sedimen klastik dan sedimen karbonatan. Sedimen klastik dari molasa Sulawesi terdiri atas Formasi Langkowala dan Formasi Boepinang. Sedangkan sedimen karbonat yang berasosiasi dengan batu pasir adalah formasi eomoiko.

Potensi kandungan Nikel di Sulawesi Tenggara telah di kenal sejak jaman Belanda. Data menunjukkan nikel Sulawesi Tenggara telah di eksploitasi sejak tahun 1934 oleh Oost Borneo Maatschappij (OBM) dan Bone Tolo Maatschappi. Cadangan Nikel di Sulawesi Tenggara cukupbesar, jumlah cadangan nikel Sulawesi Tenggara berdasarkan data Dinas ESDM provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 97 milyar tondengan luas sebaran nikelnya 480 ribu Ha. Adapun status kawasan nikel di Sulawesi Tenggara terkait dengan fungsi kawasan hutan Sulawesi Tenggara dapat terbagi kedalam: nikel Sulawesi Tenggara yang berada pada kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Selain nikel potensi besar yang ada di Sulawesi Tenggara adalah Aspal Alamnya yang terkenal di dunia. Potensi aspal alam di sultra yang terletak di pulau buton dengan jumlah cadangan 2.663.648.000 M3 atau setara sekitar 3.835.653.120 ton (DESDM Prov.Sultra, 2011). Jika disetarakan dengan jumlah energi yang dapatdihasilkankesekitar tatanan geologi pulau buton sendiri didapatkan potensi aspal (bitumen padat) di buton setelah dilakukan studi geokimia hidrokarbon pada contoh batu aspal Fm. Sampolakosa dari daerah Lawele dan daerah Sampolawa, bitumen padat/oil shale dari Fm. Winto dari daerah Sampolawa dan minyak rembesan/oilseeps pada Fm. Tondo daerah Kapontori. Ini semua memberikan gambaran potensi hidrokarbon pada daerah sultra sangat prospek.

Potensi kandungan Emas di Sulawesi Tenggara juga cukup besar. Terdapat lima kabupaten yang memiliki potensi kandungan emas, yakni Kolaka Utara, Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, dan Bombana. Dengan total cadangan emas 1,1 juta ton senilai Rp 270 triliun, potensi terbesar berada di Kabupaten Bombana sebesar 540 ribu ton. Potensi lain yang ada di Sulawesi Tenggara adalah marmer seluas 206.237 juta meter kubik, dan batu gamping seluas 188.352 hektare.

3) Hidrologi

Sumberdaya alam DAS menyediakan berbagai kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Sumber kehidupan yang tersedia mulai dari kebutuhan bahan makanan, air bersih, kayu dan berbagai jasa lingkungan yang mempunyai nilai melebihi nilai ekonomi sumberdaya alam tersebut. Gagasan pengelolaan sumberdaya alam DAS sering dianggap gagal terutama disebabkan oleh adanya perubahan kondisi yang sangat cepat, permasalahan yang demikian kompleks serta syarat dengan ketidakpastian mengenai tujuan, kebijakan dan sasaran pengelolaan.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Wanggu merupakan salah satu DAS prioritas di Sulawesi Tenggara karena disamping memiliki fungsi hidrologis sebagai sumber utama sedimen yang menyebabkan pendangkalan Teluk Kendari, juga terdapat berbagai sarana dan prasarana vital seperti Bandar Udara Halu Oleo, Kampus Universitas Halu Oleo, Polda Sulawesi Tenggara dan sebagainya. Secara administrasi DAS Wanggu dibagi atas dua daerah otonom yaitu Kota Kendari (26,38 %) dan Kabupaten Konawe Selatan (73,62%) dengan total luas 33.208 hektar (BPDAS Sampara, 2003). Bagian hilir DAS Wanggu merupakan wilayah Kota Kendari, sedangkan hulunya merupakan Kabupaten Konawe Selatan.

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki beberapa sungai yang melintasi hampir seluruh kabupaten/kota. Sungai-sungai tersebut pada umumnya potensial untuk dijadikan sebagai sumber energi, untuk kebutuhan industri, rumah tangga dan irigasi. Daerah aliran sungai, seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) Konawe, melintasi Kabupaten Kolaka dan Konawe. DAS tersebut seluas 7.150,68 km² dengan debit air rata-rata 200 m³/detik. Bendungan Wawotobi yang menampung aliran sungai tersebut, mampu mengairi persawahan di daerah Konawe seluas 18.000 ha.

Selain itu, masih dapat dijumpai banyak aliran sungai di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan debit air yang besar sehingga berpotensi untuk pembangunan dan pengembangan irigasi seperti : Sungai Lasolo di Kabupaten Konawe, Sungai Roraya di Kabupaten Bombana (Kecamatan Rumbia dan Poleang), Sungai Wandasa dan Sungai Kabangka Balano di Kabupaten Muna, Sungai Laeya di Kabupaten Kolaka dan Sungai Sampolawa di Kabupaten Buton. Di samping sungai-sungai tersebut terdapat pula 2 (dua) rawa yang cukup besar, yaitu Rawa Aopa yang terdapat di Kabupaten Konawe Selatan dan Rawa Tinondo yang terdapat di Kabupaten Kolaka.

4) **Klimatologi**

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson tipe iklim di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dibedakan ke dalam 5 (lima) klasifikasi iklim, yaitu:

Tabel 2.4. Tipe Iklim Berdasarkan Klasifikasi Schmidt dan Ferguson di Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Tipe Iklim	Wilayah
1.	B	Sekitar wilayah Kecamatan Asera (Kab. Konawe Utara)
		Sekitar wilayah Kecamatan Lainea (Kab. Konawe Selatan)
		Sekitar wilayah Kecamatan Pakue dan Lasusua (Kab. Kolaka Utara)
		Sekitar wilayah Kecamatan Kabawo (Kab. Muna)
2.	C	Sekitar wilayah Kecamatan Lambuya, Wawotobi dan Sampara (Kab. Konawe)
		Sekitar Kecamatan Lainea, Tinanggea dan Konda (Kab. Konawe Selatan)
		Sekitar wilayah Kecamatan Wolo, Kolaka, Wundulako (Kab. Kolaka) dan Mowewe (Kab. Kolaka Timur)
		Sekitar Kecamatan Pasar Wajo (Kab. Buton)
		Kecamatan Rarowatu, Kabaena Timur dan Rumbia (Kab. Bombana)
		Sekitar Kecamatan Wolio (Kota Baubau)
		Sekitar Kecamatan Kulisusu (Kab. Buton Utara)
3.	D	Sekitar wilayah Kecamatan Pondidaha, Abuki (Kab. Konawe)
		Sekitar wilayah Kecamatan Moramo, Tinanggea, Landonno, Angata (Kab. Konawe Selatan)
		Sekitar wilayah Kecamatan Watubangga, Tirawuta dan Ladongi (Kab. Kolaka Timur)

No.	Tipe Iklim	Wilayah
		Sekitar wilayah Kecamatan Batauga, Sampolawa, Kapontori, Lasalimu, Gu (Kab. Buton)
		Sekitar wilayah Kecamatan, Kabaena dan Poleang Timur (Kab. Bombana)
		Sekitar wilayah Kecamatan Bungji (Kota Baubau)
		Sekitar Kota Kendari
		Sekitar Kecamatan Tikep dan Lawa (Kab. Muna Barat)
4.	E	Sekitar Wilayah Kecamatan Mawasangka (Kab. Buton Tengah)
		Sekitar Wilayah Kecamatan Kaledupa (Kab. Wakatobi)
5.	G	Sekitar Kecamatan Tomia (Kab. Wakatobi)

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023

Sulawesi Tenggara memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Berdasarkan catatan di 4 stasiun Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) curah hujan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut:

Tabel 2.5. Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan di Sulawesi Tenggara (hari) Tahun 2022

Bulan	Stasiun Meteorologi Maritim Kendari	Stasiun Meteorologi Betoambari Baubau	Stasiun Klimatologi Konawe Selatan	Stasiun Meteorologi Sangia Ni Bandera Kolaka
Januari	15	17	18	15
Februari	21	20	16	18
Maret	19	21	22	22
April	14	13	15	19
Mei	19	15	22	18
Juni	21	23	20	24
Juli	17	8	22	24
Agustus	16	11	20	17
September	11	8	17	18
Oktober	17	20	19	22
November	18	26	16	23
Desember	15	22	15	23

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023

b. Kawasan Hutan

Berdasarkan SK.81155/MENLHK PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 dan data BPS tahun 2022 disebutkan bahwa luas kawasan hutan dan konservasi perairan Sulawesi Tenggara adalah 3.742.909 Ha, terdiri atas : Kawasan Hutan Nasional (108.415 Ha), Kawasan Hutan Marga Satwa (162.656 Ha), Kawasan Hutan Suaka Alam (7.905 Ha), Kawasan Hutan Cagar Alam (1.457 Ha), Kawasan Hutan Taman Raya (7.849 Ha), Hutan Lindung (1.080.819 Ha), Hutan Produksi Tidak Tetap (408.995 Ha), Hutan Produksi Tetap (448.011 Ha), Taman Nasional Laut (1.315.552 Ha), dan Taman Bawah Laut (105.079 Ha)

Keberadaan kawasan hutan yang harus tetap dipertahankan dalam rangka meningkatkan potensinya di Sulawesi Tenggara, mengingat kawasan hutan dihadapkan pada tantangan dan permasalahan diantaranya : kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi dan budidaya pertanian non kehutanan, izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dan HTI, serta permasalahan kebakaran hutan dan lahan.

c. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya sesuai Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Pada tahun 2017 kawasan budidaya pada penggunaannya terbagi atas lahan sawah irigasi seluas 100.121,8 Ha, lahan sawah non irigasi 28,564,1 Ha, sedangkan lahan bukan pertanian terdiri atas penggunaannya yaitu tanah perkebunan seluas 683.504,0 Ha, tanah tegalan/kebun seluas 231.171,2 Ha, tanah ladang/huma seluas 141.731.5 Ha, tanah padang rumput 105.885,4 Ha, Sementara tidak diusahakan seluas 222,909,0 Ha dan Lainnya seluas 1.442.357,5 Ha dan untuk luas lahan budidaya air tawar seluas 20.885 Ha.

d. Kawasan Lindung

Untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup maka telah ditetapkan beberapa kawasan konservasi di Sulawesi Tenggara sebagai berikut :

Kawasan Suaka Alam yang meliputi :

- Cagar Alam Napabalano
- Cagar Alam Lamedai
- Cagar Alam Kakinauwe
- Suaka Margasatwa Tanjung Amolengo
- Suaka Margasatwa Buton Utara
- Suaka Margasatwa Tanjung Peropa
- Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo
- Suaka Margasatwa Lambusango.

Kawasan Pelestarian Alam yang meliputi :

- Taman Hutan Raya Gunung Nipa-nipa
- Taman Hutan Nasional Rawa Aopa Watumohai
- Taman Nasional Laut Wakatobi
- Taman Wisata Alam Mangolo
- Taman Wisata Alam Tirta Rimba Moramo
- Taman Wisata Alam Laut P. Padamarang dan sekitarnya
- Taman Wisata Alam Teluk Lasolo
- Taman Buru Mata Osu

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi unggulan untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya, seperti : perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Kawasan strategis provinsi merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :

a. Pusat Kegiatan Industri Pertambangan yang terdiri atas :

- 1) PKIP Asera-Wiwirano-Langgikima (AWILA) di Kabupaten Konawe Utara dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe bagian selatan;
- 2) PKIP Kapontori-Lasalimu (KAPOLIMU) di Lasalimu Kabupaten Buton dengan wilayah pelayanan mencakup Pulau Buton dan Pulau Muna;
- 3) PKIP Kabaena-Torobulu-Wawonii (KARONI) di Lora Kabupaten Bombana

- dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 4) PKIP Pomalaa di Kabupaten Kolaka dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Kolaka Utara bagian selatan; dan
 - 5) PKIP Laiwoi di Kabupaten Kolaka Utara dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Konawe bagian utara.
- b. Kawasan strategis Teluk Kendari di Kota Kendari;
 - c. Kawasan industri perkebunan Kakao di Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
 - d. Kawasan strategis kelautan dan perikanan di Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - e. Kawasan industri pariwisata di Kabupaten Wakatobi;
 - f. Kawasan strategis pertanian tanaman pangan di Wawotobi Kabupaten Konawe;
 - g. Kawasan industri semen di Pulau Muna;
 - h. Kawasan pusat perdagangan di Kota Baubau; dan
 - i. Kawasan pabrik gula di Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna dan Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan.

Selain membagi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi Kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi, Rencana Tata Ruang Wilayah juga membagi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi pusat-pusat kegiatan industri, adapun pusat-pusat kegiatan industri yang direncanakan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6. Pusat-Pusat Kegiatan di Sulawesi Tenggara

No.	Pusat-Pusat Kegiatan	Lokasi
1.	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Kendari (I/B/1)
2.	Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp)	Baubau (I/B/1)
3.	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Unaaha (II/B/1)
		Lasolo (II/B/1)
		Raha (II/B/1)
		Kolaka (II/B/1)
4.	Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp)	Pasarwajo (II/B/1)
		Wangi-Wangi (II/B/1)
5.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Pomalaa
		Langara
		Usuku
		Kasipute
		Sikeli
		Lasusua
		Andoolo
		Wanggudu
		Perkotaan Buranga dan sekitarnya
		Tirawuta
		Laworo

Sumber : RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034

Keterangan:

I - IV : Tahapan pengembangan

A : Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi

B : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional

B/1 Pengembangan/peningkatan fungsi

B/2 Pengembangan baru

- B/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi
- C : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan provinsi
- C/1 Pengembangan/peningkatan fungsi
- C/2 Pengembangan baru
- C/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi



Sumber : RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034

Gambar 2.4.
Peta Struktur Ruang RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara



Sumber : RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034

Gambar 2.5.
Peta Kawasan Strategis RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara

Potensi Pengembangan wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara dibagi dalam beberapa sektor unggulan, yaitu :

a. Sektor Pertanian dan Perkebunan

Sektor Pertanian terdiri dari Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan. Untuk Sektor Pertanian Tanaman Pangan yang diusahakan di Sulawesi Tenggara terdiri dari (1) Padi Sawah, (2) Padi Ladang, (3) Jagung, (4) Kacang Kedelai, (5) Kacang Tanah, (6) Kacang Hijau, (7) Ubi Kayu, dan (8) Ubi jalar.

Sedangkan untuk Sektor Peternakan yang diusahakan di Sulawesi Tenggara terdiri dari: (1) Populasi hewan ternak yaitu Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kambing, Babi, Kuda, Ayam Burasm Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging, Itik, Itik Manila, Puyuh, (2) Populasi hewan petelur yaitu Ayam Buras, Ayam Ras Petelur, Itik, Itik Manila dan Puyuh.

Adapun produksi Sektor Pertanian di Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7. Capaian dan Target Kinerja Sektor Pertanian di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)							
	Padi	709.516	519.707	532.773	530.029	488.389	740.042	499.133
	Jagung	221.498	279.170	179.906	150.561	181.295	196.715	185.283
	Kedelai	9.853	1.540	629	574	9.681	6.876	9.894
	Kacang Tanah	2.054	3.221	3.046	3.104	2.332	2.996	2.383
	Kacang Hijau	510	449	804	296	307	650	314
	Ubi Kayu	210.387	144.752	167.769	137.657	149.336	216.582	152.621
	Ubi Jalar	20.291	17.682	17.707	15.469	15.269	22.396	15.605
2.	Jumlah Populasi Ternak (Ekor)							
	Sapi Potong	298.692	330.594	361.568	391.479	421.454	341.712	371.099
	Sapi Perah	47	37	51	46	60	42	55
	Kerbau	1.472	2.162	2.349	2.544	2.668	2.310	2.502
	Kambing	177.845	183.725	195.128	204.357	213.719	187.828	196.468
	Babi	89.600	90.524	98.108	108.606	117.216	92.843	102.313
	Kuda	721	712	644	667	724	760	787
	Ayam Buras	9.934.224	10.861.007	11.088.813	11.572.793	12.168.591	10.719.077	11.190.716
	Ayam Ras Petelur	437.634	463.163	455.719	473.916	505.923	456.022	473.807
	Ayam Ras Pedaging	4.504.344	4.453.326	4.477.630	5.122.986	5.444.745	4.588.885	5.249.684
	Itik	509.262	543.904	577.699	609.651	631.190	53.767	56.724
	Itik Manila	49.323	43.578	42.942	45.353	47.071	45.213	48.441
	Puyuh	10.368	6.319	9.266	3.724	4.090	8.618	9.419
3.	Jumlah Produksi Daging dan Telur (Kg)							
	Produksi Daging							

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Sapi	6.474.830	4.437.749	3.720.990	4.521.025	4.525.615	5.769.413	7.009.837
	Kerbau	38.862	35.832	17.183	32.303	32.768	30.566	39.124
	Kambing	356.488	312.734	324.283	205.081	200.882	356.676	420.878
	Babi	801.125	895.349	624.514	556.432	585.216	783.461	879.043
	Kuda	8.100	15.600	9.684	16.800	17.250	9.368	9.954
	Ayam Buras	10.709.094	11.708.166	11.953.741	12.475.471	13.117.741	11.365.197	11.860.720
	Ayam Ras Petelur	320.611	339.314	333.873	352.453	376.254	337.923	357.185
	Ayam Ras Pedaging	4.085.215	4.038.944	5.092.956	5.826.722	6.192.976	4.222.067	4.830.045
	Itik	319.307	341.026	362.216	381.182	395.756	323.186	369.402
	Itik Manila	32.553	28.760	28.342	29.912	31.067	31.967	35.931
	Puyuh	2.281	1.391	2.039	819	900	218	233
Produksi Telur								
	Ayam Buras	6.446.318	7.047.707	7.195.531	10.277.404	10.806.512	6.841.258	7.716.939
	Ayam Ras Petelur	3.295.388	3.487.618	5.724.897	6.135.121	6.549.471	3.473.342	3.722.728
	Itik	3.266.403	3.488.601	6.705.361	4.885.177	5.057.771	3.445.985	3.955.991
	Itik Manila	270.781	239.243	235.752	248.988	258.431	265.911	280.616
	Puyuh	18.007	10.975	16.094	6.468	7.104	17.207	18.842

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa Tahun 2022, produksi Sektor Pertanian Tanaman Pangan secara berurutan didominasi oleh produksi padi sawah sebesar 488.389 ton, produksi jagung mencapai 181.295 ton dan produksi ubi kayu 149.336 ton. Untuk populasi ternak, Tahun 2022 secara berurutan produksi didominasi oleh ternak ayam buras mencapai 12.168.591 kg, ternak ayam ras pedaging 5.444.745 kg dan ternak itik 631.190 kg. Selanjutnya untuk produksi telur secara berurutan didominasi oleh ternak ayam buras 10.277.404 kg, ternak ras ayam petelur 6.135.121 kg dan ternak itik 5.057.771 kg.

Selanjutnya Sektor Perkebunan dan Hortikultura yang diusahakan di Sulawesi Tenggara terdiri dari tanaman kakao, jambu mete, kelapa dalam, cengkeh, lada, kopi, pala, bawang merah, cabai rawit, cabai besar, jeruk dan durian. Adapun produksi Perkebunan dan Hortikultura di Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.8. Capaian dan Target Kinerja Produksi Sektor Tanaman Perkebunan dan Hortikultura di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2024

No.	Indikator	Capaian Kinerja (Ton)					Target Kinerja (Ton)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kakao	134.585	115.023	114.919	114.828	106.667	130.180	104.754
2.	Jambu Mete	25.504	50.862	48.704	59.142	51.834	23.826	36.321
3.	Kelapa Dalam	41.899	37.572	46.860	40.281	39.192	39.678	41.540
4.	Cengkeh	5.315	13.420	14.291	14.420	9.853	12.911	9.410
5.	Lada	13.719	5.718	5.747	5.798	5.749	5.069	6.009

No.	Indikator	Capaian Kinerja (Ton)					Target Kinerja (Ton)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.	Kopi	-	-	-	2.796	2.779	2.677	2.705
7.	Pala	-	-	-	806	769	422	633
8.	Bawang Merah	379	390	558	1.015	487	621	458
9.	Cabai Rawit	3.377	3.669	3.865	4.287	3.915	3.811	3.923
10.	Cabai Besar	1.230	1.408	1.815	2.411	2.540	1.706	2.545
11.	Jeruk	86.291	27.267	35.208	22.219	22.163	22.100	21.100
12.	Durian	-	-	-	12.885	23.752	11.092	23.983

Sumber: Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa Produksi Sektor Tanaman Perkebunan dan Hortikultura di Sulawesi Tenggara secara umum mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan produksi walaupun tidak terlalu signifikan. Tahun 2022 produksi Sektor Tanaman Perkebunan dan Hortikultura yang terbesar adalah Tanaman Kakao sebesar 106.667 ton dan yang terkecil adalah Tanaman Bawang Merah yang hanya mencapai 487 ton.

Beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya jumlah produksi Tanaman Perkebunan dan Hortikultura yaitu **Faktor Internal (OPD/Pemerintah)** antara lain karena keterbatasan dukungan anggaran APBD dan masih terbatasnya tenaga pendamping petani perkebunan dan hortikultura (tenaga penyuluh, pengamat opt dan pengawas/sertifikasi benih). Sedangkan **Faktor Eksternal (Petani/Lahan)** antara lain (1) Budidaya tanaman tidak sesuai GAP, (2) Belum optimalnya penanganan hama penyakit tanaman; (3) Belum optimalnya penggunaan benih unggul bersertifikat; (4) Belum optimalnya ketersediaan benih unggul bersertifikat; (5) Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran produk perkebunan dan hortikultura.

Disamping faktor penghambat tersebut diatas, terdapat faktor pendukung yang mampu mempengaruhi terjadinya peningkatan produksi yaitu **Faktor Internal (OPD/Pemerintah)** antara lain (1) Dukungan anggaran APBN melalui Dana APBN (Satker Perkebunan, Satker Hortikultura dan Satker PSP Kementerian Pertanian Republik Indonesia); (2) Berkembangnya beberapa kawasan Perkebunan dan Hortikultura yang telah ditetapkan secara resmi oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 45/kpts/PD.200/1/2015 dan Kepmentan No. 472/Kpts/RC.040/2018; dan (3) Keberpihakan pemerintah cukup tinggi dalam regulasi, pembinaan, pengawasan dan pelayanan publik. Sedangkan faktor **Faktor Eksternal (Petani/lahan)** antara lain; (1) Potensi Lahan dan iklim yang mendukung untuk berbudidaya tanaman perkebunan dan hortikultura; (2) Strategisnya letak Provinsi Sulawesi Tenggara yang memberikan kemudahan akses pasokan benih dan pemasaran produk petani; (3) Terbukanya pasar domestik maupun ekspor produk hasil perkebunan dan hortikultura; (4) Tingginya minat petani untuk mengusahakan komoditi perkebunan dan hortikultura; dan (5) Harga jual komoditi perkebunan dan hortikultura yang relatif stabil jika dibandingkan dengan komoditi pangan.

b. Sektor Perikanan

Sektor Perikanan merupakan salah satu sektor strategis penopang perekonomian di Sulawesi Tenggara. Produksi perikanan itu sendiri diartikan sebagai semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan.

Produksi Perikanan Sulawesi Tenggara (Sultra) setiap tahun mengalami peningkatan. Produksi yang berlimpah ini mampu memenuhi kebutuhan wilayah sekitar seperti Makassar, Surabaya, Jakarta, Batam dan Semarang. Di samping itu juga menjadi komoditas yang mempunyai nilai ekspor yang cukup tinggi. Data produksi sektor perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9. Capaian dan Target Produksi Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024

No.	Indikator	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata kontribusi sektor unggulan daerah terhadap PDRB (Subsektor perikanan) (persen)	11,32	11,25	11,6	11,6	11,6*	11,7	11,7
2	Jumlah total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi (Ribu Ton)	871,57	707,41	636,868	660,877	670,03	670	670
3	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Persen)	-	-	70	85	87	90	93
4	Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	65,14	71,13	70,51	70,95	72,32	72	72
5	Cakupan bina kelompok (Pokmaswas)	131	131	131	135	135	153	155
6	Produksi perikanan kelompok nelayan (Ribu Ton)	259,64	254,03	255,178	254,553	259,64	260	260
7	Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial (Juta Hektar luas kawasan konservasi)	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
8	Nilai Tukar Nelayan	123,46	117,02	97,45	102,65	102,46	105	105

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor yang telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan daerah. Perekonomian Sulawesi Tenggara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) terus mengalami peningkatan dari 118,09 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 139,06 triliun pada tahun 2021.

Dari capaian angka tersebut, PDRB Sub-Sektor Perikanan konsisten berkontribusi sebesar 10-12% setiap tahun terhadap PDRB Provinsi (BPS Prov. Sultra)

dan diperkirakan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu program kegiatan kelautan dan perikanan mendapat dukungan yang kuat baik dari legislatif maupun eksekutif. Salah satu indikatornya adalah adanya kecenderungan peningkatan alokasi anggaran pembangunan yang dikelola setiap tahun.

Jumlah total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi) terjadi penurunan pada tahun 2019 dan menurun lebih dalam pada tahun 2020. Hal ini juga ditunjukkan pada menurunnya kontribusi sub sektor perikanan pada PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara. Faktor penyebab penurunan ini adalah adanya wabah covid 19.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus menyoroti pentingnya ketangguhan pada sektor kelautan dan perikanan serta meminimalisir dampak dari resiko krisis akibat pandemi Covid-19. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara terus melaksanakan kebijakan pokok pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap melalui optimalisasi produktivitas sarana prasarana perikanan tangkap serta membuka komunikasi dengan pemangku kepentingan di daerah dan terutama kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara akan lebih berupaya meningkatkan kapasitas kapal-kapal penangkap ikan serta meningkatkan pembinaan kepada nelayan-nelayan tradisional di kabupaten/kota mengingat masih besarnya potensi sumberdaya ikan yang belum dimanfaatkan. Selain itu tentu saja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara akan terus meningkatkan pengawasan izin-izin kapal penangkap ikan dari daerah lain, meningkatkan regulasi dan lebih mengefisienkan pengurusan izin operasional perusahaan-perusahaan perikanan skala nasional untuk berinvestasi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Upaya-upaya peningkatan produktivitas perikanan tangkap tersebut salah satu dampaknya dapat terlihat melalui pertumbuhan angka produksi perikanan tangkap di tahun 2022. Dampak lebih lanjut tentunya adalah peningkatan kesejahteraan nelayan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagaimana data yang dirilis oleh Pusdatin KKP dimana rata-rata indeks NTN Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 mencapai 102,46 dimana nilai NTN ini sempat mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 yaitu sebesar 97,45.

Pendapatan masyarakat nelayan bergantung terhadap pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan (SDKP). Pendapatan masyarakat nelayan secara langsung maupun tidak akan sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka, karena pendapatan dari hasil usaha penangkapan ikan merupakan sumber ekonomi utama bagi keluarganya, sehingga besar kecilnya pendapatan akan sangat berpengaruh terhadap taraf kehidupannya.

Angka konsumsi ikan per kapita per tahun dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di dalam negeri yang dikonsumsi masyarakat. Angka konsumsi ikan per wilayah dimanfaatkan untuk perencanaan dan penetapan kebijakan suatu wilayah dalam pengelolaan perikanan. Sampai akhir triwulan III tahun 2022 Angka Konsumsi Ikan Nasional mencapai 56,48 sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 72,37 (angka sementara).

Angka konsumsi ikan yang terus meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pemanfaatan produksi hasil perikanan di dalam wilayah provinsi Sulawesi Tenggara sangat tinggi sehingga dapat menjadi peluang pengembangan industri pengolahan ikan dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Saat

ini produk hasil olahan berbahan ikan telah banyak dijumpai di pasar-pasar lokal, restoran-restoran kelas menengah dan mini market dalam berbagai kemasan dan jenis olahan yang cukup higienis dengan harga yang cukup terjangkau.

Salah satu strategi pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan masyarakat adalah peningkatan intensitas sosialisasi dan promosi tentang manfaat dan keunggulan kandungan gizi produk olahan perikanan dibanding sumber protein lainnya

Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas Taman Nasional, Taman Wisata Alam Laut, Kawasan Konservasi Perairan, dan Daerah Perlindungan Laut. Kawasan Konservasi dimaksud meliputi total luasan sebesar 2.068.969,41 hektar, yaitu:

- a. Taman Nasional Wakatobi; Taman Wisata Alam Laut Teluk Lasolo dan Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang ;
- b. Daerah Perlindungan Laut; 10 Kawasan Konservasi Perairan; Kawasan Konservasi P3K di Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Kota Kendari dan Bombana; dan,
- c. Daerah Perlindungan Laut di Kecamatan Lasalimu, Lasalimu Selatan, Konawe Selatan, Kapontori, Pasarwajo, Wolowa, dan Siontapina serta Daerah Konservasi Kimia di Konawe.

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS). Pembinaan POKMASWAS merupakan rangkaian kegiatan pembekalan sosialisasi dan bimbingan kepada Pokmaswas untuk meningkatkan partisipasi dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Umlah POKMASWAS yang terdaftar hingga saat ini adalah sebanyak 135 kelompok. Kemudian dari sebanyak 18 pokmaswas yang menjadi target awal untuk dilakukan pembinaan selama tahun 2022, hanya 13 kelompok yang dapat dikunjungi dan dilakukan pembinaan. Sementara ada 12 kelompok baru yang dikukuhkan sebagai Pokmaswas Binaan DKP Provinsi Sulawesi Tenggara.

c. Sektor Pertambangan

Potensi kandungan nikel di Sulawesi Tenggara telah dikenal sejak jaman Belanda. Data menunjukkan nikel Sulawesi Tenggara telah dieksploitasi sejak tahun 1934 oleh Oost Borneo Maatschappij (OBM) dan Bone Tolo Maatschappij. Cadangan nikel di Sulawesi Tenggara cukup besar, jumlah cadangan nikel Sulawesi Tenggara berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 97 milyar ton dengan luas sebaran nikelnya 480 ribu Ha. Selain nikel potensi besar yang ada di Sulawesi Tenggara adalah aspal alamnya yang terkenal di dunia. Potensi aspal alam di Sulawesi Tenggara yang terletak di Pulau Buton dengan jumlah cadangan 2.663.648.000 M3 atau setara sekitar 3.835.653.120 ton (DESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, 2011). Nikel dan aspal merupakan dua jenis produksi pertambangan yang menonjol di Sulawesi Tenggara. Tahun 2016 jumlah pr

Produksi nikel mengalami sebesar 1.539.426 ton, tahun 2018 peningkatannya cukup signifikan yaitu mencapai 20.220.717 ton dan pada tahun 2019 produksi Nikel mencapai 23.967.146 ton. Peningkatan produksi Nikel tersebut seiring dengan beroperasinya perusahaan nikel yang berada di Kabupaten Konawe dan menjadi Kawasan Industri Nasional. Sementara itu, produksi pertambangan Aspal dari tahun ke tahun mulai mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 produksi Aspal hanya mencapai 3.957 ton, tahun 2017 dan tahun 2018 terus meningkat masing-masing sebesar 15.821 ton dan 20.625 ton, dan pada tahun 2019 peningkatan produksi Aspal naik signifikan hingga mencapai 71.113 ton. Peningkatan produksi tersebut seiring dengan kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan Aspal Buton sebagai bahan untuk pembangunan infrastruktur jalan secara nasional.

Tabel 2.10. Hasil Produksi Pertambangan Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2019

No.	Tahun	Nikel (ton)	Aspal (ton)
1.	2016	1.539.426	3.957
2.	2017	1.539.426	3.957
3.	2018	1.539.426	3.957
4.	2019	1.539.426	3.957

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023

Untuk meningkatkan Potensi Pengembangan wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya untuk meningkatkan produksi sektor-sektor unggulan, maka perlu ditetapkan arah kebijakan penataan ruang yang mendukung pengembangan potensi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kebijakan penataan ruang yang mendukung pengembangan potensi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, terdiri atas :

- menata dan mengalokasikan sumberdaya lahan secara proporsional melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan di sektor unggulan pertanian, pertambangan serta kelautan dan perikanan;
- peningkatan aksesibilitas dan pengembangan pusat-pusat kegiatan sektor terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal melalui pengembangan struktur ruang secara terpadu;
- menetapkan pola ruang secara proporsional untuk mendukung pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal, seimbang dan berkesinambungan;
- menetapkan kawasan strategis dalam rangka pengembangan sektor unggulan dan pengembangan sosial ekonomi secara terintegrasi dengan wilayah sekitar; dan
- pengembangan sumberdaya manusia yang mampu mengelola sektor unggulan secara profesional dan berkelanjutan.

Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor pertanian dalam arti luas terdiri atas:

- menata dan mengalokasikan sumberdaya lahan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan secara proporsional;
- mengembangkan sarana dan prasarana guna mendukung aksesibilitas dan pusat-pusat pertumbuhan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal;

- c. mengintegrasikan kawasan unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan dengan wilayah sekitar dan kawasan unggulan lain; dan
- d. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu mengelola sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta peternakan secara profesional dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor pertambangan terdiri atas:

- a. menata dan menetapkan kawasan pertambangan;
- b. mengembangkan pusat industri pertambangan nasional sebagai suatu kawasan pertambangan dan pengolahan bahan tambang secara terpadu;
- c. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung guna menunjang aksesibilitas pusat kawasan industri pertambangan dengan usaha ekonomi pada wilayah sekitar;
- d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang aksesibilitas perdagangan antar pulau dan ekspor;
- e. mengintegrasikan usaha-usaha untuk mendukung pengembangan pusat industri pertambangan nasional dengan usaha-usaha ekonomi masyarakat sekitar;
- f. mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan secara preventif maupun kuratif sebelum dan sesudah eksplorasi bahan tambang dan limbah pabrik pengolahan; dan
- g. pengembangan sumberdaya manusia secara komprehensif untuk mengelola industri pertambangan nasional secara menyeluruh dengan melaksanakan pelatihan teknis dan membangun sekolah kejuruan dan pendidikan keahlian (sarjana dan pascasarjana).

Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor kelautan dan perikanan terdiri atas :

- a. menata dan mengalokasikan sumberdaya lahan secara proporsional melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan;
- b. meningkatkan aksesibilitas dan pengembangan pusat-pusat kegiatan sektor kelautan dan perikanan terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal melalui pengembangan struktur ruang secara terpadu;
- c. menetapkan pusat kawasan pengembangan sektor perikanan dan kelautan berupa kawasan pengembangan budidaya perairan dan kawasan perikanan tangkap secara terintegrasi dengan usaha-usaha ekonomi wilayah sekitar;
- d. melindungi dan mengelola sumberdaya kelautan untuk kebutuhan perlindungan plasma nutfah, terumbu karang dan sumberdaya hayati untuk kelangsungan produksi dan pengembangan ekowisata; dan
- e. mengembangkan fasilitas pelayanan pendidikan dan latihan secara profesional dan berkelanjutan.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara terbagi menjadi :

- a. Kawasan Rawan Bencana Alam, yang terdiri dari :
 - Kawasan Rawan Tanah Longsor, yaitu diseluruh wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara kecuali wilayah Kabupaten Wakatobi
 - Kawasan Rawan gelombang pasang, yaitu : wilayah Kabupaten Buton, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten

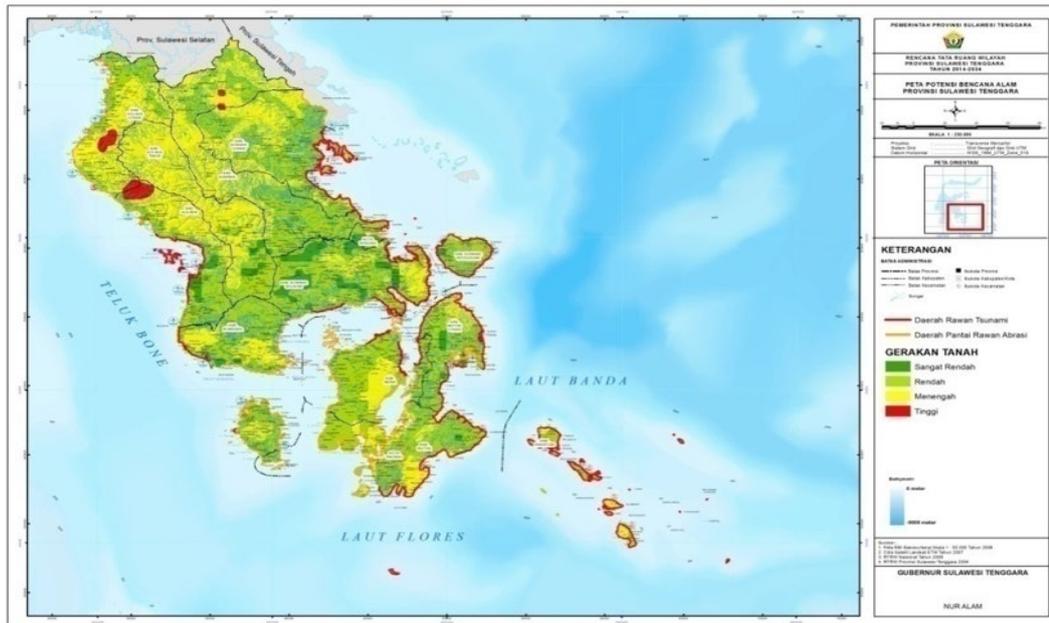
Bombana, Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe Utara, dan Kabupaten Wakatobi.

- Kawasan Rawan Banjir, yaitu : wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara kecuali wilayah Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi.

b. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

- Kawasan Rawan Gempa Bumi, yaitu : Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, dan wilayah laut provinsi bagian timur dan perairan Teluk Bone bagian barat.
- Kawasan Rawan Gerakan Tanah, yaitu :
 - Zona kerentanan tinggi meliputi wilayah Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Utara.
 - Zona kerentanan menengah meliputi semua wilayah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara kecuali Kabupaten Kolaka Utara.
 - Zona kerentanan rendah meliputi wilayah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.
 - Zona kerentanan saat rendah meliputi wilayah Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Bombana, Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Buton dan Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Kawasan Rawan Tsunami, terdapat pada kawasan pantai yang dipengaruhi kejadian gempa bawah laut di Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Bombana, dan Kota Kendari.
- Kawasan Rawan Abrasi, terdapat pada kawasan pantai diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara kecuali Kabupaten Kolaka Timur.
- Kawasan Rawan Gas Beracun H₂S (Hidrogen Sulfida), terdapat di wilayah Kabupaten Kolaka.

Selain Kawasan Rawan Bencana di atas, kecelakaan laut juga sangat potensial terjadi di seluruh perairan laut Sulawesi Tenggara seiring dengan terjadinya perubahan iklim yang mengakibatkan semakin tingginya gelombang laut serta semakin meningkatnya intensitas lalulintas pelayaran di kawasan tersebut dari waktu ke waktu.



Sumber : RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034

Gambar 2.6.
Peta Rawan Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara

2.1.1.4. Demografi

Dalam Buku Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023 dinyatakan bahwa salah satu sumber data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali, Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020. Keenam sensus penduduk sebelumnya dilaksanakan dengan menggunakan metode tradisional, yaitu mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah. Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, Sensus Penduduk 2020 (SP2020) menggunakan metode kombinasi yaitu dengan memanfaatkan data Administrasi Kependudukan (Admuduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar pelaksanaan SP2020, sebagai upaya untuk mewujudkan **“SATU DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA”**.

SP 2020 mencakup seluruh penduduk yang tinggal di wilayah teritorial Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap atau berencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun, WNI yang dicakup juga termasuk mereka yang berada di luar negeri, yaitu Anggota Korps Diplomatik Republik Indonesia beserta keluarganya di luar negeri dan Anggota TNI/POLRI beserta keluarganya yang sedang melakukan misi perdamaian di luar negeri. Berdasarkan proyeksi penduduk Interim 2020–2023, penduduk Sulawesi Tenggara tahun 2022 sebanyak 2.701.661 jiwa yang terdiri atas 1.366.872 penduduk laki–laki dan 1.334.789 penduduk perempuan, Dibandingkan dengan hasil SP2020 tahun 2020, penduduk Sulawesi Tenggara tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 1,66 persen, Secara umum, penduduk laki–laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan yang ditunjukkan oleh besaran sex ratio sebesar 102,40. Dengan luas wilayah **36.159,71 km²**, secara rata–rata setiap km² wilayah Sulawesi Tenggara

ditinggali sekitar 74-75 orang penduduk, Seiring dengan persebaran penduduk tiap kabupaten/kota, Kota Kendari dengan persentase penduduk sebesar 13,20 persen memiliki tingkat kepadatan tertinggi mencapai 1.342 jiwa/km², Sementara tingkat kepadatan terendah di Kabupaten Konawe Utara sebesar 16-17 jiwa/Km² dengan persentase penduduk sebesar 2,60 persen.

Adapun Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan SP 2020 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan SP 2020 dan Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Penduduk (jiwa)	
	2021	2022
Buton	115.207	119.353
Muna	215.527	223.283
Konawe	257.011	266.299
Kolaka	237.587	246.137
Konawe Selatan	308.524	317.826
Bombana	150.706	153.304
Wakatobi	111.402	115.286
Kolaka Utara	137.659	141.151
Buton Utara	66.653	69.051
Konawe Utara	67.871	70.314
Kolaka Timur	120.699	121.145
Konawe Kepulauan	37.050	38.383
Muna Barat	84.590	84.902
Buton Tengah	114.773	118.904
Buton Selatan	95.261	95.613
Kota Kendari	345.107	356.747
Kota Baubau	159.248	163.963
Sulawesi Tenggara	2.624.875	2.701.661

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

Pada tabel 2.11 diatas terlihat bahwa Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara pada Sensus Penduduk Tahun 2020 sebesar **2.624.875** jiwa dimana Kota Kendari memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu **345.107** jiwa atau sebesar **13,15%** dari total jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya komposisi jumlah penduduk terendah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar **37.050** jiwa atau hanya mencaapai **1,41%** dari total jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hasil Sensus Penduduk Tahun 2022 terjadi kenaikan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi **2.701.661** jiwa atau terjadi kenaikan sebesar **76.786** jiwa atau naik sebesar 2,84% dari Sensus Penduduk Tahun 2020. Dimana Kota Kendari masih tetap menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 356.747 jiwa dan

Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai daerah dengan jumlah penduduk terendah yaitu 38.383 jiwa.

Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan SP 2020 dan Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun(%)	
	2010–2020	2020–2022
Buton	1,95	2,04
Muna	0,89	2,04
Konawe	1,83	2,05
Kolaka	1,26	2,04
Konawe Selatan	1,5	1,71
Bombana	0,77	0,98
Wakatobi	1,76	1,98
Kolaka Utara	1,23	1,44
Buton Utara	1,92	2,04
Konawe Utara	2,7	2,04
Kolaka Timur	1,23	0,21
Konawe Kepulauan	2,42	2,04
Muna Barat	1,62	0,21
Buton Tengah	2,79	2,04
Buton Selatan	2,34	0,21
Kota Kendari	1,7	1,91
Kota Baubau	1,47	1,68
Sulawesi Tenggara	1,58	1,66

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

Periode Tahun 2010-2022, Laju Pertumbuhan Penduduk tertinggi berada pada Kabupaten Buton Tengah sebesar 2,79 persen dan terendah sebesar 0,77 persen adalah Kabupaten Bombana. Periode Tahun 2020-2022, Laju Pertumbuhan Penduduk tertinggi Kabupaten Konawe sebesar 2,05 persen. Laju Pertumbuhan Penduduk terendah berada pada 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kolaka Timur, Muna Barat dan Buton Selatan sebesar 0,21 persen.

Tabel 2.13. Distribusi Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan SP 2020 dan Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Distribusi Penduduk (Persen)	
	2021	2022
Buton	4,23	4,42
Muna	8,81	8,26
Konawe	9,54	9,86
Kolaka	9,35	9,11
Konawe Selatan	11,85	11,76

Kabupaten/Kota	Distribusi Penduduk (Persen)	
	2021	2022
Bombana	6,24	5,67
Wakatobi	4,17	4,27
Kolaka Utara	5,43	5,22
Buton Utara	2,45	2,56
Konawe Utara	2,31	2,6
Kolaka Timur	4,77	4,48
Konawe Kepulauan	1,3	1,42
Muna Barat	3,21	3,14
Buton Tengah	3,87	4,4
Buton Selatan	3,36	3,54
Kota Kendari	12,99	13,2
Kota Baubau	6,14	6,07
Sulawesi Tenggara	100	100

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

Tabel 2.14 Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan SP 2020 dan Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Rasio Jenis Kelamin	
	2021	2022
Buton	102,35	101,95
Muna	96,53	96,16
Konawe	107,4	106,97
Kolaka	104,38	103,97
Konawe Selatan	105,63	105,21
Bombana	102,36	101,96
Wakatobi	100,45	100,07
Kolaka Utara	104,79	104,38
Buton Utara	104,61	104,2
Konawe Utara	107,18	106,75
Kolaka Timur	105,85	105,43
Konawe Kepulauan	103,2	102,79
Muna Barat	97,85	97,48
Buton Tengah	100,28	99,89
Buton Selatan	102,34	101,94
Kota Kendari	101,68	101,28
Kota Baubau	99,69	99,31
Sulawesi Tenggara	102,81	102,4

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

Tabel 2.15. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	130.497	126.932	257.429
5-9	126.021	123.361	249.382
10-14	127.362	121.335	248.697
15-19	126.966	119.068	246.034
20-24	121.816	117.764	239.580
25-29	118.018	114.826	232.844
30-34	111.169	108.112	219.281
35-39	101.881	100.138	202.019
40-44	92.470	90.959	183.429
45-49	81.871	80.184	162.055
50-54	67.992	66.813	134.805
55-59	54.727	53.997	108.724
60-64	41.270	41.215	82.485
65-69	28.979	29.700	58.679
70-74	18.823	19.935	38.758
75+	17.010	20.450	37.460
Jumlah	1.366.872	1.334.789	2.701.661

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Kontribusi nilai tambah yang tercipta dari setiap lapangan usaha di suatu wilayah menggambarkan struktur perekonomian wilayah tersebut. Lapangan usaha yang memiliki kontribusi dominan akan menjadi kategori yang menunjukkan ciri khas ekonomi wilayah tersebut.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2022) struktur ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara didominasi oleh sektor primer yang sangat bergantung pada alam. Kayanya potensi sumber daya alam yang diberdayakan oleh masyarakat terlihat dari tingginya persentase PDRB Sulawesi Tenggara pada 5 (lima) lapangan usaha utama, yakni: sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; sektor Pertambangan dan Penggalian; sektor Konstruksi; sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor; dan sektor Industri Pengolahan. Kelima sektor lapangan usaha tersebut memiliki peranan yang cukup dominan yakni diatas 70 persen terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Tenggara.

Tahun 2022, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Sulawesi Tenggara, yaitu mencapai 23,25 persen. Sektor berikutnya yang juga memberi peran yang cukup besar dalam pembentukan PDRB Sulawesi Tenggara tahun 2022 adalah sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 20,27 persen; kemudian disusul sektor

Konstruksi sebesar 13,55 persen; dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor dengan kontribusi sebesar 12,81 persen; serta sektor Industri Pengolahan sebesar 8,36 persen. Dalam empat tahun terakhir, kelima sektor tersebut menunjukkan tren kontribusi positif yang mengalami peningkatan.

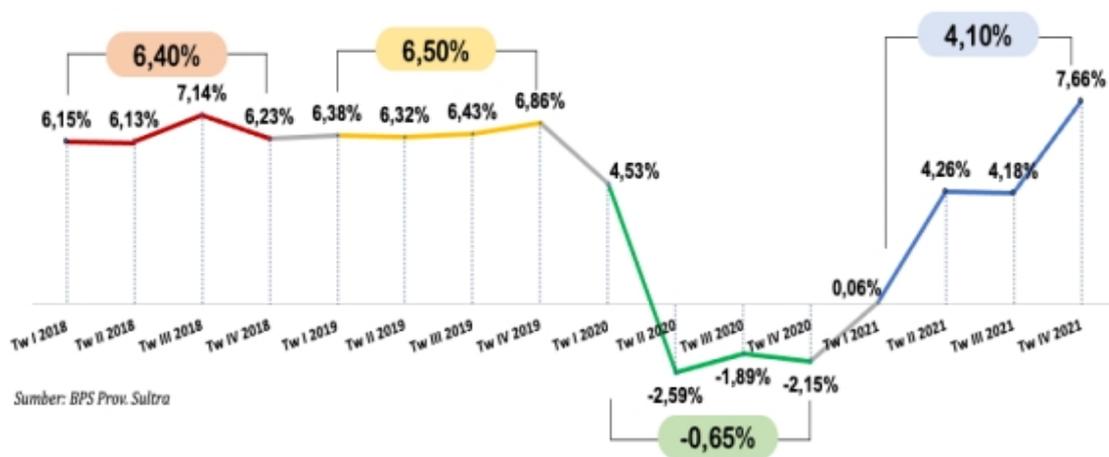
Tabel 2.16. Persentase Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2020 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 - 2022

No	Sektor	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,09	23,96	23,73	24,13	23,60	23,25
2.	Pertambangan & penggalian	20,68	20,83	21,04	19,79	19,35	20,27
3.	Industri pengolahan	6,13	6,17	6,40	7,25	7,63	8,36
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,15
6.	Konstruksi	13,35	13,49	13,69	13,58	14,51	13,55
7.	Perdagangan Besar & Eceran, dan Reparasi Mobil & Sepeda Motor	12,55	12,64	12,77	12,54	12,78	12,81
8.	Transportasi dan Pergudangan	4,52	4,59	4,43	4,07	3,82	4,34
9.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	0,58	0,58	0,56	0,55	0,53	0,52
10.	Informasi dan Komunikasi	1,85	1,82	1,79	1,90	1,76	1,69
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,44	2,35	2,34	2,39	2,50	2,42
12.	Real Estate	1,49	1,40	1,34	1,34	1,30	1,22
13.	Jasa Perusahaan	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,20
14.	Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	5,15	5,09	4,89	5,18	4,99	4,61
15.	Jasa Pendidikan	4,54	4,51	4,48	4,67	4,64	4,51
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,91	0,90	0,91	1,00	1,02	0,93
17.	Jasa Lainnya	1,30	1,26	1,22	1,20	1,17	1,14
PDRB		100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan (riil) yang dijadikan sebagai salah satu indikator kemajuan pembangunan di suatu daerah disamping nilai absolut PDRB yang menunjukkan besarnya produksi barang dan jasa di suatu daerah atau wilayah. Suatu daerah atau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan nilai PDRB riil (PDRB atas dasar harga konstan) di daerah atau wilayah tersebut.



Gambar 2.7.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022

Laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 sebesar 5,53 persen. Angka pertumbuhan tersebut menunjukkan adanya percepatan kemajuan ekonomi dibanding Tahun 2021 dan Tahun 2020 yang mengalami pertumbuhan hanya 4,10 persen dan -0,65 persen akibat dari dampak pandemi *Covid-19*. Adanya percepatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara yang terjadi di Tahun 2022, yaitu sektor Industri Pengolahan sebesar 16,74 persen, sektor Jasa Perusahaan sebesar 12,41 persen, sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,23 persen dan sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 9,29 persen yang memiliki kontribusi besar dalam perekonomian Sulawesi Tenggara yang memberi efek positif pada percepatan pertumbuhan PDRB Tahun 2022.

Tabel. 2.17. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022

No	Sektor	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,76	6,37	4,99	0,68	2,39	6,74
2.	Pertambangan & penggalian	12,77	6,46	6,99	-6,65	0,29	1,53
3.	Industri pengolahan	6,38	6,81	10,83	10,19	6,38	16,74
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,92	1,52	6,89	-0,33	7,31	8,77
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	0,12	5,70	3,94	3,30	1,93	-1,39
6.	Konstruksi	3,16	6,64	7,00	-0,68	10,10	-0,21
7.	Perdagangan Besar & Eceran, dan Reparasi Mobil & Sepeda Motor	6,80	6,63	7,76	-2,73	7,97	7,68
8.	Transportasi dan Pergudangan	7,24	8,76	4,54	-5,26	0,14	10,23
9.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,16	6,69	4,94	-3,93	4,33	8,36
10.	Informasi dan Komunikasi	8,43	8,20	7,83	8,08	3,63	9,29
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,53	2,16	6,96	3,22	6,89	2,85
12.	Real Estate	4,17	2,58	3,83	0,42	2,82	2,42
13.	Jasa Perusahaan	5,98	5,82	5,21	-3,80	1,35	12,41
14.	Adm Pemerintahan,	4,10	3,73	3,59	3,30	1,91	4,95

No	Sektor	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib						
15.	Jasa Pendidikan	3,03	7,59	7,00	3,81	3,73	5,41
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,41	6,86	8,41	8,10	7,46	2,29
17.	Jasa Lainnya	2,74	5,61	4,57	-3,92	2,43	7,48
	PDRB	6,88	6,40	6,50	-0,65	4,10	5,53

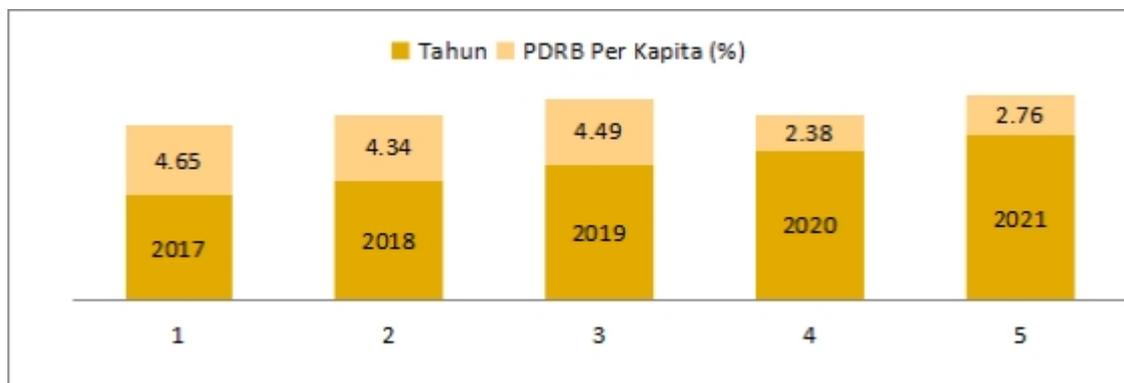
Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) beberapa sektor mengalami perlambatan pertumbuhan, yakni sektor Pertambangan dan Penggalan, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Konstruksi dan sektor Real Estate, serta sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Penurunan laju pertumbuhan PDRB pada sektor tersebut secara umum dipengaruhi oleh pandemi Covid-19.

c. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk disuatu wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB Perkapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB Perkapita, sedangkan besar kecilnya PDRB tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang ada di wilayah tersebut.

Selama lima tahun terakhir, nilai PDRB Perkapita Sulawesi Tenggara atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan. PDRB Perkapita Sulawesi Tenggara tahun 2017 sebesar 41.279 juta rupiah atau 4,65 persen dibanding tahun sebelumnya; tahun 2018 sebesar 44.492 juta rupiah atau 4,34 persen; tahun 2019 sebesar 48.514 juta rupiah; tahun 2020 sebesar 49.745 juta rupiah; tahun 2021 sebesar 52.294 juta rupiah atau meningkat 2,76 persen dari tahun sebelumnya.



Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

Gambar 2.8.

PDRB per Kapita Sulawesi Tenggara (Juta Rupiah), Tahun 2017-2021

PDRB Perkapita Sulawesi Tenggara menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Sulawesi Tenggara rata-rata mampu menghasilkan

nilai tambah sebesar nilai perkapita dimasing-masing tahun tersebut. Pertumbuhan perkapita secara *riil* pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 cukup berfluktuatif. Dimana pertumbuhan perkapita tertinggi pada tahun 2019 sebesar 6,10 persen dan terendah pada tahun 2020 sebesar 1,13 persen akibat dampak pandemi Covid-19.

Tabel 2.18. PDRB per Kapita Provinsi Sulawesi Tenggara (Juta Rupiah) Tahun 2017 s.d. 2022

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)						
	- ADHB	107.423,50	118.066,61	129.225,15	130.107,27	139.463,63	158.761,13
	- ADHK	83.001,70	88.310,05	94.053,52	93.445,72	97.276,36	102.657,94
2.	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)						
	- ADHB	41,28	44,49	48,51	49,72	52,45	58,76
	- ADHK	31,89	33,28	35,31	35,71	36,58	38
3.	Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010 (Persen)	4,65	4,34	6,1	1,13	2,44	3,87
4.	Jumlah Penduduk (Ribu jiwa)	2.602,00	2.653,65	2.663,66	2.616,90	2.659,16	2.701,66
5.	Pertumbuhan Jumlah Penduduk	2,01	1,97	0,83	-1,76	1,61	1,6

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023

d. Laju Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Inflasi di Indonesia diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Mulai Januari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Ada beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan IHK tahun dasar 2018=100 dibandingkan IHK 2012=100, khususnya dari sisi cakupan, klasifikasi pengelompokan komoditas, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 yang dilaksanakan oleh BPS, sebagai salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Hasil SBH 2018 mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang terjadi di Indonesia.

Tabel 2.19. Laju Inflasi Bulanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2022

Kelompok Pengeluaran	Indeks Harga Konsumen			Inflasi Mei 2021 ¹⁾	Laju Inflasi Tahun Kalender 2021 ²⁾	Inflasi Tahun Ke Tahun ³⁾
	Mei-20	Des-20	Mei-21			
1	2	3	4	5	6	7
Umum	103,42	105,28	106,40	1,13	1,12	2,98

Kelompok Pengeluaran		Indeks Harga Konsumen			Inflasi Mei 2021 ¹⁾	Laju Inflasi Tahun Kalender 2021 ²⁾	Inflasi Tahun Ke Tahun ³⁾
		Mei-20	Des-20	Mei-21			
1		2	3	4	5	6	7
1.	Makanan, Minuman, dan Tembakau	104,69	106,99	109,79	2,18	2,8	5,1
2.	Pakaian dan Alas Kaki	104,13	103,19	103,21	0,13	0,02	-0,92
3.	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Lainnya	101,14	101,38	101,61	0,06	0,23	0,47
4.	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	103,24	104,62	105,17	0,25	0,55	1,93
5.	Kesehatan	107,71	108,48	109,26	0,06	0,52	1,55
6.	Transportasi	101,93	107,19	108,24	2,36	1,05	6,31
7.	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97,90	97,70	97,94	0,02	0,24	0,04
8.	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	101,22	101,60	103,16	1,09	1,56	1,94
9.	Pendidikan	106,85	108,48	107,89	0,00	-0,59	1,04
10.	Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran	103,47	108,83	105,30	0,00	-3,35	1,83
11.	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	107,72	110,99	111,30	0,65	0,31	3,58

Sumber : Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023

¹⁾ Persentase perubahan IHK bulan Mei 2021 terhadap IHK bulan sebelumnya

²⁾ Persentase perubahan IHK bulan Mei 2021 terhadap IHK bulan Desember 2020

³⁾ Persentase perubahan IHK bulan Mei 2021 terhadap IHK bulan Mei 2020

Inflasi Kota Kendari bulan Mei tahun 2021 tercatat sebesar 1,13 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 106,40. Inflasi yang terjadi di Kota Kendari disebabkan oleh naiknya indeks harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau 2,18 persen; pakaian dan alas kaki 0,13 persen; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar lainnya 0,06 persen; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,25 persen; kesehatan 0,06 persen; transportasi 2,36 persen, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,02 persen; rekreasi, olahraga, dan budaya 1,09 persen; perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,65 persen.

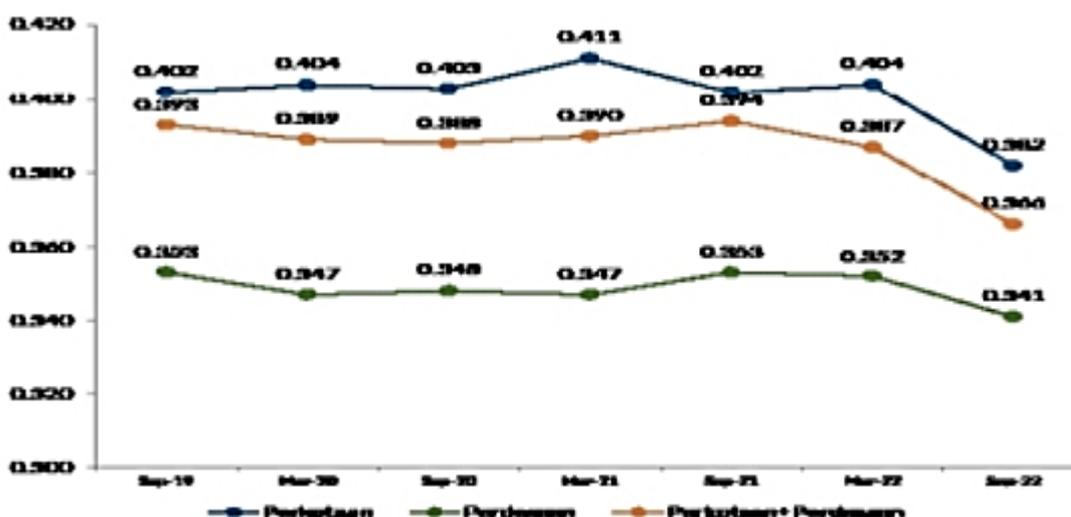
Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi pada Mei 2021 yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau 2,8 persen; kelompok transportasi 1,05 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga masing-masing 0,55 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,31 persen; serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya 1,56 persen. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,24 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya 0,23 persen. Sedangkan kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok kesehatan; serta kelompok pendidikan tidak memberikan sumbangan/relatif stabil.

e. Indeks Gini Ratio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Sulawesi Tenggara selama periode September 2019 - September 2022 terus mengalami penurunan meski naik sesaat di September 2021.

Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut pemerataan pengeluaran di Sulawesi Tenggara mulai membaik.

Dalam setahun terakhir, berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2022 adalah sebesar 0,382. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar 0,022 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,404 dan meningkat sebesar 0,008 poin dibanding September 2021 yang sebesar 0,402. Untuk daerah perdesaan, Gini Ratio pada September 2022 tercatat sebesar 0,341, turun sebesar 0,011 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 0,352 dan mengalami penurunan sebesar 0,012 poin dibandingkan dengan kondisi September 2021 sebesar 0,353.



Gambar 2.9.

Grafik Perkembangan Gini Ratio Sulawesi Tenggara Periode September 2019 – September 2022

f. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12 - 17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Pada September 2022, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,23 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini menurun dibandingkan dengan Maret 2022 yang sebesar 17,38 persen dan September 2021 yang sebesar 16,31 persen. Jika dibedakan menurut daerah, pada September 2022 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 17,65 persen. Sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar 19,11 persen. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan dan daerah perdesaan termasuk ketimpangan rendah.

Tabel 2.20. Distribusi Pengeluaran Penduduk di Indonesia Maret-September 2020, Maret-September 2021 dan Maret-September 2022

Distribusi Pengeluaran Penduduk	Distribusi Pengeluaran Penduduk (Persen)					
	2020		2021		2022	
	Maret	September	Maret	September	Maret	September
Perkotaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 persen Terbawah	15,07	17,00	15,72	16,11	16,53	17,65
Perkotaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 persen Menengah	34,75	30,98	31,55	37,64	35,96	36,72
Perkotaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 20 persen Atas	50,18	52,02	52,73	46,25	47,51	45,63
Perdesaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 persen Terbawah	20,37	21,11	20,24	18,04	18,84	19,11
Perdesaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 persen Menengah	39,51	37,50	39,86	39,93	38,37	39,75
Perdesaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 20 persen Atas	40,12	41,38	39,90	39,77	40,63	41,14
Perkotaan dan Perdesaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 persen Terbawah	18,61	19,80	19,02	16,31	17,38	18,23
Perkotaan dan Perdesaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 persen Menengah	37,30	35,95	37,68	37,96	36,74	38,12
Perkotaan dan Perdesaan-Distribusi Pengeluaran Penduduk 20 persen Atas	44,08	44,25	43,31	45,72	45,88	43,65

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023, Survei Susenas.

g. Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 sebesar 318,7 ribu jiwa naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 301,82 ribu jiwa dan pada Tahun 2022 bertambah menjadi 314,74 ribu jiwa naik 4,95 ribu jiwa dengan presentase 11,27 persen.

Tabel 2.21. Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (persen)
1	2	3	4
Maret 2017	285.609	331,71	12,81
September 2017	300.258	313,16	11,97
Maret 2018	303.618	307,10	11,63

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (persen)
1	2	3	4
September 2018	300.258	301,85	11,32
Maret 2019	327,402	302,58	11,24
September 2019	346,466	299,97	11,04
Maret 2020	350.019	301,82	11,00
September 2020	360.123	317,32	16,69
Maret 2021	369.824	318,70	16,66
September 2021	385.845	323,26	11,74
Maret 2022	404.137	309,79	11,17
September 2022	432.464	314,74	11,27

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang menggolongkan seseorang miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan di Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada bulan Maret 2021 Garis Kemiskinan Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 285.609 rupiah per kapita per bulan, kemudian pada bulan Maret 2018 meningkat mencapai 303.618 rupiah per kapita per bulan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, garis kemiskinan Sulawesi Tenggara terus naik hingga pada bulan Maret 2021 mencapai 369.824 rupiah per kapita per bulan. Sedangkan yang terakhir pada bulan September 2022 sebesar Rp. 432.464 perkapita perbulan.

Pada bulan September 2017 dan bulan September 2022 terjadi peningkatan tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan karena kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan masih sangat rendah sehingga masih banyak yang terperangkap dalam jurang kemiskinan. Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan Sulawesi Tenggara kian menurun mencapai 11,27 persen. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional, persentase penduduk miskin di Sulawesi Tenggara masih berada diatas nasional. Meskipun persentase penduduk miskin Sulawesi Tenggara cenderung menurun namun penurunannya semakin melambat, sehingga dapat dipastikan bahwa kelambatan penurunan tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin di Sulawesi Tenggara mempengaruhi tingkat kemiskinan nasional.

Persebaran penduduk miskin di Sulawesi Tenggara baik di Desa maupun di Kota dari tahun 2017-2022 fluktuatif. Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagian besar berada di Desa, namun persebaran penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara dari Maret 2017 – September 2022 mengalami penurunan berbanding terbalik dengan penduduk miskin di perkotaan, walaupun penduduk miskin sebagian besar berada di desa tetapi perkembangan penduduk miskin di perkotaan cenderung naik tiap tahunnya.

Tabel 2.22. Persebaran Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022

Tahun	Penduduk Miskin (000)		Persentase Penduduk Miskin		Garis Kemiskinan (Rp)	
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa
Maret 2017	62,75	268,96	7,56	15,29	297.829	279.739
September 2017	67,96	245,19	7,14	14,74	308.624	295.496
Maret 2018	66,41	240,69	6,56	14,77	311.241	298.702

Tahun	Penduduk Miskin (000)		Persentase Penduduk Miskin		Garis Kemiskinan (Rp)	
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa
September 2018	70,05	240,09	6,87	14,07	324.276	311.592
Maret 2019	71,82	230,76	6,81	14,09	336.877	321.197
September 2019	72,58	227,38	6,81	13,77	356.235	340.065
Maret 2020	76,93	224,89	7,14	13,50	366.063	350.019
September 2020	73,22	244,10	7,62	13,93	383.839	360.123
Maret 2021	75,05	243,65	7,66	13,89	394.183	369.824
September 2021	71,02	252,25	7,14	14,34	410.332	385.845
Maret 2022	69,94	239,85	6,98	13,57	420.442	394.734
September 2022	73,71	241,04	7,22	13,60	451.180	421.684

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

h. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh **pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya**. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010.

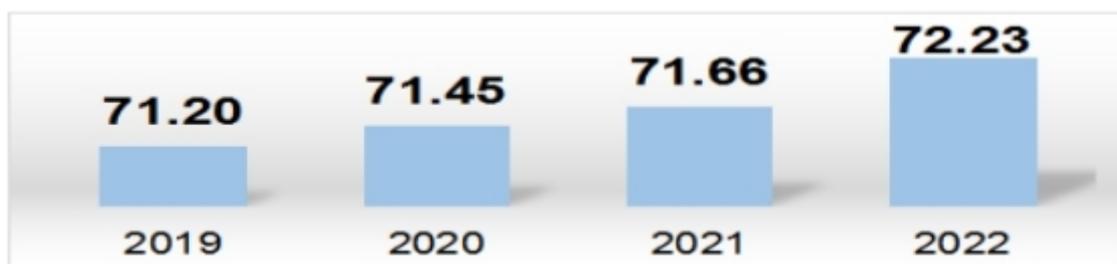
IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama Sekolah dan harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan apirtas daya beli (*purchasing power parity*).

Peningkatan IPM pada Tahun 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Hal ini berbeda dengan pencapaian IPM Tahun 2020. Pada Tahun 2020 pandemi COVID-19 telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan IPM yang disebabkan oleh penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada Tahun 2021, pengeluaran per kapita telah merangkak naik 0,53 persen dibanding Tahun 2020 dan Tahun 2022 meningkat menjadi 72,23.

Pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 tahun memiliki Harapan Lama Sekolah pada Tahun 2022 selama 13,69 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat dibandingkan Tahun 2021 yang mencapai 13,68 tahun. Selain itu, Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas mencapai 9,25 Tahun pada tahun 2022. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki

harapan untuk dapat hidup hingga 71,37 tahun, lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

IPM Sulawesi Tenggara meningkat dari 71,20 pada tahun 2018 menjadi 71,45 pada tahun 2020. Selama periode tersebut. Pada periode 2018-2019, IPM Sulawesi Tenggara tumbuh 0,84 persen. Selama periode 2019 hingga 2022, IPM Sulawesi Tenggara menunjukkan kemajuan yang besar, status pembangunan manusia Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan. Selama periode 2011 hingga 2018 pembangunan manusia Sulawesi Tenggara telah berstatus "sedang", sedang pada tahun 2019-2022 pembangunan manusia Sulawesi Tenggara telah bersatus "tinggi". Jika dibandingkan dengan capaian IPM Nasional, IPM Sulawesi Tenggara masih berada di bawahnya, namun secara optimis akan mampu menyamai capaian nasional pada tahun 2022 sebesar 72,91 Jarak IPM Provinsi Sulawesi Tenggara dan IPM Nasional pada tahun 2022 sebesar 0,68.



Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

Gambar 2.10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara dan Nasional, Tahun 2019-2022

Tabel 2.23. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara 2018-2022

Komponen	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	70,72	70,97	71,22	71,27	71,37
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,53	13,55	13,65	13,68	13,69
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,69	8,91	9,04	9,13	9,25
Pengeluaran per Kapita	Rp.000	9.262	9.436	9.331	9.381	9.708
IPM	-	70,61	71,20	71,45	71,66	72,23
Pertumbuhan IPM	Persen	0,75	0,84	0,35	0,21	0,57

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manuasi (IPM) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan 0,09 poin yaitu 0,75 pada Tahun 2018 menjadi 0,84 pada Tahun 2021. Pertumbuhan IPM mengalami penurunan sebesar 0,49 poin dari Tahun 2019 menjadi 0,35 pada Tahun 2020. Demikian halnya dengan Pertumbuhan IPM pada Tahun 2021 mengalami penurunan 0,14 poin dari Tahun 2020. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 0,57. Hal ini disebabkan dengan dampak pandemi Covid 19.

Tabel 2.24. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2022

No.	Provinsi/ Kab/Kota	AHH		HLS		RLS		Pengeluaran Perkapita (000)		IPM	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	Buton	68.39	68.46	13.76	13.87	7.92	8.25	7.324.00	7.594.00	66,32	67,23
2.	Muna	70.41	70.47	13.80	14.01	8.46	8.52	8.218.00	838.00	69,17	69,61
3.	Konawe	70.32	70.38	13.01	13.03	9.21	9.30	10.151.00	10.552.00	71,48	72,04
4.	Kolaka	71.21	71.30	12.83	13.02	8.99	9.06	12.525.00	12.639.00	73,56	73,98
5.	Konawe Selatan	70.87	70.95	12.37	12.59	8.11	8.27	9.059.00	9.347.00	68,58	69,36
6.	Bombana	69.09	69.20	11.85	11.89	8.04	8.05	831.00	8.680.00	66,25	66,81
7.	Wakatobi	70.48	70.59	13.51	13.51	8.16	8.50	928.00	9.758.00	69,87	70,85
8.	Kolaka Utara	70.36	70.40	12.15	12.16	8.22	8.54	10.244.00	10.721.00	69,50	70,39
9.	Buton Utara	70.93	70.96	12.92	12.99	8.93	9.11	7.496.00	7.935.00	68,08	69,00
10.	Konawe Utara	69.53	69.59	13.08	13.11	9.30	9.53	9.181.00	9.666.00	70,23	71,00
11.	Kolaka Timur	72.82	72.90	12.69	12.69	7.84	8.15	7.753.00	8.155.00	67,76	68,73
12.	Konawe Kep.	68.43	68.46	12.32	12.53	9.42	9.42	6.738.00	7.192.00	65,73	66,69
13.	Muna Barat	70.35	70.39	12.51	12.61	7.30	7.60	7.502.00	7.668.00	65,48	66,21
14.	Buton Tengah	67.69	67.78	13.12	13.18	7.31	7.33	7.244.00	7.670.00	64,55	65,29
15.	Buton Selatan	67.69	67.76	13.24	13.25	7.54	7.64	7.279.00	7.476.00	64,99	65,44
16.	Kendari	73.83	73.93	16.89	16.90	12.51	12.52	14.356.00	14.765.00	84,15	84,51
17.	Baubau	71.25	71.36	15.17	15.18	10.91	10.92	10.503.00	10.835.00	76,26	76,67
18.	Sulawesi Tenggara	71,27	71,37	13,68	13,69	9,13	9,25	9.381.00	9.708.00	71,66	72,23

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

Pada Tahun 2022, pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara cukup bervariasi. IPM pada level kabupaten/kota berkisar antara 66,21 (Muna Barat) hingga 84,51 (Kota Kendari). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, umur Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 67,76 dan 67,78 (Buton Selatan dan Buton Tengah) hingga 73,93 (Kota Kendari). Sementara pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah berkisar antara 11,89 (Bombana) hingga 16,90 (Kota Kendari) serta Rata-rata Lama Sekolah berkisar antara 7,60 (Muna Barat) hingga 12,52 (Kota Kendari). Pengeluaran per kapita level kabupaten/ kota berkisar antara Rp. 7.192.000,- (Konawe Kepulauan) hingga Rp. 14.765.000,- (Kota Kendari).

Kemajuan pembangunan manusia pada tahun 2022 juga terlihat dari status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota. Jumlah kabupaten yang berstatus tinggi sebanyak 6 Kabupaten/Kota (Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Utara dan Kota Bau-Bau) dan 1 kota berstatus sangat tinggi yaitu Kota Kendari. Sedangkan 10 Kabupaten lainnya berada pada status sedang. Dimana klasifikasi indeks pembangunan manusia (IPM) dikatakan rendah jika kurang dari 60, sedang jika berada antara 60 sampai 69, tinggi 70-79 dan 80 keatas dikatakan sangat tinggi.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Standar UNDP minimal 0 persen dan maksimal 100 persen.

Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun keatas di Sulawesi Tenggara telah mencapai diatas 94,91 persen. Sejak lima tahun terakhir, antara tahun 2017 hingga tahun 2021, AMH penduduk usia 15 tahun keatas terus mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2017 AMH penduduk usia 15 tahun keatas mencapai 94,32 persen, tahun 2018 meningkat 94,46 persen, tahun 2019 meningkat 94,91, tahun 2020 Angka Melek Huruf meningkat yaitu 95,00 persen dan tahun 2021 tidak terlalu meningkat, mencapai 94,91 persen.

Tabel 2.25. Capaian dan Target Kinerja Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang Melek Huruf di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024

Uraian	Capaian Kinerja					Target Kinera	
	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023	2024
Angka Melek Huruf	94,46	94,91	95,00	94,94			

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Angka Melek Huruf di Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2018 sd 2020 mengalami peningkatan yang tidak terlalu cukup signifikan. Tahun 2021, Angka Melek Huruf mengalami penurunan menkabupaten/ kota antara tahun 2016 terendah adalah Kabupaten Buton sebesar 86,65 persen dan tertinggi adalah Kota Kendari sebesar 98,69 persen. Pada tahun 2020 capaian terendah adalah Kabupaten Buton sebesar 98,57 persen sedangkan tertinggi berada pada 14 Kab/Kota sebesar 100 persen.

Tabel 2.26. Perkembangan Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020

No.	Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja		
		2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1.	Buton	90.50	92,10	99.57
2.	Muna	93.27	90,77	99.62
3.	Konawe	95.82	96,26	100.00
4.	Kolaka	96.08	95,99	100.00
5.	Konawe Selatan	94.29	95,56	100.00
6.	Bombana	92.83	92,63	100.00
7.	Wakatobi	89.30	93,33	100.00
8.	Kolaka Utara	93.08	94,07	100.00
9.	Buton Utara	96.20	94,33	100.00
10.	Konawe Utara	95.33	95,86	100.00
11.	Kolaka Timur	96.66	95,49	100.00
12.	Konawe Kepulauan	97.39	97,01	100.00
13.	Muna Barat	88.33	88,35	100.00
14.	Buton Tengah	84.82	88,08	100.00
15.	Buton Selatan	88.84	92,35	100.00
16.	Kendari	98.93	99,32	99.87
17.	Baubau	96.18	96,66	100.00

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2021

b. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun dan level nasional mencanangkan Program Wajib Belajar 12 tahun. Pada grafik di bawah ini digambarkan rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut :



Gambar 2.11. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2017-2021

Perkembangan rata-rata lama sekolah di Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, bahkan Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara lebih tinggi dibanding Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Nasional, hal ini bisa dilihat pada Grafik di atas.

Tabel 2.27. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2018-2021

No.	Provinsi/Kab/Kota	Capaian Kinerja			
		2018	2019	2020	2021
1.	Buton	7,50	7,51	7,92	7,71
2.	Muna	8,19	8,35	8,46	8,36
3.	Konawe	8,94	9,14	9,21	9,15
4.	Kolaka	8,57	8,76	8,99	8,98
5.	Konawe Selatan	7,73	7,74	8,11	7,86
6.	Bombana	7,54	7,74	8,04	8,03
7.	Wakatobi	7,72	7,73	8,16	7,94
8.	Kolaka Utara	7,67	7,86	8,22	8,12
9.	Buton Utara	8,54	8,75	8,93	8,92
10.	Konawe Utara	8,81	8,97	9,30	9,21
11.	Kolaka Timur	7,18	7,35	7,84	7,56
12.	Konawe Kepulauan	9,17	9,18	9,42	9,41
13.	Muna Barat	6,76	6,77	7,30	7,01
14.	Buton Tengah	7,28	7,29	7,31	7,30
15.	Buton Selatan	6,01	7,32	7,54	7,53
16.	Kendari	11,69	11,94	12,51	12,20
17.	Baubau	10,13	10,13	10,91	10,64

No.	Provinsi/Kab/Kota	Capaian Kinerja			
		2018	2019	2020	2021
	Sulawesi Tenggara	8,46	8,69	9,13	9,04

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2021

c. Angka Usia Harapan Hidup

Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi yang secara tak langsung dapat meningkatkan angka harapan hidup. Angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup penduduk Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun terus meningkat. Walaupun secara keseluruhan Angka Usia Harapan Hidup Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan, namun pada tahun 2021 hanya 2 kabupaten/kota yang memiliki Angka Usia Harapan Hidup diatas rata-rata provinsi, yaitu : Kolaka Timur (72,82 tahun) dan Kota Kendari (73,83 tahun).

Meningkatnya atau menurunnya angka harapan hidup tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi, diantaranya ketersediaan sarana kesehatan yang memadai, petugas kesehatan yang kompeten dan kesadaran masyarakat.

Tabel 2.28. Usia Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja				
	2018	2019	2020	2021	2022
Buton	67,60	67,92	68,25	68,39	68,46
Muna	69,97	70,18	70,39	70,41	70,47
Konawe	69,76	70,02	70,27	70,32	70,38
Kolaka	70,38	70,72	71,06	71,21	71,30
Konawe Selatan	70,24	70,52	70,80	70,87	70,95
Bombana	68,17	68,54	68,91	69,09	69,20
Wakatobi	69,85	70,13	70,41	70,48	70,59
Kolaka Utara	69,94	70,15	70,36	70,36	70,40
Buton Utara	70,56	70,75	70,93	70,93	70,96
Konawe Utara	68,95	69,23	69,51	69,53	69,59
Kolaka Timur	71,99	72,33	72,67	72,82	72,90
Konawe Kepulauan	68,06	68,25	68,43	68,43	68,46
Muna Barat	69,97	70,16	70,34	70,35	70,39
Buton Tengah	67,33	67,50	67,66	67,69	67,78
Buton Selatan	67,33	67,50	67,66	67,69	67,76
Kota Kendari	73,26	73,52	73,77	73,83	73,93
Kota Baubau	70,72	70,95	71,19	71,25	71,36
Sulawesi Tenggara	70,72	70,97	71,22	71,27	71,37

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

d. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi memberikan gambaran kemampuan seorang anak dalam periode usia dibawah 12 bulan. Angka kelangsungan hidup merupakan indikator yang memberikan gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat. Angka ini selain memberikan gambaran kondisi ekonomi juga memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas khususnya pada ibu hamil. Hasil estimasi yang dilakukan berdasarkan SDKI tahun 2017 dan laporan kematian bayi menunjukkan bahwa AKHB di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun yakni dari 989 per 1000 KH menjadi 990

per 1000 KH tahun 2018 dan terus meningkat pada tahun 2019-2021 yakni sebesar 991 per 1000 KH..

Dalam menilai derajat kesehatan masyarakat, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan. Indikator-Indikator tersebut pada umumnya tercermin dalam kondisi mortalitas, morbiditas dan status gizi. Mortalitas menggambarkan perkembangan derajat kesehatan masyarakat terlihat dari kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Di samping itu kejadian kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan program pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan selama ini adalah dengan melihat perkembangan angka kematian dari tahun ke tahun. Angka kematian yang biasanya dijadikan indikator, yaitu Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Harapan Hidup (AHH). Adapun kecenderungan pencapaian indikator aspek kesejahteraan disajikan seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.29 Pencapaian Indikator Kesejahteraan Bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2022

Indikator	Capaian Kinerja				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup (tahun)	70,76	70,88	71,22	71,27	71,37
Angka Kelangsungan Hidup Bayi	990	991	991	991	
Jumlah Kasus Kematian Ibu	60	66	56	117	
Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Balita	445	484	428	411	
Pravalensi Balita Gizi Buruk	209	271	1,4	5,9	

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2023

Pada tabel di atas menunjukkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya umur harapan hidup, pada tahun 2017 Angka Harapan Hidup Penduduk Sulawesi Tenggara mencapai 70,59 tahun, kemudian dari tahun ke tahun terus bertambah hingga mencapai angka 71,27 tahun pada tahun 2021. Meningkatnya angka harapan hidup secara tidak langsung juga memberi gambaran tentang adanya peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat.

Jumlah kasus gizi buruk yang dilaporkan menunjukkan penurunan yakni dari 215 kasus tahun 2017 turun menjadi 209 kasus tahun 2018 kemudian meningkat pada tahun 2019 yakni sebesar 271 kasus. Semua kasus yang ditemukan telah diintervensi dan beberapa diantaranya dirujuk ke rumah sakit dan puskesmas perawatan.

Jumlah kasus kematian ibu dalam lima tahun terakhir penurunan yakni dari 73 kasus tahun 2017 menjadi 60 kasus tahun 2018. Kasus kematian bayi dan anak balita menunjukkan penurunan pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun 2020. Kasus kematian bayi turun dari 428 kasus menjadi 411 kasus. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan anak diantaranya peningkatan kapasitas tenaga, kunjungan neonatal, pelayanan kesehatan bayi, pelayanan kesehatan balita, penanganan komplikasi neonatal, deteksi dini tumbuh kembang bayi serta kegiatan yang sifatnya dukungan manajemen.

Salah satu indikator kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapaiannya dalam SDGs adalah Status Gizi Balita. Status gizi balita diukur berdasarkan umur, Berat Badan (BB) dan Tinggi Badan (TB). Variabel BB dan TB disajikan dalam bentuk 3 indikator antropometri, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umum

(TB/U) dan Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB). Indikator BB/U memberikan indikasi masalah gizi secara umum. Indikator ini tidak memberikan indikasi tentang masalah gizi yang sifatnya kronis ataupun akut karena berat badan berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badan. Dengan kata lain berat badan yang rendah dapat disebabkan karena anaknya pendek (kronis) atau karena diare atau penyakit infeksi lainnya (akut) Indikator TB/U memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya kronis sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama, misalnya : kemiskinan, perilaku hidup sehat dan pola asuh/pemberian makanan yang kurang baik dari sejak anak dilahirkan yang mengakibatkan anak menjadi pendek.

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan penduduk yang tidak bekerja atau pengangguran. Jumlah Angkatan Kerja Sulawesi Tenggara pada Februari 2021 sebanyak 1.970.728 orang, dibanding Februari 2020 sebanyak 1.852.420 orang. Penduduk yang bekerja pada Februari 2021 sebanyak 1.327.069 orang, dibanding keadaan setahun lalu dan bertambah 1.274.067 orang. Sementara itu, jumlah pengangguran pada tahun 2021 sebanyak 27.983 orang, mengalami penurunan sekitar 13.789 orang.

Tabel 2.30. Penduduk Usia 15 tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022

Kegiatan Utama	Februari 2018	Februari 2019	Februari 2020	Februari 2021
Penduduk Usia Kerja	1.768.949	1.810.345	1.852.420	1.970.728
Angkatan Kerja	1.286.623	1.296.494	1.315.839	1.381.203
Bekerja	1.250.729	1.258.102	1.274.067	1.327.069
Pengangguran	35.894	38.392	41.772	27.983
Bukan Angkatan Kerja	482.326	513.851	536.581	589.525
Sekolah	158.693	167.054	171.664	150.296
Mengurus Rumah Tangga	281.595	298.083	313.524	377.233
Lainnya	42.038	48.714	51.393	61.996
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	72,73	71,62	71,03	70,09
Tingkat Pengangguran (persen)	2,79	2,96	3,17	3,9

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023, Sakernas 2018-2022

Terkait dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), TPAK di Sulawesi Tenggara berfluktuasi, meskipun menunjukkan tren positif. TPAK pada Februari 2019 tercatat sebesar 71,62 persen, sementara Februari 2020 mencapai 71,03 persen, turun 0,59 persen poin. Sementara Februari 2021 semakin menurun menjadi 70,09 persen. TPAK yang fluktuatif memberikan indikasi adanya potensi ekonomi yang masih belum stabil dalam hal pasokan (*supply*) tenaga kerja.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya, Olahraga dan Kepemudaan

Pembangunan bidang olahraga dan kepemudaan sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Perkembangan Olahraga dan kepemudaan di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 2.31. Capaian dan Target Kinerja Perkembangan Olahraga dan Kepemudaan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2024

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Nilai Lakip Minimal B	100%	100%	100%	-	-	-	-
2	Persentase Pemuda yang aktif pada kegiatan kepemudaan	100%	100%	100%	-	-	-	-
3	Pemuda dalam berwirausaha (orang)	150	250		-	-	-	-
4	Persentase Pemuda/masyarakat yang meningkat kebugarannya	73%	75%		-	-	-	-
5	Cakupan Pemberdayaan Pemuda (orang)	-	-	-	75%	83%	100%	100%
6	Cakupan Prestasi Olahraga	-	-	-	85%	85%	100%	100%
7	Cakupan Organisasi Pemuda	-	-	-	75%	78%	100%	100%
8	Nilai LAKIP							BB (72)

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2018-2020 terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu (1) Persentase Nilai Lakip Minimal B, (2) Persentase Pemuda yang aktif pada kegiatan kepemudaan dan (3) 3. Pemuda dalam berwirausaha dan 4. Persentase Pemuda/Masyarakat yang meningkat kebugarannya. Pada Tahun 2021-2023 terjadi perubahan indikator Kinerja Utama sesuai dengan nomenklatur yang telah ditetapkan di setiap OPD dengan dasar tersebut IKU Diskepora pun mengalami perubahan. Cakupan Pemberdayaan Pemuda tahun 2021-2022 merupakan kegiatan pemuda yang dilaksanakan untuk membangun sumber daya manusia bagi pemuda, adapun bentuk kegiatan kepemudaan terfokus pada pengembangan karakter kepemimpinan pemuda serta meningkatkan perekonomian mandiri pemuda dalam bentuk kegiatan wirausaha bagi pemuda.

Cakupan Prestasi Olahraga tahun 2021-2022 faktor pendukung peningkatan prestasi khususnya di tahun 2021 yaitu pelaksanaan kegiatan pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua, Sulawesi Tenggara Berhasil mendapatkan Prestasi dengan 5 medali Emas 5 medali Perak dan 5 medali perunggu dan meningkatnya jumlah atlet Sulawesi Tenggara yang mengikuti iven Sea Games, Asian Games bahkan Olimpiade.

Cakupan Organisasi Pemuda tahun 2021-2022 Dinas Kepemudaan melakukan pemeliharaan Organisasi kepemudaan yang menjadi binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sultra serta di dukung oleh organisasi lain seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Organisasi lainnya.

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung

jawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.3.1. Fokus Urusan Layanan Wajib Dasar

a. Urusan Pendidikan

1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK Pendidikan Atas Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurun waktu 4 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 dan 2019 APK Pendidikan Atas mencapai 84,83 persen, tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 89,50 persen.

Tabel 2.32. Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022

Indikator	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SMA/SMK/MA	84,83	86,81	87,74	89,50	89,14	98,05	107,86

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan disuatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

APM Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2018-2021 mengalami sedikit peningkatan tiap tahunnya. Untuk meningkatkan APM Pendidikan Atas sangat diharapkan peran aktif masyarakat dalam mendukung program wajib belajar 12 tahun, sehingga dengan pendidikan yang tinggi akan sangat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.33. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2022

Indikator	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SMA/SMK/MA	62,87	62,92	63,41	63,70	64,11	70,521	77,5731

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2023

3) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16 – 18 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia

sekolah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 2.34. Capaian dan Target Kinerja Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024

Indikator	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
APS Penduduk Usia 16 – 18 Tahun	73,47	73,94	74,50	75,02	86,04	94,64	104,11

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Perkembangan capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Sulawesi Tenggara untuk APS Penduduk Usia 16 – 18 Tahun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan setiap tahunnya.

4) Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/MA/SMK

Angka Putus Sekolah (APTS) merupakan salah satu tolok ukur kemajuan pembangunan bidang pendidikan untuk melihat keterjangkauan maupun pemerataan pendidikan. Tantangan upaya pemenuhan pendidikan salah satunya adalah permasalahan adanya anak yang putus sekolah sebelum menuntaskan pendidikannya dengan berbagai alasan seperti tidak adanya biaya, bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, ataupun alasan lainnya. Gangguan belajar pada siswa sekolah baik yang disebabkan oleh faktor internal (kurangnya motivasi sekolah, kemampuan belajar yang kurang) maupun yang disebabkan oleh faktor eksternal dapat menjadikan siswa putus sekolah/berhenti sekolah.

Tabel 2.35. Capaian dan Target Kinerja Perkembangan Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/MA/SMK Tahun 2018-2024

Indikator	Capaian Target Kinerja					Target Kinerja	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
APTS SMA/SMK/MA	26,53	26,06	25,5	24,98	13,96	12,50	12,00

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

5) Angka Kelulusan

Salah satu indikator utama pembangunan pendidikan adalah angka kelulusan. Perkembangan angka kelulusan 5 (Lima) tahun terakhir dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mencapai 100 persen. Hal menunjukkan bahwa kualitas pembangunan pendidikan meningkat dari tahun ke tahun. Target angka kelulusan untuk tahun berjalan (2023) dan tahun depan (2024) juga ditargetkan mencapai angka 100 persen. Perkembangan Angka kelulusan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018–2021 sebagai berikut :

Tabel 2.36. Capaian dan Target Kinerja Angka Kelulusan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024

Tahun	SMA (persen)	SMK (persen)
Capaian		
2018	100	100
2019	100	100

Tahun	SMA (persen)	SMK (persen)
2020	100	100
2021	100	100
2022	100	100
Target		
2023	100	100
2024	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

6) Angka Melanjutkan Sekolah

Perkembangan Angka Melanjutkan Sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.37. Capaian dan Target Kinerja Angka Melanjutkan (AM) Sekolah Dasar hingga Menengah Atas di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 - 2024

Indikator	Capaian Kinerja			Target Kinerja	
	2020	2021	2022	2023	2024
Siswa Baru SMA/SMK	44.045	44.045	47.159	51.874	57.062
Angka Melanjutkan (persen)	101,90	111,00	104,62	115,08	126,59

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara (PDSPK) Tahun 2023

7) Fasilitas Pendidikan

Fasilitas Pendidikan adalah semua sarana dan prasarana yang mendukung aktifitas pembelajaran. Kondisi Bangunan Sekolah di Sulawesi Tenggara digambarkan pada tabel di berikut ini :

Tabel 2.38. Fasilitas Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024

No.	Indikator	Capaian Target Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Ruang Kelas Baik (SMA)	38,37%	23,51%	38,58%	35,35%	47,94%	50,00%	51,00%
2.	Persentase Ruang Kelas Baik Terhadap Ruang Kelas (SMK)	40,80%	18,28%	37,91%	36,76%	47,61%	49,00%	50,00%
3.	Persentase Ruang Kelas Baik Terhadap Ruang Kelas (SLB)	26,57%	6,11%	16,41%	19,48%	33,96%	35,00%	36,00%

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Tabel 2.39. Sarana dan Prasarana Pendidikan Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022

No.	Kab/Kota	SARANA DAN PRASARANA											
		SMA				SMK				SLB			
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Bombana	197	63	87	59	100	16	15	27	0	0	6	9
2	Buton	184	100	57	58	47	32	21	23	4	0	0	0

No.	Kab/Kota	SARANA DAN PRASARANA											
		SMA				SMK				SLB			
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
3	Buton Selatan	212	38	30	44	24	19	6	1	0	0	0	0
4	Buton Tengah	137	96	104	8	63	19	38	6	9	12	0	0
5	Buton Utara	137	13	22	35	38	10	16	22	15	3	0	0
6	Kolaka	191	112	26	17	159	48	47	41	29	36	34	12
7	Kolaka Timur	122	59	33	23	91	26	21	2	15	0	0	0
8	Kolaka Utara	43	59	57	38	98	12	10	8	0	0	0	0
9	Konawe	298	144	58	60	137	28	13	26	90	16	32	0
10	Konawe Kep.	26	33	25	24	21	3	9	6	0	2	0	0
11	Konawe Selatan	294	140	76	71	45	65	59	28	17	17	2	9
12	Konawe Utara	96	28	50	34	23	6	10	0	0	6	6	0
13	Muna	327	147	80	151	135	87	110	67	46	108	43	83
14	Muna Barat	139	31	57	44	65	12	45	6	48	15	10	4
15	Wakatobi	107	78	80	84	17	33	8	5	1	0	7	6
16	Baubau	179	84	38	41	79	86	55	20	55	18	14	2
17	Kendari	364	185	91	68	297	54	63	44	24	61	19	36
	Sulawesi Tenggara	3053	1410	971	859	1439	556	546	332	353	294	173	161

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

8) Sertifikasi Guru

Tabel 2.40. Data Sertifikasi Guru SMA, SMK dan SLB Prov. Sultra Tahun 2022

No	Kab/Kota	Jumlah Guru Bersertifikasi pada Jenjang Pendidikan		
		SMA	SMK	SLB
1.	Bombana	179	80	0
2.	Buton	174	41	0
3.	Buton Selatan	110	18	
4.	Buton Tengah	114	16	0
5.	Buton Utara	112	25	1
6.	Kolaka	202	173	2
7.	Kolaka Timur	106	68	1
8.	Kolaka Utara	132	68	
9.	Konawe	337	82	5
10.	Konawe Kepulauan	35	15	0
11.	Konawe Selatan	254	60	5
12.	Konawe Utara	89	10	0
13.	Muna	435	187	42
14.	Muna Barat	131	47	8
15.	Wakatobi	167	17	1
16.	Baubau	308	197	9
17.	Kendari	501	352	15
Sulawesi Tenggara		3.386	1.456	89

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

9) SPM Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 100 tahun 2018 yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM), menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya di bidang pendidikan berwenang terhadap penyelenggaraan SPM Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus/layanan khusus, hal ini juga diperkuat dengan adanya Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 yang juga mengatur tentang SPM khususnya SPM bidang Pendidikan.

Tabel 2.41. Capaian dan Target Kinerja SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Capaian Target Kinerja										Target Kinerja	
			2018		2019		2020		2021		2022		2023	2024
			TN/ KL	C	TN/ KL	C	TN/ KL	C	TN/ KL	C	TN/ KL	C		
1	Pendidikan Menengah	Jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	9.76 5.48 8	122. 466	9.88 7.78 7	125. 183	10.05 1.919	128. 756	10.16 4.653	130. 292	10.16 7.617	129. 420	130. 000	131. 000
2	Pendidikan Khusus	Jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	132. 642	2.87 3	138. 984	2.88 6	141.9 24	2.89 7	142.1 67	2.67 1	150.8 28	2.74 2	2.80 0	2.90 0

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah siswa pendidikan menengah dari tahun ketahun. Demikian juga pada jumlah penduduk yang terserap pada satuan pendidikan khusus/layanan khusus. Hal tersebut berimplikasi pada peningkatan APK dan APM yang menunjukkan makin meningkatnya animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Tingginya angka putus sekolah pada kedua jenjang

pendidikan tersebut cukup tinggi yang disebabkan oleh factor sosial, ekonomi dan kondisi geografis yang sulit.

Adapun masalah dalam pencapaian SPM pendidikan di Sulawesi Tenggara, secara umum didominasi oleh 3 (tiga) masalah utama yaitu: (1) masih kurangnya sarana prasarana pendidikan di daerah 3T, (2) masih rendahnya kualitas sarana prasarana pendidikan khususnya pendidikan khusus/layanan khusus dan (3) kurangnya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan.

b. Urusan Kesehatan

1) Perkembangan Fasilitas Kesehatan

Perkembangan fasilitas kesehatan di Sulawesi Tenggara semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap tingkat derajat kesehatan masyarakat. Secara rinci perkembangan pembangunan fasilitas kesehatan di Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.42. Capaian Kinerja Perkembangan Fasilitas Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2022

Jenis Fasilitas	Capaian Target Kinerja				
	2018	2019	2020	2021	2022
Puskesmas :					
- Puskesmas Perawatan	86	94	98	106	105
- Puskesmas Non Perawatan	196	195	194	187	191
Jaringan Puskesmas :					
- Puskesmas Keliling	159	161	241	198	122
- Puskesmas Pembantu	493	493	504	492	431
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) :					
- Polindes & Poskesdes	1.157	1.157	1.044	1.069	
- Posyandu	3.137	3.200	3.231	3.260	3268
Rumah Sakit :					
- Rumah Sakit Umum	36	36	33	37	34
- Rumah Sakit Jiwa	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

a) Puskesmas

Jumlah Puskesmas Non Perawatan selama lima tahun terakhir terus meningkat, yaitu sebanyak 186 unit pada tahun 2017, lalu meningkat menjadi 187 unit pada tahun 2021. Jumlah Puskesmas Perawatan 2017 berjumlah 93 unit dan meningkat menjadi 187 unit di tahun 2021. Jaringan Puskesmas keliling meningkat dari 132 unit tahun 2017 menjadi 198 unit pada tahun 2021.

Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk di provinsi Sulawesi Tenggara sudah terpenuhi namun untuk wilayah Sulawesi Tenggara yang luas wilayahnya sehingga jumlah penduduknya tersebar dan tidak merata didukung juga dengan kondisi geografis yang sulit, sehingga Rasio puskesmas digunakan berdasarkan kecamatan yaitu setiap 1 kecamatan memiliki minimal 1 puskesmas. Maka jika dibandingkan jumlah puskesmas yaitu 293 puskesmas terhadap jumlah kecamatan yaitu 219 kecamatan maka diperoleh rasio 1,3 artinya setiap kecamatan memiliki 1 atau 2 puskesmas.

b) Rumah Sakit

Jumlah rumah sakit di Provinsi Sulawesi Tenggara terus bertambah, pada tahun 2019 sudah mencapai 37 RS. Jumlah ini terjadi penurunan pada tahun 2020 yakni sebanyak 34 RS dikarenakan oleh adanya 3 (tiga) RS yang masih teregistrasi namun izin operasionalnya dihentikan/tidak berlaku lagi yaitu RS Griya Husada, RS PMI dan RS Mitra sakinah Konawe. Jumlah tersebut termasuk RS Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI/Polri, BUMN, dan RS Swasta.

c) Poskesdes dan Polindes

Periode tahun 2017 – 2021 poskesdes dan polindes di Sulawesi Tenggara rata-rata mengalami penurunan sejak tahun 2017 dan pada tahun 2017 poskesdes dan polindes berjumlah 1.157 unit yang terdistribusi di 17 kabupaten/kota sedangkan pada tahun 2021 jumlah poskesdes dan polindes berkurang menjadi 1.069 unit.

Poskesdes adalah singkatan dari pos kesehatan desa, dimana lembaga ini adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang berfungsi sebagai wadah bagi kesehatan masyarakat desa. Poskesdes siap melayani segala keluhan masyarakat mengenai kesehatan desa sebelum penanganan lebih lanjut ke puskesmas lalu ke rumah sakit.

Poskesdes berperan penting terhadap tingkat kesadaran masyarakat mengenai kesehatan yang mana untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawatdaruratan secara mandiri. Persediaan obat yang ada di poskesdes itu didatangkan dari puskesmas terdekat. Biasanya obat-obat tersebut didatangkan setiap 3 bulan sekali.

Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah wujud upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat atas dasar musyawarah masyarakat desa dalam rangka :

- (1) Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat desa.
- (2) Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap penyakit dan masalah-masalah kesehatan.
- (3) Meningkatkan kemampuan masyarakat desa untuk menolong diri sendiri dalam bidang kesehatan.
- (4) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh masyarakat desa dan tenaga kesehatan.
- (5) Meningkatkan dukungan dan peran aktif berbagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat desa ditandai dengan terbentuknya Ambulans Siaga, Donor Siaga dan Dana Sehat.

d) Posyandu

Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang paling dikenal oleh masyarakat, dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat. Posyandu menyelenggarakan minimal 5 program prioritas, yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi, dan penanggulangan diare.

Di Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri berdasarkan data yang ada menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan posyandu yang cukup baik di mana peningkatan jumlah posyandu dari 3.182 di tahun 2017 meningkat menjadi 3260 di tahun 2021. Rasio posyandu dalam kurun waktu 5 tahun periode tahun 2017–2021 dengan rasio posyandu

terhadap desa/kelurahan mencapai 1,38 atau terdapat 1–2 posyandu setiap desa/kelurahan.

2) Cakupan Penyediaan Tenaga Kesehatan

Dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di daerah salah satunya dengan melihat jumlah tenaga kesehatan. Berikut ini gambaran ketersediaan tenaga kesehatan menurut kabupaten/kota lebih rinci dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43. Cakupan Penyediaan Tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022

No	Indikator	Capaian Target Kinerja					Target	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dokter Spesialis	255	320	254	273	278	295	310
	Rasio (11 per 100.000 penduduk)	9.65	11.83	9,68	9,95	10,13	10,75	11,3
2.	Dokter Umum	435	535	684	800	844	875	905
	Rasio (45 per 100.000 penduduk)	16.46	19.78	26,06	29,16	30,77	31,89	32,99
3.	Dokter Gigi	182	227	220	252	262	275	280
	Rasio (13 per 100.000 penduduk)	6.89	8.39	6,38	9,19	9,55	10,02	10,20
4.	Perawat	4.803	4.691	6.058	7408	9320	9380	9410
	Rasio (180 per 100.000 penduduk)	181.74	173.44	230,8	270,05	340	341,9	343,03
5.	Bidan	3.963	3.231	4.496	5492	7972	8000	8012
	Rasio (120 per 100.000 penduduk)	149.96	119.46	171,3	200,21	290,61	291,63	292,07
6.	Farmasi	745	855	995	1191	1617	1705	1725
	Rasio (36 per 100.000 penduduk)	28.19	31.61	37,91	43,42	58,95	62,15	62,88
7.	Ahli Gizi	616	619	845	750	1006	1020	1045
	Rasio (14 per 100.000 penduduk)	23.31	22.89	32	27	36,67	37,18	38,09
8.	Tenaga Sanitasi	393	456	490	474	687	702	785
	Rasio (13 per 100.000 penduduk)	14.87	16.86	18,67	17	25,04	25,59	28,61

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Tabel 2.44. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 - 2022

No.	Kabupaten / Kota	Tenaga Medis		Tenaga Keperawatan		Tenaga Kebidanan		Tenaga Kefarmasian		Tenaga Kesehatan lainnya	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	Buton	58	73	289	402	275	420	49	61	289	346

No.	Kabupaten / Kota	Tenaga Medis		Tenaga Keperawatan		Tenaga Kebidanan		Tenaga Kefarmasian		Tenaga Kesehatan lainnya	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
2.	Muna	98	92	847	1039	685	88	100	148	606	665
3.	Konawe	93	93	771	943	677	915	101	128	471	504
4.	Kolaka	92	99	636	790	410	618	103	113	356	363
5.	Konawe Selatan	55	81	396	501	550	656	59	101	394	451
6.	Bombana	67	79	335	416	337	386	60	81	256	254
7.	Wakatobi	51	51	241	396	129	349	59	79	225	341
8.	Kolaka Utara	58	74	305	489	221	555	57	87	255	311
9.	Buton Utara	27	30	224	285	222	261	38	49	222	232
10.	Konawe Utara	34	45	157	344	171	356	31	71	138	276
11.	Kolaka Timur	28	32	264	371	286	372	31	52	122	163
12.	Konawe Kepulauan	15	23	105	162	98	166	23	43	127	198
13.	Muna Barat	30	36	231	324	279	331	49	59	209	262
14.	Buton Tengah	33	38	304	348	268	290	32	47	190	193
15.	Buton Selatan	38	36	284	355	271	388	53	55	223	247
16.	Kendari	413	413	1430	1534	596	668	312	342	1043	923
17.	Baubau	118	114	589	621	292	355	83	101	353	409
Sulawesi Tenggara		1.308	1.409	7.408	9.320	5.767	7.972	1.240	1.617	5.479	6.138

Sumber : Aplikasi SI-DMK Kemenkes (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023)

Sumber Daya Manusia Kesehatan sangat berperan penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, menjelaskan pengertian tenaga kesehatannya itu setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pemenuhan tenaga kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2018 sampai tahun 2021 cukup berfluktuatif. Untuk dokter spesialis selain keberadaan dokter spesialis PNS, juga didukung dokter spesialis melalui program Wajib Kerja Dokter Spesialis dari Kementerian Kesehatan R.I yang ditempatkan di Rumah Sakit kabupaten namun bersifat *temporary*, serta dokter spesialis yang dikontrak oleh pemerintah kabupaten. Diharapkan peningkatan jumlah dokter spesialis di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilakukan dengan menyekolahkan dokter umum yang sudah PNS kejenjang spesialis oleh pemerintah provinsi dan kabupaten sehingga setelah mereka selesai dapat Kembali ke daerah masing-masing untuk mengabdikan ilmunya kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Untuk dokter umum sampai dengan tahun 2021 berdasarkan table diatas juga terus meningkat, baik dokter yang PNS dan PTT. Adanya dokter umum dengan status PTT sampai masa kontrak 2 tahun akan mempengaruhi keberadaannya khususnya di Puskesmas. Keberadaan Fakultas Kedokteran untuk dokter umum di Universitas

Haluoleo diharapkan dapat mencetak alumni-alumni kedokteran yang berkualitas dan dapat diangkat menjadi PNS serta bersedia ditugaskan Puskesmas seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara itu peralatan kesehatan yang berhubungan dengan tugas dokter gigi belum memadai di Puskesmas apalagi di daerah terpencil. Disamping itu belum adanya fakultas kedokteran gigi di Universitas Provinsi ini juga merupakan Pekerjaan Rumah yang perlu dipikirkan bersama antara pemerintah provinsi dan pihak universitas khususnya Universitas Haluoleo agar ke depannya dibuka Fakultas Kedokteran gigi untuk mengakomodir tenaga dokter gigi.

Pemenuhan jenis tenaga bidan, nutrisionis dan perawat di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai tahun 2021 juga berfluktuasi, selain yang berstatus PNS termasuk PNS dari alumni Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan untuk program gizi, kebidanan dan keperawatan dikabupaten/kota, juga didukung dengan adanya program PTT khususnya untuk bidan, selanjutnya Program Nusantara Sehat dan Penugasan Khusus untuk bidan, perawat, nutrisionis.

Tenaga farmasi/apoteker juga berfluktuatif dari sampai tahun 2021, banyaknya asisten apoteker beberapa tahun terakhir ini, salah satunya karena didukung oleh Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Khususnya Akdemi farmasi yang berada di Kendari, selain alumni dari luar provinsi Sulawesi tenggara yang penempatan CPNS di daerah ini. jenis tenaga ini juga masuk dalam analisis kebutuhan rencana kebutuhan untuk Program Nusantara sehat dan penugasan khusus dari pemerintah pusat yang akan ditempatkan di Puskesmas khususnya daerah terpencil. Namun demikian tantangan yang dialami, khususnya untuk status PNS, masih belum meratanya pendistribusian tenaga asisten apoteker di Puskesmas di seluruh kabupaten, masih ada Puskesmas yang tidak ada tenaga apoteker dan asisten apoteker padahal kalau dilihat dari rasionya, untuk tenaga asisten apoteker sudah melebihi target. Diharapkan pihak pemerintah kabupaten khususnya dinas kesehatan dapat mengoptimalkan Standar Ketenagaan Minimal tenaga asisten apoteker sehingga pendistribusiannya dapat lebih merata lagi.

3) Cakupan Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka mengukur keberhasilan capaian pelayanan kesehatan ada beberapa indikator yang digunakan yang meliputi indikator pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, perbaikan gizi, Pengendalian Penyakit, Pelayanan kesehatan masyarakat miskin, dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.45. Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2022

No	Indikator	Capaian Target Kinerja					Target	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Cakupan Penemuan dan Penanganan BTA Positif (persen)	82.7	83.43	83	91			
2.	Cakupan Desa UCI	89.52	88.56	85,46	73,5	78,5		
3.	Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap	93,06	89,75	94,31	88,7	87,3	90	91
4.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	77,4	77,3	75,73	75,8	72,6		
	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K6					44,6	60	60
5.	Cakupan Persalinan Tenaga Kesehatan Kompeten	84.80	86.80	99,73	87,8	81.4	82	84
6.	Penanganan Kasus Gizi Buruk	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Capaian Target Kinerja					Target	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7.	Cakupan Masyarakat Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dasar	100	100	100	100	100	100	100
8.	Cakupan Masyarakat Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Rujukan	100	100	100	100	100	100	100
9.	Cakupan Ketersediaan Obat dan Vaksin	85	90	85	90			
	Cakupan Ketersediaan Obat				90	92	94	96
	Cakupan Ketersediaan Vaksin							
10.	Cakupan Rumah Tangga dengan PHBS	36,23	53,15	56,15	58,6	55,9	75	80
11.	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas	24.4	30	57,13	69,35			
	Persentase Sarana Air Minum yang diawasi/diperiksa air minumnya sesuai standar			60	64	68	72	76
12.	Angka Kesakitan: Menurunnya Kasus Malaria per 1000 Penduduk	0.3	0.3	0,17	0,13	0.25		
13.	Angka Kesakitan: Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa (15-49 Thn) (persen)	0.009	0.013	0,18	0,3	0,245		
14.	Angka Kesakitan: Angka Kesakitan DBD Per 100.000 Penduduk	38,4	63,5	14,1	25,7	34	10	10
15.	Angka Kesakitan: Prevalensi Tuberculosis per 100.000 Penduduk	150.0	166.52	118	135			

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

4) Cakupan Penanganan Tuberculosis (TB)

Menurut *World Health Organization* (WHO) Tuberculosis atau TB merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis* yang pada umumnya mempengaruhi paru-paru. Tuberculosis (TB) merupakan masalah utama kesehatan global sebagai penyebab utama kematian pada jutaan orang setiap tahun di seluruh dunia setelah HIV. Tuberculosis lebih dikenal dengan TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium Tuberculosis*. Penyakit ini menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil Tuberculosis. Beban penyakit yang disebabkan oleh tuberculosis dapat diukur dengan *case notification rate* (CNR) dan prevalensi (didefinisikan sebagai jumlah kasus tuberculosis pada suatu titik waktu tertentu) dan mortalitas/kematian (didefinisikan sebagai jumlah kematian akibat tuberculosis dalam jangka waktu tertentu).

Proporsi pasien baru BTA (+) dari semua kasus TB proporsi pasien baru BTA+ dari semua kasus TB menggambarkan prioritas penemuan pasien TB yang menular diantara seluruh pasien TB baru yang diobati. Dalam usaha mengeliminir kasus baru, angka ini diharapkan tidak lebih rendah dari 65 persen. Apabila proporsi pasien baru BTA+ dibawah 65 persen maka hal itu menunjukkan mutu diagnosis yang rendah dan kurang memberikan prioritas untuk menemukan pasien yang menular (Pasien BTA+).

Tabel 2.46. Capaian dan Target Kinerja Penanganan Tuberculosis (TB) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2024

Indikator	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Capaian Penanganan Penyakit TB	82.7	83.43	83	91			

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

5) Cakupan Desa *Universal Child Immunization* (UCI)

Program imunisasi merupakan salah satu upaya untuk melindungi penduduk terhadap penyakit tertentu yang diberikan pada populasi yang dianggap rentan terjangkit penyakit menular, yaitu bayi, anak usia sekolah, wanita usia subur dan ibu hamil. UCI adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana >80 persen dari jumlah bayi (0 – 11) bulan yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap, pencapaian *Universal Child Immunization* (UCI) pada dasarnya merupakan cakupan imunisasi secara lengkap pada sekelompok bayi. Bila desa UCI dikaitkan dengan batasan suatu wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut menggambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat atau bayi terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

UCI adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana > 80 persen dari jumlah bayi (0 – 11) bulan yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Pencapaian UCI pada dasarnya merupakan cakupan imunisasi secara lengkap pada kelompok bayi. Bila cakupan UCI dikaitkan dengan batasan suatu wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut menggambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat atau bayi (*herd Immunity*) terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

Tabel 2.47. Capaian Program Imunisasi di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023

Indikator	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Capaian Program Imunisasi	89.52	88.56	85,46	73,5			

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

6) Cakupan Kunjungan Neonatal lengkap (KN lengkap)

Dewasa ini kematian bayi sebagian besar terjadi pada usia kurang dari satu bulan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah kematian neonatal diutamakan pada pemeliharaan kehamilan sebaik mungkin, pertolongan persalinan sesuai dengan standar pelayanan dan perawatan bayi baru lahir.

Kunjungan neonatal adalah kontak neonatal dengan tenaga kesehatan minimal 2 (dua) kali untuk mendapatkan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan neonatal, baik di dalam maupun di luar gedung puskesmas (termasuk bidan desa, polindes dan kunjungan rumah) dengan ketentuan :

- a) Kunjungan pertama, hari pertama sampai hari ketujuh (sejak 6 jam setelah lahir)
- b) Kunjungan kedua kali pada hari kedelapan sampai dengan hari kedua puluh delapan (8 sampai 28 hari)

- c) Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan bukan merupakan kunjungan neonatal.

Tabel 2.48. Capaian Kunjungan Neonatal Lengkap di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024

Indikator	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Capaian Kunjungan Neonatal Lengkap	93,06	89,75	94,31	88,7	87,3	90	91

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

7) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Pelayanan kesehatan ibu hamil diberikan kepada ibu hamil yang dilakukan oleh tenaga kesehatan difasilitas pelayanan kesehatan. Proses ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang dikelompokkan sesuai usia kehamilan menjadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan harus memenuhi elemen pelayanan sebagai berikut :

- a) Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.
- b) Pengukuran tekanan darah.
- c) Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LLA).
- d) Pengukuran tinggi puncak rahim (*fundus uteri*).
- e) Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid sesuai status imunisasi.
- f) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan.
- g) Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ).
- h) Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk keluarga berencana).
- i) Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya).
- j) Tatalaksana kasus.

Selain elemen tindakan yang harus dipenuhi, pelayanan kesehatan ibu hamil juga harus memenuhi frekuensi minimal di tiap trimester, yaitu satu kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), satu kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan dua kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu sampai persalinan). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan.

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trisemester dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil

dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ketenaga kesehatan.

Tabel 2.49. Capaian Kinerja dan Target Kunjungan Ibu Hamil di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024

Indikator	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Capaian Kunjungan Ibu Hamil	77,4	77,3	75,73	75,8	72.6		

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

8) Cakupan Persalinan Tenaga Kesehatan Berkompoten

Salah satu penyebab tingginya AKI adalah masih rendahnya pemanfaatan persalinan tenaga kesehatan. Kondisi geografis, persebaran penduduk, sosial budaya dan tingkat pendidikan yang rendah merupakan beberapa faktor penyebab rendahnya pemanfaatan persalinan tenaga kesehatan oleh masyarakat (Depkes, 2009). Cakupan persalinan tenaga kesehatan terlihat bahwa Sulawesi Tenggara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang cukup tinggi dalam pemanfaatan persalinan tenaga kesehatan.

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Sulawesi Tenggara dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan ibu yaitu, meningkatkan peran bidan desa melalui peningkatan keterampilan, fasilitas dan peralatan serta melakukan pendekatan kepada masyarakat.

Tabel 2.50. Capaian Kinerja dan Target Persalinan Tenaga Kesehatan Berkompoten di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024

Indikator	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Capaian Persalinan Tenaga Berkompoten	84.80	86.80	99,73	87,8			

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

9) Penanganan Kasus Gizi Buruk

Faktor utama terjadinya gizi buruk di Sulawesi Tenggara disebabkan oleh permasalahan ekonomi atau kemiskinan, hal tersebut sangat berkorelasi mengingat makin tinggi angka kemiskinan yang tercermin dari rendahnya tingkat pendapatan, makin tinggi pula potensi terjadinya balita gizi buruk. Penyebab lain terjadinya balita gizi buruk adalah pola asuh anak yang salah serta akibat penyakit terutama infeksi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selama ini memberikan perhatian serius terhadap penanganan kasus gizi buruk dengan menjadikan posyandu sebagai ujung tombak dalam melakukan pelayanan. Melalui posyandu, kita bisa memberikan pelayanan terhadap ibu hamil agar intens memeriksakan kehamilan, memberikan makanan tambahan ibu hamil, pemberian unsur zat besi pada ibu hamil, hingga pada paska kelahiran anaknya dengan cara memberikan pengetahuan tentang pemberian asupan gizi yang cukup kepada anak. Penanganan gizi buruk di Sulawesi

Tenggara periode tahun 2015 – 2021 rata-rata setiap tahunnya mencapai target 100 persen.

10) Cakupan Masyarakat Miskin Yang Mendapat Pelayanan Dasar

Salah satu program Pemerintah yaitu program jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin dengan tujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan hampir miskin agar tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien. Diharapkan dapat menurunkan kasus-kasus kesehatan bagi masyarakat miskin.

Pelayanan kesehatan yang bertumpuh pada masyarakat miskin dan terjangkau yaitu optimalisasi pemanfaatan pelayanan dasar atau pelayanan di tingkat puskesmas. Dari 283 Puskesmas di Sulawesi Tenggara, semua puskesmas aktif melakukan pelayanan kepada masyarakat baik itu masyarakat miskin maupun masyarakat umum. Periode tahun 2015 – 2021 cakupan pelayanan kesehatan trendnya bersifat tetap yaitu 100 persen.

11) Cakupan Masyarakat Miskin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Rujukan

Penerima manfaat pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan berbagai program pemerintah, baik itu program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dikenal dengan program jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas (Program pemerintah pusat) dan Jaminan kesehatan daerah (kabupaten) serta peserta PBP Bahteramas (provinsi). Pelayanan kesehatan bukan saja pada level pelayanan dasar atau Puskesmas namun juga pada tingkat lanjut atau rumah sakit diberikan pada masyarakat miskin dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

Cakupan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah rujukan pasien masyarakat miskin disarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu. Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan di Sulawesi Tenggara periode tahun 2015 – 2021 trendnya tetap yaitu rata-rata tiap tahun sejumlah 100 persen.

12) Cakupan Ketersediaan Obat dan Vaksin

Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan merupakan salah satu dari delapan sasaran strategis Kementerian Kesehatan serta Sasaran Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota memiliki peranan yang signifikan dalam memastikan ketersediaan obat esensial dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan terutama di puskesmas dengan melakukan penyediaan obat dan vaksin yang efektif, efisien dan akuntabel, guna mendukung dan mewujudkan sasaran strategis maupun sasaran program tersebut.

Kementerian Kesehatan telah menetapkan indikator rencana strategis tahun 2020-2024 terkait program kefarmasian dan alat Kesehatan, yaitu meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat Kesehatan. Indikator tercapainya sasaran hasil tersebut pada tahun 2020 – 2024 yaitu persentase Puskesmas dengan ketersediann obat esensial sebesar 85 persen – 100 persen, persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat esensial sebesar 77 persen – 85 persen, dan persentase Puskesmas dengan ketersediaan vaksin imunisasi dasar lengkap (IDL) sebesar 90 persen – 96,50 persen.

Pemantauan ketersediaan obat periode tahun 2020 – 2024 digunakan untuk mengetahui kondisi tingkat ketersediaan obat di Puskesmas. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menentukan langkah-langkah kebijakan yang akan diambil dimasa yang akan datang. Di era otonomi daerah, pengelolaan obat merupakan salah satu kewenangan yang diserahkan ke kabupaten/kota, kemudian didistribusikan ke Puskesmas di tiap kabupaten/kota tersebut. Adanya data ketersediaan obat di provinsi atau kabupaten/kota akan mempermudah penyusunan prioritas bantuan maupun intervensi program dimasa yang akan datang

Untuk mendapatkan gambaran ketersediaan obat dan vaksin di Sulawesi Tenggara, dilakukan pemantauan ketersediaan obat dan vaksin. Obat dan vaksin yang dipantau ketersediaannya merupakan obat dan vaksin indikator yang merupakan obat pendukung program tuberculosis, malaria, Kesehatan keluarga, gizi, dan imunisasi serta obat pelayanan Kesehatan dasar esensial yang terdapat di dalam Formularium Nasional. Pemantauan dan pengukuran tingkat ketersediaan dilakukan terhadap 40 item obat esensial dan 5 item vaksin imunisasi dasar lengkap, dengan target sasaran yaitu 292 puskesmas 17 kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini didasarkan adanya kebutuhan untuk melihat gambaran tingkat ketersediaan obat dan vaksin yang lebih menyeluruh.

Berdasarkan data dan perhitungan yang dilakukan oleh Kefarmasian dan Alat Kesehatan didapatkan bahwa pada persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial sebesar 84,55 di tahun 2020 dan meningkat sebesar 90,06 persen pada tahun 2021. Pada persentase Kabupaten/Kota dengan ketersediaan obat esensial sebesar 79,44 pada tahun 2020 dan meningkat sebesar 80,39 persen di tahun 2021, sedangkan untuk persentase Puskesmas dengan ketersediaan vaksin imunisasi dasar lengkap (IDL) di tahun 2020 sebesar 85,49 dan mengalami penurunan sebesar 82,73 persen di tahun 2021.

13) Cakupan PHBS di Rumah Tangga

Perilaku hidup masyarakat diukur dengan jumlah rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang dinilai berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Periode tahun 2017 – 2021 PHBS mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 PHBS mencapai 48,77 persen, tahun 2018 cakupan RT dengan PHBS 55 persen, tahun 2019 cakupan RT dengan PHBS 55 persen. Pada tahun 2020 16,15 persen dan tahun 2021 cakupan rumahtangga dengan PHBS yakni 58,5 persen.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. PHBS di rumah tangga dilakukan untuk mencapai Rumah Tangga Sehat. Rumah Tangga Sehat adalah rumah tangga yang melakukan 10 PHBS di rumah tangga yaitu :

- a) Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan
- b) Memberi bayi ASI Eksklusif
- c) Menimbang bayi dan balita
- d) Menggunakan air bersih
- e) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun
- f) Menggunakan jamban sehat
- g) Memberantas jentik di rumah
- h) Makan buah dan sayur setiap hari
- i) Melakukan aktivitas fisik setiap hari

j) Tidak merokok di dalam rumah.

14) Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas

Menurut permenkes RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Penyelenggaraan air minum dapat berasal dari badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan atau individu melakukan penyelenggaraan air minum. Tidak semua air dapat diminum, syarat-syarat kualitas air minum harus standar permenkes yang dimaksud.

Penduduk Sulawesi Tenggara menggunakan sumber air minum yang bervariasi seperti sumur gali terlindung (SGT), sumur gali dengan pompa air (SGP), sumur bor dengan pompa (SBP), terminal air (TA), mata air terlindung (MAT), penampungan air hujan (PAH) dan PDAM.

Periode tahun 2017 - 2021 di Sulawesi Tenggara, persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas dengan trend berfluktuasi pada tahun 2017 mencapai 54,87 persen masyarakat mengakses air minum yang berkualitas namun pada tahun 2018 terjadi penurunan sejumlah 24,4 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 sejumlah 30 persen dan 57,13 persen pada tahun 2020 namun terjadi peningkatan kembali pada tahun 2021 sebesar 69,35 persen.

15) Angka Penyakit Tidak Menular (Kardiovaskuler)

Setiap tahunnya lebih dari 36 juta orang meninggal karena Penyakit Tidak Menular (PTM) (63 persen dari seluruh kematian). Lebih dari 9 juta kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular terjadi sebelum usia 60 tahun, dan 90 persen dari kematian “dini” tersebut terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Secara global PTM penyebab kematian nomor satu setiap tahunnya adalah penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler adalah penyakit yang disebabkan gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah, seperti: Penyakit Jantung Koroner, Penyakit Gagal jantung atau Payah Jantung, Hipertensi dan Stroke.

Data Riskesdas tahun 2013 menunjukkan, prevalensi tertinggi untuk penyakit Kardiovaskuler di Indonesia adalah PJK, yakni sebesar 1,5 persen atau 2.650.340 orang. Dari prevalensi tersebut, angka tertinggi ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (4,4 persen atau 137.130 orang) dan terendah di Provinsi Riau (0,3 persen atau 12.321 orang), untuk Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 1,7 persen atau 26.170 orang. Sementara total wilayah timur Indonesia 2,2 persen atau 635.754 orang. angka tersebut mencapai 23,98 persen dari total seluruh Indonesia sebesar 2.650.340 orang.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa wilayah timur Indonesia berpotensi besar penyumbang penderita penyakit jantung di Indonesia. Sementara belum ada Rumah Sakit Khusus yang menangani jantung bertempat di wilayah timur Indonesia.

16) Angka Kesakitan Kasus Malaria

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit plasmodium yang hidup dan berkembang baik dalam sel darah merah manusia, ditularkan oleh nyamuk malaria (*Anopheles*) betina, dan dapat menyerang semua orang baik laki-laki maupun perempuan pada semua kelompok umur.

Sulawesi Tenggara periode tahun 2017-2021 dengan angka kesakitan malaria rata-rata per tahun 0,3 – 0,46 per 1000 penduduk, angka tersebut menunjukkan setiap

1000 penduduk akan beresiko 1 orang yang terkena malaria, trend ini menunjukkan penurunan setiap tahun namun tahun 2017 mengalami peningkatan 0,01 per 1000 penduduk. Pada tahun 2017 jumlah kasus positif malaria di Sulawesi Tenggara sebanyak 1.069 dengan angka kesakitan (*Annual parasite incidence/API*) per 1000 penduduk beresiko sebesar 0,41 sedikit lebih rendah dibanding tahun 2016. Pada tahun 2018 dan 2019 terus menurun yakni sebesar 0,3 persen dan mengalami peningkatan kasus pada tahun 2020 sekitar 0,16 persen dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 sekitar 0,12 persen.

Jumlah kasus malaria di Sulawesi Tenggara < 1,25 per 1000 penduduk yang artinya dengan API 0,46 telah memenuhi target. Capaian API tersebut juga sekaligus menunjukkan bahwa Sulawesi Tenggara termasuk dalam kategori rendah (API lebih kecil dari 1) untuk angka kesakitan malaria. Kematian akibat malaria yang dilaporkan sebanyak 2 kasus, keduanya berasal dari Kabupaten Muna sehingga *Case Fatality Rate* (CFR) untuk Sulawesi Tenggara mencapai 0,19 persen.

Permasalahan yang ditemui dalam pemberantasan penyakit malaria antara lain adalah kurangnya kegiatan yang dilakukan dalam rangka penemuan penderita, sehingga nilai ABER (*Annual blood examination rate*) masih sangat rendah dan di sisi lain nilai SPR (*slide Positive Rate*) masih cukup tinggi.

17) Angka Kesakitan Kasus HIV/AIDS

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *infeksi human immunodeficiency virus* yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah terinfeksi berbagai macam penyakit lainnya.

Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan sebagai pengidap HIV positif. Jumlah pengidap HIV positif dapat diketahui dengan 3 metode, yaitu layanan *voluntary, conselingand testing* (VCT), *zero survey*, dan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP).

Kejadian kasus HIV+ dan AIDS di Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, baik jumlah maupun wilayah penyebarannya, meskipun berbagai upaya preventif dan promotif yang dilakukan juga belum optimal sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui data dan fakta yang sesungguhnya mengenai penyebaran kasus HIV dan AIDS di Sulawesi Tenggara, meskipun mayoritas masyarakat tahu resiko dan bahaya perilaku yang beresiko tinggi tertular HIV dan AIDS.

Periode tahun 2017-2021 angka kesakitan prevalensi HIV pada populasi dewasa terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 angka kesakitan prevalensi HIV sebesar 0,08 persen meningkat pada tahun 2018 sebesar 0,09 persen dan pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 0,13 persen. Dari tahun 2020 ke 2021 menurun dari 0,18 persen menjadi 0,3 persen.

18) Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang masuk ke peredaran manusia melalui gigitan nyamuk dari genus *Aedes*, misalnya *aedes aegypti* atau *Aedes albopictus*. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan erat dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat.

Sulawesi Tenggara pada periode tahun 2017 - 2021 dengan Incidence Rate/Angka kesakitan DBD rata-rata per tahun berkisar 34,8 – 132,45 per 100.000

penduduk yang artinya setiap 100.000 penduduk terdapat 35 – 132 orang yang menderita DBD. Pada tahun 2017 Angka kesakitan DBD sekitar 35,68 persen, kemudian mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2018-2019 sebesar 34,8 persen, tahun 2020 sebesar 34,5 persen dan tahun 2021 penurunan angka Kesakitan DBD sekitar 24,6 persen.

19) Angka Kesakitan: Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 Penduduk

Angka kesakitan prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk adalah jumlah kasus tuberkulosis pada waktu tertentu dan di suatu wilayah tertentu setiap 100.000 penduduk. Angka untuk menggambarkan kecenderungan atau trend meningkat, tetap atau menurunnya kasus pada waktu dan wilayah tertentu. Periode tahun 2017 – 2021 trend prevalensi tuberkulosis Sulawesi Tenggara cenderung meningkat setiap tahunnya yakni 136,12 meningkat 150,59. Dan 166,52 Kecuali pada tahun 2020 menurun sejumlah 118 per 100.000 penduduk. Sedangkan tahun 2021 meningkat lagi menjadi 135 per 100.000 penduduk. Hal ini dapat dilihat pada tabel di atas.

Kasus tuberkulosis banyak terjadi pada kondisi lingkungan yang buruk dan padat penduduk serta banyak dipengaruhi oleh perilaku. Di Sulawesi Tenggara, penemuan kasus banyak ditemukan di Kota Kendari dan Kabupaten Muna pada tahun 2017. Dengan jumlah penemuan kasus baru 152 per 100.000 penduduk di Kota Kendari dan 4 per 100.000 di Kabupaten Muna. Penyebaran tuberkulosis melalui udara sehingga 1 orang yang terkena positif tuberkulosis dan berada di kota/kabupaten yang padat penduduk dan lingkungan buruk maka akan mempercepat dan memudahkan penyebaran tuberkulosis tersebut.

Selain urusan kesehatan di atas, Dinas Kesehatan Provinsi juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimum (SPM). SPM urusan kesehatan berdasarkan Kemendagri Nomor 100 tahun 2018 yaitu :

- Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi
- Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi

Data capaian SPM urusan Kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.51. Capaian dan Target Kinerja SPM Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2024

No.	Indikator	Capaian Target Kinerja										Target Kinerja (%)	
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	2024
		Target Nasional (%)	Capaian Kinerja Daerah (%)	Target Nasional (%)	Capaian Kinerja Daerah (%)	Target Nasional (%)	Capaian Kinerja Daerah (%)	Target Nasional (%)	Capaian Kinerja Daerah (%)	Target Nasional (%)	Capaian Kinerja Daerah (%)		
1.	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator	Capaian Target Kinerja										Target Kinerja (%)	
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	2024
		Target Nasional (%)	Capaian Kinerja Daerah (%)	Target Nasional (%)	Capaian Kinerja Daerah (%)	Target Nasional (%)	Capaian Kinerja Daerah (%)	Target Nasional (%)	Capaian Kinerja Daerah (%)	Target Nasional (%)	Capaian Kinerja Daerah (%)		
	Bencana Provinsi (%)												
2.	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM menyebutkan bahwa SPM urusan kesehatan di provinsi meliputi:

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan kegiatan pelayanan terhadap penduduk terkena dampak krisis kesehatan atau berpotensi bencana rutin dilakukan setiap tahun sejak tahun 2018 – 2022 ketika terjadi bencana. Pelayanan tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai program pemerintah, baik itu program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bekerjasama dengan pemerintah daerah kab/kota dan OPD terkait.

Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara telah berjalan melalui Program Mobil PSC (Public Safety Center) 119. Program Mobil PSC 119 merupakan program layanan cepat tanggap darurat dan promosi kesehatan. Apabila terjadi keadaan darurat, maka mobil tersebut akan langsung menuju ke tempat kejadian. Mobil PSC 119 dilengkapi dengan tempat tidur untuk korban dan peralatan medis lainnya. Mobil PSC 119 ini juga berfungsi untuk menyampaikan program dan informasi kesehatan kepada masyarakat.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan pada kejadian luar biasa (KLB) penyakit menular, keracunan makanan, keracunan bahan berbahaya lainnya masih menjadi masalah kesehatan masyarakat karena dapat menyebabkan jatuhnya korban kesakitan dan kematian yang besar, menyerap anggaran biaya yang besar dalam upaya penanggulangannya, berdampak pada sektor ekonomi, pariwisata serta berpotensi menyebar luas lintas kabupaten/kota, provinsi bahkan internasional yang membutuhkan

koordinasi dalam penanggulangannya. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi Sulawesi Tenggara pada periode tahun 2018 – 2022 bersifat konstan yaitu 100 persen. Kejadian luar biasa (KLB) provinsi Sulawesi Tenggara 3 (tiga) tahun terakhir atau tahun 2020, tahun 2021, dan 2022 yang ditangani yaitu kejadian luar biasa (KLB) Virus Corona Covid-19.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Pekerjaan Umum

Ketersediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum di Wilayah Sulawesi Tenggara sangat penting dalam menunjang kegiatan masyarakat dalam bidang perekonomian, pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, dan bidang – bidang lainnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Bina Konstruksi serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berupa bangunan fisik seperti jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, air bersih/air minum, sanitasi, serta bangunan pelengkap kegiatan pemukiman lainnya baik secara kuantitas maupun kualitas.

Di bidang pembangunan infrastruktur jalan, panjang jalan yang telah terbangun di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai akhir tahun 2021 yaitu sepanjang 13.861,82 km, yang terdiri dari 1.495,84 km jalan nasional, 1.009,28 km jalan provinsi, dan 11.356,7 km jalan kabupaten/kota. Tabel di bawah menunjukkan informasi data dan kondisi jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2022.

Tabel 2.52. Data Jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2021

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021
1.	Nasional	1.553,99	1.497,8	1.497,8	1.495,84
	- Diaspal (Km)	1.474,56	1.497,8	1.497,8	1.487,84
	- Tidak Diaspal (Km)	79,43	0	0	8
2.	Provinsi	1.009,28	1.009,28	1.009,28	1.009,28
	- Diaspal (Km)	789,64	673,74	673,74	710,23
	- Tidak Diaspal (Km)	219,64	335,54	335,54	299,05
3.	Kabupaten/ Kota	10.233,80	11.352	11.416	11.356,7
	- Diaspal (Km)	3.736,34	4.466,6	4.379,8	4.584,11
	- Tidak Diaspal (Km)	6.497,46	6.885,65	7.038,27	6.772,59

Sumber: Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Balai Jalan Nasional XXI Sultra, BPS Provinsi Sultra Tahun 2023

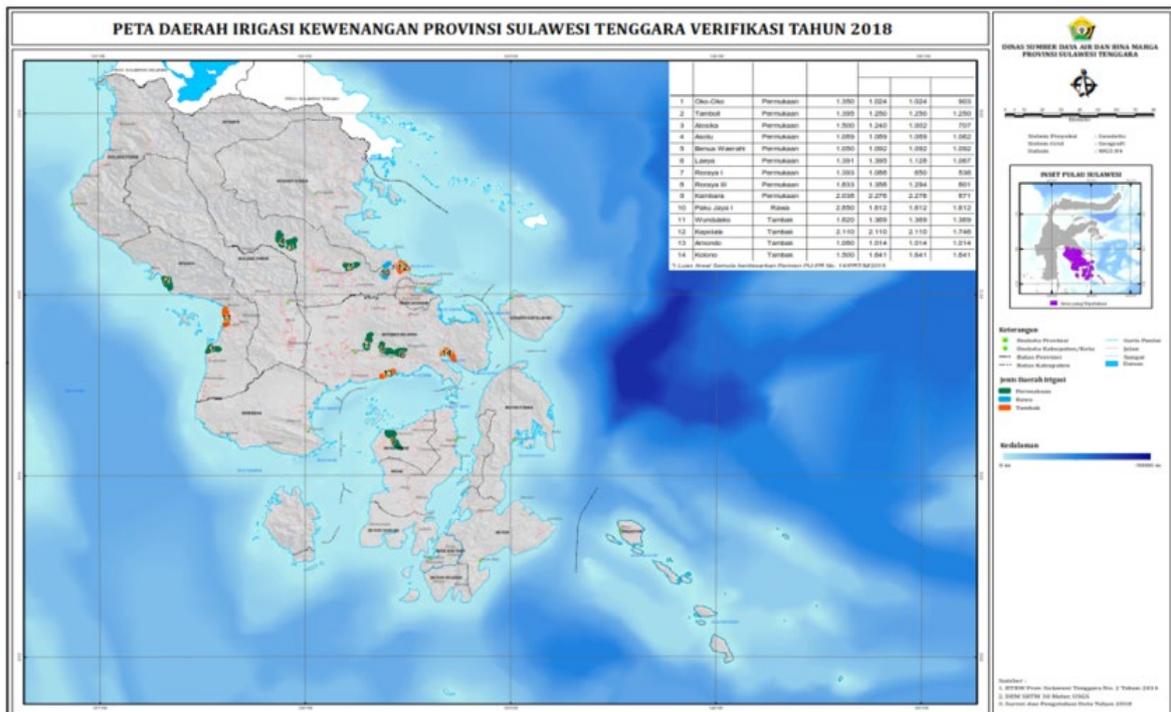
Secara umum, walaupun aspek ketersediaan jalan sudah mencukupi, akan tetapi disisi lain terdapat beberapa aspek yang masih harus terus ditingkatkan pencapaiannya. Beberapa aspek tersebut antara lain belum terintegrasinya secara menyeluruh antara pusat–pusat kegiatan/produksi ke daerah pemasaran, di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini akan berdampak pada terhambatnya arus barang dan jasa antar wilayah tersebut. Tingginya tingkat kerusakan jalan, baik rusak ringan, sedang, maupun berat. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat keselamatan pengguna jalan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu kerusakan jalan juga berdampak pada bertambahnya waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai suatu wilayah tertentu, sehingga biaya operasional kendaraan akan meningkat.

Di bidang infrastruktur pengairan, pembangunan diarahkan kepada upaya pemenuhan ketersediaan air baku masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, pemenuhan ketersediaan air irigasi untuk pertanian serta upaya penanggulangan bahaya banjir dan

abrasi kawasan pantai. Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut di atas, diantaranya melalui pembangunan sarana pengelolaan air minum, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, rehabilitasi/normalisasi sungai serta pembangunan/rehabilitasi bangunan penahan gelombang laut. Untuk Peta Irigasi Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Tabel 2.53. Pembangunan Infrastruktur di bidang pengairan (Irigasi, Pemenuhan Air baku, Penanggulangan Bahaya Banjir dan Abrasi Pantai)

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sumber Daya Air							
1.	Rasio Luas Lahan Sawah Beririgasi	82,55 %	77,80 %	77,8%	67,98 %	67,98%	67,98%
2.	Pembangunan Turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	46 lok	25 lok	-	-	-	-



Sumber : Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Gambar 2.12. Peta Daerah Irigasi Provinsi Sulawesi Tenggara

Pembangunan dibidang Cipta Karya selain untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat bidang air minum dan air limbah, juga diarahkan untuk mendukung program 100-0-100 yaitu 100% akses sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase), Opersen luas kawasan kumuh perkotaan dan 100% akses air minum yang merupakan program Pemerintah. Dari data yang ditampilkan tabel dibawah ini, untuk presentase rumah tinggal bersanitasi dan presentase penduduk berakses air minum walaupun belum mencapai level 100% tetapi telah terjadi peningkatan, demikian juga halnya dengan luas kawasan kumuh yang telah terjadi penurunan luasan sejak Tahun 2016 sampai 2021. Hal ini semua terjadi karena adanya peningkatan pembangunan infrastruktur baik yang

dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota bidang sanitasi dan air minum pada kurun waktu tersebut.

Tabel 2.54. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Cipta Karya Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2021

No.	Indikator	Capaian Kinerja (%)			
		2018	2019	2020	2021
1.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (persen)	73,61	79,75	82,38	85,62
2.	Persentase Penduduk berakses air minum (persen)	80,95	80,89	92,49	91,94
3.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan (persen)	80,95	89,66	92,49	91,94
4.	Persentase areal kawasan kumuh (Ha)	1.540,06	1.540,06	1.445,12	746,69

Sumber :Dinas Cipta Karya Bina Kontruksi dan Tata Ruang Tahun 2023, BPS Susenas 2022

Berdasarkan Permendagri Nomor 100 tahun 2018, Pekerjaan Umum juga memiliki fungsi Standar Pelayanan Minum (SPM), yaitu : Pemenuhan Kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota dan Penyediaan pelayanan air minum domestik regional lintas Kabupaten/Kota, namun sampai saat ini Provinsi Sulawesi Tenggara belum memiliki capaian SPM tersebut karena Infrastruktur SPAM Regional di Provinsi Sulawesi Tenggara belum ada yang terbangun.

2) Penataan Ruang

Dalam mengarahkan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antara daerah sektor, daerah dan masyarakat, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2014-2034 melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana didalamnya telah ditetapkan struktur dan pola ruang serta kawasan strategis. Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah dapat ditinjau kembali dalam 5 (lima tahun) setelah RTRW diundangkan, maka saat ini RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilakukan Peninjauan Kembali (PK) dan sedang dalam proses revisi.

Tabel 2.55. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara (Penetapan RTRW)

No.	Kabupaten/Kota/Provinsi	Status Perda RTRW	Status Revisi Perda RTRW saat ini
1.	Buton	Perda No. 1 Tahun 2014	Revisi tahun 2019
2.	Baubau	Perda No. 2 Tahun 2014	Revisi tahun 2019
3.	Muna	Perda No. 4 Tahun 2014	Revisi tahun 2020
4.	Konawe	Perda No. 9 Tahun 2014	Revisi Tahun 2020
5.	Konawe Selatan	Perda No. 19 Tahun 2013	Perda No 5 Tahun 2020
6.	Bombana	Perda No. 20 Tahun 2013	Revisi tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota/Provinsi	Status Perda RTRW	Status Revisi Perda RTRW saat ini
7	Kendari	Perda No. 1 Tahun 2012	Pembahasan Lintas Sektor dipusat
8	Buton Utara	Perda No. 5 Tahun 2012	Peninjauan Kembali (PK) Tahun 2021
9	Kolaka Utara	Perda No. 6 Tahun 2012	Revisi Tahun 2019
10	Wakatobi	Perda No. 12 Tahun 2012	Revisi Tahun 2020
11	Kolaka	Perda No. 16 Tahun 2012	Revisi Tahun 2019
12	Konawe Utara	Perda No. 20 Tahun 2014	Peninjauan Kembali (PK) Tahun 2021
13	Kolaka Timur	Perda No. 78 Tahun 2020	Perda No. 78 Tahun 2020
14	Konawe Kepulauan	Pembahasan Lintas sektor dipusat	Pembahasan Lintas sektor dipusat
15	Buton Selatan	Pembahasan Lintas sektor dipusat	Pembahasan Lintas sektor dipusat
16	Buton Tengah	Perda No. 6 Tahun 2020	Perda No. 6 Tahun 2020
17	Muna Barat	Perda No. 10 Tahun 2020	Perda No. 10 Tahun 2020
18	Sulawesi Tenggara	Perda No. 2 Tahun 2014	Revisi Tahun 2020, penyusunan Naskah Akademik Tahun 2021 dan pengintegrasian RTRW dan RZWP3K ke dalam RTRW Provinsi sesuai Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Sumber: Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang, Tahun 2023

Tabel 2.55. di atas menunjukkan tentang status RTRW 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini, dimana masih terdapat 1 (satu) Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang belum mempunyai Peraturan Daerah RTRW sendiri yakni Kab. Buton Selatan dan 16 (enam belas) Kabupaten/Kota sudah mempunyai Peraturan Daerah RTRW sendiri. Kab. Buton Selatan sendiri saat ini sedang dalam proses penyusunan RTRW.

3) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang mutlak harus terpenuhi. Berdasarkan basis data Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara, backlog kepemilikan rumah di provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 yaitu 127.684 unit rumah, sedangkan backlog penghunian rumah sebanyak 41.002 unit rumah. Di Provinsi Sulawesi Tenggara masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di kabupaten/ kota. RTLH di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 berjumlah 188.069 unit. Ketersediaan rumah susun di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 yaitu 11.332 unit. Rumah susun pada umumnya diperuntukan untuk MBR, pegawai, mahasiswa/pelajar. Untuk jumlah perumahan yang dibangun oleh pengembang

sebanyak 24.416 unit rumah, dengan bentuk rumah adalah tapak. Ketersediaan rumah khusus di provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 yaitu sebanyak 563 unit yang terdapat pada beberapa kabupaten/kota, pada umumnya rumah khusus ini diperuntukan sebagai masyarakat nelayan, masyarakat didaerah tertinggal, serta masyarakat berdampak relokasi.

Urusan Perumahan merupakan urusan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) salah satunya terkait SPM Urusan Perumahan dan Permukiman. Adapun SPM Perumahan yang diatur dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 ada 2 yaitu terkait Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. Kedua data SPM ini belum ada data pencapaiannya. Untuk capaian SPM Tahun 2012 – 2017, SPM tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman hanya diatur dalam Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Permendagri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal dengan Jenis Pelayanan dasarnya : a. Rumah Layak Huni dan terjangkau; b. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum. Dengan indikator : a. Rumah layak huni yang terjangkau; b. Prasarana, sarana dan utilitas umum lingkungan permukiman sedangkan pada Permen PUPR Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal tidak memuat indikator tentang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

d. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di uruProvinsi Sulawesi Tenggara ditangani dengan cukup baik ini terlihat dari suasana yang kondusif, aman dan terkendali. Indikator kondusif, aman dan terkendalnya stabilitas ketentraman serta ketertiban tersebut, antara lain ditunjukkan oleh kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak yang berlangsung dalam suasana tertib, aman dan demokratis. Upaya Pemerintah dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat dan dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.56. Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2024

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Kriminalitas	4.935 kasus	4.258 kasus	4.611 kasus	3.662 kasus	2.636 kasus	1.600 kasus	-
2.	Jumlah Satlinmas Per Desa/Kelurahan	2	4,38	7,88	1	2,35	6	-
3.	Capaian Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi Sulawesi Tenggara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas pencapaian dan target kinerja Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada point 1 (satu) kolom 2 (dua) Indikator Kinerja Utama 'angka kriminalitas'dari tahun 2018-2022 adalah merupakan capaian IKU Satpol PP Prov. Sultra sebagaimana yang termuat dalam LAKIP 2018-2022 dan target kinerja tahun 2023 juga sebagaimana yang termuat pada dokumen perencanaan yakni dokumen Renstra Satpol PP Prov. Sultra periode 2018-2023, data yang tersaji sampai saat ini berupa jumlah kasus/angka kriminalitas adalah trend jumlah kasus dari tahun ke tahun. Korelasi antara tugas Satpol PP dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban yang dihubungkan dengan trend angka kriminalitas adalah dimana Satpol PP dalam menjalankan peran dan fungsinya juga berkontribusi dalam menekan angka kriminalitas dengan melakukan patroli operasi pekat(penyakit masyarakat) serta meningkatkan peran satlinmas sehingga tindakan atau perilaku masyarakat yang sifatnya pelanggaran masih dapat dicegah dan tidak berujung pada perbuatan pidana dan menjadi laporan/aduan masyarakat (1 laporan/pengaduan = 1 angka kriminalias). Sedangkan target tahun 2024 (sebagaimana kolom 9) tidak terisi atau kosong, hal tersebut dikarenakan terjadi perubahan terhadap IKU Satpol PP Prov. Sultra periode 2024-2026 sehingga angka kriminalitas tidak lagi menjadi target kinerja/IKU Satpol PP Prov. Sultra periode 2024-2026.
2. Pada point 2 (dua) kolom 2 (dua) Indikator Kinerja Utama 'Jumlah Satlinmas Per Desa/Kelurahan'. Hal yang sama dari tahun 2018-2022 adalah merupakan capaian IKU Satpol PP Prov. Sultra sebagaimana yang termuat dalam LAKIP 2018-2022 dan target kinerja tahun 2023 juga sebagaimana yang termuat pada dokumen perencanaan yakni dokumen Renstra Satpol PP Prov. Sultra periode 2018-2023, data yang tersaji sampai saat ini beruparasio jumlah personil satlinmas yang tersebar di masing-masing desa dan kelurahan dari jumlah total satlinmas se-sultra dibagi jumlah desa dan kelurahan se-sultra dan kemudian di rata-ratakan sehingga dapat menampilkan trend maupun capaian rasio jumlah satlinmas per masing-masing desa/kelurahan setiap tahun nya. Sedangkan target tahun 2024 (sebagaimana kolom 9) tidak terisi atau kosong, hal tersebut dikarenakan terjadi perubahan terhadap IKU Satpol PP Prov. Sultra periode 2024-2026 sehingga Jumlah Satlinmas per Desa/Kelurahan tidak lagi menjadi target kinerja/IKU Satpol PP Prov. Sultra periode 2024-2026.
3. Pada point 3 (tiga) kolom 2 (dua) Indikator Kinerja Utama 'Capaian Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi Sulawesi Tenggara', adalah merupakan Indikator Kinerja Utama yang baru periode 2024-2026. Adapun terisinya capaian sebagaimana dimaksud pada point 3 (tiga) kolom 3,4,5,6 dan 7 yakni capaian tahun 2018-2022 adalah berasal dari data capaian SPM Trantibum dari tahun 2018 hingga tahun 2022, sedangkat target tahun 2024 adalah berasal dari dokumen Renstra periode tahun 2024-2026 yakni Indikatir Kinerja Utama yang baru yang disesuaikan dengan indikator capaian SPM. Hal tersebut dimaksudkan adalah untuk memudahkan Satpol PP Prov. Sultra untuk mengkompilasi data dengan menyelaraskan Indikator Capaian SPM selaku OPD pemangku SPM dengan Indikator Kinerja Utama OPD.

Tabel 2.57 Capaian Kinerja SPM Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024

Indikator	Capaian Target Kinerja										Target Kinerja (%)	
	2018		2019		2020		2021		2022		2023	2024
	TN (%)	CKD (%)	TN (%)	CKD (%)	TN (%)	CKD (%)	TN (%)	CKD (%)	TN (%)	CKD (%)		
Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan: TN= Target Nasional

CKD= Capaian Kinerja Daerah

Sumber: Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang merupakan salah satu dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) berdasarkan Permendagri Nomor 100 tahun 2017 menjadi kewenangan Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara adalah terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam skala/issue lintas wilayah Kabupaten/Kota atau dalam skala provinsi. Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan, hal ini sejalan dengan pencapaian tingkat penyelesaian keamanan ketertiban dan keindahan (K3) di Provinsi Sulawesi Tenggara yang tertangani dengan baik, atau 100 persen dapat diatasi.

Salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Keputusan Kepala Daerah. Dalam pelaksanaan penegakkan perundang-undangan daerah dimaksud dalam pelaksanaannya adalah dilakukan oleh PPNS melalui mekanisme Pro Justisia (diputuskan melalui pengadilan). Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari tahun 2017-2022 juga mengalami peningkatan walaupun sebenarnya PPNS yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara masih tergolong kurang, namun dengan peningkatan PPNS tersebut meningkatkan persentase angka penegakkan Perda di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan pada tahun 2000 sampai dengan 2021 terjadi penurunan jumlah PPNS secara signifikan, hal ini dikarenakan jumlah PPNS yang di data hanyalah pada Instansi Satpol PP saja sehingga Jumlah PPNS yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.58. Jumlah PPNS Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 – 2021

No	Prov/Kab/Kota	Jumlah PPNS (Tahun)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Sulawesi Tenggara	57	57	63	23	1
2.	Kendari	21	21	23	18	4
3.	Baubau	18	18	18	3	1
4.	Buton	3	3	3	-	1
5.	Buton Tengah	-	-	-	7	1
6.	Buton Utara	7	7	7	-	-
7.	Buton Selatan	-	-	-	22	1
8.	Wakatobi	22	22	22	7	4
9.	Muna	6	7	7	-	-
10.	Muna Barat	-	-	-	23	1

No	Prov/Kab/Kota	Jumlah PPNS (Tahun)				
		2017	2018	2019	2020	2021
11.	Bombana	5	5	5	5	-
12.	Konawe	14	14	14	14	-
13.	Konawe Selatan	10	8	10	10	-
14.	Konawe Utara	7	7	7	7	-
15.	Konawe Kepulauan	-	-	-	-	-
16.	Kolaka	7	6	7	7	2
17.	Kolaka Utara	8	8	8	8	-
18.	Kolaka Timur	-	-	-	-	1
Jumlah		185	188	183	152	17

Sumber : Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Kehidupan beragama dan kegiatan beribadah masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum telah berjalan dengan baik. Dilihat dari sisi kuantitas, jumlah rumah-rumah ibadah sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.59. Tempat Ibadah di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
1	2	3	4	6	7	8
Buton	144	33	3	8	16	-
Muna	235	35	16	9	2	-
Konawe	393	66	54	6	33	4
Kolaka	332	66	54	10	39	1
Konawe Selatan	417	168	60	12	94	4
Bombana	182	28	11	1	11	-
Wakatobi	172	27	1	-	-	-
Kolaka Utara	209	39	20	-	-	-
Buton Utara	95	15	4	3	8	-
Konawe Utara	149	1	10	3	16	-
Kolaka Timur	197	30	17	4	44	-
Konawe Kepulauan	76	1	-	1	1	-
Muna Barat	118	38	6	1	14	2
Buton Tengah	117	7	-	-	-	-
Buton Selatan	90	13	-	-	-	-
Kota Kendari	535	58	53	4	2	4
Kota Baubau	117	3	11	-	14	2
Sulawesi Tenggara	3 578	628	320	62	294	17

Sumber : Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2023

Bencana juga merupakan salah satu urusan dalam ketentraman dan ketertiban. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau

faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, merusakkan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bertanggung jawab melindungi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk penanggulangan bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Urusan Sub bencana merupakan urusan dasar pada standar pelayanan Minimal yang termuat dalam Peraturan Mendagri Nomor 101 Tahun 2018 yang terkait dengan : a. pelayanan informasi rawan bencana; b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

e. Urusan Sosial

Jenis Pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial yang bersifat lintas kabupaten/kota terdiri atas :

Tabel 2.60. Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024

No.	Indikator	Capaian Kinerja (%)					Target Kinerja (%)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Prosentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0,03	0,03					
2.	Prosentase PSKS yang melakukan pelayanan terhadap PMKS	1,3	1,5,					
3.	Prosentase PMKS dalam Panti yang ditangani dan memperoleh Bantuan pelayanan Rehabilitasi	1,3	1,3					
4.	Prosentase Peningkatan Pelayanan Panti Sosial	25	25					
5.	Prosentase Korban bencana yang ditangani dan terpeliharanya taraf Kesejahteraan Sosial PMKS	100	100					
6.	Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Sosial			15,3	0,12	15,8	51.4	51.4
7.	Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh Pemberdayaan, melakukan kemitraan dalam penanganan PPKS, serta melakukan fasilitasi dan pendampingan			30	5,7	1,7	41	41

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2018 sd 2019 terdiri dari: (1).Prosentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, (2) Prosentase PSKS yang melakukan pelayanan terhadap PMKS, (3) Prosentase PMKS dalam Panti yang ditangani dan memperoleh Bantuan pelayanan Rehabilitasi, (4). Prosentase Peningkatan Pelayanan Panti Sosial dan (5)Prosentase Korban bencana yang ditangani dan terpeliharanya taraf Kesejahteraan Sosial PMKS.

Sementara sejak Tahun 2020 seiring dengan Perubahan Nomenklatur dan peyesuaian Perubahan Pada Renstra maka IKU Dinas Sosial direvisi menjadi : (1) Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Sosial dan (2) Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh Pemberdayaan, melakukan kemitraan dalam penanganan PPKS, serta melakukan fasilitasi dan pendampingan.

Capaian Kinerja Tahun 2018 sd Tahun 2021 belum maksimal disebabkan adanya beberapa **Faktor Penghambat** antara lain :

1. Dari 26 Macam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kemudian berubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tenggara baru bisa melaksanakan penanganan untuk Anak Terlantar, Penanganan Korban Bencana Alam dan Penanganan Fakir Miskin karena Dinas Sosial hanya memiliki 1 (satu) UPTD yang menangani Anak Terlantar;
2. Updating Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum maksimal dilaksanakan oleh Kab/Kota
3. Alokasi anggaran untuk Urusan Sosial masih sangat terbatas.

Selain faktor penghambat, adanya **Faktor Pendukung** yang diharap bisa mendorong Pencapaian Target Kinerja IKU Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Urusan Sosial adalah salah satu OPD yang menangani urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga diharapkan akan berimbang pada alokasi anggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
2. Penanganan Fakir Miskin adalah salah satu Program Prioritas sehingga akan memberi dampak pada Penyusunan Perencanaan dan Penanggaran.

Tabel 2.61. Capaian dan Target Kinerja SPM Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s.d. 2024

No.	Indikator	Capaian Target Kinerja										Target Kinerja (%)	
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	2024
		TN (%)	CKD (%)	TN (%)	CKD (%)	TN (%)	CKD (%)	TN (%)	CKD (%)	TN (%)	CKD (%)		
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar didalam Panti	100		100		100		100		100	98,9	25	25
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar didalam Panti	100	78	100	78	100	1,3	100	1,3	100	1,3	80	80
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia	100		100		100		100		100	0,021	50	50

No.	Indikator	Capaian Target Kinerja										Target Kinerja (%)	
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	2024
		TN (%)	CKD (%)	TN (%)	CKD (%)	TN (%)	CKD (%)	TN (%)	CKD (%)	TN (%)	CKD (%)		
	terlantar didalam Panti												
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis didalam Panti	100		100		100		100		100	0,1	40	40
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	100	100	100	100	100	781,6	100	276	100	100	100	100
6.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar didalam Panti	100		100		100		100		100	98,9	25	25
7.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar didalam Panti	100	78	100	78	100	1,3	100	1,3	100	1,3	80	80

Keterangan: TN= Target Nasional

CKD= Capaian Kinerja Daerah

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Kinerja SPM Dinas Sosial dari Tahun 2018 sd 2022 adalah :

1. Untuk Realisasi Standart Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial Tahun 2018 sd Tahun 2021 belum maksimal dilaksanakan karena Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tenggara saat ini baru memiliki 1 (satu) UPTD Panti Sosial yang menangani Anak Terlantar sehingga dari total 5 Indikator SPM yang ada baru dilaksanakan 2 yaitu Penanganan dan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dalam Panti dan Penanganan Korban Bencana Alam skala Propinsi;
2. Tahun 2020 terdapat Capaian Kinerja yang sangat tinggi dari target karena diluncurkan Bansos bagi Korban Pandemi Covid 19.

3. Tahun 2022 dilakukan upaya peningkatan Target Capaian SPM melalui kerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Panti Sosial milik Swasta, sehingga dari 5 Target SPM bisa dilaksanakan semuanya meskipun dengan angka capaian yang masih relatif kecil.

Untuk capaian SPM belum maksimal dilaksanakan karena beberapa faktor yang menjadi Penghambat antara lain :

1. Pengalihan UPTD Panti dilokasi yang baru membuat penanganan Anak terlantar mengalami penurunan Kapasitas karena Kondisi sarana dan Prasarana dilokasi yang baru belum memadai.
2. Indikator Target SPM bagi Dinas Sosial Propinsi adalah Penanganan Dalam Panti sehingga dengan hanya memiliki 1 Panti Layanan anak terlantar tentunya akan menghambat capaian Indikator lainnya.
3. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada belum dilakukan Updating dan Pemutakhiran dari Kabupaten/Kota sehingga menghambat upaya mapping Penanganan yang dilakukan Pemerintah melalui UPTD Panti Dinas Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Panti-panti Swasta.

Faktor Pendukung yang diharapkan dapat mendorong Pencapaian Target Kinerja SPM Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana Dinas Sosial adalah salah satu dari 6 urusan wajib.
2. Dengan diberi ruang untuk melakukan Intervensi penanganan Pada Panti-panti Swasta maka diharapkan akan mendorong peningkatan capaian target SPM
3. Melakukan upaya Updating data dikabupaten Kota sebagai langkah awal penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

2.1.3.2. Fokus Urusan Layanan Wajib Non Dasar

a. Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga kerja yang ditangani pemerintah meliputi: masalah sengketa pekerja, keselamatan dan perlindungan kerja, keterampilan tenaga kerja dan kewirausahaan, dimana urusan tenaga kerja dapat diukur dengan indikator pada tabel berikut ini:

Tabel 2.62. Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2024

No.	Indikator	Capaian Kinerja (%)		
		2018	2019	2020
1.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0	0	0
2.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	766	595	260
3.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	179	249	261
4.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	170	170	200
5.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	30	30	30

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, 2023

Adapun tingkat pengangguran di Sulawesi Tenggara yakni pada tahun 2018 sekitar 3,26 persen, tahun 2019 sekitar 3,59 persen kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebanyak 4,58 persen disebabkan dampak dari pandemic virus Covid 19 yang mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Selanjutnya pada tahun 2021 terjadi sedikit penurunan tingkat pengangguran menjadi 3,92 persen.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.63 Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sd 2024

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,54	71,40	72,54	73,10	Belum ada data	73,76	74,10
2.	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak yang mencapai level minimal Predikat Pratama	5,88%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	47,06%	-
3.	Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pengaduan pada unit pelayanan terpadu sesuai kebutuhan korban	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
4.	<i>Contraceptive Prevalence Rate</i> (CPR)	-	51,2	50,6	51,6	54,65	58,8	-
5.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	100%	100%	100%	-	-	-	-
6.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	69,34 (B)	Belum ada data	70,34	70,59
7.	Persentase Kabupaten/Kota dengan peringkat KLA	-	-	-	-	-	-	23,53%
8.	Persentase perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	-	-	-	-	-	-	75%
9.	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Komprehensif	-	-	-	-	-	-	75%
10.	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	-	-	-	-	-	-	2,68

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB Tahun 2023

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2019 - 2021. Peningkatan IDG selama kurun waktu tersebut karena adanya peningkatan beberapa indikator dalam komponen IDG yang meliputi keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan.

Ruang berpolitik perempuan telah diatur oleh pemerintah guna mendorong peran aktif dan kontribusi para politisi perempuan dalam parlemen yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam Undang-undang tersebut diamanatkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD sebagai aksi afirmasi (affirmative action). Selama Tahun 2018 - 2021 keterwakilan perempuan dalam parlemen di Sulawesi Tenggara berfluktuasi pada angka 17.78 – 20.00 persen. Capaian ini belum memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebagaimana tertuang dalam peraturan perundangan yang mengamatkan sebesar 30%. Ada beberapa persoalan terkait masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik yaitu umumnya perempuan belum mengerti makna demokrasi dan pentingnya institusi pemilu sebagai sarana untuk membangun masa depan Indonesia yang demokratis, perempuan belum memahami hak asasi mereka termasuk hak asasi dalam bidang politik, dan pendidikan politik bagi perempuan belum diselenggarakan secara sungguh-sungguh, terencana dan kontinyu. Selain itu budaya patriarki yang telah lama mengakar kuat di Indonesia menjadi salah satu penghambat kiprah perempuan dalam kancah politik. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik ini menjadi suatu tantangan untuk lebih melahirkan kebijakan-kebijakan terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan perempuan.

Selain keterwakilan perempuan di parlemen, komponen lain yang menjadi pembentuk IDG adalah persentase perempuan sebagai tenaga profesional. Selama tahun 2018 – 2021, persentase perempuan sebagai tenaga profesional di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan 2,41 persen dari 48,79 persen tahun 2018 menjadi 51,20 persen tahun 2021.

Perhitungan IDG untuk melihat kontribusi perempuan dalam ekonomi menggunakan komponen sumbangan pendapatan perempuan. Pada tahun 2020, sumbangan pendapat perempuan di Sulawesi Tenggara sebesar 36.27 persen. Capaian ini meningkat sebesar 0,23 persen dan merupakan capaian tertinggi sepanjang tahun 2018 - 2021. Jika dibandingkan dengan sumbangan pendapatan laki-laki, capaian ini memang masih cukup jauh. Namun komponen sumbangan pendapatan perempuan menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perempuan Indonesia umumnya dan Sulawesi Tenggara khususnya saat ini semakin membaik.

Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, capaian ditandai dengan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak tidak hanya dilihat dari aspek fisik, namun juga non fisik seperti mewujudkan lingkungan yang layak bagi anak dalam bentuk pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Pada tahun 2011 Kota Kendari telah menginisiasi pengembangan Kota Layak Anak dan memperoleh penghargaan predikat Pratama. Selanjutnya pada tahun 2013 Kota Kendari kembali memperoleh penghargaan predikat Madya, tahun 2017 mengalami penurunan dari predikat Madya menjadi predikat Pratama dan tahun 2018 meningkat kembali menjadi predikat Madya. Sampai dengan tahun 2022

sudah 17 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah menginisiasi pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, namun baru 2 Kabupaten/Kota yang memperoleh kategori KLA yaitu Kota Kendari dengan predikat Nindya dan Kabupaten Kolaka dengan predikat Madya. Sampai dengan Tahun 2022 capaian kinerja Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak yang mencapai level minimal predikat pratama adalah 11,76%. Capaian kinerja ini belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 35,29% atau 5 dari 17 Kabupaten/Kota ditargetkan mendapatkan kategori Kabupaten/Kota Layak Anak. Hal ini disebabkan belum terpenuhinya 24 indikator yang terdapat dalam indikator penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak oleh Kabupaten/Kota yang lainnya di Sulawesi Tenggara.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak khususnya dari segala bentuk tindakan kekerasan dan perlakuan salah lainnya merupakan upaya untuk melindungi hak asasi perempuan dan anak, terutama untuk memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Berdasarkan data SIMFONI PPA (Simfoni Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) yang diperoleh dari hasil penginputan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) provinsi dan kabupaten/kota se Sulawesi Tenggara, tahun 2018 tercatat ada 93 kasus kekerasan terhadap perempuan/KtP dan 147 kasus kekerasan terhadap anak/KtA (121 kasus terhadap anak perempuan dan 26 kasus terhadap anak laki-laki), dimana 130 kasus adalah KDRT/RP (ranah personal), 5 kasus terjadi di tempat kerja dan 105 kasus terjadi di ranah lainnya (fasilitas umum, ruko, sekolah, hotel/wisma, kebun, rumah saudara).

Sedangkan untuk tahun 2019, kekerasan terhadap perempuan/KtP di Sulawesi Tenggara mengalami penurunan sebesar 58% dibandingkan tahun 2018 yaitu 54 kasus, dan kekerasan terhadap anak/KtA mengalami penurunan sebesar 57% dibandingkan tahun 2018 yaitu 85 kasus, dimana 81 kasus adalah KDRT, 2 kasus terjadi di tempat kerja dan 57 kasus terjadi di ranah lainnya (fasilitas umum, ruko, sekolah, hotel/wisma, kebun, rumah saudara). Tahun 2020 s/d 2022 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung mengalami peningkatan, dimana tahun 2020 sebanyak 240 kasus, 2021 sebanyak 235 kasus dan 2022 sebanyak 330 kasus. Namun belum semua lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak di kabupaten/kota mengirimkan data terkait KtP dan KtA, sehingga perlu dilakukan advokasi dan koordinasi pada lembaga-lembaga tersebut. Dari sejumlah kasus yang terjadi sejak tahun 2018 s/d 2022, terdapat 5 jenis kekerasan yang dialami perempuan dan anak, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan eksploitasi.

Prevalensi pemakaian alat kontrasepsi ini akan berkontribusi terhadap penurunan tingkat kelahiran. Peningkatan CPR didukung oleh partisipasi peserta KB aktif. Program KB sangat penting dilaksanakan dalam upaya pengendalian jumlah penduduk. Peningkatan CPR merupakan strategi terwujudnya keluarga berkualitas dan sebagai penanda keberhasilan program KB di Indonesia. Capaian CPR Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan 3,45% selama kurun waktu 2019 – 2020 dari 51,2% pada tahun 2019 menjadi 54,56% pada tahun 2022. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020 namun capaian CPR Sulawesi Tenggara kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 - 2022.

c. Urusan Pangan

Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 15 kabupaten dan 2 kota dengan total penduduk sebanyak **2.701.661 jiwa** pada Tahun 2022. Perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara pada sektor pertanian sebesar 24,08 persen. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan dampak pertumbuhan ekonomi global yang melambat, maka

ketahanan pangan dan gizi terus menjadi perhatian utama. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2017, perkembangan konsumsi kalori dan protein di Sulawesi Tenggara sebesar 2.320 kkal per kapita per hari meningkat menjadi 2.359 kkal per kapita per hari di tahun 2017.

Ketahanan Pangan sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan, termasuk didalamnya bantuan pangan, apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

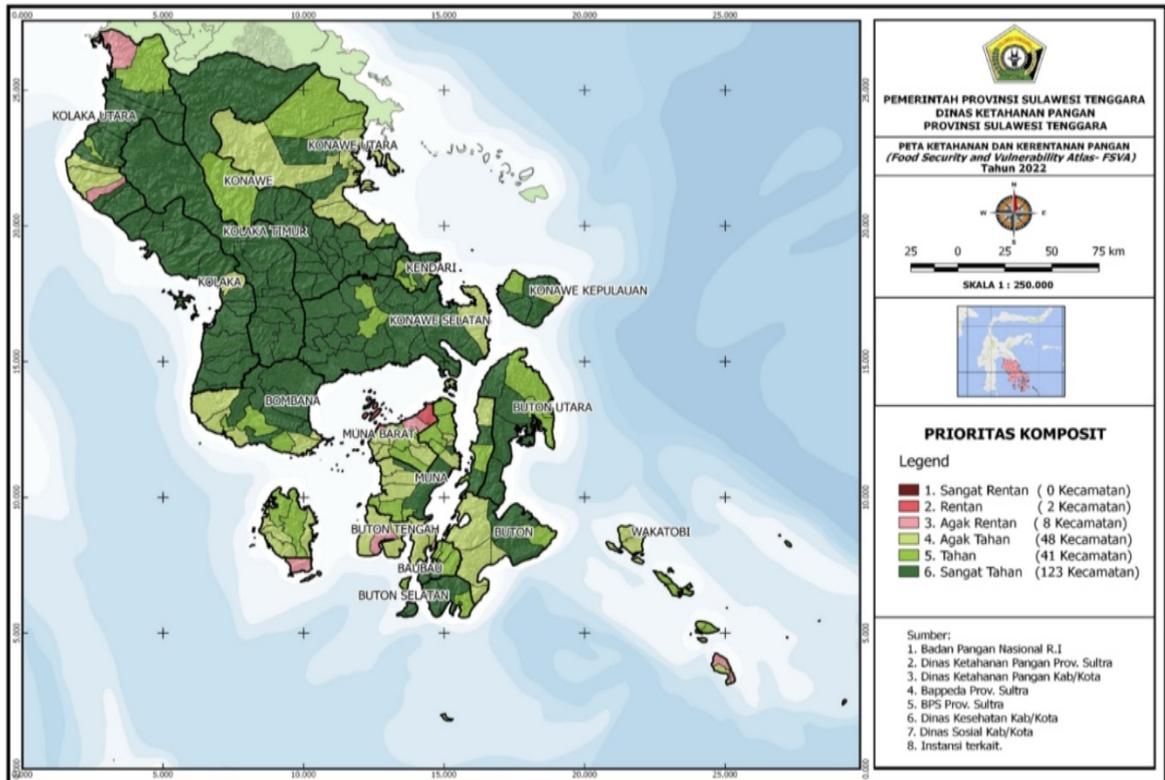
Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien (sementara). Kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, kepemilikan lahan, distribusi pendapatan, hubungan antar suku, tingkat pendidikan dan lain-lain.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 menggambarkan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan dengan lokus wilayah kecamatan yang ada di kabupaten/kota. Status ketahanan dan kerentanan pangan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 merupakan hasil pemutakhiran dari peta FSVA Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan peta FSVA menggunakan sembilan indikator untuk wilayah kabupaten dan delapan indikator untuk wilayah kota yang mencakup tiga dimensi ketahanan pangan dengan memperhatikan ketersediaan data dan informasi pendukung lainnya dari lintas sektor terkait.

Metode yang digunakan untuk mengurutkan dan mengelompokkan wilayah kecamatan ke dalam prioritas status ketahanan pangan yaitu metode analisis komposit dengan menggunakan pembobotan mengadopsi metode penyusunan **Global Food Security Index (GFSI)**. Penggunaan pendekatan pembobotan ini dapat ditingkatkan obyektifitas hasil dari analisis komposit. Bobot masing-masing indikator individu diperoleh melalui sisten **judgment** yang ditetapkan oleh para ahli. Analisis komposit menghasilkan skor komposit dari masing-masing kecamatan, yang selanjutnya dikelompokkan kedalam salah satu dari 6 kelompok prioritas.

Kecamatan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan tingkat kerentanan pangan. Kecamatan yang berada pada prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi **sangat rentan** (Prioritas 1), **rentan** (Prioritas 2), **agak rentan** (Prioritas 3). Kecamatan pada 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi **Agak tahan** (Prioritas 4), **tahan** (Prioritas 5), dan **sangat tahan** (Prioritas 6). Tujuan dari penentuan prioritas ini adalah untuk mengidentifikasi kecamatan yang lebih rentan terhadap terjadinya rawan pangan dan gizi serta mengukur perubahan statusnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk memvisualisasikan klasifikasi tersebut, kecamatan dipetakan dengan menggunakan gradasi warna merah dan hijau. Gradasi warna merah digunakan untuk memetakan kelompok Prioritas 1, 2, dan 3, serta gradasi warna hijau digunakan untuk kelompok Prioritas 4, 5, dan 6.

Penyusunan peta FSVA tahun 2022 untuk 203 kecamatan di 15 Kabupaten dan 19 kecamatan di 2 kota yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan secara terpisah atas dasar pertimbangan terdapat perbedaan karakteristik antara kabupaten dan kota.



Gambar 2.13. Peta Kerentanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 (Food Security and Vulnerability Atlas) Prioritas Komposit

Kabupaten yang masuk dalam Prioritas 1 adalah kabupaten-kabupaten dengan proporsi penduduk tertinggi yang cenderung lebih rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi sedangkan kabupaten yang masuk dalam Prioritas 6 adalah kabupaten-kabupaten dengan proporsi penduduk tertinggi yang cenderung lebih tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis komposit ketahanan pangan 222 kecamatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang masuk dalam kategori Prioritas 1-3 yaitu sebanyak 10 kecamatan (4,5%), untuk kategori kecamatan yang masuk Prioritas-1 tidak ada. Adapun kecamatan yang masuk Prioritas 2 sebanyak 2 kecamatan yaitu di Kabupaten Muna Barat. Kabupaten yang masuk Prioritas-3 sebanyak 8 kecamatan (Kabupaten Bombana 1 kecamatan, Wakatobi 1 kecamatan, Kolaka Utara 2, Muna Barat 1 kecamatan dan Buton Tengah 3 kecamatan). Kecamatan yang masuk kategori Prioritas 4-6 dengan rincian sebagai berikut: 48 kecamatan (21,63%) prioritas-4 (agak tahan), 41 kecamatan (18,47%) prioritas-5 (tahan), dan 123 kecamatan (55,41%) prioritas-6 (sangat tahan).

Di seluruh kecamatan, faktor utama yang menyebabkan tingginya kerentanan terhadap kerawanan pangan pada prioritas 3 adalah : 1) Tingginya rasio konsumsi normatif terhadap konsumsi sereal, 2) tingginya angka kesakitan, 3) tingginya persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air bersih, 4) tingginya prevalensi stunting, 5) tingginya rata-rata lama sekolah perempuan usia di atas 15 Tahun. Penting untuk diingat bahwa tidak semua kecamatan yang masuk dalam prioritas 3 itu dianggap rentan terhadap kerawanan pangan, demikian juga pada prioritas 4, 5, dan 6 tidak semua

kecamatan dalam wilayah tersebut aman terhadap kerawanan pangan berdasarkan per indikator.

Dalam 2 tahun terakhir periode 2021 - 2022, ketersediaan pangan yang mengalami penurunan rata-rata pertahun, terutama padi. Sedangkan komoditi lainnya cenderung masih stabil seperti jagung, ubi kayu, ubi Jalar, kedelai, telur, daging ayam, dan daging sapi. Ketersediaan dan Kebutuhan Komoditi Pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.64 Neraca Ketersediaan dan Kebutuhan Beberapa Komoditas Pangan Penting Tahun 2021 – 2022

No.	Komoditas	2021			2022		
		Ketersediaan Untuk di Konsumsi (Ton)	Kebutuhan Konsumsi Total/Tahun (Ton)	Surplus/ Defisit (Ton)	Ketersediaan Untuk di Konsumsi (Ton)	Kebutuhan Konsumsi Total/Tahun (Ton)	Surplus/ Defisit (Ton)
1.	Padi	304.079,23	247.806,75	56.272,48	280,190.24	255,746.91	24,443.33
2.	Jagung	79.051,11	13.295,78	65.755,33	79,051.11	13,721.80	65,329.31
3.	Ubi Kayu	104.643,47	19.465,02	85.178,45	104,643.47	20,088.72	84,554.75
4.	Ubi Jalar	14.680,16	4.414,20	10.265,96	14,680.16	4,555.64	10,124.52
5.	Kedelai	536,25	12.019,39	(11.483,14)	536.25	12,404.51	- 11,868.26
6.	Telur	9.314,30	15.263,56	(5.949,26)	9,314.30	15,752.63	- 6,438.33
7.	Daging Ayam	9.315,36	8.083,83	1.231,53	9,315.36	8,342.85	972.51
8.	Daging Sapi	2.647,28	452,06	2.195,22	2,647.28	466.54	2,180.74

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Adapun data capaian dan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sd 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.65 Capaian dan Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2024

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	93,3	95,3	92,4	80,2	79	97,5	86,1

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Pola Pangan Harapan Adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghitung skor PPH adalah menghitung sub total kandungan energi dari 9 kelompok pangan, menghitung total energi actual seluruh kelompok pangan dan menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan terhadap total energi aktual. Sembialn kelompok pangan disajikan dalam table berikut :

Tabel 2.66. Perbandingan Kualitas Konsumsi Penduduk Sulawesi Tenggara dengan Stadar WNPg Tahun 2018

No.	Kelompok Pangan	Standar WNPg				Sulawesi Tenggara			
		Gram	Energi	% AKG	Skor PPH	Gram	Energi	% AKG	Skor PPH
1	Padi-Padian	289	1050	50,0	25,0	330,4	1336	63,6	25,0

No.	Kelompok Pangan	Standar WNPG				Sulawesi Tenggara			
		Gram	Energi	% AKG	Skor PPH	Gram	Energi	% AKG	Skor PPH
2	Umbi-Umbian	105	126	6,0	2,5	42,5	77	3,7	1,8
3	Pangan hewani	157	252	12,0	24,0	144,1	296	9,3	18,7
4	Minyak + Lemak	21	210	10,0	5,0	20	180	8,6	4,3
5	Biji/Buah Berminyak	11	63	3,0	1,0	3,7	20	1,0	0,5
6	Kacang-Kacangan	37	105	5,0	10,0	13	32	1,5	3,0
7	Gula	31	105	5,0	2,5	19,6	72	3,4	1,7
8	Sayur+Buah	262	126	6,0	30,0	220,5	101	4,8	24,0
9	Lain-Lain	-	63	3,0	0,0	58,5	32	1,5	-
	Total		2100	100,0			2146	97,4	
	Sok PPH		100,0			79,0			

Sumber Data : Susenas Tahun 2023

Dalam pencapaian target kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat. **Faktor Pendukung** pencapaian target Skor PPH adalah: (1) Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tentang pentingnya mengkonsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman; (2) Adanya perubahan pola konsumsi pangan masyarakat yang semakin beragam dan seimbang; (3) Kualitas konsumsi pangan masyarakat semakin baik; dan (4) pemanfaatan pekarangan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan keluarga yang bermanfaat sebagai penyediaan pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral bagi keluarga. Sedangkan **Faktor Penghambat** pencapaian target Skor PPH antara lain: (1) Kurangnya Budaya dan kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman; (2) Rendahnya preferensi masyarakat terhadap pangan local yang tersedia terkalahkan oleh pangan introduksi dari luar; (3) Pemanfaatan pangan local belum optimal dan (4) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan penduduk.

Merujuk pada faktor pendukung dan penghambat tersebut diatas, maka dirumuskan langkah-langkah **alternatif solusi** sebagai berikut: (1) Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar membiasakan mengkonsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman; (2) pemanfaatan pekarangan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan keluarga yang bermanfaat sebagai penyediaan pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral bagi keluarga.

d. Urusan Lingkungan Hidup

Pada urusan lingkungan hidup, gambaran kondisi lingkungan hidup yang digambarkan melalui beberapa indikator yang terkait dengan lingkungan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.67. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2021

No.	Indikator	Capaian Kinerja (%)			
		2018	2019	2020	2021
1.	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Tidak ada	Ada	ada	Ada
2.	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Tidak ada	Tidak ada	ada	Ada
3.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
4.	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Tidak ada	ada	ada	Ada
5.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Tidak ada	ada	ada	ada
6.	Peningkatan Indeks Kualitas Air	54	53,1	50,55	53,26
7.	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	91,1	91,22	90,01	90,89
8.	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	69,14	69,14	74,67	74,34
9.	Laporan Inventarisasi GRK	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
10.	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
11.	Jumlah limbah B3 yang dikelola	0	0	0	0
12.	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
13.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	0	18,5	20	15
14.	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi	1	0	0	0
15.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	100	100	100	100
16.	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi	Tidak ada	Tidak ada	ada	Ada
17.	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi	0	0	0	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Tabel 2.68. Capaian dan Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2024

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71.19	70.95	72.04	74.97	76.88	74.05*	77.00**
1.	Indeks Kualitas Air	54.00	53.10	50.55	53.26	56.21	53.35*	56.32**

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja				Target Kinerja		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Indeks Kualitas Udara	91.10	91.22	90.01	90.89	92.05	89.13*	92.12**
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	69.14	69.14	74.67	74.34	74.33	77.14	74.64**
4.	Indeks Kualitas Air Laut***	-	-	-	81.60	85.70	75.81*	85.84**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Keterangan :

* = Target kinerja Tahun 2023 berdasarkan Renstra Perubahan DLH Sultra Tahun 2018-2023, lebih rendah dari capaian Tahun 2022 disebabkan capaian Tahun 2022 melampaui target.

** = Target kinerja berdasarkan Renstra DLH Sultra Tahun 2024-2026

*** = Indeks kualitas air laut (IKAL) berlaku mulai Tahun 2021

IKLH digunakan untuk menilai kinerja perbaikan kualitas lingkungan hidup, juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH ditentukan dari empat komponen indikator kinerja kunci, yaitu : indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU), indeks kualitas tutupan lahan (IKTL), dan mulai tahun 2021 melalui Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditambah dengan indeks kualitas air laut (IKAL).

Capaian IKLH Provinsi Sulawesi Tenggara terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2022, yaitu sebesar 70,95 pada tahun 2019; 72,04 pada tahun 2020; 74,97 pada tahun 2021; dan 76,88 pada tahun 2022. Meskipun terjadi penurunan nilai IKLH dari tahun 2018 sebesar 71.19 menjadi 70.95 pada tahun 2019, namun nilai IKLH tersebut tetap berada pada level cukup. Capaian nilai IKLH tersebut juga lebih tinggi dari nilai IKLH nasional yaitu 66,55 pada tahun 2019; 70,27 pada tahun 2020; 71,41 pada tahun 2021; dan 72,42 pada tahun 2022. Untuk IKLH Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 seluruhnya berada dalam level **cukup** karena berada pada kisaran nilai $66 \leq x \leq 76$, dan untuk tahun 2022 pada level **baik**.

Faktor pendukung utama pencapaian IKLH Provinsi Sulawesi Tenggara dari level cukup pada tahun 2018 sampai 2021 menjadi baik pada tahun 2022 adalah adanya kebijakan pembangunan daerah serta dukungan program dan kegiatan yang berwawasan lingkungan terutama pada sektor-sektor pengelolaan sumberdaya alam. Selain faktor pendukung tersebut, juga terdapat faktor penghambat terutama minimnya prasarana dan sarana dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks kualitas air (IKA) memberi pengaruh yang cukup besar dalam pencapaian IKLH di Provinsi Sulawesi Tenggara. Data capaian tahun 2018-2022 masih berada pada level rendah (50.55 – 56.21), yang menunjukkan adanya pencemaran air terutama air sungai. Isu pencemaran air sudah menjadi fenomena yang terjadi di Sulawesi Tenggara, seiring dengan aktifitas pembangunan yang bertumpu pada pengelolaan sumberdaya alam terus meningkat. Indikasi lainnya adalah ditemukannya parameter kualitas air di beberapa sungai yang telah melewati baku mutu air (BMA) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, diantaranya pH, residu tersuspensi (TSS), biochemical oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), oksigen terlarut (DO), Nitrit (NO3), Besi (Fe) dan Clorida (Cl), bakteri coli form, dan Coli Tinja).

Berdasarkan hasil pengujian kualitas air sungai yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara (2018), terdapat beberapa sungai yang sudah mengalami pencemaran seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.69 Status Mutu Air pada Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Nama Sungai	Status Mutu Air	Parameter yang melebihi baku mutu
1.	Sungai Sabilambo	Cemar berat	BOD, Fosfat, Nitrit, Sulfida, Klorin bebas, Seng, Cadmium, Tembaga, Timbal
2.	Sungai Wanggu	Cemar ringan-berat	Posfat, Sulfida, Klorin bebas, Seng, Cadmium, Tembaga dan Timbal
3.	Sungai Konawehea	Cemar ringan-berat	Posfat, Nitrit, Sulfida, Klorin bebas, Seng, Cadmium, Tembaga dan Timbal
4.	Sungai Poleang	Cemar ringan-sedang	Posfat, Nitrit, Sulfida, Klorin bebas, Seng, Cadmium, Tembaga, Timbal
5.	Sungai Roraya	Cemar ringan-sedang	BOD, Posfat, Nitrit, Sulfida, Klorin bebas, Seng, Cadmium, Tembaga dan Timbal
6.	Sungai Lasolo-Lalindu	Cemar ringan-sedang	BOD, Posfat, Nitrit, Sulfida, Klorin bebas, Seng, Cadmium, Tembaga dan Timbal
7.	Sungai Toari	Cemar ringan-sedang	Posfat, Nitrit, Sulfida, Klorin bebas, Seng, Cadmium, Tembaga dan Timbal
8.	Sungai Kaongkeongkea	Cemar ringan-sedang	Posfat, Sulfida, Klorin seng, Minyak dan lemak, Tembaga dan Timbal

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, 2023

Selain kegiatan pembangunan, pencemaran air juga disebabkan oleh pengelolaan sampah yang kurang baik. Di beberapa daerah seperti Wakatobi, Buton Tengah dan Kabupaten Muna, sampah menjadi salah satu isu lingkungan yang menonjol. Permasalahan lingkungan terkait sampah saat ini adalah belum tersedianya skema pengelolaan sampah rumah tangga. Di wilayah pesisir dan sekitar daerah aliran sungai (DAS) menjadi area sensitif sebagai penampung sampah utamanya dari sampah rumah tangga.

e. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah telah melaksanakan tiga (3) program strategis nasional, yaitu pemutakhiran data penduduk, pemberian NIK dan penerapan e-KTP melalui pelayanan harian pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil termasuk perekaman e-KTP yang dilakukan secara massal yang bertujuan agar semua tercatat dalam database kependudukan sebagai acuan dasar perencanaan pembangunan.

Urusan Kependudukan dan Catatan sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 merupakan OPD yang wajib ada di Daerah, oleh karena itu tahun

2017 Urusan kependudukan dan catatan sipil di Provinsi Sulawesi Tenggara resmi ditangani oleh OPD Kependudukan dan Catatan Sipil. Kinerja Penyelenggara Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.70 Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2024

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Cakupan Pelayanan							
1	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk		73,09	93	-	-		-
2	Rasio bayi beraktekelahiran		87,33	79,64	-	-		-
3	Rasio pasangan berakte nikah		13,89	33,67	-	-		-
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	-	-		-
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	-	-		-
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		84,11	93	-	-		-
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran		87,33	73	-	-		-
	Penyajian Data Kependudukan							
1	Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi Dalam Satu Tahun	-	-	-	100	100	90	95
2	Pemanfaatan Data Kependudukan	-	-	-	13,16	60	31	42

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Walaupun OPD Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara baru terbentuk tahun 2017, namun kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara sudah cukup baik dengan persentase kinerja dari tahun 2018 - 2022 yang selalu meningkat.

f. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Peningkatan pelayanan umum bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa meliputi meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan secara efektif dan efisien melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur dan manajerial pemerintahan desa/kelurahan, meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat desa/kelurahan, dan peningkatan sarana prasarana kelembagaan dan pengembangan regulasi desa/kelurahan.

Semangat otonomi daerah melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi gerbang pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemekaran daerah. Terbentuknya beberapa daerah otonomi baru di Sulawesi Tenggara merupakan peluang yang sangat baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan

terbentuknya daerah otonomi baru dapat pula meningkatkan kinerja pemerintah daerah mulai di tingkat kabupaten/kota hingga di tingkat desa/kelurahan. Terbentuknya pemerintahan daerah baru berarti terbaginya lembaga pemerintahan dibawahnya.

g. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pelayanan Umum Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, yang digambarkan dari beberapa indikator terkait dengan keluarga berencana dan sejahtera untuk menurunkan jumlah penduduk dan menekan angka kemiskinan Indonesia khususnya Sulawesi Tenggara, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.71 Jumlah Pasangan Usia Subur, Peserta KB Aktif, dan Peserta KB Baru di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	PUS	Peserta KB
1.	Buton	15.933	8.975
2.	Muna	24.099	11.093
3.	Konawe	38.040	23.631
4.	Kolaka	32.990	17.752
5.	Konawe Selatan	48.410	30.243
6.	Bombana	24.172	16.671
7.	Wakatobi	15.382	6.606
8.	Kolaka Utara	19.139	11.086
9.	Buton Utara	10.119	4.548
10.	Konawe Utara	9.983	11.449
11.	Kolaka Timur	17.968	3.447
12.	Konawe Kepulauan	5.822	5.207
13.	Muna Barat	11.061	3.944
14.	Buton Tengah	13.156	5.979
15.	Buton Selatan	11.973	5.979
16.	Kota Kendari	38.601	17.648
17.	Kota Baubau	20.228	11.120
Sulawesi Tenggara		357.076	193.734

Sumber : Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2023

Tabel 2.72 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2020

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		2018	2019	2020
1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,18	2,10	Belum ada data
2.	Total Fertility Rate (TFR)	2,88	2,89	2,92
3.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	15,3	16,8	21,4
4.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		23,29	24,17
5.	Jumlah akseptor KB	332,621	338.525	343,318
6.	Jumlah Tenaga Medis Pengelola Program KB :	-	-	-
7.	- Dokter	331	321	309
	- Bidan	1980	2025	1979
	- PPLKB	177	136	219
	- Penyuluh KB	309	304	297

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		2018	2019	2020
8.	Persentase Keluarga Sejahterah	2,18	2,10	Belum ada data

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023, BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

h. Urusan Perhubungan

Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara menjadi suatu prioritas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk melakukan mobilitas dan distribusi barang lintas daerah. Tidak hanya pemenuhan kuantitas sarana dan prasarana saja namun peningkatan kualitas yang diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam memanfaatkan sarana dan prasarana perhubungan secara maksimal. Berikut ini ketersediaan sarana angkutan udara dan laut dan pemanfaatannya dalam mobilitas penumpang dan distribusi barang lintas daerah.

Tabel 2.73 Arus Lalu Lintas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 - 2021

No.	Bidang Urusan/Indikator	Jumlah Penumpang Melalui Moda Angkutan Transportasi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Arus Lalu Lintas Penumpang Melalui Angkutan Udara (Orang)	1,904,380	2,054,807	1,608,895	866.435	838.552
2	Arus Lalu Lintas Penumpang Melalui Angkutan Laut (Orang)	3,714,299	4,636,364	6,930,920	3.260.797	3.525.040

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Data di atas menunjukkan lalu lintas pesawat udara dan penumpang dari lima bandara di Sulawesi Tenggara memperlihatkan jumlah yang beragam dari tahun ke tahun. Pada lima bandara tersebut sejak tahun 2015 hingga 2019 jumlah lalu lintas pesawat udara terus meningkat demikian halnya jumlah penumpang datang dan berangkat, hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana bandara semakin baik. Penurunan terjadi pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan 2021 terkait adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan dilakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah yang kemudian berdampak pada berkurangnya arus penumpang. Demikian halnya dengan bandara lainnya yang terus berbenah dalam meningkatkan pelayanannya, karena ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi kelayakan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menjadi garansi bagi pihak maskapai dan penumpang untuk memanfaatkan bandara tersebut untuk kebutuhan mobilitas penumpang dan distribusi barang. Sementara itu, distribusi barang bongkar maupun muat akan semakin bertambah seiring dengan meningkatnya lalu lintas pesawat udara yang mereduksi rentan waktu pendistribusian. Namun demikian, distribusi barang masih didominasi melalui angkutan darat dan laut karena selain kapasitas angkut yang lebih besar juga besaran biaya distribusi yang lebih minim. Terminal Penumpang yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 ada 2 terminal penumpang, yaitu Terminal Penumpang Tipe A yang berlokasi di Kota Kendari, dan Terminal Penumpang Tipe B yang masih dalam proses perencanaan pembangunan dengan lokasi di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu di

Kabupaten Konawe, Muna, Buton, Wakatobi, Kolaka Utara, Konawe Selatan, Konawe utara, Kolaka Timur, Buton Utara dan Kota Baubau. Selain itu direncanakan juga akan dibangun Terminal Barang berupa terminal truk angkutan barang yang lokasinya dekat pergudangan, pelabuhan laut, dan pelabuhan penyebarangan yaitu direncanakan di Kota Kendari, Baubau, Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Muna, Buton dan Buton Utara.

i. Urusan Komunikasi dan Informatika

Pelayanan dalam urusan komunikasi dan informatika cukup memegang peranan yang penting dalam upaya penyebarluasan informasi maupun efisiensi dalam komunikasi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi yang akurat dan benar, dan tidak menyesatkan yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik kecuali selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan. Perkembangan media komunikasi dan informasi di Provinsi Sulawesi Tenggara memperlihatkan pertumbuhan yang cukup pesat namun, hal ini tentunya sangat didukung dengan kebutuhan masyarakat akan media komunikasi dan informatika yang terus meningkat. Cakupan layanan komunikasi, persentase penduduk yang menggunakan telepon seluler, serta Proporsi Rumah Tangga dengan akses Internet sudah cukup tinggi, hal ini disebabkan karena kemudahan masyarakat dalam akses untuk memiliki telepon seluler didukung dengan adanya operator *provider* yang menyediakan tower jaringan keseluruhan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga layanan Komunikasi dan akses internet sangat mudah didapatkan sampai ke pelosok desa walaupun jaringan yang tersedia kecepatannya masih rendah karena hanya menggunakan jaringan radio dan pita kecil, sehingga ada beberapa kabupaten yang masih sulit jaringan telekomunikasinya.

j. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan Koperasi aktif di Provinsi Sulawesi Tenggara cenderung mengalami peningkatan. Dari tahun 2016 jumlah koperasi meningkat ditahun 2021, diikuti oleh jumlah koperasi aktif yang juga mengalami peningkatan dari 2.908 unit koperasi menurun sebesar 2.280 unit di tahun 2021, akibat dari pada pandemic Covid 19 yang berimbas pada sector perekonomian.

Tabel 2.74. Perkembangan Koperasi Aktif Kabupaten/Kota Tahun 2018 – 2021

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
1.	Kendari	468	466	465	201
2.	Baubau	272	124	140	150
3.	Konawe	279	287	297	177
4.	Konawe Utara	168	136	137	226
5.	Konawe Selatan	187	122	141	155
6.	Konawe Kepulauan	28	2	5	19
7.	Kolaka	377	301	244	134
8.	Kolaka Utara	137	136	137	143
9.	Kolaka Timur	138	32	15	16
10.	Buton	130	98	157	162
11.	Buton Utara	181	45	60	44
12.	Buton Selatan	88	86	38	38
13.	Buton Tengah	75	20	20	20
14.	Muna	264	272	298	261
15.	Muna Barat	103	113	118	89
16.	Wakatobi	164	175	191	66
17.	Bombana	203	123	63	40

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
18.	Provinsi	159	171	290	339
	Jumlah	3.421	2.709	2.816	2280

Sumber : Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Capaian Kinerja Pembangunan Koperasi sejak Tahun 2018 - 2020 untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.75 Indikator Capaian Koperasi di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2020

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		2018	2019	2020
1.	Persentase Koperasi Aktif (persen)	69,39	69,54	68,73
2.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	96,65	96,65	96,84

Sumber : Dinas Koperasi dan KUKM Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas persentase Koperasi aktif setiap tahunnya makin menurun, hal ini disebabkan karena tingkat pertumbuhan koperasi tidak sebesar jumlah koperasi yang aktif.

k. Urusan Penanaman Modal

Provinsi Sulawesi Tenggara yang kaya dengan berbagai potensi sumberdaya alam, tentunya menjadi perhatian khusus bagi para penanam modal untuk berinvestasi. Kondisi ini diperlihatkan melalui berkembangnya modal investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.76. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018– 2024

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	172 perusahaan	275 Perusahaan	253 Perusahaan	349 Perusahaan	474 Perusahaan	480 Perusahaan	480 perusahaan
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 15,50 Triliun	Rp. 18,64 Triliun	Rp. 21,73 Triliun	Rp. 27,93 triliun	Rp. 20,19 triliun	Rp. 21,73 Triliun	Rp. 21,73 Triliun
3	Kenaikan / Penurunan nilai realisasi PMDN (%)	Naik 27,13%	Naik 16,77 %	Naik 13,36 %	Naik 32,18 %	Naik 100,69 %	Naik 7,62%	Tetap
4	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Baik						
5	Lama maksimal waktu pelayanan	7 hari	7 hari	5 hari	3 hari	2 hari	2 hari	2 hari
6	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	B	B	A (-)				

Sumber : Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Faktor-faktor pendukung keberhasilan kinerja DPMPSTSP Provisni Sulawesi Tenggara Tahun 2022 antara lain:

1. Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya

Disadari DPMPTSP Prov. Sultra merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki sumberdaya terbatas, baik sumber daya dana, manusia, maupun sarana dan prasana, namun DPMPTSP Prov. Sultra mampu menunjukkan capaian kinerja dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada.

2. Kondusifnya Iklim Investasi di Sulawesi Tenggara

Masa pandemi disadari berdampak terhadap perekonomian. Meski demikian kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat setempat yang masih tetap terbuka terhadap investor dapat menjadikan Sultra sebagai tujuan investasi yang menarik dengan iklim investasi yang berdaya saing.

3. Dukungan Pendanaan dari BKPM RI

Langkah BKPM RI yang tetap memberikan dukungan dana dekonsentrasi ke DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan kinerja. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan pemantauan, pengendalian dan pelaksanaan perusahaan PMA.

4. Ketersediaan Aplikasi Perizinan Berbasis Online

Aplikasi Perizinan berbasis online sehingga dapat diakses dimanapun, kapanpun serta sarana pelayanan perizinan yang memadai mendukung percepatan waktu pelayanan perizinan dan nonperizinan di DPMPTSP Prov. Sultra paling lama 5 hari, bahkan jika berkas pemohon lengkap, benar dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat dirampungkan hanya dalam hitungan jam.

5. Strategi dan Promosi

Strategi promosi yang sinergis dengan pemerintah pusat melalui pameran serta one on one meeting mampu menarik investor untuk menginvestasikan modalnya di Sulawesi Tenggara.

Selain faktor-faktor tersebut, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPMPTSP juga menghadapi berbagai tantangan antara lain: (1) Kesadaran investor untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) masih perlu ditingkatkan; (2) Saat mengadakan kunjungan lapangan sulit bertemu dengan penanggung jawab proyek dilapangan sehingga sulit mendapatkan informasi mendalam; (3) Kontak person perusahaan tidak aktif; (4) Jarak tempuh dan medan lokasi proyek sulit dijangkau; (5) Tidak ada perwakilan/kantor dilokasi proyek; dan (6) Adanya alamat palsu, atau alamat yang tertera pada izin proyek tidak sesuai dengan kondisi faktual.

I. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Kepemudaan dan olahraga merupakan urusan pelayanan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut dapat diukur dari indikator yang disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.77. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2018	2019	2020	2021
A	Kepemudaan				
1.	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	120	120	120	120
2.	Persentase Wirausaha Muda	50	50	50	0
B	Keolahragaan				
1.	Cakupan pembinaan olahraga	100	100	100	100
2.	Jumlah Pelatih yang bersertifikat	7	6	9	23
3.	Jumlah atlit muda/pelajar yang dibina	46	46	46	46

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Jumlah atlet yang berprestasi maupun prestasi olahraga yang diraih Provinsi Sulawesi Tenggara setiap tahunnya makin menurun, hal ini disebabkan karena sarana prasarana olahraga yang kurang memadai, dan juga kurangnya jumlah pelatih yang bersertifikat.

m. Urusan Statistik

Urusan statistik di Provinsi Sulawesi Tenggara selain ditangani oleh Badan Pusat Statistik, berdasarkan kewenangannya dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibentuk pada tahun 2016. Namun dalam penyelenggaraan urusan statistik Dinas Kominfo belum menjalankan sepenuhnya sehingga kinerja penyelenggaraan urusan statistik belum optimal dan masih didominasi oleh BPS sebagai . Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. BPS menyajikan data melalui media elektronik maupun media cetak. Untuk media elektronik BPS memberikan layanan berupa sistem data informasi dan statistik Provinsi Sulawesi Tenggara berbasis internet yang dapat diakses melalui website BPS, sedangkan media cetak BPS menyajikan dalam bentuk produk Buku Sulawesi Tenggara dalam angka dan Buku PDRB baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tenggara. Capaian Kinerja Urusan statistik Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.78 Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					Target Kinerja		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Tahun 2018-2020									
1	Data Statistik yang <i>Up to Date</i> dan Mudah Diakses	0%	55%	65%	-	-	-	-	
Tahun 2021-2023									
1	Persentase ketersediaan data statistik sektoral pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-	-	140,64 %	109%	109%	-	
Tahun 2024-2026									

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Sektoral	-	-	-	-	-	-	Cukup (1,8 - 2,6)

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsu Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa Penyelenggaraan Pemerintah **Urusan Statistik** pada Tahun 2018-2020 bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dalam menyiapkan data pencapaian kinerja yang mudah diakses oleh masyarakat secara umum. Pada Tahun 2021-2023 Penyelenggaraan Pemerintah Urusan Statistik pada Tahun 2018-2020 bertujuan untuk meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yan baik dalam menyiapkan ketersediaan data-data sektoral OPD sehingga dapat dimanfaatkan untuk bahan pengambilan kebijakan selanjutnya. Pada Tahun 2024-2026 Penyelenggaraan Pemerintah Urusan Statistik pada Tahun 2024-2026 tujuan diarahkan untuk Mewujudkan Transparansi Informasi Publik dan Mutu Data Sektoral dengan Keamanan Informasi Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

n. Urusan Persandian

Kebijakan urusan pemerintah dibidang persandian sangat penting sesuai Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada perangkat Daerah Bidang Persandian dalam menangani pengamanan informasi dan pola hubungan komunikasi persandian antar perangkat daerah, keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang persandian sangat ditentukan oleh sarana dan prasarana yang mendukung pengamanan informasi yang dikecualikan maupun informasi yang terbuka. Masih rendahnya perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah, hal ini disebabkan karena Organisasi Pemerintah yang menangani urusan Persandian yaitu Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian baru dibentuk tahun 2017, begitu pula Peraturan yang menjadi payung Hukum urusan Persandian yaitu Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/kota juga baru dikeluarkan pada tahun 2017.

Tabel 2.79 Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2024

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tahun 2018-2020								
1	Meningkatnya peran Persandian Dalam Pengamanan Informasi	40%	60%	85%	-	-	-	-
Tahun 2021-2023								
1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan	-	-	-	70%	110%	110%	-

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	informasi Pemerintah							
Tahun 2024-2026								
1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	-	-	-	-	-	-	Tinggi (16-34) dan Pemanfaatan Kerangka Kerja Dasar (273 - 455)

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsu Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa Penyelenggaraan Pemerintah **Urusan Persandian** pada Tahun 2018-2020 bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dalam menyiapkan data pencapaian kinerja yang mudah diakses oleh masyarakat secara umum namun tetap mengutamakan keamanan Sistem Informasi Program Pemerintah. Pada Tahun 2021-2023 bertujuan untuk meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yan baik dengan mengutamakan pengaman informasi Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Tahun 2024-2026 tujuan diarahkan untuk mewujudkan Transparansi Infomasi Publik dan Mutu Sektoral dengan Keamanan Informasi melalui Pemanfaaaatan TIK dengan tetap mengutamakan peningkatan keamanan data dan informasi pemerintah.

o. Urusan Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan program/kegiatan yang berkaitan dengan kesenian, perfilman, cagar budaya, permuseuman, sejarah dan nilai-nilai budaya. Dalam melaksanakan tugas, bidang kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggara kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang kesenian dan perfilman di daerah;
- b. Penyelenggara kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang bidang cagar budaya dan permuseuman di daerah; dan
- c. Penyelenggara kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang sejarah dan nilai budaya di daerah.

p. Urusan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Dengan demikian garis besar kegiatan perpustakaan adalah pengelolaan koleksi, sementara

garis besar kearsipan meliputi penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan (kronologis).

Di bidang perpustakaan selama tahun 2017 hingga 2021 masih dibutuhkan upaya yang maksimal dari pemerintah provinsi dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat sehingga capaian kinerja per tahun bidang perpustakaan semakin meningkat. Capaian kinerja yang telah dicapai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.80. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Bidang Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018- 2024

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian per Tahun					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	14.115	22.514	12.681	9.472	19.708	25.000	30.000
2	Koleksi Buku yang tersedia	77.176	77.176	77.176	77.176	238.153	350.000	400.000
3	Rasio Perpustakaan per satuan Penduduk	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	13.500	13.000
4	Jumlah rata-rata pengunjung Perpustakaan/Tahun	12.000	18.314	16.436	14.695	15.698	18.000	23.000
5	Jumlah Koleksi Judul Buku	73.197	0	250	250	73.197	100.000	110.000
6	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang memiliki Sertifikat	12	28	40	40	41	50	60

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Tabel 2.81 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Urusan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Capaian per Tahun					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara baku	2,40%	2,70%	2,90%	3,15%	3,15%	100,00%	100,00%
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah :

1. Faktor Pendukung :

- a. Ketersediaan Koleksi Buku yang menarik dan lengkap;

Kelengkapan koleksi buku dan e-book adalah satu hal penting yang tidak bisa diabaikan oleh pihak perpustakaan. Selain buku yang lengkap, buku-buku yang menarik juga harus dipastikan tersedia di perpustakaan. Mulai dari buku untuk anak-anak, remaja, hingga dewasa. Dengan demikian semua orang bisa membaca buku sesuai minat dan usia

- b. Ketersediaan tempat Membaca

Kenyamanan pembaca adalah salah satu hal penting lainnya yang juga harus diperhatikan oleh petugas perpustakaan. Kita tentu tahu bahwa semakin nyaman seseorang maka akan semakin betah pula orang tersebut. Maka dari itu dibuat desain interior perpustakaan modern semenarik mungkin sehingga memungkinkan para pengunjung merasa nyaman membaca buku di perpustakaan.

c. Ketersediaan Fasilitas Kantin

Bagi orang-orang yang suka membaca tidak jarang merasa betah untuk menghabiskan waktu berjam-jam membaca buku. Akan tetapi dalam satu waktu tertentu terkadang mereka justru terganggu dengan rasa lapar ditengah kegiatan membaca tersebut. Maka dari itu untuk membuat pembaca merasa tetap nyaman fasilitas kantin.

d. Ketersediaan Fasilitas WIFI

Salah satu inovasi yang diyakini efektif untuk meningkatkan pengunjung perpustakaan adalah adanya layanan wifi gratis. Akan tetapi dalam penyediaan fasilitas yang satu, petugas perpustakaan harus tegas dan menerapkan peraturan bahwa wifi tidak boleh digunakan untuk kepentingan bermain game, menonton film, atau kegiatan tidak penting lainnya

e. Penggunaan Aplikasi Srikandi

Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI merupakan aplikasi yang diluncurkan Pemerintah sebagai aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik

2. Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan dukungan Anggaran operasional
- b. Masih Kurangnya minat dan budaya baca masyarakat yang berbanding lurus dengan rendahnya partisipasi masyarakat dan kesadaran aparat terkait khususnya di pedesaan dalam pembinaan minat dan budaya baca masyarakat
- c. Masih kurangnya jumlah tenaga perpustakaan/Pustawakan
- d. Jumlah Bahan perpustakaan belum memenuhi standar Nasional
- e. Sarana dan prasarana penyimpanan fisik arsip dan pemeliharaan arsip masih kurang. Sarana penyimpanan arsip digital/arsip hasil alih media juga masih terbatas di hardisk eksternal /belum mempunyai server khusus.
- f. Masih kurangnya jumlah Kearsipan/Arsiparis
- g. Masih terbatasnya data dan informasi perpustakaan dan kearsipan dari kabupaten/kota sebagai bahan dalam penyusunan rencana kinerja di tingkat provinsi.

2.1.3.3. Fokus Urusan Layanan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan daerah. Perekonomian Sulawesi Tenggara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) terus mengalami peningkatan dari 118,09 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 139,06 triliun pada tahun 2021.

Tabel 2.82 Kondisi Pengelolaan Sektor Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata kontribusi sektor unggulan daerah terhadap PDRB (Subsektor perikanan) (persen)	11,32	11,25	11,6	11,6	11,6*	11,7	11,7
2	Jumlah total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi (Ribu Ton)	871,57	707,41	636,868	660,877	670,03	670	670
3	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Persen)	-	-	70	85	87	90	93
4	Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	65,14	71,13	70,51	70,95	72,32	72	72
5	Cakupan bina kelompok (Pokmaswas)	131	131	131	135	135	153	155
6	Produksi perikanan kelompok nelayan (Ribu Ton)	259,64	254,03	255,178	254,553	259,64	260	260
7	Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (Juta Hektar luas kawasan konservasi)	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
8	Nilai Tukar Nelayan	123,46	117,02	97,45	102,65	102,46	105	105

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Dari capaian angka tersebut, PDRB Sub-Sektor Perikanan konsisten berkontribusi sebesar 10-12% setiap tahun terhadap PDRB Provinsi (BPS Prov. Sultra) dan diperkirakan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu program kegiatan kelautan dan perikanan mendapat dukungan yang kuat baik dari legislatif maupun eksekutif. Salah satu indikatornya adalah adanya kecenderungan peningkatan alokasi anggaran pembangunan yang dikelola setiap tahun.

Jumlah total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi) terjadi penurunan pada tahun 2019 dan menurun lebih dalam pada tahun 2020. Hal ini juga ditunjukkan pada menurunnya kontribusi sub

sektor perikanan pada PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara. Faktor penyebab penurunan ini adalah adanya wabah covid 19.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus menyoroti pentingnya ketangguhan pada sektor kelautan dan perikanan serta meminimalisir dampak dari resiko krisis akibat pandemi Covid-19. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara terus melaksanakan kebijakan pokok pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap melalui optimalisasi produktivitas sarana prasarana perikanan tangkap serta membuka komunikasi dengan pemangku kepentingan di daerah dan terutama kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara akan lebih berupaya meningkatkan kapasitas kapal-kapal penangkap ikan serta meningkatkan pembinaan kepada nelayan-nelayan tradisional di kabupaten/kota mengingat masih besarnya potensi sumberdaya ikan yang belum dimanfaatkan. Selain itu tentu saja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara akan terus meningkatkan pengawasan izin-izin kapal penangkap ikan dari daerah lain, meningkatkan regulasi dan lebih mengefisienkan pengurusan izin operasional perusahaan-perusahaan perikanan skala nasional untuk berinvestasi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Upaya-upaya peningkatan produktivitas perikanan tangkap tersebut salah satu dampaknya dapat terlihat melalui pertumbuhan angka produksi perikanan tangkap di tahun 2022. Dampak lebih lanjut tentunya adalah peningkatan kesejahteraan nelayan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagaimana data yang dirilis oleh Pusdatin KKP dimana rata-rata indeks NTN Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 mencapai 102,46 dimana nilai NTN ini sempat mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 yaitu sebesar 97,45.

Pendapatan masyarakat nelayan bergantung terhadap pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan (SDKP). Pendapatan masyarakat nelayan secara langsung maupun tidak akan sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka, karena pendapatan dari hasil usaha penangkapan ikan merupakan sumber ekonomi utama bagi keluarganya, sehingga besar kecilnya pendapatan akan sangat berpengaruh terhadap taraf kehidupannya.

Angka konsumsi ikan per kapita per tahun dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di dalam negeri yang dikonsumsi masyarakat. Angka konsumsi ikan per wilayah dimanfaatkan untuk perencanaan dan penetapan kebijakan suatu wilayah dalam pengelolaan perikanan. Sampai akhir triwulan III tahun 2022 Angka Konsumsi Ikan Nasional mencapai 56,48 sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 72,37 (angka sementara).

Angka konsumsi ikan yang terus meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa pemanfaatan produksi hasil perikanan di dalam wilayah provinsi Sulawesi Tenggara sangat tinggi sehingga dapat menjadi peluang pengembangan industri pengolahan ikan dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Saat ini produk hasil olahan berbahan ikan telah banyak dijumpai di pasar-pasar lokal, restoran-restoran kelas menengah dan mini market dalam berbagai kemasan dan jenis olahan yang cukup higienis dengan harga yang cukup terjangkau.

Salah satu strategi pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan masyarakat adalah peningkatan intensitas sosialisasi dan promosi tentang manfaat dan keunggulan kandungan gizi produk olahan perikanan dibanding sumber protein lainnya

Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas Taman Nasional, Taman Wisata Alam Laut, Kawasan Konservasi Perairan, dan Daerah Perlindungan Laut. Kawasan Konservasi dimaksud meliputi total luasan sebesar 2.068.969,41 hektar, yaitu:

- a. Taman Nasional Wakatobi; Taman Wisata Alam Laut Teluk Lasolo dan Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang ;
- b. Daerah Perlindungan Laut; 10 Kawasan Konservasi Perairan; Kawasan Konservasi P3K di Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Kota Kendari dan Bombana; dan,
- c. Daerah Perlindungan Laut di Kecamatan Lasalimu, Lasalimu Selatan, Konawe Selatan, Kapontori, Pasarwajo, Wolowa, dan Siontapina serta Daerah Konservasi Kima di Konawe.

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS). Pembinaan POKMASWAS merupakan rangkaian kegiatan pembekalan sosialisasi dan bimbingan kepada Pokmaswas untuk meningkatkan partisipasi dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Umlah POKMASWAS yang terdaftar hingga saat ini adalah sebanyak 135 kelompok. Kemudian dari sebanyak 18 pokmaswas yang menjadi target awal untuk dilakukan pembinaan selama tahun 2022, hanya 13 kelompok yang dapat dikunjungi dan dilakukan pembinaan. Sementara ada 12 kelompok baru yang dikukuhkan sebagai Pokmaswas Binaan DKP Prov. Sultra.

b. Urusan Pariwisata

Perkembangan Kepariwisata Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan yang cukup baik sejalan dengan meningkatnya kualitas aksesibilitas, amenities dan sarana penunjang dalam melakukan perjalanan di Destinasi Wisata. Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai manfaat terhadap masyarakat setempat dan sekitarnya. Pariwisata mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat Sulawesi Tenggara bahkan bagi Negara sekalipun, manfaat pariwisata dapat dilihat dari berbagai aspek/segmen yaitu manfaat pariwisata dari segi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan, serta peluang dan kesempatan kerja. Capaian kinerja Pariwisata berdasarkan pengukuran dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.83. Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Destinasi Wisata yang	2						

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	dikembangkan (lokasi)							
2	Persentase Tingkat Hunian Hotel (persen)	40,52						
3	Jumlah Kunjungan Wisata (orang)	2.481.632	8.720.256	1.927.142	2.539.976	4.832.290	1.232.915	
4	Rata-rata Lama tinggal Wisatawan (hari)	2,90	3,57	3,48	7,47	7,54	1,70	
5	Jumlah PAD Sektor Pariwisata (Rupiah)	1.030.411.500	1.118.285.000	402.973.900	621.330.000	1.122.401.000	1.102.500.000	
6	Rata – rata Belanja Wisatawan (Rupiah)							3.567.769
7	Kontribusi Sektor Akomodasi & Makan Minum pada PDRB Sulawesi Tenggara (Persen)							1,99

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Tabel diatas menggambarkan perkembangan kinerja utama Dinas pariwisata setiap Periode:

1. IKU Tahun 2018 adalah Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan, Persentase tingkat hunian hotel, jumlah kunjungan wisata, dan Rata –rata lama tinggal wisatawan
2. IKU Tahun 2019-2023 adalah jumlah kunjungan wisata, dan Rata –rata lama tinggal wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata
3. IKU Tahun 2024-2026 adalah Rata – rata Belanja Wisatawan dan Kontribusi Sektor Akomodasi & Makan Minum pada PDRB Sulawesi Tenggara

Perkembangan pariwisata di Sulawesi Tenggara Terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kualitas, aksesibilitas, amenitas dan atraksi wisata serta sarana penunjang lainnya dalam melakukan perjalanan di destinasi wisata. Peningkatan tersebut dapat terlihat pada periode 2018 sampai 2022 jumlah kunjungan wisata, rata-rata lama tinggal wisatawan dan rata-rata pengeluaran wisatawan bersifat fluktuatif. Pada tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah PAD berangsur naik dan semakin memperlihatkan peningkatan pada tahun 2022. Hal ini disebabkan berakhirnya masa pandemic dan beralih ke masa new normal.

Pada tahun 2019, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan system teknologi Mobile Positioning Data (MPD) untuk menghitung jumlah kunjungan dan memantau pergerakan wisatawan nusantara metode MPD pada era digital saat ini dinilai valid, akurat dan real-time dalam pendistribusian data untuk menghitung pergerakan wisatawan di Indonesia. Rata-rata jumlah pengeluaran wisatawan dalam menyumbang perekonomian Sulawesi Tenggara juga mengalami peningkatan sejak tahun 2019 walaupun sempat menurun tahun 2020 disebabkan adanya wabah Covid 19 yang diikuti dengan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah.

Seiring dengan berakhirnya masa pandemi Covid 19, Pariwisata Sulawesi Tenggara kembali bangkit dan kembali meningkat pada tahun 2022 dan untuk menyambut keadaan ini pemerintah gencar melakukan promosi dan even baik lokal, daerah maupun nasional serta program kepariwisataan lainnya untuk kembali menarik minat wisatawan berkunjung ke Sulawesi Tenggara.

c. Urusan Pertanian

a) Pertanian

Pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar bagi PDRB di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagian besar penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara bermata pencaharian sebagai petani. Urusan pertanian meliputi kondisi lahan, jenis pengairan/irigasi, serta produksi dan produktivitas pertanian. Pertanian di Provinsi Sulawesi Tenggara dibagi berdasarkan jenis pengairannya, tabel di bawah ini menampilkan Luas Lahan berdasarkan jenis pengairan dan frekuensi penanaman padi di Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2020 – 2021.

Tabel 2.84. Luas Lahan sawah berdasarkan jenis Pengairan dan Frekuensi Penanaman Padi (Ha) Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2021

No.	Jenis Pengairan	Frekuensi Penanaman			Tidak Ditanami Padi *)	Sementara Tidak Diusahakan	Jumlah
		Tiga kali	Dua kali	Satu kali			
Tahun : 2020							
1	Irigasi	43,0	73.642,3	14.090,0	9.315,4	-	97.090,7
2	Tadah Hujan	6,0	3.780,8	10.973,3	7.140,0	-	21.900,1
3	Rawa Pasang Surut	0,0	639,0	813,0	1.696,5	-	3.148,5
4	Rawa Lebak	0,0	191,0	50,0	1.630,0	-	1.871,0
	Jumlah	49	78253,1	25926,3	19781,9	-	124010,3
Tahun : 2021							
1	Irigasi	974,0	68.846,8	11.137,3	8.996,4	-	89.954,5
2	Tadah Hujan	15,2	9.851,6	11.605,2	5.437,3	-	26.909,3
3	Rawa Pasang Surut	0,0	617,0	2.017,0	1.797,5	-	4.431,5
4	Rawa Lebak	0,0	191,0	50,0	1.630,0	-	1.871,0
	Jumlah	989,2	79506,4	24809,5	17861,2	-	123166,3

Sumber : Dinas Tanaman Pangan & Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Produksi pertanian di Provinsi Sulawesi Tenggara masih didominasi oleh padi dengan jumlah produksi pertanian sebesar 530.029 ton pada tahun 2021, kemudian ubi kayu dengan jumlah produksi 134.038 ton pada tahun 2021 dan jagung dengan produksi sebesar 144.538 ton pada tahun 2021. Pada tabel di bawah ini menunjukkan data luas tanaman, luas panen, produksi dan produktivitas padi dan palawija di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017-2021.

Tabel 2.85. Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)							
	Padi	709.516	519.707	532.773	530.029	488.389	740.042	499.133
	Jagung	221.498	279.170	179.906	150.561	181.295	196.715	185.283
	Kedelai	9.853	1.540	629	574	9.681	6.876	9.894
	Kacang Tanah	2.054	3.221	3.046	3.104	2.332	2.996	2.383
	Kacang Hijau	510	449	804	296	307	650	314
	Ubi Kayu	210.387	144.752	167.769	137.657	149.336	216.582	152.621
	Ubi Jalar	20.291	17.682	17.707	15.469	15.269	22.396	15.605
2.	Jumlah Populasi Ternak (Ekor)							
	Sapi Potong	298.692	330.594	361.568	391.479	421.454	341.712	371.099
	Sapi Perah	47	37	51	46	60	42	55
	Kerbau	1.472	2.162	2.349	2.544	2.668	2.310	2.502
	Kambing	177.845	183.725	195.128	204.357	213.719	187.828	196.468
	Babi	89.600	90.524	98.108	108.606	117.216	92.843	102.313
	Kuda	721	712	644	667	724	760	787
	Ayam Buras	9.934.224	10.861.007	11.088.813	11.572.793	12.168.591	10.719.077	11.190.716
	Ayam Ras Petelur	437.634	463.163	455.719	473.916	505.923	456.022	473.807
	Ayam Ras Pedaging	4.504.344	4.453.326	4.477.630	5.122.986	5.444.745	4.588.885	5.249.684
	Itik	509.262	543.904	577.699	609.651	631.190	53.767	56.724
	Itik Manila	49.323	43.578	42.942	45.353	47.071	45.213	48.441
	Puyuh	10.368	6.319	9.266	3.724	4.090	8.618	9.419
3.	Jumlah Produksi Daging dan Telur (Kg)							
	Produksi Daging							
	Sapi	6.474.830	4.437.749	3.720.990	4.521.025	4.525.615	5.769.413	7.009.837
	Kerbau	38.862	35.832	17.183	32.303	32.768	30.566	39.124

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kambing	356.488	312.734	324.283	205.081	200.882	356.676	420.878
	Babi	801.125	895.349	624.514	556.432	585.216	783.461	879.043
	Kuda	8.100	15.600	9.684	16.800	17.250	9.368	9.954
	Ayam Buras	10.709.094	11.708.166	11.953.741	12.475.471	13.117.741	11.365.197	11.860.720
	Ayam Ras Petelur	320.611	339.314	333.873	352.453	376.254	337.923	357.185
	Ayam Ras Pedaging	4.085.215	4.038.944	5.092.956	5.826.722	6.192.976	4.222.067	4.830.045
	Itik	319.307	341.026	362.216	381.182	395.756	323.186	369.402
	Itik Manila	32.553	28.760	28.342	29.912	31.067	31.967	35.931
	Puyuh	2.281	1.391	2.039	819	900	218	233
	Produksi Telur							
	Ayam Buras	6.446.318	7.047.707	7.195.531	10.277.404	10.806.512	6.841.258	7.716.939
	Ayam Ras Petelur	3.295.388	3.487.618	5.724.897	6.135.121	6.549.471	3.473.342	3.722.728
	Itik	3.266.403	3.488.601	6.705.361	4.885.177	5.057.771	3.445.985	3.955.991
	Itik Manila	270.781	239.243	235.752	248.988	258.431	265.911	280.616
	Puyuh	18.007	10.975	16.094	6.468	7.104	17.207	18.842

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Tabel 2.86 Luas Lahan yang di tanami padi dan tidak ditanami padi serta frekuensi penanamannya di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 – 2021

No.	Tahun	Ditanami Padi			Tidak Ditanami Padi *)		Jumlah
		Satu kali	Dua Kali	≥ Tiga kali	Ditanami tanaman lainnya	Tidak Ditanami apa pun	
1.	2019	24.810,0	76.139,0	1.685,9	7.240,0	13.415,0	123.289,9
2.	2020	25.926,3	78.253,1	49,0	7.502,0	12.279,9	124.010,3
3.	2021	24.809,5	79.506,4	989,2	7.358,3	10.502,9	123.166,3

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Tabel 2.87. Luas Lahan Pertanian Tanaman Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Lp2b (Ha)	Lcp2b (Ha)	Kp2b (Ha)
1.	Buton	1.778	1.130	2.908
2.	Muna	1.785	3.298	5.083
3.	Konawe	41.406	18.826	60.232
4.	Kolaka	12.181	1.300	13.481

No.	Kabupaten/Kota	Lp2b (Ha)	Lcp2b (Ha)	Kp2b (Ha)
5.	Konawe Selatan	25.565	15.323	40.888
6.	Bombana	13.689	4.870	18.559
7.	Wakatobi	-	-	-
8.	Kolaka Utara	2.586	1.318	3.904
9.	Buton Utara	2.332	552	2.884
10.	Konawe Utara	4.277	3.487	7.764
11.	Kolaka Timur	15.101	6.513	21.614
12.	Konawe Kepulauan	3.756	4.240	7.996
13.	Muna Barat	4.005	4.638	8.643
14.	Buton Tengah	51	663	714
15.	Buton Selatan	-	-	-
16.	Kendari	1.319	1.797	3.116
17.	Baubau	1.375	664	2.039
Jumlah		131.206	131.206	68.619

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, tahun 2022

Ket: LP2B = Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
LCP2B = Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
KP2B = Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

b) Perkebunan

Sektor Perkebunan merupakan penyumbang nilai tertinggi pada sub kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian yakni sebesar 26,06 persen. PDRB dari golongan tanaman perkebunan dengan nilai 8,61 Triliun Rupiah dihitung atas dasar harga berlaku. Dari nilai tersebut kontribusi terhadap PDRB Sulawesi Tenggara sebesar 6,20 persen. Pada tahun 2021 atas dasar harga konstan pertumbuhan PDRB sektor perkebunan tumbuh positif 2,49 persen.

Sektor Hortikultura yang merupakan salah satu lapangan usaha penyumbang 0,94 persen PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai 1,036 Triliun rupiah pada tahun 2021. Dari nilai tersebut kontribusi terhadap PDRB Sulawesi Tenggara sebesar 0,94 persen. Pada tahun 2021 atas dasar harga konstan pertumbuhan PDRB sektor hortikultura meningkat 0,76 persen, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.88. Kontribusi Sektor Perkebunan & Hortikultural terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2021

No.	Indikator	Kontribusi			
		2018	2019	2020	2021
	Perkebunan				
1.	Nilai PDRB Sub Sektor Perkebunan ADHB (Juta Rupiah)	7.430,81 (Miliar Rupiah)	8.154,60 (Miliar Rupiah)	8.186,84 (Miliar Rupiah)	8.618,62 (Miliar Rupiah)
2.	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara ADHB (persen)	23,96	23,73	24,13	23,80
3.	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perkebunan terhadap Subkategori	26,26	26,59	26,07	26,05

No.	Indikator	Kontribusi			
		2018	2019	2020	2021
	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (persen)				
4.	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara (persen)	6,29	6,31	6,29	6,20
5.	Pertumbuhan PDRB golongan tanaman perkebunan ADHK (persen)	8,72	7,06	-3,87	2,49
	Hortikultura				
6.	Nilai PDRB Sub Sektor Hortikultura ADHB (Juta Rupiah)	1.119,18 (Miliar Rupiah)	1.241,04 (Miliar Rupiah)	1.264,12 (Miliar Rupiah)	1.306.,98 (Miliar Rupiah)
7.	Kontribusi PDRB Sub Sektor Hortikultura terhadap Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (persen)	3,96	4,05	4,02	3,95
8.	Kontribusi PDRB Sub Sektor Hortikultura terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara (persen)	0,95	0,96	0,97	0,94
9.	Pertumbuhan PDRB golongan tanaman hortikultura ADHK (persen)	5.50	5,91	-2,66	0,76

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

Tabel 2.89. Capaian dan Target Kinerja Sektor Perkebunan dan Hortikultural Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 - 2024

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Ton)					Target Kinerja (Ton)	
		2018	2019	2020	2021	2012	2023	2024
	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan dan Hortikultura :							
1.	Kakao	134.585	115.023	114.919	114.828	106.667	130.180	104.754
2.	Jambu Mete	25.504	50.862	48.704	59.142	51.834	23.826	36.321
3.	Kelapa Dalam	41.899	37.572	46.860	40.281	39.192	39.678	41.540
4.	Cengkeh	5.315	13.420	14.291	14.420	9.853	12.911	9.410
5.	Lada	13.719	5.718	5.747	5.798	5.749	5.069	6.009
6.	Kopi	-	-	-	2.796	2.779	2.677	2.705

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Ton)					Target Kinerja (Ton)	
		2018	2019	2020	2021	2012	2023	2024
7.	Pala	-	-	-	806	769	422	633
8.	Bawang Merah	379	390	558	1.015	487	621	458
9.	Cabai Rawit	3.377	3.669	3.865	4.287	3.915	3.811	3.923
10.	Cabai Besar	1.230	1.408	1.815	2.411	2.540	1.706	2.545
11.	Jeruk	86.291	27.267	35.208	22.219	22.163	22.100	21.100
12.	Durian	-	-	-	12.885	23.752	11.092	23.983

Sumber: Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

c) Urusan Kehutanan

A. Peningkatan Akses Kepada Masyarakat dalam pengelolaan Hutan melalui Pehutanan Sosial

Indikator kinerja ini merupakan perwujudan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat di sekitar kawasan hutan yang selama ini belum memiliki akses terhadap pengelolaan kawasan hutan dengan cara membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Pola pengelolaan yang dapat diberikan kepada masyarakat melalui Perhutanan Sosial adalah Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat dan Kemitraan. Pola Perhutanan sosial ini selain memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat yang secara langsung merupakan pengakuan sosial dan pengakuan status hukum bagi masyarakat juga untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik tenurial dan adat.

Peningkatan Akses Kepada Masyarakat dalam pengelolaan Hutan melalui Pehutanan Sosial ini dilaksanakan dalam program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan masyarakat di bidang kehutanan dengan indikator kinerja adalah luas fasilitasi izin perhutanan sosial (10.000 Hektar/Tahun) dengan capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 seluas 91.608 Ha atau 183,22 % dari target seluas 50.000 Ha. yang terdiri dari HD seluas 31.476 Ha, HKm seluas 37.001 Ha, HTR seluas 3.575 Ha dan Kemitraan seluas 19.556 Ha dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun 2018 seluas 39.122 Ha atau 391,22 % dari target seluas 10.000 Ha, yang terdiri dari HD seluas 29.317 Hektar, HKm seluas 8.643 Ha, HTR seluas 1.067 Ha dan Kemitraan seluas 95 Ha. tahun 2019 seluas 25.747 Ha
2. Tahun 2019 seluas 25.747 Ha atau 257,47% dari target seluas 10.000 Ha yang terdiri dari HKm seluas 13.215 Ha, HTR seluas 273 Ha dan Kemitraan seluas 12.259 Ha
3. Tahun 2020 seluas 5.244 Ha atau 52,44 % dari target seluas 10.000 Ha yang terdiri dari HD seluas 349 Ha, HKm seluas 4.860 Ha dan Kemitraan seluas 35 Ha
4. Tahun 2021 seluas 11.440 atau 114,40 % dari target seluas 10.000 Ha yang terdiri dari HD seluas 1.810 Ha dan HKm seluas 9.630 Ha

5. Tahun 2022 seluas 10.055 Ha atau 100, 55 % dari target seluas 10.000 Ha yang terdiri dari HTR seluas 2.235 Ha, HKm seluas 653 Ha

Tingginya capaian kinerja ini disebabkan oleh tingginya minat masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengikuti program perhutanan sosial, adanya regulasi dan pembinaan serta pendampingan dari Dinas Kehutanan dan BPSKL wilayah Sulawesi.



Gambar 2.14 Peningkatan Akses Kepada Masyarakat dalam pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial Tahun 2018-2022

Tabel 2.90. Target dan Realisasi Luas Fasilitas Izin Perhutanan Sosial 2018-2022

Tahun	Izin Perhutanan Sosial (Hektar)		Persentase
	Target	Realisasi	
2018	10.000	39.122	391,22
2019	10.000	25.747	257,47
2020	10.000	5.244	52,44
2021	10.000	11.440	114,40
2022	10.000	10.055	100,55
Jumlah	50.000	91.608	183,22

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Tabel 2.91. Realisasi Luas Fasilitas Izin Perhutanan Sosial 2018-2022 (menurut Jenis Izin)

Tahun	Luas Izin Perhutanan Sosial (Hektar)				Jumlah
	HD	HKm	HTR	Kemitraan	
2018	29.317	8.643	1.067	95	39.122
2019	0	13.215	273	12.259	25.747
2020	349	4.860	0	35	5.244
2021	1.810	9.630	0	0	11.440
2022		653	2.235	7.167	10.055
Jumlah	31.476	37.001	3.575	19.556	91.608

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

B. Persentase Kerusakan Hutan Per Tahun (deforestasi)

Indikator kinerja ini menargetkan agar laju deforestasi di Provinsi Sulawesi Tenggara terjadi penurunan sekitar 1 % per tahun (maksimal). Guna Optimalisasi daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis dan pemulihan cadangan sumber daya alam, peningkatan kualitas hutan dan lahan dapat di capai dengan menurunkan laju kerusakan hutan per tahun melalui upaya menurunkan luas lahan kritis, melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan dari kebakaran hutan dan lahan, pencurian atau illegal logging, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang illegal. Realisasi capaian sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.92 Luas dan Persentase Kerusakan Kawasan Hutan 2018-2022

Tahun	Luas Kawasan Hutan (Hektar)	Luas Kerusakan Kawasan Hutan (Hektar)	Persentase (%)
2018	2.322.311,73	80.888,600	3,48
2019	2.322.311,73	2.893,107	0,12
2020	2.322.311,73	3.209,040	0,14
2021	2.322.311,73	1.852,250	0,08
2022	2.322.311,73	8.429,600	0,36

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Persentase Kerusakan Hutan Per Tahun ini dilaksanakan dalam program pengelolaan Hutan dengan salah satu indikator kinerja adalah persentase penurunan luas kerusakan hutan (1%/Tahun) dengan capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 rata-rata capaian 0,84 persen yang berarti laju deforestasi di provinsi sulawesi tenggara terjadi penurunan dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun 2018 seluas 80.888,660 Ha atau 3, 48 % dari 2.321.311,73 Ha, yang menggambarkan peningkatan laju deforestasi
2. Tahun 2019 seluas 2.893,107 Ha atau 0,12 % dari 2.321.311,73 Ha, yang menggambarkan penurunan laju deforestasi
3. Tahun 2020 seluas 3.209,040 Ha atau 0,14 % dari 2.321.311,73 Ha, yang menggambarkan penurunan laju deforestasi
4. Tahun 2021 seluas 1.852,250 Ha atau 0,08 % dari 2.321.311,73 Ha, yang menggambarkan penurunan laju deforestasi
5. Tahun 2022 seluas 8.429,600 Ha atau 0,36 % dari 2.321.311,73 Ha, yang menggambarkan penurunan laju deforestasi

Berdasarkan data diatas dalam kurun waktu 2019-2022 terjadi penurunan laju deforestasi yang berarti target capaian indikator kinerja rata-rata maksimal 1 % laju kerusakan hutan tercapai dengan realisasi kinerja rata-rata 0,84 %

C. Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi

Indikator kinerja menunjukkan luas lahan kritis yang direhabilitasi sampai dengan tahun 2022 mencapai 0,37 % atau 7.266 Hektar dari total luas lahan kritis 1.985.795 Hektar. Persentase Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi dilaksanakan dalam program Pengelolaan Hutan, Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayat dan ekosistemnya dan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Tahun 2018 luas lahan kritis yang direhabilitasi adalah 1.250 Hektar atau 100 % dari target seluas 1.250 Hektar dengan persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi 0,30 % dari 423.375 Hektar luas lahan kritis.
2. Tahun 2019 luas lahan kritis yang direhabilitasi adalah 1.333 Hektar atau 106,64 % dari target seluas 1.250 Hektar dengan persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi 0,31 % dari 423.375 Hektar luas lahan kritis.
3. Tahun 2020 luas lahan kritis yang direhabilitasi adalah 2.547 Hektar atau 203,76 % dari target seluas 1.250 Hektar dengan persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi 0,61 % dari 420.764 Hektar luas lahan kritis.
4. Tahun 2021 luas lahan kritis yang direhabilitasi adalah 931 Hektar atau 74,48 % dari target seluas 1.250 Hektar dengan persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi 0,22 % dari 420.764 Hektar luas lahan kritis.
5. Tahun 2022 luas lahan kritis yang drehabilitasi adalah 1.205 Hektar atau 96,40 % dari target seluas 1.250 Hektar dengan persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi 0,41 % dari 420.764 Hektar luas lahan kritis.

Tabel 2.93. Persentase Luas lahan kritis yang di Rehabilitasi Tahun 2018-2022

Tahun	Persentase Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi		
	Luas Lahan Kritis	Realisasi	%
2018	423.375	1.250	0,30
2019	423.375	1.333	0,31
2020	420.764	2.547	0,61
2021	420.764	931	0,22
2022	297.517	1.205	0,41
Jumlah	1.985.795	7.266	0,37

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Tabel 2.94. Realisasi Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi 2018- 2022

Tahun	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Hektar)		
	Target	Realisasi	%
2018	1.250	1.250	100,00
2019	1.250	1.333	106,64
2020	1.250	2.547	203,76
2021	1.250	931	74,48
2022	1.250	1.205	96,40
Jumlah	6.250	7.266	116,26

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

D. Rasio Luas Kawasan Lindung untuk menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan

Luas Kawasan Hutan Lindung Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2022 adalah 1.369.9117 Hektar dengan rasio 58,98 % dari total luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 2.322.312 Hektar. Indikator capaian pertahun sebagai berikut :

1. Tahun 2018, rasio luas kawasan lindung sebesar 58,48 % atau 1.364.413 Hektar dari 2.333.155 Hektar luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Tahun 2019, rasio luas kawasan lindung sebesar 58,48 % atau 1.364.413 Hektar dari 2.333.155 Hektar luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Tahun 2020, rasio luas kawasan lindung sebesar 58,48 % atau 1.364.413 Hektar dari 2.333.155 Hektar luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara
4. Tahun 2021, rasio luas kawasan lindung sebesar 58,98 % atau 1.369.9117 Hektar dari 2.322.312.155 Hektar luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara
5. Tahun 2022, rasio luas kawasan lindung sebesar 58,98 % atau 1.369.9117 Hektar dari 2.322.312.155 Hektar luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara

Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022, luas kawasan lindung bertambah 4.704 hektar dari perubahan fungsi akan tetapi luas kawasan hutan berkurang 10.843 hektar. Perubahan ini tidak mempengaruhi secara signifikan Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan.

Tabel. 2.95 Rasio Luas Kawasan Lindung Tahun 2018-2022

Tahun	Kawasan Lindung (Hektar)			Total Luas Kawasan Hutan	Rasio (%)
	Hutan Lindung	Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Jumlah		
2018	1.081.489	282.924	1.364.413	2.333.155	58,48
2019	1.081.489	282.924	1.364.413	2.333.155	58,48
2020	1.081.489	282.924	1.364.413	2.333.155	58,48
2021	1.080.826	288.291	1.369.117	2.322.312	58,98
2022	1.080.826	288.291	1.369.117	2.322.312	58,98

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Tabel 2.96 Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 -2024

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2012	2023	2024
IKU 2018-2023								
1	Peningkatan Akses Legal Kepada Masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (Ha)	39.122	25.747	5.244	11.440	10.055	10.000	-
2	Persentase Penurunan Kawasan Hutan (%)	3,48	0,12	0,14	0,08	0,36	1	-
3	Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi (Ha)	1.250	1.333	2.547	931	1.205	1.000	-
4	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan Hutan (%)	58,48	58,48	58,48	58,98	8,98	58,48	-
IKU 2024-2026								
1	Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Pertanian, Kehutanan, & Perikanan (%)	-	-	-	-	-	-	2,75
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai)	-	-	-	-	-	-	74,32

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

d. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Bidang energi dan sumberdaya mineral mempunyai kontribusi cukup besar dalam mendukung perekonomian Sulawesi Tenggara. Aktivitas pertambangan merupakan sektor yang paling besar dalam menyumbangkan pendapatan daerah dan mendongkrak perekonomian daerah.

1) Pertambangan

Pertambangan merupakan salah satu sektor penyumbang pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Penerimaan Daerah dari sektor pertambangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.97. Penerimaan Daerah Sektor Pertambangan Tahun 2017 - 2020

Uraian	Realisasi Capaian Per Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Penerimaan daerah dari sektor Pertambangan	256.996.000.56	581.855.707.509	1.038.711.685.941	1.529.449.502.612

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2021

Tambang Nikel dan Aspal merupakan dua jenis produksi pertambangan yang menonjol di Sulawesi Tenggara. Produksi dan nilai produksi kedua jenis tambang tersebut ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.98. Keadaan Komoditas Pertambangan Nikel dan Aspal di Sulawesi Tenggara Tahun 2013 - 2020

Tahun	Produksi (ton)			Nilai Produksi (Rp. Juta Rupiah)		
	Bijih Nikel	Ferro Nikel	Aspal	Bijih Nikel	Ferro Nikel	Aspal
2013	29.431.004	15.535	583.830	5.398	2.563.275	175.148
2014	1.387.140	16.851	27.529	138.714	1.152	27.529
2015	932.539	17.350	18.150	709.290	41.550	6.676
2016	1.539.426	18.000	50.435	753.291	2.020.750	5.589
2017	9.043.232,94	112.490	17.039	4.059.613	3.073.548	15.960
2018	16.926.763	24.135	53.000	-	-	-
2019	22.576.054	119.900	25.846	-	-	-
2020	22.531.686	-	91.000	-	-	-

Sumber : Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2021

Sampai saat ini, izin pertambangan di Sulawesi Tenggara semakin diperketat dengan tujuan untuk menghindari terjadinya penambangan liar.

Tabel 2.99 Pertambangan Tanpa Izin di Sulawesi Tenggara Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator	Realisasi Capaian Per Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Luas areal penambangan liar yang ditertibkan	662,25	47,68	0	199,62	8,96
2.	Luas areal penambangan liar	511	108,48	33,91	25,04	36,311
3.	Pertambangan tanpa izin	129,60	43,95	0	797	25

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Tahun 2017 - 2018, kewenangan perizinan mineral dan batubara masih menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga tidak ada data penambangan liar. Data luas area penambangan liar diperoleh dari hasil pelaksanaan pengawasan lapangan terhadap bukaan lahan usaha pertambangan tanpa izin, data luas penambangan liar yang ditertibkan diperoleh dari perhitungan luas lahan usaha pertambangan yang telah ditertibkan Izin Usaha Pertambangan.

2) Listrik

Pertumbuhan permukiman di Sulawesi Tenggara signifikan dengan penambahan cabang dan ranting perusahaan listrik Negara, banyaknya pelanggan, tenaga listrik yang terjual serta nilai penjualan listrik. Keadaan perkembangan listrik di Sulawesi Tenggara Tahun 2016 - 2020 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.100. Perkembangan Kelistrikan di Sulawesi Tenggara Tahun 2016 - 2021

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Elektrifikasi (persen)	82,1	78,11	91,47	94,94	95,96	94
Daya Terpasang	243,520	257,690	-	91,70	91,70	-

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2021

Pertumbuhan permukiman, industri dan perdagangan di Sulawesi Tenggara signifikan dengan penambahan cabang dan ranting Perusahaan Listrik Negara, banyaknya pelanggan, tenaga listrik yang terjual serta nilai penjualan listrik. Keadaan perkembangan listrik di Sulawesi Tenggara tahun 2019 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.101. Jumlah Pelanggan, Tenaga Listrik yang terjual, dan Nilai Penjualan Tenaga Listrik Menurut Kategori Pelanggan Tahun 2020 - 2021

Kategori Pelanggan	Jumlah Pelanggan		Tenaga Listrik yang terjual		Nilai Penjualan	
	2020	2021	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Industri	358	390	42.757.076	358	390	42.757.076
Bisnis	21.296	22.301	154.633.658	21.296	22.301	154.633.658
Penerangan jalan	-	-	-	-	-	-
Jawatan	3.901	4.363	45.588.009	3.901	4.363	45.588.009
Rumah tangga	393.355	423.735	518.712.576	393.355	423.735	518.712.576
Sosial	8.837	9.500	30.722.402	8.837	9.500	30.722.402
Lainnya	86	106	1.945.046	86	106	1.945.046
Jumlah	427.833	460.395	794.358.766	427.833	460.395	794.358.766

Sumber : Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2022

3) Energi Baru Terbarukan

Bauran energi primer Sulawesi Tenggara Tahun 2015 didominasi oleh minyak bumi atau sekitar 88,5 persen. Selanjutnya adalah batubara dengan pangsa sekitar 6,7 persen serta gas sebesar 4,0 persen. Selain itu, bauran energi lainnya berupa energi baru terbarukan menyumbang sebagian kecil keseluruhan bauran energi daerah atau sebesar 0,8 persen.

Energi fosil berupa cadangan minyak dan gas bumi (migas) Indonesia diperkirakan habis dalam 12 tahun mendatang, sehingga bauran energi primer Sulawesi Tenggara yang didominasi oleh minyak bumi dikhawatirkan ketahanan dan keberlanjutannya.

Sulawesi Tenggara memiliki potensi energi terbarukan seperti panas bumi, surya, air, angin/bayu, biomassa dan lainnya. Potensi-potensi tersebut seharusnya dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mengganti dominasi minyak bumi untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi.

Tabel 2.102 Bauran Energi Sulawesi Tenggara Tahun 2015

No.	Jenis Energi	Satuan	Potensi
1.	Panas Bumi	MW	6.340*
2.	Mikro Hidro	MW	896
3.	Biomassa	MW	301
4.	Surya	MW	164
5.	Bayu	MW	3.917
6.	Minyak Bumi	MW	257
7.	Gas Bumi	MMSTB	0,1

Sumber : Rencana Umum Energi Nasional

Ket : * Sulseltra

e. Urusan Perindustrian dan Perdagangan

1) Perkembangan Sektor Industri Kecil

Perkembangan sektor industri kecil di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah industri tahun 2018 sebesar 13.213 perusahaan, cukup banyak dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 9.471

perusahaan dengan nilai investasi tahun 2018 sebesar 1,6 triliun. Perkembangan Sektor Industri Kecil Tahun 2017-2021 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.103 Perkembangan Sektor Industri Kecil di Sulawesi Tenggara, Tahun 2017 - 2021

Kelompok / Jenis Industri	Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Investasi (Rp.000)	Nilai (Rp.000)
Industri Kimia	2017	1.557	8.934	182.727.498	805.132.943
	2018	10	248	18.782.421	115.739.908
	2019	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
Industri Logam dan Mesin	2017	1.335	9.624	122.881.134	2.680.613.152
	2018	1	718	30.733.958	2.927.427.599
	2019	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
Industri Aneka	2017	-	-	-	-
	2018	1	122	520.000	547.560
	2019	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	2017	6.579	30.966	1,134.753.891	1.790.638.742
	2018	205	2.987	210.943.172	229.032.383
	2019	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
Industri Kecil :					
- IK Hasil Pertanian dan Kehutanan	2017	-	-	-	-
	2018	1.781	28.609	960.450.349	1.743.048.445
	2019	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
- IK Kimia	2017	-	-	-	-
	2018	1.568	9.886	176.097.754	736.172.659
	2019	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
- IK Logam dan Mesin	2017	-	-	-	-
	2018	3.186	8.837	102.009.662	224.218.467
	2019	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
- IK Aneka	2017	-	-	-	-
	2018	6.461	16.741	128.738.561	342.122.372
	2019	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-
Jumlah	2017	9.471	49.524	1.440.362.523	5.276.384.837
	2018	13.213	68.148	1.628.275.878	6.318.309.393
	2019	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-

Sumber : Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2022

2) Perkembangan Sektor Perdagangan Luar Negeri

● Ekspor Sulawesi Tenggara Menurut Nilai dan Volume

Jika dibandingkan dengan tahun 2018 volume dan nilai ekspor Sulawesi Tenggara Menurut Jenis Komoditas tahun 2019 mengalami peningkatan. Tahun 2018 volume ekspor sebesar 9.246.103,59 ton dengan nilai 1.081.258,27 USD, mengalami peningkatan cukup baik pada tahun 2019 sebesar 16.294.410,85 ton dengan nilai 1.859.753,48 USD, namun pada tahun 2020 Volume Ekspor turun dan Volume Nilai Naik hingga mencapai 1.625.514,52 ton dengan nilai 2.937.514,20 USD. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi global yang menyebabkan berkurangnya volume ekspor dan impor. Tahun 2021 total ekspor volume dan nilai mengalami peningkatan dibanding 2020. Volume dan nilai ekspor Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.104 Ekspor Berdasarkan Volume dan Nilai Tahun 2018 – 2021

Jenis Komoditas Ekspor	Volume (Ton)				Nilai (USD)			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Ekspor Langsung	9.156.740,81	16.188.812,77	1.527.100,74	2.353.721,08	824.201,14	1.584.732,58	2.159.212,29	3.853.773,43
Berbagai Produk Kimia (38)	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan Bakar Mineral (27)	51.657,19	29.334,50	116.902,10	50.002,00	2.168,59	1.259,14	4.221,38	1.500,06
Besi dan Baja (72)	395.028,30	724.796,64	1.410.159,94	2.303.691,42	552.224,01	1.072.095,16	2.154.799,21	3.853.221,81
Bijih, Kerak dan Abu Logam (26)	8.709.728,17	15.434.593,37	-	-	268.099,27	511.084,28	-	-
Ikan dan Udang (03)	135,00	-	4,16	9,66	975,50	-	12,38	29,06
Kakako/ Coklat (18)	100,00	-	-	-	660,00	-	-	-
Kayu, Barang dari Kayu (44)	-	-	-	-	-	-	-	-
Lemak dan Minyak Hewan (15)	-	-	-	-	-	-	-	-
Sayuran (07)	-	-	-	-	-	-	-	-
Tembaku (24)	-	-	-	-	-	-	-	-
Mesin dan	-	-	34,54	-	-	-	179,32	-

Jenis Komoditas Ekspor	Volume (Ton)				Nilai (USD)			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Pesawat Mekanik								
Lainnya	38,15	88,26	0,00	18,00	53,77	294,00	0,00	22,50
Ekspor Tidak Langsung	89.362,78	105.598	98.418,78	155.230,73	257.057,13	275.020,90	238.301,91	370.262,79
Bahan Bakar Mineral (27)	36,00	1.222,00	-	-	1,41	246.027,88	-	-
Besi dan Baja (72)	81.278,90	95.968,98	88.245,75	143.646,95	213.999,31	-	207.674,47	336.287,55
Biji-bijian Berminyak (12)	1.272,88	1.323,04	-	-	1.410,77	1.140,04	-	-
Buah-buahan (08)	540,21	3.299,11	4.120,52	2.337,29	858,20	4.812,66	5.634,46	2.882,03
Ikan dan Udang (03)	3.750,87	2.697,96	3.032,97	6.307,19	25.328,37	19.326,51	20.085,20	27.157,67
Kakao/ Coklat (18)	390,14	640,08	-	-	2.102,19	1.860,00	-	-
Kayu, Barang dari Kayu (44)	344,90	337,74	-	-	903,05	809,54	-	-
Kopi, Teh, dan Rempah-rempah (09)	166,64	41,52	517,25	134,04	606,86	289,29	1.927,93	654,27
Perhiasan/ Permata (71)	0,05	-	-	-	4,14	-	-	-
Produk Hewani (05)	-	-	-	-	-	-	-	-
Pupuk (31)	-	-	-	-	-	-	-	-
Paket Pos, Panel dan barang dikembalikan	-	-	0,30	33,06	-	-	25,62	56,93
Lainnya	1.582,20	67,66	2.496,99	2.772,21	11.842,83	602,61	2.954,45	3.224,34
Total	9.246.103,59	16.294.410,85	1.625.514,52	2.508.951,81	1.081.258,27	1.859.753,48	2.397.514,20	4.224.036,22

Sumber : Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2022

- **Ekspor Sulawesi Tenggara Menurut Negara Tujuan**

Selama tahun 2013-2021 jumlah negara tujuan ekspor Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan baik negara tujuan, nilai maupun volume. Nilai dan Volume ekspor Negara tujuan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.105 Volume dan Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2013-2021

Tahun	Negara Tujuan	Nilai (USD)	Volume (Ton)
2013	Jepang, Taiwan, China, USA, Hongkong, Belanda, Korea Selatan, Australia, Thailand, Ukraina	765.857.144,55	22.179.857,10
2014	China, USA, Australia, Netherland, Mexico, Thailand, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Hongkong, India.	333.012.160,80	1.896.916,65
2015	USA, Australia, Belanda, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Tiongkok, Kepulauan Solomon	134.489.271,31	80,902,57
2016	Belanda, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Kepulauan Solomon, Jerman, Timur Leste	111.930.343,27	135.046,64
2017	Belanda, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Kepulauan Solomon, Jerman, Timur Leste	193.021.030,30	2.530.150,16
2018	Belanda, Hongkong, Korea Selatan, Tiongkok, Australia, Jepang, Ukraina, Papua Nugini, Lainnya	824.201.129,68	9.156.740,79
2019	Belanda, Hongkong, Korea Selatan, Tiongkok, Australia, Jepang, Ukraina, Papua Nugini, Lainnya	16.188.812,77	1.584.732,58
2020	Belanda, Hongkong, Korea Selatan, Tiongkok, Australia, Jepang, Ukraina, Papua Nugini, Lainnya	1.527.100,75	2.159.212,29
2021*	Belanda, Hongkong, Korea Selatan, Tiongkok, Australia, Jepang, Ukraina, Papua Nugini, Lainnya	2.353.721,08	3.853.773,43

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2022

3) Volume dan Nilai Ekspor

Selama tahun 2013-2015 jumlah dan nilai ekspor komoditi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pelabuhan di Sulawesi Tenggara cenderung menurun, di Tahun 2016 mengalami Peningkatan sampai di Tahun 2019, tetapi di Tahun 2020 Volume Ekspor Langsung cenderung menurun di dibandingkan dengan Tahun 2019 . Jumlah ekspor langsung Tahun 2016 nilai ekspor langsung maupun tidak langsung sedikit meningkat yaitu sebesar 135.046,64 ton untuk ekspor langsung dengan nilai sebesar 111.930,34 USD dan ekspor tidak langsung sebesar 47.893,10 ton dengan nilai sebesar 107.312,66 USD. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun 2016, yaitu untuk Ekspor langsung pada tahun 2017 sebesar 193.021,03 (USD), dan untuk Ekspor Tidak langsung tahun 2017 adalah sebesar 189.942,83 (USD). Pada Tahun 2018 dan 2019 Kembali mengalami Peningkatan dari Tahun 2017, Yaitu untuk Ekspor Langsung pada Tahun 2018 sebesar 824.201,13 (USD) dan di Tahun 2019 sebesar 1.584.732,58 (USD), Ekspor Tidak Langsung di Tahun 2018 adalah sebesar 257.057,13 (USD) dan di Tahun 2019 sebesar 275.020,90 (USD), Sedangkan pada Tahun 2020

volume ekspor langsung mengalami penurunan di bandingkan Tahun 2019, Yaitu untuk Ekspor Langsung sebesar 2.159.212,29 (USD), dan Ekspor Tidak Langsung sebesar 238.301,91 (USD) . Pada tahun 2021 nilai ekspor langsung dan ekspor tidak langsung mengalami peningkatan sebesar 3.853.773,43 (USD) dan 370.262,29 (USD).

Tabel 2.106 Volume dan Nilai Ekspor Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2021

Tahun	Ekspor Langsung		Ekspor Tidak langsung	
	Berat (Ton)	Nilai (USD)	Berat (Ton)	Nilai (USD)
2013	32.086.631,62	975.622,92	2.325,55	7.932.95
2014	2.473.197,80	326.314,73	9.813,62	25.321.23
2015	80.802,57	134.489,27	38.186,46	102.427.04
2016	135.046,64	111.930,34	47.893,10	107.312.66
2017	2.530.150,16	193.021,03	85.890,26	189.942.83
2018	9.156.740,00	824.201,13	89.362,78	257.057.13
2019	14.032.134,98	1.584.732,58	97.073,90	275.020.,90
2020	1.527.100,75	2.159.212,29	98.413,78	238.301,91
2021	2.353.721,08	3.853.773,43	155.230,73	370.262,29

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2022

4) Perkembangan Sektor Perdagangan Dalam Negeri

Perdagangan Antar Pulau

Pada tahun 2020 jenis komoditas yang diperdagangkan antar pulau dalam daerah di Sulawesi Tenggara terdiri dari jenis komoditas antara lain: perkebunan dengan volume 55.829.98ton, perikanan dengan volume 12.492,59 ton , peternakan dengan volume 66,02 ton dan 2.438 ekor, kehutanan dengan volume 102 ton dan 4 m3, industri dengan volume 35.055,38 serta total nilai keseluruhan pada tahun 2020 sebesar 2.516.488.515,75, sedangkan total nilai keseluruhan pada tahun 2021 sebesar 5.429.727.355. Perdagangan antar pulau di provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.107. Volume dan Nilai Perdagangan Antar Pulau Menurut hasil Bumi dan Laut di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 - 2021

Jenis Komoditi	Satuan	2020		2021	
		Volume	Nilai (Rp.000)	Volume	Nilai (Rp.000)
Hasil Tanaman Pangan	Ton	-	-	-	-
Hasil Perkebunan	Ton	55.829.98	1.708.196.109,75	30.371	838.555.500
Hasil Perikanan	Ton	12.492,59	237.544.723	3.386.711	976.429.772
Hasil Peternakan	Ton	66,02	2.690.415	55,44	1.330.608
	Ekor	2.438	13.179.780	5.140,44	16.511.675
Hasil Kehutanan	Ton	102	510.490	-	-
	m3	4	2.500	-	-
Hasil Industri	Ton buah	35.055,38	554.364.498	2.573.000	3.596.899.800

Sumber : Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2022

f. Urusan Transmigrasi

Urusan pilihan adalah urusan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*Core Competence*) yang menjadi kekhasan daerah salah satu diantaranya adalah urusan pilihan ketransmigrasian. Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah penerima warga transmigrasi terbanyak di Indonesia. Namun seiring dengan bertambahnya penduduk dan pemekaran daerah, maka ketersediaan lahan untuk permukiman transmigrasi semakin berkurang sehingga mempengaruhi jumlah penerimaan transmigran. Keadaan permukiman transmigrasi sejak tahun 2017 - 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.108 Keadaan Penerimaan Transmigrasi Umum menurut Jenis Transmigrasi Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	2017		2018		2019		2020		2021	
		KK	JIWA								
1.	Keadaan Penerimaan Transmigran Umum Menurut Jenis Transmigran	175	649	115	454	240	802	0	0	45	217

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sultra, Tahun 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa hingga tahun 2017 penerimaan transmigrasi terus dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan lahan transmigrasi yang tersebar di beberapa daerah. Pada tahun 2013 total Kepala Keluarga yang mengikuti Program Transmigrasi dari berbagai wilayah tercatat 407 KK dengan total individu 1.572 jiwa, pada tahun 2014 terjadi penurunan penerimaan transmigrasi umum menjadi 261 KK dan 1.041 jiwa. Sementara transmigrasi swakarsa sejak tahun 2014 tidak dilakukan penerimaan lagi sampai dengan sekarang. Tahun 2017 merupakan penerimaan terendah sejak lima tahun terakhir yaitu sebesar 175 KK dan 649 jiwa. Salah satu alasan menurunnya penerimaan transmigran disebabkan karena kesediaan pemerintah daerah kabupaten di Sulawesi Tenggara untuk menerima Program Transmigrasi yang didukung oleh ketersediaan lahan untuk lokasi transmigrasi baru. Tahun 2020 tidak ada penempatan akibat adanya pandemi covid 19. Akibat masih terjadinya pandemi covid 19, maka Penempatan tahun 2021 hanya menempatkan transmigran penduduk setempat (TPS) tidak ada transmigrasi penduduk asal (TPA) atau transmigran yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Tenggara.

2.1.3.4. Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan

a. Urusan Perencanaan Pembangunan

Untuk melaksanakan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, mempunyai kewenangan :

- 1) Melakukan Perumusan Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan program kerja dan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Menyelenggarakan rapat berkala untuk mendapatkan masukan dan mengetahui hambatan pelaksanaan tugas masing-masing serta mengupayakan pemecahannya;
- 3) Melaksanakan penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Jangka Panjang

Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

- 4) Melaksanakan penyusunan Rencana Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi sesuai usulan program masing-masing yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Melaksanakan penyusunan rencana kerja pengalokasian dana yang bersumber dari APBN sebagai masukan BAPPENAS dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- 6) Melaksanakan tugas perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Provinsi sesuai petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Provinsi dalam rangka menciptakan sinkronisasi program kegiatan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta berusaha menjaring aspirasi masyarakat dan pelaku pembangunan se-Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 8) Melaksanakan tugas koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam hal Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi serta perubahannya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 9) Melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi serta membina hubungan kerja dengan Lembaga Non Departemen dan Swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 10) Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah pada setiap OPD lingkup Pemerintah Provinsi sebagai bahan penyusunan program kerja pembangunan tahun berikutnya;
- 11) Melaksanakan pengkajian dan penelitian pembangunan Daerah untuk perencanaan pembangunan Daerah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 12) Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur.

Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tabel 2.109. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Ton)					Target Kinerja (Ton)	
		2018	2019	2020	2021	2012	2023	2024
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda RPJPD 2005-2025 No. 4 Tahun 2012	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Ton)					Target Kinerja (Ton)	
		2018	2019	2020	2021	2012	2023	2024
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda RPJMD 2018-2023 No. 9 Tahun 2019	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda No 2 Tahun 2014 tentang RTRW 2014-2034)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara 2023

b. Urusan Keuangan

Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.110. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	SILPA terhadap APBD	352.655.750.08 1,43	485.194.593.18 5,58	449.958.890.33 9,61	155.273.768.95 6,00	241.066.735. 765

Sumber: BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara 2021.

c. Urusan Kepegawaian

Urusan Kepegawaian meliputi pendidikan ASN, jabatan struktural, jabatan fungsional. Pendidikan dan pelatihan bagi ASN merupakan tanggungjawab dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sedangkan untuk data terkait jabatan struktural, jabatan fungsional menjadi wewenang dari Badan Kepegawaian Daerah. Tabel-tabel di bawah ini menunjukkan capaian indikator pelayanan urusan pendidikan dan pelatikepegawaian di Provinsi Sulawesi Tenggara:

Tabel 2.111. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2020

No	Indikator	2018	2019	2020
1.	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	10,69 %	8,17 %	7,36 %
2.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	6,48 %	0%	3,24 %

Sumber : BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2021

Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur sipil negara yang berkualitas adalah dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal, pada tahun 2018 persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 10,69 persen, dan mengalami penurunan tahun 2019 8,17 persen dan tahun 2020 7,36 persen. Pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural pada tahun 2018 sekitar 6,48 persen, tahun 2019 tidak ada pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan structural, kemudian pada tahun 2020 sekitar 3,24 persen.

Tabel 2.112. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian Provinsi Sulawesi Tenggara 2015 - 2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	55	55	54	53	54
2.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	1.056	1.076	1.182	1182	1186
3.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	927	1.027	7.731	7.818	8.024

Sumber : BKD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Tabel 2.113. Capaian dan Target Kinerja Urusan Penunjan Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian Provinsi Sulawesi Tenggara 2018 – 2024

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase pejabat struktural yang telah memenuhi kriteria / syarat	94%	-	-	-	-	-	-
2.	Persentase pejabat fungsional yang telah memenuhi kriteria / syarat	85%	-	-	-	-	-	-
3.	Persentase jumlah aparatur yang lulus seleksi penjenjangan teknis, penjenjangan struktural dan penyetaraan ijazah	-	117,65%	111,11%	-	-	-	-
4.	Persentase Aparatur yang diberi sanksi disiplin	-	93,33%	169,23%	-	-	-	-
5.	Menurunnya persentase aparatur yang diberi sanksi disiplin	-	-	-	25%	70%	0,09%	-

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	-	-	-	-	-	-	78 (Sedang)

Sumber : BKD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Pada tahun 2018 tabel di atas, untuk indikator kinerja nomor 1 menunjukkan bahwa capaian Pejabat Struktural yang telah memenuhi kriteria tahun 2018 mencapai 94 % dimana tidak mencapai sesuai target 2018 yang telah ditetapkan yaitu 100 %. Sebagian besar pejabat telah mengikuti pendidikan kepemimpinan struktural, baik Pim IV, Pim III dan Pim II tetapi pada tahun 2018 sebagian besar formasi pejabat masih tetap sama dengan tahun 2017 sehingga realisasi capaian tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Untuk indikator nomor 2 dari tabel diatas menunjukkan persentase ketercapaian Pejabat Fungsional mencapai 85 % dimana tidak mencapai sesuai target yang ditetapkan yaitu 100 %, hal itu disebabkan karena belum semua pejabat fungsional yang mendapatkan pelatihan dan pendidikan teknis fungsional.

Pada Tahun 2019 dari tabel di atas untuk indikator kinerja nomor 3 realisasi jumlah aparatur yang lulus seleksi penjenjangan teknis, penjenjangan struktural dan penyetaraan ijazah sebesar 100% dimana lebih tinggi dari target yaitu sebesar 85% sehingga capaiannya sebesar 117,65%. Realisasi Indikator Kinerja sebesar 100% tersebut merupakan realisasi rata-rata dari pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan Pendidikan dan Pelatihan teknis yang diikuti oleh 226 orang peserta dimana semua peserta lulus, kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural yang diikuti 262 orang peserta dimana semua peserta lulus dan kegiatan Seleksi Penyetaraan Ijazah yang diikuti 115 orang peserta dimana semua peserta lulus. Jika ditotalkan maka jumlah peserta yang mengikuti seleksi sebesar 603 orang peserta dan semuanya lulus seleksi.

Indikator nomor 4 realisasi aparatur yang diberi sanksi disiplin sebesar 0,14 % dari target sebesar 0,15 % sehingga capaiannya menjadi 93,33 %. Realisasi indikator tersebut diperoleh sesuai dengan formulasi indikator kinerja yaitu “jumlah aparatur yang diberi sanksi disiplin dibandingkan jumlah aparatur dikali 100”. Jumlah aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberi sanksi disiplin sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan “Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS” selama tahun 2019 sebanyak 20 orang pegawai. Adapun jumlah aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sampai periode Desember 2019 sebanyak 13.597 orang pegawai. Sehingga berdasarkan formulasi indikator kinerja didapat perhitungan realisasi indikator yaitu $20 : 13.508 \times 100 = 0,14 \%$ dan capaiannya yaitu $0,14\% : 0,15\% \times 100 = 93,33\%$.

Pada tahun 2020 dari tabel di atas, untuk indikator kinerja nomor 3 realisasi jumlah aparatur yang lulus seleksi penjenjangan teknis, penjenjangan struktural dan penyetaraan ijazah sebesar 100% dimana lebih tinggi dari target yaitu sebesar 90% sehingga capaiannya sebesar 111,11%. Realisasi Indikator Kinerja sebesar 111,11% tersebut merupakan realisasi rata-rata dari pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan Pendidikan dan Pelatihan teknis yang diikuti oleh 280 orang peserta dimana semua peserta lulus, kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural dan kegiatan Seleksi Penyetaraan Ijazah yang tidak jadi dilaksanakan akibat dana kegiatannya dialokasikan untuk penanggulangan dampak pandemi covid 19 sehingga tidak ada peserta yang mengikuti seleksi pada kedua kegiatan tersebut. Jika ditotalkan dari ketiga kegiatan tersebut maka jumlah total peserta yang mengikuti seleksi sebesar 280 orang peserta yang hanya berasal dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan teknis saja.

Indikator nomor 4 dari tabel di atas realisasi aparatur yang diberi sanksi disiplin sebesar sebesar 0,22 % dari target sebesar 0,13% sehingga capaiannya menjadi 169,23 %. Realisasi indikator tersebut diperoleh sesuai dengan formulasi indikator kinerja yaitu “jumlah aparatur yang diberi sanksi disiplin dibandingkan jumlah aparatur dikali 100”. Jumlah aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberi sanksi disiplin sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan “Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS” selama tahun 2020 sebanyak 30 orang pegawai. Adapun jumlah aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sampai periode Desember 2020 sebanyak 13.342 orang pegawai. Sehingga berdasarkan formulasi indikator kinerja didapat perhitungan realisasi indikator yaitu $30 : 13.342 \times 100 = 0,22 \%$ dan capaiannya yaitu $0,22\% ; 0,13 \% \times 100 = 169,23\%$.

Pada tahun 2021 dari tabel di atas realisasi aparatur yang diberi sanksi disiplin sebesar sebesar 0,03 % dari target sebesar 0,12% sehingga capaiannya menjadi 25 %. Realisasi indikator tersebut diperoleh sesuai dengan formulasi indikator kinerja yaitu “jumlah aparatur yang diberi sanksi disiplin dibandingkan jumlah aparatur dikali 100”. Pada tahun 2021 terdapat 5 orang aparatur yang diproses pelanggaran disiplin tetapi masih akan dilakukan peninjauan kembali terhadap proses penanganan kasus pelanggaran disiplin yang telah dilakukan. Adapun jumlah aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sampai periode Desember 2021 sebanyak 12.814 orang pegawai. Sehingga berdasarkan formulasi indikator kinerja didapat perhitungan realisasi indikator yaitu $5 : 12.814 \times 100 = 0,03 \%$ dan capaiannya yaitu $0,03\% : 0,12\% \times 100 = 25\%$.

Pada tahun 2022 dari tabel di atas realisasi aparatur yang diberi sanksi disiplin sebesar sebesar 0,07 % dari target sebesar 0,10% sehingga capaiannya menjadi 70 %. Realisasi indikator tersebut diperoleh sesuai dengan formulasi indikator kinerja yaitu “jumlah aparatur yang diberi sanksi disiplin dibandingkan jumlah aparatur dikali 100”. Pada tahun 2022 terdapat 9 orang aparatur yang diproses pelanggaran disiplin. Adapun jumlah aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sampai periode Desember 2022 sebanyak 12.528 orang pegawai. Sehingga berdasarkan formulasi indikator kinerja didapat perhitungan realisasi indikator yaitu $9 : 12.528 \times 100 = 0,07 \%$ dan capainnya yaitu $0,07 : 0,10\% \times 100 = 70\%$.

d. Urusan Pengawasan

Urusan pengawasan menangani masalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di Pemerintahan seperti persentase pelanggaran pegawai, pelanggaran keuangan dan tindak lanjut temuan yang akan dilakukan. Fungsi Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat dan BPK.

Tabel 2.114. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pengawasan Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	74,72 %	79,99 %	95,86 %	90,35 %	80,02%	88,75%	88,75%

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja					Target Kinerja	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Persentase Penurunan Temuan APIP	16,67 %	19,83 %	101,2 %	18,38%	133,8 %	19,75%	20,05%
3.	Persentase Nilai SAKIP OPD minimal B	44,44 %	48,89 %	95,56 %	104,8 %	104,95 %	85,75%	85,75%
4.	Persentase kasus pengaduan yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Level Maturitas SPIP	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	100 %	100 %	100 %
6.	Level Kapabilitas APIP	66,67%	66,67%	66,67%	100%	100 %	100 %	100 %

Sumber : Inspektorat Daerah Prov. Sultra, Tahun 2023

Berdasarkan data di atas bahwa indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara setiap tahun mengalami fluktuasi, namun rata-rata mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun persentase penurunan temuan APIP pada tahun 2021 mengalami penurunan temuan, namun mencapai target yg telah di tetapkan dan yang tahun selanjutnya melebihi target yang telah di tetapkan pada target RENSTRA 2018-2023. Selain itu juga pada level kapabilitas APIP pada tahun 2021 mengalami peningkatan Capaian kinerja pada level 3 sesuai target capaian Renstra yang di tetapkan. Sedangkan pada level maturitas SPIP pada tahun 2021 tdk mencapai target yaitu pada capaian level 2 Berkembang di karenakan yang menjadi hambatan dalam penerapan SPIP meliputi: (a) persepsi pimpinan instansi pemerintah dan auditor atau evaluator terhadap pelaksanaan Sistem pengendalian intern tidak mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai, (b) budaya sungkan yang masih kental, dan (c) kualifikasi sumber daya manusia yang kurang memadai (4) dan belum adanya komitmen pimpinan dalam menerapkan perencanaan berbasis risiko. Namun, pada tahun 2022 telah mencapai tingkat maturitas SPIP pada level 3 terdefinisi yaitu Telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

e. Urusan Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan memiliki fungsi urusan penunjang dalam Pemerintahan. Fungsi Sekertarian Dewan dalam Pemerintahan :

- 1) Memastikan tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota
- 2) Memastikan tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

- 3) Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.

Telah di jelaskan Pada Tabel Kerangka pendanaan terhadap kinerja capaian indikator Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan Frekwensi pembahasan dengan jumlah banyaknya Perda yang di bahas serta Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dengan Jumlah sosialisasi perundang-undangan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Faktor utama yang berperan dalam menciptakan kemajuan ekonomi daerah adalah adanya kejelasan sasaran dan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil, manfaat dan dampaknya bagi peningkatan produktivitas daerah. Hal ini ditandai dengan semakin mantapnya stabilitas makro ekonomi daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.115. Kondisi Makro Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 - 2022

Indikator	Satuan	Capaian
Inflasi Kota Kendari, April 2022	Persen	1,80
Pertumbuhan Ekonomi, Triwulan I 2022	Persen	5,07
Persentase Penduduk Miskin, September 2021	Persen	11,66
Tingkat Pengangguran Terbuka, Agustus 2021	Persen	3,92
Gini Rasio, September 2021	Persen	0,394
Indeks Pembangunan Manusia, 2021	Persen	71,66
Ekspor Sulawesi Tenggara, April 2022	US\$	563,51
Impor Sulawesi Tenggara, April 2022	US\$	156,19
PDRB ADHK 2010, Triwulan I 2022	Juta Rp	72.674.564,41
Nilai Tukar Petani, Mei 2022	Persen	99,97

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

a) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga disini mencakup pembelian untuk makanan dan bukan makanan (barang dan jasa) di dalam negeri maupun di luar negeri. Termasuk pula disini pengeluaran lembaga nirlaba yang tujuan usahanya adalah untuk melayani keperluan rumah tangga.

Salah satu determinan dari kesejahteraan ekonomi penduduk adalah kemampuan daya beli penduduk. Peningkatan kemampuan daya beli akan meningkatkan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokok. Meningkatnya kemampuan daya beli penduduk tentu saja diakibatkan meningkatnya pendapatan. Karena itu besarnya konsumsi/pengeluaran penduduk merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk.

Tabel 2.116. Pengeluaran Rata-rata per Kapita sebulan (rupiah) menurut Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2018 - 2022

Kabupaten	Tahun			
	2018 (Rupiah)	2019 (Rupiah)	2020 (Rupiah)	2021 (Rupiah)
Buton	567,341	617,061	759,159	666,866
Muna	706,484	779,017	809,677	751,006
Konawe	982,295	1,105,872	968,539	1,010,959
Kolaka	1,001,753	1,119,194	1,135,254	1,074,381
Konawe Selatan	803,711	902,608	901,433	1,024,787
Bombana	895,069	988,460	993,701	973,074
Wakatobi	848,192	782,715	896,836	880,615
Kolaka Utara	883,996	1,001,623	1,041,145	1,218,254
Buton Utara	748,753	757,860	892,738	836,889
Konawe Utara	970,529	1,136,152	1,176,540	1,244,561
Kolaka Timur	993,174	876,843	1,007,634	1,000,559
KonaweKepulauan	841,982	906,913	716,948	841,899
Muna Barat	601,916	615,286	651,286	785,091
Buton Tengah	947,181	632,400	544,071	635,848
Buton Selatan	459,136	621,687	670,319	637,771
Kendari	1,596,118	1,644,433	1,684,698	1,704,396
Baubau	1,131,250	1,157,034	1,071,599	1,203,317
Sulawesi Tenggara	969,749	1,021,290	1,037,799	1,070,493

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Berdasarkan tabel pengeluaran rata-rata per kapita sebulan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2017 sebesar Rp 853.720,-. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp 969.749,- pada tahun 2018. Pada tahun 2019 pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk adalah sebesar Rp 1.021.290,-. Sedangkan tahun 2020 pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah sebesar Rp 1,037.799,- dan pada tahun 2021 pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah sebesar Rp 1.070.493,-.

Jika dilihat dari sisi proporsi, pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi makanan terhadap total pengeluaran rata-rata per kapita sebulan (konsumsi makanan dan non makanan) menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi makanan pada tahun 2021 yang sebesar 47,62 persen terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 48,83 persen. Dan proporsi pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi non makanan pada tahun 2021 yang sebesar 52,38 persen terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 51,17 persen.

Secara keseluruhan persentase terbesar yang dikeluarkan untuk konsumsi makanan masyarakat Sulawesi Tenggara didominasi oleh konsumsi makanan dan minuman jadi (12,28 persen), diikuti oleh konsumsi kelompok padi-padian (7,38 persen), rokok (7,16 persen) dan ikan/udang/cumi/kerang (6,48 persen). Sedangkan untuk konsumsi non makanan, pengeluaran untuk perumahan menempati posisi tertinggi (26,30 persen), diikuti oleh pengeluaran untuk aneka barang dan jasa (9,81 persen).

Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) 2004, angka kecukupan kalori penduduk Indonesia adalah 2000 kkal per orang per hari. Sedangkan angka kecukupan protein berdasarkan WNPG 2004 tersebut dipatok sebesar 52 gram per orang per hari.

Tabel di atas menyajikan perkembangan konsumsi kalori dan protein di Sulawesi Tenggara pada tahun 2018-2019. Tahun 2018, besarnya rata-rata konsumsi kalori masyarakat Sulawesi Tenggara sebesar 2.125,18 kkal per kapita per hari meningkat menjadi 2.083,17 kkal per kapita per hari di tahun 2019. Rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari pada tahun 2019 sudah diatas standar kecukupan gizi nasional sesuai WNPG (2000 kkal/kapita/hari). Selain konsumsi kalori, konsumsi protein juga dijadikan ukuran *proxy* terhadap kesejahteraan rumah tangga. Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 62,00gram/kapita/hari dan 61,16gram/kapita/hari sudah cukup tinggi melebihi standar kecukupan gizi nasional sesuai WNPG (52 gram/kapita/hari).

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator : infrastruktur jalan, Perumahan, Irigasi dan Perhubungan.

Tabel 2.117. Kondisi Infrastruktur Jalan, Perumahan, Irigasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2018-2019

No.	Uraian	2018	2019
A.	Jalan		
1.	Nasional	1.498	1.498
2.	Provinsi	1.009	1.009
3.	Kabupaten/ Kota	9.809	9.809
B.	Perumahan		
1.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (persen)	69,9	69,9
2.	Persentase Penduduk berakses air minum (persen)		
3.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (persen)	80,95	80,95
4.	Persentase areal kawasan kumuh (Ha)	4.098,89	4.098,89
C.	Irigasi		
1.	Rasio Irigasi	69%	69%
2.	Persentase Pembangunan Turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	25	25
d.	Perhubungan		
1.	Bandara	5 lokasi	5 lokasi
2.	Pelabuhan	15 lokasi	15 lokasi
3.	Terminal Type B	3 lokasi	4 lokasi

Sumber : BPS , Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2022

2.1.4.3. Luas Wilayah Produktif

Pada Tahun 2018 luas lahan bukan pertanian dan lahan pertanian bukan sawah menurut penggunaan seluas 2,956,206.61 ha, mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 2,911,908.60 ha dan tahun 2020 turun menjadi 2,973,266,90 ha dan tahun 2021 kembali mengalami peningkatan seluas 3,538,119.4 ha.

Tabel 2.118. Luas Lahan Bukan Pertanian dan Lahan Pertanian Bukan Sawah Menurut Penggunaan di Sulawesi Tenggara, Tahun 2018 - 2021 (Hektar)

No.	Indikator	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Luas Lahan Bukan Pertanian dan Lahan Pertanian Bukan Sawah Menurut penggunaan di Sulawesi Tenggara (Hektar)	2,956,206.61	2,911,908.60	2,734,266.90	3,538,119,4

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022

2.1.4.4. Fokus Iklim Berinvestasi

Gambaran atas iklim berinvestasi dapat dilihat pada indikator angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perizinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha dan persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

a. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan cerminan kondisi keamanan dan ketertiban di suatu daerah. Daerah yang aman dan tertib akan menarik investor untuk berinvestasi. Angka kriminalitas Provinsi Sulawesi Tenggara dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.119. Jumlah Tindak Pidana Umum Menurut Jenis Kriminalitas Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021–2022

Jenis Kriminalitas	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Dilaporkan	Diselesaikan	Dilaporkan	Diselesaikan
Pembunuhan	14	32	18	25
Aniaya Berat	22	14	7	6
Aniaya Ringan	16	27	19	16
Aniaya Biasa	848	615	1145	706
C u r a s	30	18	29	16
C u r a t	203	221	189	198
Curanmor	185	65	156	36
Perkosaan	19	22	11	11
Perjudian	26	21	41	20
Perzinahan	26	18	27	20
Pengrusakan	91	62	79	55
Penipuan	94	67	91	48
Penggelapan/Embezzlement	74	67	99	56
Curi Biasa	296	169	277	201
Penipuan dengan Penggelapan	131	55	181	73
Palsu Surat	38	29	56	23
Serobot Tanah	38	22	26	8
Penghinaan	19	10	20	20
Pengeroyokan	303	157	344	177
Lahgun Sajam	2	2	6	2

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

b. Pengenaan Pajak Daerah

Pengenaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah. Realisasi pajak dan macam pajak Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 – 2021 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.120. Realisasi Pajak dan Macam Pajak Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 - 2021

Jenis Pajak	Tahun Anggaran 2020			Tahun Anggaran 2021		
	Target (000 Rp)	Realisasi Nilai (000 Rp)	perse n	Target (000 Rp)	Realisasi Nilai (000Rp)	perse n
Pajak Daerah	-	984,253.36	-	-	931,823.51	-
Retribusi Daerah	-	19,591.16	-	-	24,380.91	-
Bagian Laba BUMD	-	56,845.49	-	-	64,694.89	-
Lain-Lain Pendapatan	-	163,528.52	-	-	135,749.56	-
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	-	97,441.26	-	-	41,053.87	-

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2022

2.1.4.5. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dapat diartikan sebagai keahlian terpadu yang berasal dari daya pikir serta daya fisik yang dimiliki oleh setiap orang. Yang melakukan serta sifatnya dilakukan masih memiliki hubungan yang erat seperti keturunan dan lingkungannya, sedangkan untuk prestasi kerjanya dimotivasi oleh sebuah keinginan dalam memenuhi keinginannya.

Pembangunan Sumberdaya Manusia dalam suatu daerah dapat dilihat dengan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan tahun berjalan yaitu Tahun 2023.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD bertujuan sebagai acuan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam pencapaian sasaran RPJMD yang tertuang dalam RKPD. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Perkembangan pelaksanaan dimaksud meliputi Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD Provinsi Sulawesi Tenggara yang direncanakan dalam RKPD dan dianggarkan dalam APBD.

Capaian Realisasi Anggaran dan Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikategorikan dalam interval penilaian sebagai berikut:

1. Capaian Realisasi Sangat Tinggi (ST)	Interval	$91\% \geq 100\%$
2. Capaian Realisasi Tinggi (T)	Interval	$76\% \leq 90\%$
3. Capaian Realisasi Sedang (S)	Interval	$66\% = 75\%$
4. Capaian Realisasi Rendah (R)	Interval	$51\% = 65\%$
5. Capaian Realisasi Sangat Rendah (SR)	Interval	$51\% \leq 65\%$

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2022 sampai dengan tahun berjalan (Tahun 2023) dan realisasi RPJMD Tahun 2018-2023 dilihat pada Tabel 2.121 (lampiran).

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok daerah yang dapat dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Permasalahan pokok pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara yang bersifat makro, meliputi:

1. Tingkat Kemiskinan Sulawesi Tenggara masih berada diatas rata-rata nasional;
2. Tingkat Pengangguran masih berfluktuasi seiring meningkatnya lapangan pekerjaan pada sektor industri;
3. Kualitas pembangunan manusia masih berada dibawah rata-rata nasional;
4. Masih rendahnya pemerataan dan mutu pendidikan;
5. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat;
6. Kerentanan terhadap kerawanan pangan yang tinggi;
7. Kontribusi PDRB sektor unggulan masih rendah;
8. Kuantitas dan kualitas infrastruktur belum memadai;
9. Konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota masih rendah;
10. Kesenjangan antar daerah cukup tinggi;
11. Pencemaran dan kerusakan lingkungan serta ancaman bencana;
12. Pendapatan Asli Daerah masih rendah; dan
13. Profesionalitas aparatur masih rendah.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat

Berdasarkan gambaran umum kondisi daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada bab sebelumnya terdapat beberapa permasalahan pembangunan yang dapat dirangkum berdasarkan hasil perumusan permasalahan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- Belum semua penduduk memperoleh layanan pendidikan menengah;
- Masih terdapat bangunan sekolah yang tidak memadai;
- Masih rendahnya kuantitas dan kualitas guru tetap jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- Rendahnya produktivitas guru pada jenjang pendidikan menengah kejuruan;
- Masih rendahnya angka melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi;
- Rendahnya kearifan budaya dan tradisional lokal yang dilestarikan;
- Belum optimalnya pembangunan pendidikan khususnya pendidikan menengah kejuruan dengan sektor tenaga kerja.

2. Kesehatan

- Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan masih tinggi (74 kasus yang dilaporkan atau 229/100.000KH);
- Angka Kematian Neonatal yang masih tinggi;
- Angka Kematian bayi dan Kematian balita masih tinggi dibanding dengan Angka Nasional;
- Prevalensi kekurangan gizi/prevalensi stunting lebih tinggi dibanding dengan angka Nasional;
- Angka kesembuhan penderita TB yang rendah (60% target 100%);
- Penderita HIV AIDS di Sultra mencapai 998 kasus;
- Prevalensi penderita malaria di Sultra Tahun 2017 mencapai 0,21 per 1000 penduduk;
- Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat;
- Prevalensi penderita penyakit tidak menular semakin bertambah;
- Masih terdapat 11 kab/kota yang endemis Kasus Kusta dan Frambusia;
- Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas dan Permenkes 56 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit;
- Ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas kefarmasian dan alat kesehatan;
- Ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin masih rendah;
- Ketersediaan SDM Kesehatan yang belum sesuai dengan standar;
- Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat, Ormas dan swasta serta stakeholder lainnya dalam pembangunan kesehatan;
- Belum semua Keluarga di Prov. Sultra memiliki Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak;
- Adanya pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Adanya Krisis dan Kedaruratan Bencana Alam;
- Terbatasnya jenis dan jumlah, kualitas standar alat sarana dan prasarana;

- Kurangnya sarana dan prasarana serta alat penunjang pendidikan dan pelatihan di Balai;
- Pelatihan Kesehatan Masyarakat;
- 41 % Kabupaten/ Kota belum memiliki kawasan bebas asap rokok;
- Presentase Desa yang melaksanakan STBM baru mencapai 46,4 %;
- Cakupan pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat baru mencapai 18 %.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

• Sumber Daya Air

- Kinerja Sistem Irigasi kewenangan provinsi masih belum optimal, terlihat dalam pencapaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) kewenangan provinsi yang baru mencapai 58,68% di tahun 2021. Kurang optimalnya kinerja sistem irigasi disebabkan antara lain oleh kondisi fisik jaringan irigasi kewenangan provinsi yang sekitar 63,98%.
- Terjadi peningkatan kondisi jaringan irigasi yang tidak begitu signifikan disebabkan kurangnya alokasi anggaran pada tahun 2022, dimana persentase kondisi jaringan irigasi tahun 2021 adalah 63,98% menjadi 64,64% pada tahun 2022.

• Jalan Dan Jembatan

- Kondisi jaringan jalan provinsi sesuai data Tahun 2023 yaitu jalan kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) sebesar 73,91% dan jalan kondisi tidak mantap 26,09%. (Hasil Verifikasi Balai Jalan Nasional Sulawesi Tenggara Maret 2023), penilaian nilai kondisi permukaan jalan mengalami perubahan. Namun Nilai Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu jalan dalam kondisi mantap sebesar 64,87%.
- Kondisi jembatan pada jalan provinsi berdasarkan data tahun 2023 adalah 482 jembatan dalam kondisi mantap dan 90 jembatan kondisi tidak mantap, dengan total keseluruhan jembatan 572. Kondisi ini meningkat dibandingkan dengan kondisi jembatan pada tahun 2022 yaitu dari total 571 jembatan, 462 jembatan diantaranya dalam kondisi mantap, sedangkan sisanya 109 jembatan dalam kondisi tidak mantap.

• Air Minum

- Belum terlaksananya pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Skala Regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Data akses air minum layak di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 yaitu mencapai 94,64% rumah tangga (tahun 2021: 91,94%). Masih terdapat 8,06% rumah tangga yang perlu mendapat perhatian terhadap akses air minum layak, khususnya untuk mendukung capaian target 100% akses air minum layak. Masih terdapat 5 (lima) kabupaten untuk rumah tangga yang akses air minum layaknya dibawah akses air minum layak provinsi.

- Belum optimalnya pemanfaatan sumber air untuk air minum yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan, khususnya di wilayah perkotaan dan daerah yang kesulitan mendapatkan sumber air layak seperti daerah kepulauan.
- Belum adanya kelembagaan yang baik dalam pengelolaan air minum bagi masyarakat baik skala kabupaten/kota maupun skala regional (provinsi).
- **Sanitasi**
 - Belum optimalnya pelayanan sanitasi yang dapat dilihat dari data rumah tangga terhadap akses fasilitas buang air besar pada tahun 2022 yaitu masih ada 12,93% rumah tangga dengan sanitasi yang tidak layak, sedangkan 87,07% rumah tangga dikategorikan memiliki akses terhadap sanitasi layak. Dimana terdapat 10 (sepuluh) kabupaten yang akses sanitasi layaknya dibawah akses sanitasi layak provinsi dan terdapat 2 (dua) kabupaten yang memiliki *gap* > 20% untuk mencapai target 90% target nasional terhadap sanitasi layak.
 - Belum tersedianya infrastruktur sanitasi skala regional berupa pengolahan air limbah regional dan TPA regional.
- **Penataan Ruang**
 - Belum tersedianya dan buruknya kualitas dari rencana tata ruang yang sudah ada menyebabkan produk rencana tata ruang belum dapat digunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang.
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah proses revisi pada tahun 2020, namun belum mendapat persetujuan substansi dari Menteri ATR/BPN.
 - b. Masih ada 1 (satu) Kabupaten (DOB) yang belum memiliki Perda terkait RTRW dan 11 Kabupaten dan Kota yang RTRWnya masih dalam proses revisi.
 - Belum tersedianya perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, dan pengaturan sanksi.
 - Belum optimalnya kinerja penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Penataan Ruang Provinsi diakibatkan belum adanya kelembagaan yang terstruktur

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Belum tersedianya data perumahan dan kawasan permukiman yang terintegrasi antar hirarki pemerintahan yang mencakup data numerik dan spasial sebagai dasar penyusunan kebijakan dan mendukung pelaksanaan program yang terintegrasi.
- Pelayanan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang belum optimal, sehingga peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh menjadi lambat.
- Masih banyaknya kondisi rumah tidak layak huni yang memerlukan penanganan pada tahun 2019 yaitu 135.922 unit dan tahun 2020 yaitu 189.548 unit

- Data kawasan kumuh di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 adalah kurang lebih 195.372,89 Ha (total kawasan kumuh yang kewenangan penanganannya nasional, provinsi, kabupaten dan kota), dimana hal tersebut menunjukkan masih tingginya angka kawasan kumuh di Provinsi Sulawesi Tenggara. Luas kawasan kumuh kewenangan provinsi: 747 Ha (2019) dan 722 Ha (2020)
- Masih tingginya backlog rumah dan masih rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau (jumlah backlog perumahan tahun 2020 yaitu kurang lebih 71.712 unit).

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- Kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana pada semua tahapan belum optimal.
- Kurangnya edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat.
- Belum optimalnya Pengarustamaan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Pengurangan Risiko Bencana
- Kerangka Hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana belum optimal
- Kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana pada semua tahapan belum optimal
- Kurangnya edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat
- Belum Optimalnya Partisipasi kemitraan multi pihak dalam penyelenggaran penanggulangan bencana.
- Kurangnya Pembangunan dan Pengembangan Sistem informasi rawan bencana dan Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*)

6. Sosial

- Penanganan dan penanggulangan pemberdayaan masyarakat miskin;
- Bertambahnya jumlah PMKS dan Rendahnya Penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya terkait target SPM skala provinsi yaitu fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia, disabilitas dan penanganan bencana alam skala provinsi;
- Kurang optimalnya Peran Potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam pendampingan penanganan PMKS skala Provinsi.
- Belum Maksimal dalam penerapan SPM urusan sosial karena terbatasnya sarana dan prasarana UPT/panti

2.4.1.1. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dari tahun 2015 sampai dengan 2019 ketaatan terhadap RTRW cukup baik yaitu mencapai 85 persen. Ini terlihat hingga tahun 2019, telah terbentuk sebanyak 12 (duabelas) Perda Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan sebanyak 1 (satu) Perda RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara. Perda RTRW memuat rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis yang disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Tabel 2.122. Realisasi Perda RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota

No	Nama Wilayah	Lingkup	Perda RTRW
	Sulawesi Tenggara	Provinsi	Perda No.2 Tahun 2014
1.	Buton	Kabupaten	Perda No.1 Tahun 2014
2.	Muna	Kabupaten	Perda No.2 Tahun 2014
3.	Baubau	Kota	Perda No.4 Tahun 2014
4.	Konawe	Kabupaten	Perda No.9 Tahun 2014
5.	Konawe Selatan	Kabupaten	Perda No.19 Tahun 2013
6.	Bombana	Kabupaten	Perda No.20 Tahun 2013
7.	Kendari	Kota	Perda No.1 Tahun 2012
8.	Buton Utara	Kabupaten	Perda No.5 Tahun 2012
9.	Kolaka Utara	Kabupaten	Perda No.6 Tahun 2012
10.	Wakatobi	Kabupaten	Perda No.12 Tahun 2012
11.	Kolaka	Kabupaten	Perda No.16 Tahun 2012
12.	Konawe Utara	Kabupaten	Perda No.20 Tahun 2012
13.	Buton Tengah	Kabupaten	Perda No. 1 Tahun 2014
14.	Konawe Kepulauan	Kabupaten	Perda No. 2 Tahun 2021
15.	Kolaka Timur	Kabupaten	Perda No. 78 Tahun 2020
16.	Muna Barat	Kabupaten	Perda No. 10 Tahun 2020

Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Kabupaten Kabupaten Buton Selatan sebagai satu-satunya wilayah yang belum memiliki Perda Rencana Tata Ruang sehingga masih mengacu pada Tata Ruang kabupaten induknya yakni Kabupaten Buton.

b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- Masih tingginya *mismatch* antara kebutuhan pasar kerja dan ketersediaan keahlian dan keterampilan tenaga kerja;
- Tingkat Pengangguran Terbuka angkatan kerja muda masih cukup tinggi;
- Fungsi kelembagaan hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja belum optimal.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

- Masih terjadi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan (APK dan APM laki-laki lebih tinggi dari perempuan);
- Masih terdapat kesenjangan partisipasi antara perempuan dan laki-laki dalam bidang ketenagakerjaan (TPAK laki-laki lebih tinggi dari perempuan, upah/pendapatan laki-laki lebih tinggi dari perempuan);

- Partisipasi perempuan sebagai pengambil kebijakan di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif masih rendah;
- Masih cukup tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kesenjangan ekonomi perempuan dan laki-laki (belum ada data kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan anak pada Bab II);
- Perlindungan anak dan TPPO (Tindakan Pidana Perdagangan Orang);
- Belum maksimalnya Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

3. Pangan

- Tidak stabilnya harga pangan strategis menjelang HBKN.
- Belum adanya Pergub/Perda CBPP
- Belum memiliki laboratorium uji mutu pangan.

4. Pertanahan

- Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang pertanahan (Reforma Agraria) belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam inventarisasi, penetapan dan penataan akses pemanfaatan objek redistribusi tanah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi
- Belum optimalnya pendataan dan penyelesaian permasalahan pemanfaatan objek tanah yang terkait dengan tanah ulayat dan tanah kosong kewenangan provinsi.
- Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang belum berjalan dengan baik dikarenakan kendala pada faktor budaya sosial masyarakat. Adanya proyek strategis yang pelaksanaan pengadaan tanahnya masih belum selesai dan prosesnya berjalan lambat
- Kebutuhan Lahan untuk kepentingan umum yang cukup tinggi
- Masih adanya Konflik dan Sengketa Pertanahan
- Belum adanya sistem informasi pertanahan

5. Lingkungan Hidup

- Kapasitas daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) rendah
- Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- Perubahan iklim

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan masih relatif rendah;
- Masih relatif terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dokumen kependudukan;
- Masih relatif terbatasnya SDM pengelola data Kependudukan dan pencatatan sipil;

- Prosedur dan persyaratan kepemilikan dokumen kependudukan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemanfaatan data kependudukan oleh OPD baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota belum maksimal;
- Sarana dan Prasarana belum memadai.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Kelembagaan desa yang belum berjalan efektif;
- Kualitas Sumber Daya Aparatur Desa masih rendah;
- Minimnya sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- Memudarnya nilai gotong royong di masyarakat;
- Kurangnya kapasitas dan pemahaman masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat pesisir dengan pemanfaatan TTG;
- Kurangnya pembinaan dan pembentukan pos yantek Desa;
- Belum maksimalnya pengelolaan BUMDesa/pasar desa;
- Belum maksimalnya pembinaan masyarakat pesisir;
- Kelembagaan PKK dan Kader PKK perlu ditingkatkan;
- Kelembagaan Adat dan pengelola Adat perlu ditingkatkan.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan, dan penganggaran;
- Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga;
- Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmeet need*) masih tinggi;
- Tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi masih tinggi (drop out);
- Peserta KB aktif yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) masih rendah.
- Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk
- Rendahnya Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB

9. Perhubungan

- Masih rendahnya tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang berupa pemasangan rambu-rambu, dari ruas jalan provinsi sepanjang 1.009 km. (pemasangan rambu sejumlah 1.513 buah sejak tahun 2014 - 2016).
- Belum optimalnya pelayanan terminal tipe B (kewenangan pemerintah provinsi) dalam hal mendukung konektivitas antar moda transportasi.
- Pada layanan transportasi laut, belum diserahkannya kewenangan pengelolaan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi terkait

pelayanan angkutan laut regional guna mendukung aksesibilitas masyarakat wilayah kepulauan. Komunikasi dan Informatika

- Belum optimalnya pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- Terbatasnya konektivitas antar wilayah dan antar moda
- Rendahnya Tingkat Keselamatan Transportasi
- Belum optimalnya pelayanan dasar jasa perhubungan

10. Komunikasi dan Informatika

- Belum optimalnya pengelolaan e-government dilingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dapat dilihat melalui berbagai aspek, yaitu:
 - a. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada beberapa layanan Teknologi Informasi.
 - b. Belum optimalnya pengelolaan website pemerintah provinsi dan OPD belum adanya website OPD yang mampu memberikan informasi terkait data dan pelaksanaan tugas serta fungsi OPD bagi publik.
 - c. Belum adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan data dan informasi elektronik untuk mendukung pembangunan daerah.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- Belum optimalnya manajemen Koperasi & UMKM
- Masih rendahnya kualitas SDM Koperasi & UMKM
- Terbatasnya akses Permodalan Koperasi & UMKM
- Terbatasnya akses kemitraan dan jaringan usaha Koperasi & UMKM
- Terbatasnya akses Permodalan Koperasi & UMKM
- Rendahnya pengetahuan teknologi dan informasi bagi Koperasi & UMKM
- Jalur perizinan yang panjang

12. Penanaman Modal

- Beban perpajakan yang memberatkan investor/pelaku usaha
- Regulasi terkait penanaman modal saling tumpang tindih
- Jalur birokrasi yang panjang

13. Kepemudaan dan Olahraga

- Kurangnya lapangan dan kesempatan kerja serta tingginya tingkat pengangguran dan tengah pengangguran dikalangan generasi muda yang mengakibatkan berkurangnya produktifitas nasional dan memperlambat laju perkembangan pembangunan nasional;
- Menurunnya prestasi atlit diberbagai cabang olahraga unggulan;
- Masih kurangnya persepsi masyarakat bahwa prestasi olahraga identik dengan medali dan mengabaikan olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi;
- Kurangnya pembibitan dan pembinaan atlet usia dini;
- Kurangnya sarana dan prasarana olahraga dan pemuda.

14. Statistik

- Belum sinkronnya ketersediaan data dengan kebutuhan data, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
- Koordinasi yang belum terjalin dengan baik antar instansi di setiap level pemerintahan (nasional, provinsi, kabupaten dan kota) dalam hal penyediaan data. Hal tersebut dikarenakan belum jelasnya mekanisme kerja dan perbedaan kepentingan.
- Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan statistik sektoral yang berdampak pada rendahnya data yang tersedia dalam bentuk spasial dan non-spasial

15. Persandian

- Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah yang belum berjalan dengan baik
- Belum optimalnya jaring komunikasi sandi pemerintah provinsi
- Infrastruktur pendukung pengamanan informasi yang belum memadai

16. Kebudayaan

- Rendahnya kearifan budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan

17. Perpustakaan

- Rendahnya Budaya Gemar Membaca;
- Masih rendahnya mutu pelayanan;
- Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pustakawan;

18. Kearsipan

- Tidak Berfungsinya Arsiparis yang ada di SKPD;
- Akuisisi Arsip Tidak Maksimal;
- Kurangnya Tenaga Arsiparis.

c. Urusan Pilihan Pemerintahan

1. Kelautan dan Perikanan

- Belum optimalnya produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap
- Belum optimalnya produksi dan produktivitas usaha perikanan budidaya
- Belum optimalnya penerapan mutu dan daya saing produk hasil perikanan
- Belum optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta kawasan konservasi perairan daerah
- Belum optimalnya peranan nelayan kecil dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan
- Masih tingginya ilegal, *unreported and unregulated finishing*.

2. Pariwisata

- Pengembangan destinasi dan industri pariwisata yang belum optimal
- Pemasaran pariwisata yang belum efektif dan efisien
- Belum optimalnya pengembangan SDM, regulasi dan kelembagaan kepariwisataan
- Intergrasi sektor dalam mendukung pembangunan kepariwisataan
- Harmonisasi kebijakan pembangunan kepariwisataan di daerah

3. Pertanian

- Alih fungsi lahan pertanian/perkebunan menjadi lahan non pertanian/perkebunan
- Rendahnya produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan
- Sarana dan prasarana pertanian masih belum memadai
- Tingginya serangan OPT dan dampak perubahan iklim pada tanaman pertanian dan perkebunan
- Fluktuasi harga produk pertanian dan perkebunan masih tinggi
- Terbatasnya akses permodalan bagi petani
- Populasi ternak masih rendah sehingga impor daging masih tinggi
- Kurangnya sumber-sumber perbibitan ternak
- Belum adanya industri pakan ternak
- Belum adanya pasar ternak
- Tingginya penyakit menular pada ternak
- Rendahnya sumberdaya manusia bidang pertanian dan perkebunan
- Sebagian besar umur tanaman perkebunan dan hortikultura sudah tua
- Daya dukung lahan perkebunan dan hortikultura menurun
- Kelembagaan petani belum berfungsi secara optimal.

4. Kehutanan

- Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan
- Rendahnya pendapatan masyarakat desa sekitar hutan
- Belum berkembangnya hutan rakyat
- Tingginya gangguan hutan dan perambahan hutan
- Belum optimalnya penanganan konservasi hutan dan lahan

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

- Rasio elektrifikasi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 sebesar 74,98% masih jauh di bawah rasio elektrifikasi nasional sebesar Tahun 2017 nasional sebesar 95,35%
- Rasio desa berlistrik Sulawesi Tenggara hingga Juli Tahun 2018 sebesar 99,4%. Perhitungan didasarkan pada 25% pemenuhan listrik desa sudah dapat dikatakan sebagai desa berlistrik
- Kontribusi PDRB sektor pertambangan Tahun 2017 sebesar 20,68%.

6. Perdagangan

- Jenis dan Jumlah Komoditi yang diekspor masih terbatas
- Komoditi ekspor didominasi produk pertambangan
- Terbatasnya sarana prasarana infrastruktur laboratorium pengujian mutu barang
- Masih terbatasnya SDM pengawas dan penguji mutu barang
- Masih terbatasnya ruang lingkup akreditasi pengujian dan kalibrasi
- Maraknya perdagangan antar pulau provinsi khususnya barang kebutuhan pokok masyarakat sehingga mempengaruhi ketersediaan dalam daerah
- Harga-harga barang kebutuhan pokok berfluktuasi yang dominan harga disepakati oleh pelaku usaha (distributor dan pedagang eceran di pasar-pasar rakyat)
- Masih kurangnya fasilitas pengawasan berkala produk wajib SNI dan barang diawasi

- Penanganan pengaduan perlindungan konsumen masih kurang

7. Perindustrian

- Lemahnya nilai tambah Produk industri Kecil dan Menengah
- Lemahnya kapabilitas pelaku industri Kecil dan menengah
- Kurangnya Modal usaha bagi pelaku usaha Industri Kecil dan menengah
- Peralatan IKM yang tidak memadai
- Produk Industri Kecil dan menengah yang potensial dan baik belum bisa dipromosikan secara baik
- Kurangnya sarana prasarana pendukung peralatan desain dan peralatan kemasan produk
- Lemahnya kapabilitas SDM tenaga teknis desain kemasan
- Kurangnya sarana teknologi tepat guna bagi industri pengolahan komoditi agro, logam dan mesin di daerah
- Belum terwujudnya struktur industri daerah secara aktual dan jelas

8. Transmigrasi

- Keterbatasan sarana dan prasarana sistem dan akses fasilitas dasar permukiman, ekonomi dan sosial budaya di kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi.

d. Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

- Ketersediaan data untuk proses perencanaan dan evaluasi pembangunan belum memadai
- Belum optimalnya proses perencanaan pembangunan daerah
- Belum optimalnya proses evaluasi perencanaan pembangunan dalam menilai kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah.
- Sinkronisasi perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum optimal

2. Keuangan

- Rendahnya Pendapatan Asli Daerah
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah
- Rendahnya penerimaan pajak dan retribusi daerah dibandingkan potensinya
- Belum optimalnya pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi
- Kualitas SDM aparat pengelola pajak masih rendah
- Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah
- Belum optimalnya pengelolaan aset daerah dalam peningkatan pendapatan daerah
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam sektor Pelayanan Publik belum optimal

3. Kepegawaian

- Kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan belum optimal.

- Tingginya angka pelanggaran disiplin oleh aparatur
- Belum optimalnya pengelolaan manajemen sumber daya manusia aparatur

4. Pendidikan dan Pelatihan

- Rendahnya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Kompeten dan Profesional di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
- Belum optimalnya pengembangan kompetensi aparatur
- Kurang memadainya Sarana dan Prasarana utama dan pendukung kegiatan kediklatan
- Masih kurangnya data dan informasi mengenai seberapa besar kontribusi Pemerintah Daerah terhadap peningkatan kapasitas SDM Aparatur

5. Penelitian dan Pengembangan

- Kebijakan dan program penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara belum didasarkan pada hasil penelitian dan pengembangan/riset (Policy Based Research);
- Kesenjangan antara potensi kekayaan/komoditas sumber daya alam Sulawesi Tenggara dengan pemanfaatan IPTEK/Inovasi teknologi pengolahan/produksi untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing perekonomian daerah dan masyarakat;
- Adanya kesenjangan sumber daya IPTEK di masyarakat, sehingga masyarakat tidak memiliki daya saing dan kemandirian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Pengawasan

- Rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dari OPD
- Masih banyaknya temuan hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan OPD
- Belum optimalnya pengawasan internal pemerintah daerah

7. Fungsi lainnya

Sekretariat Daerah

- Rendahnya OPD dalam menyimpan bukti dan administrasi sengketa Hukum;
- Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap bantuan hukum bagi masyarakat yang berpradilan;
- Pembentukan Lembaga PD belum Efektif (Belum tepat Ukuran dan Tepat Fungsi);
- Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap standar Pelayanan Publik masih rendah;
- Penerapan Standarisasi Ketatalaksanaan Administrasi Pemerintahan belum efektif
- Pengukuran Kinerja Individu belum dilakukan secara berkala;
- Belum melakukan Review Standar Kompetensi Pegawai dan belum melakukan Review Proses Bisnis yang diikuti dengan Review SOP;
- Belum menetapkan Unit Kerja Zona Intgritas untuk mendapatkan predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai miniatur Reformasi Birokrasi;

- Belum maksimalnya pengelolaan administrasi wilayah pemerintahan daerah yang tertata dengan baik;
- Belum maksimalnya pembinaan dan evaluasi kinerja daerah dengan baik;
- Kurangnya koordinasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) komoditas beras;
- Kurangnya koordinasi dan monitoring distribusi barang dan jasa;
- Kurangnya koordinasi dan monitoring Rastra;
- Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum optimal;
- Sering terlambatnya proses penginputan perencanaan umum pengadaan barang/jasa pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menuju *Central Of Excelent* belum terintegrasi dengan baik;
- Proses pengadaan barang/jasa belum sesuai dengan waktu Rencana Umum Pengadaan yang telah ditetapkan;
- Pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang belum memenuhi standar kompetensi pada bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan kabupaten/kota belum optimal;
- Masih kurangnya koordinasi kerjasama daerah antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota maupun instransi vertikal;
- Kurangnya dukungan mitra kerjasama daerah.

Sekretariat DPRD

- Belum adanya produk hukum DPRD hak prakarsa DPRD yang dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat;
- Belum terlaksananya akuntabilitas dan transparansi mengawal produk tentang hak-hak prakarsa DPRD.

Kode	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Rencana PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)						Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.
										Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
X	XX	01.1.1	01	1.1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	

Kode	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.
X XX 01 1 1 08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	24	189.200.000	12	47.458.000	12	68.200.000	0	0	12	#####	12	15.970.000	12	20.404.000	36	48.174.000	48	95.632.000	200	50,55	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang		
X XX 01 1 1 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	2.760.000.000	12	1.167.549.130	12	1.550.000.000	12	#####	12	#####	12	959.595.700	12	1.499.186.500	48	3.408.588.500	60	4.596.137.630	250	166,63	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang		
X XX 01 1 1 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	100.000.000	1	99.880.000	1	100.000.000	0	0	0	0	0	1	99.844.000	1	99.844.000	2	199.724.000	200	199,72	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang			
X XX 01 1 1 12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Persen	100	3.115.334.700	93,37	863.944.150	90,82	1.844.834.700	0	0	2,04	#####	2,04	317.800.000	90,82	1.825.697.363	94,9	2.461.297.363	188,27	3.325.241.513	188,27	106,74	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang		
X XX 01 1 1 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	9	1.252.900.000	6	677.720.000	4	418.000.000	0	0	4	#####	4	317.800.000	4	407.410.000	12	1.043.010.000	18	1.720.730.000	200	137,34	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang		
X XX 01 1 1 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	23	775.954.700	15	123.028.150	12	642.854.700	0	0	0	0	0	12	641.825.963	12	641.825.963	27	764.854.113	117,33	99,37	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang			
X XX 01 1 1 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	164	1.086.480.000	162	63.196.000	162	783.980.000	0	0	0	0	0	162	776.461.400	162	776.461.400	324	839.657.400	197,56	77,28	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang			
X XX 01 1 1 11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terselenggara	Persen	100	2.242.825.643	50	1.326.357.320	50	1.222.795.643	33,33	#####	50	#####	50	873.411.940	50	1.158.317.380	183,33	2.834.943.760	233,33	4.161.301.080	233,33	185,54	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang		
X XX 01 1 1 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	25.371.800	12	8.491.800	12	9.641.800	0	0	12	#####	12	6.000.000	12	6.000.000	36	15.000.000	48	23.491.800	200	92,30	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang		
X XX 01 1 1 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	1.133.794.943	12	790.590.520	12	492.494.943	12	#####	12	#####	12	354.411.940	12	468.317.380	48	1.109.943.760	60	1.900.534.280	250	167,63	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang		
X XX 01 1 1 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	1.083.658.900	12	527.275.000	12	720.658.900	12	#####	12	#####	12	513.000.000	12	684.000.000	48	1.710.000.000	60	2.237.275.000	250	206,46	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang		
X XX 01 1 1 11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	Persen	100	1.318.891.595	34,06	461.894.750	56,52	596.521.595	55,07	#####	55,07	#####	55,07	256.499.650	55,8	509.643.710	221,01	973.866.530	255,07	1.435.751.280	255,07	108,86	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang		
X XX 01 1 1 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	36	558.143.595	13	260.502.250	18	285.893.595	18	#####	18	#####	18	151.850.170	18	279.761.880	72	567.547.220	85	828.049.470	236,11	148,36	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang		
X XX 01 1 1 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	94	44.690.000	31	14.635.000	56	20.490.000	56	#####	56	#####	56	4.710.000	56	6.410.000	224	16.370.000	255	31.005.000	271,28	69,38	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang		
X XX 01 1 1 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	441.950.000	2	186.757.500	2	199.950.000	2	#####	2	#####	2	99.939.480	2	183.283.830	8	349.751.310	10	536.508.810	250	121,4	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang		
X XX 01 1 1 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	274.108.000	1	0	2	90.188.000	0	0	0	0	0	1	40.188.000	1	40.188.000	2	40.188.000	50	14,66	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																									
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program	Persen	100	60.820.740.000	17,66	15.936.444.250	34,76	31.300.000.000	0	0	0	0	6,04	6.080.407.000	0	0	6,04	6.080.407.000	23,7	22.016.851.250	23,7	38,2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
1 04 02 1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Persen	100	660.000.000	0	0	60	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 04 02 1 01	Identifikasi Penunahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Korban Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Korban Program Provinsi	Dokumen	5	260.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 04 02 1 02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 04 02 1 03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 04 02 1 04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 04 02 1 05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Data Penerima Rumah	Dokumen	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 04 02 1 06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 04 02 1	Sosialisasi dan Penetapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Persen	100	1.860.740.000	10,91	264.140.000	20	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,91	264.140.000	10,91	14,2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
1 04 02 1 01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Korban Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Orang	150	580.000.000	30	159.850.000	30	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	159.850.000	20	27,53	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
1 04 02 1 02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Orang	230	740.000.000	0	0	30	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 04 02 1 03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Orang	150	440.740.000	30	104.490.000	30	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	104.490.000	20	23,71	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
1 04 02 1 04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang	20	100.000.000	0	0	20	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 04 02 1 05	Rembag Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 04 02 1 06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 04 02 1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Persen	100	58.100.000.000	25,49	15.672.304.250	49,41	30.200.000.000	0	0	0	12,75	6.080.407.000	0	0	12,75	6.080.407.000	38,24	21.752.711.250	38,24	37,44	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			

Kode	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Rencana PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)					Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab			
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Kinerja	Rp.	Kinerja		Rp.	11(100%)	Rp.
										Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1 04 02 1 01	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Tersejahtera	Unit Rumah	110	5.500.000.000	0	0	35	1.750.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 04 02 1 02	Perencanaan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	7	700.000.000	0	0	7	700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 04 02 1 03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas Lahan yang Tersedia untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Tidak Berada dalam Lokasi yang Sama (Ekuiti)	Ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 04 02 1 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	153	11.400.000.000	130	15.672.304.250	30	2.250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130	15.672.304.250	84,97	137,48	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
1 04 02 1 05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	210	37.500.000.000	0	0	150	22.500.000.000	0	0	0	0	65	6.080.407.000	0	65	6.080.407.000	65	6.080.407.000	30,95	16,21	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 04 02 1 06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	30	3.000.000.000	0	0	30	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 04 02 1 07	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Persen	100	200.000.000	0	0	100	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 04 02 1 08	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi program Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Laporan	3	100.000.000	0	0	3	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 04 02 1 09	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi program Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	3	100.000.000	0	0	3	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tertatanya Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi dengan Luas 10-15 Ha	Persen	100	273.929.801.985	45,88	40.918.849.637	49,58	243.375.000.000	0	0	0	0,15	5.019.206.400	0	0,15	5.019.206.400	46,02	45.938.056.037	46,02	16,77	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
1 04 03 1	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi dengan Luas 10-15 Ha	Persen	100	180.900.000.000	11,9	6.715.749.000	83,33	176.000.000.000	0	0	0	4,76	212.919.400	0	4,76	212.919.400	16,67	6.928.668.400	16,67	3,83	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
1 04 03 1 01	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 04 03 1 02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 04 03 1 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh	Laporan	17	85.000.000.000	0	0	17	85.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 04 03 1 04	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kumuh	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 04 03 1 05	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kumuh	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 04 03 1 06	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kumuh	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 04 03 1 07	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kumuh	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 04 03 1 08	Perencanaan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Terusun/Terreview/Terlegalisasi	Dokumen	7	10.650.000.000	3	6.246.228.000	1	6.000.000.000	0	0	0	2	212.919.400	0	2	212.919.400	5	6.452.147.400	71,43	60,65	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
1 04 03 1 09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	18	85.250.000.000	2	469.521.000	17	85.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	469.521.000	11,11	0,55	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
1 04 03 1 10	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi dengan Luas 10-15 Ha	Persen	100	93.029.801.985	46,64	34.203.100.637	48,81	67.375.000.000	0	0	0	0,04	4.806.287.000	0	0,04	4.806.287.000	46,69	39.009.387.637	46,69	41,93	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
1 04 03 1 11	Perencanaan Desain Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen	49	9.904.217.048	14	8.410.185.108	9	900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14	8.410.185.108	28,57	84,92	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
1 04 03 1 12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan	17	850.000.000	0	0	17	850.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 04 03 1 13	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	1710	28.815.585.000	834	21.546.100.000	850	19.125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	834	21.546.100.000	48,77	74,77	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
1 04 03 1 14	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bersama PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 04 03 1 15	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan	60	6.000.000.000	17	181.327.592	15	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	17	181.327.592	28,33	3,02	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
1 04 03 1 16	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1 04 03 1 17	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dremajakan/Dipugar	Ha	20	47.459.999.937	0,72	4.065.487.937	15	45.000.000.000	0	0	0	0,78	4.806.287.000	0	0,78	4.806.287.000	1,5	8.871.744.937	7,5	18,69	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		

Kode	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.
										Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kawasan Permukiman yang Terfasilitasi PSU	Persen	100	83.408.637.116	57,94	50.156.440.761	76,04	34.974.554.305	0	0	0	0	41,5	37.417.006.113	0	0	41,5	37.417.006.113	99,44	87.573.446.874	99,44	104,99	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
1 04 05 1	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Kawasan Permukiman yang Terfasilitasi PSU	Persen	100	83.408.637.116	57,94	50.156.440.761	76,04	34.974.554.305	0	0	0	0	41,5	37.417.006.113	0	0	41,5	37.417.006.113	99,44	87.573.446.874	99,44	104,99	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
1 04 05 1 01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen	10	3.669.459.305	19	3.669.903.733	5	1.724.554.305	0	0	0	0	7	3.849.354.000	0	0	7	3.849.354.000	26	7.519.257.733	260	205,47	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
1 04 05 1 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	348	79.699.177.811	182	46.421.396.736	268	33.250.000.000	0	0	0	142	33.567.652.113	0	0	142	33.567.652.113	324	79.989.048.851	95,1	100,36	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
1 04 05 1 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan	1	50.000.000	7	65.140.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	65.140.200	700	130,28	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
1 04 05 1 04	Verifikasi dan Penyetahan PSU Permukiman dari Pengebang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengebang	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
1 04 05 1 05	Kerjasama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
1 04 06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	Persen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
1 04 06 1	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perencanaan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	-	Persen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
1 04 06 1 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengebang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengebang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																									
2 10 02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Tertaksananya Pemberian Izin Lokasi	Persen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
2 10 02 1	Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Lokasi yang Diterbitkan	Persen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
2 10 02 1 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Izin Lokasi yang Diterbitkan	Lokasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
2 10 03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Tertaksananya Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persen	100	158.523.408.986	50	154.314.003.017	37,5	2.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	154.314.003.017	50	97,34	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
2 10 03 1	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah Penetapan Lokasi	Persen	100	158.523.408.986	50	154.314.003.017	37,5	2.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	154.314.003.017	50	97,34	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
2 10 03 1 01	Pembertitahan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pembertitahan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Dokumen	8	158.523.408.986	4	154.314.003.017	3	2.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	154.314.003.017	50	97,34	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Tertaksananya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persen	100	11.000.000.000	0	0	37,5	10.200.000.000	0	0	0	0	37,5	20.248.609.169	0	0	37,5	20.248.609.169	37,5	20.248.609.169	37,5	184,08	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
2 10 05 1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	Persen	100	11.000.000.000	0	0	37,5	10.200.000.000	0	0	0	0	37,5	20.248.609.169	0	0	37,5	20.248.609.169	37,5	20.248.609.169	37,5	184,08	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
2 10 05 1 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dokumen	6	1.000.000.000	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
2 10 05 1 02	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	Laporan	2	10.000.000.000	0	0	2	10.000.000.000	0	0	0	3	20.248.609.169	0	0	3	20.248.609.169	3	20.248.609.169	150	202,49	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
2 10 06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Tertaksananya Program Redistribusi Tanah	Persen	100	30.000.000.000	0	100	30.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
2 10 06 1	Penetapan Subyek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Subyek dan Objek Redistribusi Tanah	Persen	100	10.000.000.000	0	100	10.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
2 10 06 1 01	Inventarisasi Subyek dan Objek Redistribusi Tanah	-	Lokasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
2 10 06 1 02	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
2 10 06 1 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	10.000.000.000	0	2	10.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
2 10 06 1 04	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	Persen	100	20.000.000.000	0	100	20.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
2 10 06 1 05	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	10.000.000.000	0	1	10.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
2 10 06 1 06	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	10.000.000.000	0	1	10.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		

Kode	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun Kinerja		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja	OPD Peningjawab				
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Kinerja	Rp.						
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
2 10 07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	-	Persen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2 10 07 1	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	Persen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2 10 07 1 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2 10 07 1 02	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Penetapan batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi oleh Gubernur	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2 10 08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-	Persen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2 10 08 1	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	-	Persen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2 10 08 1 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2 10 08 1	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	-	Persen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2 10 08 1 01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang Diinventarisasi	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2 10 08 1 02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-	Persen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2 10 10 1	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	Persen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2 10 10 1 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Provinsi	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2 10 10 1 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	51.203.994.443	34,42	42.712.072.003	21,45	16.719.187.695	0	0	0	0	16,88	11.280.029.040	0,66	243.399.891	17,54	11.523.428.931	51,96	54.235.501.024	51,96	105,92	105,92	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X XX 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang diselesaikan	Persen	100	886.265.113	58,82	202.485.227	35,29	246.655.176	0	0	0	0	35,29	146.655.176	0	0	35,29	146.655.176	94,12	349.140.403	94,12	39,39	39,39	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X XX 01 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	64.986.244	7	39.992.952	5	19.993.122	0	0	0	0	5	19.993.122	0	5	19.993.122	12	59.986.074	100,00	92,31	92,31	92,31	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X XX 01 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	24.805.741	4	19.859.600	1	4.859.600	0	0	0	0	1	4.859.600	0	1	4.859.600	5	24.719.200	100	99,95	99,95	99,95	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X XX 01 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	9.892.282	1	4.946.141	1	4.946.141	0	0	0	0	1	4.946.141	0	1	4.946.141	2	9.892.282	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X XX 01 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	9.892.282	1	4.946.141	1	4.946.141	0	0	0	0	1	4.946.141	0	1	4.946.141	2	9.892.282	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X XX 01 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	9.864.062	1	4.932.031	1	4.932.031	0	0	0	0	1	4.932.031	0	1	4.932.031	2	9.864.062	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X XX 01 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	28.956.282	5	21.978.141	2	6.978.141	0	0	0	0	2	6.978.141	0	2	6.978.141	7	28.956.282	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X XX 01 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	737.868.220	1	105.830.221	1	200.000.000	0	0	0	0	1	100.000.000	0	1	100.000.000	2	205.830.221	40	27,9	27,9	27,9	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X XX 01 1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji Pegawai yang tebayarkan	Persen	100	14.831.027.572	93,68	12.126.721.967	51,65	7.624.730.705	0	0	0	0	41,58	6.780.985.376	0,53	76.399.891	42,11	6.857.385.267	135,79	18.964.107.234	135,79	128	128	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X XX 01 1 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	170	14.398.803.100	166	11.653.528.200	90	7.400.000.000	0	0	0	0	73	6.747.091.500	0	73	6.747.091.500	239	18.400.619.700	140,59	127,79	127,79	127,79	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X XX 01 1 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	6.922.282	1	1.976.141	1	4.946.141	0	0	0	0	1	1.976.141	0	1	1.976.141	2	3.952.282	100	57,1	57,1	57,1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X XX 01 1 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	6.922.282	1	1.976.141	1	4.946.141	0	0	0	0	1	1.976.141	0	1	1.976.141	2	3.952.282	100	57,1	57,1	57,1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X XX 01 1 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	8.927.282	1	3.981.141	1	4.946.141	0	0	0	0	1	3.981.141	0	1	3.981.141	2	7.962.282	100	89,19	89,19	89,19	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X XX 01 1 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	21.936.512	3	11.990.371	1	4.946.141	0	0	0	0	1	1.990.371	0	1	1.990.371	4	13.980.742	80	63,73	63,73	63,73	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X XX 01 1 06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemertiksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemertiksaan dan Tindak Lanjut Pemertiksaan	Dokumen	2	121.993.941	1	21.993.941	1	100.000.000	0	0	0	0	1	21.993.941	0	1	21.993.941	2	43.987.882	100	36,06	36,06	36,06	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab			
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.	
										Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.										
X XX 01 1 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	258.599.891	4	429.259.891	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1	76.399.891	1	76.399.891	5	505.699.782	100	195,55	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	6.922.282	1	1.976.141	1	4.946.141	0	0	0	1	1.976.141	0	0	1	1.976.141	2	3.952.282	2	3.952.282	100	57,1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1 01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	326.913.418	35,29	228.744.982	41,18	94.976.141	0	0	0	0	35,29	56.407.744	0	0	35,29	56.407.744	70,59	285.152.726	70,59	87,23	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
X XX 01 1 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	3.976.141	1	1.976.141	1	2.000.000	0	0	0	1	1.976.141	0	0	1	1.976.141	2	3.952.282	2	3.952.282	100	99,4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	79.985.015	1	66.068.720	1	40.000.000	0	0	0	1	7.768.970	0	0	1	7.768.970	2	73.837.690	2	73.837.690	100	92,31	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	2	3.976.141	1	1.976.141	1	2.000.000	0	0	0	1	1.976.141	0	0	1	1.976.141	2	3.952.282	2	3.952.282	100	99,4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	1.976.141	0	0	1	1.976.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
X XX 01 1 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	232.999.980	3	158.723.980	1	45.000.000	0	0	0	1	40.734.210	0	0	1	40.734.210	4	199.458.190	4	199.458.190	80	85,6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2.000.000	0	0	1	2.000.000	0	0	0	1	1.976.141	0	0	1	1.976.141	1	1.976.141	1	1.976.141	50	98,81	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2.000.000	0	0	1	2.000.000	0	0	0	1	1.976.141	0	0	1	1.976.141	1	1.976.141	1	1.976.141	50	98,81	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1,1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	1.375.861.750	15,34	577.260.875	13,8	316.305.875	0	0	0	0	12,09	201.672.567	0	0	12,09	201.672.567	27,44	778.933.442	27,44	56,61	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
X XX 01 1,1 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	3.450.000	0	0	1	1.725.000	0	0	0	1	1.976.141	0	0	1	1.976.141	1	1.976.141	1	1.976.141	50	57,28	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1,1 02	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1045	634.250.000	176	143.000.000	100	63.000.000	0	0	0	84	62.916.000	0	0	84	62.916.000	280	205.916.000	24,88	32,47	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				
X XX 01 1,1 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2.999.808	1	1.499.904	1	1.499.904	0	0	0	1	1.499.904	0	0	1	1.499.904	2	2.999.808	100	100			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1,1 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4	24.999.942	2	402.499.971	1	2.499.971	0	0	0	1	2.499.971	0	0	1	2.499.971	3	404.999.942	75	1.620,00			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1,1 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	53	250.000.000	0	2	10.000.000	0	0	0	2	2.499.971	0	0	2	2.499.971	2	2.499.971	3,77	1			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
X XX 01 1,1 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	64	400.162.000	10	30.261.000	5	177.581.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	30.261.000	15,63	7,56			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
X XX 01 1,1 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	30.000.000	0	0	30	30.000.000	0	0	0	30	65.140.290	0	0	30	65.140.290	30	65.140.290	100	217,13			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1,1 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	32	30.000.000	0	0	30	30.000.000	0	0	0	30	65.140.290	0	0	30	65.140.290	30	65.140.290	93,75	217,13			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	8.211.313.268	76,51	4.435.348.348	21,48	2.584.696.500	0	0	0	11,41	1.272.315.784	8,05	167.000.000	19,46	1.439.315.784	95,97	5.874.664.132	95,97	71,54			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1,1 01	Perediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	184.997.630	4	120.153.890	1	30.000.000	0	0	0	1	15.153.890	0	0	1	15.153.890	5	135.307.780	100	73,14			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1,1 02	Perediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	454.275.000	1	85.150.000	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	85.150.000	20	18,74			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
X XX 01 1,1 03	Perediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	315.577.220	1	178.244.000	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	178.244.000	50	56,48			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
X XX 01 1,1 04	Perediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	1.175.599.505	4	883.387.958	1	500.000.000	0	0	0	1	338.626.864	0	0	1	338.626.864	5	1.220.214.822	100	103,8			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1,1 05	Perediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	655.000.000	4	349.537.000	1	150.000.000	0	0	0	1	95.681.500	0	0	1	95.681.500	5	445.218.500	100	67,97			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1,1 06	Perediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	242.993.000	4	32.712.100	1	2.686.500	0	0	0	1	2.684.000	0	0	1	2.684.000	5	35.406.100	100	14,57			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1,1 08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	60	933.000.000	48	402.900.000	12	200.000.000	0	0	0	0	0	12	167.000.000	12	167.000.000	60	569.900.000	100	61,08			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1,1 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	4.147.870.913	48	2.383.263.400	12	1.200.000.000	0	0	0	12	819.459.559	0	0	12	819.459.559	60	3.202.722.959	100	77,21			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1,1 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	2.000.000	0	0	1	2.000.000	0	0	0	1	2.499.971	0	0	1	2.499.971	1	2.499.971	100	125			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1,1 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X XX 01 1,1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	Persen	100	20.329.945.096	38,94	21.869.313.560	32,21	4.366.823.298	0	0	0	0	24,04	1.579.800.000	0	0	24,04	1.579.800.000	62,98	23.448.113.560	62,98	115,34			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
X XX 01 1,1 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	17	2.516.300.000	9	1.512.300.000	2	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1.512.300.000	52,94	60,1			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	

Kode	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan / Output/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Rensnas PD Tahun 2021		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.
										Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.									
X XX 01 1.1 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	500.000.000	0	0	1	500.000.000	0	0	0	0	2	72.000.000	0	0	2	72.000.000	2	72.000.000	200	14,4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1.1 03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1.1 04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	UMKM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1.1 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	75	1.457.458.500	15	87.450.000	50	300.000.000	0	0	0	0	41	89.750.000	0	0	41	89.750.000	56	177.200.000	74,67	12,16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1.1 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	133.646.596	16	159.192.100	4	66.823.298	0	0	0	0	5	35.000.000	0	0	5	35.000.000	21	194.192.100	175	145,3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1.1 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1.1 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1.1 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	11.232.600.000	3	19.178.032.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	19.178.032.000	100	170,74	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1.1 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	50	2.989.940.000	12	544.339.460	5	2.000.000.000	0	0	0	0	1	238.110.000	0	0	1	238.110.000	13	782.449.460	26	26,17	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1.1 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	50	1.500.000.000	26	388.000.000	5	1.000.000.000	0	0	0	0	1	1.144.940.000	0	0	1	1.144.940.000	27	1.532.940.000	54	102,2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	1.783.498.993	73,33	1.375.847.640	20	385.000.000	0	0	0	0	20	486.498.993	0	0	20	486.498.993	93,33	1.862.346.633	93,33	104,42	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1.1 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	83.500.000	4	35.207.500	1	5.000.000	0	0	0	0	1	3.500.000	0	0	1	3.500.000	5	38.707.500	100	46,36	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1.1 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	799.998.993	3	759.040.140	1	200.000.000	0	0	0	0	1	167.998.993	0	0	1	167.998.993	4	927.039.133	80	115,88	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1.1 03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1.1 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	900.000.000	4	581.600.000	1	180.000.000	0	0	0	0	1	315.000.000	0	0	1	315.000.000	5	896.600.000	100	99,62	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang terpelihara	Persen	100	3.459.169.233	63,93	1.896.349.494	27,87	1.100.000.000	0	0	0	0	13,11	755.693.400	0	0	13,11	755.693.400	77,05	2.652.042.894	77,05	76,67	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1.1 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	31	1.085.700.050	32	803.862.700	4	350.000.000	0	0	0	0	14	287.699.700	0	0	14	287.699.700	46	1.091.562.400	148,39	100,54	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1.1 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	43	465.000.000	20	149.250.000	8	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	149.250.000	46,51	32,1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1.1 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1.1 04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1.1 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1.1 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	38	210.580.000	18	12.980.000	20	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	12.980.000	47,37	6,16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1.1 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1.1 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1.1 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	5	1.486.299.183	3	801.731.794	1	500.000.000	0	0	0	0	1	455.493.700	0	0	1	455.493.700	4	1.227.025.494	80	84,59	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1.1 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	211.590.000	4	107.525.000	1	50.000.000	0	0	0	0	1	12.500.000	0	0	1	12.500.000	5	120.025.000	100	56,73	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1.1 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	1	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21.000.000	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
X XX 01 1.1 12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
8	INSUR PEMERINTAHAN LUMUM																									
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																									
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	100	6.529.971.345	33,75	87.945.000	33,75	2.329.859.950	0	0	0	0	0	0	33,75	2.111.078.600	33,75	2.111.078.600	67,5	2.199.023.600	67,5	33,68	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8 01 02 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	100	6.529.971.345	33,75	87.945.000	33,75	2.329.859.950	0	0	0	0	0	0	33,75	2.111.078.600	33,75	2.111.078.600	67,5	2.199.023.600	67,5	33,68	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		

Kode	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Rencana PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)						Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab				
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.		
										Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.							
8 01 02 1 01	Peleaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	900	6.260.666.345	300	51.043.000	300	2.179.045.950	0	0	0	0	0	0	300	2.008.721.600	300	2.008.721.600	600	2.059.764.600	66,67	32,9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 02 1 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tertaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bulan	24	128.300.000	12	9.331.000	12	96.100.000	0	0	0	0	0	12	55.227.000	12	55.227.000	24	64.558.000	100	50,31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 02 1 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tertaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bulan	36	140.997.000	12	27.571.000	12	54.714.000	0	0	0	0	0	12	47.130.000	12	47.130.000	24	74.701.000	66,67	52,98	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tertaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai p	Persen	100	13.963.758.227	33,75	117.823.000	33,75	5.496.607.418	0	0	0	1,25	218.164.000	32,5	4.550.303.350	33,75	4.768.467.350	67,5	4.886.290.350	67,5	34,99	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 03 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilih	Tertaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Persen	100	13.963.758.227	33,75	117.823.000	33,75	5.496.607.418	0	0	0	1,25	218.164.000	32,5	4.550.303.350	33,75	4.768.467.350	67,5	4.886.290.350	67,5	34,99	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 03 1 03	Peleaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Orang	900	13.362.941.227	300	42.700.000	300	5.148.007.418	0	0	0	0	0	300	4.504.076.350	300	4.504.076.350	600	4.546.776.350	66,67	34,03	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 03 1 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Pelaksanaan koordinasi kesesuaian program antara kesbangpro provinsi dan badan kesbang pusat	Bulan	36	258.617.000	12	34.216.000	12	61.700.000	0	0	0	0	0	12	46.227.000	12	46.227.000	24	80.443.000	66,67	31,11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 03 1 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kesesuaian program kesbangpro provinsi dan kab/kota	Bulan	24	342.200.000	12	40.907.000	12	286.900.000	0	0	0	12	218.164.000	0	12	218.164.000	24	259.071.000	100	75,71	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8 01 04	PROGRAM PEMBEDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Tertaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan bidang pembedayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persen	100	868.436.769	32,91	59.450.000	32,91	625.254.300	0	0	0	0	0	32,91	618.595.300	32,91	618.595.300	65,82	678.045.300	65,82	78,08	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 04 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pembedayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tertaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan bidang pembedayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persen	100	868.436.769	32,91	59.450.000	32,91	625.254.300	0	0	0	0	0	32,91	618.595.300	32,91	618.595.300	65,82	678.045.300	65,82	78,08	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 04 1 03	Peleaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	900	666.143.769	300	29.850.000	300	583.954.300	0	0	0	0	0	300	580.679.300	300	580.679.300	600	610.529.300	66,67	91,65	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 04 1 04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tertaksananya Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bulan	12	61.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 04 1 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tertaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bulan	36	141.093.000	12	29.600.000	12	41.300.000	0	0	0	0	0	12	37.916.000	12	37.916.000	24	67.516.000	66,67	47,85	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Tertaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persen	100	2.546.240.974	32,91	92.511.000	32,91	607.042.700	0	0	0	0	0	32,91	584.812.700	32,91	584.812.700	65,82	677.323.700	65,82	26,6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 05 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tertaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persen	100	2.546.240.974	32,91	92.511.000	32,91	607.042.700	0	0	0	0	0	32,91	584.812.700	32,91	584.812.700	65,82	677.323.700	65,82	26,6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 05 1 03	Peleaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalngunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalngunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	900	2.319.986.974	300	54.250.000	300	528.142.700	0	0	0	0	0	300	527.992.700	300	527.992.700	600	582.242.700	66,67	25,1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 05 1 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalngunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tertaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalngunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Da	Bulan	36	190.154.000	12	38.261.000	12	78.900.000	0	0	0	0	12	56.820.000	12	56.820.000	24	96.081.000	66,67	50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8 01 05 1 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalngunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	Tertaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalngunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	Bulan	12	36.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Tertaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Persen	100	1.385.870.790	6,43	119.491.000	6,43	179.596.000	0	0	0	0	0	6,7	357.393.400	6,7	357.393.400	13,14	476.884.400	13,14	34,41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 06 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tertaksananya perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantauan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Persen	100	1.385.870.790	6,43	119.491.000	6,43	179.596.000	0	0	0	0	0	6,7	357.393.400	6,7	357.393.400	13,14	476.884.400	13,14	34,41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 06 1 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	Orang	300	634.900.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06 1 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	Tertaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	Bulan	36	308.079.000	12	32.411.000	12	88.000.000	0	0	0	0	0	12	64.223.000	12	64.223.000	24	96.634.000	66,67	31,37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 06 1 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	Tertaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	Bulan	36	291.597.000	12	67.080.000	12	91.586.000	0	0	0	0	0	12	146.585.200	12	146.585.200	24	233.665.200	66,67	80,13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 06 1 06	Pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah provinsi	teraksananya forum koordinasi pimpinan daerah provinsi	Dokumen	1	151.285.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	146.585.200	1	146.585.200	1	146.585.200	100	96,89	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tertaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	18.816.120.079	30,77	1.275.177.862	30,77	8.656.369.878	0	0	0	1,54	13.600.000	29,23	7.462.843.772	30,77	7.476.443.772	61,54	8.751.621.634	61,54	46,51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
X XX 01 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah	Tertaksananya restrukturisasi dan tersusunnya Renja tahunan OPD/renja perubahan	Persen	100	675.386.214	27,27	99.915.000	27,27	241.129.100	0	0	0	0	0	27,27	175.413.800	27,27	175.413.800	54,55	275.328.800	54,55	40,77	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Kode	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan Output/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Rensstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.
										Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
X.XX.01.1.1.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	72	244.999.000	48	55.007.500	12	60.000.000	0	0	0	0	0	0	12	59.940.000	12	59.940.000	60	114.947.500	83,33	46,92	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
X.XX.01.1.1.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	72	419.308.200	48	288.633.959	12	65.100.000	0	0	0	0	0	0	12	65.100.000	12	65.100.000	60	353.733.959	83,33	84,36	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
X.XX.01.1.1.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	72	1.854.361.650	48	1.105.458.750	12	376.830.000	0	0	0	0	0	0	12	358.909.978	12	358.909.978	60	1.464.368.728	83,33	78,97	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
X.XX.01.1.1.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
X.XX.01.1.1.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
X.XX.01.1.1.12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Person	100	1.432.888.342	59,83	823.845.000	6,84	146.400.000	0	0	0	0	0	0	6,84	146.120.000	6,84	146.120.000	66,67	969.965.000	66,67	67,69	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
X.XX.01.1.1.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	64	1.214.287.200	52	701.445.000	7	125.400.000	0	0	0	0	0	0	7	125.170.000	7	125.170.000	59	826.615.000	92,19	68,07	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
X.XX.01.1.1.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	53	218.601.142	18	122.400.000	1	21.000.000	0	0	0	0	0	0	1	20.950.000	1	20.950.000	19	143.350.000	35,85	65,58	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
X.XX.01.1.1.11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Person	100	1.167.913.072	66,21	648.081.207	16,55	176.629.642	0	0	0	0	0	0	16,55	152.720.252	16,55	152.720.252	82,76	800.801.459	82,76	68,57	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
X.XX.01.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72	60.075.600	48	43.888.000	12	8.000.000	0	0	0	0	0	0	12	8.000.000	12	8.000.000	60	51.888.000	83,33	86,37	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
X.XX.01.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	1.077.837.272	48	604.193.207	12	168.629.642	0	0	0	0	0	0	12	144.720.252	12	144.720.252	60	748.913.459	83,33	69,48	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
X.XX.01.1.1.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
X.XX.01.1.1.11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	Person	100	3.288.820.836	52,04	1.257.087.087	18,37	1.151.805.124	0	0	0	0	0	0	18,37	1.114.812.906	18,37	1.114.812.906	70,41	2.371.899.973	70,41	72,12	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
X.XX.01.1.1.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	Unit	81	43.000.000	47	19.103.962	17	7.000.000	0	0	0	0	0	0	17	7.000.000	17	7.000.000	64	26.103.962	79,01	60,71	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
X.XX.01.1.1.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	81	866.599.000	47	590.227.105	17	148.894.000	0	0	0	0	0	0	17	142.967.900	17	142.967.900	64	733.195.005	79,01	84,61	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
X.XX.01.1.1.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
X.XX.01.1.1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
X.XX.01.1.1.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1.649.724.676	4	446.746.750	1	930.424.904	0	0	0	0	0	0	1	897.353.807	1	897.353.807	5	1.344.100.557	83,33	81,47	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
X.XX.01.1.1.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	384.497.160	4	201.009.250	1	67.516.200	0	0	0	0	0	0	1	67.491.199	1	67.491.199	5	268.500.449	83,33	69,83	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																									
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Person	100	1.811.380.000	0	0	50	977.780.000	0	0	0	0	0	0	6,81	110.140.000	6,81	110.140.000	6,81	110.140.000	6,81	6,08		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang menyusun GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budgeting Statement)	Person	100	958.600.000	0	0	50	497.100.000	0	0	0	0	0	0	13,67	110.140.000	13,67	110.140.000	13,67	110.140.000	13,67	11,49		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	161.500.000	0	0	1	85.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	277.000.000	0	0	1	142.000.000	0	0	0	0	0	0	1	38.797.600	1	38.797.600	1	38.797.600	50	14,01		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	Perangka 1 Daerah	200	345.000.000	0	0	100	180.000.000	0	0	0	0	0	0	40	71.342.430	40	71.342.430	40	71.342.430	20	20,68		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangka 1 Daerah	96	175.100.000	0	0	48	90.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Komunitas Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan anggota Lembaga Masyarakat/Partai Politik yang mendapatkan pendampingan dan penguatan pendidikan politik dan kepemimpinan perempuan	Person	100	505.600.000	0	0	50	288.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	347.300.000	0	0	1	196.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Mas	Organisasi	200	158.300.000	0	0	100	92.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapatkan penguatan	Person	100	347.180.000	0	0	50	192.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.
										Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.									
2 08 02 1 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	50	186.500.000	0	0	25	110.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 08 02 1 02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	50	160.680.000	0	0	25	82.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 08 02 1 03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif pada Lembaga Layanan (Dinas/UPTD PPA) di Daerah	Persen	100	1.007.145.420	20	273.217.400	50	529.534.000	0	0	0	0	0	42,22	526.452.168	42,22	526.452.168	62,22	799.669.568	62,22	79,4	79,4	79,4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 08 03 1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penguatan dan pendampingan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan (KIP) dan TPPO	Persen	100	187.272.000	0,98	48.832.800	50	95.472.000	0	0	0	0	0	50	227.411.088	50	227.411.088	50,98	276.243.888	50,98	147,51	147,51	147,51	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 08 03 1 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	88.434.000	1	48.832.800	1	45.084.000	0	0	0	0	0	1	76.531.400	1	76.531.400	2	125.364.200	100	141,76	141,76	141,76	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 08 03 1 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Perangka 1 Daerah	100	98.838.000	0	0	50	50.388.000	0	0	0	0	0	50	150.879.688	50	150.879.688	50	150.879.688	50	152,65	152,65	152,65	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 08 03 1 03	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	Persen	100	222.000.000	39,29	143.880.000	50	120.000.000	0	0	0	0	0	62,05	299.041.100	62,05	299.041.100	101,34	442.921.100	101,34	199,51	199,51	199,51	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 08 03 1 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	32	111.000.000	0	0	16	60.000.000	0	0	0	0	0	2	18.192.000	2	18.192.000	2	18.192.000	6,25	16,39	16,39	16,39	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 08 03 1 1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang	192	111.000.000	88	143.880.000	96	60.000.000	0	0	0	0	0	137	280.849.100	137	280.849.100	225	424.729.100	117,19	382,64	382,64	382,64	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 08 03 1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	Persen	100	597.873.420	0,81	80.504.600	50	314.062.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,81	80.504.600	0,81	13,47	13,47	13,47	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 08 03 1 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Laporan	2	218.211.420	0	0	1	117.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 08 03 1 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penganganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penganganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	100	178.602.000	0	0	50	91.902.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 08 03 1 03	Penyediaan Bantuan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Bantuan Spesifik	Orang	20	45.000.000	0	0	10	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 08 03 1 04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	156.000.000	1	80.504.600	1	79.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	80.504.600	50	51,59	51,59	51,59	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kelembagaan Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang terbentuk	Persen	100	1.297.200.000	9,11	344.827.150	50,08	663.300.000	0	0	0	0	0	0	32,68	282.662.761	32,68	282.662.761	41,79	627.289.911	41,79	48,36	48,36	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 08 04 1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM penyedia layanan dan pembagiat/ahli/instansi terkait yang mendapatkan advokasi dan pendampingan pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga	Persen	100	571.556.000	0	0	50	292.556.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 08 04 1 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Perangka 1 Daerah	200	156.408.000	0	0	100	81.308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 08 04 1 02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Dokumen	2	134.040.000	0	0	1	68.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	

Kode	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab								
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.						
										Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.															
2	06	04	1	03	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Laporan	2	280.908.000	0	0	1	143.208.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	06	04	1	04	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Person	100	548.976.000	12,69	252.741.150	50	280.576.000	0	0	0	0	0	50	282.662.761	50	282.662.761	62,69	535.403.911	62,69	97,53	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB						
2	06	04	1	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	200	157.500.000	50	192.324.400	100	81.000.000	0	0	0	0	200	213.039.261	200	213.039.261	250	405.363.661	125	257,37	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB							
2	06	04	1	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	200	197.676.000	0	0	100	100.776.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	06	04	1	03	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	193.800.000	1	60.416.750	1	98.800.000	0	0	0	0	0	1	69.623.500	1	69.623.500	2	130.040.250	100	67,1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB						
2	06	04	1	04	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Person	100	176.868.000	55,56	91.886.000	55,56	90.168.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,56	91.886.000	55,56	51,95	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB						
2	06	04	1	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan	9	176.868.000	5	91.886.000	5	90.168.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	91.886.000	55,56	51,95	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB						
2	06	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Person	100	1.264.776.000	50	84.335.750	50	603.376.000	0	0	0	0	0	75	204.591.040	75	204.591.040	125	288.926.790	125	22,84	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB						
2	06	05	1		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Person	100	1.264.776.000	50	84.335.750	50	603.376.000	0	0	0	0	0	75	204.591.040	75	204.591.040	125	288.926.790	125	22,84	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB						
2	06	05	1	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Dokumen	2	720.676.000	1	40.715.250	1	375.776.000	0	0	0	0	0	1	1.940.000	1	1.940.000	2	42.655.250	100	5,92	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB						
2	06	05	1	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokumen	2	544.100.000	1	43.620.500	1	227.600.000	0	0	0	0	0	2	202.651.040	2	202.651.040	3	246.271.540	150	45,26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB						
2	06	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Person	100	2.076.978.000	1,27	125.330.600	50	1.088.618.000	0	0	0	0	0	33,54	232.815.396	33,54	232.815.396	34,81	358.145.996	34,81	17,24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB						
2	06	06	1		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapatkan advokasi dan pendampingan terkait kebijakan pemenuhan hak anak	Person	100	319.090.000	1,92	63.832.600	50	166.090.000	0	0	0	0	0	1,92	33.533.750	1,92	33.533.750	3,85	97.366.350	3,85	30,51	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB						
2	06	06	1	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Organisasi	50	157.590.000	0	0	25	81.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2	06	06	1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	161.500.000	1	63.832.600	1	85.000.000	0	0	0	0	0	1	33.533.750	1	33.533.750	2	97.366.350	100	60,29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB						
2	06	06	1		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Person	100	1.757.888.000	0,94	61.498.000	50	922.528.000	0	0	0	0	0	49,06	199.281.646	49,06	199.281.646	50	260.779.646	50	14,83	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB						
2	06	06	1	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Orang	100	176.868.000	0	0	50	90.168.000	0	0	0	0	0	50	56.258.000	50	56.258.000	50	56.258.000	50	31,81	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB						
2	06	06	1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	439.700.000	1	61.498.000	1	238.040.000	0	0	0	0	0	1	73.526.750	1	73.526.750	2	135.024.750	100	30,71	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB						

Kode	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.
										Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
2 06 06 1 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	823.760.000	0	0	1	429.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 06 06 1 04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	317.560.000	0	0	1	164.560.000	0	0	0	0	0	1	69.496.896	1	69.496.896	1	69.496.896	50	21,88	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 06 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif pada Lembaga Layanan (Dinas/PTD PPA) di daerah	Persen	100	935.062.000	0	0	46,36	400.012.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 06 07 1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat advokasi dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KKA)	Persen	100	187.272.000	0	0	50	95.472.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 06 07 1 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan, Program dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Organisasi	100	98.838.000	0	0	50	50.388.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 06 07 1 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	88.434.000	0	0	1	45.084.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 06 07 1	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Persen	100	339.750.000	0	0	37,21	97.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 06 07 1 01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	Orang	30	147.500.000	0	0	15	47.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 06 07 1 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Layanan	10	41.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 06 07 1 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	51.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 06 07 1 04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	100.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 06 07 1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	Persen	100	408.040.000	0	0	50	207.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 06 07 1 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Laporan	2	100.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 06 07 1 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	204.000.000	0	0	1	104.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 06 07 1 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	104.040.000	0	0	1	53.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																							
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Persen	100	796.000.000	14,29	236.189.000	57,14	501.000.000	0	0	0	0	0	14,29	155.760.700	14,29	155.760.700	28,57	391.949.700	28,57	49,24	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 02 1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profilparameter dan proyeksi penduduk)	Persen	100	796.000.000	14,29	236.189.000	57,14	501.000.000	0	0	0	0	0	14,29	155.760.700	14,29	155.760.700	28,57	391.949.700	28,57	49,24	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 02 1 01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana)	Dokumen	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 02 1 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	2	300.000.000	1	236.189.000	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	236.189.000	50	78,73	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab					
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Kinerja		Rp.		Rp.			11(105-100)				
										Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
2 14 02 1 03	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Laporan	2	220.000.000	0	0	0	1	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	155.760.700	1	155.760.700	1	155.760.700	50	70,8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		
2 14 02 1 11	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Ke	Dokumen	2	176.000.000	0	0	0	1	81.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 14 02 1 12	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Layanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 14 02 1	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah provinsi	Persen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 14 02 1 01	Pelaksanaan Survey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Dokumen Survey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 14 02 1 02	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 14 02 1 06	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	100	1.023.230.000	0	0	50,14	611.440.000	0	0	0	0	0	0	0	5,76	26.451.500	5,76	26.451.500	5,76	26.451.500	5,76	26.451.500	5,76	2,59	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		
2 14 03 1	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah laporan hasil pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) yang difasilitasi	Persen	100	700.730.000	0	0	57,14	446.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 14 03 1 02	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan B	Dokumen	2	279.370.000	0	0	1	188.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 14 03 1 03	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Se	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Se	Laporan	2	176.460.000	0	0	1	89.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 14 03 1 04	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Dokumen	1	88.400.000	0	0	1	88.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 14 03 1 05	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Ken	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Ken	Dokumen	2	156.500.000	0	0	1	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 03 1 07	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 14 03 1 08	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 14 03 1	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertan Ber-KB	Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, tenaga kesehatan, perangkat daerah dan stakeholder terkait yang mendapatkan advokasi terkait pelayanan dan pembinaan kesertan Ber-KB	Persen	100	322.500.000	0	0	50	165.000.000	0	0	0	0	0	0	5,88	26.451.500	5,88	26.451.500	5,88	26.451.500	5,88	26.451.500	5,88	26.451.500	5,88	8,2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 14 03 1 02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertan Ber-KB	Organisasi	200	166.000.000	0	0	100	85.000.000	0	0	0	0	0	0	20	26.451.500	20	26.451.500	20	26.451.500	20	26.451.500	10	15,93	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB			
2 14 03 1 03	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemirnan dalam Program KKBPK	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemirnan dalam Program KKBPK	Organisasi	140	156.500.000	0	0	70	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga)	Persen	100	1.343.908.800	0	0	43,06	632.271.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	

Kode	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab					
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.			
										Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
2	14	04	1	Perencanaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diselesaikan	Persen	100	752.875.800	0	0	42,81	289.047.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2	14	04	1	03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2	14	04	1	04	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Orang	120	98.727.200	0	0	120	98.727.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2	14	04	1	06	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah PIK-R yang Mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Organisasi	120	96.828.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2	14	04	1	07	Pengembangan dan Perbarikan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan dan Perbarikan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Organisasi	40	87.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2	14	04	1	10	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dokumen	1	89.960.000	0	0	1	89.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2	14	04	1	12	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga	Laporan	1	85.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2	14	04	1	13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian (Bangsa) Indeks Pembangunan Keluarga	Laporan	2	196.860.000	0	0	1	100.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2	14	04	1	14	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyajian Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyajian Pengasuhan 1000 HPK	Dokumen	1	98.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2	14	04	1	15	Penyediaan Sarana Penyajian Pengasuhan 1000 HPK	Penyediaan Sarana Penyajian Pengasuhan 1000 HPK	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2	14	04	1		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persen	100	591.033.000	0	0	66,67	343.224.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2	14	04	1	04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Keluar	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluar	Dokumen	2	511.033.000	0	0	1	263.224.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	14	04	1	05	Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Dokumen	1	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	17.364.473.047	43,02	6.788.565.448	50,51	6.939.946.761	0	0	0	0	0	41,78	6.794.572.157	41,78	6.794.572.157	84,79	13.583.137.605	84,79	78,22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		
X	XX	01	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	693.760.640	35	247.377.750	50	366.544.640	0	0	0	0	0	45	59.794.996	45	59.794.996	80	307.172.746	80	44,28	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		
X	XX	01	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	41.032.520	2	60.172.000	2	20.624.320	0	0	0	0	0	2	8.583.300	2	8.583.300	4	68.755.300	100	167,56	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		
X	XX	01	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	19.474.000	1	7.814.250	1	10.374.000	0	0	0	0	0	1	35.453.196	1	35.453.196	2	43.267.446	100	222,18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		
X	XX	01	1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	19.474.000	0	0	1	10.374.000	0	0	0	0	0	1	6.178.000	1	6.178.000	1	6.178.000	50	31,72	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		
X	XX	01	1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	19.474.000	0	0	1	10.374.000	0	0	0	0	0	1	1.122.000	1	1.122.000	1	1.122.000	50	5,76	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		

Kode	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Restra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab				
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22
X XX 01 1 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	19.474.000	0	0	1	10.374.000	0	0	0	0	0	0	0	1	2.699.500	1	2.699.500	1	2.699.500	50	13,86	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
X XX 01 1 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Hasil Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Hasil Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Hasil Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	11.032.320	3	5.243.000	3	5.624.320	0	0	0	0	0	0	0	3	5.759.000	3	5.759.000	6	11.002.000	100	99,73	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
X XX 01 1 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	563.800.000	1	174.148.500	1	298.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.148.500	50	30,89	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
X XX 01 1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diselesaikan tepat waktu	Persen	100	12.609.130.526	50,39	5.551.643.899	50,39	6.453.935.135	0	0	0	0	0	0	0	48,84	5.824.954.705	48,84	5.824.954.705	99,23	11.376.598.604	99,23	90,23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
X XX 01 1 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1750	12.302.660.162	882	5.467.760.399	882	6.301.362.522	0	0	0	0	0	0	0	854	5.691.900.705	854	5.691.900.705	1736	11.159.661.104	99,2	90,71	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
X XX 01 1 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	24	182.448.000	12	77.780.000	12	91.234.000	0	0	0	0	0	0	0	12	82.680.000	12	82.680.000	24	160.460.000	100	87,95	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
X XX 01 1 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	11.032.320	1	2.625.500	1	5.624.320	0	0	0	0	0	0	0	1	4.434.000	1	4.434.000	2	7.059.500	100	63,99	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
X XX 01 1 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	36	112.990.044	18	3.478.000	18	55.724.203	0	0	0	0	0	0	0	18	45.940.000	18	45.940.000	36	49.418.000	100	43,74	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
X XX 01 1,1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memenuhi standar/kaidah disiplin dan mengikuti pendidikan, sosialisasi, bimtek kompetensi spesifik tupoksi/profesi	Persen	100	513.544.875	30,65	90.710.000	51,21	262.069.875	0	0	0	0	0	0	0	18,95	61.713.200	18,95	61.713.200	49,6	152.423.200	49,6	29,68	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
X XX 01 1,1 02	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	396	211.200.000	136	88.400.000	204	108.800.000	0	0	0	0	0	0	0	70	48.930.000	70	48.930.000	206	137.330.000	52,02	65,02	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
X XX 01 1,1 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	125.916.750	0	0	5	63.966.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X XX 01 1,1 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	58.809.375	0	0	15	29.767.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X XX 01 1,1 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	117.618.750	16	2.310.000	30	59.535.417	0	0	0	0	0	0	0	24	12.783.200	24	12.783.200	40	15.093.200	66,67	12,83	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
X XX 01 1,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi umum perkantoran yang dilaksanakan	Persen	100	1.481.136.722	38,34	305.819.518	50,45	749.298.004	0	0	0	0	0	0	0	50,45	468.624.500	50,45	468.624.500	88,79	774.444.018	88,79	52,29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
X XX 01 1,1 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	29.359.716	8	1.768.500	12	14.861.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1.768.500	33,33	6,02	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X XX 01 1,1 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	20.000.000	0	0	15	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
X XX 01 1,1 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	50	25.954.338	19	83.784.000	25	13.260.838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	83.784.000	38	322,81	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
X XX 01 1,1 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	54	45.954.338	20	35.241.518	27	23.260.838	0	0	0	0	0	0	0	17	36.730.500	17	36.730.500	37	71.972.018	68,52	156,62	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
X XX 01 1,1 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	18	141.267.038	8	33.148.000	9	71.505.538	0	0	0	0	0	0	0	5	25.524.700	5	25.524.700	13	58.672.700	72,22	41,53	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	

Kode	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	10(4-9)	Rp.		11(10-100)	Rp.
										Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
X XX 01 1.1 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	216	25.274.886	104	10.200.000	108	12.793.461	0	0	0	0	0	0	164	1.000.000	164	1.000.000	268	11.200.000	124,07	44,31	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		
X XX 01 1.1 08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	24	96.920.156	3	11.967.000	12	48.460.078	0	0	0	0	0	0	7	16.240.000	7	16.240.000	10	28.207.000	41,67	29,1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		
X XX 01 1.1 09	Penyetenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	135	1.051.406.250	50	129.710.500	70	530.156.250	0	0	0	0	0	0	86	389.129.300	86	389.129.300	136	518.839.900	100,74	49,35	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		
X XX 01 1.1 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	45.000.000	0	0	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
X XX 01 1.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan urusan SKPD yang terpenuhi	Persen	100	939.189.104	12,98	73.413.000	50,38	533.564.104	0	0	0	0	0	0	4,58	92.907.000	4,58	92.907.000	17,56	166.320.000	17,56	17,71	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		
X XX 01 1.1 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
X XX 01 1.1 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	122.173.479	0	0	2	47.173.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
X XX 01 1.1 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	40	155.671.875	0	0	20	78.796.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
X XX 01 1.1 07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan yang Disediakan	Unit	40	155.671.875	17	73.413.000	20	78.796.875	0	0	0	0	0	0	6	92.907.000	6	92.907.000	23	168.320.000	57,5	106,84	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		
X XX 01 1.1 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	200.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
X XX 01 1.1 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	42	155.671.875	0	0	21	78.796.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
X XX 01 1.1 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	50.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
X XX 01 1.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan penunjang urusan SKPD yang dilaksanakan	Persen	100	424.588.730	50	177.982.626	50	214.875.401	0	0	0	0	0	0	50	204.103.076	50	204.103.076	100	382.085.702	100	89,99	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		
X XX 01 1.1 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	8.503.753	12	3.000.000	12	4.284.487	0	0	0	0	0	0	12	3.000.000	12	3.000.000	24	6.000.000	100	70,56	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		
X XX 01 1.1 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	312.900.469	12	107.482.626	12	158.381.719	0	0	0	0	0	0	12	111.103.076	12	111.103.076	24	218.585.702	100	69,86	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		
X XX 01 1.1 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	103.184.508	12	67.500.000	12	52.229.195	0	0	0	0	0	0	12	90.000.000	12	90.000.000	24	157.500.000	100	152,64	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		
X XX 01 1.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan urusan SKPD yang terpenuhi	Persen	100	703.122.450	27,27	341.618.655	50	359.659.512	0	0	0	0	0	0	10,61	82.474.680	10,61	82.474.680	37,88	424.093.335	37,88	60,32	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		
X XX 01 1.1 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	14	175.597.875	0	0	7	88.882.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
X XX 01 1.1 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	6	78.143.581	7	87.324.335	3	40.060.331	0	0	0	0	0	0	7	82.474.680	7	82.474.680	14	169.799.015	233,33	214,55	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		

Kode	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Peninggung Jawab		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.
										Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.									
X XX 01 1 1 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	26.125.313	0	0	10	13.312.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
X XX 01 1 1 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	26.125.313	10	7.840.000	10	13.312.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7.840.000	50	30,01		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		
X XX 01 1 1 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	2	278.133.750	1	246.454.320	1	140.783.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	246.454.320	50	88,61		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		
X XX 01 1 1 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	68.000.000	0	0	1	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
X XX 01 1 1 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	49.996.618	0	0	1	25.306.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																									
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan pangan utama (beras) / Ketersediaan Energi (KMI/KapHar) / Ketersediaan Protein (GKI/kapHar)	Persen	100	152.156.442	54,55	107.828.942	45,45	56.732.500	0	0	0	0	45,45	56.732.500	0	45,45	56.732.500	100	164.559.442	100	108,15		Dinas Ketahanan Pangan		
2 09 02 1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Persen	100	152.156.442	54,55	107.828.942	45,45	56.732.500	0	0	0	0	45,45	56.732.500	0	45,45	56.732.500	100	164.559.442	100	108,15		Dinas Ketahanan Pangan		
2 09 02 1 01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Unit	10	114.601.971	5	62.578.471	5	56.732.500	0	0	0	5	56.732.500	0	5	56.732.500	10	119.310.971	100	104,11		Dinas Ketahanan Pangan			
2 09 02 1 02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan		
2 09 02 1 03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Tersedia	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan		
2 09 02 1 04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 02 1 05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Dokumen	1	37.554.471	1	45.248.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	45.248.471	100	120,49		Dinas Ketahanan Pangan			
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN Masyarakat	Koefisien variasi pangan strategis (beras, cabe merah, bawang merah, kedelai) (CV) / Konsumsi Energi (KMI/KapHar) / Konsumsi Protein (GKI/kapHar)	Persen	100	1.282.220.861	30,77	710.169.013	46,15	509.019.926	0	0	0	7,69	30,77	2.154.206.450	38,46	2.154.206.450	69,23	2.864.375.463	69,23	223,39		Dinas Ketahanan Pangan			
2 09 03 1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persen	100	178.683.471	20	45.500.000	40	133.225.000	0	0	0	0	40	1.871.017.500	40	1.871.017.500	60	1.916.517.500	60	1.072,58		Dinas Ketahanan Pangan			
2 09 03 1 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	1	49.905.000	0	1	49.905.000	0	0	0	0	1	70.205.000	1	70.205.000	1	70.205.000	100	140,68		Dinas Ketahanan Pangan				
2 09 03 1 02	Penyediaan Pangan Bebas Sumber Daya Lokal	Pangan Bebas Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan		
2 09 03 1 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan		
2 09 03 1 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	2	128.778.471	1	45.500.000	1	83.320.000	1	800.812.500	1	1.800.812.500	2	1.846.312.500	100	1.433,71		Dinas Ketahanan Pangan							
2 09 03 1 05	Pengembangan Ketersediaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Pengembangan Ketersediaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan		
2 09 03 1	Penyelenggaraan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Tertaskannya Penyelenggaraan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persen	100	601.271.659	50	499.999.983	50	101.271.676	0	0	0	0	0	111.147.700	0	111.147.700	50	611.147.683	50	101,64		Dinas Ketahanan Pangan			
2 09 03 1 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Laporan	2	601.271.659	1	499.999.983	1	101.271.676	0	0	0	0	0	111.147.700	1	111.147.700	1	611.147.683	50	101,64		Dinas Ketahanan Pangan			
2 09 03 1 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan		
2 09 03 1 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan		
2 09 03 1 04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpenuhi	Ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 03 1	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditepatkan oleh Pemerintah Pusat	Tertaskannya Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditepatkan oleh Pemerintah Pusat	Persen	100	52.585.841	100	52.721.870	0	0	0	0	100	0	0	100	0	200	52.721.870	200	100,26		Dinas Ketahanan Pangan				
2 09 03 1 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan	1	52.585.841	1	52.721.870	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	52.721.870	200	100,26		Dinas Ketahanan Pangan				
2 09 03 1	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Tertaskannya Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Persen	100	448.679.910	20	111.947.160	60	274.523.250	0	0	0	40	172.041.250	40	172.041.250	60	283.968.410	60	63,15		Dinas Ketahanan Pangan				
2 09 03 1 01	Promosi Penggerak/Kampanye Konsumsi Pangan Bebas Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penggerak/Kampanye Konsumsi Pangan Bebas Sumber Daya Lokal	Dokumen	1	124.131.000	0	0	0	118.220.000	0	0	0	0	1	43.000.000	1	43.000.000	1	43.000.000	100	34,64		Dinas Ketahanan Pangan			
2 09 03 1 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (BSGA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (BSGA)	Laporan	2	141.086.000	0	0	0	61.362.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 03 1 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	2	184.462.910	1	111.947.160	1	94.941.250	0	0	0	0	1	129.041.250	1	129.041.250	2	240.988.410	100	130,64		Dinas Ketahanan Pangan			
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE DAERAH RAWAN PANGAN (%)	Persen	100	113.881.971	40	75.735.442	40	75.166.000	0	0	0	0	40	107.251.000	40	107.251.000	80	182.986.442	80	160,68		Dinas Ketahanan Pangan			
2 09 04 1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	Persen	100	113.881.971	50	75.735.442	50	75.166.000	0	0	0	0	50	107.251.000	50	107.251.000	100	182.986.442	100	160,68		Dinas Ketahanan Pangan			
2 09 04 1 01	Penyusunan, Pemeliharaan dan Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Kerentanan dan Ketahanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen	4	113.881.971	2	75.735.442	2	75.166.000	0	0	0	2	107.251.000	2	107.251.000	4	182.986.442	100	160,68		Dinas Ketahanan Pangan				
2 09 04 1	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Tertaskannya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Persen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 04 1 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan	
2 09 04 1 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan	

Kode	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tinggi Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab			
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		11(10/5*100)		
										Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.										
X XX 01 1 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20.000.000	1	8.747.624	1	10.000.000	1	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.680.080	2	15.427.704	100	77,14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
X XX 01 1 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	239.200.000	1	57.750.500	2	124.200.000	0	0	2	#####	0	0	0	0	0	1.288.000	2	109.400.000	3	167.150.500	75	69,88	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
X XX 01 1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya administrasi keuangan	Persen	100	10.325.912.761	50	4.059.241.651	50	5.449.231.647	4,41	#####	5,15	#####	5,15	1.145.434.915	5,15	888.958.143	19,85	4.777.887.356	69,85	8.837.129.007	69,85	85,58	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
X XX 01 1 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	110	9.976.552.761	55	3.888.641.931	55	5.270.631.647	3	#####	4	#####	4	1.106.494.915	3	840.123.143	14	4.612.232.356	69	8.500.874.287	62,73	85,21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
X XX 01 1 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	30.600.000	1	9.484.500	1	15.600.000	0	0	0	0	0	0	1	12.895.000	1	12.895.000	2	22.359.500	100	73,07	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
X XX 01 1 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	24	318.760.000	12	161.135.220	12	163.000.000	3	#####	3	#####	3	38.940.000	3	35.940.000	12	152.760.000	24	313.895.220	100	96,47	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
X XX 01 1,1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya administrasi kepegawaian	Persen	100	909.895.158	72,7	656.930.700	37,23	193.516.000	0,35	#####	0	0	0	0	0	0,35	73.400.000	73,05	730.330.700	73,05	80,27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
X XX 01 1,1 02	Pengadaan Pakain Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakain Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	Paket	6	190.000.000	3	94.560.000	3	95.000.000	1	#####	0	0	0	0	0	0	1	73.400.000	4	167.960.000	66,67	88,4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
X XX 01 1,1 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
X XX 01 1,1 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	102	100.000.000	101	92.236.000	51	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	92.236.000	99,02	92,24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
X XX 01 1,1 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	152	619.895.158	101	470.134.700	51	48.516.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	470.134.700	66,45	75,84	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
X XX 01 1,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya administrasi umum kantor	Persen	100	2.295.480.000	53,91	1.268.296.524	46,09	1.013.980.000	11,72	#####	13,02	#####	7,81	233.348.500	13,54	280.479.332	46,09	1.011.062.332	100	2.279.358.856	100	99,3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
X XX 01 1,1 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	18	17.000.000	10	9.611.180	8	7.000.000	2	#####	0	0	2	2.000.000	4	2.577.500	8	6.172.500	18	15.783.680	100	92,85	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
X XX 01 1,1 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	5.200.000	10	2.500.000	10	2.700.000	5	#####	5	#####	0	0	0	0	10	2.699.000	20	5.199.000	100	99,98	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
X XX 01 1,1 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	63	70.280.000	33	36.308.150	30	33.280.000	10	#####	10	#####	0	0	10	18.116.350	30	32.459.350	63	68.767.500	100	97,85	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
X XX 01 1,1 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	25	86.000.000	10	38.512.000	15	46.000.000	2	#####	3	#####	2	7.308.500	8	19.165.200	15	45.601.200	25	84.113.200	100	97,81	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
X XX 01 1,1 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	28	71.000.000	14	38.280.000	14	32.000.000	2	#####	2	#####	5	8.340.000	5	10.920.000	14	32.160.000	28	70.440.000	100	99,21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
X XX 01 1,1 08	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	50	88.000.000	30	52.640.000	20	35.000.000	4	#####	10	#####	1	4.040.000	5	11.960.000	20	34.300.000	50	86.940.000	100	98,9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
X XX 01 1,1 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	180	1.958.000.000	100	1.090.445.194	80	858.000.000	20	#####	20	#####	20	211.660.000	20	217.740.282	80	857.670.282	180	1.948.115.476	100	99,5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
X XX 01 1,1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang kantor	Persen	100	1.175.000.000	39,47	490.628.500	52,63	668.000.000	7,89	#####	7,89	#####	5,26	5.236.250	21,05	96.100.000	42,11	464.484.950	81,58	955.113.450	81,58	81,29	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
X XX 01 1,1 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	6	142.000.000	4	93.128.500	2	48.000.000	0	0	0	0	0	2	48.000.000	2	48.000.000	6	141.128.500	100	99,99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
X XX 01 1,1 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	42.000.000	3	41.600.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	41.600.000	100	99,05	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
X XX 01 1,1 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	671.000.000	6	290.900.000	12	371.000.000	3	#####	0	0	0	0	6	48.100.000	9	370.248.700	15	661.148.700	75	99,53	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
X XX 01 1,1 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	200.000.000	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
X XX 01 1,1 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	120.000.000	2	65.000.000	5	49.000.000	0	0	3	#####	2	5.236.250	0	0	5	46.236.250	7	111.236.250	100	92,7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
X XX 01 1,1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang kantor	Persen	100	327.500.000	48,83	173.546.939	51,17	150.000.000	12,21	#####	12,21	#####	12,21	25.980.000	12,21	26.848.518	48,83	141.700.800	97,65	315.247.739	97,65	96,26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
X XX 01 1,1 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	165	20.000.000	80	8.200.000	85	10.000.000	20	#####	20	#####	20	2.250.000	20	2.250.000	80	9.000.000	160	17.200.000	96,97	96	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
X XX 01 1,1 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	275.000.000	12	151.846.939	12	120.000.000	3	#####	3	#####	3	19.230.000	3	20.098.518	12	114.700.800	24	266.547.739	100	96,33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
X XX 01 1,1 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	32.500.000	12	13.500.000	12	20.000.000	3	#####	3	#####	3	4.500.000	3	4.500.000	12	18.000.000	24	31.500.000	100	96,92	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
X XX 01 1,1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya penunjang barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	Persen	100	1.597.500.000	50	825.530.532	50	863.850.000	10,81	#####	13,51	#####	12,16	92.362.593	8,11	124.883.255	44,59	628.220.638	94,59	1.453.741.170	94,59	91	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
X XX 01 1,1 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	24	297.500.000	12	114.442.507	12	133.850.000	3	#####	3	#####	3	8.920.098	3	31.725.750	12	77.423.350	24	191.865.857	100	71,73	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
X XX 01 1,1 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	24	55.000.000	12	22.805.000	12	30.000.000	2	#####	3	#####	3	5.600.000	0	0	8	22.050.000	20	44.855.000	83,33	81,55	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
X XX 01 1,1 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	24	875.000.000	12	488.373.000	12	500.000.000	3	#####	3	#####	3	77.842.495	3	93.157.505	12	342.000.000	24	830.373.000	100	94,9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
X XX 01 1,1 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	400.000.000	1	199.900.025	1	200.000.000	0	0	1	#####	0	0	0	0	1	186.747.288	2	386.647.313	100	96,86	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																										
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Tertanya Desa	Persen	100	20.500.000	0	0	50	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	02	1	Penertasan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Tertanya Penertasan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Adat Desa	Persen	100	20.500.000	0	0	50	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Sub Output))	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab		
				Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		Rp.	Rp.
											Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.								
2 13 02 1 01	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitas Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitas Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Ditaksanakan	Dokumen	2	20.500.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN Kerja Sama DESA	Terbentuknya kawasan pedesaan	Persen	100	440.724.336	33,33	218.057.732	166,67	344.697.257	0	0	0	0	66,67	157.791.544	0	66,67	157.791.544	100	375.849.276	100	85,28		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2 13 03 1	Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Fasilitas Kerjasama antara Desa Yang Menjadi Kewenangan provinsi	Persen	100	440.724.336	33,33	218.057.732	166,67	344.697.257	0	0	0	0	66,67	157.791.544	0	66,67	157.791.544	100	375.849.276	100	85,28		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2 13 03 1 02	Fasilitas Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Ditaksanakan	Dokumen	1	102.789.000	0	0	1	102.789.000	0	0	0	0	1	86.436.544	0	1	86.436.544	1	86.436.544	100	84,09		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2 13 03 1 03	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	2	337.935.336	1	218.057.732	1	77.615.000	0	0	0	1	71.355.000	0	1	71.355.000	2	289.412.732	100	85,64		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kualitas Penataan dan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	100	911.817.896	54,46	636.672.586	45,54	828.049.000	0	0	0	0	45,54	485.339.246	0	45,54	485.339.246	100	1.122.011.832	100	123,05		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2 13 04 1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina	Persen	100	911.817.896	54,46	636.672.586	45,54	828.049.000	0	0	0	0	45,54	485.339.246	0	45,54	485.339.246	100	1.122.011.832	100	123,05		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2 13 04 1 07	Fasilitas Pemilhan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilhan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Orang	50	4.598.000	0	0	50	4.598.000	0	0	0	0	50	1.653.000	0	50	1.653.000	50	1.653.000	100	35,96		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2 13 04 1 08	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	2	828.635.316	1	221.208.000	1	582.694.000	0	0	0	1	479.215.246	0	1	479.215.246	2	700.423.246	100	84,53		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2 13 04 1 10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Orang	60	78.584.580	60	69.173.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	69.173.893	100	88,02		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Berdayanya Lembaga-lembaga yang ada di Desa	Persen	100	4.952.581.661	96,55	2.706.363.870	65,52	2.050.906.000	0	0	0	0	65,52	1.748.158.829	0	65,52	1.748.158.829	162,07	4.454.522.699	162,07	89,94		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2 13 05 1	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah/Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yan		Persen	100	4.952.581.661	96,55	2.706.363.870	65,52	2.050.906.000	0	0	0	0	65,52	1.748.158.829	0	65,52	1.748.158.829	162,07	4.454.522.699	162,07	89,94		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2 13 05 1 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Poyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Poyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga	24	333.820.854	15	144.548.300	10	175.182.000	0	0	0	10	156.065.088	0	10	156.065.088	25	300.613.388	104,17	90,05		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2 13 05 1 05	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	4	260.353.268	2	160.266.500	2	84.000.000	0	0	0	2	78.645.000	0	2	78.645.000	4	238.911.500	100	91,76		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2 13 05 1 06	Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	332.619.141	1	198.059.200	1	125.791.000	0	0	0	1	113.848.018	0	1	113.848.018	2	311.907.219	200	93,77		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2 13 05 1 09	Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	0	4.025.798.398	10	2.203.489.870	6	1.665.933.000	0	0	0	6	1.399.600.723	0	6	1.399.600.723	16	3.603.090.593	0	89,5		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya kegiatan Administrasi Perkantoran	Persen	100	23.826.145.764	83,87	9.641.706.063	51,25	12.751.828.900	0	0	0,36	0	80,29	8.250.646.030	2,51	5.345.000	83,15	8.255.991.000	167,03	17.897.697.093	167,03	75,12		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
X XX 01 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Perkantoran	Persen	100	215.363.857	50	180.668.000	16,67	83.047.675	0	0	0	0	54,17	30.343.675	0	54,17	30.343.675	104,17	211.011.675	104,17	97,97		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
X XX 01 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	16.937.182	1	12.514.000	1	3.501.000	0	0	0	1	3.501.000	0	1	3.501.000	2	16.015.000	100	94,56		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
X XX 01 1 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	8.555.675	0	0	1	8.555.675	0	0	0	1	5.105.675	0	1	5.105.675	1	5.105.675	100	59,68		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
X XX 01 1 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20	10.115.000	10	5.578.000	1	4.537.000	0	0	0	10	4.537.000	0	10	4.537.000	20	10.115.000	100	100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
X XX 01 1 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	179.776.000	1	162.576.000	1	66.454.000	0	0	0	1	17.200.000	0	1	17.200.000	2	179.776.000	200	100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
X XX 01 1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	17.267.136.595	341,94	7.578.382.690	41,94	8.511.168.400	0	0	0	325,81	5.893.887.552	16,13	5.345.000	341,94	5.899.232.552	683,87	13.477.615.242	683,87	78,05		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
X XX 01 1 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	1	16.937.116.500	96	7.401.670.890	0	8.362.318.400	0	0	0	96	5.755.932.552	0	96	5.755.932.552	192	13.157.803.442	192,00	77,69		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
X XX 01 1 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	11.264.260	5	5.698.300	1	5.345.000	0	0	0	5	5.345.000	5	5.345.000	10	11.043.300	500	99,04		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
X XX 01 1 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	28	318.755.835	5	170.813.500	12	143.505.000	0	0	0	5	137.955.000	0	5	137.955.000	10	308.768.500	35,71	96,87		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
X XX 01 1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	32.678.000	0	0	100	32.678.000	0	0	0	0	16,67	32.678.000	0	16,67	32.678.000	16,67	32.678.000	16,67	100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
X XX 01 1 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	32.678.000	0	0	12	32.678.000	0	0	0	2	32.678.000	0	2	32.678.000	2	32.678.000	16,67	100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
X XX 01 1,1	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawalan yang di hasilkan dan beresida	Persen	100	32.000.000	100	32.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	32.000.000	100	100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		

Kode	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun Kinerja	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja		OPD Penanggung Jawab								
							Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4				Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	11(100%)	100
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.													
							1	2	3	4	5	6	7	8													
2 15 02 1 1 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Laporan	2	62.531.000	2	48.863.000			0	0	0	0	0	0	0	0	48.863.000	100	78,14	Dinas Perhubungan						
2 15 02 1 1 05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	40.235.000	2	29.710.000			0	0	0	0	0	0	0	0	29.710.000	100	73,84	Dinas Perhubungan						
2 15 02 1 1 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Person	100	62.531.000	100	62.039.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.039.000	100	99,21	Dinas Perhubungan						
2 15 02 1 1 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Unit	87	62.531.000	87	62.039.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.039.000	100	99,21	Dinas Perhubungan						
2 15 02 1 1 01	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin trayek AKDP	Person	100	67.399.000	42,23	56.788.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.788.000	42,23	84,26	Dinas Perhubungan						
2 15 02 1 1 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Laporan	206	67.399.000	87	56.788.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.788.000	42,23	84,26	Dinas Perhubungan						
2 15 02 1 1 02	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotakan dan Perdesaan yang Melintasi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen tarif angkutan disetap Kabupaten kota	Person	100	66.888.000	100	41.583.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.583.000	100	62,17	Dinas Perhubungan						
2 15 02 1 1 03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotakan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotakan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	66.888.000	1	41.583.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.583.000	100	62,17	Dinas Perhubungan						
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAN PELAYARAN		Person	100	91.830.885.912	34,05	66.888.750.825	58,13	21.740.671.757	0,09	#####	7,19	#####	30,01	6.017.572.095	20,66	7.272.784.990	57,95	20.345.593.930	92	87.234.344.755	92	94,99	Dinas Perhubungan			
2 15 03 1	Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Jumlah Badan Usaha Angkutan Laut Yang Telah Memiliki Izin	Person	100	84.867.000	44,44	28.152.000	55,56	49.500.000	0	0	13,89	#####	27,78	14.344.200	13,89	2.808.000	55,56	19.503.200	100	47.655.200	100	56,15	Dinas Perhubungan			
2 15 03 1 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Dokumen	72	84.867.000	32	28.152.000	40	49.500.000	0	0	10	#####	20	14.344.200	10	2.808.000	40	19.503.200	72	47.655.200	100	56,15	Dinas Perhubungan			
2 15 03 1 01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional yang memiliki Izin	Jumlah Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional yang memiliki Izin	Person	100	112.031.000	18	46.934.000	60	49.500.000	0	0	14	#####	16	9.632.300	30	25.822.000	60	40.528.300	78	87.462.300	78	78,07	Dinas Perhubungan			
2 15 03 1 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Dokumen	50	112.031.000	9	46.934.000	30	49.500.000	0	0	7	#####	8	9.632.300	15	25.822.000	30	40.528.300	39	87.462.300	78	78,07	Dinas Perhubungan			
2 15 03 1 1 1	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Lintasan Angkutan Penyeberangan dan Persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Person	100	126.431.000	29,03	42.957.000	70,97	63.900.000	0	0	0	0	38,71	27.994.000	32,26	26.007.000	70,97	54.001.000	100	96.958.000	100	76,89	Dinas Perhubungan			
2 15 03 1 1 02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Diselujutnya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Dokumen	31	126.431.000	9	42.957.000	22	63.900.000	0	0	0	12	27.994.000	10	26.007.000	22	54.001.000	31	96.958.000	100	76,89	Dinas Perhubungan				
2 15 03 1 1 1 01	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyebaran Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Pele Kemas yang memiliki Izin	Jumlah Badan Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyebaran Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Pele Kemas yang memiliki Izin	Person	100	119.749.000	42,78	46.249.000	57,22	73.500.000	0	0	0	0	37,43	46.301.000	19,79	15.108.500	57,22	61.409.500	100	107.658.500	100	89,9	Dinas Perhubungan			
2 15 03 1 1 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyebaran Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Pele Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyebaran Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Pele Kemas	Dokumen	187	119.749.000	80	46.249.000	107	73.500.000	0	0	0	0	70	46.301.000	37	15.108.500	107	61.409.500	187	107.658.500	100	89,9	Dinas Perhubungan			
2 15 03 1 1 1 01	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang telah ditetapkan	Person	100	126.431.000	80	96.855.000	60	63.900.000	0	0	0	0	40	17.632.000	20	29.237.000	60	46.869.000	140	145.524.000	140	115,1	Dinas Perhubungan			
2 15 03 1 1 03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	126.431.000	2	49.327.500	3	63.900.000	0	0	0	0	2	17.632.000	1	29.237.000	3	46.869.000	5	96.196.500	100	76,09	Dinas Perhubungan			
2 15 03 1 1 01	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pungguan Regional	Jumlah Unit dan Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pungguan Regional	Person	100	90.547.527.912	33,33	66.483.943.825	55,56	21.058.971.757	3,7	#####	11,11	#####	14,81	5.757.496.595	18,52	7.031.101.490	48,15	19.806.849.930	81,48	86.290.793.755	81,48	95,3	Dinas Perhubungan			
2 15 03 1 1 02	Pembangunan Pelabuhan Pungguan Regional	Jumlah Pelabuhan Pungguan Regional yang Terbaharu	Unit	17	84.431.763.326	9	66.483.943.825	5	14.943.207.171	0	0	1	#####	1	3.832.834.945	1	4.597.735.540	3	13.913.827.230	12	80.397.771.055	70,59	95,32	Dinas Perhubungan			
2 15 03 1 1 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pungguan Regional	Jumlah Pelabuhan Pungguan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Unit	10	6.115.764.586	0	0	10	6.115.764.586	1	#####	2	#####	3	1.924.661.650	4	2.433.365.950	10	5.893.022.700	10	5.893.022.700	100	96,36	Dinas Perhubungan			
2 15 03 1 1 1	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dan Unit Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Person	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan		
2 15 03 1 1 1	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pungguan Regional	Jumlah Dokumen / Laporan Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pungguan Regional	Person	100	119.593.000	36,87	27.236.000	49,31	72.400.000	0	0	0	0	32,28	45.394.000	17,85	20.800.000	49,31	66.194.000	88,18	93.430.000	88,18	79,51	Dinas Perhubungan			
2 15 03 1 1 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pungguan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pungguan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan	
2 15 03 1 1 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pungguan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pungguan Regional	Laporan	187	117.503.000	80	27.236.000	107	72.400.000	0	0	0	0	70	45.394.000	37	20.800.000	107	66.194.000	187	93.430.000	100	79,51	Dinas Perhubungan			

Kode	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)						Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab								
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.						
										Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.											
3	29	02	1	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	2	147.025.521	60,6	43.209.000	1	75.725.000	0	0	0	0	0	86,15	65.238.000	86,15	65.238.000	146,75	108.447.000	7,337,50	73,76	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Jumlah Kontribusi Penanaman Daerah Bidang ESDM	Persen	100	400.000.000	0		100	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 MI	-	Persen	100	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 MI	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 MI yang Terkumpul dan Tertah	Dokumen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1	02	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 MI	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 MI yang Dibekukan dan Ditepaikan	Dokumen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 MI	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 MI	Laporan	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 MI Laut	-	Persen	100	200.000.000	0		100	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 MI Laut	-	Dokumen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 MI Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 MI Laut	Dokumen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 MI Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 MI Laut	Laporan	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1	05	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 MI Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 MI Laut	Laporan	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	-	Persen	100	200.000.000	0		100	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	-	Dokumen	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1	03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Dokumen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Laporan	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1	05	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemangag Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Jumlah Laporan Hasil Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemangag Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Laporan	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,1		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	Persen	100	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,1	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	Dokumen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,1	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,1	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,1		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	Persen	100	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1,1	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Tertah	Dokumen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.
										Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.					
3 29 03 1.1 02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 03 1.1 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 03 1.1	Penatuaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izn Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	Person	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 03 1.1 01	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 03 1.1	Penatuaan Izn Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izn Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	Person	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 03 1.1 01	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 03 1.1 02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izn Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izn Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izn Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izn Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 03 1.1 03	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izn Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izn Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 03 1.1	Penatuaan Pemberian Surat Izn Pengelolaan Batuan (SIPB)	-	Person	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 03 1.1 01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izn Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Dokumen Rekomendasi Surat Izn Pengelolaan Batuan (SIPB)	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 03 1.1 02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izn Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izn Pengelolaan Batuan (SIPB)	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 03 1.2	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	-	Person	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 03 1.2 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 03 1.2 02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu yang Telah Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 03 1.2 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 03 1.2	Penetapan Harga Patokan Batuan	-	Person	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 03 1.2 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 03 1.2 02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Telah Ditentukan dan Ditetapkan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Telah Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 03 1.2 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 03 1.2	Penatuaan Izn Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	-	Person	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 03 1.2 01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izn Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izn Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 03 1.2 02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izn Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izn Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 03 1.2	Penatuaan Izn Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	-	Person	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 03 1.2 01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izn Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izn Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 03 1.2 02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izn Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izn Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 03 1.2	Penatuaan Izn Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	Person	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 03 1.2 01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izn Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izn Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 03 1.2 02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izn Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izn Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 03 1.2	Penatuaan Izn Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	-	Person	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	

Kode	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)						Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab			
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.	
										Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.						
3 29 03 1.2	01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
3 29 03 1.2	02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
3 29 03 1.2	02	Penatuesahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	-	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
3 29 03 1.2	01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
3 29 03 1.2	02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
3 29 03 1.2	02	Penatuesahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	-	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
3 29 03 1.2	01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
3 29 03 1.2	02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
3 29 03 1.2	02	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	-	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
3 29 03 1.2	01	Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
3 29 03 1.2	03	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
3 29 05	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persen	100	642.920.828	57,14	212.503.000	42,86	355.706.610	0	0	0	0	6,43	93.299.000	0	6,43	93.299.000	63,57	305.802.000	63,57	47,56	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 05 1	01	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Persen	100	642.920.828	57,14	212.503.000	42,86	355.706.610	0	0	0	0	6,43	93.299.000	0	6,43	93.299.000	63,57	305.802.000	63,57	47,56	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 05 1	02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Laporan	2	119.465.064	1	0	1	108.185.500	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	50	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 05 1	03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Laporan	2	61.800.154	1	0	1	40.744.750	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	50	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 05 1	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Laporan	3	461.646.610	2	212.503.000	1	206.776.300	0	0	0	0	0,45	93.299.000	0	0,45	93.299.000	2,45	305.802.000	81,67	66,24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 06	06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persen	100	4.112.011.130	0	167.806.250	56,25	2.659.570.000	0	0	0	0	24,75	2.100.637.400	0	24,75	2.100.637.400	24,75	2.288.443.650	24,75	55,17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 06 1	03	Penatuesahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-	100	270.448.610	0	167.806.250	50	96.754.300	0	0	0	0	26	50.728.500	0	26	50.728.500	26	218.534.750	26	80,8	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 06 1	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	2	270.448.610	0	167.806.250	1	96.754.300	0	0	0	0,52	50.728.500	0	0,52	50.728.500	0,52	218.534.750	26	80,8	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 06 1.1	03	Penatuesahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	-	100	81.131.360	0	100	81.131.360	0	0	0	0	85	68.948.400	0	85	68.948.400	85	68.948.400	85	84,98	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 06 1.1	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Laporan	1	81.131.360	0	1	81.131.360	0	0	0	0	0,85	68.948.400	0	0,85	68.948.400	0,85	68.948.400	85	84,98	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 06 1.1	06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	100	3.760.430.160	0	53,85	2.481.684.300	0	0	0	0	19,92	1.980.960.500	0	19,92	1.980.960.500	19,92	1.980.960.500	19,92	52,68	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 06 1.1	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Pemenerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1	104.742.500	0	0	104.742.500	0	0	0	0	0,59	104.742.500	0	0,59	104.742.500	0,59	104.742.500	59	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 06 1.1	04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dokumen	4	83.454.860	0	0	83.454.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 06 1.1	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	1	1.650.000.000	0	0	1.650.000.000	0	0	0	0	0,65	1.650.000.000	0	0,65	1.650.000.000	0,65	1.650.000.000	65	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 06 1.1	07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Laporan	7	1.922.232.800	0	0	643.487.000	0	0	0	0	1,35	226.218.000	0	1,35	226.218.000	1,35	226.218.000	19,29	11,77	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	100	49.354.099.302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01 1	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100	414.783.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	16.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	57.570.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	329.712.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01 1	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100	8.447.497.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01 1	01	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	8.321.082.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01 1	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	126.414.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	

Kode	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)						Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.
										Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.					
X XX 01	1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Person	100	84.697.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	42.348.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01	05	Peratusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	42.348.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01	1,1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Person	100	260.879.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01	1,1	02	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	109	70.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01	1,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	30	190.259.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01	1,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Person	100	1.355.214.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01	1,1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	461.116.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01	1,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01	1,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	1	77.923.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01	1,1	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	16.621.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01	1,1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	1	12.804.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01	1,1	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	62.964.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01	1,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	673.785.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01	1,1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Person	100	37.487.723.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01	1,1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2	79.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01	1,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	4	212.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01	1,1	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	37.195.673.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01	1,1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Person	100	1.014.364.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01	1,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01	1,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	1	441.982.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	565.781.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01	1,1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Person	100	288.940.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01	1,1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dioperasikan	Unit	1	37.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01	1,1	05	Pemeliharaan Mebel	Unit	1	13.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	1	203.137.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01	1,1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	3	5.203.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
X XX 01	1,1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																				
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																				
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Person	100	284.000.000	0	0	43,33	284.000.000	0	0	0	0	0	14,17	34.380.000	14,17	34.380.000	14,17	34.380.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	02	1	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Person	100	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	02	1	01	Facilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	34	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	02	1	02	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Person	100	250.000.000	0	0	50	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	02	1	02	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Dokumen	34	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	02	1	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Laporan	34	250.000.000	0	17	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	02	1	04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Dokumen	100	34.000.000	0	5,56	34.000.000	0	0	0	0	94,44	34.380.000	94,44	34.380.000	94,44	34.380.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	02	1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Dokumen	18	34.000.000	0	1	34.000.000	0	0	0	0	17	34.380.000	17	34.380.000	17	34.380.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub-Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab										
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.								
																									Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
																									Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
5 01 02 1 04	Fasilitas/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenKota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan KabupatenKota yang Disalitasi/Evaluasi	Dokumen	12	377.691.175	6	149.656.500	6	175.744.250	0	0	0	0	6	71.502.500	0	0	6	71.502.500	12	221.159.000	100	58,56	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun	Person	100	10.398.174.502	50	4.047.068.596	50	5.749.999.900	0	0	0	0	50	2.997.401.499	0	0	50	2.997.401.499	100	7.044.470.085	100	67,75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
5 01 03 1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tertaskannya Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Masyarakat	Person	100	4.150.000.756	50	953.640.607	50	3.000.000.000	0	0	0	0	50	1.673.229.557	0	0	50	1.673.229.557	100	2.626.870.164	100	63,3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
5 01 03 1 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	196.230.452	1	50.019.893	1	105.209.000	0	0	0	0	1	80.238.624	0	0	1	80.238.624	2	130.258.517	100	66,38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
5 01 03 1 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	3.953.770.304	1	903.620.714	1	2.894.791.000	0	0	0	0	1	1.592.990.933	0	0	1	1.592.990.933	2	2.496.611.647	100	63,15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
5 01 03 1 01	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tertaskannya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Person	100	4.184.991.675	50	2.088.722.623	50	2.000.000.000	0	0	0	0	50	710.834.211	0	0	50	710.834.211	100	2.799.556.834	100	66,9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
5 01 03 1 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	6	1.218.323.978	3	1.083.332.750	3	125.000.000	0	0	0	0	3	74.677.031	0	0	3	74.677.031	6	1.158.009.781	100	95,05	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
5 01 03 1 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRPJMMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	4	1.675.565.433	2	548.050.250	2	1.124.952.000	0	0	0	0	2	77.789.637	0	0	2	77.789.637	4	625.839.887	100	37,35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
5 01 03 1 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	886.697.000	1	382.563.411	1	444.129.750	0	0	0	0	1	330.373.180	0	0	1	330.373.180	2	712.936.591	100	80,4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
5 01 03 1 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRPJMMD pada Bidang SDA	Laporan	2	404.405.284	1	74.776.212	1	305.918.250	0	0	0	0	1	227.994.363	0	0	1	227.994.363	2	302.770.575	100	74,87	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
5 01 03 1 01	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Tertaskannya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Person	100	2.063.182.071	50	1.004.705.356	50	749.999.900	0	0	0	0	50	613.337.731	0	0	50	613.337.731	100	1.618.043.087	100	78,42	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
5 01 03 1 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	109.204.239	1	26.453.500	1	62.507.000	0	0	0	0	1	32.667.574	0	0	1	32.667.574	2	59.121.074	100	54,14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
5 01 03 1 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	2	359.422.686	1	27.581.000	1	312.510.000	0	0	0	0	1	305.475.884	0	0	1	305.475.884	2	333.056.884	100	92,66	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
5 01 03 1 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	2	791.239.685	1	558.768.296	1	62.499.000	0	0	0	0	1	53.782.957	0	0	1	53.782.957	2	612.551.253	100	77,42	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
5 01 03 1 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRPJMMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	2	115.702.685	1	28.597.400	1	62.467.750	0	0	0	0	1	54.803.058	0	0	1	54.803.058	2	81.400.458	100	70,35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
5 01 03 1 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	111.709.474	1	23.693.500	1	62.521.000	0	0	0	0	1	45.116.471	0	0	1	45.116.471	2	68.809.971	100	61,6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
5 01 03 1 06	Asistensi Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Wilayah	Perangkat Daerah	2	111.613.492	1	34.290.560	1	62.516.250	0	0	0	0	1	43.335.662	0	0	1	43.335.662	2	77.626.222	100	69,55	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
5 01 03 1 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Wilayah	Perangkat Daerah	4	351.981.020	2	263.588.600	2	62.478.800	0	0	0	0	2	48.978.960	0	0	2	48.978.960	4	312.567.560	100	88,8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
5 01 03 1 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRPJMMD pada Bidang Wilayah	Laporan	4	112.308.790	2	43.732.500	2	62.500.100	0	0	0	0	2	29.177.165	0	0	2	29.177.165	4	72.909.665	100	64,92	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tertaskannya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Person	100	30.521.729.957	49,92	13.595.381.922	50,08	15.697.978.700	0	0	0	0	50,08	11.133.289.307	0	0	50,08	11.133.289.307	100	24.728.671.229	100	81,02	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
X XX 01 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertaskannya sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi dengan baik	Person	100	32.485.751	57,14	16.796.975	42,86	12.462.250	0	0	0	0	42,86	7.373.500	0	0	42,86	7.373.500	100	24.160.475	100	74,37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
X XX 01 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	22.223.165	3	12.113.325	2	7.224.000	0	0	0	0	2	3.400.000	0	0	2	3.400.000	5	15.513.325	100	69,81	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
X XX 01 1 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	10.262.586	1	4.673.650	1	5.238.250	0	0	0	0	1	3.973.500	0	0	1	3.973.500	2	8.647.150	100	84,26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
X XX 01 1 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengelolaan keuangan dengan baik	Person	100	20.696.540.718	50	9.518.957.698	50	10.685.881.600	0	0	0	0	50	7.667.126.746	0	0	50	7.667.126.746	100	17.186.084.444	100	93,04	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
X XX 01 1 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	28	20.484.094.800	14	9.423.060.698	14	10.583.228.600	0	0	0	0	14	7.586.366.746	0	0	14	7.586.366.746	28	17.009.427.444	100	83,04	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
X XX 01 1 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	9.998.918	1	4.550.000	1	5.000.000	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	4.550.000	100	45,5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
X XX 01 1 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	202.447.000	1	91.347.000	1	107.663.000	0	0	0	0	1	80.760.000	0	0	1	80.760.000	2	172.107.000	100	85,01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
X XX 01 1 01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertaskannya Pengelolaan administrasi barang milik daerah dengan baik	Person	100	75.942.361	50	36.000.000	50	39.731.000	0	0	0	0	50	29.711.000	0	0	50	29.711.000	100	65.711.000	100	86,53	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
X XX 01 1 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	75.942.361	1	36.000.000	1	39.731.000	0	0	0	0	1	29.711.000	0	0	1	29.711.000	2	65.711.000	100	86,53	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
X XX 01 1 11	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Pengelolaan administrasi kepegawalan yang baik	Person	100	347.693.000	50	142.973.000	50	157.951.000	0	0	0	0	50	78.240.000	0	0	50	78.240.000	100	221.213.000	100	63,62	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								

Kode	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.
										Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.									
X XX 01 1.1 02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	280	162.000.000	140	83.700.000	140	78.000.000	0	0	0	0	140	77.800.000	0	0	140	77.800.000	280	161.500.000	100	99,69	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
X XX 01 1.1 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40	185.693.000	20	59.273.000	20	79.951.000	0	0	0	0	20	440.000	0	0	20	440.000	40	59.713.000	100	32,16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
X XX 01 1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah	Persen	100	4.185.803.196	50	1.845.643.388	50	2.032.883.300	0	0	0	0	50	1.517.499.831	0	0	50	1.517.499.831	100	3.363.143.219	100	80,35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
X XX 01 1.1 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	59.394.966	12	35.620.400	12	22.616.250	0	0	0	0	12	6.058.600	0	0	12	6.058.600	24	41.679.000	100	70,17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
X XX 01 1.1 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	321.438.480	12	140.497.650	12	137.201.300	0	0	0	0	12	59.230.662	0	0	12	59.230.662	24	199.728.312	100	62,14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
X XX 01 1.1 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	396.874.750	1	171.968.250	1	179.649.750	0	0	0	0	1	169.869.550	0	0	1	169.869.550	2	341.837.800	100	86,13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
X XX 01 1.1 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	32	27.048.000	16	12.000.000	16	12.288.000	0	0	0	0	16	5.900.000	0	0	16	5.900.000	32	17.900.000	100	66,18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
X XX 01 1.1 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	2	347.110.000	1	145.051.000	1	191.520.000	0	0	0	0	1	72.203.000	0	0	1	72.203.000	2	217.254.000	100	62,59	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
X XX 01 1.1 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	2.284.117.000	12	1.071.020.946	12	1.063.985.000	0	0	0	0	12	920.562.107	0	0	12	920.562.107	24	1.991.583.053	100	87,19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
X XX 01 1.1 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	749.820.000	1	269.485.142	1	435.623.000	0	0	0	0	1	283.675.912	0	0	1	283.675.912	2	553.161.054	100	73,77	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
X XX 01 1.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	1.798.333.030	42,86	866.367.800	57,14	742.360.500	0	0	0	0	57,14	684.462.864	0	0	57,14	684.462.864	100	1.550.830.664	100	86,24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
X XX 01 1.1 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	8	712.000.000	4	484.700.000	4	190.000.000	0	0	0	0	4	172.500.000	0	0	4	172.500.000	8	657.200.000	100	92,3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
X XX 01 1.1 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Paket	2	114.250.000	0	0	2	114.250.000	0	0	0	0	2	113.587.000	0	0	2	113.587.000	2	113.587.000	100	99,42	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
X XX 01 1.1 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	323.147.530	1	274.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	274.380.000	100	84,91	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
X XX 01 1.1 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	249.560.500	0	0	1	249.560.500	0	0	0	0	1	249.411.000	0	0	1	249.411.000	1	249.411.000	100	99,94	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
X XX 01 1.1 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	399.375.000	1	107.287.800	1	188.550.000	0	0	0	0	1	148.964.864	0	0	1	148.964.864	2	256.252.664	100	64,16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
X XX 01 1.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	1.561.084.489	50	437.321.628	50	1.055.874.000	0	0	0	0	50	825.116.883	0	0	50	825.116.883	100	1.262.438.511	100	80,87	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
X XX 01 1.1 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	6.800.000	1	3.512.000	1	2.900.000	0	0	0	0	1	2.086.000	0	0	1	2.086.000	2	5.598.000	100	82,32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
X XX 01 1.1 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	1.130.706.100	12	258.309.628	12	818.703.000	0	0	0	0	12	666.859.883	0	0	12	666.859.883	24	925.169.511	100	81,82	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
X XX 01 1.1 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	423.578.389	12	175.500.000	12	234.271.000	0	0	0	0	12	156.171.000	0	0	12	156.171.000	24	331.671.000	100	78,3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
X XX 01 1.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertaklanya Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	1.823.847.412	50	731.331.433	50	960.835.000	0	0	0	0	50	323.758.483	0	0	50	323.758.483	100	1.055.089.916	100	57,85	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
X XX 01 1.1 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	60	578.935.412	30	216.353.433	30	288.500.000	0	0	0	0	30	169.334.319	0	0	30	169.334.319	60	385.687.752	100	66,85	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
X XX 01 1.1 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	103.150.000	1	28.736.000	1	46.100.000	0	0	0	0	1	11.856.500	0	0	1	11.856.500	2	40.592.500	100	39,35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
X XX 01 1.1 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1.049.832.000	1	438.630.000	1	599.935.000	0	0	0	0	1	133.257.664	0	0	1	133.257.664	2	571.887.664	100	54,47	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
X XX 01 1.1 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	93.930.000	1	47.612.000	1	26.300.000	0	0	0	0	1	9.310.000	0	0	1	9.310.000	2	56.922.000	100	60,6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																									
5 02	KEUANGAN																									
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah dokumen dan laporan pengelolaan keuangan	Persen	100	1.287.733.041.567	50,97	520.676.772.510	42,86	729.582.810.151	0	0	0	0	0	33,64	93.120.769.700	33,64	93.120.769.700	84,61	613.797.542.210	84,61	47,66	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
5 02 02 1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang APBD	Persen	100	6.115.006.922	82,03	2.204.301.350	4,69	2.706.660.897	0	0	0	0	0	4,69	2.423.723.866	4,69	2.423.723.866	86,72	4.628.025.216	86,72	75,68	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
5 02 02 1 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	429.662.084	1	185.460.200	1	221.618.572	0	0	0	0	0	1	211.518.000	1	211.518.000	2	396.978.200	100	92,39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
5 02 02 1 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	408.477.667	1	200.862.800	1	203.324.722	0	0	0	0	0	1	193.256.000	1	193.256.000	2	394.118.800	100	96,48	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
5 02 02 1 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKASKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	5	121.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 02 02 1 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	5	121.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Kode	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub-Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.
										Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
X XX 01 1.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	1.279.564.700	26,09	551.140.520	73,91	646.349.600	0	0	0	0	0	0	65,22	673.556.708	65,22	673.556.708	91,3	1.224.697.228	91,3	95,71	Badan Kepegawaian Daerah		
X XX 01 1.1 02	Persediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	37	276.599.500	12	164.065.463	25	135.192.000	0	0	0	0	0	25	180.275.847	25	180.275.847	37	344.341.310	100	124,49	Badan Kepegawaian Daerah			
X XX 01 1.1 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	76	103.650.000	12	62.963.000	64	54.000.000	0	0	0	0	0	64	48.564.500	64	48.564.500	76	111.517.500	100	107,59	Badan Kepegawaian Daerah			
X XX 01 1.1 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	884.315.200	12	324.122.057	1	442.157.600	0	0	0	0	1	444.716.361	1	444.716.361	13	768.838.418	100	86,94	Badan Kepegawaian Daerah				
X XX 01 1.1 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	15.000.000	0	0	12	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian Daerah		
5 04	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																									
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																									
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi Serta Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur PEMDA Melalui Uji Sertifikasi/Uji Kompetensi dan Pengembangan K	Persen	100	48.061.469.424	20,89	3.639.866.492	35,13	17.591.489.424	0	0	0	0	0	10,99	4.858.864.886	10,99	4.858.864.886	31,87	8.498.731.378	31,87	17,68	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
5 04 02 1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	Persen	100	6.567.659.020	0	0	0,35	167.659.020	0	0	0	0	0	0,35	142.757.800	0,35	142.757.800	0,35	142.757.800	0,35	2,17	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
5 04 02 1 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	1	110.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5 04 02 1 02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	1	2.445.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5 04 02 1 03	Penyenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	281	4.012.659.020	0	0	1	167.659.020	0	0	0	0	0	1	142.757.800	1	142.757.800	1	142.757.800	0,36	3,56	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
5 04 02 1	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Penyelenggaraan Sertifikasi, Kelembagaan dan PNS mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persen	100	41.493.810.404	22,25	3.639.866.492	37,4	17.423.810.404	0	0	0	0	0	11,68	4.716.107.086	11,68	4.716.107.086	33,93	8.355.973.578	33,93	20,14	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
5 04 02 1 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi	Dokumen	2	465.000.000	1	120.771.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	120.771.334	50	25,97	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
5 04 02 1 02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	Dokumen	1	220.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5 04 02 1 03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Orang	120	750.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5 04 02 1 04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan	3	2.946.499.000	1	115.099.947	1	586.499.000	0	0	0	0	0	1	188.913.660	1	188.913.660	2	304.013.607	66,67	10,32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
5 04 02 1 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Orang	4196	36.837.311.404	960	3.403.995.211	1616	16.837.311.404	0	0	0	0	0	504	4.527.193.426	504	4.527.193.426	1464	7.931.188.637	34,89	21,53	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
5 04 02 1 08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Dokumen	1	275.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Peningkatan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	61.766.785.971	23,94	2.070.200.460	27,79	15.238.832.638	0	0	0	0	0	23,33	2.884.119.305	23,33	2.884.119.305	47,26	4.954.319.765	47,26	8,02	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
X XX 01 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persen	100	370.000.000	23,08	45.599.500	23,08	150.000.000	0	0	0	0	0	23,08	196.745.000	23,08	196.745.000	46,15	242.344.500	46,15	65,5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
X XX 01 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	20.000.000	1	9.999.608	1	5.000.000	0	0	0	0	0	1	87.095.000	1	87.095.000	2	97.094.608	66,67	485,47	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
X XX 01 1 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
X XX 01 1 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
X XX 01 1 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
X XX 01 1 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
X XX 01 1 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	20.000.000	1	4.999.892	1	5.000.000	0	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	2	9.999.892	66,67	50	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
X XX 01 1 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	290.000.000	1	30.600.000	1	140.000.000	0	0	0	0	0	1	104.650.000	1	104.650.000	2	135.250.000	66,67	46,64	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			

Kode	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Restra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab				
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Kinerja		Rp.						
										Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.					
X XX 01 1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Person	100	30.054.051.733	32,04	204.507.987	31,69	10.310.098.400	0	0	0	0	0	0	0	31,69	284.237.424	31,69	284.237.424	63,73	488.745.411	63,73	1,83	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
X XX 01 1 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	277	29.250.251.733	89	174.108.000	88	10.170.688.400	0	0	0	0	0	0	0	88	260.337.424	88	260.337.424	177	434.445.424	63,9	1,49	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
X XX 01 1 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3	768.800.000	1	22.400.000	1	134.400.000	0	0	0	0	0	0	0	1	22.400.000	1	22.400.000	2	44.800.000	66,67	5,83	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
X XX 01 1 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X XX 01 1 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3	25.000.000	1	7.999.987	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1	1.500.000	1	1.500.000	2	9.499.987	66,67	38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
X XX 01 1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	Person	100	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X XX 01 1 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X XX 01 1,1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	Person	100	800.000.000	8,33	164.670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,33	164.670.000	8,33	20,58	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
X XX 01 1,1 02	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2	300.000.000	1	164.670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	164.670.000	50	54,89	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
X XX 01 1,1 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X XX 01 1,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Person	100	3.949.199.766	33,33	648.567.731	33,33	1.150.199.766	0	0	0	0	0	0	0	33,33	228.616.925	33,33	228.616.925	66,67	877.184.656	66,67	22,21	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
X XX 01 1,1 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	35.000.400	1	5.070.000	1	10.000.400	0	0	0	0	0	0	0	1	9.107.500	1	9.107.500	2	14.177.500	66,67	40,51	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
X XX 01 1,1 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	130.000.020	1	3.970.000	1	40.000.020	0	0	0	0	0	0	0	1	18.570.000	1	18.570.000	2	22.540.000	66,67	17,34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
X XX 01 1,1 03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	189.998.929	1	15.015.787	1	59.998.929	0	0	0	0	0	0	0	1	16.345.000	1	16.345.000	2	31.360.787	66,67	16,51	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
X XX 01 1,1 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	222.998.517	1	43.100.000	1	72.998.517	0	0	0	0	0	0	0	1	49.120.000	1	49.120.000	2	92.220.000	66,67	41,36	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
X XX 01 1,1 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	57.996.000	1	1.125.000	1	3.996.000	0	0	0	0	0	0	0	1	750.000	1	750.000	2	1.875.000	66,67	3,23	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
X XX 01 1,1 08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	3	650.000.000	1	54.608.000	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1	43.526.000	1	43.526.000	2	98.134.000	66,67	15,1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
X XX 01 1,1 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	2.663.205.900	1	525.678.944	1	713.205.900	0	0	0	0	0	0	0	1	91.198.425	1	91.198.425	2	616.877.369	66,67	23,16	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
X XX 01 1,1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Person	100	15.775.627.000	18,87	656.980.000	22,64	2.075.627.000	0	0	0	0	0	0	0	18,87	1.600.966.605	18,87	1.600.966.605	37,74	2.257.966.605	37,74	14,31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
X XX 01 1,1 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	10	1.350.000.000	5	144.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	144.880.000	50	10,73	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
X XX 01 1,1 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tersedia	Unit	1	300.000.000	1	262.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	262.100.000	100	67,37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
X XX 01 1,1 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	11	225.000.000	0	0	5	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	45,45	11,11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
X XX 01 1,1 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	1.433.000.000	2	80.000.000	3	283.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2	19.600.000	2	19.600.000	4	99.600.000	26,67	6,95	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
X XX 01 1,1 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	11.477.627.000	0	0	1	1.477.627.000	0	0	0	0	0	0	0	2	1.109.017.305	2	1.109.017.305	2	1.109.017.305	33,33	9,66	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
X XX 01 1,1 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	790.000.000	0	0	3	290.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1	447.369.300	1	447.369.300	1	447.369.300	12,5	56,63	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
X XX 01 1,1 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	200.000.000	2	170.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	170.000.000	100	85	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
X XX 01 1,1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Person	100	2.060.772.172	33,33	64.601.542	33,33	528.772.172	0	0	0	0	0	0	0	22,22	60.457.371	22,22	60.457.371	55,56	125.058.913	55,56	6,01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
X XX 01 1,1 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	12.960.000	1	660.000	1	960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	660.000	33,33	5,09	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
X XX 01 1,1 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	1.179.812.172	1	30.441.542	1	329.812.172	0	0	0	0	0	0	0	1	27.457.371	1	27.457.371	2	57.898.913	66,67	4,91	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
X XX 01 1,1 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	888.000.000	1	33.500.000	1	198.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1	33.000.000	1	33.000.000	2	66.500.000	66,67	7,49	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

Kode	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Triwulan)								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Total)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab				
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.		Kinerja	Rp.		
										Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.											
X	XX	01	1.1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	24	504.800.000	12	276.333.375	12	200.000.000	0	0	0	0	12	197.295.466	0	0	12	197.295.466	24	473.628.841	100	93,63	Inspektorat
X	XX	01	1.1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	24	141.280.000	12	24.610.000	12	106.500.000	0	0	0	0	12	106.500.000	0	0	12	106.500.000	24	131.110.000	100	92,8	Inspektorat



Bab III

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah memberikan gambaran mengenai kondisi eksisting perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 dan perkiraan kondisi perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024. Kondisi tersebut mempertimbangkan isu yang berkembang secara lokal, regional, nasional maupun secara global. Kerangka pendanaan meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan mempertimbangkan kondisi saat ini (tahun 2023) dan proyeksi yang terjadi di tahun 2024. Kerangka pendanaan ini menjadi pedoman dan rujukan dalam menentukan kebijakan terkait penganggaran dalam mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan daerah tahun 2024.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kebijakan ekonomi daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2024 mendukung tujuan pembangunan daerah Tahun 2024-2026, yaitu:

- 1) Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Kompetitif
- 2) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik
- 3) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Pemerataan Pembangunan Yang Berkelanjutan
- 4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Mutu Pendidikan;
- 2) Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Mutu Kesehatan;
- 3) Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat;
- 4) Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat;
- 5) Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan;
- 6) Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan;
- 7) Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses Terhadap Lapangan Kerja;
- 8) Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi;
- 9) Meningkatnya konektivitas antarwilayah;
- 10) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
- 11) Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana;
- 12) Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 13) Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah serta berpedoman pada beberapa regulasi yang harus segera dilaksanakan, diantaranya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

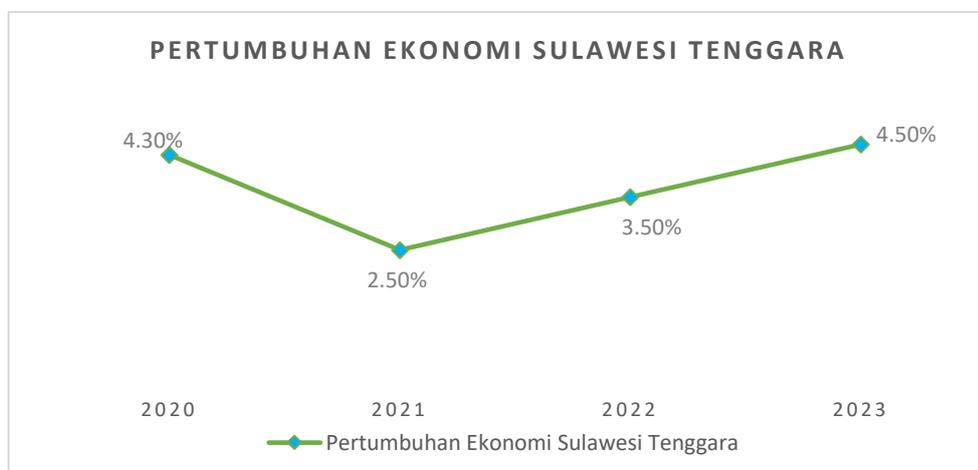
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial, mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan penerima pelayanan dasar yang dijabarkan dalam program/kegiatan OPD sesuai tugas dan fungsinya.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Sulawesi Tenggara pada tahun 2024 dipengaruhi atas pencapaian pembangunan ekonomi 2022, proyeksi pencapaian 2023 dan prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2024. Hal ini ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pemerataan pembangunan ekonomi. Kebijakan ekonomi daerah akan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan peningkatan produktifitas dan daya saing ekonomi Sulawesi Tenggara yang berkelanjutan.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Sulawesi Tenggara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 mencapai Rp 41,01 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 25,50 triliun. Perekonomian Sulawesi Tenggara triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 6,48 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 26,15 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,21 persen. Perekonomi Sulawesi Tenggara triwulan I-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 7,43 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Konstruksi mengalami kontraksi terdalam sebesar 29,98 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontraksi terdalam terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 35,46 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi paling dominan terhadap PDRB Sulawesi Tenggara sebesar 24,06 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kontribusi paling dominan terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 48,25 persen.



Sumber: BPS, 2023.

Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara y on y Triwulan I-2020 -Triwulan I-2023

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara diasumsikan dan ditargetkan dapat bertumbuh secara konsisten dan dapat melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu dapat memberikan kontribusi yang positif bagi penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan.

3.1.1.2 Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 11,27 persen, naik 0,10 persen poin terhadap Maret 2022 dan turun 0,47 persen poin terhadap September 2021. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 314,74 ribu orang, naik 4,95 ribu orang terhadap Maret 2022 dan menurun 8,52 ribu orang terhadap September 2021. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2022 sebesar 7,22 persen, naik 0,27 persen poin terhadap Maret 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2022 sebesar 13,60 persen, naik 0,03 persen poin dari Maret 2022. Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan naik sebanyak 3,77 ribu orang (dari 69,94 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 73,71 ribu orang pada September 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan naik sebanyak 1,19 ribu orang (dari 239,85 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 241,04 ribu orang pada September 2022). Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp 432.464,-/ kapita/ bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 326.264,- (75,44 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 106.200,- (24,56 persen). Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 5,27 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.279.085,-/rumah tangga miskin/bulan.

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara pada September 2022 mencapai 314,74 ribu orang. Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin naik 4,95 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 8,52 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 11,27 persen, naik 0,10 persen poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,47 persen poin terhadap September 2021.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2022 September 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 3,77 ribu orang, dan di perdesaan naik sebesar 1,19 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik 0,27 persen poin dari 6,95 persen menjadi 7,22 persen. Sementara itu, di perdesaan naik 0,03 persen poin dari 13,57 persen menjadi 13,60 persen.

Tabel 3.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Tenggara

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Perkotaan		
September 2021	71,02	7,14
Maret 2022	69,94	6,95
September 2022	73,71	7,22
Perdesaan		
September 2021	252,25	14,34
Maret 2022	239,85	13,57
September 2022	241,04	13,60

Sumber: BPS, 2023.

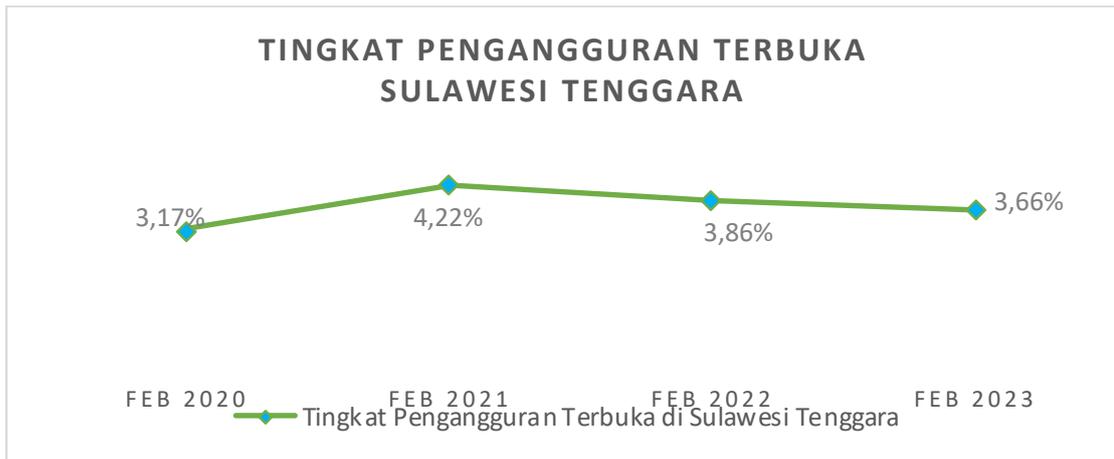
Tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dengan adanya kenaikan harga BBM skala nasional di bulan September

2022; terjadinya inflasi antara Maret 2022 terhadap September 2022 sebesar 5.33 persen. IHK Maret 2022 = 108,54 dan IHK September 2022 = 114,33; menurunnya Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 0,89 persen dan menjadi dibawah 100. NTP Maret 2022 = 100,58 dan NTP September 2022 = 99,68; produksi Ikan di Pendaratan Ikan Tradisional (PIT) menurun hingga 24% antara triwulan I dengan triwulan III Tahun 2022. Volume produksi ikan di PIT triwulan I th. 2022 = 113.675,48 kwintal dan volume produksi ikan di PIT triwulan III Th. 2022 = 86.054,63 kwintal; adanya kenaikan beberapa harga komoditas pokok naik; dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada BPNT dan PKH di Tahun 2022 sempat menurun, walaupun kemudian kembali berangsur naik tapi tetap lebih kecil dari triwulan pertama.

3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2023 sebanyak 1.331,36 ribu orang, naik 50 ribu orang dibanding Februari 2022. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) juga naik sebesar 1,23 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 1.282,63 ribu orang, meningkat sebanyak 50,72 ribu orang dari Februari 2022 atau turun sebanyak 40,61 ribu orang dari Februari 2021. Lapangan Pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar dari Februari 2022 adalah kategori Industri Pengolahan (1,64 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Jasa Pendidikan (1,53 persen poin). Sebanyak 806,41 ribu orang (62,87 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 3,88 persen poin dari Februari 2022. Setengah penganggur turun 0,99 persen poin dan persentase pekerja paruh waktu turun sebesar 2,60 persen poin dibandingkan Februari 2022. Terdapat 16,83 ribu orang (0,85 persen terhadap penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (0,05 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (1,22 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (15,56 ribu orang). Pada kelompok sementara tidak bekerja karena COVID-19 sudah tidak terdapat Penduduk Usia Kerja yang terdampak.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 3,66 persen, turun 0,56 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021 atau turun 0,20 persen poin terhadap Februari 2022. TPT hasil Sakernas Februari 2023 sebesar 3,66 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar empat orang penganggur. Selama setahun TPT Sulawesi Tenggara mengalami penurunan sebesar 0,20 persen poin. Apabila dilihat perubahan antara Februari 2022 terhadap Februari 2021, terjadi penurunan sebesar 0,36 persen poin. Pada Februari 2023, TPT laki-laki sebesar 3,61 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,74 persen. TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,14 persen poin dan 0,30 persen poin. Apabila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (5,20 persen) pada Februari 2023 lebih tinggi dua kali TPT di daerah perdesaan (2,86 persen). Dibandingkan Februari 2022, TPT perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,53 persen poin dan 0,09 persen poin. Namun jika dibandingkan perubahan antara Februari 2022 terhadap Februari 2021, TPT perdesaan mengalami kenaikan sebesar 0,57 persen poin, sedangkan TPT perkotaan turun sebesar 2,62 persen poin.



Sumber: BPS, 2023.

Gambar 3.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Tenggara Februari 2020-Februari 2023

3.1.1.4 Tingkat Inflasi

Pada April 2023 terjadi Inflasi gabungan 2 kota IHK *year on year (yoy)* 5,30 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,19. Inflasi *yoy* tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 6,75 persen dengan IHK sebesar 121,12 dan terendah terjadi di Pangkal Pinang sebesar 2,78 persen dengan IHK sebesar 114,15. Inflasi *year on year (yoy)* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran yaitu: kelompok transportasi sebesar 17,63 persen; kelompok pendidikan sebesar 8,00 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,83 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,87 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,34 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,23 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,88 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,74 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,45 persen; serta kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,92 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,51 persen. Tingkat inflasi gabungan 2 kota IHK *month to month (mtm)* sebesar 0,43 persen dan tingkat inflasi *year to date (ytd)* April 2023 sebesar 0,29 persen. Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi *yoy* antara lain angkutan udara, bensin, beras, bahan bakar rumah tangga, rokok kretek filter, mobil, angkutan dalam kota, akademi/ perguruan tinggi, rokok putih serta angkutan antar kota. Komoditas yang memberikan sumbangan deflasi *yoy* antara lain Ikan teri, ikan cakalang/ikan sisik, ikan layang/ikan benggol, bayam, cabai rawit, daging ayam ras, daun kelor, ikan rambe, pepaya muda serta terong.

Tabel 3.2. Tingkat Inflasi Gabungan 2 Kota di Sulawesi Tenggara (Kendari dan Baubau) Tahun 2021-2023

Tingkat Inflasi	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)
<i>Month to Month (mtm)</i> April	0,35	1,65	0,43
<i>Year to Date (ytd)</i> April	0,06	2,28	0,29
<i>Year on Year (yoy)</i> April	2,06	4,87	5,30

Sumber: BPS, 2023.

3.1.1.5 Neraca Perdagangan (Ekspor dan Impor)

Neraca perdagangan merupakan selisih dari nilai ekspor dan nilai impor. Provinsi Sulawesi Tenggara dengan segala potensi sumber daya alam mempunyai peluang dalam perdagangan luar negeri yang tercermin dalam statistik ekspor. Data Statistik Ekspor diperoleh dari Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari Bea dan Cukai, komoditi yang selama ini menjadi andalan Sulawesi Tenggara antara lain besi dan baja serta bermacam hasil laut, sedangkan negara tujuan ekspor tersebar di benua Asia hingga Amerika. Nilai ekspor Sulawesi Tenggara Maret 2023 mencapai US\$431,76 juta atau naik 26,85 persen dibanding ekspor Februari 2023 yang tercatat US\$340,36 juta. Sementara, volume ekspor Maret 2023 tercatat 217,77 ribu ton atau naik 36,16 persen dibanding volume ekspor Februari 2023 yang tercatat 159,94 ribu ton. Peningkatan terbesar Ekspor Sulawesi Tenggara Maret 2023 terjadi pada komoditas Besi dan Baja senilai US\$90,52 juta (naik 26,83 persen) dimana pada bulan Februari sebesar US\$337,33 juta naik menjadi US\$427,86 juta di bulan Maret. Menurut Sektor, Ekspor Sulawesi Tenggara Maret 2023 didominasi oleh sektor industry pengolahan sebesar US\$431,13 juta (99,85 persen). Ekspor Sulawesi Tenggara Maret 2023 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu US\$426,83 juta, disusul Amerika Serikat senilai US\$2,15 juta, dan India senilai US\$1,38 juta.

Nilai impor Sulawesi Tenggara Maret 2023 mencapai US\$255,36 juta, naik 67,74 persen dibandingkan Februari 2023 atau turun 43,31 persen dibandingkan Maret 2022. Volume impor Maret 2023 senilai 555,07 ribu ton, naik 89,45 persen dibandingkan Februari 2023 atau turun 18,93 persen dibandingkan Maret 2022. Peningkatan impor golongan barang terbesar Maret 2023 dibandingkan Februari 2023 adalah Garam, Belerang, Kapur (25) yaitu sebesar US\$5,85 juta (naik 329.799,19 persen). Tiga negara pemasok barang impor terbesar selama Maret 2023 adalah Tiongkok senilai US\$131,84 juta (naik 53,70 persen), Singapura senilai US\$39,17 juta (naik 2,98 persen) dan Afrika Selatan senilai US\$31,35 juta. Menurut golongan penggunaan barang, impor Maret 2023 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya mengalami penurunan 43,41 persen yakni nilai bahan baku/ penolong mengalami penurunan sebesar US\$23,34 juta (turun 44,52 persen) dan barang konsumsi pun turun sebesar 32,18 persen atau senilai US\$0,04 juta. Selanjutnya golongan barang modal turun 3,93 persen atau turun senilai US\$47,82 juta. Neraca perdagangan Sulawesi Tenggara Maret 2023 mengalami surplus US\$176,40 juta.

Tabel 3.3. Nilai Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Sulawesi Tenggara Januari 2021-Maret 2023

Periode	Ekspor (Juta US\$)	Impor (Juta US\$)	Neraca Perdagangan (Juta US\$)
Tahun 2021			
Januari	206,85	191,61	15,25
Februari	231,63	71	160,63
Maret	342,58	168,45	174,13
April	432,89	135,73	297,16
Mei	210,11	142,57	67,54
Juni	481,51	190,09	291,41
Juli	382,73	118,28	264,25
Agustus	307,27	109,91	197,36
September	347,41	383,5	-36,09

Periode	Ekspor (Juta US\$)	Impor (Juta US\$)	Neraca Perdagangan (Juta US\$)
Oktober	590,68	270,73	319,95
November	337,13	195,4	141,73
Desember	555,1	119,31	435,79
Jan-Des 2022	4.425,89	2.096,58	2.329,31
Tahun 2022			
Januari	400,19	202,20	197,99
Februari	314,15	74,57	239,57
Maret	411,54	451,22	-39,68
April	563,51	156,19	407,32
Mei	678,17	208,68	469,50
Juni	485,70	272,49	213,21
Juli	353,24	189,89	163,35
Agustus	501,22	394,86	106,35
September	553,02	160,41	392,60
Oktober	569,84	121,94	447,90
November	497,67	204,02	293,65
Desember	503,42	110,86	392,57
Jan-Des 2022	5.831,67	2.547,33	3.284,34
Tahun 2023			
Januari	369,37	249,26	120,11
Februari	340,36	152,24	188,12
Maret	431,76	255,36	176,40
Jan-Mar 2023	1.141,49	656,86	484,63

Sumber: BPS, 2023.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

Menurut Bank Indonesia, Pada triwulan IV 2022, perekonomian Sulawesi Tenggara tumbuh positif sebesar 5,57% (yoy) meningkat dibandingkan dengan triwulan IV 2022 yang tumbuh sebesar 5,40% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan perekonomian Indonesia yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy) pada periode laporan. Dari sisi penawaran, akselerasi pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan pertumbuhan pada lapangan usaha pertambangan dan perbaikan pada lapangan usaha konstruksi. Kendati demikian, terjadi perlambatan pada lapangan usaha lainnya di antaranya lapangan usaha pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Adapun peningkatan pertumbuhan didorong oleh adanya perbaikan permintaan industri pengolahan domestik maupun dari mitra Sulawesi Tengah serta percepatan realisasi pembangunan proyek pemerintah. Dari sisi permintaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara didorong oleh meningkatnya konsumsi pemerintah seiring percepatan realisasi di akhir tahun dan PMTB. Kendati demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan oleh melambatnya kinerja konsumsi rumah tangga seiring dengan kenaikan harga pangan maupun energi dan pertumbuhan impor yang masih terakselerasi. Secara tahunan, perekonomian Sulawesi Tenggara meningkat sebesar 5,53% (ctc) meningkat dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 4,10% (ctc).

Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan perekonomian Indonesia yang tumbuh sebesar 5,31% (ctc) pada tahun laporan. Pertumbuhan dari sisi penawaran didorong oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dan Pertanian sedangkan dari sisi permintaan didorong oleh seluruh komponen pengeluaran dengan kontribusi tertinggi yaitu ekspor, Konsumsi RT, dan Konsumsi Pemerintah. Adapun akselerasi pertumbuhan didorong oleh adanya peningkatan kapasitas produksi industri pengolahan di tahun 2022 dan realisasi berbagai bantuan pengendalian inflasi.

Perekonomian Sulawesi Tenggara pada Tahun 2024, diproyeksikan akan mengalami peningkatan. Namun hal ini tentunya dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan maupun faktor perlambatan yang terlihat baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Faktor pertumbuhan dari sisi penawaran, antara lain: Pembangunan pabrik baterai dan baja di Kabupaten Kolaka Utara oleh PT. Terra Paradisaea dengan investasi Rp130Triliun; Pembangunan 3 Kawasan Industri yang juga menjadi project strategis nasional dimana target 2024 sudah berproduksi. Kawasan yang telah berjalan yaitu IKIP; Beroperasinya FDNI ditengah pertambahan kapasitas terpasang OSS; Meningkatnya permintaan komoditas unggulan Sultra (antara lain nikel, CPO dan kakao, dan perikanan budaya) di pasar Internasional. Sedangkan faktor perlambatan dari sisi penawaran antara lain: Berakhirnya beberapa proyek strategis pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara dan penurunan anggaran Bina Marga dari 600M menjadi 200M berpotensi memperlambat sektor konstruksi; Adanya pergeseran musim dimana musim hujan akan memuncak pada bulan Maret sesuai prediksi BMKG dan potensi terjadinya kemarau panjang akibat El Nino usai berakhirnya La Nina pada bulan Juni; Pengetatan pelaksanaan WPP 714 memperlambat pertumbuhan dari sisi perikanan. Dari sisi permintaan, faktor pertumbuhan antara lain: Berakhirnya periode PPKM dan persiapan pemilu berpotensi meningkatkan mobilitas dan konsumsi masyarakat dengan diadakannya berbagai event; Perwujudan investasi beberapa Kawasan industri diantaranya terdapat di konawe dengan investasi sebesar Rp58 triliun dan di Kendari sebesar Rp 14 triliun; Terakumulasinya investasi yang tidak tercatat di akhir 2022 sehingga meningkatkan nilai investasi dengan nilai yang cukup besar. Sedangkan faktor perlambatan dari sisi permintaan adalah Perlambatan konsumsi untuk kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kredit pemilikan rumah (KPR) sebagai respons kenaikan BI7DRR menjadi 5,50% di tahun 2022 dan masih berpotensi naik serta Perlambatan ekonomi global di tahun 2023 berpotensi menurunkan permintaan luar negeri yang berpengaruh pada kinerja ekspor

Indikator makro ekonomi daerah yang terkendali di posisi meningkat dan menurun, akan berpengaruh positif terhadap keuangan rumah tangga dan masyarakat. Jika kemampuan masyarakat meningkat maka kapasitas keuangan daerah Sulawesi Tenggara juga akan semakin besar. Kondisi ini akan menciptakan keadaan yang kondusif untuk meningkatkan layanan social ekonomi masyarakat dalam segala aspek, seperti layanan dasar pendidikan, kesehatan, ketertiban, serta aksesibilitas ekonomi yang semakin baik. Kondisi ini, angka mempengaruhi pencapaian Tingkat pembangunan manusia (IPM). IPM Sulawesi Tenggara juga diasumsikan akan terus membaik seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi makro.

Dalam upaya mendorong pemulihan perekonomian daerah terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan, antara lain; a) Mendorong diversifikasi komoditas dan negara tujuan ekspor untuk mengurangi dampak ketidakpastian pada sektor pertambangan dan pengolahan logam dasar; b) Mendorong produksi dan produktivitas komoditas dengan tujuan pemenuhan kebutuhan domestik dan ekspor; c) Mendorong digitalisasi ekonomi Sulawesi Tenggara; d) Mendorong investasi; e) Mendorong pengembangan *quality tourism* yang berbasis UMKM melalui sinergi lintas

stakeholder dalam meningkatkan kualitas 4A (*Attraction, Accessibility, Amenity dan Ancillary*) dan 2P (Promosi dan Pelaku Usaha/SDM).

Tabel 3.4. Realisasi Indikator Makro Tahun 2021-2022 dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Tahun 2023-2024 Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi (%)		Proyeksi (%)	
		2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,50	3,50	5,5-6,5	6,0-6,5
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	11,66	11,17	11,30-11,40	10,00-11,00
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,22	3,86	3,50-3,90	2,75-3,00
4.	IPM (Nilai)	71,66	72,23	73,00-73,30	73,00-73,30
5.	Rasio Gini	0,390	0,390	0,366-0,375	0,366-0,375

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara, diolah 2023

Berdasarkan tabel di atas, bahwa target indikator makro dapat dicapai dengan beberapa pertimbangan dan asumsi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Peningkatan produksi dan produktifitas sumber daya alam berupa pertanian dan pertambangan. Selain itu peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dan pertambangan melalui industri pengolahan mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian Sulawesi Tenggara.
- 2) Peningkatan konektivitas melalui pembangunan, pemeliharaan infrastruktur berupa jalan dan jembatan, pelabuhan, bandara yang mampu mendukung kegiatan mobilitas barang dan manusia. Dengan demikian membuka peluang investasi yang lebih luas dapat membuka peluang yang lebih tinggi dalam meningkatkan perekonomian Sulawesi Tenggara.
- 3) Kerjasama antar daerah untuk mengurai disparitas harga komoditas dan produk sektor berbasis SDA. Disparitas harga pemicu capaian indikator sosial ekonomi.
- 4) Peningkatan kinerja sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan baru yang berbasis SDA melalui peningkatan investasi dan pengembangan SDM pendukung pariwisata.
- 5) Penyelesaian mega proyek prioritas berupa Rumah Sakit Jantung dan Pembangunan Perpustakaan bertaraf internasional.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Selain itu, kebijakan keuangan daerah juga tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026.

Kebijakan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024 akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah dan diselaraskan dengan arah kebijakan fiskal Pemerintah pada tahun 2024. Kebijakan keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun anggaran 2024 akan diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan daerah tahun 2024 dengan tetap menjaga iklim investasi serta kelestarian lingkungan. Belanja daerah diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja agar efisien dan efektif untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah diarahkan untuk mendorong percepatan

transformasi ekonomi, dalam jangka pendek ditempuh melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Sementara jangka menengah diarahkan untuk penguatan reformasi struktural melalui penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA dan penguatan kelembagaan dan regulasi. Pada tahun anggaran 2024 Provinsi Sulawesi Tenggara akan fokus pada penyelesaian proyek-proyek strategis yang belum tuntas dari Kepala Daerah periode sebelumnya yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Kinerja pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu tahun 2021-2022 cenderung meningkat. Pada tahun 2021 realisasi pendapatan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik pasca pandemi Covid-19. Dalam mencapai target pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun strategi peningkatan pendapatan daerah. Strategi tersebut dilakukan melalui program pengelolaan pendapatan daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Pada tahun 2021 sampai dengan 2024, Pendapatan Daerah pada aspek Pendapatan Asli Daerah masih didominasi oleh Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Di sisi lain, Pendapatan Daerah masih bergantung dengan Transfer dari Pemerintah Pusat, yaitu: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel 3.5. Realisasi Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 -2022

No	Uraian	Realisasi	
		2021	2022
1	Pendapatan Asli daerah	1.373.793.724.628,50	1.419.667.152.161,09
1.1	Pajak Daerah	1.052.629.511.015,00	1.094.436.342.274,00
1.2	Retribusi Daerah	34.672.223.312,00	4.2617.552.364,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	66.150.050.423,00	7.5522.983.759,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	220.341.939.878,50	2.07.090.273.764,09
2	Pendapatan Transfer	3.119.960.554.389,00	2.979.353.296.423,00
2.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	440.637.413.046,00	7.34.217.716.261,00
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.456.620.465.000,00	1.452.553.358.151,00
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	314.866.100.371,00	2.81.014.372.659,00

No	Uraian	Realisasi	
		2021	2022
2.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	876.377.898.972,00	4 75.101.444.352,00
2.5	Dana Insentif Daerah (DID)	31.458.677.000,00	3 6.466.405.000,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	35.496.874.787,00	98.932.714.356,00
3.1	Pendapatan Hibah	35.496.874.787,00	98.932.714.356,00
JUMLAH PENDAPATAN		4.529.251.153.804,50	4 .497.953.162.940,09

Sumber: BPKAD dan diolah Bappeda, 2023.

Dari tabel di atas terlihat bahwa total Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah direalisasikan mengalami penurunan, yakni pada tahun 2021 total sebesar 4,529 triliun rupiah, turun menjadi 4,497 triliun rupiah pada tahun 2022. Pada sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,419 triliun rupiah yang semula sebesar 1,373 triliun rupiah (2021). Peningkatan PAD tersebut meliputi: Pajak Daerah sebesar 1,094 triliun rupiah (2022) dari semula sebesar 1,052 triliun rupiah (2021), Retribusi Daerah sebesar 42,617 milyar rupiah (2022) yang semula sebesar 34,672 milyar rupiah (2021) dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 75,522 milyar rupiah (2022) yang semula sebesar 66,150 milyar rupiah (2021). Peningkatan PAD tersebut tidak diikuti dengan pendapatan dari transfer. Hal ini disebabkan karena pendapatan bersumber dari transfer pusat ke daerah mengalami penurunan dari total 3,119 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 2,979 triliun rupiah pada tahun 2022. Penurunan Pendapatan Transfer disebabkan penurunan Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu: pada tahun 2021 sebesar 1,456 triliun rupiah menjadi sebesar 1,452 triliun rupiah pada tahun 2022. Demikian pula pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik semula sebesar 314 milyar rupiah pada tahun 2021 menjadi 281 milyar rupiah pada tahun 2022. Sementara DAK Non Fisik semula sebesar 876 milyar rupiah pada tahun 2021 menjadi 475 milyar rupiah pada tahun 2022. Disisi lain, pendapatan transfer dari Dana Bagi Hasil mengalami peningkatan, yang semula sebesar 440 milyar rupiah pada tahun 2021 menjadi 734 milyar rupiah pada tahun 2022. Demikian pula pendapatan dari Dana Insentif Daerah (DID) mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 36,466 milyar rupiah dari semula sebesar 31,458 milyar rupiah. Pada sumber lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga mengalami peningkatan sebesar 98,932 milyar rupiah pada tahun 2022 dari semula sebesar 35,496 milyar rupiah pada tahun 2021.

Tabel 3.6. Target dan Proyeksi Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 dan 2024

No	Uraian	Target 2023 (tahun berjalan)	Proyeksi 2024
1	Pendapatan Asli daerah	1.625.581.261.248	1.668.498.552.000
1.1	Pajak Daerah	1.340.534.498.345	1.340.534.498.000
1.2	Retribusi Daerah	46.614.586.075	63.540.805.000
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	64.694.885.668	78.280.811.000
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	173.737.291.160	186.142.438.000
2	Pendapatan Transfer	2.930.074.487.050	2.930.074.487.000
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.930.074.487.050	2.930.074.487.000
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.483.085.800	1.483.085.000
3.1	Pendapatan Hibah	1.483.085.800	1.483.085.000
JUMLAH PENDAPATAN		4.557.138.834.098	4.600.056.124.000

Sumber: BPKAD dan diolah Bappeda, 2023.

Proyeksi pendapatan pada tabel di atas diasumsikan jika kondisi makro ekonomi nasional dan daerah semakin membaik pasca dihapusnya status Pandemi Covid-19 yang berarti kehidupan sosial-ekonomi masyarakat giat kembali, sehingga Pendapatan Daerah yang direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan mencapai 4,557 triliun rupiah dan diproyeksikan akan meningkat pada tahun 2024 mencapai 4,600 triliun rupiah. Komponen Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 direncanakan mencapai 1,625 triliun dan pada tahun 2024 diproyeksikan akan meningkat sebesar 1,668 triliun rupiah. PAD dari pajak daerah pada tahun 2024 diproyeksikan sama dengan tahun 2023, sementara pendapatan dari Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan mengalami peningkatan. Adapun Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Transfer Umum (DTU), Dana Transfer Khusus (DTK), dan Dana Insentif Daerah (DID) pada tahun 2023 direncanakan akan diperoleh sebesar sebesar 2,930 triliun rupiah. Namun, Pendapatan daerah dari komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2024 belum dapat dipastikan hingga RKPD ini ditetapkan, sehingga dapat diasumsikan beberapa komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan jumlah yang direalisasikan sama dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, maka pada tahun 2024 diproyeksikan penerimaan DTU-DBH sebesar 534,044 miliar rupiah, DTU-DAU sebesar 1,507 triliun rupiah, DTK-DAK (Fisik dan Non Fisik) sebesar 888 miliar rupiah, maka total Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dapat diproyeksikan sebesar 2,930 triliun rupiah. Demikian pula pendapatan daerah dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2023 mencapai 1,483 miliar rupiah dan diproyeksikan sama pada tahun 2024.

Peningkatan pendapatan daerah tersebut diyakini berasal dari adanya peningkatan dari semua sumber pendapatan yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, khususnya DAU dan DAK, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Di asumsikan bahwa Pajak tetap akan berkontribusi paling besar pada komponen Pendapatan Asli Daerah karena merupakan komponen pendapatan yang betul-betul berasal dari daerah, sehingga lebih mampu dikontrol oleh pemerintah daerah melalui kebijakan keuangan daerah. Demikian pula retribusi daerah diharapkan dapat mengalami peningkatan seiring dengan upaya optimasi retribusi yang bersumber dari pelayanan dan penggunaan aset pemerintah daerah.

Optimisme pertumbuhan pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan cara menerapkan strategi kebijakan peningkatan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah, yaitu: 1) Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; 2) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah; 3) Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah; 4) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah; 5) Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat; dan 6) Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Adapun komponen dana perimbangan, khususnya DAU dan DAK sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah pusat di asumsikan juga akan terus meningkat. Komponen ini diperkirakan akan dipengaruhi oleh adanya kebijakan keuangan negara ke depan, untuk mendorong optimalnya pelaksanaan desentralisasi fiskal. Khususnya DAU pada tahun 2023 mengalami perubahan kebijakan terkait penggunaan anggaran tersebut, yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, antara lain: penggunaan bagian DAU untuk penggantian formasi PPPK dan penggunaan bagian DAU bidang

pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, khususnya yang dilakukan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar, sehingga kebijakan penggunaan anggaran yang bersumber dari DAU pada tahun 2024 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, pada tahun 2024 dana perimbangan khususnya DAK Fisik diperkirakan meningkat seiring dengan upaya pemerintah dalam menuntaskan semua prioritas pembangunan sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan karena pada tahun 2024 merupakan tahun akhir periode RPJMN 2020-2024.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam mendukung akselerasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berdimensi kewilayahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, kebijakan fiskal memiliki beberapa instrumen, salah satunya adalah kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah. Instrumen menjadi strategis karena melalui kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah, pemerintah daerah dapat secara langsung memanfaatkan anggaran untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan kewenangannya.

Tabel 3.7. Realisasi Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 dan 2022

No	Uraian	Realisasi	
		2021	2022
	BELANJA	4.495.870.207.049	4.862.530.576.022
1.	BELANJA OPERASI	2.754.858.067.032	2.693.121.520.974
1.1	Belanja Pegawai	1.475.632.390.431	1.549.812.011.845
1.2	Belanja Barang dan Jasa	770.685.412.031	939.037.070.368
1.3	Belanja Bunga	20.692.768.602	50.724.644.713
1.4	Belanja Hibah	483.094.420.968	139.639.044.048
1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.753.075.000	13.908.750.000
2.	BELANJA MODAL	1.246.770.023.310	1.599.982.654.743
2.1	Belanja Modal Tanah	31.766.122.103	16.028.077.002
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	149.029.032.823	301.517.985.503
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	505.517.578.611	584.374.195.137
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	535.296.261.162	679.027.941.541
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.161.028.611	19.034.455.560
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	238.208.325	56.532.093
3.1.	Belanja Tidak Terduga	238.208.325	56.532.093
4.	BELANJA TRANSFER	494.003.908.382	569.369.868.212
4.1	Belanja Bagi Hasil	473.897.757.482	535.311.259.273
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	20.106.150.900	34.058.608.939
	Jumlah Belanja	4.495.870.207.049	4.862.530.576.022

Sumber: BPKAD dan diolah Bappeda, 2023.

Secara umum, belanja daerah telah direalisasikan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan, baik yang telah direncanakan sebelumnya dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah meliputi: belanja operasi, belanja modal dan belanja transfer, maupun yang dilaksanakan di luar rencana karena kondisi kedaruratan/mendesak atau kondisi tertentu melalui belanja tidak terduga. Penggunaan anggaran tersebut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi. Selain itu, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan direalisasikan sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan daerah.

Peningkatan kinerja pendapatan daerah memberikan ruang kepada daerah untuk mengoptimalkan target-target pembangunan yang telah direncanakan, terutama pada target-target pembangunan yang belum tercapai dan menjadi prioritas nasional.

Pada tahun 2021 dan 2022 pendapatan daerah menunjukkan peningkatan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Realisasi belanja pada tahun 2022 meningkat mencapai 4,862 triliun rupiah dibandingkan pada tahun 2021 mencapai 4,495 triliun rupiah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19 yang semakin terkendali dan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan perekonomian masyarakat mulai meningkat, meskipun dalam kondisi tertentu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masih memperhatikan protokol kesehatan, namun bukan menjadi kendala karena telah beradaptasi pada kebiasaan baru atau kondisi "new normal". Pada komponen belanja operasi, dimana realisasi tahun 2021 sebesar 2,754 triliun rupiah dan pada tahun 2022 sebesar 2,693 triliun rupiah. Pada komponen Belanja Modal pada tahun 2022 mengalami peningkatan mencapai 1,599 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 1,246 triliun rupiah. Pada komponen Belanja Transfer mengalami peningkatan dari semula sebesar 494 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi 569 miliar rupiah pada tahun 2022, belanja ini diperuntukkan bagi kabupaten dan kota dan masyarakat melalui Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Sementara komponen Belanja Tidak Terduga direalisasikan dalam kondisi tertentu atau darurat/mendesak sesuai dengan peruntukannya. Pada tahun 2022 Belanja Tidak Terduga direalisasikan sebesar 56 juta rupiah, lebih kecil dari tahun 2021 sebesar 238 juta rupiah.

Tabel 3.8. Target dan Proyeksi Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 dan 2024

No	Uraian	Target 2023 (tahun berjalan)	Proyeksi 2024
	BELANJA	4.912.167.261.707	4.943.718.934.500
1.	BELANJA OPERASI	2.827.157.725.878	2.825.789.270.000
1.1	Belanja Pegawai	1.628.831.274.282	1.448.399.015.000
1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.042.042.508.305	1.146.246.759.000
1.3	Belanja Bunga	60.000.000.000	70.000.000.000
1.4	Belanja Hibah	90.135.943.291	154.380.696.000
1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.148.000.000	6.762.800.000
2.	BELANJA MODAL	1.309.429.678.987	1.413.465.709.000
2.1	Belanja Modal Tanah	2.780.409.119	3.058.450.000
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	212.642.963.375	233.907.259.000
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	678.978.438.076	721.000.000.000
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	393.451.405.417	435.500.000.000
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.576.463.000	20.000.000.000
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.856.826.000	25.000.000.000
3.1.	Belanja Tidak Terduga	23.856.826.000	25.000.000.000
4.	BELANJA TRANSFER	751.723.030.842	679.463.955.500
4.1	Belanja Bagi Hasil	677.723.030.842	677.723.030.000
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	74.000.000.000	1.740.925.500
	Jumlah Belanja	4.912.167.261.707	4.943.718.934.500

Sumber: BPKAD dan diolah Bappeda, 2023.

Kebijakan Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2024 akan dilaksanakan berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Belanja Daerah diarahkan pada pemanfaatan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas pada

urusan-urusan pemerintahan daerah baik urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, penunjang urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan kepada pemerintah provinsi terkait bidang kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol), serta memenuhi ketentuan dalam belanja pendidikan, kesehatan, dan belanja infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kemungkinan pemberlakuan kebijakan penggunaan DAU yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat sebagaimana tahun anggaran 2023. Kebijakan belanja diharapkan akan dapat turut berperan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, terutama tujuan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan atas target penerimaan daerah, maka Anggaran Belanja pada Tahun Anggaran 2024 sebagai aktivitas anggaran yang tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh untuk dapat menghasilkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun anggaran 2024 untuk merealisasikan tugas-tugas yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan prioritas yang harus dituntaskan pada tahun 2024. Kebijakan Belanja pada tahun anggaran 2024 akan diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang belum dituntaskan pada tahun sebelumnya. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023, berdasarkan hasil evaluasi perencanaan tahun sebelumnya merekomendasikan beberapa program prioritas pembangunan akan terus dilanjutkan karena belum mencapai target-target pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Selain itu, belanja tahun 2024 difokuskan pula pada tugas-tugas mandatori sesuai peraturan perundang-undangan dan penanganan permasalahan pembangunan yang menjadi isu strategis nasional dan daerah, seperti penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanggulangan *stunting*, penanggulangan kemiskinan, penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Besaran anggaran yang diperuntukkan untuk memenuhi tugas-tugas mandatori adalah sebagai berikut; untuk pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1); untuk kesehatan Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN). Selain itu, berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, dimana telah direncanakan penganggaran melalui dua tahapan yaitu 40% pada tahun 2023 dan 60% pada tahun 2024.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara terhadap pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), yang bersumber dari (1) pelampauan penerimaan dana perimbangan, baik itu bagi hasil pajak maupun DAU, (2) pelampauan penerimaan lain lain pendapatan yang sah berasal dari hibah pemerintah pusat dan (3) Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya yang

berasal dari belanja pegawai, belanja modal, dan belanja tak terduga, dan melakukan penerimaan pinjaman daerah.

Pada tahun 2024 APBD Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu pada struktur Pembiayaan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari (1) Penerimaan Pembiayaan berupa SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) Pengeluaran Pembiayaan berupa pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2021 dan 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9. Realisasi Pembiayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 -2024

No	Uraian	Realisasi	
		2021	2022
1	Penerimaan pembiayaan	816.223.101.702	1.293.103.189.002
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	358.472.473.491	824.604.048.457
1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	457.750.628.211	468.499.140.545
2	Pengeluaran pembiayaan	25.000.000.000	48.656.923.392
2.1	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000	0
2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	48.656.923.392
	Jumlah Pembiayaan Netto	791.223.101.702	1.244.446.265.610

Sumber: Bappeda, 2023 diolah.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Pada tahun 2021 terealisasi sebesar 816 miliar rupiah dan tahun 2022 sebesar 1,293 triliun rupiah. Penerimaan dari SiLPA tahun 2021 mencapai 357 miliar rupiah dan pada tahun 2022 mencapai 824 miliar rupiah, sedangkan Penerimaan Pinjaman Daerah dari pihak PT. SMI yang diberikan secara bertahap, pada tahun 2021 mencapai 457 miliar rupiah dan pada tahun 2022 mencapai 468 miliar rupiah. Penerimaan pembiayaan digunakan untuk membiayai penyertaan modal daerah khususnya pada Bank Sultra dan kewajiban pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Pada tahun 2021 pengeluaran pembiayaan hanya diperuntukkan pada penyertaan modal daerah sebesar 25 miliar rupiah, sedangkan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2022 diperuntukkan pada pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar 48 miliar rupiah. Pembiayaan Netto diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan belanja yang belum tercukupi dari pendapatan daerah.

Tabel 3.10. Target dan Proyeksi Pembiayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 dan 2024

No	Uraian	Target 2023 (tahun berjalan)	Proyeksi 2024
1	Penerimaan pembiayaan	630.028.427.609	688.662.810.500
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	533.817.790.526	688.662.810.500
1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	96.210.637.083	0
2	Pengeluaran pembiayaan	275.000.000.000	345.000.000.000

No	Uraian	Target 2023 (tahun berjalan)	Proyeksi 2024
2.1	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000	20.000.000.000
2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	255.000.000.000	325.000.000.000
	Jumlah Pembiayaan Netto	355.028.427.609	343.662.810.500

Sumber: Bappeda, 2023 diolah.

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan SiLPA dari komponen Penerimaan Pembiayaan yang direncanakan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 533 miliar, bersumber dari pelampauan penerimaan PAD sebesar 26 miliar rupiah, pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebesar 455 miliar rupiah, pelampauan penerimaan lain-lain PAD yang sah sebesar 13 miliar rupiah, dan penghematan belanja sebesar 26 miliar rupiah. Pada tahun 2024 penerimaan SiLPA diproyeksikan sebesar 688 miliar rupiah, sedangkan Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat atau PT. SMI pada tahun 2023 sebesar 96 miliar dan merupakan tahun terakhir penyaluran pinjaman tersebut. Pada komponen Pengeluaran Pembiayaan, Penyertaan Modal Daerah sebesar 20 miliar tetap direncanakan pada tahun 2023 dan 2024. Untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo direncanakan pada tahun 2023 sebesar 255 miliar rupiah dan tahun 2024 sebesar 325 miliar rupiah.



Bab IV

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan public dan daya saing daerah. Untuk mencapai hal-hal tersebut, perlu adanya keselarasan pembangunan antara pemerintah pusat dengan daerah. Sesuai yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa perencanaan pembangunan bertujuan untuk: (i) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; (ii) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (iii) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (iv) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (v) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sebagai bentuk keselarasan perencanaan pembangunan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat (RKP) dan Program Prioritas Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Tema dari RKP 2024 adalah “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan** .” Dari tema tersebut, terdapat tujuh arahan presiden terkait Prioritas Nasional dalam RKP 2024 yaitu 1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; 2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; 3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; 4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; 7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Ketujuh Prioritas Nasional ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sehingga menciptakan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan tema RKP Tahun 2024.

Sebagai bentuk sinkronisasi dengan RKP Tahun 2024, maka tema RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 adalah “**Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Kompetitif**.” Wujud dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam RKPD tersebut tentunya harus sesuai dengan kewenangan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Sejalan dengan sasaran dan target nasional maka sasaran dan target pembangunan Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :



- 1) Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,57 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,98 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 23,28 persen. Untuk target tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara diperkirakan sebesar 6,0-6,5 persen.
- 2) Persentase penduduk miskin Sulawesi Tenggara pada September 2022 sebesar 11,27 persen (314.740 jiwa), meningkat dibandingkan Maret 2022 sebesar 11,17 persen (309.790 jiwa), maka target yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024 diperkirakan menurun sebesar 10,00-11,00 persen.
- 3) Pencapaian IPM Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 mencapai 72,23. Capaian tersebut naik dibandingkan dengan pencapaian IPM tahun 2021 yaitu 71,66. Sementara itu, target IPM untuk Tahun 2024 adalah sebesar 73,00 - 73,30.
- 4) Angka Gini Rasio pada September 2022 mengalami penurunan sebesar 0,370 Maret 2022 sebesar 0,390. Target Gini Rasio untuk Tahun 2024 adalah sebesar 0,366 –0,375.
- 5) Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Tenggara pada Agustus 2022 adalah sebesar 3.36 persen menurun dari 3,86 persen pada Februari 2022 dan 3,92 persen pada Agustus 2021. Target Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 adalah sebesar 2,75-3,00 persen.

Penyusunan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada Tahun 2024 mempertimbangkan potensi, isu dan permasalahan, dan hasil analisis serta evaluasi capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya. Penyusunan RKPD Tahun 2024 juga mengacu pada tujuan dan sasaran yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan yang dijabarkan ke dalam RKPD Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2024 dan menjadi Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Tujuan RPD 2024-2026 (<i>Tahun Perencanaan 2024</i>) /RKPD Tahun 2024	Sasaran RPD 2024-2026 (<i>Tahun Perencanaan 2024</i>) /RKPD Tahun 2024
Tujuan1: Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul & Kompetitif Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	Sasaran 1. <i>Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan</i> Indikator: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Rata-Rata Lama Sekolah</i> • <i>Harapan Lama Sekolah</i>
	Sasaran 2. <i>Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan</i> Indikator: <i>Angka Harapan Hidup Saat Lahir</i>
Tujuan 2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Sasaran 3. <i>Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat</i> Indikator:

Tujuan RPD 2024-2026 (Tahun Perencanaan 2024) /RKPD Tahun 2024	Sasaran RPD 2024-2026 (Tahun Perencanaan 2024) /RKPD Tahun 2024
Indikator: Persentase Penduduk Miskin	<i>Pengeluaran Perkapita Disesuaikan</i> Sasaran 4. <i>Menurunnya Kesejangan Pendapatan Masyarakat</i> Indikator: <i>Gini Rasio</i> Sasaran 5. <i>Meningkatnya Ketersediaan, Akses, & Kualitas Konsumsi Pangan</i> Indikator: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Skor Pola Harapan Pangan</i> • <i>Prevalensi Stunting</i>
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan Yang Berkelanjutan Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran 6. <i>Meningkatnya Produktivitas & Nilai Tambah Sektor Unggulan</i> Indikator: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Pertanian, Kehutanan, & Perikanan</i> • <i>Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Pertambangan dan Penggalian</i> • <i>Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Industri Pengolahan</i> Sasaran 7. <i>Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kerja & Akses Terhadap Lap. Kerja</i> Indikator: <i>Tingkat Pengangguran Terbuka</i> Sasaran 8. <i>Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi</i> Indikator: <i>Pertumbuhan Investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)</i> Sasaran 9. <i>Meningkatnya konektivitas antarwilayah</i> Indikator: <i>Indeks Infrastruktur</i> Sasaran 10. <i>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</i> Indikator: <i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</i> Sasaran 11. <i>Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana</i> Indikator: <i>Indeks Resiko Bencana</i>
Tujuan 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Sasaran 12. <i>Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah</i>

Tujuan RPD 2024-2026 (<i>Tahun Perencanaan 2024</i>) /RKPD Tahun 2024	Sasaran RPD 2024-2026 (<i>Tahun Perencanaan 2024</i>) /RKPD Tahun 2024
Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	Indikator: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Predikat Akuntabilitas Kinerja Daerah</i> • <i>Opini Laporan Keuangan</i> Sasaran 13. <i>Meningkatnya Kualitas Layanan Publik</i> Indikator: <i>Indeks Pelayanan Publik</i>

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Prov. Sultra Tahun 2024-2026.

4.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 harus bersinergi dengan prioritas pembangunan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026. Berdasarkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- 2) Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3) Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang- Undang. pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang- Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
- 4) Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- 5) Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan pelaksanaan 5 (lima) arahan Presiden tersebut, didefinisikan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu diperkuat, sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan

mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 - peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
 - peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
 - peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
 - pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
- b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
 - pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - penyediaan air untuk pertanian;
 - penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 - pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 - pengembangan waduk multiguna.
- c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
 - peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 - peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 - peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 - peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 - peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;

- peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
 - peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 - peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
 - peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.
- f) peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 - peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
 - peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 - perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 - pengembangan industri halal.
- g) peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
 - peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - pengelolaan impor;
 - peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
 - peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
 - peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan
 - peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
- h) penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- peningkatan pendalaman sektor keuangan;
 - optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0;

- peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
- peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
- peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
- e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata

3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. pengentasan kemiskinan; dan
- g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
 - percepatan cakupan administrasi kependudukan;
 - integrasi sistem administrasi kependudukan;
 - pendampingan dan layanan terpadu; dan

- pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - sistem jaminan sosial nasional;
 - bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
 - kesejahteraan sosial.
- c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
 - percepatan perbaikan gizi masyarakat;
 - peningkatan pengendalian penyakit;
 - penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan
 - penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:
 - Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan,
 - Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan,
 - Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat Kesehatan,
 - Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, dan
 - Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan Kesehatan.
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
 - pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
 - peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - penjaminan mutu pendidikan; dan
 - peningkatan tata kelola pendidikan.
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
 - kualitas pemuda.
- b) Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 - keperantaraan usaha dan dampak sosial;
 - reforma agraria; dan
 - perhutanan sosial.
- c) Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;

- penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
 - peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi; dan
 - prestasi olahraga.
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:
- a. revolusi mental dalam sistem pendidikan;
 - b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
 - c. revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 - revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
 - revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
 - penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
 - pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
 - pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;
- b. meningkatkan pemajuan Dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
 - pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 - perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
 - pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.

- c. memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 - penguatan harmoni dan kerukunan umat Beragama;
 - penyelarasan relasi agama dan budaya;
 - peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
 - pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
- d. peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - peningkatan budaya literasi;
 - pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
 - pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
 - penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. infrastruktur pelayanan dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
 - penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
 - pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
 - keselamatan dan keamanan transportasi;
 - ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan
 - waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.
- b. infrastruktur ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - konektivitas jalan;
 - konektivitas kereta api;

- konektivitas laut;
 - konektivitas udara; dan
 - konektivitas darat.
- c. infrastruktur perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- transportasi perkotaan; dan
 - infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perkotaan.
- d. energi dan ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
 - akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.
- e. transformasi digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
 - pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan
 - fasilitas pendukung transformasi digital.

6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
- c. pembangunan rendah karbon

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - penanggulangan bencana; dan
 - peningkatan ketahanan iklim.
- c. pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - pembangunan energi berkelanjutan;

- pemulihan lahan berkelanjutan; dan
 - pengembangan industri hijau
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
- a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b. meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
 - c. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
 - e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Konsolidasi demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
 - penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
 - peningkatan kualitas komunikasi publik.
- b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri; dan
 - penguatan kerjasama pembangunan internasional.
- c. Reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - penguatan implementasi manajemen ASN;
 - transformasi pelayanan publik;
 - penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
 - reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
- d. Menjaga stabilitas keamanan nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - penguatan keamanan dalam negeri;
 - penguatan keamanan laut; dan
 - penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Prioritas pembangunan merupakan strategi dalam upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah maupun nasional seperti yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026. Prioritas pembangunan dalam RKP Tahun 2024 dan RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan memperhatikan isu/permasalahan yang dihadapi baik secara nasional maupun lingkup kewilayahan dan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah. Berikut merupakan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024:

1. Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif

Fokus Pada:

- 1) Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan menengah.
- 2) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan Sistem Kesehatan Nasional dan tetap fokus pada permasalahan kesehatan yang menjadi prioritas daerah, al: Penanganan *Stunting*.

2. Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik

Fokus Pada:

- 1) Mengurangi beban pengeluaran dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan.
- 2) Meningkatkan kapasitas sektor riil & menciptakan iklim usaha kondusif.
- 3) Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan bg masyarakat.

3. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan

Fokus Pada:

- 1) Mendorong transformasi ekonomi pada Sektor Pariwisata, Peningkatan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian dan hilirisasi pertambangan serta program padat karya untuk menyerap tenaga kerja.
- 2) Peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah.

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Fokus Pada:

- 1) Optimalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penerapan SPBE (SIPD, SDI, dll).
- 2) Optimalisasi inovasi daerah.



Bab V

Arahan Kebijakan Pembangunan Kabupaten dan Kota

Penjabaran dari strategi pembangunan daerah dirumuskan dalam suatu arahan kebijakan yang berisikan mengenai kerangka pikir atau kerangka kerja yang bertujuan menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah. Arahan kebijakan tersebut, disusun secara bertahap yang difokuskan pada pencapaian tujuan dan sasaran.

5.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%;
 - b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%.Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
 - MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.
2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%;
 - b. Insidensi tuberkulosis: 190 per 100.000 penduduk;
 - c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 405 kab/kota;
 - d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kab/kota;
 - e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;

- MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0);
 - MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.
3. Arah Kebijakan Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
 - b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5%- 20,6% per Target RPJMN 21,0%.
- Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
- MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
 - MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
 - MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas;
 - MP *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
 - Transformasi Digital.
4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
 - b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,0 miliar.
- Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
- MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%;
 - b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 17%
- Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
- MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3;
 - MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.
6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten-kota: 95%/75%/65%;
 - b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
 - c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%;
 - d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86% akses layak termasuk 12 % akses aman;
 - e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 11 lokasi;
 - f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita.
7. Arah kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian:
- Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP, meliputi:
- a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden: 100%;
 - b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100%;
 - c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM: 100%.
- Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
- MP Ibu Kota Nusantara;
 - MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.
8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.

Dukungan terhadap *Major Project (MP)*, antara lain:

- Didukung oleh proyek-proyek prioritas.

Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024, yang meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,8% - 5,7%;
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 – 5,7%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
5. Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) sebesar 73,99 – 74,02;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 27,27%.

Serta indikator lainnya yaitu:

1. Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 107 – 110;
2. Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 105 – 108.

Perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten dan selaras tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026. Selain itu, arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Tabel 5.1. Prioritas, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Sasaran 1: Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Mutu Pendidikan	Menyelenggarakan pendidikan yang merata dan berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat. • Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan melalui sertifikasi kompetensi dan peningkatan kesejahteraan. • Pengembangan SMK yang relevan dengan dunia kerja. • Meningkatkan literasi masyarakat melalui pemanfaatan perpustakaan dan pemanfaatan teknologi informasi. • Mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. • Meningkatkan kualitas hasil belajar dan pendidikan karakter peserta didik.

Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
	Sasaran 2: Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Mutu Kesehatan	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kemandirian kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar Meningkatkan kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan.
Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Sasaran 3: Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Mengurangi beban pengeluaran dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan
	Sasaran 4 : Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	Menciptakan iklim usaha kondusif.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
	Sasaran 5: Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat serta memperbaiki sistem informasi pangan;
Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Sasaran 6 : Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Penerapan teknologi tepat guna & hilirisasi potensi unggulan berbasis sumber daya alam.	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan produksi & produktivitas pertanian, kehutanan & perikanan. Peningkatan nilai tambah komoditi melalui hilirisasi
	Sasaran 7 : Meningkatnya Kapasitas Tenaga	Memperluas kesempatan kerja & peluang usaha	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kapasitas dan

Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
	Kerja dan Akses Terhadap Lapangan Kerja		keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital & teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar
	Sasaran 8 : Meningkatkan Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Optimalisasi pengelolaan potensi investasi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan promosi investasi & memperbanyak sumber & jenis investasi
	Sasaran 9 : Meningkatkan konektivitas antarwilayah	Peningkatan infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas dan kapasitas jalur darat dan laut antarwilayah , kawasan strategis dan simpul-simpul transportasi untuk menunjang ekonomi masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas jalan & jembatan menuju/dalam kawasan strategis & antar kab/kota. Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi melalui pengembangan fasilitas angkutan Jalan & Pelabuhan Pengumpan Regional
	Sasaran 10 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian pencemaran & kerusakan lingkungan hidup darat, laut & udara melalui peningkatan kapasitas daerah dalam perlindungan & pengelolaan lingkungan hidup.
	Sasaran 11 : Meningkatkan Ketangguhan Terhadap Bencana	Mengurangi risiko bencana.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat & pasca bencana.
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Sasaran 12: Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Optimalisasi penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penataan & penguatan organisasi yang efektif & efisien. Meningkatkan profesionalisme aparatur. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi.
	Sasaran 13: Meningkatkan Kualitas Layanan Publik		

Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengawasan pembinaan aparatur & penerapan budaya kerja yang bersih & bebas KKN. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbang & inovasi sebagai dasar penyusunan atau pengambilan kebijakan pemerintah daerah

Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Prov. Sultra Tahun 2024-2026.

5.2. PENGEMBANGAN WILAYAH

Ketimpangan wilayah dapat dilihat beberapa indikator kunci pada aspek sosial dan ekonomi, diantaranya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan laju pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Gini Ratio Maret 2023 berada pada angka 0,371, berdasarkan data tersebut ketimpangan pengeluaran penduduk di Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan 0,005 poin jika dibandingkan dengan periode September 2022 yang sebesar 0,366, namun turun 0,016 poin dibandingkan periode Maret 2022 yang sebesar 0,387. Kondisi juga dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan suatu wilayah sehingga untuk periode Maret 2022 – Maret 2023 menunjukkan kecenderungan penurunan ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kondisi ketimpangan di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat digambarkan melalui pendekatan kewilayahan sesuai karakteristik wilayah yaitu antara wilayah daratan dan kepulauan. Kondisi ketimpangan tersebut dapat ditunjukkan dengan data kinerja pembangunan masing-masing kabupaten dan kota berdasarkan indikator makro pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM), PDRB Perkapita, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Diharapkan indikator tersebut akan memberikan gambaran secara utuh terkait dengan kondisi ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tertuang dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.2. Data Capaian Kinerja Indikator Makro Kabupaten dan Kota

Kab/Kota	2021					2022						
	TPT	Kemiskinan* Jumlah (Ribu Jiwa)	IPM (%)	LPE* * (%)	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	TPT	Kemiskinan* Jumlah (Ribu Jiwa)	IPM (%)	LPE** (%)	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)		
Buton	4,74	14,25	13,92	66,32	2,62	24,326	2,99	13,612	13,27	67,23	5,76	25,229
Muna	4,97	30,54	13,54	69,17	3,16	23,88	3,11	30,475	13,41	69,61	5,9	24,799
Konawe	4,56	32,46	13,03	71,48	7,78	30,463	2,73	32,087	12,75	72,04	15,38	34,465
Kolaka	3,62	33,45	12,43	73,56	4,02	78,571	4,17	31,555	11,51	73,98	2,42	78,91
Konawe Selatan	2,14	36,17	11,34	68,58	4,76	27,662	2,95	35,794	11,08	69,36	5,85	28,804
Bombana	3,17	19,73	10,76	66,25	3,49	32,08	1,47	19,211	10,26	66,81	5,11	33,413

Kab/Kota	2021					2022						
	TPT	Kemiskinan* Jumlah (Ribu Jiwa)	(%)	IPM	LPE* *	(%)	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	TPT	Kemiskinan* Jumlah (Ribu Jiwa)	(%)	LPE** .	(%)
Wakatobi	2,3	15,3	14,91	69,87	4,02	28,473	3,53	15,005	14,55	70,86	4,8	29,279
Kolaka Utara	3,18	21,36	13,79	69,5	2,68	46,903	2,86	20,631	13,08	70,39	3,85	48,046
Buton Utara	3	9,45	14,89	68,08	4,08	34,595	2,1	9,132	14,26	69	5,01	35,626
Konawe Utara	3,36	9,26	14,32	70,23	4,59	42,899	2,01	9,022	13,72	71,1	5,07	44,2
Kolaka Timur	3,44	20,03	14,35	67,76	4,83	28,222	2,22	19,327	13,57	68,73	4,47	29,439
Konawe Kepulauan	1,83	5,98	17,81	65,73	2,3	28,457	1,85	5,472	16,15	66,69	3,23	28,808
Muna Barat	2,84	11,55	13,96	65,48	3,96	22,696	2,4	11,563	13,85	66,21	4,08	23,587
Buton Tengah	3,77	14,73	15,8	64,55	3,12	15,094	2,63	13,923	14,9	65,29	3,86	15,373
Buton Selatan	3,92	11,71	14,62	64,99	2,29	21,789	4,18	11,571	14,41	65,44	3,9	22,605
Kota Kendari	5,19	19,46	4,87	84,15	3,86	49,006	5,23	18,717	4,57	84,51	4,94	50,492
Kota Baubau	6,87	13,3	7,78	76,26	4,15	42,420	5,39	12,69	7,31	76,67	5,28	43,948
Sulawesi Tenggara	3,92	318,7	11,66	71,66	4,1	36,8	3,36	309,79	11,17	72,23	5,53	XXX

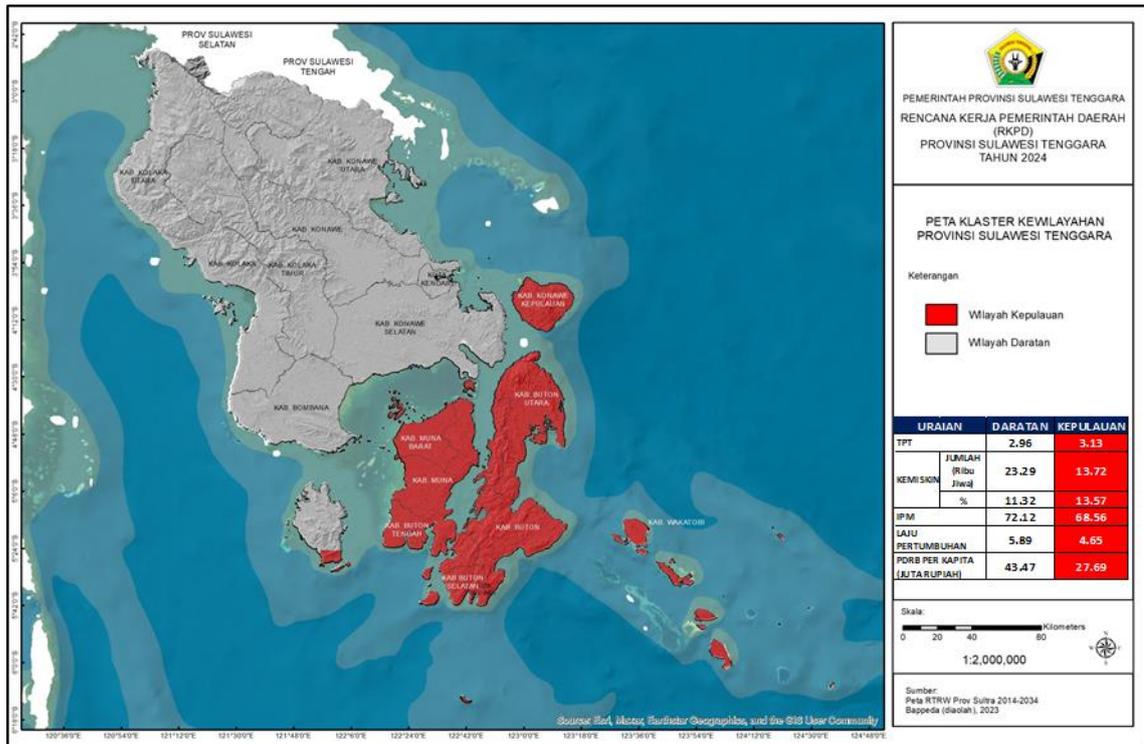
Sumber: BPS,2023 (diolah)

* referensi waktu maret

** angka sementara

*** angka sangat sementara

Gambaran ketimpangan pembangunan yang ditunjukkan dengan data kinerja pembangunan pada tahun 2021 dan 2022 memiliki kecenderungan yang sama, dimana data tersebut menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan pada wilayah daratan dan kepulauan khususnya untuk 5 (empat) indikator sosial dan ekonomi, dimana data kinerja pada Tahun 2022 untuk wilayah daratan dan kepulauan yang menunjukkan rata-rata capaian kinerja semua indikator pada wilayah daratan berada di atas capaian kinerja daerah di wilayah kepulauan, walaupun pada indikator kemiskinan yang menunjukkan jumlah jiwa angka kemiskinan lebih banyak di wilayah daratan, namun dari data persentase angka kemiskinan menunjukkan kinerja yang sebaliknya. Kondisi ini dapat dilihat pada Tabel 5.2. serta untuk gambaran ketimpangan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (daratan dan kepulauan) dapat dilihat pada Gambar 5.1.



Sumber: Bappeda Prov, Sultra, 2023

LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi

■ Wilayah Kepulauan
■ Wilayah Daratan

Gambar 5.1.

Peta Gambaran Ketimpangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Sesuai Indikator Makro Pada Tahun 2022

Tabel 5.3. Data Rata-Rata Kinerja Indikator Makro Kabupaten/Kota pada Wilayah Daratan dan Kepulauan Tahun 2022

Wilayah	TPT	Kemiskinan*		IPM	Pertumbuhan Ekonomi**	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)***
		Jumlah (Ribu Jiwa)	(%)			
DARATAN	2.96	23.29	11.32	72.12	5.89	43.47
KEPULAUAN	3.13	13.72	13.57	68.56	4.65	27.69

Sumber: Bappeda 2023 (Data Diolah)

* referensi waktu maret

** angka sementara

*** angka sangat sementara

5.3. ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2024

Berdasarkan kondisi ketimpangan tersebut, pendekatan perencanaan kewilayahan dirumuskan menjadi 2 klaster wilayah yaitu wilayah daratan dan wilayah kepulauan dengan konsep arahan pengembangan wilayah sebagai berikut:

1. Wilayah Daratan

Fokus strategis pengembangan di wilayah daratan mencakup beberapa hal yaitu:

- 1) Mengembangkan sistem pusat kegiatan ekonomi berbasis pertanian lahan sawah dalam rangka mendukung keterkaitan fungsional dengan sistem

perkotaan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan perwujudan peningkatan ekonomi di wilayah perdesaan. Dengan arah pengembangan:

- Menetapkan lahan sawah pertanian pangan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan sebagai sentra produksi hasil pertanian;
- Menetapkan pusat pengolahan pertanian di Kabupaten Kolaka Timur dengan dukungan produksi dari wilayah Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Selatan; dan
- Mengembangkan jaringan infrastruktur jalan sebagai penunjang aksesibilitas antar sentra produksi (kawasan perdesaan) dan pusat pengolahan serta pemasaran.

2) Mengembangkan kawasan pesisir Kota Kendari dan Kabupaten Konawe dengan fungsi sebagai pusat pengolahan industri perikanan dan kawasan pariwisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Dengan arah pengembangan:

- Mengembangkan destisasi wisata potensial di wilayah pesisir dan pulau kecil termasuk di sekitar Jembatan Teluk Kendari dan sepanjang jaringan jalan Kendari – Toronipa;
- Mengembangkan kegiatan industri pengolahan perikanan di wilayah Kota Kendari yang menjadi bagian dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (Pelabuhan Perikanan Samudera);
- Mengendalikan pemanfaatan ruang di wilayah darat, pesisir dan pulau kecil yang dapat berpotensi menghambat pengembangan destinasi wisata dan menyebabkan penurunan fungsi ekosistem laut sebagai kawasan perikanan tangkap; dan
- Mengembangkan infrastruktur penunjang kawasan pariwisata khususnya di wilayah pulau kecil

3) Mengembangkan pusat kegiatan ekonomi berupa kawasan industri berbasis potensi sumber daya alam pada sektor pertambangan. Dengan arah pengembangan:

- Pengembangan dan pembangunan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil tambang (smelter) yang terintegrasi dengan kawasan pertambangan;
- Pengembangan pelabuhan khusus/terminal khusus mendukung kegiatan pokok industri pertambangan;
- Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan seperti jaringan jalan khusus, sistem pengolahan air baku dan penataan kawasan permukiman di sekitar kawasan; dan
- Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan potensial pertanian dan menjaga fungsi kawasan lindung.

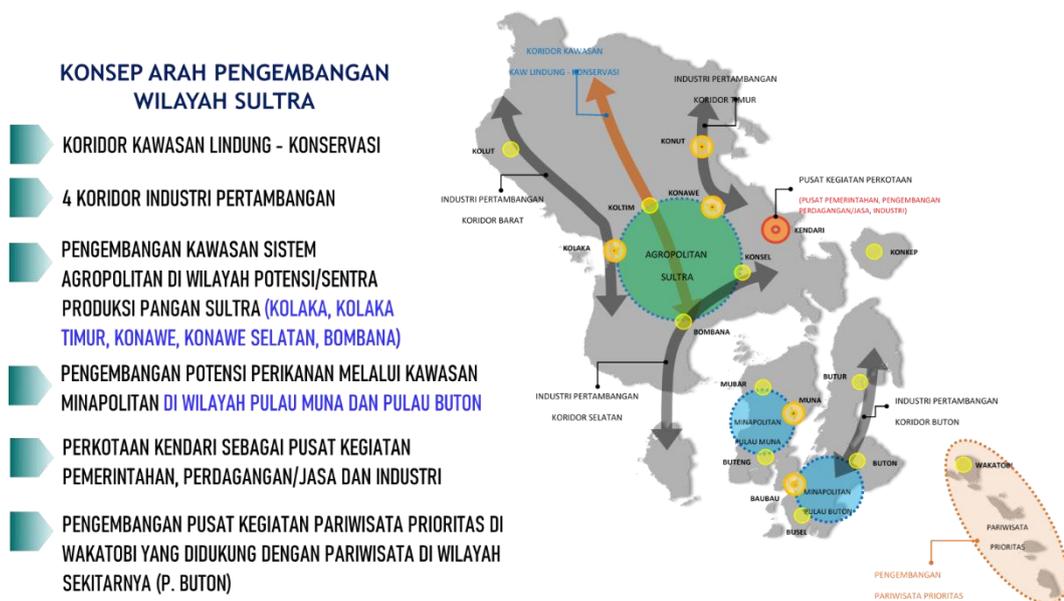
2. Wilayah Kepulauan

Fokus strategis pengembangan di wilayah daratan mencakup beberapa hal yaitu:

1) Mengembangkan sistem pusat kegiatan ekonomi berbasis perikanan dalam rangka mendukung keterkaitan fungsional keruangan dengan sistem perkotaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir. Dengan arah pengembangan:

- Menetapkan kawasan sentra produksi perikanan tangkap di wilayah perairan Pulau Buton, Pulau Muna, dan Pulau Wawonii serta sentra produksi perikanan budidaya di wilayah Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Konawe Kepulauan;

- Menetapkan kawasan pusat pengolahan komoditas perikanan di wilayah Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - Mengembangkan sarana penunjang industri perikanan yang terintegrasi dengan pelabuhan perikanan di Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kota Baubau, dan Kabupaten Konawe Kepulauan; dan
 - Mengembangkan jaringan infrastruktur jalan sebagai penunjang aksesibilitas antar sentra produksi (kawasan perdesaan) dan pusat pengolahan serta pemasaran.
- 2) Mengembangkan kawasan yang mendukung peningkatan kegiatan ekonomi berbasis pariwisata yang mengedepankan perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan pulau kecil. Dengan arah pengembangan:
- Menetapkan kawasan pengembangan akomodasi pariwisata di Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, dan Pulau Binongko;
 - Mengembangkan infrastruktur penunjang kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan Wangi-Wangi;
 - Mengembangkan destinasi wisata buatan di wilayah darat yang terintegrasi dengan pengembangan destinasi wisata laut; dan
 - Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang laut pada kawasan konservasi Taman Nasional Laut Kepulauan Wakatobi.
- 3) Mengembangkan pusat kegiatan ekonomi berupa kawasan industri berbasis potensi sumber daya alam pada sektor pertambangan. Dengan arah pengembangan:
- Pengembangan dan pembangunan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil tambang (smelter) yang terintegrasi dengan kawasan pertambangan;
 - Pengembangan pelabuhan khusus/terminal khusus mendukung kegiatan pokok industri pertambangan;
 - Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan seperti jaringan jalan khusus, sistem pengolahan air baku dan penataan kawasan permukiman di sekitar kawasan; dan
 - Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan potensial pertanian dan menjaga fungsi kawasan lindung.



Gambar 5.2. Konsep Arah Pengembangan Wilayah Sulawesi Tenggara



Bab VI

Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2024. Penetapan program dan kegiatan prioritas berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 dengan mengacu pada arah kebijakan pada RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 dan prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam RKP Tahun 2024.

Usulan program dan kegiatan berimplikasi pada penganggaran yang bersifat indikatif dan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adapun rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 diuraikan pada matriks berikut ini :

Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
					Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						1.365.813.296.908	1.492.021.068.245
1	01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.360.612.268.603	1.486.299.937.109
1	01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			630.184.858.158	689.818.677.170
1	01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.856.516.549	2.068.575.244
1	01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	101.057.000	111.162.700
1	01 01 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	721.237.049	793.360.754
1	01 01 1.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
1	01 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
1	01 01 1.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
1	01 01 1.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	101.057.000	137.569.740
1	01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	633.165.500	696.482.050
1	01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			613.629.456.602	671.581.328.417
1	01 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6567 Orang/ Bulan	611.532.591.462	670.044.776.762
1	01 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	800.000.000	110.000.000
1	01 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	545.413.140	599.954.455
1	01 01 1.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	19.800.000	21.780.000
1	01 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	97.603.000	107.363.300
1	01 01 1.02 06 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
1	01	01	1,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	434.049.000	477.453.900
1	01	01	1,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			213.139.300	234.453.230
1	01	01	1,03	01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	213.139.300	234.453.230
1	01	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.103.947.090	1.214.341.800
1	01	01	1,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	45.978.900	50.576.790
1	01	01	1,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	820.498.558	902.548.414
1	01	01	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 orang	237.469.632	261.216.596
1	01	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			2.386.502.855	2.625.153.141
1	01	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	707.356.485	778.092.134
1	01	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	222.647.370	244.912.107
1	01	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	254.947.000	280.441.700
1	01	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	107.052.000	117.757.200
1	01	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1.094.500.000	1.203.950.000
1	01	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			5.018.443.100	5.520.287.410
1	01	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	509.388.000	560.326.800
1	01	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	4.509.055.100	4.959.960.610
1	01	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			2.482.883.062	2.731.171.368
1	01	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	22.000.000	24.200.000
1	01	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	688.707.162	757.577.878
1	01	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1.772.175.900	1.949.393.490

Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	01	1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	^ Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			3.493.969.600	3.843.366.560
1	01	01	1,09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	^ Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	543.697.000	598.066.700
1	01	01	1,09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	^ Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	200.970.000	221.067.000
1	01	01	1,09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Lainnya	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	^ Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	2.749.302.600	3.024.232.860
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	^ Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Angka Partisipasi Anak Usia 16 -18 Tahun Angka Partisipasi Anak Usia 4-18 Tahun Angka Partisipasi Murni SLTA Sederajat Angka Partisipasi Kasar SLTA Sederajat	100 % 100 % 100 % 100 %	595.775.355.599	655.352.891.159
1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	^ Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Angka Partisipasi Kasar SMA Angka Partisipasi Murni SMA Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 63,60 % 100 % 53,35 % 89,3 % 88,63 % 83,12 %	331.907.657.070	365.098.422.777
1	01	02	1.01	01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	^ Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	13.120.144.986	14.432.159.485
1	01	02	1.01	03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	^ Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	50 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	^ Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	11 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	^ Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	50 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	12 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	^ Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang	436.256.700	479.882.370
1	01	02	1.01	13 Pembangunan Asrama Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	^ Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	^ Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	125.635.383.874	138.198.922.261
1	01	02	1.01	15 Pembangunan Fasilitas Parkir	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	^ Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit	114.538.600	125.992.460
1	01	02	1.01	16 Pembangunan Kantin Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	^ Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	^ Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	1.589.901.720	1.748.891.892
1	01	02	1.01	20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	^ Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	^ Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	100.000.000	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
					Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	01 02 1.01 23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.01 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.01 25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.01 26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.01 27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.01 28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.01 29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.01 36	Pengadaan Mebel Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	100 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.01 37	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.01 38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	500 Paket	1.000.000.000	1.100.000.000
1	01 02 1.01 39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.01 40	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.01 41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.01 43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.01 45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta didik	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.01 46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	100 Paket	2.507.560.000	2.758.316.000
1	01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.01 50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	3.982.453.750	4.380.699.125
1	01 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan	6.876.995.840	7.564.695.424
1	01 02 1.01 53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	350 Satuan Pendidikan	170.733.607.000	187.806.967.700
1	01 02 1.01 54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	350 Orang	440.000.000	484.000.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	1.01	55	Pemeliharaan Mebel	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	100 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	56	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi	50 orang	50.000.000	55.000.000
1	01	02	1.01	57	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 orang	50.000.000	55.000.000
1	01	02	1.01	58	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 konten digital	50.000.000	55.000.000
1	01	02	1.01	59	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 orang	50.000.000	55.000.000
1	01	02	1.01	60	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 dokumen	50.000.000	55.000.000
1	01	02	1.01	61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 dokumen	50.000.000	55.000.000
1	01	2	1.01	63	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	17 Komunitas	100.000.000	110.000.000
1	01	2	1.01	64	Penyediaan infrastruktur TIK	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	100 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	2	1.01	65	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	100 Kegiatan	100.000.000	110.000.000
1	01	2	1.01	66	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang diterima Peserta Didik	50 Buku	100.000.000	110.000.000
1	01	2	1.01	67	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang telah Dibangun	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	2	1.01	68	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	2	1.01	69	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	2	1.01	70	Pembangunan Ruang Laboratorium	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	47 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	2	1.01	71	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Laboratorium	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	2	1.01	72	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	1.270.814.600	1.397.896.060
1	01	2	1.01	73	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	2	1.01	74	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	2	1.01	75	Bimbingan Teknik, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	2	1.01	76	Penataan Ruang/Sudut Baca	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang telah Ditata	1 Ruang	100.000.000	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	2	1.01	77	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	78	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Angka Partisipasi Kasar SMK Angka Partisipasi Murni SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		235.937.275.579	259.531.003.137
1	01	02	1.02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	100 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	09	Pembangunan Asrama Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30 Unit	151.665.533.690	166.832.087.059
1	01	02	1.02	11	Pembangunan Fasilitas Parkir	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	12	Pembangunan Kantin Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	2.009.172.677	2.210.089.945
1	01	02	1.02	28	Pengadaan Mebel Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	29	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1000 Paket	100.000.000	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	32	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1 Peserta Didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	1 Orang	478.304.200	526.134.620
1	01	02	1.02	48	Pemeliharaan Mebel	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	49	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	50	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	51	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	52	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	53	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	385.488.400	424.037.240
1	01	02	1.02	56	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	1 Orang	100.000.000	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	1.02	57	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	58	Penyedia infrastruktur TIK	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	59	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	60	Fasilitasi sertifikasi kompetensi Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peserta didik yang memiliki kompetensi	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	61	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang diterima Peserta Didik	1 Buku	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	62	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	3.340.782.571	3.674.860.828
1	01	02	1.02	63	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	421.066.041	463.172.645
1	01	02	1.02	64	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	72.736.928.000	80.010.620.800
1	01	02	1.02	65	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	66	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	67	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	68	Penataan Ruang/Sudut Baca	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang telah Ditata	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	69	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	70	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	71	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	72	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	73	Bimbingan Teknik, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	74	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	75	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	100.000.000	110.000.000

Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	01	02	1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	59,58 % 95,40 % 71,41 % 88,52 % 52,78 % 59,40 % 83,34 % 68,61 % 91,94 % 58,87 % 90,41 % 86,43 % 88,51 % 82,74 % 100 %	27.930.422.950	30.723.465.245	
1	01	02	1.03	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	06	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	07	Pembangunan Asrama Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	09	Pembangunan Fasilitas Parkir	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	10	Pembangunan Kantin Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	12	Pembangunan Ruang Laboratorium	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	1 Ruang	100.000.000	110.000.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	1.03	16	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	17	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	28	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	29	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	31	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	32	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	33	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	34	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	35	Pengadaan Mebel Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	36	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	39	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta Didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1 Peserta Didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	100.000.000	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
					Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	01 02 1.03 52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.03 53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.03 54	Pemeliharaan Mebel	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.03 55	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.03 56	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.03 57	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.03 59	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.03 60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.03 62	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidikan Satuan Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendidik Satuan Pendidik Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.03 63	Penyediaan infrastruktur TIK	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.03 64	Penataan Ruang/Sudut Baca	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.03 65	Fasilitasi sertifikasi kompetensi Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.03 66	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.03 67	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.03 68	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1.361.804.950	1.497.985.445
1	01 02 1.03 69	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.03 70	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	100 Ruang	20.968.618.000	23.065.479.800
1	01 02 1.03 71	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 Satuan Pendidikan	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.03 72	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.03 74	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.03 75	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	100.000.000	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
					Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	01 02 1.03 76	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.03 77	Rehabilitasi Sedarng/Berat Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.03 78	Rehabilitasi Sedarng/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedarng/Berat	1 Ruang	100.000.000	110.000.000
1	01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			600.000.000	715.000.000
1	01 03 1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			350.000.000	385.000.000
1	01 03 1.01 02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
1	01 03 1.01 03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	50 Buku	50.000.000	55.000.000
1	01 03 1.01 04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	50 Orang	50.000.000	55.000.000
1	01 03 1.01 05	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah yang telah dinilai/ditelaah	100 Buku	50.000.000	55.000.000
1	01 03 1.01 06	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	1 Dokumen	50.000.000	55.000.000
1	01 03 1.01 07	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	50.000.000	55.000.000
1	01 03 1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			250.000.000	330.000.000
1	01 03 1.02 02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	1 Dokumen	50.000.000	55.000.000
1	01 03 1.02 03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	100 Buku	0	55.000.000
1	01 03 1.02 04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	50 Orang	50.000.000	55.000.000
1	01 03 1.02 05	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	100 Buku	100.000.000	110.000.000
1	01 03 1.02 06	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan khusus yang tersusun	1 Dokumen	50.000.000	55.000.000
1	01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			133.952.054.846	140.303.368.780
1	01 04 1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			133.952.054.846	140.303.368.780
1	01 04 1.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Dokumen	133.676.265.046	140.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	01		1.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 laporan	275.789.800	303.368.780
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			100.000.000	110.000.000
1	01	05	1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			100.000.000	110.000.000
1	01	05	1.01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	50.000.000	55.000.000
1	01		1.01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	50.000.000	55.000.000
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						5.201.028.305	5.721.131.136
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			2.939.396.471	3.233.336.118
2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.694.264.171	1.863.690.588
2	22	02	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	1 Objek	903.906.300	994.296.930
2	22	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1 Orang	690.357.871	759.393.658
2	22	02	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	1 Unit	100.000.000	110.000.000
2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			300.000.000	330.000.000
2	22	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	100.000.000	110.000.000
2	22	02	1.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
2	22	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	1 Sertifikat	100.000.000	110.000.000
2	22	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			945.132.300	1.039.645.530
2	22	02	1.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	100.000.000	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
2	22	02	1.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1 Orang	100.000.000	110.000.000
2	22	02	1.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	1 Unit	745.132.300	819.645.530
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			503.831.834	554.215.018
2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			503.831.834	554.215.018
2	22	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	1 Orang	303.831.834	334.215.018
2	22	03	1.01	02	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	1 Sertifikat	100.000.000	110.000.000
2	22	03	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	100.000.000	110.000.000
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			957.800.000	1.053.580.000
2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			957.800.000	1.053.580.000
2	22	04	1.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1 Orang	100.000.000	110.000.000
2	22	04	1.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 Unit	657.800.000	723.580.000
2	22	04	1.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
2	22	04	1.01	04	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			550.000.000	605.000.000
2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			200.000.000	220.000.000
2	22	05	1.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	1 Objek	100.000.000	110.000.000
2	22	04	1.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 Objek	100.000.000	110.000.000
2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			250.000.000	275.000.000
2	22	05	1.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	1 Objek	100.000.000	110.000.000
2	22	04	1.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	50.000.000	55.000.000
2	22	05	1.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	50.000.000	55.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	22	04	1.02	04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Orang	50.000.000	55.000.000
2	22	05	1.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			100.000.000	110.000.000
2	22	05	1.03	01	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	1 Objek	50.000.000	55.000.000
2	22	04	1.03	02	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	1 Objek	50.000.000	55.000.000
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			250.000.000	275.000.000
2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			250.000.000	275.000.000
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	1 Unit	50.000.000	55.000.000
2	22	06	1.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	100 Orang	50.000.000	55.000.000
2	22	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	50.000.000	55.000.000
2	22	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit	50.000.000	55.000.000
2	22	06	1.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	50.000.000	55.000.000
UPTD PENANGANAN SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS											3.694.551.965	4.039.686.052
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											3.694.551.965	4.039.686.052
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			2.270.307.174	2.484.016.782
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			49.764.000	54.740.400
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	49.764.000	54.740.400
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			448.362.794	479.877.964
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.180.245	1.298.269
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	31.090.549	34.199.605
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.901.700	28.491.870
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	13.464.500	1.481.040
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	13.094.400	14.403.840

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	363.631.400	400.003.340
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.472.180.380	1.619.398.418
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.640.000	2.904.000
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	63.919.680	70.311.648
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.405.620.700	1.546.182.770
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			300.000.000	330.000.000
1	01		1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01		1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01		1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.424.244.791	1.555.669.270
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.424.244.791	1.555.669.270
2	22	06	1.01	51	Pembinaan Kelembagaan dan Managemen Sekolah Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Managemen	1 Satuan Pendidikan	1.424.244.791	1.555.669.270
UPTD MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA											5.598.999.650	5.937.277.114
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.755.961.000	1.709.934.599
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1.755.961.000	1.709.934.599
	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			62.832.000	69.115.200
	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Dokumen	62.832.000	69.115.200
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			284.506.872	312.957.559
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.901.065	37.291.171
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	79.117.137	87.028.851
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	43.108.670	47.419.537
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.920.000	8.712.000
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	20.460.000	22.506.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			175.886.128	193.474.740
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.500.000	6.050.000
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	96.334.128	105.967.540
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	74.052.000	81.457.200
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.232.736.000	1.134.387.100
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.031.261.000	1.134.387.100
1	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	101.475.000	111.622.500
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						3.843.038.650	4.227.342.515
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						1.764.646.400	1.941.111.040
2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.073.406.400	1.180.747.040
2	22	02	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	1 Objek	903.906.300	994.296.930
2	22	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1 Orang	169.500.100	186.450.110
2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			691.240.000	760.364.000
2	22	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	352.851.400	388.136.540
2	22	02	1.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	338.388.600	372.227.460
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						2.078.392.250	2.286.231.475
2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			2.078.392.250	2.286.231.475
2	22	06	1.01	06	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	2.078.392.250	2.286.231.475
					UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN						1.215.999.267	1.296.499.193
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.215.999.267	1.296.499.193
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						120.966.854	133.963.539
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			38.214.000	42.035.400
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	38.214.000	42.035.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			71.202.854	79.223.139
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Paket	30.202.854	33.223.139
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Paket	5.000.000	5.500.000
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	12 Paket	12.000.000	13.500.000
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12.000.000	13.500.000
1	01	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.000.000	13.500.000
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			11.550.000	12.705.000
1	01	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	11.550.000	12.705.000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						1.095.032.413	1.162.535.654
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			745.032.413	819.535.654
1	01	02	1.01	59	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Pelatihan Penggunaan Aplikasi di Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	745.032.413	819.535.654
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			250.000.000	233.000.000
1	01	02	1.02	52	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Pelatihan Penggunaan Aplikasi di Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	250.000.000	233.000.000
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			100.000.000	110.000.000
1	01	04	1.03	58	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	81 Orang	100.000.000	110.000.000
					Kantor Cabang Dikbud Kab. Bombana						1.782.484.737	1.960.433.211
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.782.484.737	1.960.433.211
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			1. Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			520.543.737	572.898.111
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			27.588.000	30.346.800
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	27.588.000	30.346.800
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			460.326.760	506.359.436
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	110.000.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	64.325.360	70.757.896
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.171.000	6.788.100
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	89.830.400	98.813.440
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			20.628.977	22.691.875
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.750.000	3.025.000
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	17.878.977	19.666.875
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			12.000.000	13.500.000
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.000.000	13.500.000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			⁠ Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1.261.941.000	1.387.535.100
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	⁠ Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			561.941.000	617.535.100
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	⁠ Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	⁠ Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik	33.970.500	36.767.550
1	01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	⁠ Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	75	Bimbingan Teknik, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	⁠ Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	327.970.500	360.767.550
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	⁠ Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			400.000.000	440.000.000
1	01	02	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	⁠ Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	⁠ Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	⁠ Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	73	Bimbingan Teknik, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	⁠ Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	100.000.000	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
					Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	⁠ Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		300.000.000	330.000.000	
1	01 02 1.03 38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	⁠ Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.03 44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	⁠ Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta Didik	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.03 73	Bimbingan Teknik, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	⁠ Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	100.000.000	110.000.000
		Kantor Cabang Dikbud Kab. Buton					2.105.831.600	2.316.714.760	
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					2.105.831.600	2.316.714.760	
1	01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.005.831.600	1.106.714.760	
1	01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		27.588.000	30.346.800	
1	01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	27.588.000	30.346.800
1	01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		954.882.580	1.050.370.838	
1	01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.401.380	71.941.518
1	01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.402.000	7.042.200
1	01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
1	01 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
1	01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	583.079.200	641.387.120
1	01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		11.361.020	12.497.122	
1	01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.750.000	3.025.000
1	01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.611.020	9.472.122
1	01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12.000.000	13.500.000	
1	01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.000.000	13.500.000
1	01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	⁠ Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.100.000.000	1.210.000.000	
1	01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	⁠ Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		500.000.000	550.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	1.01	37	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	' Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	' Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	' Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	' Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	75	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	' Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	' Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			300.000.000	330.000.000
1	01	02	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	' Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	' Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	73	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	' Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	' Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			300.000.000	330.000.000
1	01	02	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	' Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	' Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta Didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	73	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	' Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	100.000.000	110.000.000
					Kantor Cabang Dikbud Kab. Buton Utara						1.909.837.030	2.100.820.733
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.909.837.030	2.100.820.733
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	' Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			541.444.280	595.588.708
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			27.588.000	30.346.800
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	' Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	27.588.000	30.346.800
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	' Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			502.495.260	552.744.786
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	' Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	' Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	64.649.860	71.114.846

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.171.000	6.788.100
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	131.674.400	144.841.840
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			11.361.020	12.497.122
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.750.000	3.025.000
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.611.020	9.472.122
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.368.392.750	1.505.232.025
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			668.392.750	735.232.025
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	75	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	368.392.750	405.232.025
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			400.000.000	440.000.000
1	01	02	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	73	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			300.000.000	330.000.000
1	01	02	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta Didik	100.000.000	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
					Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	01 02 1.03 73	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	100.000.000	110.000.000
Kantor Cabang Dikbud Kab. Kolaka Timur									
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.714.632.380	1.886.095.618
1	01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			492.048.780	541.253.658
1	01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			483.481.760	531.829.936
1	01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	68.313.960	75.145.356
1	01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.091.000	3.400.100
1	01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
1	01 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
1	01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	112.076.800	123.284.480
1	01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			8.567.020	9.423.722
1	01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.200.000	2.420.000
1	01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	6.367.020	7.003.722
1	01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.222.583.600	1.344.841.960
1	01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			650.995.600	716.095.160
1	01 02 1.01 39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.01 45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik	66.000.000	72.600.000
1	01 02 1.01 54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01 02 1.01 75	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	384.995.600	423.495.160
1	01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			344.000.000	378.400.000
1	01 02 1.02 31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	⁠ Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik	44.000.000	48.400.000
1	01	02	1.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	⁠ Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	73	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	⁠ Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	⁠ Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			227.588.000	250.346.800
1	01	02	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	⁠ Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	⁠ Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta Didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	73	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	⁠ Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	27.588.000	30.346.800
Kantor Cabang Dikbud Kab. Kolaka Utara											1.672.912.000	1.840.203.200
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.672.912.000	1.840.203.200
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			⁠ Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			590.426.500	649.469.150
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			27.588.000	30.346.800
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	27.588.000	30.346.800
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			460.748.500	506.823.350
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.474.800	77.522.280
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.402.000	7.042.200
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	83.871.700	92.258.870
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			102.090.000	112.299.000
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.090.000	2.299.000
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	⁠ Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025					
					Indikator Kinerja	Target							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				1.082.485.500	1.190.734.050
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				460.485.500	506.534.050
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik		33.000.000	36.300.000
1	01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	1 Orang		100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	75	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang		227.485.500	250.234.050
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				322.000.000	354.200.000
1	01	02	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik		22.000.000	24.200.000
1	01	02	1.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	1 Orang		100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	73	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang		100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				300.000.000	330.000.000
1	01	02	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta Didik		100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	73	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang		100.000.000	110.000.000
					Kantor Cabang Dikbud Kab. Konawe Utara							2.485.910.860	2.734.801.946
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							2.485.910.860	2.734.801.946
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				1.485.910.860	1.634.801.946
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				27.588.000	30.346.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	27.588.000	30.346.800
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.323.944.460	1.456.338.906
k,f	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	292.465.360	321.711.896
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.326.000	8.058.600
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa/Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	724.153.100	796.568.410
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			22.378.400	24.616.240

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.400.000	4.840.000
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	17.978.400	19.776.240
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			12.000.000	13.500.000
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.000.000	13.500.000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.000.000.000	1.100.000.000
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			400.000.000	440.000.000
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	20000 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	75	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			400.000.000	440.000.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	73	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			200.000.000	220.000.000
1	01	02	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa; - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta Didik	100.000.000	110.000.000
					Kantor Cabang Dikbud Kab. Konawe Kepulauan						1.569.810.210	1.859.091.220
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.569.810.210	1.859.091.220
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			321.478.610	463.926.460
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			27.588.000	30.346.800
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	27.588.000	30.346.800
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			269.765.970	406.742.556
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.765.360	10.741.896
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.171.000	6.788.100
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10	110.000.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	53.829.600	59.212.560
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			12.124.640	13.337.104
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.750.000	3.025.000
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	9.374.640	10.312.104
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			12.000.000	13.500.000
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.000.000	13.500.000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.248.331.600	1.395.164.760
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			548.331.600	614.164.760
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik	100.000.000	121.000.000
1	01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	75	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	248.331.600	273.164.760
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			400.000.000	451.000.000
1	01	02	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik	100.000.000	121.000.000
1	01	02	1.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	73	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			300.000.000	330.000.000
1	01	02	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta Didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	73	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	100.000.000	110.000.000
Kantor Cabang Dikbud Kab. Konawe Selatan											2.430.835.080	2.673.918.588
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											2.430.835.080	2.673.918.588
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.330.835.080	1.463.918.588
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			27.588.000	30.346.800
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	27.588.000	30.346.800
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.291.886.060	1.421.074.666
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	290.485.360	319.533.896
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.402.000	7.042.200
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	694.998.700	764.498.570
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			11.361.020	12.497.122
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.750.000	3.025.000
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.611.020	9.472.122
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.100.000.000	1.210.000.000
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			400.000.000	440.000.000
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	75	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	100.000.000	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	* Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			400.000.000	440.000.000
1	01	02	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	* Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	* Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	* Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	73	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	* Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	* Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			300.000.000	330.000.000
1	01	02	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	* Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	* Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta Didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	73	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	* Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	100.000.000	110.000.000
					Kantor Cabang Dikbud Kab. Muna						2.055.463.280	2.261.009.608
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						2.055.463.280	2.261.009.608
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			562.977.880	619.275.668
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			27.588.000	30.346.800
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	27.588.000	30.346.800
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			524.028.860	576.431.746
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	64.649.860	71.114.846
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.171.000	6.788.100
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	153.208.000	168.528.800
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			11.361.020	12.497.122

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.750.000	3.025.000
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.611.020	9.472.122
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.492.485.400	1.641.733.940
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			792.485.400	871.733.940
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	75	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	492.485.400	541.733.940
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			400.000.000	440.000.000
1	01	02	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	73	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			300.000.000	330.000.000
1	01	02	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta Didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	73	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	100.000.000	110.000.000
					Kantor Cabang Dikbud Kab. Wakatobi						1.940.293.930	2.134.623.323
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.940.293.930	2.134.623.323
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			553.911.780	609.602.958
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			27.588.000	30.346.800

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	27.588.000	30.346.800
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			502.962.760	553.259.036
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	64.765.360	71.241.896
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.171.000	6.788.100
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	132.026.400	145.229.040
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			11.361.020	12.497.122
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.750.000	3.025.000
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.611.020	9.472.122
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			12.000.000	13.500.000
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.000.000	13.500.000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.386.382.150	1.525.020.365
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			686.382.150	755.020.365
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	75	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	386.382.150	425.020.365
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			400.000.000	440.000.000
1	01	02	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	73	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			300.000.000	330.000.000
1	01	02	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta Didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	73	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	100.000.000	110.000.000
					Kantor Cabang Dikbud BauBau - Kab. Buton Selatan						1.920.077.743	2.112.085.518
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.920.077.743	2.112.085.518
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			820.077.743	902.085.518
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			27.588.000	30.346.800
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	27.588.000	30.346.800
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			690.905.743	759.996.318
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	-Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.050.083	20.955.092

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.224.260	9.046.686
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	363.631.400	399.994.540
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			101.584.000	111.742.400
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.584.000	1.742.400
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	*Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	*Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.100.000.000	1.210.000.000
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	*Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			400.000.000	440.000.000
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	*Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	*Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik	100.000.000	110.000.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	*Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	75	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	*Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	*Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			400.000.000	440.000.000
1	01	02	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	*Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	*Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	*Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	73	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	*Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	*Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			300.000.000	330.000.000
1	01	02	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	*Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	*Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta Didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	73	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	*Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	100.000.000	110.000.000
					Kantor Cabang Dikbud Rayon Kab.Muna Barat - Kab. Buton Tengah						1.757.063.360	1.932.769.696
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.757.063.360	1.932.769.696

Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			673.552.960	740.908.256	
1	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			27.588.000	30.346.800	
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	27.588.000	30.346.800
1	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			629.579.360	692.537.296	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	110.745.360	121.819.896
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.326.000	8.058.600
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	211.508.000	232.658.800
1	01	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			16.385.600	18.024.160	

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.750.000	3.025.000
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	13.635.600	14.999.160
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			12.000.000	13.500.000
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.000.000	13.500.000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.083.510.400	1.191.861.440
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			363.949.400	400.344.340
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik	66.000.000	72.600.000
1	01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	1 Orang	22.781.000	25.059.100
1	01	02	1.01	75	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	175.168.400	192.685.240
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			419.561.000	461.517.100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01	02	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta didik	113.025.000	124.327.500
1	01	02	1.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	1 Orang	20.504.000	22.554.400
1	01	02	1.02	73	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	186.032.000	204.635.200
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			300.000.000	330.000.000
1	01	02	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta Didik	100.000.000	110.000.000
1	01	02	1.03	73	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	100.000.000	110.000.000
1	01				Urusan Kesehatan						891.524.944.110	943.035.117.329
1	02				Dinas Kesehatan						55.417.582.900	61.078.532.190
1	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Provinsi	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	37.140.719.900	40.987.891.890
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	12 Dokumen	1.745.304.000	1.919.834.400
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	4 Dokumen	1.331.000.000	1.464.100.000
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13.310.000	14.641.000
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12.100.000	13.310.000
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.922.000	10.914.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9.922.000	10.914.200
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	6.050.000	6.655.000
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	363.000.000	399.300.000
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75 Dokumen	25.302.631.400	27.965.994.540
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah ASN mendapatkan Gaji dan Tunjangan Bulanan	423 Orang/Bulan	24.872.718.400	27.493.090.240
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	66.550.000	73.205.000
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 Dokumen	13.310.000	14.641.000
1	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD	12 Dokumen	13.310.000	14.641.000
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	19 Laporan	6.655.000	7.320.500
1	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah Dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1 Dokumen	13.310.000	14.641.000
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	38 Laporan	303.468.000	333.814.800
1	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	3 Dokumen	13.310.000	14.641.000
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	34 Dokumen	193.957.500	213.353.250
1	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	3 Dokumen	13.310.000	14.641.000
1	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah Dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	2 Dokumen	55.950.400	61.545.440
1	02	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	6 Laporan	13.310.000	14.641.000
1	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah Laporan Hasil pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	30.401.800	33.441.980
1	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	9 Laporan	13.310.000	14.641.000
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	9 Laporan	54.365.300	59.801.830

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
					Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	02 01 1.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah Dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah SKPD	4 Dokumen	13.310.000	14.641.000
1	02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8 Laporan	685.600.000	754.160.000
1	02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah Unit Peningkatan sarana dan Prasarana disiplin pegawai	1 Unit	50.000.000	55.000.000
1	02 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	jumlah dokumen pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	200.000.000	220.000.000
1	02 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah Dokumen pendataan dan pengelolaak administrasi kepegawaian	1 Dokumen	54.450.000	59.895.000
1	02 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sisten informasi kepegawaian	1 Dokumen	36.300.000	39.930.000
1	02 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	jumlah dokumen monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	2 Dokumen	42.350.000	46.585.000
1	02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan palatihan	30 Orang	242.000.000	266.200.000
1	02 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah omg yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	30 Orang	30.250.000	33.275.000
1	02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	jumlah omg yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peratiran perundang-undangan	30 Orang	30.250.000	33.275.000
1	02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	194 Laporan	2.575.357.000	2.832.892.700
1	02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bagunan kantor yang tersedia	3 Paket	22.627.000	24.889.700
1	02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	121.000.000	133.100.000
1	02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	60.500.000	66.550.000
1	02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	229.900.000	252.890.000
1	02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	1 Paket	181.500.000	199.650.000
1	02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	21.780.000	23.958.000
1	02 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket	2.050.000	2.255.000
1	02 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	25 Laporan	242.000.000	266.200.000
1	02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	160 Laporan	1.694.000.000	1.863.400.000
1	02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	6 Unit	4.280.900.000	4.708.990.000
1	02 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	400.000.000	440.000.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah Unit kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	52.000.000	57.200.000
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	400.000.000	440.000.000
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	40 Unit	653.400.000	718.740.000
1	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	1.200.000.000	1.320.000.000
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 Unit	1.028.500.000	1.131.350.000
1	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantortatau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	547.000.000	601.700.000
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Usuran	15 Laporan	1.318.010.000	1.449.811.000
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	1 Laporan	54.450.000	59.895.000
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	12 Laporan	1.220.000.000	1.342.000.000
1	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	14.520.000	15.972.000
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	1 Laporan	29.040.000	31.944.000
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	102 Unit	1.038.960.000	1.142.856.000
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	6 Unit	61.710.000	67.881.000
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	40 Unit	60.500.000	66.550.000
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	4 Unit	151.250.000	166.375.000
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	423.500.000	465.850.000
1	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinkes	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	342.000.000	376.200.000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHANA UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	PROVINSI	PERSENTASE PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LENGKAP	80%	12.320.318.000	13.537.340.800
									INSIDENSI HIV (Per 100.000 Penduduk)	0,18%		
									CAKUPAN PENEMUAN DAN PENGOBATAN TBC (TREATMENT COVERAGE)	70%		
									PERSENTASE IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA ANAK USIA 12-23 BULAN	92%		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MERESPON PERINGATAN DINI KLB (ALERT SYSTEM) MINIMAL 80%	100%		
								PREVALENSI OBESITAS PADA PENDUDUK USIA > 18 TAHUN	30%		
								PERSENTASE KAB/KOTA YANG DIBINA DAN DIPERSIAPKAN AKREDITASINYA	100%		
1	02	02	1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Saran, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan	3 Unit	5.953.670.000	6.540.028.000
1	02	02	1.01	02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar	2 Unit	2.025.000.000	2.227.500.000
1	02	02	1.01	04 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Persentase pemanfaatan Balai laboratorium	1 Unit	205.000.000	225.500.000
1	02	02	1.01	06 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Pelayanan kesehatan di DTPK (Pelayanan Sarana, Prasarana, Gugus pulau, Pelayanan Kesehatan yang dilakukan pengembangan)	5 Layanan	81.070.000	89.177.000
1	02	02	1.01	07 Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintenance Center	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Unit pemeliharaan fasilitas kesehatan Regional/ regional maintenance center yang dilakukan pengembangan	1 Unit	1.300.000.000	1.430.000.000
1	02	02	1.01	08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang direhabilitasi	2 Unit	442.000.000	486.200.000
1	02	02	1.01	10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan	4 Unit	284.000.000	312.400.000
1	02	02	1.01	13 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah unit Alat Kalibrasi yang disediakan dan dipelihara	6 Unit	302.500.000	332.750.000
1	02	02	1.01	17 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Set Alat Kesehatan/Penunjang Medik Fasyankes yang dipelihara	1 Unit	242.000.000	266.200.000
1	02	02	1.01	21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	2 Dokumen	509.100.000	551.001.000
1	02	02	1.01	22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang disediakan	3 Paket	563.000.000	619.300.000
1	02	02	1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Layanan UKP dan UKM Rujukan	6 Dokumen	5.367.067.000	5.897.773.700
1	02	02	1.02	01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Penduduk yang mendapatkan Layanan Kesehatan yang terdampak krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi sesuai standar (Orang/Kab/Kota)	4020 Orang	140.360.000	154.396.000
1	02	02	1.02	02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan	3770 Orang	242.000.000	266.200.000
1	02	02	1.02	03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	6 Dokumen	696.080.000	765.688.000
1	02	02	1.02	04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	2 Dokumen	96.800.000	106.480.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
					Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 02 02 1.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	96.800.000	106.480.000
1 02 02 1.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	733.930.000	807.323.000
1 02 02 1.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	532.480.000	585.728.000
1 02 02 1.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	389.620.000	428.582.000
1 02 02 1.02 09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Laporan pelaksanaan pelayanan promosi kesehatan	3 Dokumen	199.650.000	219.615.000
1 02 02 1.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	145.200.000	159.720.000
1 02 02 1.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5 Dokumen	78.650.000	86.515.000
1 02 02 1.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		jumlah Jamaah Haji Yang Mendapatkan Pengukuran Kebugaran	1 Dokumen	96.800.000	106.480.000
1 02 02 1.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	145.200.000	159.720.000
1 02 02 1.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	20 Orang	35.937.000	39.530.700
1 02 02 1.02 16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1 Dokumen	423.500.000	465.850.000
1 02 02 1.02 17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	193.600.000	212.960.000
1 02 02 1.02 18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	181.500.000	199.650.000
1 02 02 1.02 19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	125.840.000	138.424.000
1 02 02 1.02 20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dokumen	54.450.000	53.895.000
1 02 02 1.02 21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60.500.000	66.550.000
1 02 02 1.02 25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang di distribusikan	1 Paket	96.800.000	106.480.000
1 02 02 1.02 26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah dokumen hasil upaya pengurangan resiko krisis kesehatan	1 Paket	145.200.000	159.720.000
1 02 02 1.02 30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1 Dokumen	456.170.000	501.787.000
1 02 02 1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Informasi dan Data Program Kesehatan yang Efektif	1 Dokumen	267.531.000	294.284.100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	11 Dokumen	267.531.000	294.284.100
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Mutu	1 Dokumen	732.050.000	805.255.000
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		jumlah rumah sakit yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar	30 Unit	157.300.000	173.030.000
1	02	02	1.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	30 Unit	242.000.000	266.200.000
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	17 Unit	332.750.000	366.025.000
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	PROVINSI	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN TENAGA KESEHATAN SESUAI STANDAR	35%	4.612.375.000	5.073.612.500
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Tenaga Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2754 Orng	102.850.000	113.135.000
1	02	03	1.01	01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)	2754 Orang	42.350.000	46.585.000
1	02	03	1.01	02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Standar Sumber daya manusia kesehatan yang terdistribusi	2754 Orang	60.500.000	66.550.000
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Kompetensi Teknis SDMK	1 Dokumen	4.509.525.000	4.960.477.500
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	240 Orang	4.235.000.000	4.658.500.000
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	274.525.000	301.977.500
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	PROVINSI	PERSENTASE PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) CABANG DAN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL (UKOT) YANG MEMENUHI KETENTUAN PERIZINAN BERUSAHA	80%	72.600.000	79.860.000
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyatur Alat Kesehatan (PAK)	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Penerbitan Pengakuan PBF dan PAK	1 Dokumen	36.300.000	39.930.000
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah PBF cabang dan cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut penerbitan perizinan	20 Sarana	36.300.000	39.930.000
1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Penerbitan Izin UKOT	1 Dokumen	36.300.000	39.930.000
1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (sarana)	10 Sarana	36.300.000	39.930.000
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	PROVINSI	Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan GERMAS (%)	85%	1.271.570.000	1.399.827.000
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Kemitraan Lintas Sektor Dalam Upaya Germas	1 Dokuemen	526.560.000	580.316.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	5 Dokumen	526.560.000	580.316.000
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi PHBS	1 Dokumen	624.010.000	686.411.000
1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku hidup bersih dan sehat	5 Dokumen	624.010.000	686.411.000
1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	121.000.000	133.100.000
1	02	05	1.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	2 Dokumen	121.000.000	133.100.000
1	02				Rumah Sakit Jiwa						151.928.244.310	133.561.297.639
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100%	41.172.000.000	33.767.000.000
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	6 Dokumen	75.000.000	60.000.000
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	45.000.000	30.000.000
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Laporan	10.000.000	10.000.000
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	16 Dokumen	26.941.604.000	27.941.604.000
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	230 orang/bulan	26.931.604.000	27.931.604.000
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	5.000.000
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	5.000.000	5.000.000
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.000.000	5.000.000
1	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	5.000.000	5.000.000

Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46 Dokumen	950.000.000	209.000.000
1	02	01	1.05	01 Peningkatan sarana dan Prasarana disiplin Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	150.000.000	150.000.000
1	02	01	1.05	02 Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapan / Jumlah pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS. Jiwa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	500.000.000	-
1	02	01	1.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang	150.000.000	29.500.000
1	02	01	1.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19 Orang	150.000.000	29.500.000
1	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	87 Dokumen	1.850.000.000	1.300.000.000
1	02	01	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	200.000.000
1	02	01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	200.000.000
1	02	01	1.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	300.000.000	200.000.000
1	02	01	1.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	250.000.000	250.000.000
1	02	01	1.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	250.000.000	150.000.000
1	02	01	1.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 dokumen	20.000.000	20.000.000
1	02	01	1.06	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	30.000.000	30.000.000
1	02	01	1.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	600.000.000	250.000.000
1	02	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah yang Tersedia	36 Unit	3.470.000.000	1.290.000.000
1	02	01	1.07	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	1.400.000.000	0
1	02	01	1.07	05 Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	980.000.000	500.000.000
1	02	01	1.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	600.000.000	300.000.000
1	02	01	1.07	07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	40.000.000	40.000.000
1	02	01	1.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	450.000.000	450.000.000
1	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Usuran	38 Laporan	2.520.000.000	1.160.000.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	10.000.000
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	350.000.000	350.000.000
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.160.000.000	800.000.000
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	66 Unit	5.360.396.000	1.801.396.000
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	100.000.000	100.000.000
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	200.396.000	200.396.000
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	510.000.000	350.000.000
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	2.500.000.000	151.000.000
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RS Jiwa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	2.050.000.000	1.000.000.000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RS Jiwa	Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	109.281.244.310	98.594.297.639
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RS Jiwa	Jumlah Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alkes UKP dan UKM Rujukan	38 Unit	96.718.244.310	83.034.821.419
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RS Jiwa	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	4 Unit	45.000.000.000	73.994.297.639
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RS Jiwa	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	2.127.920.000	4.430.523.780
1	02	02	1.01	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RS Jiwa	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	8 Unit	5.000.000	190.000.000
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RS Jiwa	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	30 Unit	80.000.000	200.000.000
1	02	02	1.01	26	Pengembangan Rumah Sakit	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RS Jiwa	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	45.330.324.310	-
1	02	02	1.01	27	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RS Jiwa	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	4.175.000.000	4.220.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RS Jiwa	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	5 Dokumen	10.062.000.000	12.999.476.220
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RS Jiwa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4 Dokumen	269.000.000	270.000.000
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RS Jiwa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	9.793.000.000	12.729.476.220
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RS Jiwa	Jumlah Unit yang tersedia Sistem Informasi terintegrasi	1 Unit	1.000.000	60.000.000
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RS Jiwa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen	1.000.000	60.000.000
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RS Jiwa	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	24 Unit	2.500.000.000	2.500.000.000
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RS Jiwa	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	24 unit	2.500.000.000	2.500.000.000
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RS Jiwa	Persentase Jumlah Tenaga yang bersertifikat	100%	1.200.000.000	900.000.000
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RS Jiwa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi Mutu dan Standar Kompetensi Teknis	133 Orang	1.200.000.000	900.000.000
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumberdaya Manusia Kesehatan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RS Jiwa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi Mutu dan Standar Kompetensi Teknis	133 Orang	1.200.000.000	900.000.000
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	RS Jiwa	Persentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	100%	275.000.000	300.000.000
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	RS Jiwa	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	2 Dokumen	275.000.000	300.000.000
1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	RS Jiwa	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	275.000.000	300.000.000
1	02				Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas						316.631.420.000	351.405.062.000
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSUD Bahteramas	Persentase capaian pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	89.631.420.000	98.605.062.000
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSUD Bahteramas	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	210.000.000	241.500.000
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSUD Bahteramas	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	57.000.000	65.550.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSUD Bahteramas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	153.000.000	175.950.000
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSUD Bahteramas	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	88.146.200.000	96.960.820.000
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSUD Bahteramas	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	902 orang/bulan	88.056.000.000	96.861.600.000
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSUD Bahteramas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	24 laporan	90.200.000	99.220.000
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSUD Bahteramas	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	77 Dokumen	33.220.000	36.542.000
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSUD Bahteramas	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	17 laporan	33.220.000	36.542.000
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang usuran pemerintah daerah	100%	450.000.000	495.000.000
1	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	450.000.000	495.000.000
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSUD Bahteramas	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Laporan	792.000.000	871.200.000
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSUD Bahteramas	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	792.000.000	871.200.000
1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RSUD Bahteramas	Persentase capaian pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100%	227.000.000.000	252.800.000.000
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RSUD Bahteramas	Tersedianya fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	4 Unit	62.000.000.000	71.300.000.000
1	02	02	1.01	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RSUD Bahteramas	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	6.000.000.000	6.900.000.000
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RSUD Bahteramas	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	1 unit	20.000.000.000	23.000.000.000
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RSUD Bahteramas	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	1 unit	30.000.000.000	34.500.000.000
1	02	02	1.01	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit Jumlah Barang Penunjang	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RSUD Bahteramas	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	1 Unit	6.000.000.000	6.900.000.000
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	4 Dokumen	165.000.000.000	181.500.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	4 dokumen	165.000.000.000	181.500.000.000
1	02				Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah, dan Otak Oputa Yi Koo						367.547.696.900	396.990.225.500
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 Persen	243.561.696.900	273.754.225.500
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Kegiatan	45.000.000	45.000.000
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	30.000.000	30.000.000
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.000.000	5.000.000
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah kegiatan administrasi perangkat daerah	4 Kegiatan	71.249.696.900	79.662.225.500
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah ASN mendapatkan Gaji dan Tunjangan Bulanan (Orang)	558 Orang	70.989.696.900	79.402.225.500
1	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5.000.000	5.000.000
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	19 Laporan	250.000.000	250.000.000
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah kegiatan administrasi BMD SKPD	2 Kegiatan	35.000.000	35.000.000
1	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	30.000.000	30.000.000
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	3 Kegiatan	982.000.000	1.082.000.000
1	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	50.000.000	50.000.000
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	312.000.000	312.000.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	600.000.000	700.000.000
1	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	20.000.000	20.000.000
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Kegiatan	4.350.000.000	5.100.000.000
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	150.000.000
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	250.000.000
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	300.000.000	200.000.000
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	500.000.000	550.000.000
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	300.000.000	350.000.000
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	20 Dokumen	50.000.000	100.000.000
1	02	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	1.300.000.000	1.700.000.000
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.700.000.000	1.800.000.000
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Kegiatan	4.860.000.000	4.260.000.000
1	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	2.500.000.000	1.500.000.000
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	750.000.000	750.000.000
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	300.000.000	300.000.000
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	300.000.000	200.000.000
1	02	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10.000.000	10.000.000
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1.000.000.000	1.500.000.000
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Kegiatan	9.910.000.000	10.910.000.000
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	30.000.000	30.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	5.000.000.000	6.000.000.000
1	02	01	1.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	4.880.000.000	4.880.000.000
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Kegiatan	2.130.000.000	2.660.000.000
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	20.000.000	20.000.000
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	20.000.000	20.000.000
1	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	5 Unit	25.000.000	30.000.000
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	12 Unit	15.000.000	20.000.000
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	1.500.000.000	2.000.000.000
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	550.000.000	570.000.000
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	1 Kegiatan	150.000.000.000	170.000.000.000
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	RSJPDO	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	150.000.000.000	170.000.000.000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RSJPDO	Persentase cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 Persen	121.810.000.000	120.910.000.000
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Saran, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RSJPDO	Jumlah Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	9 Kegiatan	117.700.000.000	115.700.000.000
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RSJPDO	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	5 unit	5.000.000.000	3.000.000.000
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RSJPDO	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	50.000.000.000	55.000.000.000
1	02	02	1.01	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RSJPDO	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	17 Unit	10.750.000.000	1.000.000.000
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RSJPDO	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	15 Unit	550.000.000	600.000.000
1	02	02	1.01	20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RSJPDO	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	5 Unit	100.000.000	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
1	02	02	1.01	26	Pengembangan Rumah Sakit	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RSJPDO	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
1	02	02	1.01	27	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RSJPDO	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	2 Paket	50.300.000.000,00	55.000.000.000,00
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RSJPDO	Jumlah Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2 Kegiatan	3.100.000.000	4.200.000.000
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RSJPDO	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen	100.000.000	200.000.000
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RSJPDO	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	10 Dokumen	3.000.000.000	4.000.000.000
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RSJPDO	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1 Kegiatan	1.000.000.000	1.000.000.000
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RSJPDO	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Unit Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	1 Unit	1.000.000.000	1.000.000.000
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RSJPDO	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1 Kegiatan	10.000.000	10.000.000
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	RSJPDO	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	3 Unit	10.000.000	10.000.000
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	RSJPDO	Persentase cakupan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	100 Persen	1.876.000.000	1.976.000.000
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	RSJPDO	Jumlah Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi	1 Kegiatan	1.176.000.000	1.176.000.000
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	RSJPDO	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memenuhi Standar Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14 Orang	1.176.000.000	1.176.000.000
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	RSJPDO	Jumlah Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1 Kegiatan	700.000.000	800.000.000
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	RSJPDO	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	70 Orang	700.000.000	800.000.000
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	RSJPDO	Persentase cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100%	300.000.000	350.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	RSJPDO	Jumlah Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif tingkat Daerah Provinsi	1 Kegiatan	300.000.000	350.000.000
1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	RSJPDO	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	3 Dokumen	300.000.000	350.000.000
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						1.172.147.448.500	1.265.848.200.900
1	03				DINAS Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang						316.663.348.000	403.923.015.400
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			13.713.348.000	14.398.015.400
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		32 Dokumen	596.468.000	626.291.400
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000	5.250.000
1	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000	5.250.000
1	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.250.000
1	03	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000	5.250.000
1	03	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.250.000
1	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	15.000.000	15.750.000
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	556.468.000	584.291.400
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	107 Dokumen	8.242.320.000	8.654.436.000
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/Bulan	8.045.000.000	8.447.250.000
1	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	5.250.000
1	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	192.320.000	201.936.000
1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24 Dokumen	67.560.000	70.938.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	03	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	37.560.000	39.438.000
1	03	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	30.000.000	31.500.000
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8 Laporan	180.000.000	188.000.000
1	03	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	150.000.000	157.500.000
1	03	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
1	03	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
1	03	01	1.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	2 Laporan	10.000.000	10.000.000
1	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.000.000	10.500.000
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1223 Laporan	1.757.000.000	1.844.850.000
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	60.000.000	63.000.000
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	70.000.000	73.500.000
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1173 Dokumen	7.000.000	7.350.000
1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000	21.000.000
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.500.000.000	1.575.000.000
1	03	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000	105.000.000
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	187 Unit	1.160.000.000	1.218.000.000
1	03	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	500.000.000	525.000.000
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	650.000.000	682.500.000
1	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	170 Unit	10.000.000	10.500.000
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan	36 Laporan	1.150.000.000	1.207.500.000
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.000.000	6.300.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	460.000.000	483.000.000
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	684.000.000	718.200.000
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	82 Unit	560.000.000	588.000.000
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	300.000.000	315.000.000
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit	10.000.000	10.500.000
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000	210.000.000
1	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000	52.500.000
1	03	03			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.000.000.000	1.750.000.000
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.000.000.000	1.750.000.000
1	03	03	1.01	14	Pembinaan, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1 Kabupaten/ Kota	250.000.000	250.000.000
1	03	03	1.01	15	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	750.000.000	1.500.000.000
1	03	04			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100 Persen	500.000.000	0
1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100 Persen	500.000.000	0
1	03	04	1.01	09	Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2 Kabupaten/ Kota	500.000.000	0
1	03	07			Program Pengembangan Permukiman	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			12.000.000.000	13.200.000.000
1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			12.000.000.000	13.200.000.000
1	3	07	1.01	07	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	1 Ton/hari	2.000.000.000	2.200.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3	07	1.01	09	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	100 Rumah Tangga	1.000.000.000	1.100.000.000
1	03	07	1.01	10	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan	1 Ton/hari	1.000.000.000	1.100.000.000
1	03	07	1.01	11	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan	10 M ³ /Hari	1.000.000.000	1.100.000.000
1	03	07	1.01	19	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	10 M ³ /Hari	2.000.000.000	2.200.000.000
1	03	07	1.01	26	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	5 Liter/Detik	1.000.000.000	1.100.000.000
1	03	07	1.01	27	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	10 Unit	1.000.000.000	1.100.000.000
1	03	07	1.01	29	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	10 Unit	1.000.000.000	1.100.000.000
1	03	07	1.01	30	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	10 Unit	1.000.000.000	1.100.000.000
1	03	07	1.01	31	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	50 SR	1.000.000.000	1.100.000.000
1	03	08			Program Penataan Bangunan Gedung	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			248.600.000.000	328.500.000.000
1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			248.600.000.000	328.500.000.000
1	03	08	1.01	12	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	5 Orang	100.000.000	100.000.000,00
1	03	08	1.01	16	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	10 Bangunan Gedung	7.500.000.000	7.500.000.000
1	03	08	1.01	19	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	6 Dokumen	240.000.000.000	320.000.000.000
1	03	08	1.01	20	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	5 Bangunan Gedung	1.000.000.000	1.000.000.000
1	03	09			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			21.950.000.000	25.450.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		21.950.000.000	25.450.000.000	
1	03	09	1.01	08	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	25 Kawasan	17.500.000.000	21.000.000.000
1	03	09	1.01	09	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	25 Dokumen	2.500.000.000	2.500.000.000
1	03	09	1.01	10	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	15 Dokumen	1.000.000.000	1.000.000.000
1	03	09	1.01	12	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	50 Kabupaten/Kota	950.000.000	950.000.000
1	03	11			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			7.400.000.000	7.525.000.000
1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			4.150.000.000	4.150.000.000
1	03	11	1.01	09	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	30 Orang	400.000.000	400.000.000
1	03	11	1.01	10	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	2 Dokumen	800.000.000	800.000.000
1	03	11	1.01	11	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	60 Orang	800.000.000	800.000.000
1	03	11	1.01	12	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Lembaga	300.000.000	300.000.000
1	03	11	1.01	13	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	3 Dokumen	775.000.000	775.000.000
1	03	11	1.01	14	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	60 Orang	275.000.000	275.000.000
1	03	11	1.01	15	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatiahannya	2 Orang	100.000.000	100.000.000
1	03	11	1.01	16	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	1 Lembaga	700.000.000	700.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.750.000.000	1.875.000.000
1	03	11	1.02	06	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	2 Layanan Informasi	250.000.000	250.000.000
1	03	11	1.02	07	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	2 Perangkat Pendukung	250.000.000	250.000.000
1	03	11	1.02	08	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	4 Dokumen	950.000.000	1.045.000.000
1	03	11	1.02	09	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	72 Orang	300.000.000	330.000.000
1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.500.000.000	1.500.000.000
1	03	11	1.03	04	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	2 Paket Pekerjaan	500.000.000	500.000.000
1	03	11	1.03	07	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	2 Badan Usaha	500.000.000	500.000.000
1	03	11	1.03	08	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	500.000.000	500.000.000
1	03	12			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			2.200.000.000	1.900.000.000
1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			800.000.000	600.000.000
1	03	12	1.01	07	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi	1 Dokumen	700.000.000	500.000.000
1	03	12	1.01	09	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	1 Orang	100.000.000	100.000.000
1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			650.000.000	550.000.000
1	03	12	1.02	04	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Laporan	100.000.000	100.000.000
1	03	12	1.02	09	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	03	12	1.02	13	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	1 Dokumen	500.000.000	400.000.000
1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			200.000.000	200.000.000
1	03	12	1.03	04	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Laporan	50.000.000	50.000.000
1	03	12	1.03	06	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	150.000.000	150.000.000
1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			550.000.000	550.000.000
1	03	12	1.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1 Kasus	100.000.000	100.000.000
1	03	12	1.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	350.000.000	350.000.000
1	03	12	1.04	08	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1 Kasus	100.000.000	100.000.000
1	03	04			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.000.000.000	0
1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.000.000.000	0
1	03	04	1.01	16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	2 Dokumen	1.000.000.000	0
1	03	05			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			500.000.000	0
1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			500.000.000	0
1	03	05	1.01	15	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	1 Dokumen	500.000.000	0
1	03	06			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			7.800.000.000	11.200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			7.800.000.000	11.200.000.000
1	03	06	1.01	08	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	15 Unit	3.000.000.000	4.000.000.000
1	03	06	1.01	12	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	8 Dokumen	3.200.000.000	4.800.000.000
1	03	06	1.01	13	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas & pemerataan pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	8 Dokumen	1.600.000.000	2.400.000.000
1	03				DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA						855.484.100.500	861.925.185.500
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Persen	49.386.065.500	49.675.185.500
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		7 Dokumen	780.000.000	825.000.000
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	0 Dokumen	220.000.000	250.000.000
1	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	25.000.000
1	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	25.000.000
1	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	20.000.000	25.000.000
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	500.000.000	500.000.000
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Dokumen	26.016.065.500	26.150.185.500
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	303 orang/ bulan	24.265.185.500	24.265.185.500
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.500.000.000	1.600.000.000
1	03	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	17.000.000	20.000.000
1	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	12.000.000	15.000.000
1	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	221.880.000	250.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	03	01	1,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Laporan	350.000.000	350.000.000
1	03	01	1,05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	200.000.000	200.000.000
1	03	01	1,05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	50.000.000	50.000.000
1	03	01	1,05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	100.000.000	100.000.000
1	03	01	1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	2.070.000.000	2.170.000.000
1	03	01	1,06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	100.000.000	100.000.000
1	03	01	1,06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	100.000.000	100.000.000
1	03	01	1,06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	200.000.000	200.000.000
1	03	01	1,06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	200.000.000	220.000.000
1	03	01	1,06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	50.000.000	50.000.000
1	03	01	1,06	07 Penyediaan Bahan/Material	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	100.000.000	150.000.000
1	03	01	1,06	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	120.000.000	150.000.000
1	03	01	1,06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.200.000.000	1.200.000.000
1	03	01	1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	73 Unit	15.500.000.000	15.500.000.000
1	03	01	1,07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	2.000.000.000	2.000.000.000
1	03	01	1,07	03 Pengadaan Alat Besar	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	2.000.000.000	2.000.000.000
1	03	01	1,07	05 Pengadaan Mebel	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	500.000.000	500.000.000
1	03	01	1,07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	3.000.000.000	3.000.000.000
1	03	01	1,07	09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	8.000.000.000	8.000.000.000
1	03	01	1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan	12 Laporan	1.170.000.000	1.180.000.000
1	03	01	1,08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000	30.000.000
1	03	01	1,08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	750.000.000	750.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	03	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000	150.000.000
1	03	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000	250.000.000
1	03	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	56 Unit	3.500.000.000	3.500.000.000
1	03	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	1.000.000.000	1.000.000.000
1	03	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	1.000.000.000	1.000.000.000
1	03	01	1,09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	18 Unit	450.000.000	450.000.000
1	03	01	1,09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	1.000.000.000	1.000.000.000
1	03	01	1,09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7 Unit	50.000.000	50.000.000
1	03	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) Dalam Kondisi Baik		188.250.000.000	188.750.000.000
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase perlindungan terhadap banjir dan abrasi kewenangan provinsi		127.650.000.000	127.750.000.000
1	03	02	1.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	3 KM	5.000.000.000	5.000.000.000
1	03	02	1.01	75	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	3 Lembaga	300.000.000	300.000.000
1	03	02	1.01	77	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	2 KM	31.000.000.000	31.000.000.000
1	03	02	1.01	79	Normalisasi/Restorasi Sungai	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	2 KM	7.500.000.000	7.500.000.000
1	03	02	1.01	82	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 KM	2.500.000.000	2.500.000.000
1	03	02	1.01	86	Pembangunan Breakwater	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Breakwater yang Dibangun	2 KM	21.200.000.000	21.200.000.000
1	03	02	1.01	87	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	50.000.000	100.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	03	02	1.01	90	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	3 Lembaga	450.000.000	500.000.000
1	03	02	1.01	107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	2 KM	1.000.000.000	1.000.000.000
1	03	02	1.01	117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	3 Dokumen	4.500.000.000	4.500.000.000
1	03	02	1.01	118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	3 KM	40.000.000.000	40.000.000.000
1	03	02	1.01	119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	3 Dokumen	2.000.000.000	2.000.000.000
1	03	02	1.01	120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	10.000.000.000	10.000.000.000
1	03	02	1.01	121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	3 Dokumen	2.150.000.000	2.150.000.000
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Presentase jaringan irigasi dalam kondisi baik		60.600.000.000	61.000.000.000
1	03	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	10 KM	45.000.000.000	45.000.000.000
1	03	02	1.02	17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi	4 KM	6.000.000.000	6.000.000.000
1	03	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	150 KM	8.000.000.000	8.000.000.000
1	03	02	1.02	32	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	5 Dokumen	500.000.000	500.000.000
1	03	02	1.02	34	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	5 Lembaga	1.100.000.000	1.500.000.000
1	03	10			Program Penyelenggaraan Jalan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap		617.433.035.000	623.000.000.000
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase penambahan jaringan jalan		617.433.035.000	623.000.000.000
1	03	10	1.01	25	Rehabilitasi Jembatan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	40 Jembatan	350.000.000	500.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	03	10	1,01	26	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	100 Jembatan	1.000.000.000	2.000.000.000
1	03	10	1,01	27	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	50 Jembatan	500.000.000	1.000.000.000
1	03	10	1,01	30	Rehabilitasi Jalan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	30 KM	300.000.000.000	300.000.000.000
1	03	10	1,01	31	Rekonstruksi Jalan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	40 KM	200.000.000.000	200.000.000.000
1	03	10	1,01	32	Pembangunan Jembatan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Dibangun	60 Jembatan	21.000.000.000	21.000.000.000
1	03	10	1,01	33	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	150 KM	10.000.000.000	10.000.000.000
1	03	10	1,01	36	Penggantian Jembatan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Diganti	115 Jembatan	41.083.035.000	45.000.000.000
1	03	10	1,01	38	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	30 KM	30.000.000.000	30.000.000.000
1	03	10	1,01	41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2 Dokumen	5.000.000.000	5.000.000.000
1	03	10	1,01	42	Pembangunan Jalan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Dibangun	1 KM	6.000.000.000	6.000.000.000
1	03	10	1,01	43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2 KM	500.000.000	500.000.000
1	03	10	1,01	44	Pengelolaan Leger Jalan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	2.000.000.000	2.000.000.000
1	03	11			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase SDM yang kompeten dan profesional di bidang konstruksi		415.000.000	500.000.000
1	03	11	1,01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kelas pelatihan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi yang diselenggarakan		415.000.000	500.000.000
1	03	11	1,01	12	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Lembaga	415.000.000	500.000.000
1	04				DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN						104.970.000.000	58.453.500.000
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						63.258.500.000	55.703.500.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	04	01			Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Provinsi	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah				14.768.500.000	14.763.500.000
1	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	11 Dokumen	305.000.000	300.000.000
1	04	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	25.000.000	25.000.000
1	04	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
1	04	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	0
1	04	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
1	04	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
1	04	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	10.000.000	10.000.000
1	04	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	250.000.000	250.000.000
1	04	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9 Kegiatan	10.150.000.000	10.150.000.000
1	04	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/Bulan	10.000.000.000	10.000.000.000
1	04	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
1	04	01	1,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
1	04	01	1,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
1	04	01	1,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	5.000.000
1	04	01	1,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000
1	04	01	1,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	100.000.000	100.000.000
1	04	01	1,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
					Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 04 01 1,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	85.000.000	85.000.000
1 04 01 1,03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
1 04 01 1,03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
1 04 01 1,03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	5.000.000	5.000.000
1 04 01 1,03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000	10.000.000
1 04 01 1,03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000	50.000.000
1 04 01 1,03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000	5.000.000
1 04 01 1,03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
1 04 01 1,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	605.000.000	605.000.000
1 04 01 1,05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	10.000.000	10.000.000
1 04 01 1,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	75.000.000	75.000.000
1 04 01 1,05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
1 04 01 1,05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
1 04 01 1,05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	10.000.000	10.000.000
1 04 01 1,05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	200.000.000	200.000.000
1 04 01 1,05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	150.000.000	150.000.000
1 04 01 1,05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	150.000.000	150.000.000
1 04 01 1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.473.500.000	1.473.500.000
1 04 01 1,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	15.000.000
1 04 01 1,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	150.000.000
1 04 01 1,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	50.000.000
1 04 01 1,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	500.000.000	500.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	04	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	100.000.000
1	04	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.500.000	3.500.000
1	04	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	250.000.000	250.000.000
1	04	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	250.000.000	250.000.000
1	04	01	1,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
1	04	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	150.000.000	150.000.000
1	04	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah yang diadakan	22 Unit	975.000.000	975.000.000
1	04	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	700.000.000	700.000.000
1	04	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	75.000.000	75.000.000
1	04	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	100.000.000	100.000.000
1	04	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50.000.000	50.000.000
1	04	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50.000.000	50.000.000
1	04	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	3 Laporan	385.000.000	385.000.000
1	04	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	5.000.000
1	04	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	200.000.000	200.000.000
1	04	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	180.000.000	180.000.000
1	04	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran yang terpelihara	33 Unit	790.000.000	790.000.000
1	04	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	350.000.000	350.000.000
1	04	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	100.000.000	100.000.000
1	04	01	1,09	05	Pemeliharaan Mebel	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	10.000.000	10.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	04	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	25.000.000	25.000.000
1	04	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	275.000.000	275.000.000
1	04	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000	25.000.000
1	04	01	1,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	5.000.000
1	04	02			Program Pengembangan Perumahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana		Tersedianya Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program		26.250.000.000	18.700.000.000
1	04	02	1,01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana		Dokumen Pendataan yang tersedia		1.200.000.000	1.300.000.000
1	04	02	1,01	02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000
1	04	02	1,01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000
1	04	02	1,01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000
1	04	02	1,01	07	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000
1	04	02	1,01	08	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	100.000.000	200.000.000
1	04	02	1,01	09	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000
1	04	02	1,01	11	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000
1	04	02	1,02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana		Jumlah Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi		600.000.000	600.000.000
1	04	02	1,02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	30 Orang	100.000.000	100.000.000
1	04	02	1,02	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	20 Orang	100.000.000	100.000.000
1	04	02	1,02	06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
1	04	02	1,02	08	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	1 Orang	100.000.000	100.000.000
1	04	02	1,02	09	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	30 Orang	100.000.000	100.000.000
1	04	02	1,02	10	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	30 Orang	100.000.000	100.000.000
1	04	02	1,03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana		Jumlah Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	50 Unit	24.150.000.000	16.500.000.000
1	04	02	1,03	01	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban bencana	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	20 Unit Rumah	3.150.000.000	3.150.000.000
1	04	02	1,03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	30 Unit Rumah	6.750.000.000	6.750.000.000
1	04	02	1,03	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	30 Rumah	150.000.000	150.000.000
1	04	02	1,03	09	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	3 Unit Rumah	600.000.000	600.000.000
1	04	02	1,03	11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	30 Unit Rumah	5.000.000.000	5.000.000.000
1	04	02	1,03	12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	30 Unit Rumah	8.500.000.000	850.000.000
1	04	02	1,04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana		Jumlah Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi		300.000.000	300.000.000
1	04	02	1,04	06	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	2 Rumah Tangga	150.000.000	150.000.000
1	04	02	1,04	07	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	2 Dokumen	150.000.000	150.000.000
1	04	03			Program Kawasan Permukiman	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Tertatanya Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi dengan Luas 10-15 Ha		15.140.000.000	15.140.000.000
1	04	03	1,01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas)Ha	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi dengan Luas 10-15 Ha		490.000.000	490.000.000
1	04	03	1,01	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	1 Dokumen	350.000.000	350.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	04	03	1,01	14	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina	1 Kelompok Masyarakat	10.000.000	10.000.000
1	04	03	1,01	15	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000
1	04	03	1,01	16	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	1 Rumah Tangga	10.000.000	10.000.000
1	04	03	1,01	17	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	100.000.000	100.000.000
1	04	03	1,01	18	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 Orang	10.000.000	10.000.000
1	04	03	1,02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi dengan Luas 10-15 Ha	50 Ha	14.650.000.000	14.650.000.000
1	04	03	1,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	3 Laporan	250.000.000	250.000.000
1	04	03	1,02	03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	272 Unit Rumah	6.800.000.000	6.800.000.000
1	04	03	1,02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1 Laporan	100.000.000	100.000.000
1	04	03	1,02	13	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	1 Hektar	4.500.000.000	4.500.000.000
1	04	03	1,02	14	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	1 Ha	3.000.000.000	3.000.000.000
1	04	05			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Kawasan Permukiman yang Terfasilitasi PSU	156 Kawasan	7.100.000.000	7.100.000.000
1	04	05	1,01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Jumlah Kawasan Permukiman yang Terfasilitasi PSU	50 Unit	7.100.000.000	7.100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	04	05	1,01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	7 Dokumen	2.000.000.000	2.000.000.000
1	04	05	1,01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman Untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	25 Lokasi	5.000.000.000	5.000.000.000
1	04	05	1,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1 Laporan	100.000.000	100.000.000
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						41.711.500.000	2.750.000.000
2	10	03			Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup				200.000.000	200.000.000
2	10	03	1,01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Jumlah Penetapan Lokasi	2 Lokasi	200.000.000	200.000.000
2	10	03	1,01	01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	2 Dokumen	200.000.000	200.000.000
2	10	05			Program Penyelesaian ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup				41.061.500.000	2.100.000.000
2	10	05	1,01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah		41.061.500.000	2.100.000.000
2	10	05	1,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000
2	10	05	1,01	02	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	5 Laporan	40.961.500.000	2.000.000.000
2	10	07			Program Penetapan Tanah Ulayat	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup				450.000.000	450.000.000
2	10	07	1,01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Penetapan Tanah Ulayat		450.000.000	450.000.000
2	10	07	1,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3 Laporan	150.000.000	150.000.000
2	10	07	1,01	02	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penetapan batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi oleh Gubernur	3 Dokumen	300.000.000	300.000.000
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						42.199.115.413	44.745.765.011
1	05				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						20.920.000.000	21.170.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	05	01			Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Provinsi	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA		100%	11.770.000.000	11.770.000.000
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	DOKUMEN	290.000.000	290.000.000
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.000.000	15.000.000
1	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	15.000.000	15.000.000
1	05	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000
1	05	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000	30.000.000
1	05	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	100.000.000	100.000.000
1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	100.000.000	100.000.000
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.305.000.000	5.305.000.000
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan PNS;	49 Orang/Bulan	5.000.000.000	5.000.000.000
1	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	200.000.000	200.000.000
1	05	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;	2 Dokumen	15.000.000	15.000.000
1	05	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	15.000.000	15.000.000
1	05	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	20.000.000	20.000.000
1	05	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	15.000.000	15.000.000
1	05	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	40.000.000	40.000.000
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		400.000.000	400.000.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	05	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10 Unit	20.000.000	20.000.000
1	05	01	1.05	02	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	150.000.000	150.000.000
1	05	01	1.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	15.000.000	15.000.000
1	05	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	15.000.000	15.000.000
1	05	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	15.000.000	15.000.000
1	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	150.000.000	150.000.000
1	05	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	20.000.000	20.000.000
1	05	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	15.000.000	15.000.000
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.290.000.000	1.290.000.000
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	150.000.000	150.000.000
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	150.000.000	150.000.000
1	05	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	30.000.000
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang diadakan	10 Paket	20.000.000	20.000.000
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000	30.000.000
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	20.000.000	20.000.000
1	05	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	30.000.000
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu;	12 Laporan	150.000.000	150.000.000
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi;	12 Laporan	700.000.000	700.000.000
1	05	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah yang Tersedia		3.300.000.000	3.300.000.000
1	05	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 Unit	1.000.000.000	1.000.000.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	05	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Unit Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit	500.000.000	500.000.000
1	05	01	1.07	03	Pengadaan Alat Besar	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Unit alat besar yang disediakan	2 Unit	100.000.000	100.000.000
1	05	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Unit alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan	2 Unit	100.000.000	100.000.000
1	05	01	1.07	05	Pengadaan Mebel;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Paket Mebel yang disediakan;	10 Paket	200.000.000	200.000.000
1	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	100.000.000	100.000.000
1	05	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Unit aset tetap lainnya yang disediakan	0 Unit	100.000.000	100.000.000
1	05	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tetap Tak Berwujud	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Unit Aset Tetap Tak Berwujud yang disediakan	0 Unit	100.000.000	100.000.000
1	05	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	500.000.000	500.000.000
1	05	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	300.000.000	300.000.000
1	05	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	300.000.000	300.000.000
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Usuran		235.000.000	235.000.000
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat;	600 Laporan	5.000.000	5.000.000
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	50.000.000	50.000.000
1	05	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	30.000.000	30.000.000
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	150.000.000	150.000.000
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang Terpelihara		950.000.000	950.000.000
1	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	100.000.000	100.000.000
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	10 Unit	100.000.000	100.000.000
1	05	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan Perizinanya	1 Unit	100.000.000	100.000.000
1	05	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang dipelihara dan dibayarkan Perizinanya	2 Unit	50.000.000	50.000.000
1	05	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Mebel yang di Pelihara	2 Unit	50.000.000	50.000.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	50.000.000	50.000.000
7	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	200.000.000	200.000.000
1	05	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	2 Unit	200.000.000	200.000.000
1	05	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;	Tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	100.000.000	100.000.000
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	BPBD PROV.SULTRA	Persentasi meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dalam pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan serta tanggap darurat dan pasca bencana		9.150.000.000	9.400.000.000
1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi;	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah laporan informasi rawan bencana provinsi	Laporan	1.900.000.000	2.000.000.000
1	05	03	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana);	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	BPBD dan Instansi TERKAIT	Jumlah Orang yang Tersedia Untuk Melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kab/Kota	350 Orang	700.000.000	700.000.000
1	05	03	1.01	03	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	BPBD Prov.Sultra	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalakan	1 Dokumen	1.200.000.000	1.300.000.000
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Laporan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		3.200.000.000	3.350.000.000
7	05	03	1.02	12	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	BPBD Prov.Sultra	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalakan	1 Dokumen	1.200.000.000	1.200.000.000
1	05	03	1.02	13	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	BPBD Prov.Sultra	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	5 Kawasan	500.000.000	400.000.000
7	05	03	1.02	14	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	BPBD Prov.Sultra	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalakan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000
1	05	03	1.02	15	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	BPBD Prov.Sultra	Jumlah personel TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	50 Orang	300.000.000	400.000.000
1	05	03	1.02	16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	BPBD Prov.Sultra	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	150.000 Orang	200.000.000	200.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	05	03	1.02	17	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	BPBD Prov.Sultra	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	2 Dokumen	100.000.000	150.000.000
1	05	03	1.02	18	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan	1 Dokumen	300.000.000	400.000.000
1	05	03	1.02	19	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah warga negara dan aparat di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	2 Orang	300.000.000	300.000.000
1	05	03	1.02	20	Pengelolaan Risiko Bencana	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	BPBD Se-Sultra	Jumlah akar masalah Risiko Bencana lintas Kabupaten/kota yang tertangani	1 Kegiatan	100.000.000	100.000.000
1	05	03	1.02	21	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	BPBD Se-Sultra	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Unit	100.000.000	100.000.000
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah laporan penyelamatan & Evakuasi Korban Bencana	Laporan	3.100.000.000	3.100.000.000
1	05	03	1.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas;	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	BPBD DAN OPD TERKAIT	Jumlah Laporan hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	100.000.000	100.000.000
1	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana;	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	17 Laporan	500.000.000	500.000.000
1	05	03	1.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana;	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	BPBD DAN OPD TERKAIT	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	17 Laporan	500.000.000	500.000.000
1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Orang	500.000.000	500.000.000
1	05	03	1.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	BPBD DAN OPD TERKAIT	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	500.000.000	500.000.000
1	05	03	1.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit;	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	BPBD DAN OPD TERKAIT	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit	1 Laporan	1.000.000.000	1.000.000.000
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	BPBD PROV.SULTRA	Jumlah laporan pelaksanaan sisten dasar penanggulangan bencana	Laporan	950.000.000	950.000.000
1	05	03	1.04	06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	BPBD Prov.Sultra	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	40 Keluarga	100.000.000	100.000.000
1	05	03	1.04	07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	BPBD Prov.Sultra	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	6 Dokumen	150.000.000	150.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	05	03	1.04	16	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	BPBD dan OPD Terkait	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	3 Dokumen	100.000.000	100.000.000
1	05	03	1.04	17	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	BPBD Se-Sultra	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	300.000.000	300.000.000
1	05	03	1.04	18	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	BPBD Se-Sultra	Jumlah Dokumen yang dilegalikan	2 Dokumen	100.000.000	100.000.000
1	05	03	1.04	19	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	BPBD Prov.Sultra	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	2 Dokumen	100.000.000	100.000.000
1	05	03	1.04	20	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	BPBD Prov.Sultra	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	17 Kabupaten/ Kota	100.000.000	100.000.000
1	05				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						21.279.115.413	23.575.765.011
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	15.997.749.329	17.597.524.262
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersusun	1 Dokumen	165.000.000	181.500.000
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	33.000.000	36.300.000
1	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.700.000	8.470.000
1	05	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.700.000	8.470.000
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	23.100.000	25.410.000
1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	93.500.000	102.850.000
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	2 Laporan	8.010.079.000	8.811.086.900
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1120 Orang/ Bulan	7.805.039.000	8.585.542.900
1	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	550.000	605.000
1	05	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 Dokumen	187.000.000	205.700.000
1	05	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 Dokumen	550.000	605.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	05	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.700.000	8.470.000
7	05	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1 Dokumen	770.000	847.000
7	05	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	7.700.000	8.470.000
7	05	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	770.000	847.000
1	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah dokumen administrasi barang perangkat daerah	7 Dokumen	97.350.000	107.085.000
7	05	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	770.000	847.000
7	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.200.000	2.420.000
7	05	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	2.200.000	2.420.000
7	05	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.650.000	1.815.000
7	05	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.650.000	1.815.000
7	05	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	88.000.000	96.800.000
7	05	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	880.000	968.000
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	596.624.244	656.286.668
7	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100 Unit	1.100.000	1.210.000
7	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	498.591.904	548.451.094
7	05	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	550.000	605.000
7	05	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.982.340	4.380.574
7	05	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	550.000	605.000
7	05	01	1.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	2 Orang	1.650.000	1.815.000
7	05	01	1.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	550.000	605.000
7	05	01	1.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	2 Orang	1.650.000	1.815.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	44.000.000	48.400.000
1	05	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	22.000.000	24.200.000
1	05	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	22.000.000	24.200.000
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Cakupan pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	1.230.671.538	1.353.738.692
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.000.000	24.200.000
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.000.000	36.300.000
1	05	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	11.000.000	12.100.000
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	113.291.538	124.620.692
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	1 Paket	110.000.000	121.000.000
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	22.000.000	24.200.000
1	05	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket	550.000	605.000
1	05	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	143.000.000	157.300.000
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	770.000.000	847.000.000
1	05	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	330.000	363.000
1	05	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.500.000	6.050.000
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Yang Disediakan	160 Unit	634.453.600	697.898.960
1	05	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	20 Unit	55.000.000	60.500.000
1	05	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Unit kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang disediakan	100 Unit	525.553.600	578.108.960
1	05	01	1.07	03	Pengadaan Alat Besar	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	5 Unit	1.100.000	1.210.000
1	05	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	10 Unit	5.500.000	6.050.000
1	05	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	2.750.000	3.025.000
1	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20 Unit	11.000.000	12.100.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	05	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	20 Unit	550.000	605.000
1	05	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	11.000.000	12.100.000
1	05	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	20 Unit	11.000.000	12.100.000
1	05	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	11.000.000	12.100.000
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	4 Laporan	4.353.124.179	4.788.436.597
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.864.000	7.550.400
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	107.119.584	117.831.542
1	05	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	47.361.600	52.097.760
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.191.778.995	4.610.956.895
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	247 Unit	910.446.768	1.001.491.445
1	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	29 Unit	246.417.600	271.059.360
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	397.425.600	437.168.160
1	05	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	5 Unit	550.000	605.000
1	05	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	5 Unit	5.500.000	6.050.000
1	05	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit	5.500.000	6.050.000
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.500.000	6.050.000
1	05	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.500.000	6.050.000
1	05	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	15 Unit	5.500.000	6.050.000
1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	228.653.568	251.518.925
1	05	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	3.300.000	3.630.000
1	05	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	3.300.000	3.630.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	05	01	1.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha	3.300.000	3.630.000
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	4.944.716.434	5.615.926.134
1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan	100%	4.600.522.034	5.237.312.294
1	05	02	1.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	7.700.000	8.470.000
1	05	02	1.01	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia	50 Unit	5.500.000	6.050.000
1	05	02	1.01	14	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	2.200.000	2.420.000
1	05	02	1.01	15	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	2.200.000	2.420.000
1	05	02	1.01	16	Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	232.177.834	256.395.617
1	05	02	1.01	17	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	1 Laporan	770.000	185.585.057
1	05	02	1.01	18	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	10 Orang	90.090.000	90.099.000
1	05	02	1.01	19	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	200 Laporan	4.259.884.200	4.685.872.620
1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Persentase Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Yang Ditegakkan	85%	109.780.000	120.758.000
1	05	02	1.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Laporan	3.850.000	4.235.000
1	05	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Laporan	102.960.000	113.256.000
1	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	1 Laporan	2.200.000	2.420.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	05	02	1.02	09	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokumen	770.000	847.000
1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Dokumen Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	1 Dokumen	234.414.400	257.855.840
1	05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Keterlibatan Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	5.500.000	6.050.000
1	05	02	1.03	04	KERJA Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1 Dokumen	228.914.400	251.805.840
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Cakupan Kabupaten Kota Yang Tanggap Bencana	3 Kab/Kota	100.580.000	110.638.000
1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Dokumen Pemetaan Rawan Bencana Provinsi	1 Dokumen	2.200.000	2.420.000
1	05	03	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	100 Orang	2.200.000	2.420.000
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Siaga dan Tanggap Bencana	17 Kab/Kota	10.560.000	11.616.000
1	05	03	1.02	12	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalikan	1 Dokumen	770.000	847.000
1	05	03	1.02	13	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	2.750.000	3.025.000
1	05	03	1.02	14	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalikan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Dokumen	1.100.000	1.210.000
1	05	03	1.02	15	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	5 Orang	1.100.000	1.210.000
1	05	03	1.02	16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	10 Orang	1.100.000	1.210.000
1	05	03	1.02	17	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	1 Dokumen	770.000	847.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	05	03	1.02	18	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan	1 Dokumen	770.000	847.000
1	05	03	1.02	19	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	100 Orang	1.100.000	1.210.000
1	05	03	1.02	21	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	50 Unit	1.100.000	1.210.000
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	6.270.000	6.897.000
1	05	03	1.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	1 Laporan	1.100.000	1.210.000
1	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	1.100.000	1.210.000
1	05	03	1.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Laporan	1.100.000	1.210.000
1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	1.100.000	1.210.000
1	05	03	1.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	770.000	847.000
1	05	03	1.03	06	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidem/Wabah Penyakit	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidem/Wabah Penyakit	1 Laporan	1.100.000	1.210.000
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	81.550.000	89.705.000
1	05	03	1.04	06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	5 Keluarga	50.000.000	55.000.000
1	05	03	1.04	07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen	20.000.000	22.000.000
1	05	03	1.04	16	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	7.700.000	8.470.000
1	05	03	1.04	17	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	1.100.000	1.210.000
1	05	03	1.04	18	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen	2.200.000	2.420.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	05	03	1.04	19	Keja Sama Antar Lembaga dan Kermitraan dalam Penanggulangan Bencana	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kermitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen	550.000	605.000
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	236.069.650	251.676.615
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Tersedianya peta rawan kebakaran	1 Dokumen	225.069.650	239.576.615
1	05	04	1.01	02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	1 Dokumen	7.700.000	8.470.000
1	05	04	1.01	04	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kermitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	2.200.000	2.420.000
1	05	04	1.01	06	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal	1 Dokumen	770.000	847.000
1	05	04	1.01	07	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	1 Dokumen	770.000	847.000
1	05	04	1.01	09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	50 Orang	4.400.000	4.840.000
1	05	04	1.01	12	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid	1 Dokumen	7.700.000	8.470.000
1	05	04	1.01	13	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	10 Keluarga	100.000.000	110.000.000
1	05	04	1.01	18	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISP KP)	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISP KP)	1 Dokumen	7.700.000	8.470.000
1	05	04	1.01	22	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	7.700.000	8.470.000
1	05	04	1.01	23	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	550.000	605.000
1	05	04	1.01	24	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Dokumen	80.079.650	80.087.615

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	05	04	1.01	25	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SIKIP) nya Terintegrasi dengan Provinsi	4 Kabupaten/Kota	1.100.000	1.210.000
1	05	04	1.01	26	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	50 Unit	3.850.000	4.235.000
1	05	04	1.01	27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	50 Unit	550.000	605.000
1	05	04	1.02		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah kab/kota yang tanggap penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	6 Kabupaten/ Kota	11.000.000	12.100.000
1	05	04	1.02	02	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan	5.500.000	6.050.000
1	05	04	1.02	04	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sultra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Laporan	5.500.000	6.050.000
1	06				Urusan Sosial						22.144.266.000	23.383.821.000
1	06				Dinas Sosial						22.200.866.000	23.395.998.000
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi	100 persen	15.929.466.000	18.820.834.000
1	06	01	1,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	1 Dokumen	717.520.000	1.135.690.000
1	06	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	468.400.000	680.000.000
1	06	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	109.200.000	200.000.000
1	06	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20.400.000	35.000.000
1	06	01	1,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.800.000	20.000.000
1	06	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.640.000	15.940.000
1	06	01	1,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	11.232.000	20.750.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	06	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	88.848.000	164.000.000
1	06	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.775.937.000	10.793.712.000
1	06	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	10.262.668.000	10.262.712.000
1	06	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	237.600.000	250.000.000
1	06	01	1,02	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.616.000	6.000.000
1	06	01	1,02	04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	270.053.000	275.000.000
1	06	01	1,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada	6 Dokumen	326.880.000	358.000.000
1	06	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	6.480.000	8.000.000
1	06	01	1,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	187.200.000	200.000.000
1	06	01	1,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	58.320.000	65.000.000
1	06	01	1,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	36.000.000	40.000.000
1	06	01	1,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	21.600.000	25.000.000
1	06	01	1,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	17.280.000	20.000.000
1	06	01	1,04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	68.720.000	35.500.000
1	06	01	1,04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	39.360.000	17.500.000
1	06	01	1,04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	24.320.000	8.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
					Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 06 01 1,04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	5.040.000	10.000.000
1 06 01 1,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Kegiatan	662.400.000	745.000.000
1 06 01 1,05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	64.800.000	75.000.000
1 06 01 1,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	150 Paket	216.000.000	250.000.000
1 06 01 1,05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	122.400.000	125.000.000
1 06 01 1,05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	194.400.000	200.000.000
1 06 01 1,05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	64.800.000	95.000.000
1 06 01 1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 laporan	1.147.452.000	1.914.304.000
1 06 01 1,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Paket	14.515.000	26.781.000
1 06 01 1,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	90.000.000	166.050.000
1 06 01 1,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	78.000.000	143.910.000
1 06 01 1,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	31.104.000	57.387.000
1 06 01 1,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.736.000	38.258.000
1 06 01 1,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	19.356.000	35.712.000
1 06 01 1,06 07	Penyediaan Bahan/Material	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.160.000	3.985.000
1 06 01 1,06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	68.429.000	126.251.000
1 06 01 1,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	818.832.000	1.308.000.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	06	01	1,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.320.000	7.970.000
1	06	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah yang Tersedia	7 Paket	859.427.000	1.401.143.000
1	06	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00
1	06	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00
1	06	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	101.827.000	187.871.000
1	06	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	21.600.000	39.852.000
1	06	01	1,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	36.000.000	66.420.000
1	06	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	370.000.000	498.150.000
1	06	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	108.000.000	199.260.000
1	06	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	222.000.000	409.590.000
1	06	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Usuran	4 laporan	478.330.000	790.269.000
1	06	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	160.010.000	295.219.000
1	06	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	174.000.000	321.030.000
1	06	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	108.320.000	107.600.000
1	06	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	36.000.000	66.420.000
1	06	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	8 unit	892.800.000	1.647.216.000
1	06	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	4 Unit	108.000.000	199.260.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
1	06	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	180.000.000	332.100.000
1	06	01	1,09	05	Pemeliharaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	7.200.000	13.284.000
1	06	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.800.000	19.926.000
1	06	01	1,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.800.000	19.926.000
1	06	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	122.400.000	225.828.000
1	06	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	216.000.000	398.520.000
1	06	01	1,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	237.600.000	438.372.000
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat				6.214.800.000	4.562.987.000
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilaksanakan	5 kegiatan	936.000.000	1.170.000.000
1	06	02	1,01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat		Jumlah Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilaksanakan	1 Dokumen	96.000.000	160.000.000
1	06	02	1,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	96.000.000	160.000.000
1	06	02	1,02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat		Jumlah Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilaksanakan	4 Kegiatan	840.000.000	1.010.000.000
1	06	02	1,02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	40 Orang	152.400.000	165.000.000
1	06	02	1,02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat	40 Orang	342.000.000	350.000.000
1	06	02	1,02	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	20 Keluarga	216.000.000	350.000.000
1	06	02	1,02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	6 Lembaga	129.600.000	145.000.000
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat		Jumlah Fasilitasi Warga Negara Pekerja Migran Korban tindak Kekerasan yang dilaksanakan	1 kegiatan	115.000.000	143.750.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	06	03	1,01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarbasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarbasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal yang dipulangkan	5 Orang	115.000.000	143.750.000	
1	06	03	1,01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarbasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarbasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	5 Orang	115.000.000	143.750.000
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlantar dalam Panti yang memperoleh layanan dan Rehabilitasi Jumlah orang yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	3500 jiwa	753.800.000	844.237.000
1	06	04	1,01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TeriAntar di dalam Panti	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat		Jumlah orang yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	6 Orang	183.400.000	161.738.000
1	06	04	1,01	01	Penyediaan Permakanan	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	40 Orang	55.400.000	29.963.000
1	06	04	1,01	02	Penyediaan Sandang	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	40 Orang	57.200.000	13.636.000
1	06	04	1,01	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	40 Orang	7.632.000	14.081.000
1	06	04	1,01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	21.168.000	26.568.000
1	06	04	1,01	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TeriAntar	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TeriAntar	1 Dokumen	42.000.000	77.490.000
1	06	04	1,02		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lanjut usia yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	50 Orang	300.000.000	241.363.000
1	06	04	1,03	01	Penyediaan Permakanan	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	62.000.000	32.140.000
1	06	04	1,03	02	Penyediaan Sandang	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang	56.000.000	11.070.000
1	06	04	1,03	04	Penyediaan Alat Bantu	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	25 Orang	68.000.000	33.210.000
1	06	04	1,03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	32.400.000	14.391.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	06	04	1,03	12	Pemulasaraan	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	50 Orang	9.600.000	17.712.000
1	06	04	1,03	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	72.000.000	132.840.000
1	06	04	1,04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat		Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	30 Orang	150.000.000	218.998.000
1	06	04	1,04	01	Penyediaan Permakanan	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	30 Orang	25.000.000	19.225.000
1	06	04	1,04	02	Penyediaan Sandang	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	30 Orang	25.000.000	18.225.000
1	06	04	1,04	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	30 Orang	14.400.000	26.568.000
1	06	04	1,04	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	30 Orang	6.600.000	9.225.000
1	06	04	1,04	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	30 Orang	10.000.000	18.450.000
1	06	04	1,04	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	10 Orang	15.000.000	27.675.000
1	06	04	1,04	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1 Dokumen	54.000.000	99.630.000
1	06	04	1,05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat		Jumlah orang yang mengikuti Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	10 Orang	120.400.000	222.138.000
1	06	04	1,05	01	Penyediaan Permakanan	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	10 Orang	4.000.000	7.380.000
1	06	04	1,05	02	Penyediaan Sandang	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	10 Orang	5.000.000	9.225.000
1	06	04	1,05	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	10 Orang	10.000.000	18.450.000
1	06	04	1,05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	10 Orang	8.400.000	15.498.000
1	06	04	1,05	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	10 Orang	15.000.000	27.675.000
1	06	04	1,05	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	5 Orang	12.000.000	22.140.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
					Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	06 04 1,05 11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	1 Dokumen	66.000.000	121.770.000
1	06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						56.600.000	12.177.000
1	06 04 1,01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	6 Orang	56.600.000	12.177.000
3	08 06 3,03 15	Penyediaan Alat Bantu	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	10 Orang	56.600.000	12.177.000
		UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK DAN REMAJA						7.359.368.000	2.833.676.000
1	06 04 1,02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat		Jumlah orang yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	70 Orang	2.059.368.000	2.280.176.000
1	06 04 1,02 01	Pengasuhan	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	70 Orang	150.000.000	200.000.000
1	06 04 1,02 02	Penyediaan Makanan	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	70 Orang	1.189.440.000	1.189.440.000
1	06 04 1,02 03	Penyediaan Sandang	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	70 Orang	98.640.000	181.991.000
1	06 04 1,02 04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	70 Orang	58.608.000	65.000.000
1	06 04 1,02 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	70 Orang	72.000.000	95.000.000
1	06 04 1,02 06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	70 Orang	109.680.000	125.000.000
1	06 04 1,02 07	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	70 Orang	14.400.000	20.000.000
1	06 04 1,02 08	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	70 Orang	237.600.000	250.000.000
1	06 04 1,02 09	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	70 Orang	18.000.000	20.000.000
1	06 04 1,02 10	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	70 Orang	12.000.000	22.140.000
1	06 04 1,02 11	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	70 Orang	9.000.000	16.605.000
1	06 04 1,02 12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen	90.000.000	95.000.000
1	06 04 1,02 13	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	70 Orang	5.300.000.000	553.500.000
1	06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						642.000.000	1.165.000.000
		Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat			Jumlah PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan Sosial	1500 kk		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	06	05	1,01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah anak yang mengikuti Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	2 Orang	65.000.000	109.435.000
1	06	05	1,01	01	Pengangkatan Anak antar WNI	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	10 Orang	25.000.000	35.635.000
1	06	05	1,01	01	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	10 Orang	40.000.000	73.800.000
1	06	05	1,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat		Jumlah laporan pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	3 keluarga	577.000.000	1.055.565.000
1	06	05	1,02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	15 Keluarga	200.000.000	360.000.000
1	06	05	1,02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	15 Keluarga	190.000.000	350.550.000
1	06	05	1,02	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	10 Orang	187.000.000	345.015.000
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat		Persentase Korban bencana yang memperoleh Penanganan	100 persen	2.588.000.000	765.000.000
1	06	06	1,01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah korban bencana yang Terlindunginya Kebutuhan Sosial nya.	5 Orang	2.588.000.000	765.000.000
1	06	06	1,01	01	Penyediaan Permakanan	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	100 Orang	895.000.000	259.775.000
1	06	06	1,01	02	Penyediaan Sandang	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	100 Orang	580.000.000	232.100.000
1	06	06	1,01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	10 Unit	245.000.000	83.025.000
1	06	06	1,01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	100 Orang	450.000.000	156.890.000
1	06	06	1,01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	100 Orang	418.000.000	33.210.000
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat		Jumlah Taman makam Pahlawan Nasional yang dikelola dan memperoleh Pemeliharaan	2 unit	1.180.000.000	475.000.000
1	06	07	1,01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dilaksanakan	2 Unit	1.180.000.000	475.000.000
1	06	07	1,01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dokumen	860.000.000	195.200.000
1	06	07	1,01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	220.000.000	177.800.000
1	06	07	1,01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	Meningkatnya Kemampuan daya beli masyarakat	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan	100.000.000	102.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	07		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA				4.991.500.000	21.155.000.000				
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				4.041.500.000	19.955.000.000				
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	-	15.452.000.000				
2	07	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	305.000.000	315.000.000			
2	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	200.000.000	210.000.000
2	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000	5.000.000
X	XX	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	100.000.000	100.000.000
2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				11.981.000.000	11.981.000.000
2	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ Bulan	11.500.000.000	11.500.000.000
2	07	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	255.000.000	255.000.000
2	07	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	5.000.000
2	07	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	221.000.000	221.000.000
2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				55.000.000	105.000.000
2	07	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	5.000.000	5.000.000
2	07	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	50.000.000	100.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	-	909.500.000	1.225.000.000	
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.000.000	75.000.000
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	119.500.000	200.000.000
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	150.000.000	200.000.000
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	40.000.000	50.000.000
2	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	150.000.000	200.000.000
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400.000.000	500.000.000
2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	-	450.000.000	600.000.000	
2	07	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	150.000.000	200.000.000
2	07	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	150.000.000	200.000.000
2	07	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	150.000.000	200.000.000
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	-	208.000.000	258.500.000	
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.000.000	8.500.000
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000	250.000.000
2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	-	740.000.000	967.500.000	
2	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	15.000.000	17.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
2	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	150.000.000	200.000.000
2	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	150.000.000	200.000.000
2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	300.000.000	350.000.000
2	07	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	125.000.000	200.000.000
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja		-	-	605.000.000	760.000.000
2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	60 Orang	525.000.000	675.000.000
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	60 Orang	525.000.000	675.000.000
2	07	03	1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja		-	-	80.000.000	85.000.000
2	07	03	1.02	01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	25 LPK	80.000.000	85.000.000
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja		-	-	1.136.250.000	1.297.500.000
2	07	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja		-	-	288.750.000	302.500.000
2	07	04	1.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	100 Orang	288.750.000	302.500.000
2	07	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja		-	-	360.000.000	420.000.000
2	07	04	1.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	17000 Orang	150.000.000	200.000.000
2	07	04	1.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	2000 Orang	210.000.000	220.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	-	-	337.500.000	375.000.000	
2	07	04	1.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	50 Orang	75.000.000	100.000.000
2	07	04	1.04	04	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	50 Orang	262.500.000	275.000.000
2	07	04	1.05		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	-	-	150.000.000	200.000.000	
2	07	04	1.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	- Kab. Buton, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	40 Orang	150.000.000	200.000.000
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	-	-	1.239.750.000	1.334.500.000	
2	07	05	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	-	-	409.500.000	429.000.000	
2	07	05	1.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	30 Perusahaan	136.500.000	143.000.000
2	07	05	1.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	30 Perusahaan	136.500.000	143.000.000
2	07	05	1.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan	136.500.000	143.000.000
2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	-	-	530.250.000	555.500.000	
2	07	05	1.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	136.500.000	143.000.000
2	07	05	1.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	25 Perkara	78.750.000	82.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	07	05	1.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	178.500.000	187.000.000
2	07	05	1.02	05	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	25 Perusahaan	136.500.000	143.000.000
2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	-	-	-	300.000.000	350.000.000
2	07	05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	300.000.000	350.000.000
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	-	-	-	1.060.500.000	1.111.000.000
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	-	-	-	1.060.500.000	1.111.000.000
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	500 Perusahaan	525.000.000	550.000.000
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	50 Kasus	168.000.000	176.000.000
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	150 Perusahaan	367.500.000	385.000.000
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						950.000.000	1.200.000.000
3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	-	-	-	150.000.000	200.000.000
3	32	02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	-	-	-	150.000.000	200.000.000
3	32	02	1.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjakamkan dengan Daerah Lain	2 Dokumen	75.000.000	100.000.000
3	32	02	1.01	03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	24 Hektar	75.000.000	100.000.000
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	-	-	-	500.000.000	650.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	32	03	1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja		-	-	500.000.000	650.000.000
3	32	03	1.01	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4 Laporan	200.000.000	250.000.000
3	32	03	1.01	02 Penyjapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	4 Dokumen	150.000.000	200.000.000
3	32	03	1.01	04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	200 Kepala Keluarga	150.000.000	200.000.000
3	32	04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja		-	-	300.000.000	350.000.000
3	32	04	1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja		-	-	300.000.000	350.000.000
3	32	03	1.01	02 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pem bangunan	Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses terhadap Lapangan Kerja	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	4 Satuan Permukiman	300.000.000	350.000.000
2	08			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						12.868.240.100	14.200.312.000
2	08			URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						11.277.471.600	12.499.279.300
2	08	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	8.651.632.300	9.666.296.300
2	08	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dokumen)	10	244.423.100	268.865.700
2	08	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	64.584.300	71.042.800
2	08	01	1.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	1	14.378.500	19.816.500
2	08	01	1.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	1	8.247.200	9.071.900
2	08	01	1.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	1	3.306.300	3.637.000
2	08	01	1.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	1	3.306.300	3.637.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	08	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dokumen)	3	15.600.500	16.660.500
2	08	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	135.000.000	145.000.000
2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	31	6.183.541.400	6.801.895.600
2	08	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)	840	6.013.584.700	6.614.943.200
2	08	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (dokumen)	12	109.824.000	120.806.400
2	08	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD (laporan)	1	6.626.700	7.289.400
2	08	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	18	53.506.000	58.856.600
2	08	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	3	177.552.400	195.307.600
2	08	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan (Paket)	1	49.000.000	53.900.000
2	08	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	5	45.000.000	49.500.000
2	08	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-Undangn (orang)	50	83.552.400	91.907.600
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah laporan administrasi umum Perangkat Daerah	8	773.680.400	851.048.300
2	08	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	8	9.273.000	10.200.300
2	08	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	5	5.720.000	6.292.000
2	08	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	10	9.273.000	10.200.300
2	08	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	17	40.637.900	44.701.600
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	7	28.077.500	30.885.200
2	08	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangn yang disediakan (dokumen)	180	4.008.000	4.408.800

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
2	08	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)	12	27.324.000	30.056.400
2	08	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	50	649.367.000	714.303.700
2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang tersedia (unit)	16	435.000.000	850.000.000
2	08	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan (unit)	2	80.000.000	80.000.000
2	08	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (unit)	1	40.000.000	40.000.000
2	08	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah paket mebel yang disediakan (paket)	1	45.000.000	50.000.000
2	08	01	1.07	07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	10	85.000.000	90.000.000
2	08	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	1	0,00	500.000.000
2	08	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	1	100.000.000	0,00
2	08	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	1	85.000.000	90.000.000
2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah laporan jasa penunjang urusan (laporan)	3	278.300.000	302.130.000
2	08	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1	3.300.000	3.630.000
2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	185.000.000	203.500.000
2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Laporan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	90.000.000	95.000.000
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang terpelihara (unit)	9	559.135.000	397.049.100
2	08	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	132.225.000	145.448.100
2	08	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	3	46.910.000	51.601.000
2	08	01	1.09	05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	80.000.000
2	08	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	30.000.000	35.000.000
2	08	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	25.000.000	30.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	08	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	0,00
2	08	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kendari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	55.000.000
2	08	02			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan		Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan PPRG	21%	698.608.000	761.535.000
2	08	02	1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan		Jumlah laporan hasil pelaksanaan pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi (laporan)	3	244.939.000	279.432.600
2	08	02	1.01	05	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Kendari	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	1	70.000.000	85.000.000
2	08	02	1.01	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Prov/Kab/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	1	86.320.600	96.952.600
2	08	02	1.01	07	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Prov/Kab/Kota	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	50	88.618.400	97.480.000
2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi (Laporan)	2	268.669.000	282.102.400
2	08	02	1.02	03	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi (dokumen)	1	131.000.000	137.550.000
2	08	02	1.02	04	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota (organisasi)	100	137.669.000	144.552.400
2	08	02	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi (laporan)	3	185.000.000	200.000.000
2	08	02	1.03	04	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan (lembaga)	40	90.000.000	95.000.000
2	08	02	1.03	05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (orang)	40	95.000.000	105.000.000
2	08	03			Program Perlindungan Perempuan	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan		Persentase perempuan anak kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada lembaga layanan (Dinas/UPTD PPA) di provinsi	100%	460.122.000	495.837.500

Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	08	03	1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (laporan)	2	165.841.000	174.133.000
2	08	03	1.01	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi (dokumen)	1	80.091.000	84.095.500
2	08	03	1.01	02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi (Perangkat Daerah)	34	85.750.000	90.037.500
2	08	02	1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (laporan)	2	80.091.000	84.095.500
2	08	03	1.02	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (layanan)	20	80.091.000	84.095.500
2	08	02	1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	3	214.190.000	237.609.000
2	08	03	1.03	01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (laporan)	1	53.790.000	59.169.000
2	08	03	1.03	02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (orang)	34	95.400.000	106.940.000
2	08	03	1.03	04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	1	65.000.000	71.500.000
2	08	04		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan		Persentase lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga (PUSPAGA) yang terbentuk	28%	421.063.600	456.669.900
2	08	04	1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi (laporan)	2	156.063.600	171.669.900

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
2	08	04	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (laporan)	50	86.063.600	86.669.900
2	08	04	1.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (laporan)	1	70.000.000	85.000.000
2	08	04	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi (laporan)	3	200.000.000	215.000.000
2	08	04	1.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan (lembaga)	50	100.000.000	105.000.000
2	08	04	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (orang)	40	50.000.000	55.000.000
2	08	04	1.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (dokumen)	1	50.000.000	55.000.000
2	08	04	1.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan		Jumlah Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia (layanan)	1	65.000.000	70.000.000
2	08	04	1.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan		Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (layanan)	1	65.000.000	70.000.000
2	08	05			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan		Persentase perangkat daerah yang mengelola data terpilah gender dan anak	31%	230.750.000	242.287.500
2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi (laporan)	2	230.750.000	242.287.500
2	08	05	1.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Prov/Kab/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak provinsi yang tersedia (dokumen)	1	85.750.000	90.037.500
2	08	05	1.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi (dokumen)	2	145.000.000	152.250.000
2	08	06			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan		Persentase Kabupaten/Kota yang membentuk minimal 2 Forum Anak Tingkat Kecamatan dan 2 Forum Anak Desa/Kelurahan	41%	391.795.700	418.303.100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	08	06	1.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi (laporan)	2	136.878.500	146.065.100
2	08	06	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (dokumen)	1	46.854.500	51.539.900
2	08	06	1.01	03	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Prov/Kab/Kota	umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	50	90.024.000	94.525.200
2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (laporan)	3	254.917.200	272.238.000
2	08	06	1.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Prov/Kab/Kota	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (orang)	50	78.500.000	87.000.000
2	08	06	1.02	05	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	1	96.781.000	101.620.000
2	08	06	1.02	06	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1	79.636.200	83.618.000
2	08	07			Program Perlindungan Khusus Anak	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan		Persentase anak kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada lembaga layanan (Dinas/UPTD PPA) di provinsi	100%	423.500.000	458.350.000
2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (laporan)	2	115.000.000	125.000.000
2	08	07	1.01	03	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Prov/Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	100	65.000.000	70.000.000
2	08	07	1.01	04	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Prov/Kab/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu Kewenangan Provinsi	1	50.000.000	55.000.000
2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	3	130.000.000	140.000.000
2	08	07	1.02	05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Prov/Kab/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	15	65.000.000	70.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
					Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	08 07 1.02 06	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Prov/Kab/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	15	65.000.000	70.000.000
2	08 07 1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (laporan)	2	178.500.000	193.350.000
2	08 07 1.03 04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Prov/Kab/Kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	1	85.000.000	90.000.000
2	08 07 1.03 08	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Prov/Kab/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	34	93.500.000	103.350.000
2	14	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						1.590.768.500	1.701.032.700
2	14 02	Program Pengendalian Penduduk	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	56%	460.824.000	491.860.100
2	14 02 1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah laporan hasil pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah provinsi	3	325.824.000	346.860.100
2	14 02 1.01 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi (dokumen)	1	95.000.000	100.000.000
2	14 02 1.01 03	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK (laporan)	1	136.591.500	143.421.000
2	14 02 1.01 017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1	94.232.500	103.439.100
2	14 02 1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah laporan hasil pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah provinsi (laporan)	2	135.000.000	145.000.000
2	14 02 1.02 02	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga (dokumen)	1	50.000.000	55.000.000
2	14 02 1.02 010	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1	85.000.000	90.000.000
2	14 02	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate</i> (mCPR))	48,76%	476.538.000	513.941.800
						Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate</i> /ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	29,20		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	14	03	1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah laporan hasil pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan lokal (laporan)	6	372.500.000	400.000.000
2	14	03	1.01	06 Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	1	75.000.000	80.000.000
2	14	03	1.01	07 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak- Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal (dokumen)	1	67.500.000	70.000.000
2	14	03	1.01	010 Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1	55.000.000	60.000.000
2	14	03	1.01	011 Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1	50.000.000	55.000.000
2	14	03	1.01	012 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	1	75.000.000	80.000.000
2	14	3	1.01	013 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1	50.000.000	55.000.000
2	14	03	1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah laporan hasil pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (laporan)	2	104.038.000	113.941.800
2	14	03	1.02	02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (organisasi)	40	49.038.000	53.941.800
2	14	03	1.01	04 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangsa Kencana	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	40	55.000.000	60.000.000
2	14	04		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Nilai)	54,36	653.406.500	695.230.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
2	14	04	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang difasilitasi (laporan)	7	503.106.500	540.230.800	
2	14	04	1.01	03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (dokumen)	1	72.500.000	76.125.000
2	14	04	1.01	15	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK (unit)	1	50.000.000	55.000.000
2	14	04	1.01	17	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1	88.728.000	93.164.400
2	14	04	1.01	19	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	60	72.500.000	76.125.000
2	14	04	1.01	21	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	Prov/Kab/Kota	Jumlah PIK-R yang Mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	40	80.000.000	85.000.000
2	14	04	1.01	23	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1	89.378.500	99.816.400
2	14	04	1.01	25	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1	50.000.000	55.000.000
2	14	04	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (laporan)	2	150.300.000	155.000.000
2	14	04	1.02	06	Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	1	65.300.000	65.000.000
2	14	04	1.02	08	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	Prov/Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1	85.000.000	90.000.000
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)										394.184.000	396.393.000	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada lembaga layanan (Dinas/UPTD PPA) di provinsi	100%	299.184.000	296.393.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025		
					Indikator Kinerja	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
2	08 03 1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	299.184.000	296.393.000
2	08 03 1.02 01		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	130 Orang	299.184.000	296.393.000
2	11 11		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada lembaga layanan (Dinas/UPTD PPA) di provinsi	100%	95.000.000	100.000.000
2	11 11 1.01		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	3 Laporan	95.000.000	100.000.000
2	11 11 1.01 06		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	150 Orang	95.000.000	100.000.000
2	09		URUSAN PANGAN						13.320.960.367	17.039.970.367
2	09		DINAS KETAHANAN PANGAN						13.320.960.367	17.039.970.367
2	09 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Nilai Akip Perangkat Daerah	73,70%	9.835.982.467	10.230.992.467
2	09 01 1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	255.200.000	263.400.000
2	09 01 1.01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.000.000	3.500.000
2	09 01 1.01 02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	70.000.000	72.000.000
2	09 01 1.01 03		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	2.000.000	2.200.000
2	09 01 1.01 04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	2.200.000
2	09 01 1.01 05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	2.200.000
2	09 01 1.01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	1.200.000	1.300.000
2	09 01 1.01 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	175.000.000	180.000.000
2	09 01 1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7.439.252.467	7.452.312.467

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
					Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	09 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 orang/14 bulan	7.245.812.467	7.245.812.467
2	09 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	10.000.000	11.000.000
	09 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0
	09 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1.500.000	1.650.000
2	09 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah laporan keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1.500.000	1.650.000
2	09 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1 Dokumen	1.000.000	1.100.000
2	09 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	178.440.000	190.000.000
2	09 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.000.000	1.100.000
2	09 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	7 Dokumen	3.500.000	7.000.000
2	09 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	500.000	1.000.000
2	09 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	500.000	1.000.000
2	09 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah laporan hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan hasil koordinasi penilaian barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	500.000	1.000.000
2	09 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah laporan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Laporan	500.000	1.000.000
2	09 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah laporan rekonsiliasi Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Laporan	500.000	1.000.000
2	09 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Laporan	500.000	1.000.000
2	09 01 1.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah dokumen hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Dokumen	500.000	1.000.000
2	09 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8 Laporan	96.000.000	114.200.000
2	09 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1.000.000	2.000.000
2	09 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	51.000.000	56.100.000
2	09 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	500.000	1.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	09	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	500.000	1.000.000
2	09	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.000.000	1.100.000
2	09	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	20.000.000	22.000.000
2	09	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	12.000.000	20.000.000
2	09	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah orang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2 orang	10.000.000	11.000.000
2	09	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Laporan	725.300.000	748.100.000
2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	12.000.000	13.200.000
2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	2.000.000	2.200.000
2	09	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	70.000.000	77.000.000
2	09	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	2 Paket	55.000.000	61.000.000
2	09	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	3.300.000	3.500.000
2	09	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	500.000	550.000
2	09	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	76.000.000	84.000.000
2	09	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	505.000.000	505.000.000
2	09	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	500.000	550.000
2	09	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	1 Dokumen	1.000.000	1.100.000
2	09	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Unit	630.000.000	901.500.000
2	09	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah unit kendaraan perorangan Dinas Atau kendaraan dinas jabatanyang disediakan	Unit	0	555.000.000
2	09	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di sediakan	3 Unit roda 2, 1 Unit roda 4	400.000.000	75.000.000
2	09	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah paket Mebel yang disediakan	1 Paket	100.000.000	120.000.000
2	09	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Paket	60.000.000	70.000.000
2	09	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	09	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	5.000.000	6.000.000
2	09	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 Unit	60.000.000	70.000.000
2	09	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	5.000.000	5.500.000
2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	285.200.000	298.000.000
2	09	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah laporan penyediaan jasa surat-menysurat	1 Laporan	4.200.000	5.000.000
2	09	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	190.000.000	200.000.000
2	09	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.000.000	3.000.000
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	90.000.000	90.000.000
2	09	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91 Unit	401.530.000	446.480.000
2	09	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	1 Unit	25.000.000	30.000.000
2	09	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	29 Unit	170.000.000	185.000.000
2	09	01	1.09	05	Pemeliharaan Meubel	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Meubel yang dipelihara	1 Unit	500.000	1.000.000
2	09	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	33 Unit	24.000.000	26.450.000
2	09	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0
2	09	01	1.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah gedung dan bangunan lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	2 Unit	166.000.000	185.000.000
2	09	01	1.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	23 Unit	14.030.000	14.030.000
2	09	01	1.09	11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	2 Unit	2.000.000	5.000.000
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	1. Ketersediaan pangan utama (beras) (ton)	303.562	294.000.000	490.000.000
								2. Ketersediaan Energi (Kk/Kap/hari)	3.200			
								3. Ketersediaan Protein (Gr/kap/hari)	64			
2	09	02	1.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi	1 keg	294.000.000	490.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	09	02	1.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang tersedia	1 unit	50.000.000	80.000.000
2	09	02	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	2 Laporan	100.000.000	200.000.000
2	09	02	1.01	06	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia	5 Unit	144.000.000	210.000.000
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	1. Koefisien variasi pangan strategis (beras, cabe merah, bawang merah, kedelai) (CV) 2. Konsumsi Energi (Kkl/Kap/hari) 4. Konsumsi Protein (Gr/kap/hari)	CV beras ≤ 5% CV cabai merah ≤ 2,075,9 62,0	2.120.977.900	2.868.977.900
2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Tersedianya dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1 keg	600.000.000	950.000.000
2	09	03	1.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang tersedia	1 Laporan	25.000.000	50.000.000
2	09	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	25.000.000	50.000.000
2	09	03	1.01	06	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Jumlah dokumen hasil peningkatan ketahanan pangan keluarga	1 dokumen	25.000.000	50.000.000
2	09	03	1.01	07	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	25.000.000	50.000.000
2	09	03	1.01	08	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1 Laporan	230.000.000	350.000.000
2	09	03	1.01	09	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	1 Laporan	25.000.000	50.000.000
2	09	03	1.01	10	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	25.000.000	50.000.000
2	09	03	1.01	11	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1 Unit	50.000.000	100.000.000
2	09	03	1.01	12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan	85.000.000	100.000.000
2	09	03	1.01	13	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	85.000.000	100.000.000
2	09	03	1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Tertaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	6 Dokumen	1.113.977.900	1.268.977.900
2	09	03	1.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Rencana kebutuhan pangan lokal	1 Dokumen	55.000.000	110.000.000
2	09	03	1.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara	88,3 ton	25.000.000	50.000.000
2	09	03	1.02	05	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara	88,3 ton	25.000.000	50.000.000
2	09	03	1.02	06	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	88,3 ton	25.000.000	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	09	03	1.02	07	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara	88,3 ton	958.977.900	958.977.900
2	09	03	1.02	08	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	25.000.000	50.000.000
2	09	03	1.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan	55.000.000	100.000.000
2	09	03	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Laporan	55.000.000	100.000.000
2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Terlaksananya Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	1 keg	352.000.000	550.000.000
2	09	03	1.04	01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 dokumen	124.000.000	150.000.000
2	09	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 laporan	84.000.000	150.000.000
2	09	03	1.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	1 Laporan	120.000.000	200.000.000
2	09	03	1.04	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	1 Laporan	24.000.000	50.000.000
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	PERSENTASE DAERAH RAWAN PANGAN (%)	15,76%	250.000.000	500.000.000
2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	25.000.000	50.000.000
2	09	04	1.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang dimutakhirkan	1 dokumen	25.000.000	25.000.000
2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	4 Dokumen	225.000.000	450.000.000
2	09	04	1.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	75.000.000	150.000.000
2	09	04	1.02	03	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	25.000.000	50.000.000
2	09	04	1.02	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	100.000.000	200.000.000
2	09	04	1.02	05	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen	25.000.000	50.000.000
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi	Prov. Sultra	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan	82,35%	820.000.000	2.950.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	820.000.000	2.950.000.000
2	09	05	1.01	06	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	21 Sertifikat	80.000.000	100.000.000
2	09	05	1.01	07	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	100.000.000	2.000.000.000
2	09	05	1.01	08	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen	100.000.000	200.000.000
2	09	05	1.01	09	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	390.000.000	400.000.000
2	09	05	1.01	10	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	50.000.000	100.000.000
2	09	05	1.01	11	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prov. Sultra	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	100.000.000	150.000.000
2	11				URUSAN LINGKUNGAN HIDUP						15.500.000.000	19.177.327.290
2	11				DINAS LINGKUNGAN HIDUP						15.500.000.000	19.177.327.290
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari dan Luar Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	-	10.195.000.000	12.484.077.290
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Cakupan keterpenuhan sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD (%)	-	255.000.000	281.000.000
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	150.000.000	172.500.000
2	11	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	11.500.000
2	11	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	11.500.000
2	11	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	11.500.000
2	11	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	60.000.000	69.000.000
2	11	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	5.000.000
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Cakupan keterpenuhan administrasi keuangan (%)	-	6.004.950.000	7.706.869.790
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	70 orang	5.826.350.000	7.504.479.790

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
2	11	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	123.600.000	142.140.000
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
2	11	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000	28.750.000
2	11	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
2	11	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	12 Laporan	10.000.000	11.500.000
2	11	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari		-	85.000.000	95.500.000
2	11	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
2	11	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.000.000	17.250.000
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	25.000.000	28.750.000
2	11	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000	17.250.000
2	11	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000	17.250.000
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000	5.000.000
2	11	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari		-	75.000.000	84.750.000
2	11	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	15.000.000	17.250.000
2	11	01	1.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	50.000.000	57.500.000
2	11	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	5.000.000	5.000.000

Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	11	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Cakupan keterpenuhan SDM aparatur yang memenuhi standar disiplin aparatur (%)	-	310.000.000	354.250.000
2	11	01	1.05	01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	25.000.000	28.750.000
2	11	01	1.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	60.000.000	69.000.000
2	11	01	1.05	03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
2	11	01	1.05	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
2	11	01	1.05	05 Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
2	11	01	1.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	150.000.000	172.500.000
2	11	01	1.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	30.000.000	34.500.000
2	11	01	1.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	30.000.000	34.500.000
2	11	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Cakupan keterpenuhan pelayanan administrasi umum perkantoran (%)	-	1.100.000.000	1.263.500.000
2	11	01	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	1 Paket	15.000.000	17.250.000
2	11	01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	57.500.000
2	11	01	1.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	35.000.000	40.250.000
2	11	01	1.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	30.000.000	34.500.000
2	11	01	1.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	175.000.000	201.250.000
2	11	01	1.06	07 Penyediaan Bahan/Material	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	35.000.000	40.250.000
2	11	01	1.06	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.000.000	28.750.000
2	11	01	1.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	725.000.000	833.750.000
2	11	01	1.06	10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
2	11	01	1.06	11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
2	11	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (unit)	-	1.340.000.000	1.541.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
2	11	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	600.000.000	690.000.000
2	11	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	350.000.000	402.500.000
2	11	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1 Unit	30.000.000	34.500.000
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	30.000.000	34.500.000
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Unit	50.000.000	57.500.000
2	11	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	30.000.000	34.500.000
2	11	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	150.000.000	172.500.000
2	11	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	57.500.000
2	11	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	50.000.000	57.500.000
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan perkantoran (%)	-	502.000.000	555.700.000
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	5.750.000
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	275.000.000	316.250.000
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	78.000.000	89.700.000
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	144.000.000	144.000.000
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (unit)	-	523.050.000	601.507.500
2	11	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	30.150.000	34.672.500
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit	102.900.000	118.335.000
2	11	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	50.000.000	57.500.000
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	50.000.000	57.500.000
2	11	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	50.000.000	57.500.000
2	11	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	90.000.000	103.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
					Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	11 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi (unit)	2 Unit	150.000.000	172.500.000
2	11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Cakupan keterpenuhan dokumen perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup (%)	-	1.750.000.000	1.972.500.000
2	11 02 1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Cakupan keterpenuhan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi (%)	-	550.000.000	772.500.000
2	11 02 1.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi (Dokumen)	17 Dokumen	150.000.000	172.500.000
2	11 02 1.01 04	Penyusunan RPPLH Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	1 Dokumen	200.000.000	400.000.000
2	11 02 1.01 05	Penetapan RPPLH Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000
2	11 02 1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kendari	Cakupan keterpenuhan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi (%)	-	1.200.000.000	1.200.000.000
2	11 02 1.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kendari	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun (dokumen)	2 Dokumen	600.000.000	600.000.000
2	11 02 1.02 05	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kendari	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	1 Dokumen	0,00	0,00
	02 1.02 08	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kendari	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	1 Dokumen	600.000.000	600.000.000
2	11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Cakupan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (%)	-	1.600.000.000	1.990.000.000
2	11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Cakupan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (%)	-	350.000.000	402.500.000
2	11 03 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	1 Dokumen	200.000.000	230.000.000
2	11 03 1.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1 Dokumen	150.000.000	172.500.000
2	11 03 1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Cakupan pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (%)	-	1.000.000.000	1.150.000.000
2	11 03 1.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	1 Laporan	375.000.000	431.250.000
2	11 03 1.02 02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	1 Lokasi	375.000.000	431.250.000
2	11 03 1.02 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 Titik	250.000.000	287.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	11	03	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Cakupan pelaksanaan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (%)	-	250.000.000	437.500.000
2	11	03	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 Dokumen	50.000.000	57.500.000
2	11	03	1.03	06	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	50.000.000	57.500.000
2	11	03	1.03	07	Pelaksanaan rehabilitasi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	luas area yang dilakukan rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	1 Ha	0,00	50.000.000
2	11	03	1.03	08	Pelaksanaan Restorasi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	luas area yang dilakukan restorasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	1 Ha	0,00	50.000.000
2	11	03	1.03	09	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	50.000.000	57.500.000
2	11	03	1.03	10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota	1 Kegiatan	50.000.000	57.500.000
2	11	03	1.03	12	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	50.000.000	57.500.000
2	11	03	1.03	13	Pelaksanaan Remediasi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	luas area yang dilakukan remediasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	1 Ha	0,00	50.000.000
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Cakupan Pengelolaan Taman Keekaragam Hayati dan Ruang Terbuka Hijau (%)	-	550.000.000	602.500.000
2	11	04	1.01		Pengelolaan Keekaragaman Hayati Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Cakupan Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati dan Ruang Terbuka Hijau Provinsi (%)	-	550.000.000	602.500.000
2	11	04	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	200.000.000	0,00
2	11	04	1.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kota Kendari	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Ha)	2 Ha	0,00	200.000.000
2	11	04	1.01	08	Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kota Kendari	Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	2 Unit	200.000.000	230.000.000
2	11	04	1.01	09	Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati Lainnya	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi (Ha)	1 Unit	150.000.000	172.500.000
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Cakupan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (%)	-	200.000.000	230.000.000
2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Cakupan keterpenuhan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (%)	-	200.000.000	230.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	11	05	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kota Kendari	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	2 Dokumen	50.000.000	57.500.000
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	KLHK dan Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya (Dokumen)	1 Dokumen	150.000.000	172.500.000
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik		Sultra	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) (%)	-	250.000.000	690.000.000
2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (%)	-	250.000.000	690.000.000
2	11	06	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	KLHK dan Sultra	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	1 Dokumen	200.000.000	230.000.000
2	11	06	1.01	05	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Orang	50.000.000	57.500.000
2	11	06	1.01	06	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	70 Badan Usaha	0,00	402.500.000
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Cakupan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH (%)	-	100.000.000	125.000.000
2	11	07	1.01		Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Cakupan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH (%)	-	50.000.000	62.500.000
2	11	07	1.01	01	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH (Dokumen)	1 Dokumen	50.000.000	62.500.000
11	07	1.02			Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra		-	50.000.000	62.500.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
11	07	1.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	50.000.000	62.500.000	
2	11	08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Cakupan peningkatan kapasitas lingkungan hidup bagi masyarakat (%)	-	430.000.000	494.500.000	
2	11	08	1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi masyarakat	-	430.000.000	494.500.000	
	11	08	1.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	150.000.000	172.500.000
2	11	08	1.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat (orang)	50 Orang	100.000.000	115.000.000
	11	08	1.01	04	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	30 Keluarga	30.000.000	34.500.000
	11	08	1.01	05	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2 Lembaga	150.000.000	172.500.000
2	11	09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Peningkatan persentase jumlah penghargaan lingkungan hidup (%)	-	250.000.000	287.500.000	
2	11	09	1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan (penghargaan)	-	250.000.000	287.500.000	
2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	110 Entitas	250.000.000	287.500.000
2	11	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Cakupan penyelesaian sengketa lingkungan hidup (%)	-	175.000.000	301.250.000	
2	11	10	1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi (%)	-	175.000.000	301.250.000	
2	11	10	1.01	03	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	1 Perkara	25.000.000	28.750.000
2	11	10	1.01	05	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	1 Perkara	0,00	50.000.000
2	11	10	1.01	06	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	1 Perkara	0,00	50.000.000
2	11	10	1.01	07	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	100 Pengaduan	150.000.000	172.500.000
UPTD Laboratorium Lingkungan										500.000.000	575.000.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	11	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Cakupan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (%)	-	500.000.000	575.000.000	
2	11	03	1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Cakupan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (%)	-	500.000.000	575.000.000	
2	11	03	1.01	15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	3 Dokumen	500.000.000	575.000.000
				UPTD Persampahan						0,00	1.600.000.000	
2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Cakupan pengelolaan persampahan regional (%)	-	0'00	1.600.000.000	
2	11	11	1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Cakupan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (%)	-	0'00	1.600.000.000	
2	11	11	1.01	06	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan (Ton)	0 Ton	0'00	100.000.000
2	11	11	1.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Sultra	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia (unit)	0 Unit	0'00	1.500.000.000
2	12			URUSAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						10.176.590.000	10.986.800.000	
2	12			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						10.176.590.000	10.986.800.000	
2	12	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Cakupan pelayanan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Provinsi	-	8.279.590.000	8.839.550.000	
2	12	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana	-	271.000.000	314.000.000	
2	12	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dok	100.000.000	120.000.000
2	12	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	7.000.000	8.000.000
2	12	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	7.000.000	8.000.000
2	12	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	7.000.000	8.000.000
2	12	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap	150.000.000	170.000.000
2	12	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana	-	5.486.790.000	5.607.200.000	
2	12	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Org/Bulan	5.300.000.000	5.406.000.000
2	12	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah laporan keuangan akhir tahun pJumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat daerah	1 Lap	5.790.000	6.200.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	12	01	1,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Lap	181.000.000	195.000.000
2	12	01	1,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terlaksana	-	20.000.000	29.800.000
2	12	01	1,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15 Lap	20.000.000	29.800.000
2	12	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	-	602.600.000	740.450.000
2	12	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	169.600.000	180.200.000
2	12	01	1,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	98.000.000	140.250.000
2	12	01	1,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dok	100.000.000	120.000.000
2	12	01	1,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	75.000.000	100.000.000
2	12	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	68 Orang	80.000.000	100.000.000
2	12	01	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	68 Orang	80.000.000	100.000.000
2	12	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	-	841.000.000	949.700.000
2	12	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	11.000.000	16.700.000
2	12	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	30.000.000	50.000.000
2	12	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55 Paket	57.000.000	70.000.000
2	12	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	70.000.000	74.000.000
2	12	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 Dok	27.000.000	35.000.000
2	12	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Lap	46.000.000	54.000.000
2	12	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Lap	600.000.000	650.000.000
2	12	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	-	282.000.000	341.000.000
2	12	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	56.000.000	56.000.000
2	12	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	50.000.000	50.000.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
					Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	12 01 1,07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	80.000.000	80.000.000
2	12 01 1,07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	96.000.000	155.000.000
2	12 01 1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Pe-	-	169.500.000	191.000.000
2	12 01 1,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 lap	7.500.000	9.000.000
2	12 01 1,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 lap	130.000.000	150.000.000
2	12 01 1,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	32.000.000	32.000.000
2	12 01 1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Baran-	-	606.700.000	666.400.000
2	12 01 1,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	85.000.000	98.900.000
2	12 01 1,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	25.000.000	30.000.000
2	12 01 1,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	400.000.000	425.000.000
2	12 01 1,09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	96.700.000	112.500.000
2	12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk di Provinsi	-	592.000.000	673.250.000
2	12 02 1,01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	-	142.000.000	157.000.000
2	12 02 1,01 01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	17 Dok	32.000.000	32.000.000
2	12 02 1,01 02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	17 Dok	25.000.000	30.000.000
2	12 02 1,01 03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	17 Dok	25.000.000	30.000.000
2	12 02 1,01 04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	2 Dok	20.000.000	25.000.000
2	12 02 1,01 05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	17 Dok	40.000.000	40.000.000
2	12 02 1,02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	-	300.000.000	348.250.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
2	12	02	1,02	01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	17 Lap	25.000.000	27.000.000
2	12	02	1,02	02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Lap	65.000.000	81.250.000
2	12	02	1,02	03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	5 Dok	50.000.000	60.000.000
2	12	02	1,02	04	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	5 Lap	110.000.000	110.000.000
2	12	02	1,02	05	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	15 Lap	50.000.000	70.000.000
2	12	02	1,03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	-	150.000.000	168.000.000
2	12	02	1,03	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	68 Lap	60.000.000	60.000.000
2	12	02	1,03	02	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk	51 Lap	90.000.000	108.000.000
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Persentase Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil bagi Aparatur Disdukcapil	-	695.000.000	777.000.000
2	12	03	1,01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Kegiatan pelayanan pencatatan sipil	-	290.000.000	331.000.000
2	12	03	1,01	01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Ditetapkan	17 Dok	15.000.000	18.000.000
2	12	03	1,01	02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	1 Dok	65.000.000	75.000.000
2	12	03	1,01	03	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	2 Dok	35.000.000	40.000.000
2	12	03	1,01	04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Lap	90.000.000	108.000.000
2	12	03	1,01	05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	17 Dok	85.000.000	90.000.000
2	12	03	1,02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	-	280.000.000	316.000.000
2	12	03	1,02	01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	17 Lap	60.000.000	60.000.000
2	12	03	1,02	02	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Lap	65.000.000	75.000.000
2	12	03	1,02	03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	5 Dok	25.000.000	31.000.000
2	12	03	1,02	04	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	5 Dok	80.000.000	90.000.000
2	12	03	1,02	05	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	15 Lap	50.000.000	60.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	12	03	1.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	125.000.000	130.000.000
2	12	03	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Laporan pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	68 Lap	50.000.000	50.000.000
2	12	03	1.03	02	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	2 Lap	75.000.000	80.000.000
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Persentase pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan dengan baik	-	540.000.000	622.000.000
2	12	04	1,01		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Kegiatan penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara tertib	-	120.000.000	120.000.000
2	12	04	1,01	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17 Dok	120.000.000	120.000.000
2	12	04	1,02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	-	240.000.000	282.000.000
2	12	04	1,02	01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	5 Lap	100.000.000	120.000.000
2	12	04	1,02	02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	2 Lap	90.000.000	110.000.000
2	12	04	1,02	05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	10 Dok	50.000.000	52.000.000
2	12	04	1,03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	-	180.000.000	220.000.000
2	12	04	1,03	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17 Lap	90.000.000	110.000.000
2	12	04	1,03	02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	68 Orang	90.000.000	110.000.000
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Persentase pengelolaan Profil Kependudukan	-	70.000.000	75.000.000
2	12	05	1,01		Penyediaan Profil Kependudukan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Data Kependudukan Kependudukan yang disediakan	-	70.000.000	75.000.000
2	12	05	1,01	01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen penyediaan data kependudukan Provinsi	2 Dok	20.000.000	25.000.000
2	12	05	1,01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	1 Dok	50.000.000	50.000.000
2	13				PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						17.072.414.405	18.791.002.872
2	13				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						17.072.414.405	18.791.002.872
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	96 PERSEN	13.692.587.565	15.061.846.322
2	13	01	1,01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	10 Dokumen	292.000.000	306.600.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	13	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.000.000	15.750.000
2	13	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.000.000	7.350.000
2	13	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.250.000
2	13	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	2.100.000
2	13	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	3.150.000
2	13	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10.000.000	10.500.000
2	13	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	250.000.000	262.500.000
2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.854.587.565	8.931.946.322
2	13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/Bulan	7.692.587.565	8.761.846.322
2	13	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	3.000.000	3.150.000
2	13	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	3.000.000	3.150.000
2	13	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	3.000.000	3.150.000
2	13	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	5.250.000
2	13	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	3.000.000	3.150.000
2	13	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	145.000.000	152.250.000
2	13	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	33.000.000	34.650.000
2	13	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.000.000	3.150.000
2	13	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	30.000.000	31.500.000
2	13	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 Laporan	148.000.000	155.400.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	13	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	100.000.000	105.000.000
2	13	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000	10.500.000
2	13	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	3.000.000	3.150.000
2	13	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	10.000.000	10.500.000
2	13	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	15.000.000	15.750.000
2	13	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	10.000.000	10.500.000
2	13	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Laporan	751.000.000	788.550.000
2	13	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	10.500.000
2	13	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	52.500.000
2	13	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	70.000.000	73.500.000
2	13	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	18.000.000	18.900.000
2	13	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	95.000.000	99.750.000
2	13	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	500.000.000	525.000.000
2	13	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.000.000	3.150.000
2	13	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.250.000
2	13	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	10 Unit	3.721.000.000	3.907.050.000
2	13	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	550.000.000	577.500.000
2	13	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	565.000.000	593.250.000
2	13	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	105.000.000
2	13	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	100.000.000	105.000.000
2	13	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.000.000	3.150.000
2	13	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	3.000.000	3.150.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	13	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000.000.000	1.050.000.000
2	13	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000.000.000	1.050.000.000
2	13	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	400.000.000	420.000.000
2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Usuran	4 Laporan	241.000.000	253.050.000
2	13	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	2.100.000
2	13	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	200.000.000	210.000.000
2	13	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.000.000	3.150.000
2	13	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	36.000.000	37.800.000
2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	23 Unit	652.000.000	684.600.000
2	13	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	100.000.000	105.000.000
2	13	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	150.000.000	157.500.000
2	13	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	28.000.000	29.400.000
2	13	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	2.000.000	2.100.000
2	13	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	2.000.000	2.100.000
2	13	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	170.000.000	178.500.000
2	13	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	105.000.000
2	13	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	105.000.000
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prov. Sultra	PERSENTASE PENATAUSAHAAN PEMERINTAHAN DESA	30 PERSEN	250.000.000	262.500.000
2	13	02	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	3 Dokumen	250.000.000	262.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	13	02	1.01	01	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15 kab	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	1 Dokumen	100.000.000	105.000.000
2	13	02	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15 kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	1 Dokumen	100.000.000	105.000.000
2	13	02	1.01	03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	17 kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	50.000.000	52.500.000
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK	MENURUNNYA KESENJANGAN PENDAPATAN MASYARAKAT	Prov. Sultra	JUMLAH KERJA SAMA DESA	17 DOKUMEN	198.444.440	208.366.620
2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	17 Dokumen	198.444.440	208.366.620
2	13	03	1.01	01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	17 kab/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	2 Dokumen	98.444.440	103.366.620
2	13	03	1.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	15 kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	15 Dokumen	100.000.000	105.000.000
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prov. Sultra	CAKUPAN PEMBINAAN ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	85 PERSEN	675.385.800	776.693.670
2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	26 Dokumen	675.385.800	776.693.670
2	13	04	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	17 kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	11.000.000	12.000.000
2	13	04	1.01	02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	2 Dokumen	75.385.800	76.693.670
2	13	04	1.01	03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15 kab	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	1 Dokumen	11.000.000	11.000.000
2	13	04	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15 kab	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	1 Dokumen	11.000.000	11.000.000
2	13	04	1.01	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15 kab	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	45.000.000	50.000.000
2	13	04	1.01	06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15 kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	2 Dokumen	45.000.000	50.000.000
2	13	04	1.01	07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15 kab	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	10 Orang	21.000.000	22.000.000
2	13	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	17 kab	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	200.000.000	240.000.000
2	13	04	1.01	09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	17 kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	21.000.000	22.000.000
2	13	04	1.01	10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15 kab	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	100 Orang	100.000.000	120.000.000
2	13	04	1.01	11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15 kab	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	10 Orang	11.000.000	12.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	13	04	1.01	12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15 kab	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	1 Dokumen	10.000.000	11.000.000
2	13	04	1.01	13	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15 kab	Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	1 Dokumen	11.000.000	11.000.000
2	13	04	1.01	14	Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15 kab	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	1 Dokumen	11.000.000	11.000.000
2	13	04	1.01	15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15 kab	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	11.000.000	11.000.000
2	13	04	1.01	16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15 kab	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	20.000.000	40.000.000
2	13	04	1.01	17	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15 kab	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	1 Dokumen	10.000.000	11.000.000
2	13	04	1.01	18	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15 kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	11.000.000	11.000.000
2	13	04	1.01	19	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15 kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Dokumen	10.000.000	11.000.000
2	13	04	1.01	20	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15 kab	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	1 Desa	10.000.000	11.000.000
2	13	04	1.01	21	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15 kab	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	1 Laporan	10.000.000	11.000.000
2	13	04	1.01	22	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15 kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	11.000.000
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK	MENURUNNYA KESENJANGAN PENDAPATAN MASYARAKAT	Prov. Sultra	CAKUPAN PEMBINAAN, PENATAAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, LEMBAGA ADAT DESA, LEMBAGA EKONOMI DESA, KELOMPOK USAHA EKONOMI MASYARAKAT	90 PERSEN	2.255.996.600	2.481.596.260
2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	Prov. Sultra	Cakupan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	90 Persen	2.255.996.600	2.481.596.260
2	13	05	1.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	200.000.000	250.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	13	05	1.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	30 Lembaga	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	200.000.000	250.000.000
2	13	05	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	30 Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	20 Lembaga	200.000.000	250.000.000
2	13	05	1.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	Prov. Sultra	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Unit	100.000.000	100.000.000
2	13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	15 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	255.996.600	281.596.260
2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	15 Kab	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	100.000.000	150.000.000
2	13	05	1.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	50.000.000	50.000.000
2	13	05	1.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000
2	13	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	Kendari	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	1.000.000.000	1.000.000.000
2	13	05	1.01	10	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	Prov. Sultra	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1 Keluarga	50.000.000	50.000.000
2	13	05	1.01	11	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	Prov. Sultra	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	1 Keluarga	50.000.000	50.000.000
2					Urusan Perhubungan						46.378.767.492	51.070.644.241
2					Dinas Perhubungan						46.378.767.492	51.070.644.241
2	15	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100 %	28.315.392.028	31.146.931.231
2	15	01	1,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	10 Laporan	804.410.400	884.851.440
2	15	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	200.987.600	221.086.360

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	15	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	129.862.600	142.848.860
2	15	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	129.882.600	142.870.860
2	15	01	1,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	154.227.600	169.650.360
2	15	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	189.450.000	208.395.000
2	15	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20 Dokumen	17.946.055.448	19.740.660.993
2	15	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Bulan	17.595.358.098	19.354.893.908
2	15	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	344.077.400	378.485.140
2	15	01	1,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.331.150	3.664.265
2	15	01	1,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3.288.800	3.617.680
2	15	01	1,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Laporan Aset yang tepat waktu	2 Dokumen	232.137.600	255.351.360
2	15	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2.255.000	2.480.500
2	15	01	1,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	100.000.000	110.000.000
2	15	01	1,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dokumen	129.882.600	142.870.860
2	15	01	1,04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Berkualitas Dan Tepat Waktu	2 Dokumen	12.255.000	13.480.500
2	15	01	1,04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Laporan	12.255.000	13.480.500
2	15	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Hasil Penilaian Kinerja Pegawai (SKP)	210 SKP	582.112.000	640.323.200

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	15	01	1,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	320 Unit	147.900.000	162.690.000
2	15	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	320 Paket	147.900.000	162.690.000
2	15	01	1,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	320 Dokumen	128.156.000	140.971.600
2	15	01	1,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	128.156.000	140.971.600
2	15	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	320 Orang	10.000.000	11.000.000
2	15	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	320 Orang	10.000.000	11.000.000
2	15	01	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	320 Orang	10.000.000	11.000.000
2	15	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Dinas	12 Bulan	2.949.858.350	3.244.844.185
2	15	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	42.568.750	46.825.625
2	15	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	100.000.000	110.000.000
2	15	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	100.000.000	110.000.000
2	15	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	383.921.600	422.313.760
2	15	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	87.390.000	96.129.000
2	15	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	20.778.000	22.855.800
2	15	01	1,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	9 Paket	191.680.000	210.848.000
2	15	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	22.320.000	24.552.000
2	15	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	2.001.200.000	2.201.320.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	15	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Ketersediaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	798.253.230	878.078.553
2	15	01	1,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit	100.000.000	110.000.000
2	15	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	100.000.000	110.000.000
2	15	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Paket	85.113.950	93.625.345
2	15	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	116.000.000	127.600.000
2	15	01	1,07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit	100.000.000	110.000.000
2	15	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.000.000	110.000.000
2	15	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	197.139.280	216.853.208
2	15	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	36 Laporan	3.040.360.000	3.344.396.000
2	15	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13.000.000	14.300.000
2	15	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.290.360.000	1.419.396.000
2	15	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.737.000.000	1.910.700.000
2	15	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Pemenuhan Kebutuhan Gedung Kantor serta Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan	1.949.950.000	2.144.945.000
2	15	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	59 Unit	103.500.000	113.850.000
2	15	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	16.450.000	18.095.000
2	15	01	1,09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	15.000.000	16.500.000
2	15	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	1.000.000.000	1.100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	15	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas/ UPTD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	815.000.000	896.500.000
2	15	01			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Persentase Perengkapan Jalan Provinsi Yang Terpasang	82,50%	2.705.326.600	2.975.859.260
									Persentase Pemenuhan Kebutuhan Terminal Tipe B	52,94%	3.112.646.016	3.423.910.617
									Cakupan Pelayanan Terminal Type B	100%	400.000.000	440.000.000
2	15	02	1,01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Dokumen Rencana Jaringan LLAJ Prov	1 Dokumen	264.577.600	291.035.360
2	15	02	1,01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	82.288.800	90.517.680
2	15	02	1,01	04	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
2	15	02	1,01	06	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	66 Laporan	82.288.800	90.517.680
2	15	02	1,02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	3300 Unit	1.306.449.000	1.437.093.900
2	15	02	1,02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun	2 Unit	553.224.500	608.546.950
2	15	02	1,02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	3300 Unit	553.224.500	608.546.950
2	15	02	1,02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit	100.000.000	110.000.000
2	15	02	1,02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	3300 Unit	100.000.000	110.000.000
2	15	02	1,03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah terminal yang memiliki sarana prasana yang lengkap dan berfungsi	11 Unit	2.148.246.016	2.363.070.617
									Jumlah kendaraan Roda Empat Yang Terlayani	42500 Unit	300.000.000	330.000.000
2	15	02	1,03	06	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	11 Dokumen	100.000.000	110.000.000
2	15	02	1,03	07	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	11 Unit	500.000.000	550.000.000
2	15	02	1,03	08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Terminal yang Menyenggarakan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	11 Unit	100.000.000	110.000.000
2	15	02	1,03	09	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Orang	100.000.000	110.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	15	02	1,03	10	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	11 Unit	1.448.246.016	1.593.070.617
2	15	02	1,03	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	11 Unit	200.000.000	220.000.000
2	15	02	1,05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Pelaksanaan MRLM untuk jaringan Jalan Provinsi	1 Dokumen	572.000.000	629.200.000
2	15	02	1,05	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	150.000.000	165.000.000
2	15	02	1,05	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Dokumen	70.000.000	77.000.000
2	15	02	1,05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	32 Laporan	70.000.000	77.000.000
2	15	02	1,05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	66 Laporan	132.000.000	145.200.000
2	15	02	1,05	07	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	3986 Unit	150.000.000	165.000.000
2	15	02	1,06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Persetujuan Hasil Andalalin untuk jalan provinsi.	1 Dokumen	305.200.000	335.720.000
2	15	02	1,06	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	100.000.000	110.000.000
2	15	02	1,06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	110.200.000	121.220.000
2	15	02	1,06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	52 Laporan	95.000.000	104.500.000
2	15	02	1,07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Audit dan Inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi.	104 Laporan	257.100.000	282.810.000
									Jumlah kendaraan Roda Empat Yang Telah diinspeksi Keselamatan	104 Laporan	100.000.000	110.000.000
2	15	02	1,07	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	50.000.000	55.000.000
2	15	02	1,07	04	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Penumpang Tipe B	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan	62.900.000	69.190.000
2	15	02	1,07	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	32 Laporan	100.000.000	110.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	15	02	1,07	15	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	16 Laporan	50.000.000	55.000.000
2	15	02	1,07	15	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	4 Dokumen	94.200.000	103.620.000
2	15	02	1,08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	7 Dokumen	175.800.000	193.380.000
2	15	02	1,08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	80 Unit	50.000.000	55.000.000
2	15	02	1,08	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	80 Laporan	125.800.000	138.380.000
2	15	02	1,09		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	7 Dokumen	100.000.000	110.000.000
2	15	02	1,09	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	50.000.000	55.000.000
2	15	02	1,09	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	17 Dokumen	50.000.000	55.000.000
2	15	02	1,10		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah jaringan trayek AKDP	8 Dokumen	100.000.000	110.000.000
2	15	02	1,10	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	8 Dokumen	50.000.000	55.000.000
2	15	02	1,10	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	17 Dokumen	50.000.000	55.000.000
2	15	02	1,11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah jaringan trayek AKDP	8 Dokumen	100.000.000	110.000.000
2	15	02	1,11	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	8 Dokumen	50.000.000	55.000.000
2	15	02	1,11	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	17 Dokumen	50.000.000	55.000.000
2	15	02	1,12		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah izin operasional Taxi On Line	4 Dokumen	100.000.000	110.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	15	02	1,12	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	50.000.000	55.000.000
2	15	02	1,12	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	17 Dokumen	50.000.000	55.000.000
2	15	02	1,13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah izin trayek AKDP	8 Dokumen	100.000.000	110.000.000
2	15	02	1,13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	80 Unit	50.000.000	55.000.000
2	15	02	1,13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	17 Laporan	50.000.000	55.000.000
2	15	02	1,14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Izin Penyelenggaraan Taxi	4 Dokumen	125.700.000	138.270.000
2	15	02	1,14	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	17 Laporan	75.700.000	83.270.000
2	15	02	1,14	04	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	21 Unit	50.000.000	55.000.000
2	15	02	1,15		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Dokumen tarif angkutan disetiap Kabupaten kota	7 Dokumen	162.900.000	179.190.000
2	15	02	1,15	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	50.000.000	55.000.000
2	15	02	1,15	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	50.000.000	55.000.000
2	15	02	1,15	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	62.900.000	69.190.000
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas &	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Persentase Izin Pelayaran Diterbitkan	100%	595.900.000	655.490.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
					Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		Pemerataan Pembangunan			Persentase Pelabuhan Dalam Kondisi Mantap	34,62%	8.322.194.299	9.154.413.729	
					Cakupan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan	100%	2.927.308.550	3.274.039.405	
2	75 03 1,01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Badan Usaha Angkutan Laut Yang Telah Memiliki Izin	2 Dokumen	103.600.000	113.960.000
2	15 03 1,01 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	2 Unit	50.000.000	55.000.000
2	15 03 1,01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	6 Laporan	53.600.000	58.960.000
2	15 03 1,02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional yang memiliki izin	4 Dokumen	103.600.000	113.960.000
2	15 03 1,02 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	50 Unit	50.000.000	55.000.000
2	15 03 1,02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	4 Laporan	53.600.000	58.960.000
2	15 03 1,05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Lintasan Angkutan Penyeberangan dan Persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	17 Dokumen	112.900.000	124.190.000
2	15 03 1,05 01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	17 Dokumen	50.000.000	55.000.000
2	15 03 1,05 02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	8 Laporan	62.900.000	69.190.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
					Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	15 03 1,06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Badan Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas yang memiliki Izin	164 Izin	112.900.000	124.190.000
2	15 03 1,06 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	164 Dokumen	50.000.000	55.000.000
2	15 03 1,06 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	8 Laporan	62.900.000	69.190.000
2	15 03 1,07	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antardaerahKabupaten/KotadalamDaerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang telah ditetapkan	1 Dokumen	162.900.000	179.190.000
2	15 03 1,07 01	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	50.000.000	55.000.000
2	15 03 1,07 02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	15 Dokumen	50.000.000	55.000.000
2	15 03 1,07 03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	6 Laporan	62.900.000	69.190.000
2	15 03 1,08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Dokumen / Laporan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	21 Dokumen	330.000.000	363.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	15	03	1,08	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	7 Dokumen	200.000.000	220.000.000
2	15	03	1,08	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	7 Dokumen	50.000.000	55.000.000
2	15	03	1,08	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	7 Laporan	80.000.000	88.000.000
2	15	03	1,09		Pembangunan, Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Kondisi Layak	2 Unit	4.417.606.299	4.859.366.929
2	15	03	1,09	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	7 Unit	50.000.000	55.000.000
2	15	03	1,09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	2 Unit	4.198.206.299	4.618.026.929
2	15	03	1,09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2 Laporan	69.400.000	76.340.000
2	15	03	1,09	05	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	2 Unit	100.000.000	110.000.000
2	15	03	1,10		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7 Unit	2.916.388.000	3.208.026.800
									Pengoperasian Pelabuhan	18552 Trip	2.927.308.550	3.274.039.405
2	15	03	1,10	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	15 Laporan	50.000.000	55.000.000
2	15	03	1,10	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	15 Unit	2.866.388.000	3.153.026.800
2	15	03	1,10	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	15 Unit	2.717.308.550	2.989.039.405
2	15	03	1,10	04	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia	15 Unit	50.000.000	55.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	15	03	1,11	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	15 Laporan	100.000.000	110.000.000
2	15	03	1,11	01 Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	6 Orang	60.000.000	120.000.000
2	15	03	1,11	02 Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Dokumen / Laporan Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	28 Dokumen	119.400.000	131.340.000
2	15	03	1,12	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	14 Dokumen	50.000.000	55.000.000
2	15	03	1,12	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	14 Laporan	69.400.000	76.340.000
2	15	03	1,12	02 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Dokumen / Laporan Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	14 Dokumen	100.000.000	110.000.000
2	15	03	1,13	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	7 Dokumen	50.000.000	55.000.000
2	15	03	1,13	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	7 Laporan	50.000.000	55.000.000
2	15	03	1,13	02 Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	14 Laporan	119.400.000	131.340.000
2	15	03	1,14	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	7 Unit	50.000.000	55.000.000
2	15	03	1,14	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	7 Laporan	69.400.000	76.340.000
2	15	03	1,14	02 Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	6 Laporan	100.000.000	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
2	15	03	1,15		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dokumen	50.000.000	55.000.000
2	15	03	1,15	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	3 Laporan	50.000.000	55.000.000
2	15	03	1,15	02	Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	6 Laporan	100.000.000	110.000.000
2	15	03	1,16		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dokumen	50.000.000	55.000.000
2	15	03	1,16	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	3 Laporan	50.000.000	55.000.000
2	15	03	1,16	02	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Dokumen / Laporan Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	16 Laporan	119.400.000	131.340.000
2	15	03	1,16		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8 Dokumen	50.000.000	55.000.000
2	15	03	1,16	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah	Provinsi SULTRA	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	8 Laporan	69.400.000	76.340.000
					Dinas Komunikasi dan Informatika						21.442.300.000	22.514.414.500
2	16				Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika						20.024.000.000	21.025.199.500
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kendari	Cakupan pelayanan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Provinsi	100%	9.931.000.000	10.427.550.000
2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersedia Tepat Waktu	7 Dok	42.000.000	44.100.000
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dok	5.500.000	5.775.000
2	16	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	5.500.000	5.775.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	16	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	5.500.000	5.775.000
2	16	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	2.500.000	2.625.000
2	16	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	2.500.000	2.625.000
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	5.500.000	5.775.000
2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	15.000.000	15.750.000
2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan yang Tersedia	3 Dok	5.518.500.000	5.794.425.000
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang	5.350.000.000	5.617.500.000
2	16	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	150.000.000	157.500.000
2	16	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dok	2.500.000	2.625.000
2	16	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun pJumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat daerah	1 Lap	5.500.000	5.775.000
2	16	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	2.500.000	2.625.000
2	16	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Lap	5.500.000	5.775.000
2	16	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	2.500.000	2.625.000
2	16	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Administrasi BMD yang Tersedia	1 Dok	41.000.000	43.050.000
2	16	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	3.500.000	3.675.000
2	16	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	30.000.000	31.500.000
2	16	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Lap	2.500.000	2.625.000
2	16	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	2.500.000	2.625.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	16	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	2.500.000	2.625.000
2	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Tersedia	1 Dok	284.500.000	298.725.000
2	16	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	5.000.000	5.250.000
2	16	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	120.000.000	126.000.000
2	16	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	3.000.000	3.150.000
2	16	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	5.500.000	5.775.000
	16	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	40.000.000	42.000.000
2	16	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	55.000.000	57.750.000
2	16	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	56.000.000	58.800.000
2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang Tersedia	1 Dok	1.037.500.000	1.089.375.000
2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	5.250.000
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.000.000	5.250.000
2	16	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	52.500.000	55.125.000
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	25.000.000	26.250.000
2	16	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dok	10.000.000	10.500.000
2	16	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	65.000.000	68.250.000
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Luar Daerah dan Dalam Daerah Prov. Sultra (Semua Kab/Kota)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	850.000.000	892.500.000
2	16	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	25.000.000	26.250.000
2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah yang Disediakan	5 Paket	1.370.000.000	1.438.500.000
2	16	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	300.000.000	315.000.000
2	16	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	300.000.000	315.000.000
2	16	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	120.000.000	126.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	16	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	250.000.000	262.500.000
2	16	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	300.000.000	315.000.000
2	16	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	105.000.000
2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pe	12 Lap	1.220.000.000	1.281.000.000
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	5.000.000	5.250.000
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	300.000.000	315.000.000
2	16	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Lap	5.000.000	5.250.000
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	910.000.000	955.500.000
2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Pemeliharaan Baran	2 Lap	417.500.000	438.375.000
2	16	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	80.000.000	84.000.000
2	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	15.000.000	15.750.000
2	16	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	10.000.000	10.500.000
2	16	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	12.500.000	13.125.000
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	157.500.000
2	16	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150.000.000	157.500.000
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Publik	1 Lap	6.723.350.000	7.059.517.000
2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik Daerah Provinsi	1 Dok	6.723.350.000	7.059.517.000
2	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dok	63.500.000	66.675.000
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Prov. Sultra (Semua Kab/Kota)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dok	5.000.000	5.250.000
2	16	02	1.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dok	150.000.000	157.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dok	15.000.000	15.750.000
2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dok	69.000.000	72.450.000
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3 Dok	115.500.000	121.275.000
2	16	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Prov. Sultra (Semua Kab/Kota)	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 Layanan	1.200.000.000	1.260.000.000
2	16	02	1.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2 Dok	1.339.850.000	1.406.842.000
2	16	02	1.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dok	65.000.000	68.250.000
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 Orang	92.500.000	97.125.000
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dok	1.500.000.000	1.575.000.000
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dok	66.000.000	69.300.000
2	16	02	1.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Prov. Sultra (Semua Kab/Kota)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2 Unit	2.042.000.000	2.144.100.000
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Aplikasi Informatika yang Dikelola dan Terhubung Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3 Unit	3.369.650.000	3.538.132.500
2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Memiliki Layanan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	70%	2.351.000.000	2.468.550.000
2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Subdomain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	2 Dok	251.000.000	263.550.000
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	2.100.000.000	2.205.000.000
2	16	03	1.02		Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Inovasi yang Mendukung e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	20%	1.018.650.000	1.069.582.500
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	2 Dok	330.000.000	346.500.000
2	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dok	32.500.000	34.125.000
2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	20.000.000	21.000.000
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	2 Dok	82.500.000	86.625.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
2	16	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dok	19.500.000	20.475.000
2	16	03	1.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	49 OPD	19.500.000	20.475.000
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	50.000.000	52.500.000
2	16	03	1.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Layanan	78.000.000	81.900.000
2	16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dok	73.750.000	77.437.500
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dok	85.300.000	89.565.000
2	16	03	1.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dok	32.500.000	34.125.000
2	16	03	1.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dok	195.100.000	204.855.000
2	20				Urusan Bidang Statistik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik				716.700.000	752.535.000
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1 Dok	716.700.000	752.535.000
2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	30%	716.700.000	752.535.000
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dok	35.500.000	37.275.000
2	20	02	1.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	59 Orang	120.000.000	126.000.000
2	20	02	1.01	03	Membangun Meta Data Statistik Sektoral	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2 Dok	79.300.000	83.265.000
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Orang yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral	3 Orang	46.800.000	49.140.000
2	20	02	1.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	120.000.000	126.000.000
2	20	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	3 Dok	315.100.000	330.855.000
2	21				Urusan Bidang Persandian	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik				701.600.000	736.680.000
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	30%	701.600.000	736.680.000
2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah	20%	619.100.000	650.055.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	2 Dok	127.000.000	133.350.000
2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	3 Lap	156.500.000	164.325.000
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kota Kendari, Kota Baubau dan Kab. Kolaka	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Lap	257.600.000	270.480.000
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	10 OPD	78.000.000	81.900.000
2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	20%	82.500.000	86.625.000
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Kendari	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	10 OPD	82.500.000	86.625.000
02	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						19.993.000.000	21.526.000.000
					DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH						19.993.000.000	21.526.000.000
02	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	PROVINSI	CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 Persen	12.826.000.000	12.826.000.000
02	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	7 Dokumen	595.000.000	595.000.000
02	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000
02	17	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000
02	17	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000
02	17	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000
02	17	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000
02	17	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15.000.000	15.000.000
02	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	500.000.000	500.000.000
02	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.659.000.000	7.659.000.000
02	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/Bulan	7.500.000.000	7.500.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02	17	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	90.000.000	90.000.000
02	17	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000
02	17	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
02	17	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	5.000.000
02	17	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
02	17	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	50.000.000	50.000.000
02	17	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000
02	17	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7 Dokumen	14.000.000	14.000.000
02	17	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000
02	17	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000
02	17	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	2.000.000	2.000.000
02	17	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.000.000	2.000.000
02	17	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.000.000	2.000.000
02	17	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.000.000	2.000.000
02	17	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000
02	17	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	7 Dokumen	12.000.000	12.000.000
02	17	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000
02	17	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000
02	17	01	1.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.000.000	2.000.000
02	17	01	1.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02	17	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	2.000.000	2.000.000
02	17	01	1.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000
02	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11 Laporan	79.000.000	79.000.000
02	17	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10 Unit	5.000.000	5.000.000
02	17	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	40.000.000	40.000.000
02	17	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000
02	17	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000
02	17	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000
02	17	01	1.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	5 Laporan	5.000.000	5.000.000
02	17	01	1.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	5 Orang	5.000.000	5.000.000
02	17	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	10.000.000	10.000.000
02	17	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	10.000.000	10.000.000
02	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 Laporan	875.000.000	875.000.000
02	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	5.000.000
02	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	10.000.000
02	17	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	10.000.000
02	17	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	50.000.000
02	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	50.000.000
02	17	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12.000.000	12.000.000
02	17	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	5.000.000
02	17	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	30.000.000	30.000.000
02	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	700.000.000	700.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02	17	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000
02	17	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000
02	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah yang Tersedia	11 Unit	960.000.000	960.000.000
02	17	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	300.000.000	300.000.000
02	17	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	150.000.000	150.000.000
02	17	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	2 Unit	20.000.000	20.000.000
02	17	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	20.000.000
02	17	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000	10.000.000
02	17	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000	10.000.000
02	17	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	50.000.000
02	17	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	100.000.000
02	17	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	200.000.000
02	17	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	100.000.000
02	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Usuran	4 Laporan	252.000.000	252.000.000
02	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	2.000.000
02	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	240.000.000	240.000.000
02	17	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000
02	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	10 Unit	2.380.000.000	2.380.000.000
02	17	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	100.000.000	100.000.000
02	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	20.000.000	20.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
					Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02 17 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	20.000.000	20.000.000
02 17 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	20.000.000	20.000.000
02 17 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.000.000	5.000.000
02 17 01 1.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	5.000.000	5.000.000
02 17 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000.000	2.000.000.000
02 17 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	100.000.000
02 17 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	100.000.000
02 17 01 1.09 12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha	10.000.000	10.000.000
02 17 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Persentase koperasi yang memperoleh izin usaha	100 Persen	1.000.000.000	1.100.000.000
02 17 02 1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah	1 Dokumen	500.000.000	550.000.000
02 17 02 1.01 01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	100 Unit Usaha	500.000.000	550.000.000
02 17 02 1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	500.000.000	550.000.000
02 17 02 1.02 01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 Unit Usaha	500.000.000	550.000.000
02 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat		Persentase koperasi aktif	100 Persen	1.000.000.000	1.250.000.000
02 17 03 1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat		Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Dokumen	300.000.000	500.000.000
02 17 03 1.01 03	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	300 Unit Usaha	300.000.000	500.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	700.000.000	750.000.000
02	17	03	1.02	02	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	300 Unit Usaha	700.000.000	750.000.000
02	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat		Persentase koperasi sehat	100 Persen	600.000.000	650.000.000
02	17	04	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat		Jumlah Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Dokumen	600.000.000	650.000.000
02	17	04	1.01	03	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	150 Unit Usaha	600.000.000	650.000.000
02	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat		Jumlah Anggota Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	600 Orang	1.300.000.000	1.500.000.000
02	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat		Jumlah Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	1.300.000.000	1.500.000.000
02	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	600 Orang	1.300.000.000	1.500.000.000
02	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat		Persentase koperasi yang memperoleh dukungan fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan	100 Persen	530.000.000	660.000.000
02	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat		Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3 Dokumen	530.000.000	660.000.000
02	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	100 Unit Usaha	50.000.000	60.000.000
02	17	06	1.01	03	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	200 Keluarga	50.000.000	60.000.000
02	17	06	1.01	04	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	100 Kelompok Masyarakat	200.000.000	250.000.000
02	17	06	1.01	06	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	200 Unit Usaha	30.000.000	50.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02	17	06	1.01	07	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	100 Unit Usaha	50.000.000	60.000.000
02	17	06	1.01	08	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	100 Unit Usaha	100.000.000	120.000.000
02	17	06	1.01	09	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	150 Unit Usaha	50.000.000	60.000.000
02	17	07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat		Persentase UMKM yang memperoleh dukungan fasilitasi pemberdayaan	100 Persen	2.407.000.000	3.140.000.000
02	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2 Dokumen	2.407.000.000	3.140.000.000
02	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	200 Unit Usaha	750.000.000	800.000.000
02	17	07	1.01	02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	600 Orang	350.000.000	600.000.000
02	17	07	1.01	03	Pemulihan Usaha-Usaha Kecil	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha	200.000.000	250.000.000
02	17	07	1.01	04	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	10 Unit Usaha	100.000.000	200.000.000
02	17	07	1.01	05	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	500 Unit Usaha	100.000.000	120.000.000
02	17	07	1.01	06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	200 Orang	200.000.000	250.000.000
02	17	07	1.01	07	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	100 Unit Usaha	100.000.000	130.000.000
02	17	07	1.01	08	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	100 Unit Usaha	100.000.000	130.000.000
02	17	07	1.01	09	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	20 Unit Usaha	400.000.000	530.000.000
02	17	07	1.01	10	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	30.000.000	40.000.000
02	17	07	1.01	11	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	30.000.000	40.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02	17	07	1.01	12	Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	47.000.000	50.000.000
02	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Persentase usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah	100 Persen	330.000.000	400.000.000
02	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Berkembangnya Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	2 Dokumen	330.000.000	400.000.000
02	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	50 Unit Usaha	50.000.000	60.000.000
02	17	08	1.01	02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	50 Orang	30.000.000	40.000.000
02	17	08	1.01	03	Pengembangan Usaha Kecil	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	50.000.000	60.000.000
02	17	08	1.01	04	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	50 Lembaga	100.000.000	120.000.000
02	17	08	1.01	05	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Wirausaha yang Difasilitasi	50 Orang	50.000.000	60.000.000
02	17	08	1.01	06	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sultra	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	50.000.000	60.000.000
UPTD BALAI LATIHAN KOPERASI											58.960.097.933	78.362.975.686
02	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	PROVINSI	CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 Persen	48.096.113.045	66.407.400.000
02	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11 Laporan	44.516.424.395	61.928.900.000
02	17	01	1.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	5 Orang	5.000.000	5.000.000
2	18				Usuran Penanaman Modal						16.310.694.431	22.421.300.000
2	18				Dinas Penanaman Modal & PTSP						16.310.694.431	22.421.300.000
2	18	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah	CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persen	10.983.430.781	16.001.300.000
2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja yang Disusun	6 Dokumen	466.134.751	565.000.000
2	18	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	196.270.001	250.000.000
2	18	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	94.200.000	100.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	18	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	50.000.000	55.000.000
2	18	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	100.000.000	110.000.000
2	18	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	25.664.750	50.000.000
2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	27 Dokumen	5.395.627.581	8.068.500.000
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang	5.160.747.731	7.700.000.000
2	18	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	60 Dokumen	194.880.000	275.000.000
2	18	01	1.02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 Laporan	7.500.000	27.500.000
2	18	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000
2	18	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	50 Laporan	22.499.850	55.000.000
2	18	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000
2	18	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah	3 Dokumen	24.214.499	16.500.000
2	18	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	14.214.499	5.500.000
2	18	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000	5.500.000
2	18	1	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000
2	18	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	102.260.000	459.800.000
2	18	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 paket	31.800.000	184.800.000
2	18	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000
2	18	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000
2	18	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	20.230.000	220.000.000
2	18	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	10 orang	20.000.000	22.000.000
2	18	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	50 orang	20.230.000	22.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	717.650.000	1.353.000.000
2	18	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	100.000.000	165.000.000
2	18	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah unit Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 paket	300.000.000	330.000.000
2	18	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	37.550.000	110.000.000
2	18	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	25 paket	6.500.000	55.000.000
2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	60 paket	15.500.000	55.000.000
2	18	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	10.000.000	11.000.000
2	18	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	11.000.000
2	18	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	60 Laporan	18.200.000	55.000.000
2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	250 Laporan	209.900.000	550.000.000
2	18	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000
2	18	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000
2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	Unit	779.825.350	973.500.000
2	18	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 unit	52.000.000	66.000.000
2	18	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah paket mebel yang disediakan	10 paket	83.219.050	66.000.000
2	18	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	210.000.000	275.000.000
2	18	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 unit	15.000.000	16.500.000
2	18	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	5 unit	419.606.300	550.000.000
2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan	12 Laporan	690.043.600	973.500.000
2	18	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	10 laporan	10.400.000	16.500.000
2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	5 Laporan	305.643.600	550.000.000
2	18	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000	22.000.000
2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 Laporan	354.000.000	385.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	29 unit	2.807.675.000	3.591.500.000
2	18	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	106.805.000	275.000.000
2	18	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah mebel yang dipelihara	5 Unit	15.000.000	16.500.000
2	18	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 unit	45.870.000	50.000.000
2	18	01	1.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Pelihara/ Rehabilitasi	1 Unit	1.500.000.000	1.650.000.000
2	18	01	1.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Rehabilitasi	5 Unit	140.000.000	500.000.000
2	18	01	1.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah paket pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor yang dilaksanakan	1 Paket	1.000.000.000	1.100.000.000
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah investor yang mendapatkan insentif investasi	4 investor	762.125.000	935.000.000
2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Terkait Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1 Kegiatan	350.000.000	385.000.000
2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Perda	350.000.000	385.000.000
2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Potensi investasi Unggulan Provinsi Sultra yang Dipetakan	Potensi Unggulan	412.125.000	550.000.000
2	18	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Peraturan daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Perda RUPMP	200.000.000	220.000.000
2	18	02	1.02	05	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	Peta Potensi	212.125.000	330.000.000
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah media promosi penanaman modal	4 media	2.042.000.000	2.350.000.000
2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	4 kegiatan	2.042.000.000	2.350.000.000
2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi Penanaman Modal Provinsi	4 Dokumen	250.000.000	2.000.000.000
2	18	03	1.01	03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1.792.000.000	350.000.000

Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	18	04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Dalam dan Luar Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan	Nilai	1.373.138.650	1.870.000.000
2	18	04	1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kab/Kota	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Regulasi Terkait Penyelenggaraan Perizinan yang Disusun	2 Dokumen	973.138.650	1.210.000.000
2	18	04	1.01	05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Dokumen	600.000.000	660.000.000
2	18	04	1.01	06 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4000 Pelaku Usaha	140.177.500	220.000.000
2	18	04	1.01	07 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah	50 Kegiatan Usaha	232.961.150	330.000.000
2	18	04	1.02	Penanaman Modal yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Penanaman Modal yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi yang Dilaksanakan	1 Izin	400.000.000	660.000.000
2	18	04	1.02	06 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	60 Pelaku Usaha	400.000.000	660.000.000
2	18	05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN	Rp. 21.73 Triliun	1.050.000.000	1.155.000.000
2	18	05	1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN	Rp. 21.73 Triliun	1.050.000.000	1.155.000.000
2	18	05	1.01	04 Pengawasan Penanaman Modal	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	17 Kabupaten/ Kota Se-Sultra	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	171 Kegiatan Usaha	600.000.000	660.000.000
2	18	05	1.01	05 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	17 Kabupaten/ Kota Se-Sultra	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	1784 Kegiatan Usaha	450.000.000	495.000.000
2	18	06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		Jumlah izin yang diterbitkan	500 izin	100.000.000	110.000.000
2	18	06	1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Paket Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	500 Dokumen	100.000.000	110.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	18	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan	500 Dokumen	100.000.000	110.000.000
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						25.000.000.000	27.815.392.309
2	19				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						25.000.000.000	27.815.392.309
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari			10.535.540.888	11.594.287.286
2	19	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari			82.000.000	90.200.000
2	19	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	52.000.000	57.200.000
2	19	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000
2	19	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000
2	19	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000
2	19	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000
2	19	01	1.01	06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	5.000.000	5.500.000
2	19	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	5.000.000	5.500.000
2	19	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari			8.506.295.781	9.362.117.668
2	19	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	7.858.656.376	8.644.214.322
2	19	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	196.944.000	216.638.400
2	19	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	55.000.000	60.500.000
2	19	01	1.02	04	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	15.405.275	22.445.803
2	19	01	1.02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	55.000.000	60.500.000
2	19	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	2 Dokumen	11.000.220	12.100.242
2	19	01	1.02	07	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	18 laporan	265.100.110	291.610.121

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	19	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis prognosa realisasi anggaran	1 Dokumen	49.189.800	54.108.780
2	19	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari			10.000.000	11.000.000
2	19	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000
2	19	01	1.03	06	Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	5.000.000	5.500.000
2	19	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari			286.532.390	315.185.629
2	19	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Unit Peningkatan sarana prasarana disiplin pegawai	1 Unit	5.582.390	6.140.629
2	19	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	1 Paket	77.000.000	84.700.000
2	19	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	100.000.000	110.000.000
2	19	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	7 Orang	103.950.000	114.345.000
2	19	01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari			637.286.757	701.015.433
2	19	01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	26.403.487	29.043.836
2	19	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	46.200.000	50.820.000
2	19	01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	95.156.300	104.671.930
2	19	01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	75.264.970	82.791.467
2	19	01	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen	3.762.000	4.138.200
2	19	01	06	08	Fasilitas kunjungan Tamu	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah makan dan minuman yang disediakan	1 laporan	99.000.000	108.900.000
2	19	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	275.000.000	302.500.000
2	19	01	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokum Penatausahaan dinamis yang disediakan	1 Dokumen	16.500.000	18.150.000
2	19	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari			109.285.000	120.213.500
2	19	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	46.750.000	51.425.000
2	19	01	1.07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah unit peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Unit	62.535.000	68.788.500

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	19	01	08		Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari			377.133.960	414.847.356
2	19	01	08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	6.600.000	7.260.000
2	19	01	08	02	Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya Air dan Listrik	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	365.533.960	402.087.356
2	19	01	08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor lainnya	1 Laporan	5.000.000	5.500.000
2	19	01	09		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari			527.007.000	579.707.700
2	19	01	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	165.825.000	182.407.500
2	19	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	61.182.000	67.300.200
2	19	01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	3 Unit	200.000.000	220.000.000
2	19	01	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	10 Unit	50.000.000	55.000.000
2	19	01	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Luas tanah yang dilakukan pemeliharaan rehabilitasi	10 Unit	50.000.000	55.000.000
2	19	02			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Sultra			1.860.000.000	2.156.000.000
2	19	02	01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Sultra			760.000.000	836.000.000
2	19	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda kader provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Sultra	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	50 orang	150.000.000	165.000.000
2	19	02	1.01	10	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Sultra	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	1 Orang	50.000.000	55.000.000
2	19	02	1.01	11	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Sultra	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	2 Dokumen	200.000.000	220.000.000
2	19	02	1.01	12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Sultra	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	50 Persentase	150.000.000	165.000.000
2	19	02	1.01	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Sultra	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	2 Orang	100.000.000	110.000.000
2	19	02	1.01	15	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Sultra	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	50 Orang	110.000.000	121.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025					
					Indikator Kinerja	Target							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					
2	19	02	1.02		Pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Sultra				1.100.000.000	1.320.000.000
2	19	02	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Sultra	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda	100 Persentase	100.000.000	110.000.000	
2	19	02	1.02	04	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Sultra	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	1 Organisasi	1.000.000.000	1.210.000.000	
2	19	03			Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Sultra			11.954.459.112	13.350.105.023	
2	19	03	1.01		Pembinaa dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Sultra			400.000.000	440.000.000	
2	19	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan pusat pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan Oleh masyarakat dan Dunia Usaha	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Sultra	Jumlah pusat pembinaan dan pengembangan olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang dikembangkan	1 Unit	150.000.000	165.000.000	
2	19	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan, Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh kumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	1 Dokumen	250.000.000	275.000.000	
2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Sultra			7.854.250.000	8.639.675.000	
2	19	03	1.01	04	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Sultra	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	250 Orang	654.250.000	719.675.000	
2	19	03	1.01	05	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Sultra	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	200.000.000	220.000.000	
2	19	03	1.01	06	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Sultra	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	1 Kegiatan	7.000.000.000	7.700.000.000	
2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Sultra			1.650.000.000	1.815.000.000	
2	19	03	1.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Sultra	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	150 Orang	400.000.000	440.000.000	
2	19	03	1.03	06	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Sultra	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	20 Orang	200.000.000	220.000.000	
2	19	03	1.01	07	Pemusatan Lathan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Sultra	Jumlah Pemusatan Lathan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	100 Pelatda	840.000.000	924.000.000	
2	19	03	1.01	08	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Sultra	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	17 Dokumen	110.000.000	121.000.000	
2	19	03	1.01	09	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Sultra	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	50 Orang	100.000.000	110.000.000	
2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Sultra			2.050.209.112	2.455.430.023	
2	19	03	1.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait		Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	1 Dokumen	2.000.209.112	2.400.430.023	

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	19	03	1.04	05	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Sultra	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Provinsi	1 Dokumen	50.000.000	55.000.000
2	19	04			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Sultra	Jumlah Prestasi kepramukaan	100%	650.000.000	715.000.000
2	19	04	01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Sultra	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina	100%	650.000.000	715.000.000
2	19	04	1.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi		Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan		Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	400.000.000	440.000.000
2	19	04	1.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Sultra	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	1 Unit	200.000.000	220.000.000
2	19	04	1.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Sultra	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1 laporan	50.000.000	55.000.000
2	23				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah						25.000.000.000	28.950.000.000
2	23				Urusan Perpustakaan						24.200.000.000	27.895.000.000
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	31,08-%	22.500.000.000	25.615.000.000
2	23	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Laporan Kinerja, Keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan Fungsi OPD	100 Persen	410.000.000	505.000.000
2	23	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	75.000.000	80.000.000
2	23	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	50.000.000	55.000.000
2	23	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	30.000.000	40.000.000
2	23	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	50.000.000	65.000.000
2	23	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Perubahan DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	30.000.000	40.000.000
2	23	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2 Laporan	75.000.000	100.000.000
2	23	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	100.000.000	125.000.000
2	23	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Dukungan terhadap Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100 Persen	11.225.000.000	11.760.000.000
2	23	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	110 Orang/Bulan	11.000.000.000	11.500.000.000
2	23	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	25.000.000	30.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	23	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	25.000.000	30.000.000
2	23	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	25.000.000	30.000.000
2	23	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	25.000.000	30.000.000
2	23	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	25.000.000	30.000.000
2	23	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Laporan	75.000.000	80.000.000
2	23	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000	30.000.000
2	23	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	105.000.000	122.500.000
2	23	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.000.000	17.500.000
2	23	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.000.000	17.500.000
2	23	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	15.000.000	17.500.000
2	23	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000	17.500.000
2	23	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000	17.500.000
2	23	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000	17.500.000
2	23	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.000.000	17.500.000
2	23	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	100 Persen	5.000.000	7.500.000
2	23	01	1.04		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	5.000.000	7.500.000
2	23	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	100 Persen	455.000.000	550.000.000
2	23	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	30.000.000	35.000.000
2	23	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	200.000.000	250.000.000
2	23	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000	30.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	23	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000	30.000.000
2	23	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	25.000.000	30.000.000
2	23	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	150.000.000	175.000.000
2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	100 Persen	1.335.000.000	1.570.000.000
2	23	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	50.000.000	60.000.000
2	23	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	50.000.000	75.000.000
2	23	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	50.000.000	75.000.000
2	23	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	100.000.000	150.000.000
2	23	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	20.000.000	30.000.000
2	23	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	20.000.000	25.000.000
2	23	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	75.000.000	100.000.000
2	23	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000	75.000.000
2	23	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	845.000.000	900.000.000
2	23	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	75.000.000	80.000.000
2	23	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Penyediaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100 Persen	6.900.000.000	8.550.000.000
2	23	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit	250.000.000	300.000.000
2	23	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	1.000.000.000	1.250.000.000
2	23	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	750.000.000	1.000.000.000
2	23	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 Unit	3.000.000.000	3.500.000.000
2	23	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	50 Unit	1.000.000.000	1.250.000.000
2	23	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	3 Unit	200.000.000	250.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	23	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 Unit	500.000.000	750.000.000
2	23	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	200.000.000	250.000.000
2	23	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	100 Persen	1.450.000.000	1.780.000.000
2	23	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	25.000.000	30.000.000
2	23	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	1.250.000.000	1.500.000.000
2	23	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	100.000.000	150.000.000
2	23	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	75.000.000	100.000.000
2	23	01	1.09	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	100 Persen	615.000.000	770.000.000
2	23	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15 Unit	100.000.000	150.000.000
2	23	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	30.000.000	40.000.000
2	23	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	40 Unit	60.000.000	65.000.000
2	23	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	1 Unit	25.000.000	30.000.000
2	23	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara	1 Unit	50.000.000	60.000.000
2	23	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	250.000.000	275.000.000
2	23	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000	75.000.000
2	23	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000	75.000.000
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pembinaan Perpustakaan Sekolah/ Madrasah, Perguruan Tinggi, Umum, dan Desa	28,24%	1.350.000.000	1.765.000.000
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	63,94%	975.000.000	1.290.000.000
2	23	02	1.01	02	<i>Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi</i>	<i>Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif</i>	Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	<i>Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</i>	<i>Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Provinsi sesuai Kewenangannya.</i>	<i>40 Perpustakaan</i>	<i>150.000.000</i>	<i>175.000.000</i>

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	23	02	1.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Provinsi yang dikembangkan	40 Eksemplar	25.000.000	30.000.000
2	23	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	60 Perpustakaan	250.000.000	300.000.000
2	23	02	1.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Khusus yang dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	100.000.000	150.000.000
2	23	02	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	50 Orang	100.000.000	150.000.000
2	23	02	1.01	08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Deposit yang dikembangkan	17 Perpustakaan	50.000.000	85.000.000
2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi Perpustakaan	50.000 Eksemplar	50.000.000	75.000.000
2	23	02	1.01	15	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	10 Perpustakaan	200.000.000	250.000.000
2	23	02	1.01	16	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	50.000.000	75.000.000
2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Prov. Sultra	Peningkatan Gerakan Gemar Membaca dalam Mewujudkan Masyarakat yang Kreatif dan Inovatif	100 Persen	375.000.000	475.000.000
2	23	02	1.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Prov. Sultra	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	17 Lokus	75.000.000	100.000.000
2	23	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Prov. Sultra	Jumlah Orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	30 Orang	75.000.000	100.000.000
2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Prov. Sultra	Jumlah Layanan Perpustakaan Literasi Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang dikembangkan	17 Perpustakaan	150.000.000	175.000.000
2	23	02	1.02	06	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Prov. Sultra	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	2 Orang	75.000.000	100.000.000
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Prov. Sultra	Cakupan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	28,65%	350.000.000	515.000.000
2	23	03	1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Prov. Sultra	Tersedianya Informasi dan Usaha Karya Cetak dan Karya Rekam bagi Masyarakat	100 Persen	50.000.000	65.000.000
2	23	03	1.01	01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Prov. Sultra	Jumlah Koleksi KCKR yang dihimpun dan dikelola serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	1 Eksemplar	50.000.000	65.000.000
2	23	03	1.02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Prov. Sultra	Tersedianya Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Masyarakat	100 Persen	100.000.000	150.000.000
2	23	03	1.02	01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder lainnya yang diterbitkan	2 Entry	50.000.000	75.000.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	23	03	1.02	02	Penerbitan Katalog Bibliografi Daerah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Prov. Sultra	Jumlah Bibliografi Daerah yang diterbitkan	1 Naskah	50.000.000	75.000.000
2	23	03	1.03		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Prov. Sultra	Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan	100 Persen	150.000.000	200.000.000
2	23	03	1.03	01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Prov. Sultra	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	100 Orang	75.000.000	100.000.000
2	23	03	1.03	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Prov. Sultra	Jumlah naskah Kuno yang dilakukan Pengembangan yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	100 Eksamplar	75.000.000	100.000.000
2	23	03	1.04		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Prov. Sultra	Tersedia dan Terolahnya Koleksi Budaya Etnis Nusantara	100 Persen	50.000.000	100.000.000
2	23	03	1.04	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Prov. Sultra	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan Pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	100 Eksamplar	25.000.000	50.000.000
2	23	03	1.04	02	Pengolahan dan Penyangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Prov. Sultra	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	100 Eksamplar	25.000.000	50.000.000
2	24				Usuran Kearsipan			Prov. Sultra			800.000.000	1.055.000.000
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah arsip dinamis dan statis yang dikelola	27,83%	500.000.000	655.000.000
2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Arsip Dinamis Daerah yang Dikelola	100 Persen	200.000.000	270.000.000
2	24	02	1.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	18 Laporan	100.000.000	150.000.000
2	24	02	1.01	04	Penyusutan Arsip Dinamis	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1 Arsip	50.000.000	60.000.000
2	24	02	1.01	06	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	1 Arsip	50.000.000	60.000.000
2	24	02	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip yang Autentik dan Terpercaya	100 Persen	50.000.000	60.000.000
2	24	02	1.02	05	Akuisisi Arsip Statis	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	100 Arsip	50.000.000	60.000.000
2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Pelaksanaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada Daerah	100 Persen	250.000.000	325.000.000
2	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi melalui JIKN	381 Pengguna	200.000.000	250.000.000
2	24	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	1 Laporan	50.000.000	75.000.000
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan tansparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	27,03%	300.000.000	400.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
2	24	03	1.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Penyelamatan Arsip OPD akibat Penggabungan, Pembubaran, Pemekaran Organisasi	100 Persen	150.000.000	200.000.000
2	24	03	1.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Daerah Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah provinsi	5 Daftar	50.000.000	60.000.000
2	24	03	1.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah provinsi	500 Arsip	50.000.000	75.000.000
2	24	03	1.03	03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Pendampingan Penyelamatan Bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	500 Arsip	50.000.000	65.000.000
2	24	03	1.04		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Melindungi Fisik Arsip Asli	12 Bulan	150.000.000	200.000.000
2	24	03	1.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang dinilai dan Ditetapkan sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	500 Arsip	50.000.000	75.000.000
2	24	03	1.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1.250 Arsip	100.000.000	125.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						88.700.000.000	93.041.360.463
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						88.700.000.000	93.041.360.463
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	20.758.361.841	21.900.229.734
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	268.960.714	386.358.750
3	25	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	113.738.520	119.425.446
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	105.000.000
3	25	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.208.570	2.318.999
3	25	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.405.484	5.675.758
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	146.608.140	153.938.547
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat	200 Orang	18.191.531.151	19.101.107.509

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/ Bulan	17.924.747.151	18.820.984.509
3	25	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	266.784.000	280.123.000
3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	7.000.000	7.350.000
3	25	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.000.000	1.050.000
3	25	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.000.000	1.050.000
3	25	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1.000.000	1.050.000
3	25	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.000.000	1.050.000
3	25	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.000.000	1.050.000
3	25	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.000.000	1.050.000
3	25	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.000.000	1.050.000
3	25	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	22.000.000	23.100.000
3	25	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	5.000.000	5.250.000
3	25	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	3.000.000	3.150.000
3	25	01	1.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	4.000.000	4.200.000
3	25	01	1.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	5.000.000	5.250.000
3	25	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	5.000.000	5.250.000
3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	100.476.650	105.500.483
3	25	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	71.476.650	75.050.483
3	25	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.000.000	1.050.000
3	25	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.000.000	1.050.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
					Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	25 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.000.000	1.050.000
3	25 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.000.000	1.050.000
3	25 01 1.05 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1 Orang	1.000.000	1.050.000
3	25 01 1.05 07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	1.000.000	1.050.000
3	25 01 1.05 08	Pemindahan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	5 Orang	1.000.000	1.050.000
3	25 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	20.000.000	21.000.000
3	25 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	1.000.000	1.050.000
3	25 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	1.000.000	1.050.000
3	25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	1.272.489.347	1.336.113.814
3	25 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.297.197	6.612.056
3	25 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	237.405.000	249.275.250
3	25 01 1.06 04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.656.500	24.839.325
3	25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.173.600	29.582.280
3	25 01 1.06 06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.599.000	4.828.950
3	25 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.557.000	26.834.850
3	25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	946.801.050	994.141.103
3	25 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	1 Unit	52.568.000	55.196.400
3	25 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1.000.000	1.050.000
3	25 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	35.000.000	36.750.000
3	25 1 1.07 03	Pengadaan Alat Besar	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1.000.000	1.050.000
3	25 01 1.07 04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1 Unit	1.000.000	1.050.000
3	25 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	8.568.000	8.996.400

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000.000	1.050.000
3	25	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000.000	1.050.000
3	25	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1.000.000	1.050.000
3	25	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000.000	1.050.000
3	25	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000.000	1.050.000
3	25	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000.000	1.050.000
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	4 Laporan	646.334.478	678.651.202
3	25	01	1.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.090.000	6.394.500
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	205.544.478	215.821.702
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	434.700.000	456.435.000
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah				197.001.501	206.851.576
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	122.384.115	128.503.321
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	6.132.000	6.438.600
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	DKP Prov Sultra	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	68.485.386	71.909.655
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Luas Kawasan Perairan Laut Yang Memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	302953,66 Ha	1.881.706.941	1.974.292.288
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	16 Kab / Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Dokumen	1.852.456.941	1.943.579.788
3	25	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	16 Kab / Kota	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen	503.895.000	529.089.750

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	16 Kab / Kota	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	301644,49 Ha	873.063.069	916.716.222
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	16 Kab / Kota	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	445.498.872	467.773.816
3	25	02	1.01	04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	16 Kab / Kota	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	20 Orang	30.000.000	30.000.000
3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut Di Bawah 12 Mil Di Luar Minyak dan Bumi Gas	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut Di Bawah 12 Mil Di Luar Minyak dan Bumi Gas	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut Di Bawah 12 Mil Di Luar Minyak dan Bumi Gas	16 Kab / Kota			1.000.000	1.050.000
3	25	02	1.02	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil Di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil Di Luar Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil Di Luar Minyak dan Gas Bumi		Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Rekomendasi	1.000.000	1.050.000
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	16 Kab / Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 Laporan	28.250.000	29.662.500
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	16 Kab / Kota	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang	15.750.000	16.537.500
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	16 Kab / Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10 Kelompok	5.000.000	5.250.000
3	25	02	1.03	03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil	16 Kab / Kota	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	30 Orang	5.000.000	5.250.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	25	02	1.03	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	16 Kab / Kota	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Informasi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	30 Kelompok	2.500.000	2.625.000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	16 Kab / Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Nilai Tukar Nelayan	259 Ton 104 NTN	53.891.307.889	56.585.862.981
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai Dengan 12 Mil	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai Dengan 12 Mil	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai Dengan 12 Mil		Jumlah Laporan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	1 Laporan	32.491.200.560	34.115.750.285
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	16 Kab / Kota	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	131.124.000	137.680.200
3	25	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	16 Kab / Kota	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100 Unit	31.981.839.215	33.580.931.175
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penjaminan Ketersediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Penjaminan Ketersediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap	16 Kab / Kota	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	10 Unit	378.237.345	397.138.910
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Prov Sultra	Jumlah Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	13 Pelabuhan	21.400.107.329	22.470.112.696
3	25	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Prov Sultra	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	10 Unit	21.400.007.329	22.470.007.696
3	25	03	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penyediaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Penyediaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Prov Sultra	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	1 Layanan	100.000	105.000
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKP Prov Sultra	Jumlah Produksi benur/udang dan benih ikan	37 Juta Ekor 410000 Ton	10.196.032.594	10.509.755.188
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Laut	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Laut	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Laut	DKP Prov Sultra	Jumlah Laporan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Laporan	4.866.433.513	5.109.755.188

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Laut	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Laut	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Laut	DKP Prov Sultra	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Yang Terbangun	100 Unit	4.856.433.513	5.099.255.188
3	25	04	1.05	06	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan atau Manfaat Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kab / Kota	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan atau Manfaat Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kab / Kota	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan atau Manfaat Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kab / Kota	DKP Prov Sultra	Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Budidaya yang dikembangkan (Kelompok)	1 Dokumen	10.000.000	10.500.000
3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat				Jumlah Laporan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	1 Laporan	5.329.599.081	5.400.000.000
3	25	04	1.06	01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Unit	1.000.100.000	1.000.000.000
3	25	04	1.06	02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 Unit	4.329.499.081	4.400.000.000
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SDKP	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Program Pengawasan	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Program Pengawasan SDKP	Prov Sultra	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	153 Kelompok	1.438.645.794	1.510.578.084
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pengawasan SDKP Sampai Dengan 12 Mil	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pengawasan SDKP Sampai Dengan 12 Mil	Prov Sultra	Jumlah Laporan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Laporan	1.408.645.794	1.479.078.084
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	DKP Prov Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	15.103.644	15.858.826
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	DKP Prov Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	290.441.550	304.963.628
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawasa (POKMASWAS)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawasa (POKMASWAS)	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawasa (POKMASWAS)	DKP Prov Sultra	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawasa (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	50 Kelompok	1.103.100.600	1.158.255.630

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	25	05	1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pengawasan SDKP Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pengawasan SDKP Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi	Prov Sultra	Jumlah Laporan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	30.000.000	31.500.000	
3	25	05	1.02	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	DKP Prov Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	10.000.000	10.500.000
3	25	05	1.02	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	DKP Prov Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	10.000.000	10.500.000
3	25	05	1.02	03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	DKP Prov Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	10.000.000	10.500.000
3	25	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			Prov Sultra	Jumlah Konsumsi Ikan	70,95 Kg / Kap / Tahun	533.944.941	560.642.188
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengelolaan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengelolaan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengelolaan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Prov Sultra	ragam produk olahan bernilai tambah dan penguatan pangsa pasar yang meningkat	1 Laporan	43.602.300	45.782.415
3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman Untuk Di Konsumsi Atau Digunakan dan Berdaya Saing	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Menghasilkan Produk Yang Aman Untuk Di Konsumsi Atau Digunakan dan Berdaya Saing	DKP Prov Sultra	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	26 Unit Usaha	43.602.300	45.782.415

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	25	06	1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	490.342.641	514.859.773
3	25	06	1.03	02 Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DKP Prov Sultra	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	30 Unit Usaha	490.342.641	514.859.773
				UPTD BALAI PELAYANAN JASA USAHA, DOCK DAN PERBENGKELAN						100.000.000	105.000.000
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						100.000.000	105.000.000
3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						100.000.000	105.000.000
3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pelayanan Jasa Usaha, Dock dan Perbengkelan	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pelayanan Jasa Usaha, Dock dan Perbengkelan				100.000.000	105.000.000
3	25	03	1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil				100.000.000	105.000.000
3	25	03	1.01	03 Penjaminan Ketersediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penjaminan Ketersediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Penjaminan Ketersediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap	DKP Prov Sultra	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	215 Unit	100.000.000	105.000.000
				UPTD BALAI BENIH PERIKANAN						100.000.000	105.000.000
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						100.000.000	105.000.000
3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						100.000.000	105.000.000
3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Balai Benih Perikanan (BPP)	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Balai Benih Perikanan (BPP)		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		100.000.000	105.000.000
3	25	04	1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Jumlah Laporan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		100.000.000	105.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
3	25	04	1.06	01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	DKP Prov Sultra	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	100.000.000	105.000.000
					UPTD BALAI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN						100.000.000	105.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						100.000.000	105.000.000
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						100.000.000	105.000.000
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Penerapan Mutu Hasil Perikanan		Jumlah Konsumsi Ikan Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI)	70,95 Kg / Kap / Tahun 1636 UPP	100.000.000	105.000.000
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Jumlah Laporan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1 Laporan	100.000.000	105.000.000
3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Melalui Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	DKP Prov Sultra	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	30 Unit Usaha	100.000.000	105.000.000
3	26				Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata						34.751.344.988	36.161.922.608
					DINAS PARIWISATA						34.751.344.988	36.161.922.608
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	13.219.390.988	13.553.372.608
3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	3 Dokumen	252.386.000	265.006.000
3	26	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	20.000.000	21.000.000
3	26	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	227.136.000	238.493.000
3	26	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.250.000	5.513.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	108 Dokumen	8.352.535.988	8.443.175.608
3	26	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/Bulan	8.174.662.988	8.256.408.608
3	26	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	172.623.000	181.254.000
3	26	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.250.000	5.513.000
3	26	01	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 Dokumen	53.433.000	56.105.000
3	26	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	53.433.000	56.105.000
3	26	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Laporan	132.010.000	138.610.000
3	26	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	95 Paket	68.141.000	71.547.000
3	26	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	15.967.000	16.766.000
3	26	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	31.935.000	33.531.000
3	26	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	15.967.000	16.766.000
3	26	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	50 Laporan	1.703.964.000	1.789.162.000
3	26	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.492.000	13.117.000
3	26	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	500.000.000	525.000.000
3	26	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	400.000.000	420.000.000
3	26	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	59.055.000	62.008.000
3	26	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	68.141.000	71.548.000
3	26	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	20.489.000	21.513.000
3	26	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	68.787.000	72.226.000
3	26	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	575.000.000	603.750.000
3	26	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	19 Unit	1.615.527.000	1.696.303.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	26	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	478.000.000	501.900.000
3	26	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	100.000.000	105.000.000
3	26	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	150.000.000	157.500.000
3	26	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	289.400.000	303.870.000
3	26	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	598.127.000	628.033.000
3	26	01	1.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Usuran	25 Laporan	373.651.000	392.333.000
3	26	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.743.000	2.880.000
3	26	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	207.236.000	217.597.000
3	26	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	163.672.000	171.856.000
3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	35 Unit	735.884.000	772.678.000
3	26	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	59.590.000	62.570.000
3	26	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	55.648.000	58.430.000
3	26	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	50.000.000	52.500.000
3	26	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	50.646.000	53.178.000
3	26	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	520.000.000	546.000.000
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Rata - Rata Lama Tinggal Wisatawan	7,63 Hari	15.066.403.000	15.819.722.000
3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikelola	2 Lokasi	776.190.000	815.000.000
3	26	02	1.01	01	Penepatan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	776.190.000	815.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Destinasi Wisata yang Dikelola	2 Lokasi	13.781.314.000	14.470.378.000
3	26	02	1.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2 Dokumen	204.750.000	214.986.000
3	26	02	1.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	13.006.629.000	13.656.960.000
3	26	02	1.03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2 Lokasi	230.685.000	242.219.000
3	26	02	1.03	10	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	100 Orang	250.000.000	262.500.000
3	26	02	1.03	12	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2 Laporan	89.250.000	93.713.000
3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Industri Pariwisata yang Difasilitasi Mendapatkan Tanda Daftar Usaha	5 Industri	508.899.000	534.344.000
3	26	02	1.04	07	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE)	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	5 Usaha	161.479.000	169.553.000
3	26	02	1.04	10	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	200.000.000	210.000.000
3	26	02	1.04	13	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	1 Laporan	147.420.000	154.791.000
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Kunjungan Wisatawan	6.666.000 Orang	4.087.091.000	4.291.445.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025		
					Indikator Kinerja	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
3	26 03 1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Laporan Pemasaran Pariwisata Daerah	10 Laporan	4.087.091.000	4.291.445.000
3	26 03 1.01 01		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	264.359.000	277.576.000
3	26 03 1.01 05		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2 Dokumen	139.838.000	146.830.000
3	26 03 1.01 06		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Sulawesi Tenggara	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	3.682.894.000	3.867.039.000
3	26 04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah Usulan Produk Ekraf yang Difasilitasi /Mendapatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1 Usulan	1.695.960.000	1.780.758.000
3	26 04 1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah Laporan Kabupaten/Kota Kreatif yang Difasilitasi	5 Laporan	965.960.000	1.014.258.000
3	26 04 1.01 03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	2 Laporan	172.409.000	181.029.000
3	26 04 1.01 06		Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	2 Dokumen	793.551.000	833.229.000
3	26 04 1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah Dokumen Ekosistem Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	4 Dokumen	730.000.000	766.500.000
3	26 04 1.02 05		Pengembangan Sistem Pemasaran	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	200.000.000	210.000.000
3	26 04 1.02 10		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	30.000.000	31.500.000
3	26 04 1.02 12		Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	1 Dokumen	200.000.000	210.000.000
3	26 04 1.02 15		Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	1 Lembaga	100.000.000	100.000.000
3	26 04 1.02 18		Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	2 Produk	200.000.000	215.000.000
3	26 05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dibina	200 Orang	682.500.000	716.625.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	26	05	1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Mengalami Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan	200 Orang	682.500.000	716.625.000
3	26	05	1.01	04 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	50 Orang	123.850.000	130.043.000
3	26	05	1.01	12 Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	40 Orang	133.400.000	140.070.000
3	26	05	1.01	14 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	40 Orang	56.700.000	59.535.000
3	26	05	1.01	16 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	40 Orang	155.925.000	163.721.000
3	26	05	1.01	17 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	40 Orang	155.925.000	163.721.000
3	26	05	1.01	18 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Sulawesi Tenggara	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5 Laporan	56.700.000	59.535.000
3	27			Urusan Pertanian						151.018.280.700	156.520.378.770
				DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN						98.942.300.000	99.267.300.000
3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100 Persen (%)	47.153.700.000	47.153.700.000
3	27	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	73.500.000	73.500.000
3	27	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	40.000.000	40.000.000
3	27	01	1.01	02 Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.500.000	5.500.000
3	27	01	1.01	03 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.500.000	5.500.000
3	27	01	1.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.500.000	5.500.000
3	27	01	1.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.500.000	5.500.000
3	27	01	1.01	06 Penyusunan lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	6.000.000	6.000.000
3	27	01	1.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.500.000	5.500.000
3	27	01	1.02	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Dokumen	36.312.600.000	36.312.600.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	375 Orang/ Bulan	36.000.000.000	36.000.000.000
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	12.000.000	12.000.000
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	5.300.000	5.300.000
3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Dokumen	290.000.000	290.000.000
3	27	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.300.000	5.300.000
3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	5.300.000	5.300.000
3	27	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.300.000	5.300.000
3	27	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.300.000	5.300.000
3	27	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	5.300.000	5.300.000
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Laporan	355.000.000	355.000.000
3	27	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Pegawai yang Menerima Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	350 Paket	200.000.000	200.000.000
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang	150.000.000	150.000.000
3	27	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	5.000.000	5.000.000
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 laporan	2.387.000.000	2.387.000.000
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	42.000.000	42.000.000
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	150.000.000
3	27	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	50.000.000
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	110.000.000	110.000.000
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	110.000.000	110.000.000
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	170.000.000	170.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1.700.000.000	1.700.000.000
3	27	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000
3	27	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah yang Tersedia	26 Unit	5.000.000.000	5.000.000.000
3	27	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	100.000.000	100.000.000
3	27	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000	500.000.000
3	27	01	1.07	03	Pengadaan Alat Besar	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	1.000.000.000	1.000.000.000
3	27	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Mebel yang Disediakan	10 Unit	200.000.000	200.000.000
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	500.000.000	500.000.000
3	27	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1.500.000.000	1.500.000.000
3	27	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1.000.000.000	1.000.000.000
3	27	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	200.000.000	200.000.000
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	4 Laporan	1.365.000.000	1.365.000.000
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	5.000.000
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	800.000.000	800.000.000
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	200.000.000	200.000.000
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	360.000.000	360.000.000
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	170 Unit	1.650.000.000	1.650.000.000
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	50 Unit	500.000.000	500.000.000
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya	30 Unit	100.000.000	100.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	27	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Periziniannya	30 Unit	50.000.000	50.000.000
3	27	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	50.000.000	50.000.000
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	50.000.000	50.000.000
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	500.000.000	500.000.000
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	200.000.000	200.000.000
3	27	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Distannak Prov. Sultra	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	200.000.000	200.000.000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	JUMLAH LAPORAN SARANA PERTANIAN YANG TERSEDIA DAN DIKEMBANGKAN	6 Laporan	17.145.000.000	16.875.000.000
3	27	02	1,01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Sarana Pertanian yang Peredarannya Diawasi	5 Laporan	13.215.000.000	13.215.000.000
3	27	02	1,01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	13.045.000.000	13.045.000.000
3	27	02	1,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Laporan	170.000.000	170.000.000
3	27	02	1,02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman yang Diawasi	2 Laporan	1.100.000.000	830.000.000
3	27	02	1,02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Sertifikat Benih	75 Sertifikat	300.000.000	30.000.000
3	27	02	1,02	05	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	800.000.000	800.000.000
3	27	02	1,03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi yang Dikelola	4 Laporan	650.000.000	650.000.000
3	27	02	1,03	02	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	100.000.000	100.000.000
3	27	02	1,03	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	1 Laporan	300.000.000	300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
3	27	02	1,03	04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	2 Laporan	150.000.000	150.000.000
3	27	02	1,03	06	Penilaian galur SDG Hewan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah galur SDG hewan yang dinilai	1 Galur	100.000.000	100.000.000
3	27	02	1,04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengalami Peningkatan	2 Laporan	68.000.000	68.000.000
3	27	02	1,04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Laporan	50.000.000	50.000.000
3	27	02	1,04	04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Laporan	18.000.000	18.000.000
3	27	02	1,05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Dikendalikan dan Diawasi	1 Laporan	18.000.000	18.000.000
3	27	02	1,05	04	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 Laporan	18.000.000	18.000.000
3	27	02	1,07		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain yang Tersedia	2 Laporan	2.094.000.000	2.094.000.000
3	27	02	1,07	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	100 Ton	648.000.000	648.000.000
3	27	02	1,07	04	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	120 Ekor	1.446.000.000	1.446.000.000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	JUMLAH LAPORAN PRASARANA PERTANIAN YANG TERSEDIA DAN DIKEMBANGKAN	1 Laporan	23.548.600.000	23.548.600.000
3	27	03	1,01		Penataan Prasarana Pertanian	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Prasarana Pertanian yang Tertata	9 Dokumen	23.548.600.000	23.548.600.000
3	27	03	1,01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan komoditas Pertanian	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan komoditas Pertanian	3 Dokumen	3.000.000.000	3.000.000.000
3	27	03	1,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	15.300.000.000	15.300.000.000
3	27	03	1,01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen	1.090.000.000	1.090.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	27	03	1,01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Dokumen	1.158.600.000	1.158.600.000
3	27	03	1,01	13	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan	3 Ha	3.000.000.000	3.000.000.000
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	JUMLAH LAPORAN KASUS KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER YANG DIKENDALIKAN	5 Laporan	2.500.000.000	2.500.000.000
3	27	04	1,01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang terjamin	5 Laporan	1.000.000.000	1.000.000.000
3	27	04	1,01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	2 Laporan	1.000.000.000	1.000.000.000
3	27	04	1,02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi yang Terawasi	5 Laporan	500.000.000	500.000.000
3	27	04	1,02	04	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	2 Laporan	200.000.000	200.000.000
3	27	04	1,02	05	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	2 Laporan	200.000.000	200.000.000
3	27	04	1,02	07	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 Laporan	100.000.000	100.000.000
3	27	04	1,03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/ Kompartemen Bebas Penyakit yang Diterapkan	2 Laporan	550.000.000	550.000.000
3	27	04	1,03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	1 Unit	250.000.000	250.000.000
3	27	04	1,03	02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	1 Laporan	100.000.000	100.000.000
3	27	04	1,03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000
3	27	04	1,04		Sertifikasi Persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Sertifikasi Persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner	2 Laporan	250.000.000	250.000.000
3	27	04	1,04	03	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	2 Dokumen	100.000.000	100.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	27	04	1,04	04	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	7 Orang	150.000.000	150.000.000
3	27	04	1,05		Kesejahteraan Hewan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Kesejahteraan Hewan yang Terlaksana	2 Laporan	200.000.000	200.000.000
3	27	04	1,05	02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	1 Kasus	100.000.000	100.000.000
3	27	04	1,05	03	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	2 Sertifikat	100.000.000	100.000.000
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	JUMLAH LAPORAN KASUS BENCANA PERTANIAN YANG DIKENDALIKAN DAN DITANGGULANGI	1 Laporan	6.250.000.000	6.250.000.000
3	27	05	1,01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Bencana Pertanian Provinsi yang Dikendalikan dan Ditanggulangi	3 Laporan	6.250.000.000	6.250.000.000
3	27	05	1,01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	10.000 Ha	5.500.000.000	5.500.000.000
3	27	05	1,01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	1.000 Ha	600.000.000	600.000.000
3	27	05	1,01	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	150.000.000	150.000.000
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	PERSENTASE PENINGKATAN KELAS KEMAMPUAN KELOMPOK TANI	5 Persen (%)	2.345.000.000	2.940.000.000
3	27	07	1,01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Penyuluh yang Telah Mengikuti Uji Kompetensi	200 Orang	1.600.000.000	1.600.000.000
3	27	07	1,01	03	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	50 Unit	100.000.000	100.000.000
3	27	07	1,01	04	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	150 Orang	1.500.000.000	1.500.000.000
3	27	07	1,02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Laporan	150.000.000	745.000.000
3	27	07	1,02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	24 Dokumen	50.000.000	475.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
					Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	27 07 1,02 02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	14.000 Kelompok	100.000.000	270.000.000
3	27 07 1,03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah Kelembagaan Pertanian yang Dikembangkan	4 Laporan	595.000.000	595.000.000
3	27 07 1,03 05	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah korporasi petani yang didampingi	17 Unit	340.000.000	340.000.000
3	27 07 1,03 06	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Prov. Sultra	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	17 Unit	255.000.000	255.000.000
DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA								52.075.980.700	57.253.078.770
3	27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	100%	28.309.980.700	31.140.978.770
3	27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	9 Dokumen	140.000.000	154.000.000
3	27 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000	11.000.000
3	27 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000
3	27 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000
3	27 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000
3	27 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000
3	27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	10.000.000	11.000.000
3	27 1 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
3	27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21 Dokumen	19.069.230.700	20.976.153.770
3	27 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	208 Orang/Bulan	18.709.230.700	20.580.153.770

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	5.000.000	5.500.000
3	27	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000
3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	350.000.000	385.000.000
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	264 Laporan	413.750.000	455.125.000
3	27	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	50.000.000	55.000.000
3	27	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	225 Paket	168.750.000	185.625.000
3	27	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,0	5.500.000
3	27	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,0	5.500.000
3	27	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.000.000	11.000.000
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	75.000.000	82.500.000
3	27	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	50.000.000	55.000.000
3	27	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	5 Orang	50.000.000	55.000.000
3	27	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	137 Laporan	1.239.000.000	1.362.900.000
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	60.000.000	66.000.000
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.000.000	22.000.000
3	27	1	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	120.000.000	132.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	27	1	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	120.000.000	132.000.000
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	18.000.000	19.800.000
3	27	1	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	96.000.000	105.600.000
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	800.000.000	880.000.000
3	27	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,0	5.500.000
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	34 Unit	4.900.000.000	5.390.000.000
3	27	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	1.500.000.000	1.650.000.000
3	27	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	400.000.000	440.000.000
3	27	1	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	220.000.000
3	27	1	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	200.000.000	220.000.000
3	27	1	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya Yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	110.000.000
3	27	1	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	110.000.000
3	27	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.000.000.000	2.200.000.000
3	27	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Unit Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	4 Unit	200.000.000	220.000.000
3	27	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	200.000.000	220.000.000
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	37 Laporan	1.100.000.000	1.210.000.000
3	27	1	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	40.000.000	44.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	720.000.000	792.000.000
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
3	27	1	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	240.000.000	264.000.000
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	126 Unit	1.448.000.000	1.592.800.000
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	275.000.000	302.500.000
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	125.000.000	137.500.000
3	27	1	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	100 Unit	48.000.000	52.800.000
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	500.000.000	550.000.000
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Keloka Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	500.000.000	550.000.000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan		Jumlah Laporan Sarana Pertanian yang Tersedia dan dikembangkan	18 Laporan	14.800.000.000	16.280.000.000
3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan		Jumlah pengawasan peredaran sarana pertanian yang dilaksanakan	9 Laporan	1.600.000.000	1.760.000.000
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Sultra	Jumlah Pengawasan, Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
3	27	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Sultra	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	2 Dokumen	300.000.000	330.000.000
3	27	02	1.01	03	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Sultra	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	2 Laporan	400.000.000	440.000.000
3	27	02	1.01	05	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Sultra	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	2 Laporan	400.000.000	440.000.000
3	27	02	1.01	06	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Sultra	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	1 Laporan	200.000.000	220.000.000
3	27	02	1.01	07	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Sultra	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	1 Laporan	200.000.000	220.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Sultra	Jumlah pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman Perkebunan dan Hortikultura	9 Laporan	13.200.000.000	14.520.000.000
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Sultra	Jumlah Sertifikat Benih	12 Sertifikat	1.200.000.000	1.320.000.000
3	27	02	1.02	05	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Sultra	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	8.400.000.000	9.240.000.000
3	27	02	1.03	06	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan				Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	10000 Anakan	100.000.000	110.000.000
3	27	02	1.04	07	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang				Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	200000 Batang	2.000.000.000	2.200.000.000
3	27	02	1.05	08	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh				Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	1000 Mata	10.000.000	11.000.000
3	27	02	1.06	10	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek				Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	1000 Setek	10.000.000	11.000.000
3	27	02	1.07	11	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji				Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	1000 Gram	100.000.000	110.000.000
3	27	02	1.08	12	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	118000 Batang	1.180.000.000	1.298.000.000
3	27	02	1.09	14	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi				Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	2 Ton	200.000.000	220.000.000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan		Jumlah Laporan Prasarana Pertanian yang Tersedia dan dikembangkan	11 Laporan	6.000.000.000	6.600.000.000
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan		Jumlah penataan prasarana yang dilaksanakan	11 Laporan	6.000.000.000	6.600.000.000
3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Sultra	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	200.000.000	220.000.000
3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Sultra	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	15 Dokumen	3.000.000.000	3.300.000.000
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Sultra	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen	200.000.000	220.000.000
3	27	03	1.01	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Sultra	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	200.000.000	220.000.000
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Sultra	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Sultra	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	4 Unit	400.000.000	440.000.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	27	03	1.01	11	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura				Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	200.000.000	220.000.000
3	27	03	1.01	13	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian				Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan	100 Ha	1.000.000.000	1.100.000.000
3	27	03	1.01	14	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura				Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	200.000.000	220.000.000
3	27	03	1.01	17	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan				Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3 Unit	300.000.000	330.000.000
3	27	03	1.01	20	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan				Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit	200.000.000	220.000.000
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan		Jumlah Laporan Pengendalian penanggulangan Bencana Perkebunan dan Hortikultura yang dilaksanakan	4 Laporan	2.100.000.000	2.310.000.000
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan		Jumlah Laporan Pengendalian Bencana Perkebunan dan Hortikultura	4 Laporan	2.100.000.000	2.310.000.000
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Sultra	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	10 Ha	1.000.000.000	1.100.000.000
3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Sultra	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	5 Ha	500.000.000	550.000.000
3	27	05	1.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Sultra	Jumlah Luas Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5 Ha	500.000.000	550.000.000
3	27	05	1.01	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Sultra	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan		Jumlah Laporan penerbitan izin usaha perkebunan dan hortikultura	3 Laporan	300.000.000	300.000.000
3	27	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan		Jumlah Izin Usaha Pertanian yang terbit	3 Laporan	300.000.000	300.000.000
3	27	06	1.01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Sultra	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000
3	27	06	1.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Sultra	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000
3	27	06	1.01	05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Sultra	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	100.000.000	100.000.000
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan		Pesentase Peningkatan Kemampuan kelompok tani	6 Laporan	566.000.000	622.100.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan		Jumlah tenaga penyuluh pertanian yang kompeten	2 Laporan	116.000.000	127.100.000
3	27	07	1.01	03	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Sultra	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Unit	66.000.000	72.100.000
3	27	07	1.01	04	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Sultra	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	50 Orang	50.000.000	55.000.000
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan		Jumlah penerapan penyuluh pertanian yang dilaksanakan	2 Laporan	100.000.000	110.000.000
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Sultra	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	50.000.000	55.000.000
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Sultra	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	2 Kelompok	50.000.000	55.000.000
3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan		Jumlah Kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan yang dikembangkan	2 Laporan	350.000.000	385.000.000
3	27	07	1.03	05	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Sultra	Jumlah korporasi petani yang didampingi	9 Unit	225.000.000	247.500.000
3	27	07	1.03	06	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Sultra	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	5 Unit	125.000.000	137.500.000
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						119.538.412.000,00	115.625.154.000,00
3	28				DINAS KEHUTANAN						62.692.260.000,00	68.030.861.000,00
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	55.370.860.000,00	60.358.321.000,00
3	28	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	165.000.000,00	181.500.000,00
3	28	1	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	2.750.000,00
3	28	1	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	2.750.000,00
3	28	1	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	150.000.000,00	165.000.000,00
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	52.588.610.000,00	57.847.471.000,00
3	28	1	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7020 Orang/Bulan	52.313.610.000,00	5.754.971.000
3	28	1	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	1	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	175.000.000,00	192.500.000,00
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	51.000.000,00	56.100.000,00
3	28	1	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00	1.100.000,00
3	28	1	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Laporan	1.038.750.000,00	660.000.000,00
3	28	1	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	438.750.000,00	0,00
3	28	1	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	1	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	1	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	400.000.000,00	440.000.000,00
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Laporan	715.000.000,00	786.500.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	1	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Mandonga, Korumba	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	1	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	1	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.500.000,00	2.750.000,00
3	28	1	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.500.000,00	2.750.000,00
3	28	1	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	500.000.000,00	550.000.000,00
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	5 Unit	270.000.000,00	230.000.000,00
3	28	1	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00
3	28	1	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	0,00
3	28	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	252.500.000,00	277.750.000,00
3	28	1	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00	2.750.000,00
3	28	1	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	250.000.000,00	275.000.000,00
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	14 Unit	290.000.000,00	319.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	200.000.000,00	220.000.000,00
3	28	1	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	1	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	1	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Rehabilitasi Hutan dan Lahan Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan Dokumen RPHJP Produksi Hasil Hutan Kayu Bukan Kayu	1215 Ha 1 Persen 5 Dokumen 40000 M3 500 Ton	3.901.400.000,00	75.540.000
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	800.000.000,00	580.000.000,00
3	28	3	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	6 Dokumen	500.000.000,00	250.000.000,00
3	28	3	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	300.000.000,00	330.000.000,00
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		-	-	348.000.000,00	382.800.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.03	03	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	5 Dokumen	328.000.000,00	360.800.000,00
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara	1250 Hektar	990.000.000,00	1.089.000.000,00
3	28	3	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	388.000.000,00	426.800.000,00
3	28	3	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	602.000.000,00	662.200.000,00
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2 Laporan	1.500.000.000,00	1.650.000.000,00
3	28	3	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	100000 Ha	500.000.000,00	550.000.000,00
3	28	3	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	500.000.000,00	550.000.000,00
3	28	3	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	500.000.000,00	550.000.000,00
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Unit Manajemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	4 Unit Manajemen	30.000.000,00	33.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.06	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	2 Unit Manajemen	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	3	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	2 Unit Manajemen	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	3	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Unit manajemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	25 Unit Manajemen	183.400.000,00	285.740.000,00
3	28	3	1.07	01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	20 Unit Manajemen	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	3	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	60.000.000,00	150.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.07	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Permohonan PBPBH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	5 Unit Manajemen	23.400.000,00	25.740.000,00
3	28	4			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Pengembangan Pengelolaan Kawasan Konservasi	100 Hektar	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	4	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola	100 Hektar	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	4	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	100 Ha	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya	3000 Hektar 10 KTH	2.700.000.000,00	2.970.000.000,00
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Laporan	2.700.000.000,00	2.970.000.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	5	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	55 Orang	500.000.000,00	550.000.000,00
3	28	5	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00

Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	5	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	3000 Ha	1.200.000.000,00	1.320.000.000,00
3	28	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Evaluasi Pengelolaan DAS	3 DAS	620.000.000,00	517.000.000,00
3	28	6	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	620.000.000,00	517.000.000,00
3	28	6	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	470.000.000,00	517.000.000,00
3	28	6	1.01	05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	150.000.000,00	0,00
					UPTD BALAI TAMAN HUTAN RAYA NIPA						2.031.060.000,00	2.233.166.000,00
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	601.060.000,00	661.166.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.500.000,00	2.750.000,00
3	28	1	1.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	2.750.000,00
3	28	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	32.760.000,00	36.036.000,00
3	28	1	1.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	3.600.000,00	3.960.000,00
3	28	1	1.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	29.160.000,00	32.076.000,00
3	28	1	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.500.000,00	2.750.000,00
3	28	1	1.03	01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	2.750.000,00
3	28	1	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	1	1.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Laporan	66.000.000,00	72.600.000,00
3	28	1	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.200.000,00
3	28	1	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	4.000.000,00
3	28	1	1.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	6.600.000,00
3	28	1	1.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	3.300.000,00
3	28	1	1.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	6.000.000,00	6.600.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	9.000.000,00	9.900.000,00
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	4 Unit	410.000.000,00	451.000.000,00
3	28	1	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	80.000.000,00	88.000.000,00
3	28	1	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	300.000.000,00	330.000.000,00
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	1.500.000	15.950.000,00
3	28	1	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500.000,00	550.000,00
3	28	1	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.000.000	15.400.000,00
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	10 Unit	40.300.000,00	4.330.000
3	28	1	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Penzinannya	9 Unit	35.300.000,00	38.830.000,00
3	28	1	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dokumen RPHJP Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Produksi Hasil Hutan Kayu	1215 Hektar 5 Dokumen 1 Persen 500 Ton 40000 M3	380.000.000,00	418.000.000,00
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara	32 Hektar	380.000.000,00	418.000.000,00
3	28	3	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	3	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Soropia, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, L alonggasumeeto, Semua Kel/Desa	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	15 Ha	180.000.000,00	198.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Soropia, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, L alonggasumeeto, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Kendari, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Kendari Barat, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Mandonga, Semua Kel/Desa	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	12 Ha	90.000.000,00	99.000.000,00
3	28	3	1.04	09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, L alonggasumeeto, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Soropia, Semua Kel/Desa	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	5 Ha	105.000.000,00	115.500.000,00
3	28	4			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Pengembangan Pengelolaan Kawasan Konservasi	100 Ha	1.050.000.000,00	115.000.000
3	28	4	1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	1 Laporan	1.050.000.000,00	115.000.000
3	28	4	1.01	02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, L alonggasumeeto, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Soropia, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Kendari, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Kendari Barat, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Mandonga, Semua Kel/Desa	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	6 Operasi	210.000.000,00	231.000.000,00
3	28	4	1.01	03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	10 Ha	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	4	1.01	05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Soropia, Semua Kel/Desa	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	10 Ha	150.000.000,00	165.000.000,00
3	28	4	1.01	06	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	4 Permohonan	50.000.000,00	55.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	4	1.01	07	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi	4 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	4	1.01	08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Kendari, Mangga Dua - Kota Kendari, Kendari Barat, Watu-Watu	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	2 Desa	420.000.000,00	462.000.000,00
3	28	4	1.01	11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, L alonggsumeeto, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Soropia, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Kendari, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Kendari Barat, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Mandonga, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	1 Dokumen	110.000.000,00	120.000.000,00
3	28				UPTD BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN						2.861.710.000,00	1.603.356.000,00
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	2.026.710.000,00	68.856.000
3	28	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	1	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.160.000	37.576.000,00
3	28	1	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	29.160.000,00	32.076.000,00
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.05		Administrasi Pegawai Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	206.800.000,00	227.480.000,00
3	28	1	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	88.400.000,00	97.240.000,00
3	28	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	88.400.000,00	97.240.000,00
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	200.000.000,00	86.000.000,00
3	28	1	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	1.100.000,00
3	28	1	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	165.000.000,00	50.000.000,00
3	28	1	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	6.600.000,00
3	28	1	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	3.300.000,00
3	28	1	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	15 Unit	1.470.000.000,00	190.000.000,00
3	28	1	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	450.000.000,00	110.000.000,00
3	28	1	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	30.000.000,00
3	28	1	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00
3	28	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	920.000.000,00	0,00
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	20.500.000,00	20.550.000,00
3	28	1	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500.000,00	550.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	7 Unit	80.250.000,00	106.750.000,00
3	28	1	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.250.000,00	2.250.000,00
3	28	1	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Konda, Lamomea	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan Dokumen RPHJP Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Rehabilitasi Hutan dan Lahan Produksi Hasil Hutan Kayu	1 Persen 5 Dokumen 500 Ton 1215 Hektar 40000 M3	835.000.000,00	918.500.000,00
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1250 Hektar	300.000.000,00	330.000.000,00
3	28	3	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	300.000.000,00	330.000.000,00
3	28	3	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Laporan Pelaksanaan Perbenihan Tanaman	1 Laporan	535.000.000,00	588.500.000,00
3	28	3	1.09	01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	135 Unit Usaha	135.000.000,00	148.500.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.09	02	Sertifikasi Sumber Benih	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	12 Sertifikat	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	3	1.09	03	Sertifikasi Mutu Benih	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	12 Sertifikat	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	3	1.09	04	Sertifikasi Mutu Bibit	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	12 Sertifikat	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	3	1.09	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	1 Laporan	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28				UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT I KAPONTORI						2.138.660.000,00	132.826.000,00
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	1.101.160.000,00	419.576.000,00
3	28	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.500.000,00	13.750.000,00
3	28	1	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.500.000,00	8.250.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.160.000	48.576.000,00
3	28	1	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Mandonga, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	1	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	29.160.000,00	32.076.000,00
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		-	-	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	75.000.000,00	82.500.000,00
3	28	1	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	75.000.000,00	82.500.000,00
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	99.000.000,00	105.900.000,00
3	28	1	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	1.100.000,00
3	28	1	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	1	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	3.300.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	1	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	7 Unit	840.000.000,00	133.000.000,00
3	28	1	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	750.000.000,00	90.000.000,00
3	28	1	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	1	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	60.000.000,00	10.000.000,00
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	8.000.000,00	11.100.000,00
3	28	1	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	1.100.000,00
3	28	1	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	7.000.000,00	10.000.000,00
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	4 Unit	17.500.000,00	19.250.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Produksi Hasil Hutan Kayu Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Dokumen RPHJP	40000 M3 1 Persen 1215 Hektar 500 Ton 5 Dokumen	802.500.000,00	646.750.000,00
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	130.000.000,00	33.000.000,00
3	28	3	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00
3	28	3	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	3	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2 Dokumen	30.000.000,00	33.000.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara	38 Hektar	550.000.000,00	479.000.000,00
3	28	3	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	300.000.000,00	330.000.000,00
3	28	3	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	3 Ha	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.04	09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	10 Ha	210.000.000,00	105.000.000,00
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2 Laporan	70.000.000,00	77.000.000,00
3	28	3	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah unit manajemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	2 Unit Manajemen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPH	2 Unit Manajemen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Fasilitas Perhutanan Sosial Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya	3000 Hektar 10 KTH	230.000.000,00	253.000.000,00
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Laporan	230.000.000,00	253.000.000,00
3	28	5	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	5	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	200.000.000,00	220.000.000,00
3	28	5	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Ha	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Evaluasi Pengelolaan DAS	3 DAS	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	6	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	6	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28				UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT II LASALIMU						2.735.060.000,00	1.800.066.000,00
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	1.080.060.000,00	453.066.000,00
3	28	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.500.000,00	13.750.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	1	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.160.000	48.576.000,00
3	28	1	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	1	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	29.160.000,00	32.076.000,00
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	1	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	103.500.000,00	110.850.000,00
3	28	1	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	2.750.000,00
3	28	1	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	4.000.000
3	28	1	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.000.000,00	17.600.000,00
3	28	1	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.000.000,00	7.700.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8.000.000,00	8.800.000,00
3	28	1	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	6 Unit	820.000.000,00	170.000.000,00
3	28	1	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	750.000.000,00	120.000.000,00
3	28	1	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000,00	50.000.000,00
3	28	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	0,00
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	18.400.000,00	20.240.000,00
3	28	1	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	1.100.000,00
3	28	1	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	17.400.000,00	19.140.000,00
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	2 Unit	46.500.000,00	51.150.000,00
3	28	1	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	36.500.000,00	40.150.000,00
3	28	1	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Produksi Hasil Hutan Kayu Dokumen RPHJP Rehabilitasi Hutan dan Lahan Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan	500 Ton 40000 M3 5 Dokumen 1215 Hektar 1 Persen	1.545.000.000,00	1.226.000.000,00
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	350.000.000,00	55.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
3	28	3	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00
3	28	3	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2 Dokumen	70.000.000,00	77.000.000,00
3	28	3	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Sotapina, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara	50 Hektar	955.000.000,00	907.000.000,00
3	28	3	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00
3	28	3	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	300.000.000,00	300.000.000,00
3	28	3	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	120.000.000,00	72.000.000,00
3	28	3	1.04	09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	25 Ha	525.000.000,00	525.000.000,00
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 Laporan	130.000.000,00	143.000.000,00
3	28	3	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	20000 Ha	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		-	-	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	1 Unit Manajemen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		-	-	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Siotapina, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		-	-	0,00	0,00
3	28	3	1.09	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	0 Laporan	0,00	0,00
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Fasilitas Perhutanan Sosial Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya	3000 Hektar 10 Unit	90.000.000,00	99.000.000,00
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Laporan	90.000.000,00	99.000.000,00
3	28	5	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	30.000.000,00	33.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	5	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	5	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	0 Ha	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Evaluasi Pengelolaan DAS	3 Unit	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	6	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	6	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28				UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT III LAKOMPA						2.427.910.000,00	2.010.501.000,00
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	757.910.000,00	579.501.000,00
3	28	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.500.000,00	13.750.000,00
3	28	1	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	1	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.160.000	48.576.000,00
3	28	1	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	1	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	29.160.000,00	32.076.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	40.000.000,00	4.000.000,00
3	28	1	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	40.000.000,00	4.000.000,00
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		-	-	83.500.000,00	88.850.000,00
3	28	1	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	2.750.000,00
3	28	1	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00	38.500.000,00
3	28	1	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	6.600.000,00
3	28	1	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	13 Unit	500.000.000,00	296.000.000,00
3	28	1	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	160.000.000,00	80.000.000,00
3	28	1	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	60.000.000,00	0,00
3	28	1	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	100.000.000,00	18.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	180.000.000,00	198.000.000,00
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	13.000.000,00	1.300.000
3	28	1	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	1.100.000,00
3	28	1	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000,00	13.200.000,00
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	5 Unit	59.750.000,00	68.525.000,00
3	28	1	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	57.750.000,00	63.525.000,00
3	28	1	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2.000.000,00	5.000.000,00
3	28	1	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Dokumen RPHJP Rehabilitasi Hutan dan Lahan Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Produksi Hasil Hutan Kayu	5 Dokumen 1215 Hektar 1 Persen 500 Ton 40000 M3	1.540.000.000,00	1.288.000.000,00
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	550.000.000,00	220.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00
3	28	3	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 Unit	200.000.000,00	220.000.000,00
3	28	3	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	3	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBP Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	30.000.000,00	33.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara	35 Hektar	740.000.000,00	793.000.000,00
3	28	3	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	300.000.000,00	450.000.000,00
3	28	3	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	220.000.000,00	122.000.000,00
3	28	3	1.04	09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	10 Ha	210.000.000,00	210.000.000,00
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2 Laporan	175.000.000,00	192.500.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	28000 Ha	75.000.000,00	82.500.000,00
3	28	3	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah unit manajemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 Unit Manajemen	20.000.000,00	22.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	1 Unit Manajemen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		-	-	0,00	0,00
3	28	3	1.09	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	0 Laporan	0,00	0,00
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya Luas Fasilitas Perhutanan Sosial	10 Unit 3000 Hektar	80.000.000,00	88.000.000,00
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Laporan	80.000.000,00	88.000.000,00
3	28	5	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	5	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	5	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Ha	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Evaluasi Pengelolaan DAS	3 Unit	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	6	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	50.000.000,00	55.000.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	6	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa - Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28				UPTD KPH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT IV KATONDAKI						1.485.160.000,00	1.047.176.000,00
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	385.160.000,00	279.676.000,00
3	28	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.500.000,00	13.750.000,00
3	28	1	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	1	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.160.000	48.576.000,00
3	28	1	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	1	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	29.160.000,00	32.076.000,00
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	30.000.000,00	33.000.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	65.000.000,00	68.500.000,00
3	28	1	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	2.750.000,00
3	28	1	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	1	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	1	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	1	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.500.000,00	2.750.000,00
3	28	1	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah yang tersedia	5 Unit	210.000.000,00	90.000.000,00
3	28	1	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00
3	28	1	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	0,00
3	28	1	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	10.000.000,00
3	28	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	0,00
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	2 Laporan	8.500.000,00	9.350.000,00
3	28	1	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	1.100.000,00
3	28	1	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	7.500.000,00	8.250.000,00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah yangterpelihara	2 Unit	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	1	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan Produksi Hasil Hutan Kayu Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dokumen RPHJP	1 Persen 40000 M3 500 Ton 1215 Hektar 5 Dokumen	1.020.000.000,00	679.500.000,00
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	320.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00
3	28	3	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	10.000.000,00	0,00
3	28	3	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	3	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara	30 Hektar	535.000.000,00	487.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00
3	28	3	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	300.000.000,00	300.000.000,00
3	28	3	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	120.000.000,00	72.000.000,00
3	28	3	1.04	09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	5 Ha	105.000.000,00	105.000.000,00
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2 Laporan	130.000.000,00	143.000.000,00
3	28	3	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10000 Ha	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	40.000.000,00	4.000.000
3	28	3	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	40.000.000,00	4.000.000
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah unit manajemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 Unit Manajemen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	3	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	1 Unit Manajemen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	3	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	3	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	3	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		-	-	0,00	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.09	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	0 Laporan	0,00	0,00
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Fasilitas Perhutanan Sosial Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya	3000 Hektar 10 Unit	70.000.000,00	77.000.000,00
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Laporan	70.000.000,00	77.000.000,00
3	28	5	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	5	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	5	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Ha	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		-	-	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	6	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		-	-	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	6	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28				UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT V WAKONTI						2.542.910.000,00	1.556.701.000,00
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	1.210.410.000,00	623.451.000,00
3	28	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.500.000,00	13.750.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	1	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	49.160.000,00	5.076.000
3	28	1	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	1	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	29.160.000,00	32.076.000,00
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	1	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	120.000.000,00	129.000.000,00
3	28	1	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.500.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	1	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	1	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	1	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	1	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	5 Unit	825.000.000,00	202.500.000,00
3	28	1	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	750.000.000,00	120.000.000,00
3	28	1	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	1	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	17.000.000,00	18.700.000,00
3	28	1	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000,00	13.200.000,00
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	5 unit	131.750.000,00	14.925.000,00
3	28	1	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	750.000,00	5.225.000,00
3	28	1	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	2.000.000,00	2.200.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dokumen RPHJP Produksi Hasil Hutan Kayu Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1215 Hektar 5 Dokumen 40000 M3 1 Persen 500 Ton	1.265.000.000,00	859.000.000,00
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	370.000.000,00	77.000.000,00
3	28	3	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Sorawolio, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Lea-Lea, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Kokalukuna, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Wolio, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Bungli, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Betoambari, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00
3	28	3	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	3	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	15.000.000,00	16.500.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2 Dokumen	150.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Bau Bau, Lea-Lea, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Kokalukuna, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Sorawolio, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Wolio, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Betoamban, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Bungi, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara	35 Hektar	505.000.000,00	465.500.000,00
3	28	3	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Bau Bau, Sorawolio, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	3	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Bau Bau, Sorawolio, Semua Kel/Desa	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	300.000.000,00	300.000.000,00
3	28	3	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10 Ha	75.000.000,00	82.500.000,00
3	28	3	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	125.000.000,00	77.500.000,00
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2 Laporan	200.000.000,00	217.500.000,00
3	28	3	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10000 Ha	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	3	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	50.000.000,00	52.500.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah unit manajemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 Unit Manajemen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	3	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Bau Bau, Sorawolio, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	1 Unit Manajemen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	3	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	4 Laporan	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Bau Bau, Sorawolio, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Batuparao, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Bungie, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		-	-	0,00	0,00
3	28	3	1.09	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	0 Laporan	0,00	0,00
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Fasilitas Perhutanan Sosial Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya	3000 Hektar 10 Unit	60.000.000,00	66.000.000,00
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Laporan	60.000.000,00	66.000.000,00
3	28	5	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	5	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		-	-	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	6	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		-	-	7.500.000,00	8.250.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	6	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28				UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VI PULAU MUNA						52.080.000	3.541.788.000,00
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 persen	1.602.080.000,00	1.369.288.000,00
3	28	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.500.000,00	13.750.000,00
3	28	1	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	1	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.080.000,00	4.088.000
3	28	1	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	1	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	25.080.000,00	27.588.000,00
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	1	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000,00	110.000.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	117.000.000,00	125.700.000,00
3	28	1	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000,00	7.700.000,00
3	28	1	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	1	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	1	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	1	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	1	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	10 Unit	1.025.000.000,00	802.500.000,00
3	28	1	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	750.000.000,00	500.000.000,00
3	28	1	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	1	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000,00	165.000.000,00
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	22.500.000,00	2.750.000,00
3	28	1	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00	2.750.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	29 Unit	280.000.000,00	243.000.000,00
3	28	1	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28	1	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00	100.000.000,00
3	28	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	75.000.000,00	82.500.000,00
3	28	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Dokumen RPHJP Rehabilitasi Hutan dan Lahan Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Produksi Hasil Hutan Kayu	5 Dokumen 1215 Ha 1 Persen 500 Ton 40000 M3	1.895.000.000,00	1.809.500.000,00
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	270.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Watopute, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Tongkuno, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Kontu Kowuna, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Lasalepa, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	7 Unit	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2 Dokumen	150.000.000,00	165.000.000,00
3	28	3	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	100.000.000,00	110.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Watopute, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Lasalepa, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Katobu, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Gu, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Tiworo Utara, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara	55 Ha	985.000.000,00	1.083.500.000,00
3	28	3	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	30 Ha	300.000.000,00	330.000.000,00
3	28	3	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	230.000.000,00	253.000.000,00
3	28	3	1.04	09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	30 Ha	445.000.000,00	489.500.000,00
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2 Laporan	450.000.000,00	495.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Tongkuno, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Napabalaro, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Watopute, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Bone, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Parigi, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Katobu, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Sawerigadi, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Lawa, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Tiworo Tengah, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10000 Ha	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	3	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	300.000.000,00	330.000.000,00
3	28	3	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah unit manajemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 Unit Manajemen	10.000.000,00	11.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Kontunaga, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Tongkuno, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Lohia, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	1 Unit Manajemen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1 Laporan	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Watopute, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Napano Kusambi, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Kusambi, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		-	-	0,00	0,00
3	28	3	1.09	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Lasalepa, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	1 Laporan	0,00	0,00
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial	10 Unit 3000 Ha	515.000.000,00	319.000.000,00
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Laporan	515.000.000,00	319.000.000,00
3	28	5	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	15 Orang	100.000.000,00	110.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	5	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Kontunaga, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Napabalaro, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Watopute, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Kabawo, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Lohia, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	375.000.000,00	165.000.000,00
3	28	5	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Watopute, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Kontunaga, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Barangka, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Ha	40.000.000,00	4.000.000
3	28	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Evaluasi Pengelolaan DAS	3 unt	40.000.000,00	4.000.000
3	28	6	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	40.000.000,00	4.000.000
3	28	6	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	40.000.000,00	4.000.000
3	28				UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VII PEROPEA						3.677.660.000,00	2.615.926.000,00
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	1.072.660.000,00	338.926.000,00
3	28	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.500.000,00	13.750.000,00
3	28	1	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.500.000,00	8.250.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
(1)									(2)	(3)		
3	28	1	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.160.000	48.576.000,00
3	28	1	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	1	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	29.160.000,00	32.076.000,00
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		-	-	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		-	-	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	1	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	65.000.000,00	68.500.000,00
3	28	1	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	2.750.000,00
3	28	1	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	11.000.000,00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	1	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	1	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.500.000,00	2.750.000,00
3	28	1	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	6 Unit	880.000.000,00	130.000.000,00
3	28	1	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	750.000.000,00	80.000.000,00
3	28	1	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	0,00
3	28	1	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00
3	28	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	0,00
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	26.000.000,00	28.600.000,00
3	28	1	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	1.100.000,00
3	28	1	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	2 Unit	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	1	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	16.500.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Produksi Hasil Hutan Kayu Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dokumen RPHJP Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan	40000 M3 1215 Ha 5 Dokumen 500 Ton 1 Persen	2.525.000.000,00	2.189.000.000,00
3	28	3	1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	310.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.01	01 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00
3	28	3	1.01	04 Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	3	1.02	01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	3	1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2 Laporan	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.03	04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.03	05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara	150 Ha	2.005.000.000,00	1.958.000.000,00
3	28	3	1.04	01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.04	02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	300.000.000,00	300.000.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	120.000.000,00	72.000.000,00
3	28	3	1.04	09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	125 Ha	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2 Laporan	150.000.000,00	165.000.000,00
3	28	3	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10000 Ha	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah unit manajemen yang melaksanakan pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 Unit Manajemen	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28	3	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	1 Unit Manajemen	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28	3	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1 Laporan	10.000.000,00	0,00
3	28	3	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00
3	28	3	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		-	-	0,00	0,00
3	28	3	1.09	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	0 Laporan	0,00	0,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya Luas Fasilitas Perhutanan Sosial	10 Unit 3000 Ha	70.000.000,00	77.000.000,00
3	28	5	1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Laporan	70.000.000,00	77.000.000,00
3	28	5	1.01	01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	5	1.01	02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	5	1.01	03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Ha	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	6		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Evaluasi Pengelolaan DAS	3 Unit	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	6	1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	6	1.01	02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28			UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT VIII GANTARA						3.765.800.000,00	2.817.680.000,00
3	28	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		-	-	1.043.300.000,00	382.930.000,00
3	28	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.500.000,00	13.750.000,00
3	28	1	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.500.000,00	8.250.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.160.000	48.576.000,00
3	28	1	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	1	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	29.160.000,00	32.076.000,00
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		-	-	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	40.000.000,00	4.000.000
3	28	1	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	40.000.000,00	4.000.000
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	9.000.000	100.200.000,00
3	28	1	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00
3	28	1	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	1	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.500.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.200.000,00
3	28	1	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	4 Unit	800.000.000,00	135.000.000,00
3	28	1	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	750.000.000,00	80.000.000,00
3	28	1	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	30.640.000,00	1.720.000,00
3	28	1	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00	2.750.000,00
3	28	1	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	28.140.000,00	145.000,00
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	4 unit	17.000.000,00	18.700.000,00
3	28	1	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	2.000.000,00	2.200.000,00
3	28	1	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan Produksi Hasil Hutan Kayu Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dokumen RPHJP Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1 Persen 40000 M3 500 Ton 5 Dokumen 1215 Hektar	2.597.500.000,00	2.297.250.000,00
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	3	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Pasir Putih, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Wakorumba Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Kambowa, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	3	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Pasir Putih, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Kambowa, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara	125 Hektar	1.970.000.000,00	1.937.000.000,00
3	28	3	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Maligano, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Pasir Putih, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Batukara, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Wakorumba Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Pasi Kolaga, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Kambowa, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Maligano, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Pasi Kolaga, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Wakorumba Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Batukara, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Kambowa, Semua Kel/Desa	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	125 Ha	600.000.000,00	600.000.000,00
3	28	3	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Maligano, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Wakorumba Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Pasi Kolaga, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Batukara, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Kambowa, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	260.000.000,00	116.000.000,00
3	28	3	1.04	09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Maligano, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Pasir Putih, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Wakorumba Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Batukara, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Kambowa, Semua Kel/Desa	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	50 Ha	1.100.000.000,00	1.210.000.000,00
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2 Laporan	250.000.000,00	275.000.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Batukara, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Maligano, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Pasir Putih, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Wakorumba Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Pasi Kolaga, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Kambowa, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10000 Ha	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	3	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Pasir Putih, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Pasi Kolaga, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Maligano, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Batukara, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Wakorumba Selatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Kambowa, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	75.000.000,00	82.500.000,00
3	28	3	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Maligano, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Wakorumba Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Pasir Putih, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Pasi Kolaga, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Batukara, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Kambowa, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	75.000.000,00	82.500.000,00
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah unit manajemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 unit Mangemen	10.000.000,00	11.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Pasir Putih, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	1 Unit Manajemen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1 Laporan	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		-	-	0,00	0,00
3	28	3	1.09	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Wakorumba Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	1 Laporan	0,00	0,00
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya Luas Fasilitas Perhutanan Sosial	10 Unit 3000 Hektar	110.000.000,00	121.000.000,00
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Laporan	110.000.000,00	121.000.000,00
3	28	5	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	5	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Pasir Putih, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Wakorumba Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	40.000.000,00	4.000.000
3	28	5	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Pasir Putih, Semua Kel/Desa - Kab. Muna, Wakorumba Selatan, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Ha	40.000.000,00	4.000.000
3	28	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Evaluasi Pengelolaan DAS	3 Unit	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	6	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	15.000.000,00	16.500.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	6	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Muna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28				UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT X TINA ORIMA						2.200.910.000,00	2.433.296.000,00
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 persen	505.910.000,00	1.091.296.000,00
3	28	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.500.000,00	13.750.000,00
3	28	1	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	1	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.160.000	48.576.000,00
3	28	1	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	1	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	29.160.000,00	32.076.000,00
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000,00	60.000.000,00
3	28	1	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	50.000.000,00	60.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	90.200.000,00	9.070.000
3	28	1	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.500.000,00	2.000.000,00
3	28	1	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	1	1.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.200.000,00	1.320.000,00
3	28	1	1.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.500.000,00	2.750.000,00
3	28	1	1.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28	1	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	5 Unit	245.000.000,00	795.000.000,00
3	28	1	1.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	120.000.000,00	750.000.000,00
3	28	1	1.07	05 Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	75.000.000,00	25.000.000,00
3	28	1	1.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	20.000.000,00
3	28	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	3.500.000,00	3.850.000,00
3	28	1	1.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	1.100.000,00
3	28	1	1.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.500.000,00	2.750.000,00
3	28	1	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	10 Unit	55.550.000,00	70.550.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	25.550.000,00	37.550.000,00
3	28	1	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Produksi Hasil Hutan Kayu dokumen RPHJP Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	40000 M3 5 Dokumen 500 Ton 1 persen 1215 Hektar	1.560.000.000,00	1.193.500.000,00
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00
3	28	3	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	3	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Bombana, Rumbia Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1 Laporan	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Bombana, Poleang Barat, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Mata Usu, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Lantari Jaya, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Tontonunu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara	40 Hektar	945.000.000,00	847.000.000,00
3	28	3	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Bombana, Rarowatu Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Lantari Jaya, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Rumbia Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Bombana, Rumbia Tengah, Semua Kel/Desa	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	450.000.000,00	450.000.000,00
3	28	3	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Bombana, Rarowatu, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Rumbia Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	170.000.000,00	72.000.000,00
3	28	3	1.04	09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Bombana, Rarowatu Utara, Semua Kel/Desa	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	15 Ha	315.000.000,00	315.000.000,00
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2 Laporan	250.000.000,00	275.000.000,00
3	28	3	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Bombana, Poleang Timur, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Rarowatu, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Poleang Barat, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Rarowatu Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Poleang Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Poleang Tenggara, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Lantari Jaya, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Tontonunu, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10000 Ha	100.000.000,00	110.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Poleang Timur, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Rarowatu, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Poleang Barat, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Rarowatu Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Poleang Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Poleang Tenggara, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Lantari Jaya, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Tontonunu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Poleang Tenggara, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Poleang Timur, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Rarowatu, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Poleang Barat, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Rarowatu Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Poleang Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Lantari Jaya, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Tontonunu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan		Jumlah unit manajemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	2 Unit Manajemen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Bombana, Poleang, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Poleang Utara, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	2 Unit Manajemen	10.000.000,00	11.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial	10 Unit 3000 Hektar	95.000.000,00	10.500.000
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Laporan	95.000.000,00	10.500.000
3	28	5	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	0 Orang	35.000.000,00	38.500.000,00
								- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	7 Orang	35.000.000,00	38.500.000,00
3	28	5	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Bombana, Poleang Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Mata Usu, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	5	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Bombana, Rarowatu, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Rarowatu Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Poleang Tenggara, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Tontonunu, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Ha	40.000.000,00	4.000.000
3	28	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Evaluasi Pengelolaan DAS	3 Unit	40.000.000,00	4.000.000
3	28	6	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	40.000.000,00	4.000.000
3	28	6	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	40.000.000,00	4.000.000
3	28				UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XI MEKONGGA SELATAN						277.160.000	1.831.676.000,00
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 persen	125.160.000	58.676.000
3	28	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.500.000,00	13.750.000,00
3	28	1	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.500.000,00	8.250.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.160.000	48.576.000,00
3	28	1	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	1	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	29.160.000,00	32.076.000,00
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	1	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	105.000.000,00	115.500.000,00
3	28	1	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.200.000,00
3	28	1	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.000.000,00	66.000.000,00
3	28	1	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.000.000,00	8.800.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	6 Unit	905.000.000,00	235.500.000,00
3	28	1	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	750.000.000,00	120.000.000,00
3	28	1	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28	1	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	80.000.000,00	88.000.000,00
3	28	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	0,00
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	13.500.000,00	1.850.000,00
3	28	1	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000,00	1.650.000,00
3	28	1	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000,00	13.200.000,00
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	23 Unit	139.000.000,00	118.000.000,00
3	28	1	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	60.000.000,00	66.000.000,00
3	28	1	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	000.000,00	2.000.000,00
3	28	1	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	75.000.000,00	50.000.000,00
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Dokumen RPHJP Produksi Hasil Hutan Kayu Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	5 Dokumen 40000 M3 1 Persen 1215 Hektar 500 Ton	1.390.000.000,00	110.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	325.000.000,00	27.500.000,00
3	28	3	1.01	01 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Wolo, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Iwoimendaa, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Samaturu, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Latambaga, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00
3	28	3	1.01	04 Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28	3	1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuai pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.02	01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2 Dokumen	70.000.000,00	77.000.000,00
3	28	3	1.03	03 Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Tanggetada, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.03	05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Baula, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Wundulako, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara	40 Hektar	745.000.000,00	697.000.000,00
3	28	3	1.04	01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Tanggetada, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00
3	28	3	1.04	02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Watubangga, Semua Kel/Desa	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	300.000.000,00	300.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	120.000.000,00	72.000.000,00
3	28	3	1.04	09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Tanggetada, Semua Kel/Desa	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	15 Ha	315.000.000,00	315.000.000,00
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2 Laporan	210.000.000,00	258.500.000,00
3	28	3	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Polinggona, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10000 Ha	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	3	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Baula, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Polinggona, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Tanggetada, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Pomalaa, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	60.000.000,00	93.500.000,00
3	28	3	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Baula, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Wundulako, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Polinggona, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Pomalaa, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Tanggetada, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Watubangga, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah unit manajemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 unit manajemen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	1 Unit Manajemen	10.000.000,00	11.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1 Laporan	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.07	02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Wundulako, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Pomalaa, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BPBPH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Fasilitas Perhutanan Sosial Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya	3000 Hektar 10 Unit	110.000.000,00	121.000.000,00
3	28	5	1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Laporan	110.000.000,00	121.000.000,00
3	28	5	1.01	01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	5	1.01	02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	5	1.01	03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Baula, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Polinggona, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Ha	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	6		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Evaluasi Pengelolaan DAS	3 Unit	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	6	1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	6	1.01	02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Toari, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Kolaka, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Pomalaa, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28			UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIII MEKONGGA UTARA						2.740.700.000,00	1.795.616.000,00
3	28	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	1.125.700.000,00	461.116.000,00
3	28	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.000.000,00	13.750.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	1	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.500.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.160.000	48.576.000,00
3	28	1	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	1	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	29.160.000,00	32.076.000,00
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	40.000.000,00	4.000.000
3	28	1	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	40.000.000,00	4.000.000
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	9.000.000	102.900.000,00
3	28	1	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1.650.000,00
3	28	1	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	55.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00
3	28	1	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	1	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	5 Unit	850.000.000,00	175.000.000,00
3	28	1	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	750.000.000,00	120.000.000,00
3	28	1	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	0,00
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	12.940.000,00	20.240.000,00
3	28	1	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	1.100.000,00
3	28	1	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	11.940.000,00	19.140.000,00
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	15 Unit	6.600.000	51.150.000,00
3	28	1	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	5.600.000	40.150.000,00
3	28	1	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Produksi Hasil Hutan Kayu Persentase Kerusakan Kawasan Hutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dokumen RPHJP	40000 M3 1 persen 1215 Hektar 500 Ton 5 Dokumen	1.360.000.000,00	105.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	470.000.000,00	187.000.000,00
3	28	3	1.01	01 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Wolo, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Iwoimendaa, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Latambaga, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Samaturu, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00
3	28	3	1.01	03 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Wolo, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	150.000.000,00	165.000.000,00
3	28	3	1.01	04 Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.02	01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2 Laporan	70.000.000,00	77.000.000,00
3	28	3	1.03	04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Latambaga, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Kolaka, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Samaturu, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Wolo, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Iwoimendaa, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Mowewe, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara	35 Hektar	640.000.000,00	592.000.000,00
3	28	3	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00
3	28	3	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	300.000.000,00	300.000.000,00
3	28	3	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	120.000.000,00	72.000.000,00
3	28	3	1.04	09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	10 Ha	210.000.000,00	210.000.000,00
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2 Laporan	150.000.000,00	165.000.000,00
3	28	3	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Latambaga, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Samaturu, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Kolaka, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Iwoimendaa, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Wolo, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10000 Ha	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Iwoimendaa, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Latambaga, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Samaturu, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Kolaka, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Wolo, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Peninggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Wolo, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Samaturu, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Latambaga, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka, Kolaka, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Mowewe, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah unit manajemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 unit manajemen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	1 Unit Manajemen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1 Laporan	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Fasilitas Perhutanan Sosial Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya	3000 Hektar 10 Unit	235.000.000,00	258.500.000,00
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Laporan	235.000.000,00	258.500.000,00
3	28	5	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	5	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	175.000.000,00	192.500.000,00
3	28	5	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan yang Diiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Ha	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Evaluasi Pengelolaan DAS	3 Unit	20.000.000,00	22.000.000,00

Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	28	6	1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	20.000.000,00	22.000.000,00	
3	28	6	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28				UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV UEESI						2.235.160.000,00	184.226.000
3	28	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	600.660.000,00	457.726.000,00	
3	28	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.500.000,00	13.750.000,00	
3	28	1	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	1	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.160.000	48.576.000,00	
3	28	1	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	1	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	29.160.000,00	32.076.000,00
3	28	1	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00	
3	28	1	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	40.000.000,00	4.000.000
3	28	1	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	40.000.000,00	4.000.000
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	145.000.000,00	109.500.000,00
3	28	1	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.200.000,00
3	28	1	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	60.000.000,00
3	28	1	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	1	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	1	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.000.000,00	3.300.000,00
3	28	1	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	8 Unit	205.000.000,00	162.500.000,00
3	28	1	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00
3	28	1	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	0,00
3	28	1	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	75.000.000,00	82.500.000,00
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1.000.000	15.400.000,00
3	28	1	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	2.200.000,00
3	28	1	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000,00	13.200.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah yangterpelihara	9 Unit	135.000.000,00	58.500.000,00
3	28	1	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	35.000.000,00	38.500.000,00
3	28	1	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000,00	20.000.000,00
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		-	-	1.420.000.000,00	1.172.000.000,00
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	320.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Mowewe, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Uluwoi, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Tinondo, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00
3	28	3	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2 Dokumen	95.000.000,00	10.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
3	28	3	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	75.000.000,00	82.500.000,00
3	28	3	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara	50 Hektar	730.000.000,00	743.000.000,00
3	28	3	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	600.000.000,00	660.000.000,00
3	28	3	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	120.000.000,00	72.000.000,00
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2 Laporan	250.000.000,00	275.000.000,00
3	28	3	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10000 Ha	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	3	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	75.000.000,00	82.500.000,00
3	28	3	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	75.000.000,00	82.500.000,00
3	28	3	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1 Laporan	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	3	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya Luas Fasilitas Perhutanan Sosial	10 Unit 3000 Hektar	165.000.000,00	165.000.000,00
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Laporan	165.000.000,00	165.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	5	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 Orang	55.000.000,00	55.000.000,00
3	28	5	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	55.000.000,00	55.000.000,00
3	28	5	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Ha	55.000.000,00	55.000.000,00
3	28	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Evaluasi Pengelolaan DAS	3 Unit	49.500.000,00	49.500.000,00
3	28	6	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	49.500.000,00	49.500.000,00
3	28	6	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	49.500.000,00	49.500.000,00
3	28				UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XV ALAHAH						2.055.660.000,00	1.131.226.000,00
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	1.050.660.000,00	355.726.000,00
3	28	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.500.000,00	13.750.000,00
3	28	1	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	1	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.160.000	48.576.000,00
3	28	1	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	16.500.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	29.160.000,00	32.076.000,00
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	1	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	85.000.000,00	9.050.000,00
3	28	1	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.750.000,00
3	28	1	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	1	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	1.100.000,00
3	28	1	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.000.000,00	2.200.000,00
3	28	1	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	5 Unit	850.000.000,00	135.000.000,00
3	28	1	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	750.000.000,00	80.000.000,00
3	28	1	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	55.000.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	0,00
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	2 Laporan	2.500.000,00	2.200.000,00
3	28	1	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	550.000,00
3	28	1	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.500.000,00	1.650.000,00
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang terpelihara	9 Unit	31.500.000,00	3.650.000,00
3	28	1	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	2.000.000,00	26.400.000,00
3	28	1	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				905.000.000,00	665.500.000,00
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	340.000.000,00	4.000.000,00
3	28	3	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00
3	28	3	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1 Laporan	30.000.000,00	33.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara	25 Hektar	425.000.000,00	467.500.000,00
3	28	3	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	3	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	300.000.000,00	330.000.000,00
3	28	3	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	120.000.000,00	132.000.000,00
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2 Laporan	90.000.000,00	99.000.000,00
3	28	3	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10000 Ha	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	3	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	3	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1 unit manajemen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	1 Unit Manajemen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya Luas Fasilitas Perhutanan Sosial	10 Unit 3000 Hektar	80.000.000,00	88.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Laporan	80.000.000,00	88.000.000,00
3	28	5	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	5	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	5	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Ha	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Evaluasi Pengelolaan DAS	3 Unit	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	6	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	6	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Ueesi, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28				UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVI PATAMPANUA SELATAN						2.151.300.000,00	2.455.680.000,00
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	521.300.000,00	1.115.180.000,00
3	28	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000,00	13.750.000,00
3	28	1	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	1	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.160.000	48.576.000,00
3	28	1	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	16.500.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	29.160.000,00	32.076.000,00
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	30.000.000,00	20.000.000,00
3	28	1	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	30.000.000,00	20.000.000,00
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	91.000.000,00	100.100.000,00
3	28	1	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	1.100.000,00
3	28	1	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	1	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	5 Unit	230.000.000,00	805.000.000,00
3	28	1	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	80.000.000,00	750.000.000,00
3	28	1	1.07	05	Pengadaan Mebel	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	0,00
3	28	1	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	55.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	0,00
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	28.340.000,00	3.117.000
3	28	1	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	2.200.000,00
3	28	1	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	26.340.000,00	2.897.000
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	4 Unit	82.800.000,00	91.080.000,00
3	28	1	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	32.800.000,00	36.080.000,00
3	28	1	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		-	-	1.530.000.000,00	1.230.500.000,00
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	475.000.000,00	192.500.000,00
3	28	3	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00
3	28	3	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	150.000.000,00	165.000.000,00
3	28	3	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	-	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1 Laporan	30.000.000,00	33.000.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Utara, Lasusua, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Lambai, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Batu Putih, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Rante Angin, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Katoi, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Wawo, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara	65 Hektar	745.000.000,00	697.000.000,00
3	28	3	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Utara, Ngapa, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Watunohu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00
3	28	3	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Utara, Ngapa, Semua Kel/Desa	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	300.000.000,00	300.000.000,00
3	28	3	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Utara, Ngapa, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Watunohu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	120.000.000,00	72.000.000,00
3	28	3	1.04	09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Utara, Watunohu, Semua Kel/Desa	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	15 Ha	315.000.000,00	315.000.000,00
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2 Laporan	250.000.000,00	275.000.000,00
3	28	3	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10000 Ha	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	3	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Perangulungan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah unit manajemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 unit manajemen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	1 Unit Manajemen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1 Laporan	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Fasilitas Perhutanan Sosial Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya	3000 Hektar 10 Unit	80.000.000,00	88.000.000,00
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Laporan	80.000.000,00	88.000.000,00
3	28	5	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	5	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	5	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Ha	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Evaluasi Pengelolaan DAS	3 Unit	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	6	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	6	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28				UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII PATAMPANUA UTARA						1.778.160.000,00	2.136.476.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	363.160.000,00	1.020.976.000,00
3	28	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.500.000,00	13.750.000,00
3	28	1	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	1	1.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.160.000	48.576.000,00
3	28	1	1.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	1	1.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	29.160.000,00	32.076.000,00
3	28	1	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.03	01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	30.000.000,00	20.000.000,00
3	28	1	1.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	30.000.000,00	20.000.000,00
3	28	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	91.000.000,00	100.100.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	1.100.000,00
3	28	1	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	1	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Unit	155.000.000,00	805.000.000,00
3	28	1	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	80.000.000,00	750.000.000,00
3	28	1	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	0,00
3	28	1	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	1.500.000,00	1.650.000,00
3	28	1	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500.000,00	550.000,00
3	28	1	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.000.000,00	1.100.000,00
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	9 Unit	2.000.000	26.400.000,00
3	28	1	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	1	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.000.000	15.400.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		-	-	1.295.000.000,00	983.500.000,00
3	28	3	1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	375.000.000,00	82.500.000,00
3	28	3	1.01	01 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Pakue Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Batu Putih, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Porehu, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Tolala, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00
3	28	3	1.01	03 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.01	04 Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28	3	1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.02	01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1 Laporan	60.000.000,00	66.000.000,00
3	28	3	1.03	04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	35.000.000,00	38.500.000,00
3	28	3	1.03	05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28	3	1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara	35 Hektar	640.000.000,00	593.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	-	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	0 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Porehu, Tinuna	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	300.000.000,00	300.000.000,00
3	28	3	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Utara, Batu Putih, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Porehu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	120.000.000,00	72.000.000,00
3	28	3	1.04	09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Utara, Batu Putih, Lelelawo	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	10 Ha	210.000.000,00	210.000.000,00
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2 Laporan	200.000.000,00	220.000.000,00
3	28	3	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Utara, Tolala, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Porehu, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	5000 Ha	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	3	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Porehu, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Batu Putih, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Tolala, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Pakue Utara, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Tolala, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Batu Putih, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Porehu, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Pakue Utara, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	50.000.000,00	55.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah unit manajemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 unit manajemen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.06	04 Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Utara, Porehu, Larui	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	1 Unit Manajemen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Fasilitas Perhutanan Sosial Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya	3000 Hektar 10 Unit	80.000.000,00	88.000.000,00
3	28	5	1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Laporan	80.000.000,00	88.000.000,00
3	28	5	1.01	01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	5	1.01	02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	5	1.01	03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Ha	40.000.000,00	4.000.000
3	28	6		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Evaluasi Pengelolaan DAS	3 Unit	40.000.000,00	4.000.000
3	28	6	1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	40.000.000,00	4.000.000
3	28	6	1.01	02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	40.000.000,00	4.000.000
3	28			UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XVII LAIWOI BARAT						1.777.660.000,00	1.250.426.000,00
3	28	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	1.002.660.000,00	397.926.000,00
3	28	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.500.000,00	13.750.000,00
3	28	1	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.500.000,00	8.250.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.160.000	48.576.000,00
3	28	1	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	1	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	29.160.000,00	32.076.000,00
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	1	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	77.500.000,00	85.250.000,00
3	28	1	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	1.650.000,00
3	28	1	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00	38.500.000,00
3	28	1	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	11.000.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.000.000,00	1.100.000,00
3	28	1	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	5 Unit	815.000.000,00	191.500.000,00
3	28	1	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	750.000.000,00	120.000.000,00
3	28	1	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	1	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	8.500.000,00	9.350.000,00
3	28	1	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	1.100.000,00
3	28	1	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	2 Unit	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	1	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Produksi Hasil Hutan Kayu dokumen RPHJP Rehabilitasi Hutan dan Lahan Persentase Kerusakan Kawasan Hutan	500 Ton 4000 M3 5 Dokumen 1215 Hektar 1 Persen	665.000.000,00	731.500.000,00
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	70.000.000,00	77.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terusun	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2 Dokumen	40.000.000,00	4.000.000,00
3	28	3	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Hektar	325.000.000,00	357.500.000,00
3	28	3	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Rوتا, Tira Wonua	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	3	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Rوتا, Tira Wonua	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	300.000.000,00	330.000.000,00
3	28	3	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Rوتا, Tira Wonua	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2 Laporan	200.000.000,00	220.000.000,00
3	28	3	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	-	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	0 Ha	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	3	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Perangulungan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah unit manajemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 unit manajemen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	1 Unit Manajemen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1 Laporan	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BPBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial	10 Unit 3000 Hektar	90.000.000,00	99.000.000,00
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Laporan	90.000.000,00	99.000.000,00
3	28	5	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	5	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	5	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Ha	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Evaluasi Pengelolaan DAS	3 Unit	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	6	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	6	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	0 Dokumen	0,00	0,00
3	28	6	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Rوتا, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28				UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIX LAWOI UTARA						2.416.000.000,00	1.541.566.000,00

Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	1.026.000.000,00	393.566.000,00
3	28	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.500.000,00	13.750.000,00
3	28	1	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	1	1.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.160.000	48.576.000,00
3	28	1	1.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	1	1.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	29.160.000,00	32.076.000,00
3	28	1	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.03	01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	1	1.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	87.500.000,00	96.250.000,00
3	28	1	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	2.750.000,00
3	28	1	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00	38.500.000,00
3	28	1	1.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.500.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	1	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	4 Unit	800.000.000,00	135.000.000,00
3	28	1	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	750.000.000,00	80.000.000,00
3	28	1	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	9.340.000,00	20.240.000,00
3	28	1	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	1.100.000,00
3	28	1	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.340.000,00	19.140.000,00
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	13 Unit	37.500.000,00	41.250.000,00
3	28	1	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	1	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	2.500.000,00	2.750.000,00
3	28	1	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Dokumen RPHJP Rehabilitasi Hutan dan Lahan Persentase Kerusakan kawasan Hutan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Produksi Hasil Hutan Kayu	5 Dokumen 1215 Hektar 1 Persen 500 Ton 40000 M3	1.150.000.000,00	88.000.000
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	400.000.000,00	110.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Wiwirano, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Langgikima, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Molawe, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Lasolo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Oheo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Andowia, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Lasolo Kepulauan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00
3	28	3	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		umlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1 Laporan	40.000.000,00	4.000.000
3	28	3	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Utara, Lasolo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Molawe, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Wiwirano, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	35 Hektar	540.000.000,00	543.000.000,00
3	28	3	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Utara, Molawe, Semua Kel/Desa	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	300.000.000,00	300.000.000,00
3	28	3	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.04	09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	10 Ha	210.000.000,00	210.000.000,00
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2 Laporan	150.000.000,00	165.000.000,00
3	28	3	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Wiwirano, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Langgikima, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Molawe, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Lasolo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Oheo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Andowia, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Lasolo Kepulauan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Landawe, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10000 Ha	50.000.000,00	55.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Wiwirano, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Langgikima, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Molawe, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Lasolo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Oheo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Andowia, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Lasolo Kepulauan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Landawe, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Wiwirano, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Langgikima, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Molawe, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Lasolo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Oheo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Andowia, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Lasolo Kepulauan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Landawe, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah unit manajemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 unit manajemen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	3	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	1 Unit Manajemen	5.000.000,00	5.500.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	3	1.07	02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BP/PH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya Luas Fasilitas Perhutanan Sosial	10 Unit 3000 Hektar	210.000.000,00	231.000.000,00
3	28	5	1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Laporan	210.000.000,00	231.000.000,00
3	28	5	1.01	01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	5	1.01	02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	150.000.000,00	165.000.000,00
3	28	5	1.01	03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Ha	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	6		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Evaluasi Pengelolaan DAS	3 Unit	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	6	1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	6	1.01	02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28			UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XX LAIWOI TENGAH						1.173.600.000,00	1.532.391.000,00
3	28	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	383.600.000,00	1.053.391.000,00
3	28	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.500.000,00	13.750.000,00
3	28	1	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.500.000,00	8.250.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.160.000	48.576.000,00
3	28	1	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	1	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	29.160.000,00	32.076.000,00
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	1	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	7.500.000	81.950.000,00
3	28	1	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.200.000,00
3	28	1	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00	38.500.000,00
3	28	1	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.500.000,00	2.750.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	4 Unit	160.000.000,00	805.000.000,00
3	28	1	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	80.000.000,00	750.000.000,00
3	28	1	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	0,00
3	28	1	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	16.190.000,00	20.240.000,00
3	28	1	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	1.100.000,00
3	28	1	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	15.190.000,00	19.140.000,00
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	12 Unit	41.250.000,00	45.375.000,00
3	28	1	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Utara, Andowia, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Penzinannya	10 Unit	21.250.000,00	23.375.000,00
3	28	1	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Dokumen RPHJP Rehabilitasi Hutan dan Lahan Produksi Hasil Hutan Kayu Persentase Kerusakan Kawasan Hutan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	5 Dokumen 1215 Hektar 40000 M3 1 Persen 500 Ton	760.000.000,00	446.000.000,00
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	350.000.000,00	55.000.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Latoma, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Pulau Panjang, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Wiwirano, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Oheo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Landawe, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00
3	28	3	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 Unit	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1 Hektar	100.000.000,00	50.000.000,00
3	28	3	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	100.000.000,00	50.000.000,00
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2 Laporan	300.000.000,00	330.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Latoma, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Pulau Panjang, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Wiwirano, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Oheo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Landawe, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10000 Ha	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	3	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Latoma, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Pulau Panjang, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Wiwirano, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Oheo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Landawe, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Latoma, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Pulau Panjang, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Asera, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Wiwirano, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Oheo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Landawe, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	150.000.000,00	165.000.000,00
3	28	3	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		-	-	0,00	0,00
3	28	3	1.09	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	0 Laporan	0,00	0,00
3	28	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Evaluasi Pengelolaan DAS	3 Unit	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	6	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	6	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28				UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXI LAWOI TENGGARA						1.332.710.000,00	1.759.981.000,00
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	602.710.000,00	1.181.981.000,00
3	28	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.500.000,00	2.750.000,00
3	28	1	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	2.750.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	31.660.000,00	3.826.000
3	28	1	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	2.750.000,00
3	28	1	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	29.160.000,00	32.076.000,00
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.500.000,00	2.750.000,00
3	28	1	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	2.750.000,00
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	40.000.000,00	4.000.000
3	28	1	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	40.000.000,00	4.000.000
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	73.500.000,00	80.850.000,00
3	28	1	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	2.750.000,00
3	28	1	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	1	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	1	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	2.750.000,00
3	28	1	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	6.000.000,00	6.600.000,00
3	28	1	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	7 Unit	360.000.000,00	915.000.000,00
3	28	1	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	80.000.000,00	750.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	0,00
3	28	1	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	150.000.000,00	165.000.000,00
3	28	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00	0,00
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	13.100.000,00	1.410.000,00
3	28	1	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500.000,00	550.000,00
3	28	1	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.600.000,00	13.860.000,00
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	6 Unit	76.950.000,00	8.645.000,00
3	28	1	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	26.950.000,00	29.645.000,00
3	28	1	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Rehabilitasi Hutan dan Lahan dokumen RPHJP Produksi Hasil Hutan Kayu Produksi hasil Hutan Bukan Kayu Persentase Kerusakan Kawasan Hutan	1215 Hektar 5 Dokumen 40000 M3 500 Ton 1 Persen	560.000.000,00	391.000.000,00
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	170.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00
3	28	3	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuai pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1 Laporan	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1 Hektar	100.000.000,00	50.000.000,00
3	28	3	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	100.000.000,00	50.000.000,00
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 Laporan	250.000.000,00	275.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Besulutu, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Anggaben, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Meluhu, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Amonggedo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Pulau Panjang, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Padangguni, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Pondidaha, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Sampara, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Morosi, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Anggalomoare, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Molawe, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Lasolo, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10000 Ha	100.000.000,00	110.000.000,00

Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Besulutu, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Anggaben, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Meluhu, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Amonggedo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Padangguni, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Pulau Panjang, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Pondidaha, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Morosi, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Sampara, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Anggalomoare, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Molawe, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Lasolo, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Besulutu, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Anggaber, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Meluhu, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Amonggedo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Padangguni, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Pulau Panjang, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Morosi, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Pondidaha, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Anggalomoare, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Sampara, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Molawe, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Lasolo, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	3	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1 Laporan	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Anggaber, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Lasolo, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Fasilitas Perhutanan Sosial Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya	3000 Hektar 10 KTH	170.000.000,00	187.000.000,00
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Laporan	170.000.000,00	187.000.000,00
3	28	5	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	9 Orang	90.000.000,00	99.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	5	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Besulutu, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Meluhu, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Amonggedo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Utara, Lasolo, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	5	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Anggaberu, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Ha	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28				UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIII WAWONII						2.029.160.000,00	2.318.576.000,00
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	53.160.000	113.576.000
3	28	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.500.000,00	13.750.000,00
3	28	1	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	1	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.160.000	48.576.000,00
3	28	1	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	1	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	29.160.000,00	32.076.000,00
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	40.000.000,00	4.000.000
3	28	1	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	40.000.000,00	4.000.000
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	90.000.000,00	99.000.000,00
3	28	1	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	1.100.000,00
3	28	1	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	1	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.200.000,00
3	28	1	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.000.000,00	2.200.000,00
3	28	1	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	6 Unit	260.000.000,00	833.000.000,00
3	28	1	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	80.000.000,00	750.000.000,00
3	28	1	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	1	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	100.000.000,00	50.000.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	0,00
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	2 Laporan	12.500.000,00	13.750.000,00
3	28	1	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500.000,00	550.000,00
3	28	1	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000,00	13.200.000,00
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang terpelihara	7 Unit	70.000.000,00	77.000.000,00
3	28	1	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	1	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Persentase Kerusakan Kawasan Hutan dokumen RPHJP Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Produksi Hasil Hutan Kayu Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1 Persen 5 Dokumen 500 Ton 40000 M3 1215 Hektar	1.400.000.000,00	1.079.500.000,00
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	340.000.000,00	4.000.000
3	28	3	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00
3	28	3	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		-	-	10.000.000,00	11.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		-	-	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Selatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		-	-	835.000.000,00	788.000.000,00
3	28	3	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Barat, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Utara, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Tengah, Semua Kel/Desa	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	600.000.000,00	600.000.000,00
3	28	3	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	120.000.000,00	72.000.000,00
3	28	3	1.04	09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Kepulauan, Wawonii Timur Laut, Semua Kel/Desa	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	5 Ha	105.000.000,00	105.000.000,00
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		-	-	200.000.000,00	220.000.000,00
3	28	3	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10000 Ha	110.000.000,00	121.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	40.000.000,00	4.000.000
3	28	3	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		-	-	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	3	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Fasilitas Perhutanan Sosial Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya	3000 Hektar 10 Unit	75.000.000,00	82.500.000,00
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Laporan	75.000.000,00	82.500.000,00
3	28	5	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	5	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	5	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Ha	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Evaluasi Pengelolaan DAS	3 Unit	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	6	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	20.000.000,00	22.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	6	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Kepulauan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28				UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXV WAKATOB						1.185.660.000,00	919.226.000,00
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	160.660.000,00	176.726.000,00
3	28	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	1	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	1	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.160.000	48.576.000,00
3	28	1	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	1	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	29.160.000,00	32.076.000,00
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	1	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	60.500.000,00	66.550.000,00
3	28	1	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	1.100.000,00
3	28	1	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	22.000.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.200.000,00
3	28	1	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.500.000,00	2.750.000,00
3	28	1	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	2 Laporan	1.000.000,00	1.100.000,00
3	28	1	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500.000,00	550.000,00
3	28	1	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	500.000,00	550.000,00
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah yangterpelihara	6 Unit	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	1	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	1	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2.500.000,00	2.750.000,00
3	28	1	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		- Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		dokumen RPHJP Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Persentase Kerusakan Kawasan Hutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Produksi Hasil Hutan Kayu	5 Dokumen 500 Ton 1 Persen 1215 Hektar 40000 M3	950.000.000,00	660.000.000,00
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	360.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00
3	28	3	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	50.000.000,00	0,00
3	28	3	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2 Laporan	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	3	1.03	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Wakatobi, Wangi-Wangi, Semua Kel/Desa - Kab. Wakatobi, Tomia, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	3	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Hektar	320.000.000,00	352.000.000,00
3	28	3	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Wakatobi, Tomia Timur, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Wakatobi, Tomia Timur, Semua Kel/Desa	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	300.000.000,00	330.000.000,00
3	28	3	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Wakatobi, Tomia Timur, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2 Laporan	230.000.000,00	253.000.000,00
3	28	3	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	2000 Ha	150.000.000,00	165.000.000,00
3	28	3	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	3	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	50.000.000,00	55.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya Luas Fasilitas Perhutanan Sosial	10 Unit 3000 Hektar	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	5	1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Laporan	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	5	1.01	03 <i>Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial</i>	<i>Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan</i>	<i>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</i>	<i>- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</i>	<i>Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial</i>	100 Ha	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	6		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Evaluasi Pengelolaan DAS	3 Unit	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28	6	1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28	6	1.01	02 <i>Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS</i>	<i>Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan</i>	<i>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</i>	<i>- Kab. Wakatobi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS</i>	1 Dokumen	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28			UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XII LADONGI						1.881.160.000,00	2.310.276.000,00
3	28	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Porsen	266.160.000,00	95.776.000,00
3	28	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.500.000,00	13.750.000,00
3	28	1	1.01	01 <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</i>	<i>Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah</i>	<i>- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1 Dokumen	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	1	1.01	06 <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</i>	<i>Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah</i>	<i>- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.160.000,00	48.576.000,00
3	28	1	1.02	03 <i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</i>	<i>Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah</i>	<i>- Kota Bau Bau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	1 Dokumen	15.000.000,00	16.500.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	29.160.000,00	32.076.000,00
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		-	-	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	1	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	6.500.000	70.950.000,00
3	28	1	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	500.000,00	550.000,00
3	28	1	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	1	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	1.100.000,00
3	28	1	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.000.000,00	3.300.000,00
3	28	1	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	3 Unit	100.000.000,00	772.000.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	80.000.000,00	750.000.000,00
3	28	1	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	2 Laporan	3.500.000,00	3.850.000,00
3	28	1	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500.000,00	550.000,00
3	28	1	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.000.000,00	3.300.000,00
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah yang terpelihara	3 Unit	16.500.000,00	18.150.000,00
3	28	1	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1.500.000,00	1.650.000,00
3	28	1	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		-	-	1.020.000.000,00	701.000.000,00
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		-	-	380.000.000,00	88.000.000,00
3	28	3	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Loea, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Ladongi, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Poli Polia, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Aere, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00
3	28	3	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	30.000.000,00	33.000.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuai pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2 Dokumen	60.000.000,00	66.000.000,00
3	28	3	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Loea, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Lalolae, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Aere, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	40.000.000,00	4.000.000,00
3	28	3	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Lalolae, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara	25 Hektar	430.000.000,00	382.000.000,00
3	28	3	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Ladongi, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00
3	28	3	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	300.000.000,00	300.000.000,00
3	28	3	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	120.000.000,00	72.000.000,00
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2 Laporan	130.000.000,00	143.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Loea, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Ladongi, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Poli Polia, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Aere, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10000 Ha	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Loea, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Ladongi, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Poli Polia, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Aere, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	3	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Loea, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Ladongi, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Poli Polia, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Lalolae, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Aere, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah unit manajemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 Unit Manajemen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Loea, Semua Kel/Desa - Kab. Kolaka Timur, Lalolae, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	1 Unit Manajemen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		-	-	0,00	0,00
3	28	3	1.09	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Tirawuta, Semua Kel/Desa	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	0 Laporan	0,00	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	28	4			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Pengembangan Pengelolaan Kawasan Konservasi	100 Hektar	535.000.000,00	588.500.000,00
3	28	4	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Kawasan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang di kelola	25 Hektar	535.000.000,00	588.500.000,00
3	28	4	1.03	03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Lalolae, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	4	1.03	04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Lalolae, Semua Kel/Desa	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	25 Ha	525.000.000,00	577.500.000,00
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya Luas Fasilitasi Perhutanan Sosial	10 Unit 3000 Hektar	40.000.000,00	4.000.000
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Laporan	40.000.000,00	4.000.000
3	28	5	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	5	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	5	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Ha	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Evaluasi Pengelolaan DAS	3 Unit	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	6	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	6	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Kolaka Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28				UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XXIV GULARAYA						2.615.950.000,00	2.606.465.000,00
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	703.450.000,00	645.215.000,00
3	28	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.500.000,00	13.750.000,00
3	28	1	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.500.000,00	8.250.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.160.000	48.576.000,00
3	28	1	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	1	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	29.160.000,00	32.076.000,00
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	90.000.000,00	99.000.000,00
3	28	1	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	90.000.000,00	99.000.000,00
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	83.500.000,00	89.350.000,00
3	28	1	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	6.600.000,00
3	28	1	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00	38.500.000,00
3	28	1	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	1	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00

Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	6 Unit	230.000.000,00	141.000.000,00
3	28	1	1.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00
3	28	1	1.07	05 Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	1	1.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	10.000.000,00
3	28	1	1.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	0,00
3	28	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	35.240.000,00	3.876.000
3	28	1	1.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	1.100.000,00
3	28	1	1.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.240.000	3.766.000
3	28	1	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		-	-	103.050.000,00	99.275.000,00
3	28	1	1.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	57.250.000,00	62.975.000,00
3	28	1	1.09	05 Pemeliharaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	1	1.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Puunggaluku	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	12.800.000,00	0,00
3	28	1	1.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Poasia, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Angata, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Lainya, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Konda, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Kolono, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Moramo Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Laeya, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	1	1.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3.000.000,00	3.300.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	28	1	1.010	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah BLUD	1 Unit	100.000.000,00	110.000.000,00	
3	28	1	1.010	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		-	-	1.737.500.000,00	1.768.750.000,00
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	350.000.000,00	385.000.000,00
3	28	3	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	300.000.000,00	330.000.000,00
3	28	3	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	3	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2 Dokumen	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	3	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		-	-	965.000.000,00	919.000.000,00
3	28	3	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Selatan, Lainya, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Laeya, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Selatan, Laeya, Semua Kel/Desa	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	45 Ha	300.000.000,00	300.000.000,00
3	28	3	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Selatan, Lainea, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Laeya, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	120.000.000,00	72.000.000,00
3	28	3	1.04	09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Selatan, Lainea, Semua Kel/Desa	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	50 Ha	525.000.000,00	525.000.000,00
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2 Laporan	250.000.000,00	275.000.000,00
3	28	3	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	35000 Ha	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	3	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah unit manajemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	3 Unit	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	3	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe Selatan, Konda, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Ranomeeto, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	3 Unit Manajemen	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	3	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1 Laporan	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Poasia, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Abeli, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Kolono,	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025			
					Indikator Kinerja	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
				Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Angata, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Andoolo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Palangga, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Landono, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Lainea, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Konda, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Ranomeeto, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Moramo, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Palangga Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Moramo Utara, Semua Kel/Desa							
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya Luas Fasilitas Perhutanan Sosial	10 Unit 3000 Hektar	150.000.000,00	165.000.000,00
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Laporan	150.000.000,00	165.000.000,00
3	28	5	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	4 Orang	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	5	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	5	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Ha	50.000.000,00	55.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	28	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Evaluasi Pengelolaan DAS	3 Unit	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28	6	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28	6	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28				UPTD KPH UNIT IX PULAU KABAENA						2.919.660.000,00	1.845.126.000,00
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Persen	1.199.660.000,00	430.626.000,00
3	28	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.500.000,00	13.750.000,00
3	28	1	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	1	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.160.000	48.576.000,00
3	28	1	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	1	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	29.160.000,00	32.076.000,00
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	55.000.000,00
3	28	1	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	55.000.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	1	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	6.500.000	67.950.000,00
3	28	1	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	1.100.000,00
3	28	1	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	1	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	1	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.000.000,00	1.100.000,00
3	28	1	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	7 Unit	1.000.000.000,00	170.000.000,00
3	28	1	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	750.000.000,00	120.000.000,00
3	28	1	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	150.000.000,00	50.000.000,00
3	28	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	100.000.000,00	0,00
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	6.000.000,00	6.600.000,00
3	28	1	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	1.100.000,00
3	28	1	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	9 Unit	37.500.000,00	35.750.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	11.000.000,00	12.100.000,00
3	28	1	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	5.000.000,00	0,00
3	28	1	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.500.000,00	1.650.000,00
3	28	1	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Produksi Hasil Hutan Buan kayu Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan Dokumen RPHJP Produksi Hasil Hutan Kayu Rehabilitasi Hutan dan Lahan	500 ton 1 Persen 5 Dokumen 40000 m3 1215 Ha	1.650.000.000,00	1.337.500.000,00
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	320.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena Timur, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena Tengah, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Talaga Raya, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00
3	28	3	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Talaga Raya, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Bombana, Kabaena Timur, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena Tengah, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	3	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara	50 Hektar	1.010.000.000,00	963.500.000,00
3	28	3	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Bombana, Kabaena Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	300.000.000,00	300.000.000,00
3	28	3	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	175.000.000,00	127.500.000,00
3	28	3	1.04	09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Bombana, Kabaena Utara, Semua Kel/Desa	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	35 Ha	525.000.000,00	525.000.000,00
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2 Laporan	250.000.000,00	275.000.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Bombana, Kabaena, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena Timur, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena Selatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena Tengah, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Talaga Raya, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10000 Ha	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	3	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	100.000.000,00	110.000.000,00
3	28	3	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1 Laporan	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	-	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Fasilitas Perhutanan Sosial Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya	3000 Ha 10 Unit	40.000.000,00	4.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Laporan	40.000.000,00	4.000.000
3	28	5	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Bombana, Kabaena Barat, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1 Orang	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	5	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	5	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Ha	20.000.000,00	22.000.000,00
3	28	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Evaluasi Pengelolaan DAS	3 unit	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	6	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	6	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Bombana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Buton Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28				UPTD KPH UNIT XXII LAWOI						2.357.532.000,00	182.878.000
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 Person	473.460.000,00	463.306.000,00
3	28	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.500.000,00	13.750.000,00
3	28	1	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.500.000,00	8.250.000,00
3	28	1	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.160.000	48.576.000,00
3	28	1	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	16.500.000,00
3	28	1	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	29.160.000,00	32.076.000,00
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Dokumen Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	1	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	78.000.000,00	83.300.000,00
3	28	1	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.200.000,00
3	28	1	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00	38.500.000,00
						Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	6.600.000,00
3	28	1	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah					
3	28	1	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.500.000,00
3	28	1	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	1	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	5 Unit	166.000.000,00	127.600.000,00
3	28	1	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	1	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	56.000.000,00	61.600.000,00
3	28	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	0,00
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	13.000.000,00	1.300.000
3	28	1	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	1.100.000,00
3	28	1	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000,00	13.200.000,00
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	23 unit	10.800.000	115.280.000,00
3	28	1	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	67.250.000,00	73.975.000,00
3	28	1	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	2.000.000,00	2.200.000,00
3	28	1	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.050.000,00	3.355.000,00
3	28	1	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.500.000,00	2.750.000,00
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Rehabilitasi Hutan dan Lahan Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan Dokumen RPHJP Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Produksi Hasil Hutan Kayu	1215 Hektar 1 Persen 5 Dokumen 500 Ton 40000 M3	166.072.000	1.119.572.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	359.072.000,00	6.072.000
3	28	3	1.01	01 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Tongauna, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Latoma, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Puriala, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Uepai, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Lambuya, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Asinua, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Onembuta, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Pulau Panjang, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Padangguni, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Abuki, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00
3	28	3	1.01	03 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	9.072.000,00	9.072.000,00
3	28	3	1.01	04 Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.02	01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2 Dokumen	75.000.000,00	82.500.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	3	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	25.000.000,00	27.500.000,00
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	810.000.000,00	511.000.000,00
3	28	3	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Pualala, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Padangguni, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00
3	28	3	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Pualala, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Padangguni, Semua Kel/Desa	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	600.000.000,00	300.000.000,00
3	28	3	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Pualala, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Lambuya, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Padangguni, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2 Laporan	350.000.000,00	385.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Tongauna, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Latoma, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Puniala, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Uepai, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Lambuya, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Asinua, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Onembuta, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Unaha, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Padangguni, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Pulau Panjang, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Abuki, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	50000 Ha	150.000.000,00	165.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Tongauna, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Latoma, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Puniala, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Uepai, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Lambuya, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Asinua, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Onembutu, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Padangguni, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Pulau Panjang, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Abuki, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	3	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Tongauna, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Latoma, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Pualala, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Uepai, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Lambuya, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Asinua, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Unaaha, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Onembutu, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Padangguni, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Pulau Panjang, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Abuki, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Tongauna Utara, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	150.000.000,00	165.000.000,00
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah unit manajemen yang melaksanakan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 Unit Manajemen	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	3	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	1 Unit Manajemen	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	3	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1 Laporan	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	3	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	30.000.000,00	33.000.000,00
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Luas Fasilitas Perhutanan Sosial Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya	3000 Ha 10 unit	150.000.000,00	165.000.000,00
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Laporan	150.000.000,00	165.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	28	5	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	5	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	5	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Ha	50.000.000,00	55.000.000,00
3	28	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Evaluasi Pengelolaan DAS	2 Unit	70.000.000,00	77.000.000,00
3	28	6	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	70.000.000,00	77.000.000,00
3	28	6	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Kab. Konawe, Latoma, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Punala, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Lambuya, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Asinua, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Onembut, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Abuki, Semua Kel/Desa - Kab. Konawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	70.000.000,00	77.000.000,00
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						54.900.000.000	57.742.796.305
3	29				DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						54.900.000.000	57.742.796.305
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Cakupan keterpenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	23.207.867.288	24.422.807.249
3	29	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	1.151.745.061	1.264.302.729
3	29	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	382.396.713	420.636.384
3	29	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	16.500.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	29	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	16.500.000
3	29	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	16.500.000
3	29	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	16.500.000
3	29	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	52.336.760	54.953.598
3	29	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, laporan Monitoring dan Evaluasi Program, dokumen statistik bidang ESDM dan Pameran promosi ESDM	2 laporan	657.011.588	722.712.747
3	29	01	1.02		Admisitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.810.211.525,00	8.052.156.101,25
3	29	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/bulan	7.564.620.400	7.794.285.420
3	29	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	120.668.625	126.702.056
3	29	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapom Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	10.500.000
3	29	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	114.922.500	120.668.625
3	29	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	38.499.000	40.423.950
3	29	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	38.499.000	40.423.950
3	29	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	350.963.000	368.511.150
3	29	01	1.05	02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	78.000.000	81.900.000
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75 Orang	172.963.000	181.611.150
3	29	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undang	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	10 Orang	100.000.000	105.000.000
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	1.535.036.300	1.695.038.115

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	419.197.100	440.156.955
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan serta perlengkapan gedung kantor yang tersedia	3 Paket	100.000.000	150.000.000
3	29	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Paket Penyediaan Bahan logistik kantor yang diadakan	1 Paket	70.839.200	74.381.160
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	70.000.000	75.000.000
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15.000.000	16.500.000
3	29	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu yang disediakan	1 Laporan	85.000.000	86.500.000
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	775.000.000	852.500.000
3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah yang tersedia	1 Paket	10.619.263.240	11.174.189.564
3	29	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 Unit	90.000.000	92.000.000
3	29	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia	10 Unit	529.263.240	582.189.564
3	29	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	10.000.000.000	10.500.000.000
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	1 Laporan	922.749.162	1.007.829.140
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat yang disediakan	1 Laporan	6.600.000	6.930.000
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan penyediaan jasa publikasi, komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	401.802.622	421.892.753
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terlaksana	1 Laporan	514.346.540	579.006.387
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah yang terpelihara	35 Unit	779.400.000	820.356.500
3	29	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	35 Unit	305.000.000	320.250.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	29	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Mebel yang dipelihara	150 Unit	15.000.000	16.500.000
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	184.670.000	193.903.500
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	250.000.000	262.500.000
3	29	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	24.730.000	27.203.000
3	29	02			Program Pengelolaan Aspek Geogeologian	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab/Kota Se-Sultra	Perda/Pergub terkait Zonasi Kawasan Konservasi Air tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	610.725.000	646.797.500
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Laporan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air tanah Dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	200.000.000	210.000.000
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan		Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	100.000.000	105.000.000
3	29	02	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terlaksananya penyusunan dan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	100.000.000	105.000.000
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan zoan konservasi air tanah pada cekungan Air tanah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terkendalinya dan terawasinya pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah Provinsi	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah Provinsi	1 Laporan	100.000.000	105.000.000
3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terkumpulnya dan terolahnya data dan informasi nilai perolehan air tanah dalam daerah Provinsi	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	410.725.000	436.797.500
3	29	02	1.03	01	Pengumpulan dan Pengolahan data dan informasi nilai perolehan air tanah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terkumpulnya dan terolahnya data dan informasi nilai perolehan air tanah dalam daerah Provinsi	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen data dan informasi nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi yang terkumpul	1 Dokumen	110.725.000	121.797.500
3	29	02	1.03	02	Penghitungan, perumusan dan penetapan nilai perolehan air tanah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terlaksananya penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah Provinsi	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan hasil penghitungan, perumusan dan penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah Provinsi	1 Laporan	150.000.000	157.500.000
3	29	02	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terkendalinya dan terawasinya implementasi nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan implementasi nilai perolehan air tanah dalam daerah Provinsi.	1 Laporan	150.000.000	157.500.000
3	29	03			Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Meningkatnya Kontribusi Penerimaan Daerah Bidang ESDM Persentase Peningkatan Kepatuhan Pemegang IUP dalam Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan		5.255.000.000	5.502.750.000
3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 Mil.	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Dokumen Penetapan Wilayah Izin Usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 Mil.	3 Dokumen	350.000.000	367.500.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	29	03	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan data dan informasi wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen data dan informasi wilayah izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam Jenis tertentu dalam 1 (satu) Daerah Provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 Mil	1 dokumen	100.000.000	105.000.000
3	29	03	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah dan wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah dan wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.	1 dokumen	100.000.000	105.000.000
3	29	03	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah dan wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah dan wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.	1 Laporan	150.000.000	157.500.000
3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1(satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan		Jumlah laporan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1(satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	5 Laporan	300.000.000	315.000.000
3	29	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam penetapan wilayah Pertambangan oleh pemerintah pusat	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan usulan wilayah usaha pertambangan dalam penetapan wilayah pertambangan oleh pemerintah Pusat	1 Laporan	100.000.000	105.000.000
3	29	03	1.02	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan logam dan Batuan dalam rangka Penanaman modal Dalam negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut sampai dengan 12 Mil Laut.	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan logam dan Batuan dalam rangka Penanaman modal Dalam negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut sampai dengan 12 Mil Laut.	1 Dokumen	100.000.000	105.000.000
3	29	03	1.02	05	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan logam dan Batuan dalam rangka Penanaman modal Dalam negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut sampai dengan 12 Mil Laut.	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan hasil pengawasan kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan kaidah pengusaha yang baik perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan logam dan Batuan dalam rangka Penanaman modal Dalam negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut sampai dengan 12 Mil Laut.	1 Laporan	100.000.000	105.000.000
3	29	03	1.04		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam , dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Laporan Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam , dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	2 Laporan	285.000.000	294.250.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
3	29	03	1.04	03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1 Dokumen	185.000.000	189.250.000
3	29	03	1.04	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1 Laporan	100.000.000	105.000.000
3	29	03	1.06		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang sama	2 Dokumen	285.000.000	294.250.000
3	29	03	1.06	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman modal Dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman modal Dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	185.000.000	189.250.000
3	29	03	1.06	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman modal Dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman modal Dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	100.000.000	105.000.000
3	29	03	1.07		Penetapan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan penetapan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	3 Dokumen	460.000.000	478.000.000
3	29	03	1.07	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1 Dokumen	125.000.000	131.250.000
3	29	03	1.07	02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1 Dokumen	185.000.000	189.250.000
3	29	03	1.07	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1 Laporan	150.000.000	157.500.000
3	29	03	1.12		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal dalam negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan daerah yang Berada Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah laut sampai dengan 12 Mil Laut.	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal dalam negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	4 Laporan	550.000.000	577.500.000
3	29	03	1.12	01	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh pemerintah Pusat	1 Laporan	100.000.000	105.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	29	03	1.12	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis tertentu dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengnan 12 Mil Laut.	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis tertentu dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengnan 12 Mil Laut.	1 Dokumen	100.000.000	105.000.000
3	29	03	1.12	03	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam Jenis tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai 12 Mil laut	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam Jenis tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai 12 Mil laut	1 Laporan	150.000.000	157.500.000
3	29	03	1.12	04	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik perizinan Usaha Pertambangan Mineral bukan logam dan Batuan dalam rangka Penanaman modal Dalam negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut ampai 12 Mil laut	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan hasil Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan logam dan Batuan dalam rangka Penanaman modal Dalam negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut ampai 12 Mil laut	Laporan	200.000.000	210.000.000
3	29	03	1.13		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut sampai 12 Mil laut	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut sampai 12 Mil laut	4 Dokumen	650.000.000	682.500.000
3	29	03	1.13	01	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan	200.000.000	210.000.000
3	29	03	1.13	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi izin Usaha Pertambagnn Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut ampai 12 Mil laut	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi izin Usaha Pertambagnn Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut ampai 12 Mil laut	1 Dokumen	150.000.000	157.500.000
3	29	03	1.13	03	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambnagan Batuan dalam Ragka Penanaman Modal dalam Negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut ampai 12 Mil laut	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambnagan Batuan dalam Ragka Penanaman Modal dalam Negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut ampai 12 Mil laut	1 Laporan	150.000.000	157.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
3	29	03	1.13	04	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman modal Dalam negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut.	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan hasil Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman modal Dalam negeri pada wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut.	1 Laporan	150.000.000	157.500.000
3	29	03	1.14		Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	2 Laporan	200.000.000	210.000.000
3	29	03	1.14	01	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	1 Dokumen	100.000.000	105.000.000
3	29	03	1.14	02	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	1 Laporan	100.000.000	105.000.000
3	29	03	1.15		Penetapan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Jenis tertentu yang terkumpul dan terolah	3 Dokumen	400.000.000	420.000.000
3	29	03	1.15	01	Pengumpulan dan pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Jenis tertentu	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Jenis tertentu yang terkumpul dan terolah	1 Dokumen	150.000.000	157.500.000
3	29	03	1.15	02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Jenis tertentu	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Jenis tertentu yang telah ditentukan dan ditetapkan	1 Dokumen	150.000.000	157.500.000
3	29	03	1.15	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Jenis tertentu	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Jenis tertentu	1 Laporan	100.000.000	105.000.000
3	29	03	1.16		Penetapan Harga Patokan Batuan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Harga Patokan Batuan	3 Dokumen	300.000.000	315.000.000
3	29	03	1.16	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Batuan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Terkumpulnya dan terolahnya Data dan Informasi Harga Patokan Batuan	1 Dokumen	100.000.000	105.000.000
3	29	03	1.16	02	Penentuan dan penetapan Harga Batuan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1 Dokumen	100.000.000	105.000.000
3	29	03	1.16	03	Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan batuan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1 Laporan	100.000.000	105.000.000
3	29	03	1.17		Penatausahaan izin Pengangkutan dan penjualan untuk komoditas Mineral Bukan Logam	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Laporan Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	2 Dokumen	250.000.000	262.500.000
3	29	03	1.17	01	Penyusunan dan perumusan Rekomendasi izin Pengangkutan dan penjualan untuk komoditas Mineral Bukan Logam	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen Rekomendasi izin Pengangkutan dan penjualan untuk komoditas Mineral Bukan Logam	1 Dokumen	150.000.000	157.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
					Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	29 03 1.17 02	Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan izin Pengangkutan dan penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan izin Pengangkutan dan penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	1 Laporan	100.000.000	105.000.000
3	29 03 1.18	Penatausahaan izin Pengangkutan dan penjualan untuk komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Laporan Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	2 Dokumen	175.000.000	183.750.000
3	29 03 1.18 01	Penyusunan dan perumusan Rekomendasi izin Pengangkutan dan penjualan untuk komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen Rekomendasi izin Pengangkutan dan penjualan untuk komoditas Mineral Bukan Logam Jenis tertentu	1 Dokumen	75.000.000	78.750.000
3	29 03 1.18 02	Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan izin Pengangkutan dan penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan izin Pengangkutan dan penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis tertentu	1 laporan	100.000.000	105.000.000
3	29 03 1.19	Penatausahaan izin Pengangkutan dan penjualan untuk Komoditas Batuan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Laporan Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	2 Dokumen	175.000.000	183.750.000
3	29 03 1.19 01	Penyusunan dan perumusan Rekomendasi izin Pengangkutan dan penjualan untuk komoditas Batuan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen Rekomendasi izin Pengangkutan dan penjualan untuk komoditas Batuan	1 Dokumen	75.000.000	78.750.000
3	29 03 1.19 02	Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan izin Pengangkutan dan penjualan untuk Komoditas Batuan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan izin Pengangkutan dan penjualan untuk Komoditas Batuan	1 laporan	100.000.000	105.000.000
3	29 03 1.20	Penatausahaan izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen Penatausahaan izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Dokumen	175.000.000	183.750.000
3	29 03 1.20 01	Penyusunan dan perumusan Rekomendasi izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen Rekomendasi izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	75.000.000	78.750.000
3	29 03 1.20 02	Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (satu) Daerah Provinsi	1 laporan	100.000.000	105.000.000
3	29 03 1.21	Penatausahaan izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen Penatausahaan izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	2 Dokumen	175.000.000	183.750.000
3	29 03 1.21 01	Penyusunan dan perumusan Rekomendasi izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen Rekomendasi izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	1 Dokumen	75.000.000	78.750.000
3	29 03 1.21 02	Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	1 laporan	100.000.000	105.000.000
3	29 03 1.22	Penatausahaan izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen penatausahaan izin usaha pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis tertentu	2 Dokumen	175.000.000	183.750.000
3	29 03 1.22 01	Penyusunan dan perumusan Rekomendasi izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen Rekomendasi izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	1 Dokumen	75.000.000	78.750.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
3	29	03	1.22	02	Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis tertentu	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	1 laporan	100.000.000	105.000.000
3	29	03	1.23		Penatausahaan izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Dokumen Penatausahaan izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	2 Dokumen	175.000.000	183.750.000
3	29	03	1.23	01	Penyusunan dan perumusan Rekomendasi izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen Rekomendasi izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	1 Dokumen	75.000.000	78.750.000
3	29	03	1.23	02	Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	1 laporan	100.000.000	105.000.000
3	29	03	1.24		Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan izin Usaha Pertambangan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan hasil Pembinaan Pelaksanaan izin Usaha Pertambangan	2 Dokumen	175.000.000	183.750.000
3	29	03	1.24	01	Pembinaan Pelaksanaan izin Usaha Pertambangan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan hasil Pembinaan Pelaksanaan izin Usaha Pertambangan	1 Laporan	75.000.000	78.750.000
3	29	03	1.24	02	Pengawasan Pelaksanaan izin Usaha Pertambangan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Izin Usaha Pertambangan hasil pengawasan	1 Dokumen	100.000.000	105.000.000
3	29	05			Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan				913.552.720	959.230.356
3	29	05	1.01		Penatausahaan izin, pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Prosedur persyaratan izin pemanfaatan langsung panas bumi lisntas daerah kabupaten/kota dala 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan	3 Laporan	456.776.360	479.615.178
3	29	05	1.01	01	Penetapan prosedur dan persyaratan izin pemanfaatan langsung panas bumi lisntas daerah kabupaten/kota dala 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen prosedur dan persyaratan izin pemanfaatan langsung panas bumi lisntas daerah kabupaten/kota dala 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan yang ditetapkan	1 Dokumen	150.000.000	157.500.000
3	29	05	1.01	02	Penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi pemanfaatan langsung panas bumi lisntas daerah kabupaten/kota dala 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi pemanfaatan langsung panas bumi lisntas daerah kabupaten/kota dala 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.	1 Dokumen	100.000.000	105.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	29	05	1.01	03	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi lisitas daerah kabupaten/kota dala 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi lisitas daerah kabupaten/kota dala 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.	1 Laporan	206.776.360	217.115.178
3	29	05	1.03		Penatausahaan izin, Pembinaan, dan Pengawasan usaha bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10000 (sepuluhribu) ton per tahun	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan		Jumlah laporan Penatausahaan izin, Pembinaan, dan Pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	3 Laporan	456.776.360	479.615.178
3	29	05	1.03	01	Penetapan prosedur dan persyaratan izin usaha niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10000 (sepuluhribu) ton per tahun	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan hasil penetapan prosedur dan persyaratan izin usaha niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10000 (sepuluhribu) ton per tahun yang ditetapkan	1 Dokumen	150.000.000	157.500.000
3	29	05	1.03	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan informasi izin usaha niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10000 (sepuluhribu) ton per tahun	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen Rekomendasi Perizinan dan informasi izin usaha niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10000 (sepuluhribu) ton per tahun	1 Dokumen	100.000.000	105.000.000
3	29	05	1.03	03	Pembinaan usaha niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10000 (sepuluhribu) ton per tahun	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan hasil pembinaan usaha niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10000 (sepuluhribu) ton per tahun	1 Laporan	206.776.360	217.115.178
3	29	06			Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan				24.912.854.992	26.211.211.200
3	29	06	1.01		Penatausahaan lain usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan		Jumlah dokumen Penatausahaan lain usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi	3 Dokumen	290.263.080	304.776.232
3	29	06	1.01	01	Penetapan prosedur dan persyaratan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan pelaksanaan prosedur dan persyaratan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi yang ditetapkan	1 Dokumen	96.754.360	101.592.076
3	29	06	1.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan informasi izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan informasi izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi	1 Dokumen	96.754.360	101.592.076

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	29	06	1.01	03	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Laporan Hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi	1 Laporan	96.754.360	101.592.078
3	29	06	1.04		Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan		Jumlah Dokumen Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	3 Laporan	290.263.080	304.776.234
3	29	06	1.04	01	Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen dan informasi terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi	1 Dokumen	96.754.360	101.592.078
3	29	06	1.04	02	Penentuan dan penetapan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen pemberian rekomendasi persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi	1 Dokumen	96.754.360	101.592.078
3	29	06	1.04	03	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan hasil penegndalian dan pengawasan pelaksanaan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	96.754.360	101.592.078
3	29	06	1.05		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan		Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	3 Dokumen	243.394.080	255.563.784
3	29	06	1.05	01	Penetapan prosedur dan persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen kebijakan terkait Penetapan prosedur dan persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	1 Dokumen	81.131.360	85.187.928
3	29	06	1.05	02	Penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah surat rekomendasi perizinan dan informasi izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	1 Dokumen	81.131.360	85.187.928

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
3	29	06	1.05	03	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	1 Laporan	81.131.360	85.187.928
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan		Jumlah Laporan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	7 Laporan	24.088.934.752	25.346.094.950
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	150.000.000	165.000.000
3	29	06	1.06	02	Penetapan penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	1700 Keluarga	150.000.000	157.500.000
3	29	06	1.06	03	Pengendalian dan pengawasan penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan pengawasan penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu	1 Laporan	150.000.000	198.000.000
3	29	06	1.06	04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah dokumen yang terkumpul terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen	94.273.420	103.700.762
3	29	06	1.06	05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan	1 Laporan	100.000.000	105.000.000
3	29	06	1.06	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah laporan pembangunan Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1702 Unit	22.801.174.332	23.941.232.838
3	29	06	1.06	07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas & Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Kab/Kota Se-Sultra	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Laporan	643.487.000	675.661.350
3	30				Dinas Perindustrian dan Perdagangan						53.262.455.000	69.241.191.500
3	30				Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan						40.262.455.000	52.341.191.500
3	30	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Persentase penyelesaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7 Kegiatan	28.919.455.000	37.595.291.500
3	30	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dok	625.300.000	812.890.000
3	30	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	16.900.000	21.970.000
3	30	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	202.800.000	263.640.000
3	30	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	202.800.000	263.640.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	30	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.140.000	13.182.000
3	30	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.140.000	13.182.000
3	30	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	13.520.000	17.576.000
3	30	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	169.000.000	219.700.000
3	30	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana	3 Dokumen	13.301.315.000	17.291.709.500
3	30	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang/bulan	13.000.000.000	16.900.000.000
3	30	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	228.150.000	296.595.000
3	30	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	10.000.000	13.000.000
3	30	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	15.000.000	19.500.000
3	30	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat daerah	1 Laporan	17.745.000	23.068.500
3	30	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.140.000	13.182.000
3	30	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Lap	10.140.000	13.182.000
3	30	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	10.140.000	13.182.000
3	30	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyelesaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	259.925.000	337.902.500
3	30	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	6.000.000	7.800.000
3	30	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000	13.000.000
3	30	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	10.000.000	13.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	30	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	101.400.000	131.820.000
3	30	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000	13.000.000
3	30	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.140.000	13.182.000
3	30	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	112.385.000	146.100.500
3	30	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8 Laporan	486.720.000	632.736.000
3	30	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	42.250.000	54.925.000
3	30	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	169.000.000	219.700.000
3	30	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.140.000	13.182.000
3	30	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.140.000	13.182.000
3	30	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.140.000	13.182.000
3	30	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	42.250.000	54.925.000
3	30	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	100 Orang	101.400.000	131.820.000
3	30	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	20 Orang	101.400.000	131.820.000
3	30	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	12 Laporan	2.596.405.000	3.375.326.500
3	30	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.645.000	45.038.500
3	30	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	42.250.000	54.925.000
3	30	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	42.250.000	54.925.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	30	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	338.000,000	439.400.000
3	30	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	143.650,000	186.745.000
3	30	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	13.520,000	17.576.000
3	30	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	42.250,000	54.925.000
3	30	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	304.200,000	395.460.000
3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.605.500,000	2.087.150.000
3	30	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.140,000	13.182.000
3	30	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	20.000,000	26.000.000
3	30	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyelesaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	81 Unit	8.204.700,000	10.666.110.000
3	30	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	1.352.000,000	1.757.600.000
3	30	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	304.200,000	395.460.000
3	30	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	253.500,000	329.550.000
3	30	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20 Unit	338.000,000	439.400.000
3	30	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	5.450.000,000	7.085.000.000
3	30	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	20 Unit	253.500,000	329.550.000
3	30	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 Unit	253.500,000	329.550.000
3	30	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Pe	4 Laporan	1.415.400,000	1.840.020,000
3	30	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	16.900,000	21.970.000
3	30	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	591.500,000	768.950.000
3	30	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	169.000,000	219.700.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
					Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	30 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	638.000.000	829.400.000
3	30 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah LaporanPenyelesaianPemeliharaan	100 Unit	2.029.690.000	2.638.597.000
3	30 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	439.400.000	571.220.000
3	30 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	338.000.000	439.400.000
3	30 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	25.350.000	32.955.000
3	30 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	27.040.000	35.152.000
3	30 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	929.500.000	1.208.350.000
3	30 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	135.200.000	175.760.000
3	30 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 Unit	135.200.000	175.760.000
3	30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Kendari	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	50%	600.000.000	780.000.000
3	30 02 1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	1 Dokumen	200.000.000	260.000.000
3	30 02 1.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua kab/kota, Semua kecamatan, Semua kelurahan	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	200.000.000	260.000.000
3	30 02 1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi		Jumlah Dokumen Pemenuhan Komitmen Surat Izin Perdagangan Bahan Berbahaya	1 Dokumen	400.000.000	520.000.000
3	30 02 1.03 02	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission Jumlah Dokumen PKPBerbahaya	1 Dokumen	200.000.000	260.000.000
3	30 02 1.03 03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	1 Laporan	200.000.000	260.000.000

Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi		Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	50%	550.000.000	715.000.000
3	30	03	1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Provinsi	1 Dokumen	550.000.000	715.000.000
3	30	03	1.01	02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Laporan	250.000.000	325.000.000
3	30	03	1.01	03 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	40 Orang	300.000.000	390.000.000
3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Kendari	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	80%	2.264.000.000	2.943.200.000
3	30	04	1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	2 Laporan	500.000.000	650.000.000
3	30	04	1.01	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	1 Laporan	250.000.000	325.000.000
3	30	04	1.01	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	1 Laporan	250.000.000	325.000.000
3	30	04	1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi		Jumlah Dokumen Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1 Dokumen	1.014.000.000	1.318.200.000
3	30	04	1.02	01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	1 Laporan	507.000.000	659.100.000
3	30	04	1.02	02 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	507.000.000	659.100.000
3	30	04	1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	3 Laporan	750.000.000	975.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	30	04	1.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pesticida Tingkat Daerah Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pesticida Tingkat Daerah Provinsi	1 Laporan	250.000.000	325.000.000
3	30	04	1.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	250.000.000	325.000.000
3	30	04	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pesticida	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pesticida	1 Laporan	250.000.000	325.000.000
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi		Persentase Nilai Ekspor Industri Pengolahan Non Migas	80%	1.774.500.000	2.306.850.000
3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	5 Laporan	1.774.500.000	2.306.850.000
3	30	05	1.01	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Luar Sultra	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	20 Pelaku Usaha	676.000.000	878.800.000
3	30	05	1.01	02	Pameran Dagang Lokal	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	15 Pelaku Usaha	338.000.000	439.400.000
3	30	05	1.01	03	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Luar Sultra	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha	338.000.000	439.400.000
3	30	05	1.01	04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Luar Sultra	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	20 Produk	422.500.000	549.250.000
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi		Persentase Peningkatan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	80%	3.957.500.000	5.144.750.000
3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di seluruh Daerah Kab/Kota	3 Laporan	1.191.500.000	1.548.950.000
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	350.000.000	455.000.000
3	30	06	1.01	02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	1 LPKSM	250.000.000	325.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	30	06	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengaduan Konsumen yang ditangani	10 Pengaduan	591.500.000	768.950.000
3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengujian, sertifikasi dan Kalibrasi	4 Dokumen	1.752.000.000	2.277.600.000
3	30	06	1.02	04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	10 Sertifikat	645.000.000	838.500.000
3	30	06	1.02	05	Pengembangan Layanan Pengujian	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	10 Dokumen	507.000.000	659.100.000
3	30	06	1.02	06	Pemantauan Mutu Produk	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	10 Produk	300.000.000	390.000.000
3	30	06	1.02	07	Pengembangan Layanan sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	5 Sertifikat	300.000.000	390.000.000
3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan / atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten / Kota	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.014.000.000	1.318.200.000
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	1 Laporan	507.000.000	659.100.000
3	30	06	1.03	02	Fasilitasi Penanganan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus yang Ditangani	5 Kasus	507.000.000	659.100.000
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemasaran Produk Unggulan Daerah	80%	2.197.000.000	2.856.100.000
3	30	07	1.01		Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Kab/Kota	Jumlah Laporan Promosi Produk Dalam Negeri	1 Laporan	422.500.000	549.250.000

Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	30	07	1.01	01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Kab/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	20 UMKM	422.500.000	549.250.000
3	30	07	1.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Kab/Kota	Jumlah Laporan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	422.500.000	549.250.000
3	30	07	1.02	01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Kab/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	20 UMKM	422.500.000	549.250.000
3	30	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Kab/Kota	Jumlah dokumen penggunaan produk dalam negeri	1 Dokumen	1.352.000.000	1.757.600.000
3	30	07	1.03	02	Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Kab/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	422.500.000	549.250.000
3	30	07	1.03	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	50 Orang	507.000.000	659.100.000
3	30	07	1.03	05	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Kab/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer	1 Laporan	422.500.000	549.250.000
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						13.000.000.000	16.900.000.000
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Kab/Kota	Persentase Jumlah Industri yang mengolah sumber daya daerah	3%	11.050.000.000	14.365.000.000
									Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri yang mengolah sumber daya daerah	30,12%		
3	31	2	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	5 Dokrmen	11.050.000.000	14.365.000.000
3	31	2	1.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	300.000.000	390.000.000
3	31	2	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	500.000.000	650.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	31	2	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	500.000.000	650.000.000
3	31	2	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	8.450.000.000	10.985.000.000
3	31	2	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	650.000.000	845.000.000
3	31	2	1.01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	650.000.000	845.000.000
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri	50 Persen	800.000.000	1.040.000.000
3	31	3	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	1 Laporan	800.000.000	1.040.000.000
3	31	3	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor Perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	400.000.000	520.000.000
3	31	3	1.01	04	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Kab/Kota			400.000.000	520.000.000
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	80 Persen	1.150.000.000	1.495.000.000
3	31	4	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1 Dokumen	1.150.000.000	1.495.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	31	4	1.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	350.000.000	455.000.000
3	31	4	1.01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 Dokumen	300.000.000	390.000.000
3	31	4	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	500.000.000	650.000.000
04					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
04 01					SEKRETARIAT DAERAH							
04 01					BIRO PEMERINTAHAN							
04 01 01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
04	01	01			Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				3.261.163.807	3.588.277.751
04	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			3.058.000	3.363.800
04	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.529.000	1.681.900
04	01	01	1.01	06	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.529.000	1.681.900
04	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			94.061.000	103.467.100
04	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.529.000	1.681.900
04	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	92.532.000	101.785.200
04	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			22.176.000	24.393.600
04	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	22.176.000	24.393.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
04	01	01	1.05		Administrasi Pegawai Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			105.325.000	115.857.500
04	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	90.475.000	99.522.500
04	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	14.850.000	16.335.000
04	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			864.885.300	952.371.398
04	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.375.000	1.512.500
04	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.398.050	20.237.855
04	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	128.236.570	141.060.227
04	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	180.000.000	198.997.568
04	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	536.875.680	590.563.248
04	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			209.687.500	230.656.250
04	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	38.500.000	42.350.000
04	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	171.187.500	188.306.250
04	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			63.426.000	69.768.600
04	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.100.000	1.210.000
04	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	62.326.000	68.558.600
04	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			98.593.000	108.452.300
04	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	96.580.000	106.238.000
04	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	2.013.000	2.214.300
04	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	CAKUPAN PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1 Dokumen	1.799.952.007	1.979.947.203

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	01	03	1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TERLAKSANANYA PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN	1 Dokumen	658.936.300	724.829.930
04	01	03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	12 Dokumen	282.668.100	310.934.910
04	01	03	1.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	289.065.700	317.972.270
04	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	2 Dokumen	87.202.500	95.922.750
04	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			499.028.207	548.931.020
04	01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	17 Dokumen	123.515.707	135.867.270
04	01	03	1.02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Dokumen	91.450.700	100.595.770
04	01	03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Laporan	284.061.800	312.467.980
04	01	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			641.987.500	706.186.253
04	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	45 Dokumen	428.913.100	471.804.410
04	01	03	1.03	02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	15 Dokumen	94.585.700	104.044.273
04	01	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kerjasama yang dievaluasi	1 Laporan	118.488.700	130.337.570
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN										44.060.449.695	49.472.757.794
04	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			2.685.834.575	3.960.632.162
04	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			171.149.000	256.723.500
04	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	76.515.000	114.772.500
04	01	01	1.01	06	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	11.550.000	17.325.000
04	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	83.084.000	124.626.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			278.548.500	349.703.050
04	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	75.688.500	45.413.050
04	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	202.860.000	304.290.000
04	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			32.518.500	48.777.750
04	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	32.518.500	48.777.750
04	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			369.834.000	554.751.000
04	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	76.642.500	114.963.750
04	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	293.191.500	439.787.250
04	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.129.387.500	1.694.081.250
04	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.140.000	37.710.000
04	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.037.500	36.056.250
04	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	172.335.000	258.502.500
04	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	907.875.000	1.361.812.500
04	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			339.937.500	509.906.250
04	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	201.187.500	301.781.250
04	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	138.750.000	208.125.000
04	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			34.980.000	52.470.000
04	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.000.000	22.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	19.980.000	29.970.000
04	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			329.479.575	494.219.362
04	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	267.829.575	401.744.362
04	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	61.650.000	92.475.000
04	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			41.374.615.120	45.512.125.632
04	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			28.792.362.423	31.671.598.665
04	01	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	8 Unit	13.514.631.823	14.866.095.005
04	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	300 Lembaga	15.277.730.600	16.805.503.660
04	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			11.931.830.197	13.125.002.217
04	01	04	1.02	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	7 Dokumen	8.161.434.820,00	8.977.578.302
04	01	04	1.02	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	6 Dokumen	3.478.604.877	3.826.465.365
04	01	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	5 Dokumen	291.790.500	320.958.550
04	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			650.422.500,00	715.524.750,00
04	01	04	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	5 Dokumen	266.810.500	293.491.550
04	01	04	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	5 Dokumen	289.030.500	317.993.550

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	01	04	1.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	4 Dokumen	94.581.500	104.039.650
					BIRO HUKUM						10.026.431.510	14.012.257.283
04	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				2.686.963.765	5.345.289.900
04	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			13.103.565	42.350.000
04	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.000.000	24.200.000
04	01	01	1.01	06	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.103.565	18.150.000
04	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			56.160.000	142.271.800
04	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	57.571.800
04	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	51.160.000	84.700.000
04	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			29.500.000	32.450.000
04	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	29.500.000	32.450.000
04	01	01	1.05		Administrasi Pegawai Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			185.570.000	572.000.000
04	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	77.330.000	132.000.000
04	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	108.240.000	198.000.000
04	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	240 Orang	0	242.000.000
04	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.187.317.200	1.911.831.000
04	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	35.860.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
04	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	151.065.200	566.500.000
04	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	77.500.000	85.250.000
04	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak & Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	76.530.000	84.183.000
04	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	178.823.000	330.000.000
04	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 2 Laporan	703.399.000	773.738.000
04	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0	36.300.000
04	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			966.950.000	1.983.277.000
04	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	580.470.000
04	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0	220.000.000
04	01	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	3 Unit	500.000.000	550.000.000
04	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	275.279.000	302.807.000
04	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	191.671.000	330.000.000
04	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			33.341.000	36.675.100
04	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	11.363.000	12.499.300
04	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	21.978.000	24.175.800
04	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			215.022.000	624.435.000
04	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	167.667.000	184.435.000
04	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	47.355.000	264.000.000
04	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	176.000.000
04	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			7.339.467.745	8.666.967.383

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	01	05	1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			2.523.986.910	3.667.058.048
04	01	05	1.01	01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	130 Dokumen	992.797.000	1.420.597.100
04	01	05	1.01	02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	900 Dokumen	249.689.700	421.975.593
04	01	05	1.01	03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	570 Dokumen	406.500.210	686.985.355
04	01	05	1.01	04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	500 Dokumen	875.000.000	1.137.500.000
04	01	05	1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			4.815.480.835	4.999.909.335
04	01	05	1.01	01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	20 Kasus	4.345.530.035	4.388.985.335
04	01	05	1.01	02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	20 Kasus	469.950.800	610.924.000
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN										4.257.498.797	4.673.290.392
04	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			2.229.203.627	2.442.165.705
04	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			27.883.240	30.671.564
04	01	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	20.430.740	22.473.814
04	01	01	1.01	06 Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	7.452.500	8.197.750
04	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			98.579.250	108.437.175
04	01	01	1.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.938.500	10.932.350
04	01	01	1.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	88.640.750	97.504.825
04	01	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			26.528.700	19.181.570
04	01	01	1.03	05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	26.528.700	19.181.570

Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	01	01	1.05	Administrasi Pegawai Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			231.727.100	254.899.810
04	01	01	1.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	67.650.000	74.415.000
04	01	01	1.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	164.077.100	180.484.810
04	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.368.724.337	1.505.638.486
04	01	01	1.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	76.325.714	84.000.000
04	01	01	1.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	37.527.710	41.280.481
04	01	01	1.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	72.760.600	80.036.660
04	01	01	1.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	1.182.110.313	1.300.321.345
04	01	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			290.950.000	320.045.000
04	01	01	1.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		30.250.000	33.275.000
04	01	01	1.07	05 Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	133.100.000	146.410.000
04	01	01	1.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	127.600.000	140.360.000
04	01	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			29.766.000	32.742.600
04	01	01	1.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.610.000	6.171.000
04	01	01	1.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24.156.000	26.571.600
04	01	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			155.045.000	170.549.500
04	01	01	1.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Penzinannya	10 Unit	134.948.000	148.442.800
04	01	01	1.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20.097.000	22.106.700
04	01	06		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				2.028.295.170	2.231.124.687
04	01	06	1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.433.456.970	1.576.802.667

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	1.223.323.970	1.345.656.367
04	01	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	210.133.000	231.146.300
04	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			247.841.000	272.625.100
04	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	83.248.000	91.572.800
04	01	06	1.02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	82.445.000	90.689.500
04	01	06	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	82.148.000	90.362.800
04	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			346.997.200	381.696.920
04	01	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	2 Dokumen	218.726.200	240.598.820
04	01	06	1.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	2 Dokumen	128.271.000	141.098.100
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN											5.810.276.370	6.056.776.370
04	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				2.356.500.000	2.503.000.000
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				418.500.000	453.500.000
04	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	23.000.000	25.000.000
04	01	01	1.01	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000	40.000.000
04	01	01	1.01	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000	10.000.000
04	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000	15.000.000
04	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	7.500.000
04	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6.000.000	6.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
04	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	330.000.000,00	350.000.000,00
04	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah				130.000.000	140.000.000
04	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	35.000.000	40.000.000
04	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	95.000.000	100.000.000
04	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah				22.000.000	25.000.000
04	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	22.000.000	25.000.000
04	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				473.500.000	487.000.000
04	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	80.000.000	80.000.000
04	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	6.500.000	7.000.000
04	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	19 Orang	387.000.000	400.000.000
04	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				925.000.000	990.000.000
04	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	30.000.000	35.000.000
04	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	45.000.000
04	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	55.000.000	60.000.000
04	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	800.000.000	850.000.000
04	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				90.000.000	100.000.000
04	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit mebel yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	35.000.000
04	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	60.000.000	65.000.000

Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	01	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				30.000.000	30.000.000
04	01	01	1.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000	10.000.000
04	01	01	1.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000	20.000.000
04	01	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik					267.500.000	277.500.000
04	01	01	1.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	235.000.000	240.000.000
04	01	01	1.09	05 Pemeliharaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	7.500.000	10.000.000
04	01	01	1.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	25.000.000	27.500.000
04	01	08		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				3.453.776.370	3.553.776.370
04	01	08	1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				924.325.000	924.325.000
04	01	08	1.01	01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Laporan	425.000.000	425.000.000
04	01	08	1.01	02 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1 Laporan	323.500.000	323.500.000
04	01	08	1.01	03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1 Laporan	175.825.000	175.825.000
04	01	08	1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				2.529.451.370	2.629.451.370
04	01	08	1.02	01 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	2 Dokumen	1.750.000.000	1.850.000.000
04	01	08	1.02	02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 Laporan	557.572.018	557.572.018
04	01	08	1.02	03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	2 Dokumen	221.879.352	221.879.352
				BIRO PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH						5.794.932.600	5.794.932.600
04	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				2.784.932.600	2.784.932.600
4	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				10.657.800	10.657.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
04	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.142.800	6.142.800
04	01	01	1.01	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.505.000	1.505.000
04	01	01	1.01	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.505.000	1.505.000
04	01	01	1.01	06	Penyusunan lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	#REF!	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.505.000	1.505.000
04	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah				44.968.000	44.968.000
04	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.568.000	2.568.000
04	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	42.400.000	42.400.000
04	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah				21.082.800	21.082.800
04	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	21.082.800	21.082.800
04	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				369.600.000	369.600.000
04	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	62 Paket	43.400.000	43.400.000
04	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	23 Orang	326.200.000	326.200.000
04	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				686.624.000	686.624.000
04	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	130.000.000	130.000.000
04	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak & Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	15.000.000
04	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1104 Dokumen	6.624.000	6.624.000
04	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	85.000.000	85.000.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	450.000.000	450.000.000
04	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				850.000.000	850.000.000
04	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000	500.000.000
04	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit mebel yang Disediakan	4 Paket	100.000.000	100.000.000
04	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	250.000.000	250.000.000
04	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				607.000.000	607.000.000
04	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.000.000	7.000.000
04	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	600.000.000	600.000.000
04	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik					195.000.000	195.000.000
04	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	165.000.000	165.000.000
04	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	30.000.000	30.000.000
04	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				3.010.000.000	3.010.000.000
04	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				1.320.000.000	1.320.000.000
04	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	60.000.000	60.000.000
04	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	1.200.000.000	1.200.000.000
04	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	60.000.000	60.000.000
04	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				1.100.000.000	1.100.000.000
04	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	2 Laporan	890.000.000	890.000.000
04	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	60.000.000	60.000.000
04	01	07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Laporan	150.000.000	150.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				590.000.000	590.000.000
04	01	07	1.03	01	Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	50 Orang	150.000.000	150.000.000
04	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	390.000.000	390.000.000
04	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	50.000.000	50.000.000
					BIRO ORGANISASI						4.957.612.800	5.453.374.080
04	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				3.952.612.800	4.347.874.080
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				91.124.000	100.236.400
04	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	22.000.000	24.200.000
04	01	01	1.01	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6.864.000	7.550.400
04	01	01	1.01	06	Penyusunan lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	#REF!	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	16.500.000	18.150.000
04	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	45.760.000	50.336.000
04	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah				129.338.000	142.271.800
04	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	52.338.000	57.571.800
04	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	77.000.000	84.700.000
04	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah				49.500.000	54.450.000
04	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	22.000.000	24.200.000
04	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan	27.500.000	30.250.000

Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	01	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				1.170.450.800	1.287.495.880
04	01	01	1.05	01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit	82.368.000	90.604.800
04	01	01	1.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	712.082.800	783.291.080
04	01	01	1.05	03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	125.000.000	137.500.000
04	01	01	1.05	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	11.000.000	12.100.000
04	01	01	1.05	05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	30.000.000	33.000.000
04	01	01	1.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000	110.000.000
04	01	01	1.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250 Orang	110.000.000	121.000.000
04	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				1.159.200.000	1.275.120.000
04	01	01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	200.000.000	220.000.000
04	01	01	1.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	55.000.000	60.500.000
04	01	01	1.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	77.000.000	84.700.000
04	01	01	1.06	05 Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak & Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24.200.000	26.620.000
04	01	01	1.06	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	33.000.000	36.300.000
04	01	01	1.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	770.000.000	847.000.000
04	01	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				1.259.000.000	1.384.900.000
04	01	01	1.07	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	154.000.000	169.400.000
04	01	01	1.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	605.000.000	665.500.000
04	01	01	1.07	05 Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit mebel yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	220.000.000
04	01	01	1.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	200.000.000	220.000.000
04	01	01	1.07	08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	110.000.000
04	01	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				31.000.000	34.100.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
04	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	1.000.000	1.100.000
04	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000	33.000.000
04	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				63.000.000	69.300.000
04	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	15.000.000	16.500.000
04	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah mebel yang Dipelihara	4 Unit	20.000.000	22.000.000
04	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	28.000.000	30.800.000
04	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				1.005.000.000	1.105.500.000
04	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				375.000.000	412.500.000
04	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	125.000.000	137.500.000
04	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	125.000.000	137.500.000
04	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	6 Dokumen	125.000.000	137.500.000
04	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				630.000.000	693.000.000
04	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	6 Dokumen	130.000.000	143.000.000
04	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	130.000.000	143.000.000
04	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	6 Laporan	100.000.000	110.000.000
04	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	6 Dokumen	140.000.000	154.000.000
04	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	2 Dokumen	130.000.000	143.000.000
04	01	01			BIRO UMUM							
04	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1 DOKUMEN	166.498.104.986	183.293.415.126
	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan	1 DOKUMEN	217.000.000	238.700.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
04	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	33.000.000	36.300.000
04	01	01	1.01	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	11.000.000
04	01	01	1.01	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	38.500.000	42.350.000
04	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	11.000.000
04	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	11.000.000
04	01	01	1.01	06	Penyusunan lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.500.000	6.050.000
04	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	110.000.000,00	121.000.000,00
04	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah				73.086.357.689	80.394.993.457
04	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/bulan	59.565.595.569	65.522.155.125
04	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	12.907.922.500	14.198.714.750
04	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	55.000.000	60.500.000
04	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	10.000.000	11.000.000
04	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.441.240	27.985.364
04	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.000.000	11.000.000
04	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	502.398.380	552.638.218
04	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	10.000.000	11.000.000
04	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah				385.407.970	418.998.767

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
					Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	9.240.000	10.164.000
04 01 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	294.851.590	324.336.749
04 01 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	10.000.000	11.000.000
04 01 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000	11.000.000
04 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	46.316.380	50.948.018
04 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000	11.000.000
04 01 01 1.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	550.000
04 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				1.571.130.000	1.723.293.000
04 01 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	300 Unit	33.000.000	36.300.000
04 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	933.130.000	1.026.443.000
04 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	550.000
04 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	500.000.000	550.000.000
04 01 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	50.000.000	55.000.000
04 01 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	50.000.000	55.000.000
04 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				22.579.464.708	24.837.811.179
04 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	143.017.006	157.318.707
04 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	699.600.000	769.560.000
04 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	50.000.000	55.000.000
04 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	443.391.025	487.730.128
04 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak & Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	525.178.830	577.696.713
04 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.000.000	7.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	10.000.000	11.000.000
04	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	13.070.145.000	14.377.159.500
04	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	7.599.140.547	8.359.054.601
04	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	32.992.300	36.291.530
04	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				30.323.304.830	33.455.635.314
04	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	2.611.378.000	2.872.515.800
04	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	2.000.000.000	2.200.000.000
04	01	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	3 Unit	500.000.000	550.000.000
04	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit mebel yang Disediakan	10 Paket	1.566.191.000	1.722.810.100
04	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	2.576.571.525	2.834.228.678
04	01	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000	11.000.000
04	01	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud				Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	55.000.000
04	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1.000.000.000	1.200.000.000
04	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2.000.000.000	2.200.000.000
04	01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	18.009.164.305	19.810.080.736
04	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				14.594.827.799	16.054.310.220
04	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	115.494.500	127.043.950
04	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.072.779.294	3.380.057.224
04	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.048.860.000	2.253.746.000
04	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.357.694.005	10.293.463.046
04	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik					14.577.623.047	16.090.385.352

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
04	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	8.966.675.795	9.863.343.375
04	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50.000.000	55.000.000
04	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit	100.000.000	110.000.000
04	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	1.062.270.000	1.168.497.000
04	01	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0	55.000.000
04	01	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	10.000.000	11.000.000
04	01	01	1.09	09	Peeliharaa/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4.088.677.252	4.497.544.977
04	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	100.000.000	110.000.000
04	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	100.000.000	110.000.000
04	01	01	1.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Tanah yang Dilakukan Dipelihara/Direhabilitasi	10 Ha	100.000.000	110.000.000
04	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik					4.079.473.769	4.487.421.146
04	01	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2.166.473.769	2.383.121.146
04	01	01	1.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7 Paket	913.000.000	1.004.300.000
04	01	01	1.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	500.000.000	550.000.000
04	01	01	1.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah h Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	500.000.000	550.000.000
04	01	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik					5.083.515.174	5.591.866.691
04	01	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	3.269.676.911	3.596.644.602
04	01	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.184.742.763	1.303.217.039
04	01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1 Paket	629.095.500	692.005.050
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN											37.177.703.941	41.217.154.587

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
04	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			23.206.597.743	25.848.937.769	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		37.992.955	363.472.505	
04	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	32.492.955	357.422.505
04	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.500.000	6.050.000
04	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah				160.115.615	176.127.176
04	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.442.240	16.986.464
04	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	144.673.375	159.140.712
04	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah				32.599.325	35.859.257
04	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	32.599.325	35.859.257
04	01	01	1.05		Administrasi Pegawai Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				1.268.960.000	1.395.856.000
04	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	695.750.000	765.325.000
04	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	573.210.000	630.531.000
04	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				15.305.938.543	16.836.532.397
04	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.618.850	35.880.735
04	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	213.125.000	234.437.500
04	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	283.426.550	311.769.205
04	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	337.177.445	370.895.189
04	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Laporan	468.484.500	515.332.950

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
					Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	13.971.106.198	15.368.216.818
04 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				2.212.676.350	2.433.943.985
04 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	500.000.000	550.000.000
04 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit mebel yang Disediakan	5 Paket	574.640.000	632.104.000
04 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	1.138.036.350	1.251.839.985
04 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				1.278.860.000,00	1.406.746.000,00
04 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	16.500.000,00	18.150.000,00
04 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	142.560.000	156.816.000
04 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	184.800.000	203.280.000
04 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	935.000.000	1.028.500.000
04 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				1.248.378.175	1.373.215.992
04 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Penzinannya	15 Unit	130.707.500	143.778.250
04 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	38.500.000	42.350.000
04 01 01 1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				1.079.170.675	1.187.087.742
04 01 01 1.13 01	Penyiapan Materi Pimpinan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan Yang Disiapkan	2 Dokumen	58.803.800	64.684.180
04 01 01 1.13 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2 Laporan	1.020.366.875	1.122.403.562
04 01 01 1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				581.906.105	640.096.715
04 01 01 1.14 01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	2 Laporan	216.907.955	238.598.750
04 01 01 1.14 02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Laporan	105.626.400	116.189.040
04 01 01 1.14 03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1 Laporan	259.371.750	285.308.925
04 02	SEKRETARIAT DPRD						130.952.154.172	145.612.633.186
04 02	SEKRETARIAT DPRD						130.952.154.172	145.612.633.186

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
									Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
04	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		69.941.064.559,00	76.934.445.014,00	
04	02	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2.188.228.625,00	2.407.051.487,00	
04	02	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	871.843.225	959.027.547
04	02	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	591.492.000	650.641.200
04	02	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	356.621.100	392.283.210
04	02	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	53.625.000	58.987.500
04	02	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	49.225.000	54.147.500
04	02	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	196.342.300	215.976.530
04	02	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	69.080.000	75.988.000
04	02	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			13.674.142.600,00	15.040.830.860,00
04	02	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	154 Orang	12.741.714.500	14.015.885.950
04	02	01	1.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	75.240.000	82.764.000
04	02	01	1.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	77.474.100	85.221.510
04	02	01	1.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.260.000	7.260.000
04	02	01	1.02	06		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.000.000	11.000.000
04	02	01	1.02	07		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Laporan	714.384.000	785.822.400
04	02	01	1.02	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	48.070.000	52.877.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	02	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			176.549.725,00	194.204.697,00
04	02	01	1.03	01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	105.049.725	115.554.697
04	02	01	1.03	06 Penatausahaan Barang Milik Daerah Yang Baik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	71.500.000	78.650.000
04	02	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		493.063.800,00	542.370.180,00
04	02	01	1.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	309 Paket	150.000.000	165.000.000
04	02	01	1.05	04 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Dokumen	20.000.000	22.000.000
04	02	01	1.05	05 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Dokumen	20.000.000	22.000.000
04	02	01	1.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	147.034.800	161.738.280
04	02	01	1.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	50.000.000	55.000.000
04	02	01	1.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	106.029.000	116.631.900
04	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			4.585.706.895,00	5.044.277.584,00
04	02	01	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket	325.392.375	357.931.612
04	02	01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	153.417.000	168.758.700
04	02	01	1.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	55.000.000	60.500.000
04	02	01	1.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	402.878.520	443.166.372
04	02	01	1.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	242.550.000	266.805.000
04	02	01	1.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	660.000.000	726.000.000
04	02	01	1.06	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.536.469.000	1.690.115.900
04	02	01	1.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.100.000.000	1.210.000.000
04	02	01	1.06	11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	110.000.000	121.000.000

Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	02	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			1.963.170.456,00	2.159.487.502,00
04	02	01	1.07	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	172.458.000	189.703.800
04	02	01	1.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	172.458.000	189.703.800
04	02	01	1.07	05 Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	77.550.000	85.305.000
04	02	01	1.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	110.000.000	121.000.000
04	02	01	1.07	09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	110.000.000	121.000.000
04	02	01	1.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	471.832.350	519.015.585
04	02	01	1.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	848.872.106	933.759.317
04	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Keterpenuhan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah	100%	5.312.221.478,00	5.843.443.626,00
04	02	01	1.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	11.000.000	12.100.000
04	02	01	1.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	2.063.821.478	2.270.203.626
04	02	01	1.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	10.000.000	11.000.000
04	02	01	1.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.227.400.000	3.550.140.000
04	02	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			5.076.012.140,00	5.583.613.354,00
04	02	01	1.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	100.000.000	110.000.000
04	02	01	1.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	2.606.395.000	2.867.034.500
04	02	01	1.09	06 Pemeliharaan Peralatan & Mesin lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	187.220.000	205.942.000
04	02	01	1.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	856.292.800	941.922.080
04	02	01	1.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.323.673.340	1.456.040.674

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2.431.000	2.674.100
04	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Kota Kendari			32.871.968.840,00	36.159.165.724,00
04	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	31.966.586.840	35.163.245.524
04	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	517.500.000	569.250.000
04	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	387.882.000	426.670.200
04	02	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Kota Kendari			3.600.000.000,00	3.960.000.000,00
04	02	01	1.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	45 Dokumen	100.000.000	110.000.000,00
04	02	01	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	8 Laporan	100.000.000	110.000.000,00
04	02	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2 Laporan	100.000.000	110.000.000,00
04	02	01	1.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	3.300.000.000	3.630.000.000,00
04	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			61.011.089.613,20	68.678.188.172,12
04	02	02	1.01		PEMBENTUKAN PERDA DAN PERATURAN DPRD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			22.798.872.999,00	26.523.749.896,50
04	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	380.678.771	418.746.648
04	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	7 Dokumen	3.004.386.880	3.304.825.568
04	02	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	8 Dokumen	17.613.047.375	3.304.825.568
04	02	02	1.01	04	Fasilitasi penyusunan penjelasan/Keterangan dan atau Naskah Akademik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Dokumen	1.790.759.973	19.374.352.112,50
04	02	02	1.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	10.000.000	11.000.000,00
04	02	02	1.01	06	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	45 Orang	-	110.000.000,00
04	02	02	1.02		PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			2.778.939.850,00	3.056.833.835,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	710.155.000	781.170.500
04	02	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPA	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	202.800.000	223.080.000
04	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	202.800.000	223.080.000
04	02	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	204.784.850	225.263.335
04	02	02	1.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab/Kota - Se Sultra dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	729.200.000	802.120.000
04	02	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4 Dokumen	729.200.000	802.120.000
04	02	02	1.03		PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			10.979.312.609,00	12.077.243.869,90
04	02	02	1.03	01	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	288 Laporan	2.145.035.200	2.359.538.720
04	02	02	1.03	02	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Infrastruktur	240 Laporan	1.870.035.200	2.057.038.720
04	02	02	1.03	03	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	432 Laporan	2.200.035.409	2.420.038.949,90
04	02	02	1.03	04	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Perekonomian	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Perekonomian	360 Laporan	2.145.035.200	2.359.538.720
04	02	02	1.03	05	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	120 Laporan	880.000.000	968.000.000
04	02	02	1.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	780.089.200	858.098.120
04	02	02	1.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Dokumen	100.000.000	110.000.000
04	02	02	1.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	859.082.400	944.990.640,00
04	02	02	1.04		PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kota Kendari, Kab/Kota Se-Sultra			6.152.899.100,00	6.768.189.010,00
04	02	02	1.04	01	Orientasi DPRD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	45 Dokumen	1.100.000.000	1.210.000.000
04	02	02	1.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	45 Dokumen	1.215.519.800	1.337.071.780
04	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	21 Orang	972.457.200	1.069.702.920
04	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab/Kota - Se Sultra dan Luar Daerah	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	840.985.200	925.083.720
04	02	02	1.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab/Kota - Se Sultra dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	544.196.400	598.616.040

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
04	02	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab/Kota - Se Sultra dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen	620.790.500	682.869.550
04	02	02	1.04	08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab/Kota - Se Sultra dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	7 Dokumen	858.950.000	944.845.000
04	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kota Kendari, Kab/Kota Se-Sultra			13.883.022.925,20	15.271.325.217,72
04	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	120 Laporan	2.675.142.800	2.942.657.080
04	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	45 Dokumen	383.897.351,20	422.287.086,32
04	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab/Kota-SeSultra	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	135 Dokumen	10.823.982.774	11.906.381.051,40
04	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab/Kota - Se Sultra dan Luar Daerah, Kota Kendari			1.089.323.300,00	1.198.255.630,00
04	02	02	1.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Kota Kendari	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen	10.000.000	11.000.000,00
04	02	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab/Kota - Se Sultra dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Laporan	1.079.323.300	1.187.255.630
04	02	02	1.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab/Kota - Se Sultra dan Luar Daerah			357.689.880,00	393.458.868,00
04	02	02	1.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab/Kota - Se Sultra dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	2 Dokumen	10.000.000	11.000.000
04	02	02	1.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab/Kota - Se Sultra dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	2 Dokumen	347.689.880	382.458.868
04	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab/Kota - Se Sultra dan Luar Daerah			2.971.028.950,00	3.389.131.845,00
04	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab/Kota - Se Sultra dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	90 Dokumen	100.000.000	110.000.000
04	02	02	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	8 Laporan	100.000.000	110.000.000
04	02	02	1.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	491.902.950	541.093.245
04	02	02	1.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	144 Dokumen	2.279.126.000	2.507.038.600
04	02	02	1.08	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2 Dokumen	-	121.000.000
5	01				URUSAN PERENCANAAN						25.239.379.801	27.494.785.836
5	01				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						25.239.379.801	27.494.785.836
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				17.777.640.751	19.286.872.951

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	-	33.796.730	37.176.403	
5	01	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Kambu, Kambu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	28.184.530	31.002.983
5	01	01	1.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.612.200	6.173.420
5	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	-	11.154.969.471	12.270.466.418	
5	01	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/ Bulan	10.989.545.476	12.088.500.023
5	01	01	1.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.502.695	6.052.965
5	01	01	1.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	159.921.300	175.913.430
5	01	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	-	43.326.800	47.659.480	
5	01	01	1.03	05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	43.326.800	47.659.480
5	01	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	-	-	307.340.000	69.212.000	
5	01	01	1.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	-	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	275.880.000	34.606.000
5	01	01	1.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	31.460.000	34.606.000
5	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	-	2.366.198.650	2.602.818.600	
5	01	01	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.734.550	21.708.000
5	01	01	1.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	139.560.600	153.516.700
5	01	01	1.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	312.244.800	343.469.300

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	14.322.000	15.754.200
5	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	64.515.000	70.966.500
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.364.616.000	1.501.077.600
5	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	451.205.700	496.326.300
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		-	-	1.387.100.000	1.525.810.000
5	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	878.900.000	966.790.000
5	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	55.000.000	60.500.000
5	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	281.600.000	309.760.000
5	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	110.000.000	121.000.000
5	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	61.600.000	67.760.000
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		-	-	952.591.500	1.048.180.700
5	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	3.630.000
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	709.965.300	780.961.900
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	239.626.200	263.588.800
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		-	-	1.532.317.600	1.685.549.350
5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	336.737.500	370.411.250
5	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	42.240.000	46.464.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.133.210.100	1.246.531.100
5	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	20.130.000	22.143.000
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	4.413.100.150	4.854.410.160
5	1	2	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan dan Berita Acara Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5/3 Dok/Lap. BA	2.892.705.100	3.181.975.610
5	1	2	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	426.140.000	468.754.000
5	1	2	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	48.981.900	53.880.100
5	1	2	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	-	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	681.847.100	750.031.810
5	1	2	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	1.735.736.100	1.909.309.700
5	1	2	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		-	-	229.459.000	252.404.900
5	1	2	1.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	229.459.000	252.404.900
5	1	2	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		-	-	1.290.936.050	1.420.029.650
5	1	2	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	827.694.100	910.463.500
5	1	2	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	2 Dokumen	463.241.950	509.566.150
5	1	3	1.01		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		-	-	3.048.638.900	3.353.502.725
5	1	3	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		-	-	1.079.100.125	1.187.010.100
5	1	3	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	82.696.200	90.965.800

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	1	3	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	996.403.925	1.096.044.300
5	1	3	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.339.239.050	1.473.162.950
5	1	3	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	845.339.500	929.873.450
5	1	3	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	177.649.550	195.414.500
5	1	3	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	156.750.000	172.425.000
5	1	3	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang SDA	1 Laporan	159.500.000	175.450.000
5	1	3	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	-	-	630.299.725	693.329.675
5	1	3	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	128.498.850	141.348.750
5	1	3	1.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	124.955.425	137.450.950
5	1	3	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	126.935.700	139.629.250
5	1	3	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	124.914.550	137.406.025
5	1	3	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	124.995.200	137.494.700
5	02				KEUANGAN						1.086.929.590.757	1.195.453.264.833
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH						985.429.290.757	1.083.928.719.833
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kendari			164.394.838.136	180.575.821.950
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				431.000.000	505.600.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	120.000.000	165.000.000
5	02	01	1.01	02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	11.000.000
5	02	01	1.01	03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Perubahan PKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5.000.000	5.000.000
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	286.000.000	314.600.000
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	-	-	150.870.000.000	165.957.000.000
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/Bulan	150.000.000.000	165.000.000.000
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	110.000.000	121.000.000
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	110.000.000	121.000.000
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5 Laporan	550.000.000	605.000.000
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	-	-	910.000.000	1.001.000.000
5	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	200.000.000	220.000.000
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	200.000.000	220.000.000
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	110.000.000	121.000.000
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	200.000.000	220.000.000
5	02	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	200.000.000	220.000.000
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	-	-	1.430.000.000	1.513.000.000
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	330 Paket	200.000.000	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
					Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5 02 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000
5 02 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000
5 02 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	330.000.000	363.000.000
5 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	40 Orang	500.000.000	550.000.000
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	-	-	5.494.500.000	5.813.950.000
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	33.000.000
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	770.000.000	847.000.000
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggadaan yang Disediakan	12 Paket	550.000.000	605.000.000
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	270 Paket	400.000.000	440.000.000
5 02 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	544.500.000	598.950.000
5 02 01 1.05 09	Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.300.000.000	2.300.000.000
5 02 01 1.05 10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 Dokumen	600.000.000	660.000.000
5 02 01 1.05 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	300.000.000	330.000.000
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	-	-	2.253.500.000	2.478.850.000
5 02 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	500.000.000	550.000.000
5 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	330.000.000	363.000.000
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit	1.000.000.000	1.100.000.000
5 02 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	36 Unit	423.500.000	465.850.000
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	-	-	1.175.838.136	1.293.421.950
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.838.136	22.921.950
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	385.000.000	423.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	770.000.000	847.000.000
5	02	01	1.09		Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Kota Kendari	-		1.830.000.000	2.013.000.000
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	33 Unit	600.000.000	660.000.000
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Perorangan Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	110.000.000	121.000.000
5	02	01	1.08	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	6 Unit	220.000.000	242.000.000
5	02	01	1.08	09	Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	550.000.000	605.000.000
5	02	01	1.08	10	Pemeliharaan/Rehab Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	350.000.000	385.000.000
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan daerah	100 PERSEN	805.219.524.689	886.016.477.158
5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dokumen/Orang 12/101	5.325.000.000	5.857.500.000
5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	1 Dokumen	275.000.000	302.500.000
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	275.000.000	302.500.000
5	02	02	1.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	220.000.000	242.000.000
5	02	02	1.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	220.000.000	242.000.000
5	02	02	1.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	220.000.000	242.000.000
5	02	02	1.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	1 Dokumen	220.000.000	242.000.000
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	1.210.000.000	1.331.000.000
5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	1.155.000.000	1.270.500.000
5	02	02	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	330.000.000	363.000.000
5	02	02	1.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	400.000.000	440.000.000
5	02	02	1.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 dokumen	500.000.000	550.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	02	02	1.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	30 Orang	300.000.000	330.000.000
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Dokumen dan laporan Evaluasi Kabupaten/Kota	Dokumen/Laporan 206	2.435.649.420	2.679.214.362
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	17 Laporan	330.000.000	363.000.000
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	17 Laporan	330.000.000	363.000.000
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	17 Laporan	330.000.000	363.000.000
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	1 Dokumen	385.000.000	423.500.000
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	1 Laporan	242.000.000	266.200.000
5	02	02	1.02	11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	34 Orang	488.649.420	537.514.362
5	02	02	1.02	12	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	330.000.000	363.000.000
5	02	02	1.03		Koordinasi & Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Dokumen/Laporan/Org 24/13/150	4.363.643.251	4.800.007.576
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	3 Dokumen	1.500.000.000	1.650.000.000
5	02	02	1.03	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian Dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	300.000.000	330.000.000
5	02	02	1.03	05	Koordinasi , Fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring & evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	17 Dokumen	400.000.000	440.000.000
5	02	02	1.03	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Bukan Bank	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	363.000.000	399.300.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	02	02	1.03	07	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran PFK	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	1.000.000.000	1.100.000.000
5	02	02	1.03	09	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan pemotongan atas sp2d dengan instansi terkait	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	50.643.251	55.707.576
5	02	02	1.03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	150.000.000	165.000.000
5	02	02	1.03	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kab/Kota	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Orang	600.000.000	660.000.000
5	02	02	1.04		Koodinasi & Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Dokumen Lporan Keuangan Pemerintah daerah	Dokumen/Kegiatan 27/1	2.555.232.018	3.085.755.220
5	02	02	1.04	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	71.068.374	78.175.211
5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 Laporan	263.163.644	289.480.009
5	02	02	1.04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	-	275.000.000
5	02	02	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	3 Dokumen	1.000.000.000	1.100.000.000
5	02	02	1.04	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	200.000.000	220.000.000
5	02	02	1.04	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	200.000.000	220.000.000
5	02	02	1.04	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	150.000.000	165.000.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	02	02	1.04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	150.000.000	165.000.000
5	02	02	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	190 Orang	400.000.000	440.000.000
5	02	02	1.04	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	1 Lembaga	121.000.000	133.100.000
5	02	02	1.05		Penunjang Usuran Kewenangan Pengelolaan Keuda	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Laporan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	44 Laporan	790.540.000.000	869.594.000.000
5	02	02	1.05	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	4 Laporan	220.000.000	242.000.000
5	02	02	1.05	06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	12 Laporan	100.000.000	110.000.000
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	220.000.000	242.000.000
5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	40.000.000.000	44.000.000.000
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan	750.000.000.000	825.000.000.000
5	02	03	1.01		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Cakupan Pengelolaan Barang Milik daerah	100 PERSEN	15.814.927.932	17.336.420.725
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Dokumen, Laporan dan Orang yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik daerah	Dokumen/Laporan/Org 9/46/3	15.814.927.932	17.336.420.725
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	500.000.000	550.000.000
5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	44.000.000	48.400.000
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	600.000.000	600.000.000
5	02	03	1.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.815.000.000	1.996.500.000
5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	11.140.727.633	12.254.800.396
5	02	03	1.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	300.000.000	330.000.000
5	02	03	1.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	42 Laporan	440.200.299	484.220.329
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	400.000.000	440.000.000
5	02	03	1.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	75.000.000	82.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	02	03	1.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	kendari/ Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	34 Orang	500.000.000	550.000.000
5	02				BADAN PENDAPATAN DAERAH						101.500.300.000	111.524.545.000
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				96.880.300.000	106.442.545.000
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	10 Dokumen	583.000.000	641.300.000
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	154.000.000	169.400.000
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	44.000.000	48.400.000
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	44.000.000	48.400.000
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	11.000.000	12.100.000
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	11.000.000	12.100.000
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	110.000.000	121.000.000
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	209.000.000	229.900.000
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	75 Dokumen	63.228.000.000	69.550.800.000
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	330 Orang/Bulan	61.666.000.000	67.832.600.000
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	924.000.000	1.016.400.000
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	275.000.000	302.500.000
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	66.000.000	72.600.000
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	33.000.000	36.300.000
5	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	66.000.000	72.600.000
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	34 Laporan	187.000.000	205.700.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	11.000.000	12.100.000
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	34 Dokumen	403.150.000	443.465.000
5	02	01	1.03	01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	66.000.000	72.600.000
5	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	33.000.000	36.300.000
5	02	01	1.03	03	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	36.300.000	39.930.000
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	36.300.000	39.930.000
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	60.500.000	66.550.000
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	165.000.000	181.500.000
5	02	01	1.03	07	Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	6.050.000	6.655.000
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	61 Dokumen	1.147.850.000	1.147.850.000
5	02	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	748.000.000	748.000.000
5	02	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	36.300.000	36.300.000
5	02	01	1.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Laporan	121.000.000	121.000.000
5	02	01	1.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	121.000.000	121.000.000
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	60.500.000	60.500.000
5	02	01	1.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	5 Dokumen	55.000.000	55.000.000
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	36 Laporan	6.050.000	6.050.000
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	442 Laporan	2.464.000.000	2.710.400.000
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10 Unit	242.000.000	266.200.000
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	450 Paket	1.100.000.000	1.210.000.000
5	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 Dokumen	154.000.000	169.400.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	02	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	36 Dokumen	99.000.000	108.900.000
5	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	345 Dokumen	121.000.000	133.100.000
5	02	01	1.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	10 Orang	60.500.000	66.550.000
5	02	01	1.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	5 Laporan	60.500.000	66.550.000
5	02	01	1.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	20 Orang	60.500.000	66.550.000
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	329 Pegawai	220.000.000	242.000.000
5	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	302.500.000	332.750.000
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	44.000.000	48.400.000
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	64 Laporan	6.009.300.000	6.599.230.000
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	484.000.000	532.400.000
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	200 Paket	110.000.000	121.000.000
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket	110.000.000	110.000.000
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	500 Paket	1.650.000.000	1.815.000.000
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	22 Paket	385.000.000	423.500.000
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	22.000.000	24.200.000
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1.100.000.000	1.210.000.000
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	18 Laporan	385.000.000	423.500.000
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.298.000.000	1.427.800.000
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	36.300.000	39.930.000
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	26 Dokumen	429.000.000	471.900.000
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	884 Unit	16.126.000.000	17.738.600.000
5	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit	1.815.000.000	1.996.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	1.100.000.000	1.210.000.000
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Paket	550.000.000	605.000.000
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1.408.000.000	1.548.800.000
5	02	01	1.07	07	Pengadaan Asset Tetap Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	242.000.000	266.200.000
5	02	01	1.07	08	Pengadaan Asset Tak Berwujud	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	1.210.000.000	1.331.000.000
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	3.751.000.000	4.126.100.000
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	500 unit	3.630.000.000	3.993.000.000
5	02	01	1.07	11	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	250 unit	2.420.000.000	2.662.000.000
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Cakupan Jasa Penunjang yang tersedia	100%	2.948.000.000	3.242.800.000
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	33.000.000	36.300.000
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.100.000.000	1.210.000.000
5	02	01	1.08	03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	363.000.000	399.300.000
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.452.000.000	1.597.200.000
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	222 Unit	3.971.000.000	4.368.100.000
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	98 Unit	396.000.000	435.600.000
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	253.000.000	278.300.000
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	214 Unit	429.000.000	471.900.000
5	02	01	1.09	08	Pemeliharaan aset tak berwujud	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	12 Unit	363.000.000	399.300.000
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	1.298.000.000	1.427.800.000
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	605.000.000	665.500.000
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	627.000.000	689.700.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
									Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
5	02	04				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	5 persen	4.620.000.000	5.082.000.000
5	02	04	1.01			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	141 Dokumen	4.620.000.000	5.082.000.000
5	02	04	1.01	01		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5 Dokumen	352.000.000	387.200.000
5	02	04	1.01	02		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	726.000.000	798.600.000
5	02	04	1.01	03		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	308.000.000	338.800.000
5	02	04	1.01	04		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Sarana dan Prasarana	550.000.000	605.000.000
5	02	04	1.01	05		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	110.000.000	121.000.000
5	02	04	1.01	06		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	13 Laporan	88.000.000	96.800.000
5	02	04	1.01	07		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen Ketetapan	88.000.000	96.800.000
5	02	04	1.01	08		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	12 Laporan	913.000.000	1.053.800.000
5	02	04	1.01	09		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	17 Dokumen	66.000.000	72.600.000
5	02	04	1.01	10		Penagihan Pajak Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	121.000.000	133.100.000
5	02	04	1.01	11		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	12 Dokumen Surat Pertujuan/Penolakan	121.000.000	133.100.000
5	02	04	1.01	12		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Laporan	990.000.000	1.039.500.000
5	02	04	1.01	13		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	30 Laporan	121.000.000	133.100.000
5	02	04	1.01	14		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	66.000.000	72.600.000
5	03					KEPEGAWAIAN						27.400.000.000	30.140.000.000
						BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						27.400.000.000	30.140.000.000
5	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	22.000.000.000	24.200.000.000
5	03	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	125.000.000	137.500.000
5	03	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000	5.500.000
5	03	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000
5	03	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.500.000
5	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000	5.500.000
5	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.971.884.000	12.069.072.400
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/ Bulan	10.828.134.000	11.910.947.400
5	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	5.500.000
5	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	138.750.000	152.625.000
5	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	39.480.000	43.428.000
5	03	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	39.480.000	43.428.000
5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	580.000.000	638.000.000
5	03	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	180.000.000	198.000.000
5	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	150.000.000	165.000.000
5	03	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	250.000.000	275.000.000
5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.097.736.000	2.307.509.600
5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.000.000	55.000.000
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25.000.000	27.500.000
5	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang – undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan & Peraturan Perundang – undangan yang Disediakan	576 Dokumen	2.736.000	3.009.600
5	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000	22.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.500.000.000	1.650.000.000
5	03	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	500.000.000	550.000.000
5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah yang Tersedia	35 Unit	6.550.000.000	7.205.000.000
5	03	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000	550.000.000
5	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	250.000.000	275.000.000
5	03	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	55.000.000
5	03	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000.000	5.500.000.000
5	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 unit	250.000.000	275.000.000
5	03	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	500.000.000	550.000.000
5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	1 Laporan	765.900.000	842.490.000
5	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	5.500.000
5	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	400.000.000	440.000.000
5	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	360.900.000	396.990.000
5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	102 Unit	870.000.000	957.000.000
5	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya	25 Unit	170.000.000	187.000.000
5	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Dipelihara /Direhabilitasi	64 Unit	80.000.000	88.000.000
5	03	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	20.000.000	22.000.000
5	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000	550.000.000
5	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Dipelihara /Direhabilitasi	12 Unit	80.000.000	88.000.000
5	03	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000	22.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pelayanan Urusan Kepegawaian	100%	5.400.000.000	5.940.000.000
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	3.050.000.000	3.355.000.000
5	03	02	1.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	4 Dokumen	1.000.000.000	1.100.000.000
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	150.000.000	165.000.000
5	03	02	1.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1.700.000.000	1.870.000.000
5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
5	03	02	1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Mutasi dan Promosi ASN	100%	1.650.000.000	1.815.000.000
5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4 Laporan	250.000.000	275.000.000
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN Jumlah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1.400.000.000	1.540.000.000
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	100%	300.000.000	330.000.000
5	03	02	1.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	10 Orang	50.000.000	55.000.000
5	03	02	1.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	50.000.000	55.000.000
5	03	02	1.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen	100.000.000	110.000.000
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	400.000.000	440.000.000
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	150.000.000	165.000.000
5	03	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	10 Orang	50.000.000	55.000.000
5	03	02	1.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	300 Orang	100.000.000	110.000.000
5	03	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	100.000.000	110.000.000
5	04				Pendidikan dan Pelatihan						37.985.350.000	32.062.500.000
					BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						37.985.350.000	32.062.500.000
5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	28.140.350.000	21.812.500.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	04	01	1.01.	Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	7 Dokumen	160.000.000	185.000.000
5	04	01	1.01.	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	25.000.000	30.000.000
5	04	01	1.01.	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	7.000.000
5	04	01	1.01.	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	7.000.000
5	04	01	1.01.	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	7.000.000
5	04	01	1.01.	05 Koordinasi dan Penyusunan DPA Perubahan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	7.000.000
5	04	01	1.01.	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	5.000.000	7.000.000
5	04	01	1.01.	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	110.000.000	120.000.000
5	04	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	9.944.400.000	2.164.000.000
5	04	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Org/Bulan	9.800.000.000	2.000.000.000
5	04	01	1.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	134.400.000	150.000.000
5	04	01	1.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	7.000.000
5	04	01	1.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5.000.000	7.000.000
5	04	01	1.03	01 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		-	-	5.000.000	7.000.000
5	04	01	1.03	01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	7.000.000
5	04	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	650.000.000	715.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
5	04	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	150.000.000	165.000.000
5	04	01	1.05	09	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	500.000.000	550.000.000
5	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		-	-	11.810.000.000	12.920.000.000
5	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.500.000.000	11.500.000.000
5	04	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	56.000.000	60.000.000
5	04	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.000.000	75.000.000
5	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	125.000.000	130.000.000
5	04	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.000.000	5.000.000
5	04	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	300.000.000	350.000.000
5	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dalam & Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	750.000.000	800.000.000
5	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	26 Unit	3.750.000.000	3.955.000.000
5	04	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	1.000.000.000	1.000.000.000
5	04	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	50.000.000	55.000.000
5	04	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	500.000.000	550.000.000
5	04	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1.400.000.000	1.500.000.000
5	04	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	800.000.000	850.000.000
5	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan	3 Laporan	530.950.000	546.000.000
5	04	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	950.000	1.000.000
5	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	330.000.000	335.000.000
5	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	200.000.000	210.000.000

Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
								Indikator Kinerja	Target		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	04	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	35 Unit	1.290.000.000	1.320.500.000
5	04	01	1.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	260.000.000	265.000.000
5	04	01	1.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	100.000.000	105.000.000
5	04	01	1.09	05 Pemeliharaan Meubel	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	10.000.000	10.500.000
5	04	01	1.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	20.000.000	25.000.000
5	04	01	1.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	300.000.000	305.000.000
5	04	01	1.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	300.000.000	305.000.000
5	04	01	1.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	300.000.000	305.000.000
5	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			-	9.845.000.000	10.250.000.000
5	04	02	1.01.	Pengembangan Kompetensi Teknis	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			-	950.000.000	1.150.000.000
5	04	02	1.01.	01 Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Usuran Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Usuran Pemerintahan Umum	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Usuran Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Usuran Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	200.000.000	250.000.000
5	04	02	1.01.	02 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan dalam negeri, kompetensi teknis umum, inti dan pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Usuran Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah, Penunjang dan Usuran Pemerintahan Umum	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Usuran Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Usuran Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	250.000.000	300.000.000
5	04	02	1.01.	03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi penyelenggara usuran pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	240 Orang	400.000.000	500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
5	04	02	1.01.	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000
5	04	02	1.02.		Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Penyelenggaraan Sertifikasi, Kelembagaan dan PNS mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100%	8.895.000.000	9.100.000.000
5	04	02	1.02.	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta jabatan fungsional	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	1 Dokumen	450.000.000	500.000.000
5	04	02	1.02.	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Dokumen	220.000.000	250.000.000
5	04	02	1.02.	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	155 Orang	750.000.000	750.000.000
5	04	02	1.02.	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Laporan	2.200.000.000	2.300.000.000
5	04	02	1.02.	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1650 Orang	5.000.000.000	5.000.000.000
5	04	02	1.02.	08	Pembinaan, Pengoordinasian, fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Dokumen	275.000.000	300.000.000
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						20.000.000.000	21.984.810.132
5	05	01			BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH						20.000.000.000	21.984.810.132
5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Terselenggaranya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	7.831.645.575	8.614.810.132
5	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	25.000.000	27.500.000
5	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000	5.500.000
5	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000	11.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
5	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000	5.500.000
5	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	5.500.000
5	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.892.142.260	6.481.356.486
5	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	5.765.542.260	6.342.096.486
5	05	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	80.100.000	88.110.000
5	05	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	5.500.000
5	05	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	41.500.000	45.650.000
5	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Laporan	219.600.000	241.560.000
5	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	39.600.000	43.560.000
5	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	120.000.000	132.000.000
5	05	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	60.000.000	66.000.000
5	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Laporan	673.765.740	741.142.314
5	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.000.000	5.500.000
5	05	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	5.000.000	5.500.000
5	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.000.000	16.500.000
5	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	31.365.740	34.502.314

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
5	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	14.400.000	15.840.000
5	05	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	165.000.000
5	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000	27.500.000
5	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	338.000.000	371.800.000
5	05	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	90.000.000	99.000.000
5	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11 Unit	170.237.575	187.261.332
5	05	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	25.000.000	27.500.000
5	05	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	102.737.575	113.011.332
5	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	36.750.000	40.425.000
5	05	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.750.000	6.325.000
5	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	429.400.000	472.340.000
5	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	900.000	990.000
5	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	186.000.000	204.600.000
5	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	242.500.000	266.750.000
5	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32 Unit	421.500.000	463.650.000
5	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya2	7 Unit	150.000.000	165.000.000
5	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	6.500.000	7.150.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
5	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	250.000.000	275.000.000
5	05	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	15.000.000	16.500.000
5	05	02	.0		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Terselenggaranya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	100 Persen	12.168.354.425	13.370.000.000
5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Tersedianya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 Persen	3.600.000.000	3.960.000.000
5	05	02	1.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	3 Laporan	750.000.000	825.000.000
5	05	02	1.01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	3 Laporan	800.000.000	880.000.000
5	05	02	1.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	2 Laporan	400.000.000	440.000.000
5	05	02	1.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	3 Laporan	750.000.000	825.000.000
5	05	02	1.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	3 Rekomendasi	600.000.000	660.000.000
5	05	02	1.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	300.000.000	330.000.000
5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Tersedianya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 Persen	2.300.000.000	2.530.000.000
5	05	02	1.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	500.000.000	550.000.000
5	05	02	1.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	4 Dokumen	800.000.000	880.000.000
5	05	02	1.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	3 Dokumen	500.000.000	550.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	05	02	1.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	2 Dokumen	500.000.000	550.000.000
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Tersedianya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100 Persen	3.750.000.000	4.125.000.000
5	05	02	1.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3 Dokumen	750.000.000	825.000.000
5	05	02	1.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	2 Dokumen	500.000.000	550.000.000
5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3 Dokumen	750.000.000	825.000.000
5	05	02	1.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	3 Dokumen	750.000.000	825.000.000
5	05	02	1.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	250.000.000	275.000.000
5	05	02	1.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	250.000.000	275.000.000
5	05	02	1.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	500.000.000	550.000.000
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Inovasi	100 Persen	2.518.354.425	2.755.000.000
5	05	02	1.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	4 Dokumen	1.000.000.000	1.100.000.000
5	05	02	1.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	3 Laporan	300.000.000	330.000.000
5	05	02	1.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	450.000.000	495.000.000
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	500.000.000	550.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	05	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	3 Laporan	268.354.425	280.000.000
5	07				Urusan Pengelolaan Penghubung						50.734.698.793	53.068.507.877
5	07				Badan Penghubung						50.734.698.793	53.068.507.877
5	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah				20.807.106.793	21.937.322.597
5	01	01	1,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	Renja, Renstra SKPD		3 dokumen	5.782.060	6.013.342
5	01	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	5.782.060	6.013.342
5	01	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah				6.958.732.098	7.237.081.382
5	01	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	6.788.504.589	7.060.044.773
5	01	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	29.156.475	30.322.734
5	01	01	1,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 dokumen	5.801.812	6.033.884
5	01	01	1,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 laporan	135.269.222	140.679.991
5	01	01	1,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah		Ketersediaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat guna	12 dokumen	35.043.840	36.445.594
5	01	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 dokumen	35.043.840	36.445.594
5	01	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah		Terlaksananya peningkatan kapasitas kedisiplinan aparatur serta terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas aparatur		384.916.480	400.313.139
5	01	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	90 paket	116.596.480	121.260.339
5	01	01	1,05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	5 orang	54.080.000	56.243.200
5	01	01	1,05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	5 laporan	108.160.000	112.486.400
5	01	01	1,05	08	Pemindahan Tugas ASN	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	5 orang	54.080.000	56.243.200
5	01	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 orang	52.000.000	54.080.000
5	01	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah		Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah yg tepat sasaran pada Perangkat Daerah		2.286.494.621	2.469.414.191

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	01	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	6.270.468	6.772.106
5	01	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	6.292.615	6.796.024
5	01	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	272.457.518	294.254.120
5	01	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	17.008.110	18.368.759
5	01	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	2.494.230	2.693.768
5	01	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	1.487.971.680	1.607.009.414
5	01	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 laporan	494.000.000	533.520.000
5	01	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah		Tersedianya perlengkapan sarana dan prasarana berikut pemeliharaannya		4.341.740.793	4.689.081.137
5	01	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	604.052.366	652.377.635
5	01	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12paket	577.057.161	623.221.734
5	01	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	102.343.024	110.530.466
5	01	01	1,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	2.010.960.000	2.171.836.800
5	01	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	523.664.121	565.557.251
5	01	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	523.664.121	565.557.251
5	01	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah				2.522.864.969	2.656.580.602
5	01	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.355.892.544	1.410.128.246
5	01	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	858.456.841	892.795.114
5	01	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	3.504.384	36.445.594
5	01	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	305.011.200	317.211.648
5	01	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah yg senantiasa layak guna sebagai sarana dan prasarana penunjang		4.271.531.932	4.442.393.210
5	01	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 unit	2.804.354.800	2.916.528.992

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	01	01	1,09	05	Pemeliharaan Mebel	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 unit	21.632.000	22.497.280
5	01	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	11.891.543	12.367.205
5	01	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	909.989.468	946.389.047
5	01	01	1,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	523.664.121	544.610.686
5	01	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Tata Kelola pemerintahan yang baik	meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah				29.927.592.000	31.131.185.280
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah				1.044.992.000	1.093.281.280
5	07	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	5 laporan	324.480.000	337.459.200
5	07	02	1.01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	12 laporan	270.400.000	281.216.000
5	07	02	1.01	03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	1 laporan	104.000.000	108.160.000
5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	1 laporan	183.872.000	191.226.880
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1 laporan	162.240.000	175.219.200
6	01				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						28.882.600.000	30.037.904.000
6	01				INSPEKTORAT DAERAH						28.882.600.000	30.037.904.000
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		-	-	20.104.600.000	20.908.784.000
6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		-	-	13.200.000	13.728.000
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.200.000	1.248.000
6	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000	3.120.000
6	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000	3.120.000
6	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	2.500.000	2.600.000
6	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	3.500.000	3.640.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
6	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	750.000.000	780.000.000
6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25 Unit	2.315.000.000	2.407.600.000
6	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	400.000.000	416.000.000
6	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	300.000.000	312.000.000
6	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	215.000.000	223.600.000
6	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	450.000.000	468.000.000
6	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	400.000.000	416.000.000
6	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	300.000.000	312.000.000
6	01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	250.000.000	260.000.000
6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36 Laporan	225.900.000	234.936.000
6	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.900.000	10.296.000
6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	158.000.000	164.320.000
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	58.000.000	60.320.000
6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		-	-	678.000.000	705.120.000
6	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	35.000.000	36.400.000
6	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	205.000.000	213.200.000
6	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	150.000.000	156.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
6	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	200.000.000	208.000.000
6	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	88.000.000	91.520.000
6	01	02	.0		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah, serta Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	98 persen	7.198.000.000	7.485.920.000
6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		-		6.103.000.000	6.347.120.000
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Kota Kendari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	150 Laporan	3.350.000.000	3.484.000.000
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Laporan	460.000.000	478.400.000
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	36 Laporan	415.000.000	431.600.000
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	285.000.000	296.400.000
6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	45 Laporan	843.000.000	876.720.000
6	01	02	1.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	100.000.000	104.000.000
6	01	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3 Dokumen	650.000.000	676.000.000
6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		-		1.095.000.000	1.138.800.000
6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan	145.000.000	150.800.000
6	01	02	1.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	95 Laporan	950.000.000	988.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	01	03	.0		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Kualitas APIP dalam Rangka Profesionalisme Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	93 persen	1.580.000.000	1.643.200.000
6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		-		400.000.000	416.000.000
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	130.000.000	135.200.000
6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi	270.000.000	280.800.000
6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		-		1.180.000.000	1.227.200.000
6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	48 Perangkat Daerah	850.000.000	884.000.000
6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	48 Perangkat Daerah	175.000.000	182.000.000
6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	155.000.000	161.200.000
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						25.000.000.000	27.392.190.500
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						25.000.000.000	27.392.190.500
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						25.000.000.000	27.392.190.500
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	KOTA KENDARI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 PERSEN	18.629.810.000	20.014.491.000
8	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	10 Dokumen	570.000.000	625.000.000
8	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	40.000.000	45.000.000
8	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	150.000.000	155.000.000
8	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000	55.000.000
8	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000	55.000.000
8	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000	55.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	30.000.000	35.000.000
8	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	200.000.000	225.000.000
8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75 Dokumen	5.436.810.000	5.927.241.000
8	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	5.050.000.000	5.505.000.000
8	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	20.000.000	28.800.000
8	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	20.000.000	28.800.000
8	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	20.000.000	28.800.000
8	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	150.000.000	155.000.000
8	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	13.500.000	16.200.000
8	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	38 Laporan	150.000.000	150.000.000
8	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	13.310.000	14.641.000
8	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada	34 Dokumen	81.000.000	85.800.000
8	01	01	1.03	01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	10.000.000	12.000.000
8	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	15.000.000	15.000.000
8	01	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	6 Laporan	13.000.000	14.300.000
8	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000	10.000.000
8	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000	10.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025				
					Indikator Kinerja	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
8	01	01	1.03	06	Penata Usahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penata Usahaan Barang Daerah pada SKPD	12 Laporan	10.000.000	11.000.000
8	01	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	13.000.000	13.500.000
8	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Laporan	699.000.000	745.450.000
8	01	01	1.05	01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	50.000.000	55.000.000
8	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	200.000.000	210.000.000
8	01	01	1.05	03	Pendataan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	20.000.000	25.000.000
8	01	01	1.05	04	koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	150.000.000	150.000.000
8	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	30.000.000	35.000.000
8	01	01	1.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	2 Orang	17.000.000	18.700.000
8	01	01	1.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	17.000.000	18.700.000
8	01	01	1.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	3 Orang	25.000.000	28.050.000
8	01	01	1.05	09	Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	70.000.000	75.000.000
8	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	5 Orang	50.000.000	55.000.000
8	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	70.000.000	75.000.000
8	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	50 Laporan	3.505.000.000	3.778.000.000
8	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.000.000	30.000.000
8	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.000.000.000	1.150.000.000
8	01	01	1.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	200.000.000	220.000.000
8	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	70.000.000	75.000.000
8	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	12 Paket	200.000.000	220.000.000
8	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	100.000.000	100.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	100.000.000	105.000.000
8	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	250.000.000	265.000.000
8	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	1.500.000.000	1.550.000.000
8	01	01	1.06	10	Penata usahaan arsip dinamis pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	30.000.000	33.000.000
8	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	30.000.000	30.000.000
8	01	01	1.07		Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah yang Tersedia	134 Unit	3.820.000.000	4.030.000.000
8	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	1.000.000.000	1.000.000.000
8	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.000.000.000	1.000.000.000
8	01	01	1.07	03	Pengadaan Alat Besar	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 unit	50.000.000	55.000.000
8	01	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	3 Unit	20.000.000	20.000.000
8	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 paket	500.000.000	600.000.000
8	01	01	1.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	200.000.000	210.000.000
8	01	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	200.000.000	210.000.000
8	01	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	-	-
8	01	01	1.07	09	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	120.000.000
8	01	01	1.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	200.000.000	210.000.000
8	01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	550.000.000	605.000.000
8	01	01	1.08		Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Usuran	48 Laporan	1.160.000.000	1.180.000.000
8	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	15.000.000
8	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000	155.000.000

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	500.000.000	505.000.000
8	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	500.000.000	505.000.000
8	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	92 Unit	3.358.000.000	3.643.000.000
8	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan dan perizinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	400.000.000	405.000.000
8	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	200.000.000	205.000.000
8	01	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2 Unit	50.000.000	55.000.000
8	01	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 Unit	8.000.000	8.000.000
8	01	01	1.09	05	Pemeliharaan mebel	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	250.000.000	275.000.000
8	01	01	1.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	250.000.000	275.000.000
8	01	01	1.09	07	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	250.000.000	275.000.000
8	01	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	12 Unit	-	-
8	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	450.000.000	495.000.000
8	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	750.000.000	825.000.000
8	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	750.000.000	825.000.000
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	PUSAT & PROV.SULTRA	Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6 KEGIATAN	2.730.190.000	3.133.699.500
8	01	02	101		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Kegiatan Hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Dokumen	2.730.190.000	3.133.699.500
8	01	02	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	10.000.000	11.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
					Indikator Kinerja	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
8	01 02 1.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kota Kendari	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	4 dokumen	50.000.000	55.000.000
8	01 02 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov.Sultra	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	151.150.000	157.699.500
8	01 02 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pusat & Prov.Sultra	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Orang	100.000.000	200.000.000
8	01 02 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 laporan	60.000.000	65.000.000
8	01 02 1.01 06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	5 dokumen	50.000.000	55.000.000
8	01 02 1.01 07	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	100 Orang	30.000.000	45.000.000
8	01 02 1.01 08	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	2 Dokumen	30.000.000	45.000.000
8	01 02 1.01 09	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	3 Dokumen	2.159.040.000	2.365.000.000
8	01 02 1.01 10	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	30.000.000	45.000.000
8	01 02 1.01 11	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	30.000.000	45.000.000
8	01 02 1.01 12	Pembentukan Paskibraka	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Jumlah Paskibraka	70 Orang	30.000.000	45.000.000
8	01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	PUSAT & PROV.SULTRA	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Presiden, Wakil Presiden dan PEMILUKADA	90 PERSEN	1.660.000.000	1.861.000.000

Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025	
								Indikator Kinerja	Target			
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
8	01	03	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pusat & Prov.Sultra	Jumlah Dokumen hasil perumusan kebijakan teknis dan pemantapan bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Dokumen	1.660.000.000	1.861.000.000	
8	01	03	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pusat & Prov.Sultra	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	10.000.000	11.000.000
8	01	03	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pusat & Prov.Sultra	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	100.000.000	100.000.000
8	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov.Sultra	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	400 Orang	800.000.000	900.000.000
8	01	03	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pusat & Prov.Sultra	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Orang	250.000.000	300.000.000
8	01	03	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	500.000.000	550.000.000
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	PUSAT & PROV.SULTRA	Persentase Jumlah Ormas yang Terdaftar Dalam setiap Tahunnya	80 PERSEN	335.000.000	356.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025		
					Indikator Kinerja	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
8	01 04 101		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pusat & Prov.Sultra	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	80 PERSEN	335.000.000	356.000.000
8	01 04 1.01 01		Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pusat & Prov.Sultra	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	10.000.000	11.000.000
8	01 04 1.01 02		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pusat & Prov.Sultra	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	50.000.000	55.000.000
8	01 04 1.01 03		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov.Sultra	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang	150.000.000	155.000.000
8	01 04 1.01 04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pusat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Orang	75.000.000	80.000.000
8	01 04 1.01 05		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Laporan	50.000.000	55.000.000
8	01 05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	PUSAT DAN PROV.SULTRA	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 KEGIATAN	335.000.000	356.000.000
8	01 05 101		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Prov.Sultra	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	5 Kegiatan	335.000.000	356.000.000
8	01 05 101 01		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov.Sultra	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	10.000.000	11.000.000
8	01 05 101 02		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov.Sultra	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	50.000.000	55.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	01	05	101	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov.Sultra	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400 Orang	150.000.000	155.000.000
8	01	05	101	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pusat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 Orang	75.000.000	80.000.000
8	01	05	101	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 Laporan	50.000.000	55.000.000
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	PUSAT DAN PROV.SULTRA	Jumlah Kegiatan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1 KEGIATAN	1.310.000.000	1.671.000.000
8	01	06	101		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Prov.Sultra	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknik dan Pelaksanaan Pemantapan Peningkatan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	6 Kegiatan	1.310.000.000	1.671.000.000
8	01	06	101	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov.Sultra	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	10.000.000	11.000.000
8	01	06	101	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov.Sultra	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	50.000.000	55.000.000
8	01	06	101	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov.Sultra	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400 Orang	500.000.000	750.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif 2024	Prakiraan Maju 2025
									Indikator Kinerja	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	01	06	101	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pusat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Orang	200.000.000	250.000.000
8	01	06	101	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	50.000.000	55.000.000
8	01	06	101	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Prov. Sultra	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	12 Laporan	500.000.000	550.000.000



Bab VII

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tolok ukur yang digunakan untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian kinerja tahunan Kepala Daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) menjadi dasar bagi Organisasi Pemerintah Daerah dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan baik termuat dalam RKPD maupun dalam Renja PD. Indikator kinerja tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang terukur, dapat dicapai, rasional, dan memperhitungkan waktu pencapaian dengan tetap bersumber pada aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7.1. Indikator Makro

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengidikasikan keberhasilan dalam suatu pembangunan yang dibandingkan secara nasional. Berikut ini merupakan target indikator makro yang ingin dicapai oleh Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2024:

Tabel 7.1
Indikator Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RPJMN TAHUN 2024	TARGET RKP TAHUN 2024	TARGET RPD TAHUN 2024	TARGET RKPD TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran Pembangunan						
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	8,90	6,0-6,8	6,0-6,5	6,0-6,5
2	Rasio Gini	Indeks	-	0,363-0,364	0,366-0,375	0,366-0,375
3	Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	7,25	9,50-9,80	10,00-11,00	10,00-11,00
4	T P T (%)	Persen	2,40	2,47-3,19	2,75-3,00	2,75-3,00
5	I P M (Indeks)	Indeks	-	73,02-73,20	73,00-73,30	73,00-73,30
Indikator Pembangunan						
1	Nilai Tukar Petani	Nilai				107-110
2	Nilai Tukar Nelayan	Nilai				105-108

Untuk dapat mencapai target indikator makro Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu dukungan capaian dari Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara. Berikut target indikator makro yang masing-masing Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara pada Tahun 2024:



Tabel 7.2
Target Indikator Makro Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2024

No	Kabupaten /Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM (%)	Rasio Gini	PDRB Per Kapita (Rp Jt)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Buton	5,80	12,26	22,6	67,50	0,260	39,00
2	Muna	5,70	13,12	4,19	70,61	0,290	3,32
3	Konawe	11,61	9,65	3,56	71,74	0,306	34,30
4	Kolaka	5,50	10,65	2,05	74,00	0,380	-
5	Konawe Selatan	5,85	11,08	2,58	69,36	0,370	45,73
6	Bombana	5,50	9,75	2,64	68,73	0,350	60,00
7	Wakatobi	6,00	13,5	2,10	71,85	0,328	44,31
8	Kolaka Utara	5,05	12,23	2,50	70,14	0,295	69,26
9	Buton Utara	5,50	13,50	2,50	69,70	0,340	56,00
10	Konawe Utara	5,91	13,01	3,62	71,48	0,372	62,17
11	Kolaka Timur	5,63	13,10	3,05	67,21	0,3592	-
12	Konawe Kepulauan	5,10	15,55	1,76	67,35	0,370	28,95
13	Muna Barat	5,60	11,76	2,65	67,00	0,370	24,00
14	Buton Tengah	3,40	15,50	2,50	65,30	0,360	1,85
15	Buton Selatan	5,00	12,00	-	68,00	0,300	
16	Kendari	6,00	4,50	5,00	85,50	0,350	74,97
17	Baubau	6,27	6,91	4,95	77,78	0,410	72,09
18	Provinsi Sulawesi Tenggara	6,0-6,5	10,00-11,00	2,75-3,00	73,00-73,30	0,366-0,375	-

7.2. Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama Daerah adalah Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Sasaran Rancangan Pembangunan Daerah (RPD). Penetapan target indikator kinerja utama daerah selanjutnya disajikan dalam 7.2. berikut ini :

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Tenggara

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Persen	10,63
2	Harapan Lama Sekolah	Persen	14,87
3	Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	72,02
4	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Juta Rupiah	10.046
5	Gini Ratio	Nilai	0,336
6	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	86,1
7	Prevalensi Stunting	Persen	16,79
8	Pertumbuhan Pdrb Lap. Usaha Pertanian, Kehutanan, & Perikanan.	Nilai	2,75

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Pertumbuhan Pdrb Lap. Usaha Pertambangan Dan Penggalian	Nilai	1,53
10	Pertumbuhan Pdrb Lap. Usaha Industri Pengolahan	Nilai	5,72
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,12
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Pmtb)	Persen	1,24
13	Indeks Infrastruktur	Persen	90,15
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	77,00
15	Indeks Resiko Bencana	Nilai	157,02
16	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	BB
17	Opini Laporan Keuangan	Nilai	WTP
18	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Kategori	B

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Prov. Sultra 2024-2026

7.3. Indikator Kinerja Kunci Daerah

Indikator Kinerja Kunci Daerah adalah Indikator Kinerja yang dicapai oleh OPD dalam kewajibannya menyelenggarakan urusan pemerintahan. Penetapan target indikator kinerja kunci daerah selanjutnya disajikan dalam 6.4. berikut ini :

Tabel 7.4
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Aspek Pelayanan Umum			
A. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib			
Pelayanan Dasar			
1.	Pendidikan		
1.1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Persen	100
1.2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Persen	100
2.	Kesehatan		
2.1.	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Nilai	1,49
2.2.	Persentase RS rujukan yang terakreditasi	Persen	100
2.3.	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana	Persen	100
2.4.	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi	Persen	100
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
3.1.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	68
3.2.	Rasio kemandapan jalan	persen	87
3.3.	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli.	Orang	60
3.4.	Cakupan perpipaan jaringan air minum	dokumen	2
3.5.	Cakupan penyelenggaraan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi	Sistem jaringan	40
3.6.	Cakupan Bangunan Gedung dan fasilitas umum pemda sesuai standard an kriteria	Unit	197
3.7.	Tersedianya RTR Kab/kota yang mendapat rekom dan dokumen RTR Provinsi yang tersusun	Dokumen	10
4.	Perumahan Rakyat		
4.1.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100
4.2.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	100
4.3.	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 ha yang ditangani	Persen	0,25
4.4.	Persentase Satuan Perumahan yang dilengkapi PSU	Persen	6,5
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
5.1.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100
5.2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	85
6.	Sosial		
6.1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	25
6.2.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	80
6.3.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	50
6.4.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Persen	100
Pelayanan Non Dasar			
1.	Tenaga Kerja		
1.1.	Persentase Kab/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Persen	100
1.2.	Persentase peningkatan tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	17,5
1.3.	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Persen	65
1.4.	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	2,2
1.5.	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Persen	25
1.6.	Persentase perusahaan yang menerapkan norma hukum ketenagakerjaan	Persen	2

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	10
2.2.	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Nilai	2,8
2.3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Nilai	15,51
3.	Pangan		
3.1.	Persentase cadangan pangan	Persen	33
4.	Pertanahan		
4.1.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	98
4.2.	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	95
4.3.	Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota	Persen	90
5.	Lingkungan Hidup		
5.1.	Tingkat keterpenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	100
5.2.	Tingkat kepatuhan terhadap perizinan lingkungan hidup	Persen	80
5.3.	Indeks Kualitas Air	Poin	56,32
5.4.	Indeks Kualitas Air Laut	Poin	85,84
5.5.	Indeks Kualitas Udara	Poin	92,12
5.6.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	74,64
5.7.	Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persen	23
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
6.1.	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	Persen	95
6.2.	Pemanfaatan data kependudukan	Persen	42
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
7.1.	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,62
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
8.1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	Nilai	2,51
8.2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (modern <i>contracepture prevalence rate/mCPR</i>)	Nilai	48,76
8.3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Nilai	23,54
9.	Perhubungan		
9.1.	Rasio konektivitas Provinsi	Persen	47,06
9.2.	V/C Ratio Jalan Provinsi	Persen	38,23
10.	Komunikasi dan Informatika		
10.1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	10
10.2.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	70

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		
11.1.	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	71,6
12.	Penanaman Modal		
12.1.	persentase peningkatan investasi di provinsi	persen	1,24
13.	Kepemudaan dan Olahraga		
13.1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	53
13.2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	63
13.3.	Peningkatan prestasi olahraga	Orang	60
14.	Statistik		
14.1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	50
15.	Persandian		
15.1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	20
16.	Kebudayaan		
16.1.	Terlestarikannya Cagar Budaya (jumlah Cagar Budaya yang terlindungi)	Persen	24
16.2.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Hasil Kesepakatan Rakortek)	Nilai	50,66
17.	Perpustakaan		
17.1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	72,5
17.2.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	77,5
18.	Kearsipan		
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	10
18.2.	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Persen	55
B. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan			
1.	Kelautan Perikanan		
1.1.	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Ribu Ton	670
1.2.	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persen	93
2.	Pariwisata		
2.1.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	1,99
3.	Pertanian		
3.1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun		
	Padi	Ku/ha	41,38
	Jagung	Ku/ha	38,64
	Kedelai	Ku/ha	17,18
	Kacang Tanah	Ku/ha	8,72
	Kacang Hijau	Ku/ha	12,76

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
	Ubi Kayu	Ku/ha	267,67
	Ubi Jalar	Ku/ha	133,57
3.2.	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular :		
	Ai (Unggas)	Persen	2
	Brucellosis dan Helminthiasis (Ternak Potong)	Persen	2
	Rabies (Hewan Peliharaan /anjing)	Persen	5
4.	Kehutanan		
4.1.	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Ha	3000
4.2.	Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi)	Persen	100
4.3.	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	1250
5.	Energi Sumber Daya Mineral		
5.1.	Persentase desa yang teraliri listrik	Persen	100
6.	Perdagangan		
6.1.	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Persen	50
6.2.	Tertib usaha	Persen	80
6.3.	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga-harga barang kebutuhan pokok	Persen	3
7.	Perindustrian		
7.1.	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (kesepakatan hasil rakortek)	Persen	8
7.2.	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB (kesepakatan hasil rakortek)	Persen	8,6
C. Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan			
1.	Urusan Pemerintahan		
1.1.	Sekretariat Daerah		
1.1.1.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	B
1.2.	Sekretariat DPRD		
1.2.1.	Persentase dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan	Persen	100
1.2.2.	Persentase Perda yang ditetapkan	Perda	8
2.	Kuangan		
2.1.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	5
2.2.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak	Predikat (Nilai)	A-
3.	Pengadaan		
3.1.	Persentase jumlah proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0
3.2.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	10,16
3.3.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	65,69

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
4,	Manajemen Keuangan		
4.1.	Revenue Mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	100
5.	Kepegawaian		
5.1.	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	453,92
5.2.	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	7,25
5.3.	Rasio jabatan fungsional berkompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	100
6.	Transparansi dan Partisipasi Publik		
6.1.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>information on resources available to frontline service delivery units</i>)	Persen	50
6.2.	Akses public terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public Access to Fiscal Information</i>)	Persen	50
7.	Pengawasan		
7.1.	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3
7.2.	Marturitas Sistem Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,07

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Prov. Sultra 2024-2026



Bab VIII

Penutup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2024. RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara setelah melalui beberapa tahapan penyusunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penetapan RKPD tersebut menjadi pedoman dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dokumen perencanaan anggaran sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 dan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta prioritas pembangunan nasional. Dalam perumusan permasalahan, isu strategis dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mengakomodir usulan dan saran dari pemangku kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik, Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tingkat Provinsi, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi. Selain itu mengakomodir aspirasi masyarakat melalui Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara yang dimuat dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka pencapaian target-target pembangunan daerah dan nasional sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Gubernur Sulawesi Tenggara,

ALI MAZI